



Peraturan Gubernur Papua Nomor 77 Tahun 2024
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua
Tahun 2025

RKPD

PROVINSI PAPUA

2025

PAPUA 2025:

“Penguatan Modal Dasar
Pembangunan Untuk Papua
Maju dan Berkelanjutan
Berbasis Ekonomi Biru,
Agroindustri dan Ekonomi
Kreatif ”







GUBERNUR PAPUA

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah di susun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

19. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201);
20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan/6

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76.PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus;
30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 9);
32. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN/7

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida atau sebutan lainnya adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, riset dan inovasi daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir tahun 2023.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD tahun 2024-2026.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah;
 - b. rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - c. prioritas pembangunan daerah Tahun 2025;
 - d. rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - e. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024.
- (3) RKPD Provinsi Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah dalam satu (1) tahun anggaran.
- (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (6) Program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan.
- (7) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber pada APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (8) Hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, memperhatikan hasil kesepakatan Rakortekbang tahun 2024.

Pasal 3

- (1) Rancangan akhir RKPD tahun 2025 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi Tahun 2025.
- (2) Rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. surat permohonan fasilitasi dari Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - b. rancangan akhir RKPD tahun 2025;
 - c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD tahun 2025;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPD dan RKPD;
 - f. hasil rewiu aparat pengawasan internal pemerintah Daerah; dan
 - g. daftar isian fasilitasi RKPD tahun 2025.
- (4) Ketentuan mengenai format daftar isian fasilitasi RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penjabaran dari RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPD.
- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan pada RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (4) Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap memperhatikan target kinerja Pemerintah Daerah dan target kinerja perangkat daerah sebagaimana tercantum pada RPD dan Rentsra perangkat Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

- (1) Penetapan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan:
 - a. RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagai penjabaran dari RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Provinsi Tahun 2025;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2025;
 - c. penyusunan rancangan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2025;
 - d. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2025;
 - f. penetapan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2025.
- (3) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kewenangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen.
- (5) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pencapaian nasional dan arah kebijakan pemerintah.

Pasal 6

Penetapan RKPD Tahun 2025 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 13 Juni 2024

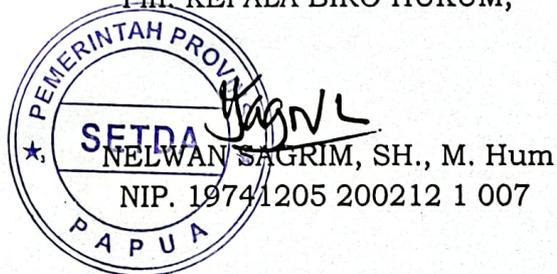
Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 14 Juni 2024

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,





Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan dan karunia-Nya Pemerintah Provinsi Papua dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 ini. Sebagaimana peraturan yang berlaku, dokumen RKPD Tahun 2025 ini tetap memedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024–2026, Dokumen RKP, program-program prioritas dan strategis nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dengan telah selesainya penyusunan RKPD Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik unsur Pemerintah Pusat, para Kepala Perangkat Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen RKPD ini.

Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa dapat memberikan kekuatan bagi kita semua dalam membangun Provinsi Papua demi mewujudkan Visi Provinsi Papua pada RPJPD tahun 2005-2025 yaitu “Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik” sekaligus menjadi dasar bagi RPJPD 2025-2045. Karena itu RKPD Tahun 2025 diberi tema **“Penguatan Modal Dasar Pembangunan Untuk Papua Maju dan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru, Agroindustri dan Ekonomi Kreatif”**.

Jayapura, Juni 2024
Plh Gubernur Papua

Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE., MM.





Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	x
BAB I PENDAHULUAN	1.1
1.1 LATAR BELAKANG	1.1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	1.3
1.3 MAKSUD dan TUJUAN	1.5
1.4 TAHAPAN PENYUSUNAN	1.6
1.5 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	1.9
1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD.....	1.10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II.1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II.1
2.1.1 Aspek Geografi	II.1
2.1.2 Aspek Demografi	II.35
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II.36
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	II.36
2.2.2 Struktur Ekonomi	II.37
2.2.3 Indeks Gini	II.40
2.2.4 Tingkat Kemiskinan dan Daerah Tertinggal	II.40
2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia	II.46
2.2.6 Angka Harapan Hidup	II.48
2.2.7 Harapan Lama Sekolah	II.50
2.2.8 Rata-rata Lama Sekolah.....	II.51
2.2.9 Prevalensi Stunting.....	II.53
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II.54
2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.....	II.54
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	II.71
2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II.102

2.4	ASPEK DAYA SAING	II.107
2.4.1	Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II.107
2.4.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II.110
2.4.3	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	II.112
2.4.4	Daya Saing Iklim Investasi.....	II.114
2.5	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM dan KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN dan REALISASI RPJMD.....	II.117
2.6	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	II.118
2.6.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II.118
2.6.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II.127
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH		III.1
3.1	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH.....	III.2
3.1.1	Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional	III.2
3.1.2	Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah	III.9
3.1.3	Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tahun 2025	III.18
3.2	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III.19
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III.19
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III.22
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III.24
3.2.4	Kebijakan Belanja Daerah yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus.....	III.25
BAB IV .SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....		IV.1
4.1	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	IV.2
4.1.1	Arahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	IV.2
4.1.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV.9
4.2	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	IV.14
4.2.1	Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025.....	IV.14
4.2.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV.18
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH		V.1
5.1	Kerangka Pengembangan Wilayah	V.1
5.2	Arah Pengembangan Wilayah Papua Berbasis Wilayah Adat.....	V.4
5.2.1	Wilayah Adat Tabi.....	V.4
5.2.2	Wilayah Adat Saireri	V.5
5.3	Pengembangan Wilayah Berdasarkan Arahan RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042	V.7
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		VI.1
6.1	Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2025	VI.3
6.2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaannya	VI.10

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VII.1
Indikator Kinerja Utama	VII.1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1
8.1 Kaidah Pelaksanaan	VIII-1
8.2 Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.....	VIII-2
8.2.1 Pemantauan Pelaksanaan RKPD	VIII-2
8.2.2 Pengendalian Pelaksanaan RKPD.....	VIII-4
8.2.3 Evaluasi Saat Pelaksanaan RKPD.....	VIII-5
8.2.4 Evaluasi Pasca Pelaksanaan RKPD	VIII-7





Daftar Tabel

Tabel II.1 Luas Wilayah Provinsi Papua berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023	II.2
Tabel II.2 Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua Tahun 2023	II.3
Tabel II.3 Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Geografi dan Topografi Wilayah di Provinsi Papua Tahun 2014-2021	II.3
Tabel II.4 Kawasan Perkotaan dalam Sistem Pusat Pemukiman	II.5
Tabel II.5 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua	II.10
Tabel II.6 Kelerengan Provinsi Papua	II.11
Tabel II.7 Luas Jenis Tanah di Provinsi Papua	II.13
Tabel II.8 Wilayah Sungai di Provinsi Papua	II.17
Tabel II.9 Cekungan Air Tanah di Provinsi Papua	II.19
Tabel II.10 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Papua Tahun 2020–2023	II.20
Tabel II.11 Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Provinsi Papua Tahun 2023-2042	II.20
Tabel II.12 Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Provinsi Papua Tahun 2023-2042	II.22
Tabel II.13 Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	II.25
Tabel II.14 Nilai Indeks Risiko Per Ancaman Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023	II.26
Tabel II.15 Wilayah dengan Bahaya Gempa Bumi Tinggi	II.29
Tabel II.16 Wilayah dengan Bahaya Bencana Longsor Tinggi	II.30
Tabel II.17 Wilayah dengan Bahaya Bencana Banjir Tinggi	II.31
Tabel II.18 Wilayah dengan Bahaya Tsunami Tinggi	II.32
Tabel II.19 Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2017-2023	II.35
Tabel II.20 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 (Juta Rupiah)	II.37
Tabel II.21 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023	II.38
Tabel II.22 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023	II.38

Tabel II.23 Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023	II.39
Tabel II.24 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota	II.41
Tabel II.25 Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Keteringgalan di Provinsi Papua	II.41
Tabel II.26 Klasifikasi status IDM Tingkat Provinsi, Kabupaten, Distrik dan Kampung Se-Provisi Papua tahun 2023.....	II.42
Tabel II.27 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Papua Tahun Ajaran 2023/2024.....	II.55
Tabel II.28 Angka Kematian Bayi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023	II.57
Tabel II.29 Angka Kematian Ibu Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023	II.58
Tabel II.30 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2023.....	II.58
Tabel II.31 Jumlah Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2022.....	II.59
Tabel II.32 Panjang Jalan Menurut Kewenangant di Provinsi Papua (km).....	II.60
Tabel II.33 Panjang Jalan di Provinsi Papua (km)	II.60
Tabel II.34 Presentase Ketaatan Terhadap Pelaksanaan RTRW Provinsi Papua.....	II.61
Tabel II.35 Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Papua 2016-2022	II.61
Tabel II.36 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Diselesaikan, dan Persentase yang Diselesaikan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022.....	II.63
Tabel II.37 Karakteristik Penduduk Papua Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2019-2022	II.65
Tabel II.38 Capaian IDI Provinsi Papua Berdasarkan Aspek dan Indikator Penyusunnya 2021-2022	II.68
Tabel II.39 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Papua Tahun 2020 (Jiwa).....	II.69
Tabel II.40 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosial Menurut Jenis Jaminan Sosial di Provinsi Papua Tahun 2019-2023	II.70
Tabel II.41 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun Menurut Jenis Kredit di Provinsi Papua Tahun 2019-2023.....	II.71
Tabel II.42 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Papua Tahun 2023.....	II.71
Tabel II.43 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2023	II.72
Tabel II.44 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) – Agustus Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021-2023	II.72
Tabel II.45 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020-2023	II.76
Tabel II.46 Perbandingan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tahun 2019-2023.....	II.77

Tabel II.47 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022	II.77
Tabel II.48 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari di Provinsi Papua Tahun 2019-2023.....	II.79
Tabel II.49 Konsumsi Setara Kedelai (Tahu, Tempe, Kecap) di Provinsi Papua Tahun 2020.....	II.80
Tabel II.50 Konsumsi Setara Kedelai di Provinsi Papua Tahun 2018-2020	II.80
Tabel II.51 Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua.....	II.82
Tabel II.52 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022	II.84
Tabel II.53 Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha).....	II.84
Tabel II.54 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya	II.85
Tabel II.55 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya	II.86
Tabel II.56 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Menurut Tipe Daerah di Provinsi Papua Tahun 2020-2023.....	II.86
Tabel II.57 Persentase Kepemilikan NIK Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020	II.88
Tabel II.58 Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua (Milyar).....	II.89
Tabel II.59 Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (Jiwa).....	II.90
Tabel II.60 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2022 (km/unit).....	II.91
Tabel II.61 Jumlah Penumpang menurut Pelabuhan dan Jenis Pelayaran di Provinsi Papua Tahun 2022-2023.....	II.92
Tabel II.62 Jumlah Kapal dan Arus Barang menurut Pelabuhan di Provinsi Papua Tahun 2022-2023	II.93
Tabel II.63 Jumlah Pesawat dan Penumpang pada Bandar Udara di Provinsi Papua Tahun 2021-2023.....	II.94
Tabel II.64 Jumlah Muatan Barang (Kargo) pada Bandar Udara di Provinsi Papua Tahun 2022-2023	II.94
Tabel II.65 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Unit) (Juta US\$).....	II.95
Tabel II.66 Perkembangan Nilai IPP dan Domain Penyusun IPP Provinsi Papua dan Indonesia	II.97
Tabel II.67 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Provinsi Papua Tahun 2021.....	II.98
Tabel II.68 Perkembangan Warisan Tak Benda Papua	II.99
Tabel II.69 Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di Hotel pada Provinsi Papua.....	II.103
Tabel II.70 Produksi Komoditas Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.....	II.104
Tabel II.71 Produksi Komoditas Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.....	II.105

Tabel II.72 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan	II.105
Tabel II.73 Produksi Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (kWh).....	II.106
Tabel II.74 Jumlah Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2020	II.107
Tabel II.75 PDRB Per Kapita Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	II.108
Tabel II.76 PDRB Per Kapita Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota	II.109
Tabel II.77 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua	II.110
Tabel II.78 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Keberadaan Base Transceiver Station (BTS), Sinyal Telepon Seluler, dan Sinyal Internet Telepon Seluler	II.113
Tabel II.79 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Komunikasi	II.113
Tabel II.80 Tingkat Inflasi Provinsi Papua Tahun 2021-2023	II.115
Tabel II.81 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek di Provinsi Papua, 2016-2020	II.115
Tabel II.82 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek Berdasarkan Metode Baru di Provinsi Papua, 2021-2022	II.116
Tabel II.83 Tingkat Kriminalitas di Provinsi Papua Tahun 2019-2021	II.116
Tabel II.84 Produktivitas Total Daerah Provinsi Papua Tahun 2017-2021.....	II.116
Tabel II.85 Kriteria Penilaian Kinerja Per Urusan Provinsi Papua	II.117
Tabel II.86 Rekapitulasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023	II.117
Tabel II.87 Permasalahan Pokok 1: Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Masih Rendah	II.119
Tabel II.88 Permasalahan Pokok 2: Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Sosial Budaya.....	II.121
Tabel II.89 Permasalahan Pembangunan Sarana Prasarana dan Konektivitas di Provinsi Papua	II.123
Tabel II.90 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Papua Tahun 2018-2022	II.125
Tabel II.91 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II.127
Tabel III.1 Pertumbuhan Ekonomi Global.....	III.2
Tabel III.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023-2025 (% , yoy)	III.3
Tabel III.3 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025	III.7
Tabel III.4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Papua, 2020- 2023 (Persen).....	III.11
Tabel III.5 Distribusi PDRB ADHB menurut Pengeluaran Provinsi Papua, 2020- 2023 (Persen).....	III.12
Tabel III.6 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua 2020-2023 (Persen)	III.13
Tabel III.7 Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua, 2020-2023 (Persen)	III.14
Tabel III.8 Indikator Kemiskinan dan Persentasi Penduduk Miskin di Provinsi Papua, Maret 2020-2023.....	III.16
Tabel III.9 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Papua Tahun 2025.....	III.18
Tabel III.10 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua tahun 2021-2023	III.20

Tabel III.11 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2021-2023	III.21
Tabel III.14 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2021-2023	III.23
Tabel III.17 Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024	III.24
Tabel IV.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV.7
Tabel IV.2 Matriks Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026	IV.11
Tabel IV.3 Sasaran Target Pembangunan Tahun 2025	IV.14
Tabel IV.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah 2023	IV.15
Tabel IV.5 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD 2025 dengan RKP 2025	IV.16
Tabel IV.6 Sinkronisasi Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV.18
Tabel V.1 Pengembangan Sistem Pusat Permukiman dan Kawasan Strategis di Provinsi Papua	V-10
Tabel VI.1 Proyeksi APBD Provinsi Papua Tahun 2025	VI.2
Tabel VI.1 Kerangka Pendanaan APBD Provinsi Papua Tahun 2025	VI.3
Tabel VI.2 Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2025	VI.4
Tabel VI.3 Rekapitulasi Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan Menurut Urusan Provinsi Papua Tahun 2025	VI.10
Tabel VII.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2025	VII.2
Tabel VII.2 Penetapan Indikator Terhadap Capaian	VII.26



Daftar Gambar

Gambar I.1 Jadwal dan Tahapan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS 2024	I.8
Gambar I.2 Keterkaitan RKPD Provinsi Papua Tahun 2025 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya.....	I.9
Gambar II.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua	II.2
Gambar II.2 Peta Wilayah Adat Provinsi Papua.....	II.4
Gambar II.3 Peta Topografi Provinsi Papua.....	II.10
Gambar II.4 Peta Wilayah Sungai Provinsi Papua.....	II.16
Gambar II.5 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Papua	II.18
Gambar II.6 Peta Klimatologi Provinsi Papua	II.19
Gambar II.7 Peta Pola Ruang Perda RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042	II.22
Gambar II.8 Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Papua	II.25
Gambar II.9 Peta Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Papua	II.28
Gambar II.10 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah di Provinsi Papua.....	II.30
Gambar II.11 Peta Rawan Bencana Banjir di Provinsi Papua	II.31
Gambar II.12 Ketaatan Terhadap Pelaksanaan RTRW Provinsi Papua	II.33
Gambar II.13 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2023	II.35
Gambar II.14 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua	II.36
Gambar II.15 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2015-2023.....	II.37
Gambar II.16 Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2007-2023.....	II.40
Gambar II.17 Indikator Penyebab Keteringgalan Wilayah Papua.....	II.42
Gambar II.18 Sebaran 212 Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia.....	II.44
Gambar II.19 Sebaran Penduduk Miskin di Papua (<P18).....	II.44
Gambar II.20 Lokasi Penduduk Miskin di Papua (<P18)	II.45
Gambar II.21 Sebaran Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat Berdasarkan Kesejahteraan serta Penduduk Miskin (P<18) dengan Disabilitas Sedang dan Berat di Provinsi Papua	II.46
Gambar II.22 Persebaran Penduduk Miskin (P<18) dengan Disabilitas Sedang dan Berat di Provinsi Papua.....	II.46
Gambar II.23 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010-2023.....	II.47

Gambar II.24 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Gender dan IPG di Provinsi Papua.....	II.48
Gambar II.25 Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Papua Tahun 2018-2022.....	II.48
Gambar II.26 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2017-2023	II.49
Gambar II.27 Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023	II.49
Gambar II.28 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010-2023 (Tahun).....	II.50
Gambar II.29 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023 (Tahun).....	II.51
Gambar II.30 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023 (Tahun)	II.51
Gambar II.31 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010-2023 (Tahun)	II.52
Gambar II.32 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023 (Tahun).....	II.52
Gambar II.33 Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2023.....	II.53
Gambar II.34 Angka Partisipasi Sekolah per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021.....	II.54
Gambar II.35 Tingkat Pendidikan dan Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan di Papua, 2023.....	II.55
Gambar II.36 Persentase Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat Berdasarkan Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua.....	II.56
Gambar II.37 Sebaran Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat yang Bersekolah di Sekolah Luar Biasa di Provinsi Papua.....	II.57
Gambar II.38 Rasio Dokter Umum per 1.000 Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022.....	II.59
Gambar II.39 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022	II.62
Gambar II.40 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Diselesaikan, dan Persentase yang Diselesaikan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022	II.63
Gambar II.41 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya di Provinsi Papua Tahun 2014-2020	II.65
Gambar II.42 Rasio Penduduk Terhadap Personil Polisi di Provinsi Papua Tahun 2019-2022.....	II.66
Gambar II.43 Jumlah Sarana Keamanan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022.....	II.66
Gambar II.44 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua Tahun 2009-2020	II.67
Gambar II.45 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar Menurut Jenis PIP di Provinsi Papua Tahun 2021.....	II.69
Gambar II.46 Persentase Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) - Agustus di Provinsi Papua Tahun 2022	II.73
Gambar II.47 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023	II.74

Gambar II.48 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Agustus di Provinsi Papua 2023	II.74
Gambar II.49 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023.....	II.75
Gambar II.50 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2018-2023.....	II.75
Gambar II.51 Perbandingan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II.76
Gambar II.52 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Papua Tahun 2019-2023	II.78
Gambar II.53 Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 kkal/Kapita/Hari di Provinsi Papua Tahun 2016-2020.....	II.79
Gambar II.54 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat Berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 (Persen)	II.81
Gambar II.55 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan.....	II.81
Gambar II.56 Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2022.....	II.82
Gambar II.57 Persentase Penerima BPNT dan Bantuan Sembako Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	II.83
Gambar II.58 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya di Papua Tahun 2019-2022	II.85
Gambar II.59 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020.....	II.87
Gambar II.60 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun	II.87
Gambar II.61 Cakupan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Papua 2020-2022.....	II.88
Gambar II.62 Indeks Desa Membangun Provinsi Papua	II.89
Gambar II.63 Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	II.90
Gambar II.64 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga (Orang)	II.90
Gambar II.65 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km/unit).....	II.91
Gambar II.66 Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga di Provinsi Papua Tahun 2015-2019	II.96
Gambar II.67 Jumlah Organisasi Pemberdayaan Pemuda di Provinsi Papua Tahun 2016-2019 (Unit)	II.97
Gambar II.68 Capaian Urusan Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2016-2019.....	II.100
Gambar II.69 Rasio Ketercukupan Jumlah Koleksi Perpustakaan Berdasarkan Kategori Dari IFLA/UNESCO pada 34 Provinsi Di Indonesia Dan Secara Nasional	II.101
Gambar II.70 Persentase Jumlah Koleksi Buku yang Dipinjam Terhadap Keseluruhan Koleksi Buku pada 34 Provinsi di Indonesia dan Secara Nasional.....	II.101
Gambar II.71 Sebaran Perpustakaan Dalam Peta Secara Nasional.....	II.102
Gambar II.72 Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku di Provinsi Papua Tahun 2016.....	II.102

Gambar II.73 Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2016-2021	II.103
Gambar II.74 Komponen Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2017-2021.....	II.104
Gambar II.75 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2018-2023 (Rupiah).....	II.110
Gambar III.1 Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Spasial	III.3
Gambar III.2 Trend Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua dan Nasional 2020- 2023 (Persen)	III.10
Gambar III.3 Trend Pertumbuhan PDRB Papua (% , yoy).....	III.11
Gambar III.4 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Papua, 2020 – 2023 (Persen)	III.15
Gambar III.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua 2021-2023.....	III.17
Gambar III.6 Rasio Gini Provinsi Papua 2020-2023.....	III.17
Gambar IV.1 Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua	IV.5
Gambar IV.2 Tema dan Arah Kebijakan RKP TA 2025.....	IV.6
Gambar IV.3 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV.7
Gambar V.1 Arah Pengembangan Wilayah Adat Tabi	V.5
Gambar V.2 Arah Pengembangan Wilayah Saireri	V.6
Gambar V.3 Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Papua	V.7
Gambar V.4 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Papua Tahun 2023-2042.....	V.8
Gambar V.5 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Papua Tahun 2023-2042	V.9



BAB I

Pendahuluan





BAB I

Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pembahasan bab ini terdiri atas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, metode evaluasi, dan sistematika penulisan RKPD Provinsi Papua 2025

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004 pasal 3 mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Amanat ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di pasal 260 juga mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu dokumen dari perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk mencapai kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen- dokumen perencanaan ini dipedomani oleh Visi Provinsi Papua dalam RPJPD tahun 2005-2025 yaitu **“Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik”** untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan.

Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Papua saat ini berada dalam era baru pelaksanaan otonomi khusus, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Papua. Adanya perubahan Undang-undang ini mengubah proporsi, mekanisme, dan tata kelola keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dana Otonomi Khusus. Perubahan pasal terkait pengelolaan keuangan juga dimaksudkan untuk mendorong sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Wilayah Papua. Hal ini membawa konsekuensi perubahan perencanaan dan penganggaran di Provinsi Papua, secara khusus anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2023 tentang **Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)** tahun 2022-2041, dimana Dokumen RIPPP ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di Wilayah Papua. Selain itu, RIPPP ini juga menjadi dasar pengelolaan Otonomi Khusus guna optimalisasi pembangunan dan mensejajarkan Wilayah Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia. Sehingga RKPD Provinsi Papua tahun 2025 ini juga harus berpedoman kepada dokumen RIPPP selain dokumen perencanaan pembangunan yang telah dipedomani.

RKPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025 juga merupakan RKPD yang sangat strategis, karena merupakan penjabaran tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, sehingga harus memastikan semua rencana pembangunan yang disusun dalam RKPD Tahun 2025 dapat menjamin pencapaian target indikator pembangunan akhir Periode RPD.

RKPD disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu. Adapun perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang kepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Terakhir, untuk pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, penyusunan RKPD 2024 juga diperkuat dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial (HITS) dengan memperhatikan pada beberapa hal yaitu:

- a. Pengendalian perencanaan;
- b. Konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran;
- c. Perencanaan berbasis kewilayahan, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Integrasi sumber pendanaan.

Selanjutnya, untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, penyusunan RKPD 2025 menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Melalui penerapan berbasis IT (Informasi dan Teknologi) tersebut diharapkan RKPD 2025 akan lebih berkualitas, yang dapat memenuhi beberapa kriteria antara lain:

- a. Disusun berdasarkan penjabaran dari RPJMD;
- b. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
- c. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD konsisten dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
- d. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;
- e. Program dan kegiatan dalam RKPD dilengkapi dengan pendanaan yang terukur dan menunjukkan prakiraan maju.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2025 adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan; Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 24) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomo 9);
 - 25) Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

RKPD yang memuat rancangan ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud:

- a. menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025; serta
- b. mewujudkan sinergi rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah:

- a. sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025;
- b. menjadi landasan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),
- c. sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024;
- d. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan.

1.4 TAHAPAN PENYUSUNAN

Untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas tersebut, maka proses penyusunan RKPD 2024 dilaksanakan dalam beberapa tahap, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, meliputi tahapan sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar I.1, yaitu:

a. **Persiapan Penyusunan RKPD:** Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan kepala daerah tentang pembentukantim penyusunan RKPD;
- 2) Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun;
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

b. **Penyusunan Rancangan Awal RKPD:** Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri dari perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD

- 1) Perumusan rancangan awal RKPD: Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:
 - (a) Pengolahan data dan informasi;
 - (b) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - (c) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
 - (d) Evaluasi kinerja tahun lalu;
 - (e) Penelaahan terhadap kebijakan nasional;
 - (f) Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP);
 - (g) Perumusan permasalahan pembangunan;
 - (h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
 - (i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
 - (j) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
 - (k) Pelaksanaan forum konsultasi publik;
 - (l) Penyelerasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
- 2) Penyajian rancangan awal RKPD: Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
 - (a) Pendahuluan;
 - (b) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - (c) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - (d) Prioritas dan sasaran pembangunan;
 - (e) Rencana program prioritas daerah.

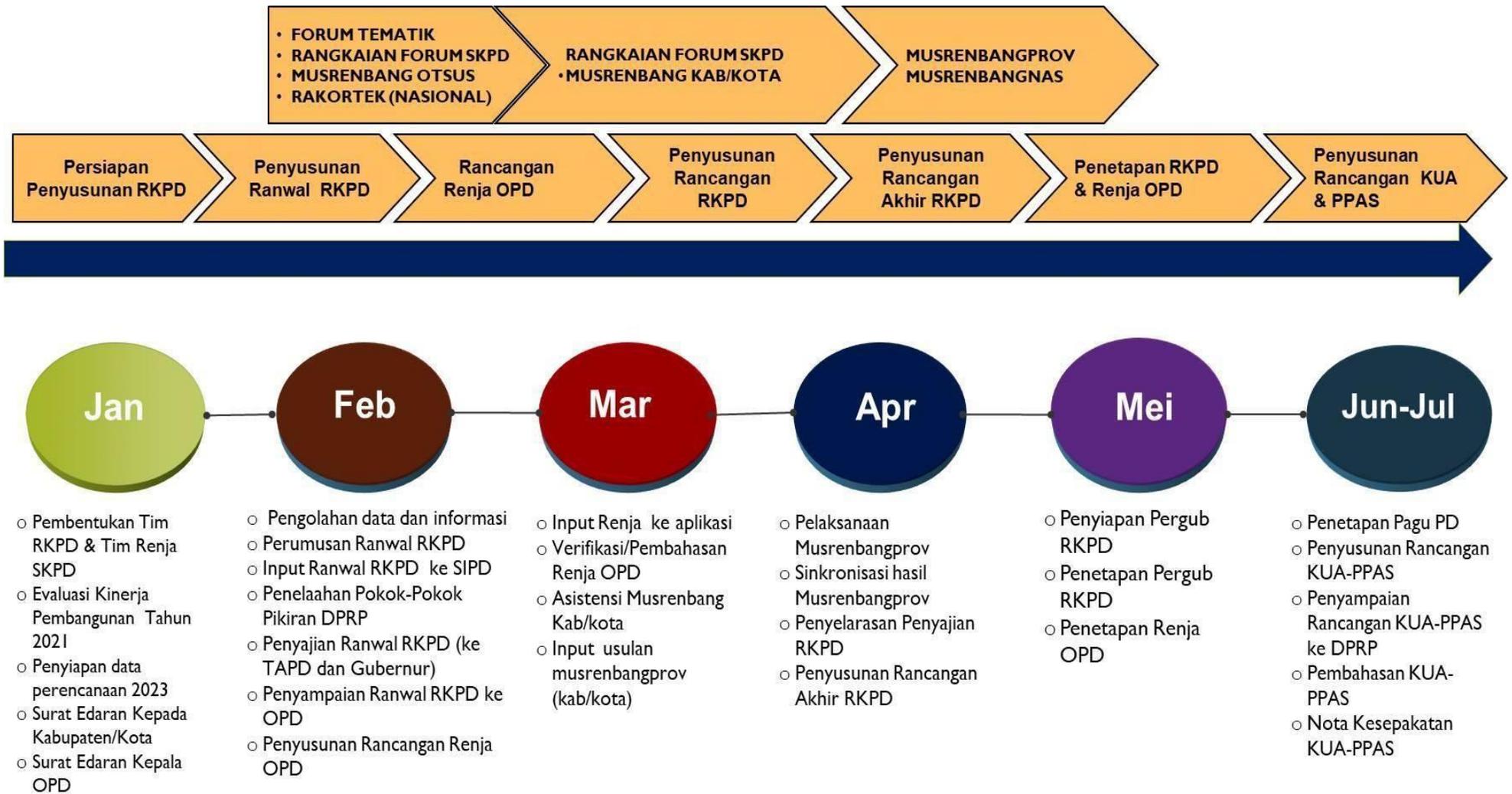
c. **Penyusunan Rancangan RKPD:** Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Papua.

- d. **Pelaksanaan Musrenbang RKPD:** Musrenbang RKPD Provinsi Papua dalam pelaksanaannya dilakukan melalui 2 forum musrenbang yaitu **musrenbang otonomi khusus dan musrenbang RKPD**, dimana musrenbang otonomi khusus akan difokuskan untuk penyiapan pengusulan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus sesuai sasaran dan ketentuan penggunaannya. Sedangkan Musrenbang RKPD akan mengelaborasi hasil musrenbang otsus untuk kewenangan Provinsi yang harus disepakati dalam rancangan RKPD bersama perangkat daerah, Bappeda Provinsi dengan perangkat daerah dan Bappeda kabupaten/kota. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan tersebut mencakup:
- 1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
 - 2) Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah Provinsi maupun melalui musrenbang kabupaten/kota;
 - 3) Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Provinsi Papua
 - 4) Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, serta sinergi semua sumber pendanaan yang dikelola Provinsi Papua;
 - 5) Implementasi pendekatan THIS dalam program prioritas Pembangunan Provinsi Papua (kolaborasi program/kegiatan dan pendanaan lintas sektor);
 - 6) Sinergi dengan RKP.
- e. **Perumusan Rancangan Akhir RKPD:** Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.
- f. **Penetapan RKPD:** RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, agar terjadi keselarasan antara perencanaan nasional dan daerah.

Untuk itu pondasi yang dibangun melalui RKPD 2025 harus lebih baik yang diwujudkan dengan perumusan prioritas daerah yang komprehensif dan holistik, yang dijabarkan secara integratif dan spasial, serta disusun secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Semua ini merupakan rangkaian proses sistematis dan terstruktur yang diimplementasikan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang menjadi inovasi dari penyusunan RKPD Provinsi Papua saat ini, oleh karena hirarkinya semakin bertambah kuat dan terkendali yang akan menjamin dan memastikan terintegrasinya RKPD 2025 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, dan kepentingan seluruh stakeholder pembangunan.

RKPD T.A 2025 dipersiapkan oleh Pejabat Gubernur dan kemungkinan akan menjadi dasar bagi penyusunan dan penetapan APBD yang akan ditetapkan oleh DPRD dan Gubernur yang baru terpilih (menurut agenda di Bulan November 2024). Dengan demikian maka prioritas program Gubernur yang baru perlu diakomodasi setelah penetapan Gubernur terpilih. Selain itu, postur penerimaan Provinsi Papua juga berubah dari tahun sebelumnya sebagai implikasi dari Kebijakan Dana OTSUS yang ditetapkan oleh menteri keuangan (PMK).

Gambar I.1 Jadwal dan Tahapan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS 2024

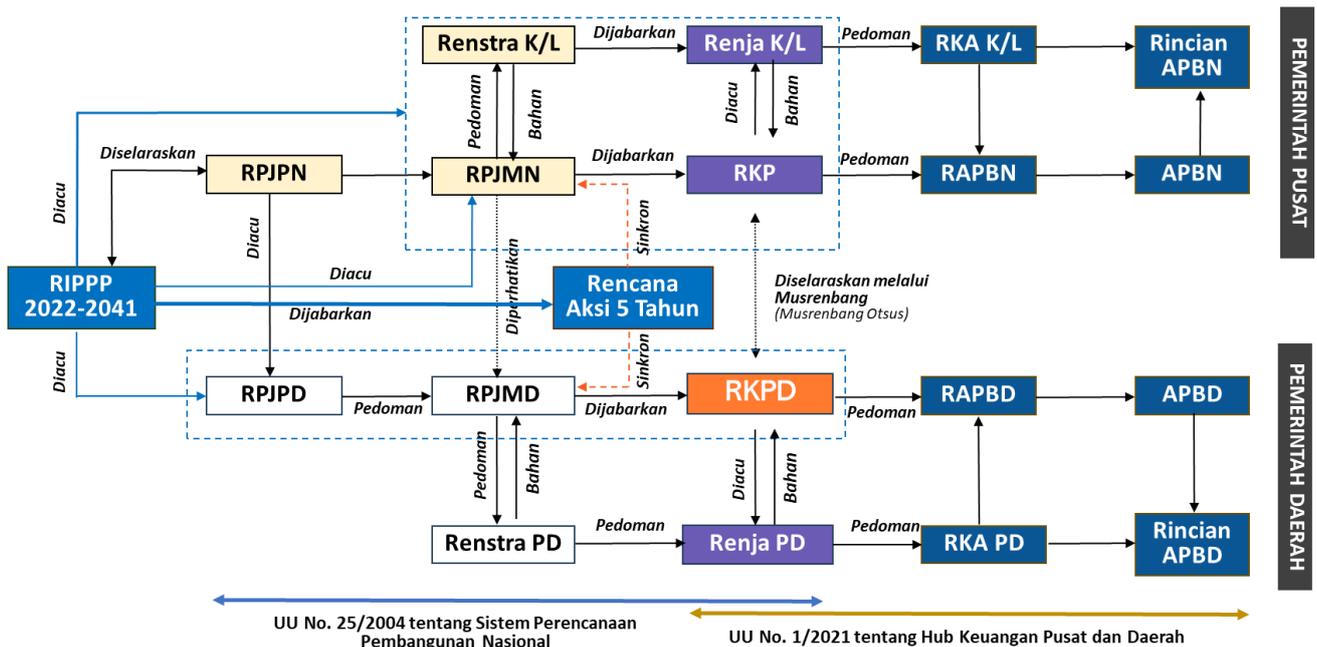


Berdasarkan pengalaman TA 2023 dan TA 2023, kebijakan OTSUS yang baru dan implementasinya mengharuskan provinsi fokus pada urusan yang menjadi kewenangannya, kecuali yang telah disepakati sebagai **Prioritas Program Strategis Bersama yang** disepakati oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Prioritas program OTSUS dalam RKPD 2025 juga merujuk pada RIPP.

1.5 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Provinsi Papua Tahun 2024 selain disusun dengan mempedomani RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 yang merupakan dokumen transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelum terpilih Gubernur yang baru, juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, RPJPD, RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Provinsi Papua Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.

Gambar 1.2 Keterkaitan RKPD Provinsi Papua Tahun 2025 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya



RPD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

RPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD 2025 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar I.2.

Mengacu pada Gambar I.2 tersebut dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah:

- a. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas
- b. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPD,
- c. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja-PD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat bagi OPD dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan program, kegiatan dan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber seperti APBN dan APBD.
- d. program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2025, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Papua tahun 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2025.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2025 ini selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Papua sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika RKPD Provinsi Papua Tahun 2025 ini terdiri atas 8 (delapan) Bab yang saling berkaitan, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pembahasan bab ini terdiri atas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, metode evaluasi, dan sistematika penulisan RKPD Provinsi Papua 2025.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat kondisi umum daerah serta evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD Tahun berjalan sebagai bahan acuan. Pembahasan kondisi umum daerah terdiri atas aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Bab ini memuat arah kebijakan pembangunan wilayah yang perlu diperhatikan Kabupaten/kota dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan agar terjadi sinergitas dalam rangka mendukung capaian pembangunan Provinsi Papua.

BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD 2025, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2025.

BAB VIII Penutup

Bab ini memuat kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2025 yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan daerah Provinsi Papua.



BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah





BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat kondisi umum daerah serta evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD Tahun berjalan sebagai bahan acuan. Pembahasan kondisi umum daerah terdiri atas aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Provinsi Papua kurang lebih 131.582,85 km² yang terdiri atas wilayah darat seluas 82.688,37 km² atau 62,84% yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota dan wilayah laut yang merupakan wilayah sejauh 12 mil dari garis pantai darat ke arah laut sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi seluas kurang lebih 48.894,48 km² atau 37,16% yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota. Secara administrasi wilayah Provinsi Papua berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Samudra Pasifik;
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah;
- c. Sebelah Barat : Provinsi Papua Tengah dan Teluk Cenderawasih; dan
- d. Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea.

Secara administratif Provinsi Papua terdiri atas 9 Kabupaten/Kota (8 Kabupaten dan 1 Kota) dan mempunyai 115 Distrik serta 1.032 Kelurahan/Kampung. Kabupaten/Kota yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Mamberamo Raya yakni seluas

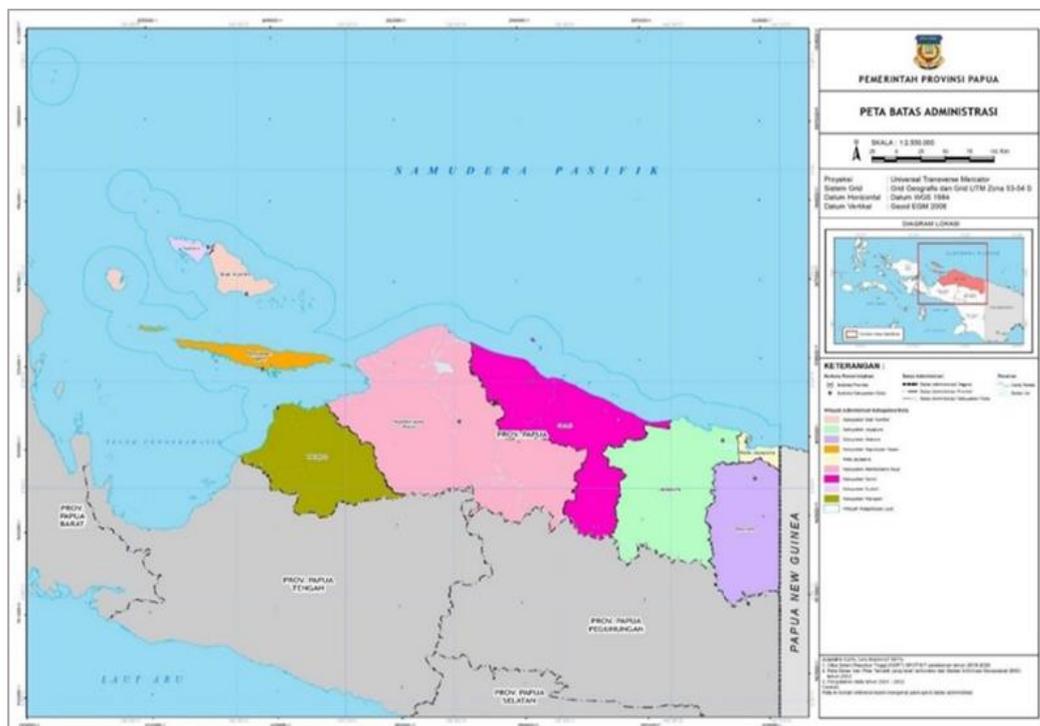
28.043,47 km² atau 33,91 persen dari luas total Provinsi Papua, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kabupaten Supiori yakni 660,69 km² setara 0,80 persen dari luas Provinsi Papua. Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi memiliki distrik terbanyak yaitu 19 distrik. Kabupaten Biak Numfor juga menjadi kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki kampung/kelurahan terbanyak yaitu 268 kampung sedangkan Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura memiliki distrik/kecamatan paling sedikit yaitu 5 kecamatan. Kabupaten Biak Numford memiliki kampung paling terbanyak yaitu 268 kampung Kabupaten Supiori menjadi kabupaten dengan jumlah kampung/kelurahan paling sedikit yaitu berjumlah 38 kampung/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.1. dan Gambar II.1.

Tabel II.1 Luas Wilayah Provinsi Papua berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Jayapura	Sentani	14.082,62	17,03
2	Kepulauan Yapen	Serui	2.428,42	2,94
3	Biak Numfor	Biak	2.260,02	2,73
4	Sarmi	Sarmi	14.069,02	17,01
5	Keerom	Waris	9.526,32	11,52
6	Waropen	Botawa	10.782,13	13,04
7	Supiori	Sorendiweri	660,69	0,80
8	Mamberamo Raya	Burmeso	28.043,47	33,91
9	Kota Jayapura	Jayapura	835,69	1,01
	Provinsi Papua	Kota Jayapura	82.688,37	100,00

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Gambar II.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2043

Tabel II.2 Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kampung/Kelurahan	Jumlah Pulau
1	Kab. Jayapura	19	144	58
2	Kab. Kepulauan Yapen	16	165	142
3	Kab. Biak Numfor	19	268	126
4	Kab. Sarmi	19	111	-
5	Kab. Keerom	11	91	15
6	Kab. Waropen	12	117	1
7	Kab. Supiori	5	38	164
8	Kab. Mamberamo Raya	9	59	2
9	Kota Jayapura	5	39	19
	TOTAL	115	1.032	527

Sumber: BPS, Kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial ST2023, Kondisi 2022 Semester 1 dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Tabel II.3 Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Geografi dan Topografi Wilayah di Provinsi Papua Tahun 2014-2021

Kabupaten	Letak Geografi						Topografi Wilayah								
	Tepi Laut			Bukan Tepi Laut			Lembah			Lereng/Puncak			Dataran		
	2014	2018	2021	2014	2018	2021	2014	2018	2021	2014	2018	2021	2014	2018	2021
Jayapura	24	24	25	120	120	119	30	22	6	23	28	95	91	94	43
Kepulauan Yapen	142	142	115	23	23	50	12	21	2	38	4	130	115	140	33
Sarmi	64	64	59	46	46	52	5	5	2	1	1	39	104	104	70
Keerom	-	-	-	61	91	91	9	13	5	2	4	40	50	74	46
Waropen	39	53	19	41	64	92	17	-	1	-	26	37	63	91	73
Supiori	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	31	38	38	7
Mamberamo Raya	3	3	9	56	56	50	9	9	-	6	6	7	44	44	52
Kota Jayapura	21	22	23	18	17	16	3	3	-	1	2	28	35	34	11
Provinsi Papua	646	662	590	4.225	4.890	4.965	551	644	162	2.452	2.638	3.836	1.868	2.270	1.557

*Catatan : Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan nagari di Provinsi Sumatera Barat, Data citra satelit yang sudah dikonfirmasi oleh aparat desa. Kategori Lereng/Puncak termasuk juga Tebing.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes) dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Wilayah adat mencakup 2 wilayah yang berada di ruang darat dan maupun laut yaitu Wilayah adat Mamta/TABI dan wilayah adat Saireri yang ditunjukkan pada Gambar II.2. Secara budaya, keduanya memiliki otoritas penuh dalam kepemilikan dan penguasaan wilayah adat yang tersebar beberapa kabupaten sebagai berikut:

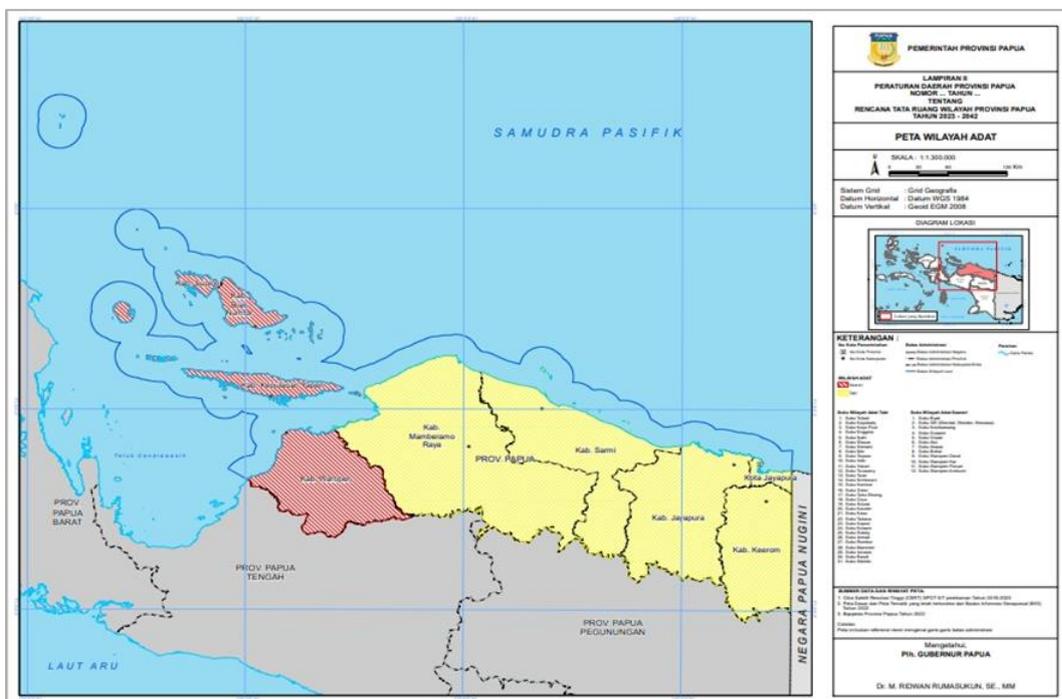
- a. Wilayah Mamta/TABI meliputi:
 - 1) Kota Jayapura,
 - 2) Kabupaten Jayapura,
 - 3) Kabupaten Keerom,
 - 4) Kabupaten Sarmi, dan
 - 5) Kabupaten Mamberamo Raya
- b. Wilayah Saireri meliputi:
 - 1) Kabupaten Biak Numfor,

- 2) Kabupaten Supiori,
- 3) Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
- 4) Kabupaten Waropen.

2.1.1.1.2 Posisi Astronomis

Provinsi Papua secara geografis berada di antara garis koordinat 1° 8' 20.8752" LU - 4° 6' 58.626" LS dan 134° 5' 58.8444" - 141° 0' 37.5912" BT. Wilayah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Papua adalah sejauh 12 mil dari garis pantai darat ke arah laut dengan luas kurang lebih 4.889.447,97 hektar yang terdiri dari 8 kabupaten/kota dan memiliki 517 Pulau. Berdasarkan data BIG tahun 2018, Provinsi Papua memiliki 4 pulau yang terluar yang merupakan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar yaitu Pulau Fanildo, Pulau Brass, Pulau Bepondi di Kabupaten Supiori dan Pulau Liki di Kabupaten Sarmi.

Gambar II.2 Peta Wilayah Adat Provinsi Papua



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

2.1.1.1.3 Kondisi/Kawasan

a. Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang RTRW Provinsi Papua, Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Papua diantaranya meliputi sistem pusat permukiman, yang meliputi PKN, PKW, PKSN dan PKL. Kawasan perkotaan dalam Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel Tabel II.4.

Tabel II.4 Kawasan Perkotaan dalam Sistem Pusat Pemukiman

No	Pusat Kegiatan	Lokasi	Fungsi
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	1. Kota Jayapura 2. Sebagian Kabupaten Jayapura	Melayani Kegiatan Skala Internasional, Nasional atau Beberapa Provinsi.
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Biak di Kabupaten Biak Numfor; 2. Sarmi di Kabupaten Sarmi; 3. Arso di Kabupaten Keerom.	Melayani Kegiatan Skala Provinsi atau Beberapa Kabupaten/Kota.
3	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	1. Jayapura di Kota Jayapura; 2. Biak di Kabupaten Biak Numfor.	Mendorong Pengembangan Kawasan Perbatasan Negera.
4	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura; 2. Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura; 3. Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numfor; 4. Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numfor; 5. Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor; 6. Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom; 7. Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom; 8. Perkotaan Bonggo di Kabupaten Sarmi; 9. Perkotaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen; 10. Perkotaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen; 11. Perkotaan Botawa di Kabupaten Waropen; 12. Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen; 13. Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori; 14. Perkotaan Sorendiwari di Kabupaten Supiori; 15. Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya; dan 16. Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya.	Melayani Kegiatan Skala Kabupaten atau Beberapa Kecamatan.

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

b. Kawasan Pedalaman

Kawasan pedalaman merupakan daerah yang terletak jauh dari pusat-pusat urbanisasi atau daerah yang lebih berkembang. Kawasan ini sering kali memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang membedakannya dari wilayah perkotaan dan semiperkotaan. Secara keseluruhan, kawasan pedalaman memainkan peran penting dalam konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Upaya untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kualitas hidup di daerah ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah

gambaran umum mengenai kondisi kawasan pedalaman di Provinsi Papua dilihat dari berbagai aspek yaitu:

- a. Geografi.
- b. Aksesibilitas.
- c. Infrastruktur
- d. Ekonomi dan Mata Pencaharian
- e. Budaya dan Masyarakat
- f. Lingkungan dan Ekosistem

Secara keseluruhan, kawasan pedalaman Papua adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pembangunan dan peningkatan kualitas hidup, sambil tetap menghargai dan melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan yang ada.

Kawasan pedalaman di Provinsi Papua meliputi Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, sebagian Distrik di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak dan Kabupaten Supiori.

c. Kawasan Terpencil

Kawasan terpencil merupakan kawasan yang terletak jauh dari pusat kegiatan ekonomi, administrasi, dan sosial. Kawasan ini biasanya memiliki akses yang terbatas dan sering kali menghadapi berbagai tantangan terkait dengan infrastruktur, layanan dasar, dan integrasi dengan pusat-pusat utama. Kawasan terpencil di Provinsi Papua menghadapi berbagai tantangan unik yang mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Berikut adalah gambaran kondisi umum di kawasan terpencil di Provinsi Papua dilihat dari berbagai aspek yaitu:

- a. Geografi dan Aksesibilitas
- b. Infrastruktur
- c. Kesehatan
- d. Pendidikan
- e. Ekonomi
- f. Kesejahteraan Sosial
- g. Isolasi Sosial dan Budaya
- h. Konservasi dan Lingkungan
- i. Upaya Pembangunan

Secara keseluruhan, kawasan terpencil di Provinsi Papua menghadapi tantangan yang memerlukan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Upaya yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah-daerah ini. Kawasan terpencil di Provinsi Papua meliputi Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, sebagian distrik di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

d. Kawasan Pesisir

Kawasan pesisir merupakan area di sepanjang garis pantai di mana daratan bertemu dengan lautan, sungai, atau danau besar. Kawasan ini mencakup wilayah yang memiliki

karakteristik khusus dan fungsi ekologis serta sosial yang penting. Kondisi kawasan pesisir di Provinsi Papua sangat beragam dan mencerminkan keunikan geografis serta tantangan yang dihadapi oleh daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara kosisten darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Berikut adalah gambaran umum tentang kondisi kawasan pesisir di Provinsi Papua dilihat dari berbagai aspek yaitu:

- a. Geografi dan Karakteristik
 - 1) Topografi:
 - Pantai dan Delta.
 - Pulau dan Kepulauan.
 - 2) Ekosistem:
 - Hutan Mangrove.
 - Terumbu Karang.
- b. Kondisi Lingkungan
 - 1) Keanekaragaman Hayati:
 - Flora dan Fauna.
 - Kawasan Konservasi.
 - 2) Risiko Lingkungan:
 - Perubahan Iklim.
 - Kerusakan Lingkungan.
- c. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi
 - 1) Mata Pencaharian:
 - Perikanan.
 - Pariwisata.
 - 2) Infrastruktur :
 - Aksesibilitas
 - Layanan Publik.
 - 3) Pembangunan Berkelanjutan:
 - Program Pembangunan.

Kawasan pesisir di Provinsi Papua memiliki keanekaragaman yang luar biasa serta potensi ekonomi dan ekologis yang besar. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan infrastruktur memerlukan perhatian dan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kawasan Pesisir di Provinsi Papua terletak di sepanjang pesisir Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen. Sementara Kawasan pesisir terdapat juga di Kabupaten Kepulauan meliputi Kabupaten Biak Numfor, Supiori dan Kepulauan Yapen.

e. Kawasan Pegunungan

Pegunungan adalah *landform* yang memiliki signifikansi atas perbedaan dibandingkan dengan lapisan tanah sekitarnya, biasanya membentuk seperti puncak dan teksturnya lebih

curam, lebih tinggi, dan lebih menonjol daripada arti perbukitan. Kawasan pegunungan di Provinsi Papua terdapat mulai dari Kota Jayapura sampai dengan Kabupaten Waropen. Terdapat 10 Kawasan Pegunungan di Provinsi Papua yaitu:

- 1) Kawasan Pegunungan Puja di Kabupaten Sarmi
- 2) Kawasan Pegunungan Van Rees di Kabupaten Mamberamo Raya
- 3) Kawasan Pegunungan Van Rees di Kabupaten Mamberamo Raya
- 4) Kawasan Pegunungan Vanres di Kabupaten Mamberamo Raya
- 5) Kawasan Pegunungan Gautier di Kabupaten Sarmi.
- 6) Kawasan Pegunungan Siduari di Kabupaten Sarmi
- 7) Kawasan Pegunungan Foju di Kabupaten Sarmi
- 8) Kawasan Pegunungan Baugenville di Kota Jayapura
- 9) Kawasan Pegunungan Djar di Kota Jayapura
- 10) Kawasan Pegunungan Karamor di Kabupaten Sarmi

Sementara jumlah gunung di Provinsi Papua sebanyak: 383, yang tersebar di 6 Kabupaten dan 1 Kota kecuali Kabupaten Biak dan Kabupaten Supiori.

f. Kawasan Kepulauan

Kawasan kepulauan adalah suatu kumpulan pulau yang berada dalam satu wilayah geografis tertentu. Menurut ahli geografi definisi kawasan kepulauan adalah kumpulan pulau yang sering kali membentuk suatu unit geologis atau ekosistem. Misalnya, kepulauan vulkanik terbentuk dari aktivitas gunung berapi yang menciptakan pulau-pulau baru, sedangkan kepulauan karst terbentuk dari proses pelarutan batuan kapur. Sedangkan menurut ahli ekologi: Kepulauan adalah kumpulan pulau yang dapat memiliki hubungan ekologis satu sama lain, misalnya dalam hal migrasi spesies atau dinamika ekosistem. Dalam konteks ini, kepulauan dapat dianggap sebagai unit ekologi yang penting untuk memahami hubungan antar pulau dan konservasi spesies.

Kepulauan di Provinsi Papua memiliki beberapa karakteristik yang khas, mencerminkan keragaman geografis, biologis, dan budaya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari kepulauan di Provinsi Papua dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut:

- 1) Geografi dan Topografi:
- 2) Keanekaragaman Hayati:
- 3) Kultur dan Etnis:
- 4) Ekonomi dan Infrastruktur:

Kepulauan Papua merupakan wilayah yang sangat beragam dan kompleks, dengan berbagai karakteristik yang mempengaruhi kehidupan dan lingkungan di sana. Keunikan geografis dan budaya menjadikannya salah satu wilayah yang paling menarik untuk dipelajari dan dilestarikan.

Jumlah pulau di Provinsi Papua sejumlah 540 pulau, dengan perincian 512 pulau terletak membentang dari Kabupaten Waropen sampai Kota Jayapura dan dikelilingi oleh lautan termasuk pulau-pulau yang berada di Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori dan Kabupaten

Kepulauan Yapen. Sementara 28 pulau lainnya berada ditengah-tengah Danau Sentani Kabupaten Jayapura.

g. Kawasan Perbatasan

Menurut UU nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Berdasarkan penjelasan atas UU nomor 43 tahun 2008, sisi terluar dari wilayah negara atau wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka dibutuhkan pengaturan khusus untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup sesuai dengan batas-batasnya.

Berikut adalah karakteristik dan aspek-aspek penting dari Kawasan Perbatasan yaitu:

- a. Karakteristik Kawasan Perbatasan
- b. Menurut Soegijoko (1994:154) terdapat 3 (tiga) aspek pokok yang mendasari karakteristik daerah perbatasan yaitu sosial ekonomi, pertahanan keamanan dan politis.
- c. Aspek Kunci dari Kawasan Perbatasan yaitu:
 - 1) Pengaturan Hukum dan Keamanan: Perbatasan sering memerlukan pengawasan untuk menjaga keamanan, penegakan hukum, dan pencegahan pelanggaran.
 - 2) Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur seperti pos perbatasan, jalan, dan jembatan untuk memfasilitasi administrasi dan mobilitas di sepanjang perbatasan.
 - 3) Kerjasama dan Diplomasi: Perbatasan internasional sering kali memerlukan kerjasama antar negara untuk mengelola isu-isu bersama dan menyelesaikan sengketa.
 - 4) Hak dan Kewajiban: Perbatasan menentukan hak dan kewajiban terkait sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, dan tanggung jawab terhadap warga negara.
 - 5) Resolusi Sengketa: Dalam kasus sengketa perbatasan, penyelesaian biasanya melibatkan dialog diplomatik, perjanjian resmi, atau intervensi internasional.

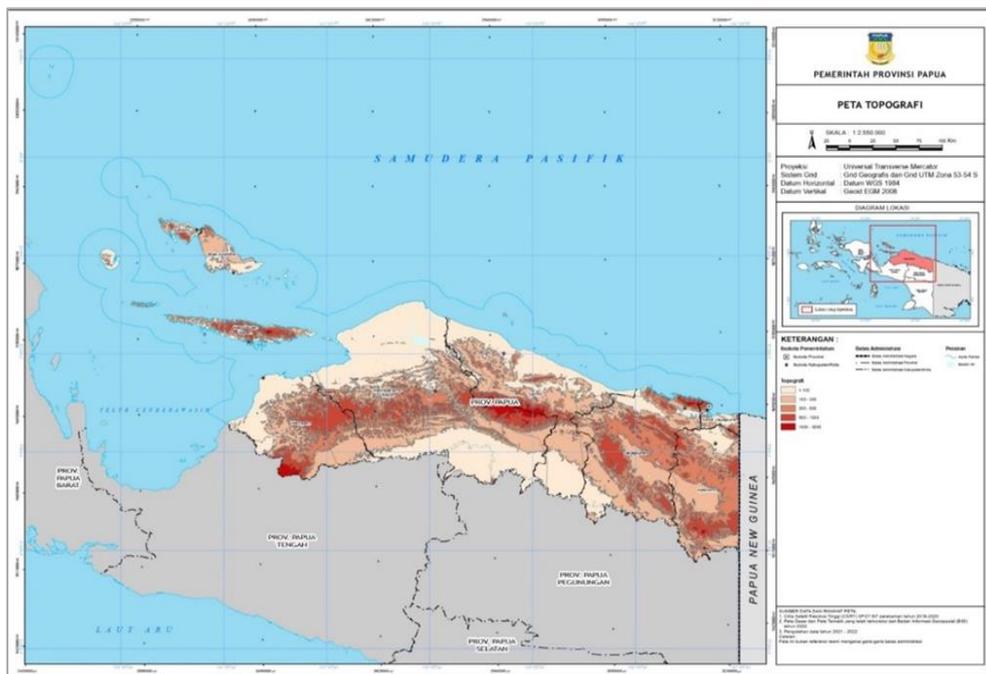
Secara umum, perbatasan memainkan peran penting dalam pengaturan wilayah, pengelolaan sumber daya, dan interaksi antara entitas yang berbeda, baik dalam konteks negara, administrasi, maupun sosial.

Terdapat 1 Kota yaitu Kota Jayapura dan 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Keerom dan Kabupaten Supiori yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom berbatasan darat dengan Negara Papua Nugini. Terdapat 3 (tiga) titik pelintasan utama di daerah perbatasan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini yaitu PLBN Skouw di Kota Jayapura dan 2 (dua) titik lagi di Kabupaten Keerom yaitu di Distrik Arso Timur dan Distrik Waris. Untuk Distrik Arso Timur belum ada PLBNnya, sementara untuk Distrik Waris rencana tahun depan (2025) akan dibangun PLBN tipe C. Sementara Kabupaten Supiori berbatasan laut dengan Negara Palau.

2.1.1.2 Topografi

Topografi dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah morfologi, ketinggian, dan kelerengan. Provinsi Papua didominasi oleh dataran (39,20%) yang berada di bagian pesisir selatan (terluas) dan pesisir utara, dan pegunungan (60,79%) yang berada di bagian tengah wilayah provinsi. Morfologi dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 100 m menjadi bagian terluas yaitu sebesar 5.027.142,57 ha (53,3%). Sedangkan ketinggian lebih dari 1000 m dari permukaan laut menjadi bagian tersempit dengan luas sebesar 3.241.694.74 ha (39,20%). Berikut peta topografi yang dapat dilihat pada Gambar II.3.

Gambar II.3 Peta Topografi Provinsi Papua



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Ketinggian di wilayah Provinsi Papua cenderung memiliki elevasi yang beragam, yaitu 0-100 mdpl, 100-3000 mdpl, dan >3000 mdpl. Wilayah dengan elevasi 0-100 mdpl memiliki luas sebesar 3.241.694.74 ha, elevasi 100-3000 mdpl sebesar 5.025.909 ha, dan elevasi >3000 mdpl sebesar 1.233,57 ha. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan wilayah terluas yang memiliki elevasi 0-100 mdpl dan 100-3000 mdpl dengan luas masing-masingnya adalah 1.360.180,62 ha dan 1.444.166,45 ha. Sementara Kabupaten Keerom menjadi kabupaten dengan wilayah elevasi >3000 mdpl terluas yaitu seluas 1.233,57 ha. Tingkat elevasi kabupaten/kota di Provinsi Papua ditunjukkan melalui Tabel II.5.

Tabel II.5 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua

Elevasi (Mdpl)	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
0-100	Mamberamo Raya	1,360,180.62
	Sarmi	626,262.05

Elevasi (Mdpl)	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
	Waropen	746,554.32
	Jayapura	185,319.99
	Biak Numfor	116,564.00
	Keerom	75,299.98
	Kepulauan Yapen	69,214.21
	Supiori	25,702.05
	Kota Jayapura	36,597.52
0-100 Total		3.241.694.74
100-3000	Jayapura	1,222,941.63
	Mamberamo Raya	1,444,166.45
	Keerom	876,097.99
	Sarmi	780,639.91
	Waropen	331,658.57
	Kepulauan Yapen	173,628.00
	Biak Numfor	109,437.70
	Kota Jayapura	46,971.47
Elevasi (mdpl)		
	Kabupaten	Area (ha)
	Supiori	40,367.28
100-3000 Total		5.025.909
>3000	Keerom	1,233.57
>3000 Total		1,233.57
Grand Total		8.268.837.32

Sumber: Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

Tingkat kemiringan lereng seperti yang ditunjukkan pada Tabel II.5, diklasifikasikan dalam beberapa rentang, yaitu 0-8%, 15-25%, 25-45%, dan > 45%. Kemiringan lereng 0-8 % seluas 3.849.082,03 ha, 8-15% seluas 1.034.503,65 ha, 15-25% seluas 1.531.173,89 ha, 25-45% seluas 1.013.710,94 ha, dan >45% seluas 134.759,41 ha. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan kemiringan lereng 0-8% dan 15-25% terluas dengan masing-masing luasnya sebesar 1.517.691,61 ha dan 484.150,73 ha. Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dengan kemiringan lereng 8-15% terluas sebesar 360.181,45 ha, diikuti Kabupaten Sarmi dengan kemiringan lereng >45% terluas sebesar 57.217,56 ha. Tingkat kemiringan lereng yang mendominasi di wilayah Provinsi Papua adalah landai (0-8%) dengan persentase sebesar 45,9% dan sangat terjal (>40%) sebesar 43,3%.

Tabel II.6 Kelerengan Provinsi Papua

No	Kemiringan Lereng	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
1	0-8 %	Mamberamo Raya	1,517,691.61
		Sarmi	786,828.96
		Jayapura	550,385.44
		Keerom	433,272.53
		Waropen	516,193.64
		Biak Numfor	186,892.61

No	Kemiringan Lereng	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
		Kepulauan Yapen	38,772.07
		Supiori	19,971.85
		Kota Jayapura	56,722.06
Total 0 – 8 %			4,106,730.77
2	8-15%	Jayapura	295,881.08
		Mamberamo Raya	478,660.73
		Sarmi	191,828.18
		Keerom	179,566.75
		Waropen	257,370.93
		Kepulauan Yapen	26,625.90
		Biak Numfor	18,831.22
		Supiori	13,209.59
		Kota Jayapura	13,741.82
Total 8–15 %			1,475,716.20
3	15-25%	Mamberamo Raya	484,150.73
		Jayapura	350,131.45
		Sarmi	215,357.06
		Keerom	194,529.88
		Waropen	200,660.97
		Kepulauan Yapen	60,503.87
		Supiori	19,902.39
		Biak Numfor	12,683.64
		Kota Jayapura	17,129.85
Total 15-25%			1,555,049.84
4	25-45%	Mamberamo Raya	310,648.06
		Jayapura	188,532.54
		Sarmi	155,670.20
		Keerom	129,997.55
		Waropen	101,890.17
		Kepulauan Yapen	96,899.04
		Supiori	11,410.49
		Biak Numfor	6,625.39
		Kota Jayapura	12,037.50
Total 25-45%			1,013,710.94
5	>45%	Sarmi	47,217.56
		Jayapura	16,331.11
		Kepulauan Yapen	19,911.49
		Keerom	15,264.83
		Mamberamo Raya	13,195.94
		Waropen	2,097.18
		Supiori	1,575.01
		Biak Numfor	968.84
		Kota Jayapura	1,067.61
>45% Total			117,629.57
Grand Total			8,268,837.32

Sumber: Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

2.1.1.3 Jenis Tanah

Beberapa jenis tanah di Provinsi Papua di antaranya adalah jenis tanah entisol, inceptisol, mollisol, histosol, dan ultisol. Luas jenis tanah yang ada di Provinsi Papua ditunjukkan pada Tabel II.7.

Tabel II.7 Luas Jenis Tanah di Provinsi Papua

Jenis Tanah	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
Entisols	Kabupaten Sarmi	95.060,48
	Kabupaten Mamberamo Raya	57.806,27
	Kabupaten Waropen	48.955,23
	Kabupaten Jayapura	45.312,74
	Kota Jayapura	34.151,52
	Kabupaten Keerom	31.502,84
	Kabupaten Supiori	9.428,63
	Entisols Total	322.217,71
Inceptisols	Kabupaten Mamberamo Raya	1.477.352,81
	Kabupaten Sarmi	913.496,30
	Kabupaten Jayapura	620.843,28
	Kabupaten Waropen	166.698,33
	Kabupaten Keerom	98.038,18
	Kabupaten Kepulauan Yapen	26.293,22
	Kota Jayapura	17.811,94
	Kabupaten Supiori	6.316,86
Inceptisols Total	3.326.850,92	
Mollisols	Kabupaten Biak Numfor	163.713,81
	Kabupaten Jayapura	57.414,34
	Kabupaten Kepulauan Yapen	9.020,44
	Kabupaten Supiori	834,76
	Kabupaten Sarmi	310,87
Mollisols Total	231.294,22	
Histosols	Kabupaten Mamberamo Raya	597.148,74
	Kabupaten Waropen	128.925,63
	Kabupaten Sarmi	29.634,57
	Kabupaten Keerom	3.690,51
	Kabupaten Biak Numfor	959,97
	Kabupaten Kepulauan Yapen	957,40
	Kota Jayapura	891,31
	Kabupaten Supiori	448,21
	Kabupaten Jayapura	211,33
Histosols Total	762.867,67	
Ultisols	Kabupaten Keerom	795.344,59
	Kabupaten Jayapura	702.901,07
	Kabupaten Mamberamo Raya	359.557,57
	Kabupaten Sarmi	356.243,64
	Kabupaten Waropen	238.450,11
	Kabupaten Kepulauan Yapen	204.626,59
	Kabupaten Biak Numfor	60.764,33

Jenis Tanah	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
	Kabupaten Supiori	50.073,73
	Kota Jayapura	57,38
Ultisols Total		2.768.019,01
Tidak Ada Data	Kota Jayapura	8.428,14
	Kabupaten Sarmi	2.345,23
	Kabupaten Waropen	294,52
	Kabupaten Supiori	3,96
	Kabupaten Biak Numfor	0,40
	Kabupaten Jayapura	0,12
Tidak Ada Data Total		11.072,37
Tubuh Air	Kabupaten Mamberamo Raya	71.983,24
	Kota Jayapura	21.692,73
	Kabupaten Sarmi	13.701,46
	Kabupaten Keerom	13.341,30
	Kabupaten Waropen	3.463,13
	Kabupaten Kepulauan Yapen	83,22
	Kabupaten Biak Numfor	14,21
Tubuh Air Total		124.279,29
Grand Total		7.546.601,19

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Adapun jenis-jenis tanah di Provinsi Papua terbagi dalam lima jenis yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Entisol

Jenis tanah yang berkembang dari bahan asal atau bahan induknya dan pembentukannya terjadi oleh beberapa akibat seperti iklim yang sangat kering sehingga reaksi kimia dan pelapukan terjadi sangat lambat, erosi kuat sehingga bahan yang tererosi lebih banyak dari yang terbentuk, pengendapan terus-menerus, dan jenuh air yang menghambat perkembangan horison. Tanah entisol cocok untuk pertanian khususnya di daerah endapan sungai. Provinsi Papua memiliki jenis tanah entisol seluas 322.217,71 ha yang dapat ditemukan di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori.

b. Inceptisol

Jenis tanah yang belum matang dan masih menyerupai bahan induknya. Tanah inceptisol digunakan secara bergaam untuk pertanian maupun non pertanian. Wilayah di Provinsi Papua dengan tanah inceptisol memiliki luas 3.326.850292 ha yang berada di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, dan Kabupaten Supiori.

c. Mollisol

Jenis tanah yang terbentuk dari proses pembentukan tanah berwarna gelap karena penambahan bahan organik. Tanah mollisol sebagian besar digunakan untuk pertanian.

Wilayah di Provinsi Papua dengan tanah mollisol memiliki luas 231.294,22 ha yang berada pada beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Sarmi.

d. Histosol

Jenis tanah yang terbentuk akibat penimbunan bahan organik yang lebih besar dari mineralisasinya dan terbentuk pada tempat yang tergenang air sehingga sirkulasi oksigen terhambat dan terjadi akumulasi bahan organik. Agar dapat digunakan untuk usaha pertanian, perbaikan drainase perlu dilakukan bagi tanah histosol. Tanah histosol dapat digunakan untuk bertanam sayur, bawang merah, padi, dan sebagainya. Wilayah di Provinsi Papua memiliki tanah histosol seluas 762.867,67 ha yang berada Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Jayapura.

a. Ultisol

Jenis tanah yang sudah berkembang dan memiliki horison argilik, bersifat masam dan kejenuhan basa rendah (<35%). Penggunaan tanah ini sedikit memiliki kendala karena reaksi masam, kejenuhan basa rendah, kadar aluminium tinggi yang dapat meracuni tanaman, unsur hara rendah, dan fiksasi fosfor yang tinggi. Wilayah di Provinsi Papua memiliki jenis tanah ultisol seluas 2.768.019,01 ha yang berada di hampir seluruh wilayah Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Jayapura.

2.1.1.4 Stratigrafi

Provinsi Papua secara garis besar dibedakan dalam 3 kelompok stratigrafi, yaitu batuan Kraton Australia, batuan Lempeng Pasifik, dan batuan campuran dari kedua lempeng tersebut. Batuan Kraton Australia tersusun dari batuan alas, batuan malihan dengan derajat rendah hingga tinggi, dan sebagiannya diintrusi oleh batuan granit di sebelah barat.

2.1.1.5 Tektonik

Terdapat 2 mandala struktur geologi terpenting di Provinsi Papua berdasarkan peristiwa tektonik regional, di antaranya:

a. Jalur Sesar Naik Pegunungan Tengah (JSNPT)

Berada pada daerah Pegunungan Tengah Papua, jalur sesar sungkup berarah timur barat dan memiliki panjang 100 km. Batu gamping New Guinea menjadi satuan litologi yang paling dominan di JNSPT dengan ketebalan 2000 m. Bentuk daerah JNSPT termodifikasi pada awal Pliosen diduga terbentuk dari penebalan batuan kerak. Perkembangan kerak yang bergerak ke arah utara membentuk Sesar Sungkup Mamberamo (*The Mamberamo Thrust Belt*) dan menjadi awal tempat Gautier (*The Gautier off set*).

b. Jalur Sesar Naik Mamberamo

Terdapat dari sesar anjak dan sesar geser (*shear*) serta memanjang 100 km ke arah selatan sehingga menggeser sedikit-demi sedikit batuan Plio–Pleistosen Formasi–Mamberamo dan batuan kerak Pasifik yang berada di bawahnya.

2.1.1.6 Hidrologi

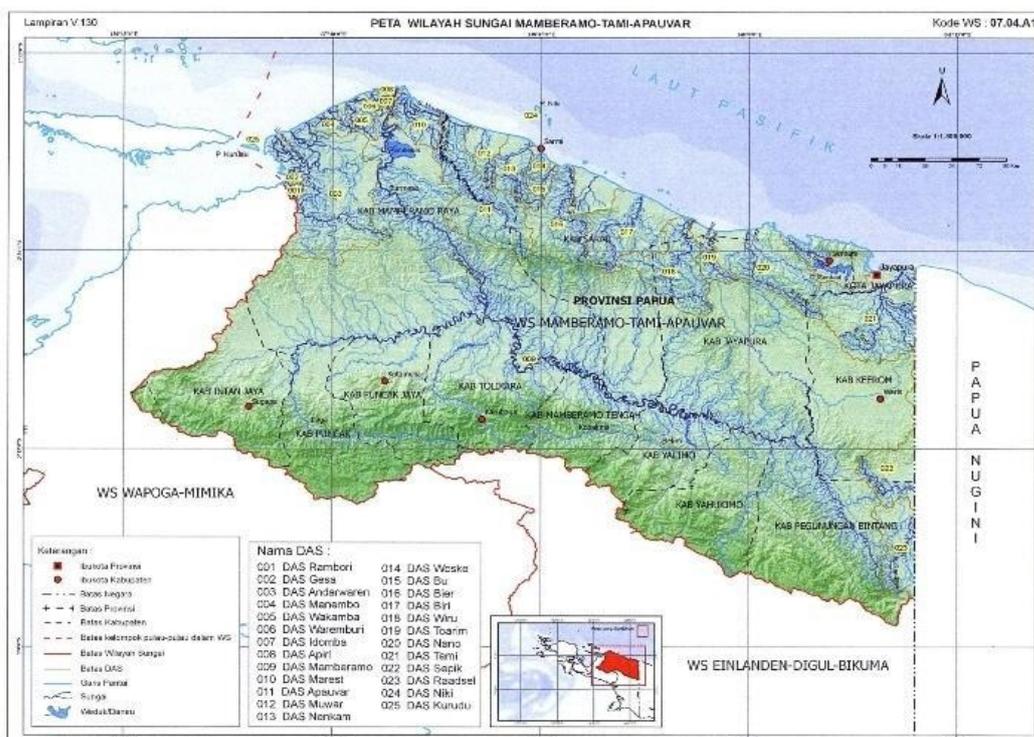
Hidrologi berkaitan dengan karakteristik kuantitas dan kualitas air di bumi menurut waktu dan ruang. Hidrologi dapat terbentuk oleh proses hidrologi, pergerakan, penyebaran, sirkulasi tampungan, eksplorasi, pengembangan dan manajemen, Kondisi Hidrologi di Provinsi Papua dapat dilihat dari banyaknya sungai yang ada. Banyaknya daerah aliran sungai yang ada ditunjukkan pada Gambar II.4. Provinsi Papua dilalui oleh wilayah sungai Mamberamo-Tami-Apauvar.

Terdapat 2 sungai besar yang melintasi beberapa kabupaten di Provinsi Papua meliputi:

1. Sungai Mamberamo-Tami-Apauvar melintasi Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mamberamo Raya; dan
2. Sungai Wapoga-Mimika melintasi Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen.

Adapun Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Papua terbagi dalam wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai lintas kabupaten yang dikelompokkan berdasarkan kewenangan wilayah sungai, kabupaten, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dijabarkan pada Tabel II.8 dan Gambar II.5.

Gambar II.4 Peta Wilayah Sungai Provinsi Papua



Sumber : Balai Wilayah Sungai Papua, Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR

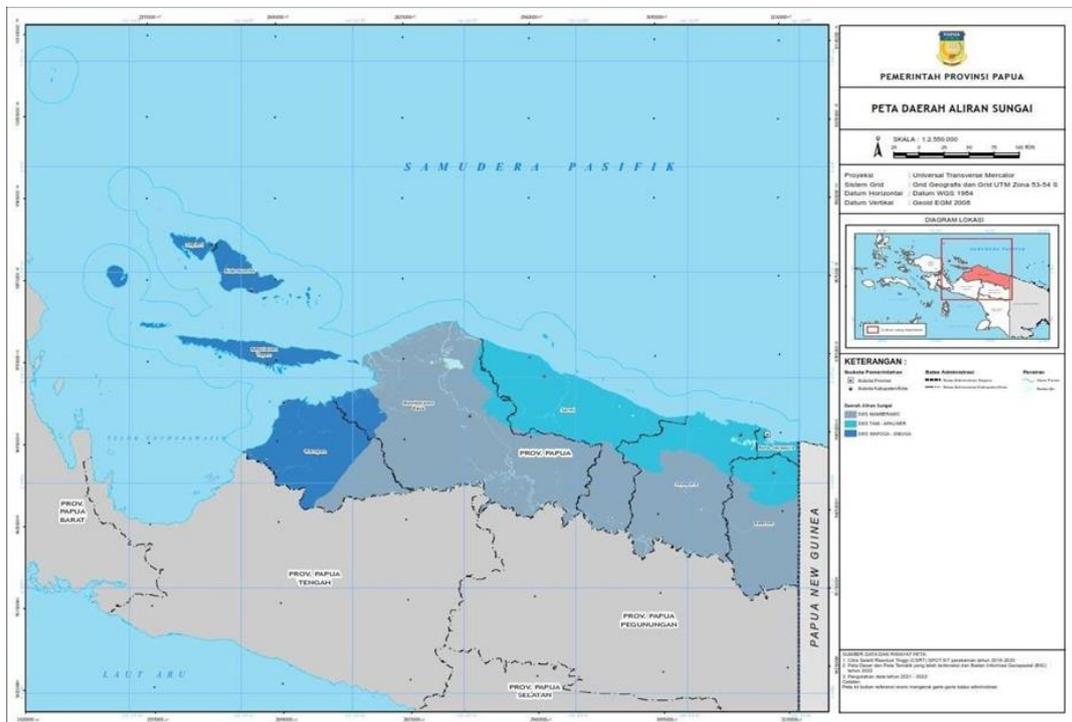
Tabel II.8 Wilayah Sungai di Provinsi Papua

No.	Kewenangan Wilayah Sungai	Kabupaten	DAS
Wilayah Sungai Lintas Negara			
A	WS MamberamoTami-Apauva	1) Kabupaten Keerom	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Tami (Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kota Jayapura) • DAS Sepik (Kab. Keerom dan Pegunungan Bintang)
		2) Kabupaten Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Wiru (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura) • DAS Toarim (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura) • DAS Nano (Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Keerom) • DAS Sentani (Kab. Jayapura dan Kota Jayapura)
		3) Kabupaten Sarmi	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Muwar (Kab. Sarmi dan Mamberamo Raya) • DAS Nenkam • DAS Woske • DAS Bu • DAS Bier • DAS Biri (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura) • DAS Niki • DAS Orai
		4) Kabupaten Mamberamo Raya	DAS Rambori DAS Gesa DAS Andarwaren DAS Manembo DAS Wakamba DAS Waremburi DAS Idomba DAS Apiri DAS Mamberamo (Kab. Mamberamo Raya, Keerom, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Kab. Jayapura, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mamberamo Tengah) DAS Marest DAS Apauvar DAS Kurudu
Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota			
A	WS Wapoga-Mimika	1) Kabupaten Supiori	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Bepondi • DAS Rusdori • DAS Wafordori • DAS Waradokdo
		2) Kabupaten Biak Numfor	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Surdori • DAS Sarwodari • DAS Korem • DAS Wardo • DAS Owi • DAS Auki • DAS Pai • DAS Padaidori • DAS Bromsi • DAS Numfor
		3) Kabupaten Mamberamo Raya	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Sorabi • DAS Bariworo • DAS Barapasi • DAS Naduboai • DAS Rawiwa • DAS Wankai • DAS Sosoro

No.	Kewenangan Wilayah Sungai	Kabupaten	DAS
		4) Kabupaten Waropen	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Waron • DAS Wanasanu • DAS Boi • DAS Binatanaboa • DAS Sanoringga • DAS Sabia • DAS Rombak • DAS Rondisi • DAS Dambo • DAS Seram
		5) Kabupaten Kepulauan Yapen	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Wadapi • DAS Menawi • DAS Borai • DAS Amboi • DAS Mariadey • DAS Warui • DAS Pamawari • DAS Sumbu • DAS Koanda • DAS Sasawa • DAS Parida • DAS Papuma • DAS Ansus • DAS Marau • DAS Antunai • DAS Jauri • DAS Aibondeni • DAS Kairawi • DAS Wooi

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023 - 2042

Gambar II.5 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Papua



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023 - 2042

Cekungan air tanah (CAT) di Provinsi Papua dibagi berdasarkan 2 kewenangan yaitu CAT dalam wilayah provinsi dan CAT lintas negara. CAT dalam wilayah Provinsi Papua meliputi CAT Numfor, CAT Warsa, CAT Biak, CAT Pom, CAT Ansar, CAT Serui, CAT Samberdada, CAT Waren-Demta, CAT Taritatu, Cat Hulu S. Senggi, CAT Timur Arso, CAT Lereh-Leweh dan CAT Ubrub. CAT di Provinsi Papua ditunjukkan pada Tabel II.8.

Tabel II.9 Cekungan Air Tanah di Provinsi Papua

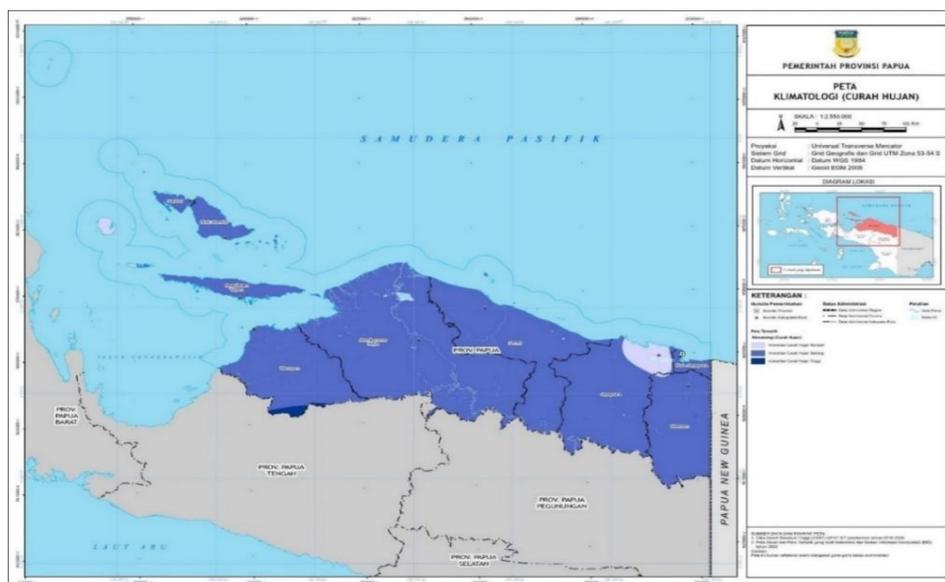
No	Kewenangan	Cekungan Air Tanah
1	CAT dalam wilayah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. CAT Pom di Kabupaten Yapen Waropen b. CAT Ansar di Kabupaten Yapen Waropen c. CAT Serui di Kabupaten Yapen Waropen d. CAT Samberdada di Kabupaten Kepulauan Yapen e. CAT Waren-Demta di Kab. Nabire, Waropen, Sarmi, Jayapura f. CAT Taritatu di Kab. Waropen, Sarmi, Jayapura, Keerom g. Cat Hulu S. Senggi di Kabupaten Keerom h. CAT Timur Arso di Kabupaten Keerom i. CAT Lereh-Leweh di Kabupaten Keerom dan Jayapura j. CAT Ubrub di Kabupaten Keerom
2	CAT lintas negara	CAT Jayapura di Kabupaten Jayapura dan Keerom

Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

2.1.1.7 Klimatologi

Klimatologi merupakan salah satu hal terpenting dalam melihat perubahan iklim selama beberapa tahun terakhir. Perubahan iklim menjadi salah satu isu internasional untuk menjaga lingkungan. Klimatologi berkaitan akan dampaknya bagi kelangsungan hidup penduduk dilihat dari perubahan iklim yang terjadi serta pola dan perilaku suatu penduduk. Klimatologi dilihat dari rata-rata temperatur, kelembaban, curah hujan, angin, dan tekanan atmosfer. Peta klimatologi di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar II.6.

Gambar II.6 Peta Klimatologi Provinsi Papua



Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua

Hasil catatan pengamatan BMKG yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Sentani dalam mengamati unsur iklim sebagai komponen data klimatologi ditunjukkan pada Berdasarkan data tahun 2021-2023, diketahui bahwa rata-rata suhu dan tekanan udara tertinggi terjadi pada tahun 2021, untuk kelembaban tertinggi pada tahun 2023 sedangkan kecepatan angin pada tahun 2021.

Tabel II.10 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Papua Tahun 2020–2023

Unsur Iklim	2021			2022			2023		
	Min.	Rata-Rata	Maks.	Min.	Rata-Rata	Maks.	Min.	Rata-Rata	Maks.
Suhu (°C)	21,30	27,50	36,60	22,60	27,03	35,00	21,80	27,07	33,28
Kelembaban (%)	38,00	75,80	96,00	45,00	77,74	93,00	56,14	83,57	98,19
Kecepatan Angin (m/det)	calm	3,50	31,00	-	4,06	24,00	-	3,19	15,11
Tekanan Udara(mb)	988,50	998,70	1.012,90	991,20	997,04	1.002,60	985,22	990,02	994,54
Jumlah Curah Hujan (mm)	2.028,30			217,40			209,10		
Jumlah Hari Hujan (hari)	221,00			25,00			20,11		
Penyinaran Matahari (%)	5,20			2,45			5,01		

*Catatan: Calm adalah kecepatan angin mendekati nol

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam Provinsi Papua dalam Angka 2022-2024

2.1.1.8 Penggunaan Lahan

A. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 luas Kawasan budidaya 8.884.607,79 Ha atau sekitar 69,75 % yang di dalam kawasan budidaya termasuk luas wilayah laut 4.101.800,35 ha yang merupakan Kawasan perikanan dalam Pola Ruang.

Tabel II.11 Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Provinsi Papua Tahun 2023-2042

No	Jenis Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Hutan Produksi	3,272,076.39	25.69
2	Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pariwisata	562.10	0.00
3	Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perikanan	2,050.92	0.02
4	Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perkebunan Rakyat	124,653.13	0.98

No	Jenis Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya	Luas (ha)	Persentase (%)
5	Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman	33,342.84	0.26
6	Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian	643,434.71	5.05
7	Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Peruntukan Industri	68.18	0.00
8	Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Transportasi	84.31	0.00
9	Kawasan Konservasi/Kawasan Permukiman	1,399.08	0.01
10	Kawasan Konservasi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan	29.88	0.00
11	Kawasan Konservasi/Kawasan Pertanian	1,138.08	0.01
12	Kawasan Konservasi/Kawasan Transportasi	235.71	0.00
13	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan	78,68	0,00
14	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Permukiman	653,72	0,01
15	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertahanan dan Keamanan	235,47	0,00
16	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian	17,805,24	0,14
17	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Transportasi	541,15	0,00
18	Kawasan Pariwisata	72,545.77	0.57
19	Kawasan Perikanan	4,101,800.35	32.20
20	Kawasan Perkebunan Rakyat	8,655.92	0,07
21	Kawasan Permukiman	209,208.97	1.64
22	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1,232.91	0.01
23	Kawasan Pertambangan dan Energi	20,63	0,00
24	Kawasan Pertanian	377,194.44	2.96
25	Kawasan Peruntukan Industri	7,702.71	0.06
26	Kawasan Transportasi	27,170.74	0.21
Total Kawasan Budidaya		8.903.922,05	69,90

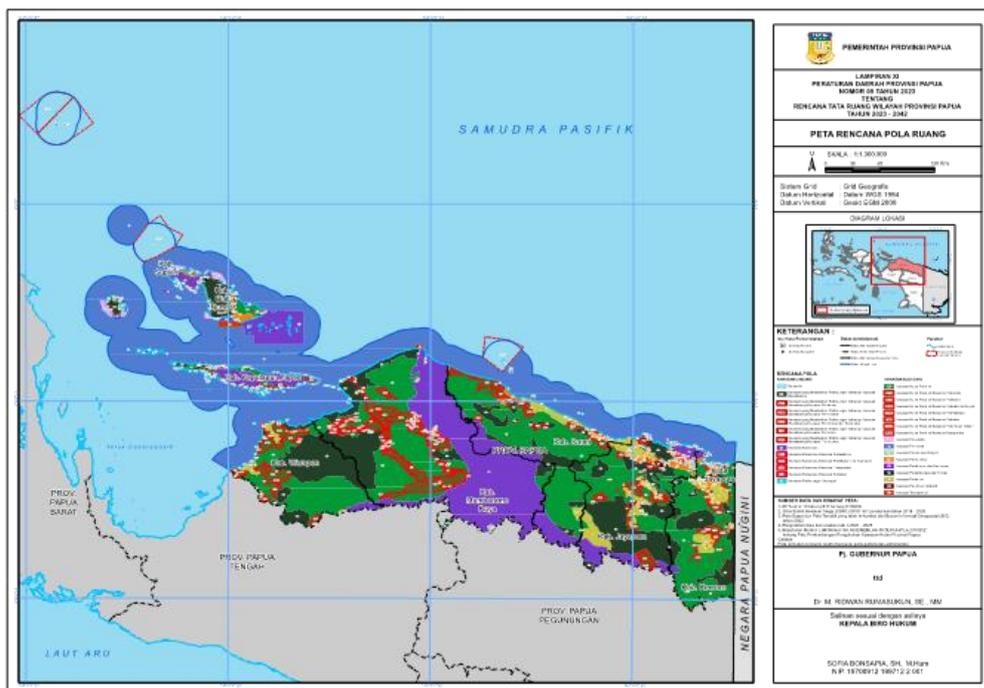
Sumber : Perda No. 9 Tahun 2023 RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Dari data diatas menunjukkan bahwa Kawasan Budidaya terbesar ada di Kawasan Perikanan seluas 4.101.800,35 hektar atau 32,20 % Kawasan perikanan tersebut merupakan wilayah laut dari 0-12 mil yang merupakan kewenangan pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi dan Kawasan hutan produksi seluas 3,272,076.39 hektar atau 25,69% sedangkan proporsi terkecil untuk Kawasan budidaya yaitu pertambangan dan energi seluas 20,63 hektar atau 0,001%.

B. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup SDA dan sumber daya buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 3.834.568,98 Ha atau sekitar 30,10% dari luas wilayah Provinsi Papua, termasuk di dalamnya kawasan lindung mutlak yang di dalamnya terdapat Kawasan Konservasi seluas kurang lebih 1.930.900,18 Ha atau 15,16%, Hutan Lindung seluas kurang lebih 18.009 Ha atau 14,16% dan proporsi Kawasan lindung yang terkecil adalah kawasan perlindungan setempat 5.415,04 hektar atau 0,04%, (Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042).

Gambar II.7 Peta Pola Ruang Perda RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Tabel II.12 Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Provinsi Papua Tahun 2023-2042

No	Jenis Penggunaan Lahan Kawasan Lindung	Luas (ha)	Prosentase (%)
1	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	1.882.746,75	14.78
2	Kawasan Konservasi	1.930.900,18	15.16
3	Kawasan Perlindungan Setempat	5,415,04	0.04
4	Badan Air	15.507,02	0.12
Luas Kawasan Lindung		3.834.568,98	30,10

Sumber: Perda No. 9 Tahun 2023 RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

2.1.1.9 Tutupan Lahan

Tutupan lahan di Provinsi Papua didominasi oleh peruntukkan hutan rimba sebesar 7.878.548,02 ha atau 95,28% terhadap luas wilayah provinsi. Tutupan lahan di Provinsi Papua selain hutan rimba meliputi badan air yang berupa air danau, air sungai dan air rawa sebesar 205.741,87 ha (2,49%), bukit pasir sebesar 1.223,84 ha (0,015%), pelabuhan

udara sebesar 753,26 ha (0,009%), permukiman sebesar 24.316,08 ha (0,29%), perkebunan sebesar 51.907,5 ha (0,63%), sawah sebesar 10.795,94 ha (0,13%), tegalan sebesar 14.714,49 ha (0,18%) dan semak belukar sebesar 80.835,33 ha (0,98%).

Gambar II.7 Peta Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tahun 2022



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

Tabel II.10 Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tahun 2022

Tutupan Lahan	Biak Numfor	Jayapura	Keerom	Kep. Yapen	Mamberamo Raya	Sarmi	Supiori	Waropen	Kota Jayapura	Grand Total
Air Danau/Situ	147.9	9,736.09	1.24	85.88	23,161.06	1,947.76	7.75	293.84	225.95	35,607.47
Air rawa	114.99	325.03	41.4		87,168.44	1,434.87		2,499.34	393.5	91,977.57
Air Tawar Sungai	41.8	8,053.29	3,281.83	3.37	50,055.65	10,364.59	5.47	5,899.04	451.79	78,156.83
Hutan Rimba	203,707.74	1,336,427.4	904,413.2	240,166.29	2,616,480.42	1,378,715.7	64,415.9	1,066,834.9	67,386.41	7,878,548.02
Pasir/Bukit Pasir Darat					28.83			992,25		1,021.08
Pasir/Bukit Pasir Laut	92.39	1.71		44.43	5.91		58.01	0.93	0.38	203.76
Pelabuhan Udara Domestik	227.93									227.93
Pelabuhan Udara Internasional	253.33									253.33
Pelabuhan Udara Perintis	41.61	146.11	11.01	50.75	11.83	5.2		5.49		272
Perkebunan/kebun	254.85	24,307.52	26,974.8			135.46	200.13		34.74	51,907.5
Permukiman dan Tempat Kegiatan	3,943.33	5,622.88	4,032.09	1,802.32	510.38	2,267.09	637,25	962.14	4,538.6	24,316.08
Sawah	45.51	1,512.76	5,180.16	165.39				215.16	3,676.96	10,795.94
Semak Belukar/Alang-Alang	15,798.96	17,848.07	2,740.42	463.25	26,921.01	10,883.73	731.84	424.27	5,023.96	80,835.33
Tegalan/Ladang	1,331.35	4,280.74	5,955.35	60.53	3.55	1,147.59	12.95	85.54	1,836.89	14,714.49
Grand Total	226,001.7	1,408,261.6	952,631.5	242,842.21	2,804,347.07	1,406,902	66,069.3	1,078,212.9	83,568.99	8,268,837.31

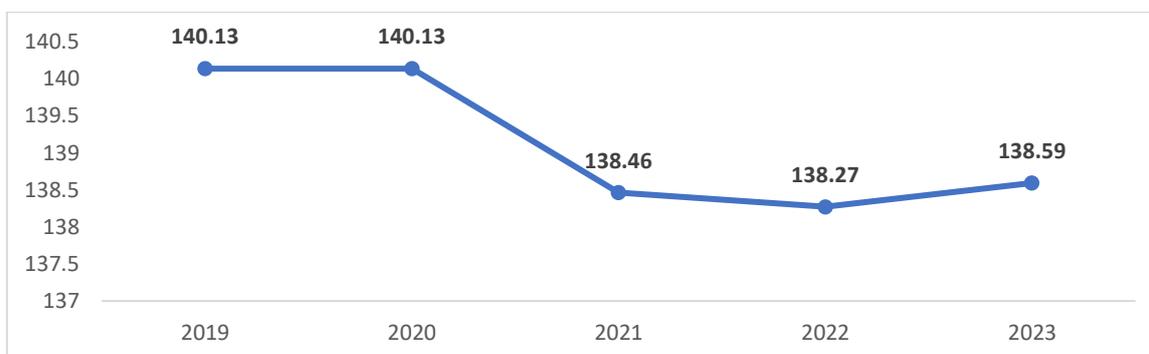
Sumber: Keputusan Menteri KLHK Nomor: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

2.1.1.10 Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Papua dilalui oleh dua lempeng benua yaitu Australia dan Samudera Pasifik aktif serta dikelilingi dua samudera besar yaitu Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Hal tersebut menyebabkan Provinsi Papua secara geografis memiliki berbagai kerawanan akan bencana. Guna mengantisipasi bencana, diperlukan adanya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dapat bersifat preventif, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Provinsi Papua rawan terhadap bencana geologi berupa gempa bumi dan gerakan tanah. Pergerakan ini juga dapat menyebabkan tsunami yang dapat terjadi pada beberapa daerah rawan bencana tsunami seperti Pulau Biak, Yapen, dan bagian utara Kabupaten Waropen.

Pengukuran risiko bencana di Indonesia diukur melalui indeks risiko bencana yang dilihat berdasarkan tiga faktor utama yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). Berdasarkan catatan yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Provinsi Papua memiliki Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 138,59 pada tahun 2023. Hal ini naik dibandingkan pada tahun 2022 yaitu 138,27. Disamping itu, resiko bencana meningkat akibat banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, likuefaksi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Provinsi Papua juga termasuk dalam kategori risiko bencana “sedang” dengan perolehan skor total indeks risiko bencana berada pada rentang 13-144 sehingga dari tahun 2016-2023, Provinsi Papua berada dalam kelas risiko bencana “sedang”. Perolehan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Provinsi Papua tahun 2016-2023 ditunjukkan pada Gambar II.8.

Gambar II.8 Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Papua



Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, BNPB (data diolah)

Tabel II.13 Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko
1	Jayapura	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	tinggi
2	Sarmi	166.98	166.98	166.98	169.63	172.50	tinggi
3	Mamberamo Raya	165.60	165.60	165.60	165.60	165.60	tinggi
4	Waropen	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	sedang
5	Biak Numfor	138.40	138.40	138.40	138.40	138.40	sedang

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko
6	Keerom	127.20	127.20	127.20	127.20	127.20	sedang
7	Kota Jayapura	143.94	143.94	128.86	114.40	114.40	sedang
8	Kepulauan Yapen	83.48	83.48	83.48	93.60	93.60	sedang
9	Supiori	92.40	92.40	92.40	92.40	92.40	sedang

Sumber: BNPB dalam dokumen "Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2019-2023"

Nilai indeks risiko per ancaman bencana di Provinsi Papua menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2022 berdasarkan Indeks Risiko Bencana 2022 yang diterbitkan oleh BNPB ditunjukkan pada Tabel II.12.

Tabel II.14 Nilai Indeks Risiko Per Ancaman Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023

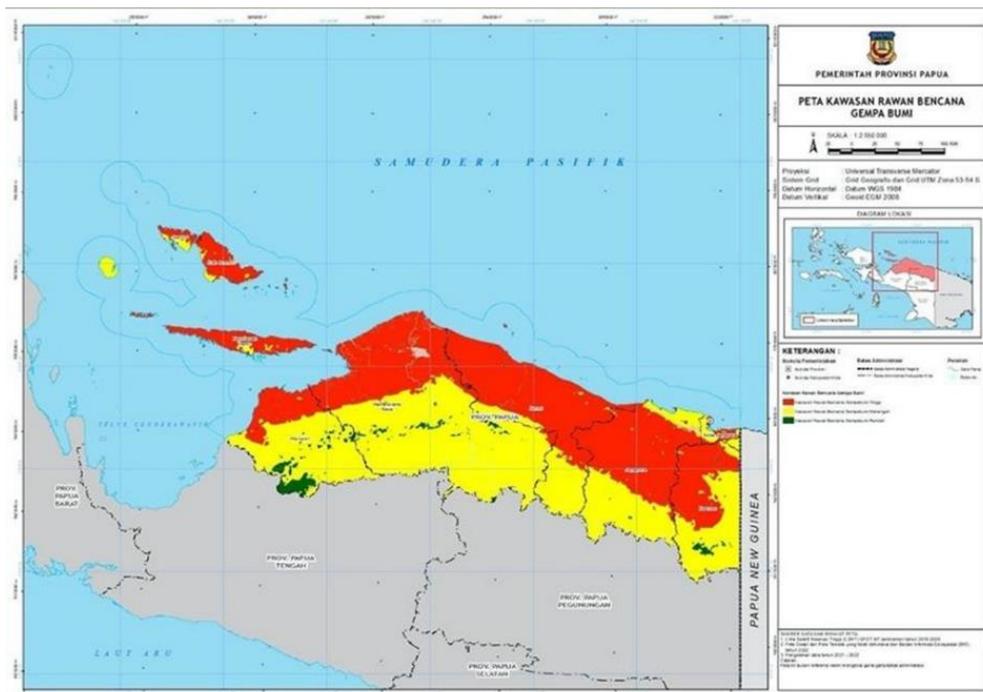
No	Kabupaten	Nilai IRB	Kelas Risiko	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Jayapura	203.20	Tinggi	Banjir	36.00	Tinggi
				Gempabumi	32.40	Tinggi
				Tsunami	14.40	Tinggi
				Karhutla	24.00	Tinggi
				Tanah Longsor	36.00	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	17.60	Tinggi
				Kekeringan	36.00	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	6.80	Sedang
2	Sarmi	172.50	Tinggi	Banjir	33.58	Tinggi
				Gempabumi	13.43	Tinggi
				Tsunami	22.39	Tinggi
				Karhutla	15.67	Tinggi
				Tanah Longsor	23.51	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	19.03	Tinggi
				Kekeringan	29.11	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	3.36	Rendah
3	Mamberamo Raya	165.60	Tinggi	Banjir	36.00	Tinggi
				Gempabumi	21.60	Tinggi
				Tsunami	19.20	Tinggi
				Karhutla	16.80	Tinggi
				Tanah Longsor	16.80	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	20.40	Tinggi
				Kekeringan	31.20	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	3.60	Rendah
4	Waropen	140.00	Sedang	Banjir	36.00	Tinggi
				Gempabumi	14.40	Tinggi
				Tsunami	14.40	Tinggi
				Karhutla	16.80	Tinggi
				Tanah Longsor	16.80	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	13.60	Tinggi

No	Kabupaten	Nilai IRB	Kelas Risiko	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
5	Biak Numfor	138.40	Sedang	Kekeringan	20.80	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	7.20	Sedang
				Gempabumi	14.40	Tinggi
				Tsunami	24.00	Tinggi
				Karhutla	25.20	Tinggi
				Tanah Longsor	16.80	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	20.00	Tinggi
				Kekeringan	31.20	Tinggi
6	Keerom	127.20	Sedang	Cuaca Ekstrim	6.80	Sedang
				Banjir	36.00	Tinggi
				Gempabumi	14.40	Tinggi
				Karhutla	16.80	Tinggi
				Tanah Longsor	25.20	Tinggi
				Kekeringan	31.20	Tinggi
7	Kota Jayapura	114.40	Sedang	Cuaca Ekstrim	3.60	Rendah
				Banjir	18.52	Tinggi
				Gempabumi	11.11	Sedang
				Tsunami	8.23	Sedang
				Karhutla	4.32	Rendah
				Tanah Longsor	8.64	Sedang
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	10.29	Sedang
				Kekeringan	16.05	Tinggi
8	Kepulauan Yapen	93.60	Sedang	Cuaca Ekstrim	3.50	Rendah
				Gempabumi	21.60	Tinggi
				Tsunami	24.00	Tinggi
				Karhutla	8.40	Sedang
				Tanah Longsor	25.20	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	13.60	Tinggi
				Kekeringan	20.80	Tinggi
9	Supiori	92.40	Sedang	Cuaca Ekstrim	3.60	Rendah
				Gempabumi	14.40	Tinggi
				Tsunami	6.40	Sedang
				Karhutla	16.80	Tinggi
				Tanah Longsor	16.80	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	13.60	Tinggi
				Kekeringan	20.80	Tinggi

Sumber: IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023, BNPB

Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua berada dalam kawasan rawan bencana alam berisiko tinggi. Jenis bencana dengan risiko kerawanan tinggi di Provinsi Papua antara lain adalah tanah longsor, banjir bandang, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan gelombang ekstrem.

Gambar II.9 Peta Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Papua



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Wilayah rawan bencana di Provinsi Papua ditinjau berdasarkan beberapa jenis bencana yang terjadi di antaranya adalah gempa bumi, longsor, banjir, tsunami, kekeringan, dan bencana alam lainnya yang berpotensi membawa bencana. Masing-masing jenis bencana dijabarkan sebagai berikut.

a. Gempa Bumi

Terdapat 2 mandala struktur geologi terpenting di Provinsi Papua berdasarkan peristiwa tektonik regional, di antaranya:

1) Jalur Sesar Naik Pegunungan Tengah (JSNPT)

Berada pada daerah Pegunungan Tengah Papua, jalur sesar sungkup berarah timur barat dan memiliki panjang 100 km. Batu gamping New Guinea menjadi satuan litologi yang paling dominan di JNSPT dengan ketebalan 2000 m. Bentuk daerah JNSPT termodifikasi pada awal Pliosen diduga terbentuk dari penebalan batuan kerak. Perkembangan kerak yang bergerak ke arah utara membentuk Sesar Sungkup Mamberamo (*The Mamberamo Thrust Belt*) dan menjadi awal tempat Gautier (*The Gautier off set*).

2) Jalur Sesar Naik Mamberamo

Terdiri dari sesar anjak dan sesar geser (*shear*) serta memanjang 100 km ke arah selatan sehingga menggeser sedikit-demi sedikit batuan Plio–Pleistosen Formasi–Mamberamo dan batuan kerak Pasifik yang berada di bawahnya.

Provinsi Papua rawan gempa bumi akibat dari tatanan tektonik di Pulau *New Guinea*. Provinsi Papua juga termasuk dalam kategori wilayah rawan bencana gempa bumi dan tsunami berdasarkan kajian kerawanan bencana gempa bumi di Indonesia. Adapun tingkat kerawanan gempa bumi berada di jalur pegunungan tengah hingga bagian utara

Pulau Papua tergolong menengah hingga tinggi dengan percepatan tanah maksimal. Berdasarkan catatan Balai BMKG wilayah V Jayapura, sebanyak lebih dari 2600 kali terjadi gempa bumi di Provinsi Papua pada tahun 1988-2007. Gempa bumi kuat dan dapat merusak berpusat di sekitar Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi, dan Jayapura.

Daerah rawan gempa bumi di Provinsi Papua berada di satu wilayah yaitu pulau Biak-Yapen yang secara umum berada di bagian utara pegunungan tengah Papua. Gempa bumi yang biasa terjadi adalah gempa tektonik yang terjadi akibat tubrukan dari dua lempeng. Gempa dangkal sering kali berhubungan dengan aktivitas sesar yang ada di jalur pegunungan tengah Papua. Gempa yang terjadi akibat pergerakan sesar Sorong secara berkelanjutan dirasakan di Pulau Biak dan Yapen serta dapat terjadi di darat dan di bawah laut. Wilayah dengan bahaya gempa bumi tinggi ditunjukkan pada Tabel II.15.

Tabel II.15 Wilayah dengan Bahaya Gempa Bumi Tinggi

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (ha)	PROPORSI (%)
1	Jayapura	667,913.15	19.94
2	Kepulauan Yapen	195,268.72	5.83
3	Biak Numfor	124.55	0.00
4	Sarmi	624,831.77	18.66
5	Keerom	36,642.82	1.09
6	Waropen	65,968.39	1.97
7	Supiori	30.85	0.00
8	Mamberamo Raya	1,698,934.93	50.73
9	Kota Jayapura	59,148.48	1.77
TOTAL		3,348,863.66	100

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

a. Longsor

Longsor terbagi dalam 3 kategori yaitu zona kerentanan gerakan tanah tinggi, zona kerentanan gerakan tanah menengah, dan zona kerentanan gerakan tanah rendah. Zona kerentanan gerakan tanah tinggi merupakan daerah dengan tingkat kerentanan tinggi yang dapat terkena gerakan tanah. Zona kerentanan gerakan tanah menengah merupakan daerah dengan tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah dan zona kerentanan gerakan tanah rendah merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah.

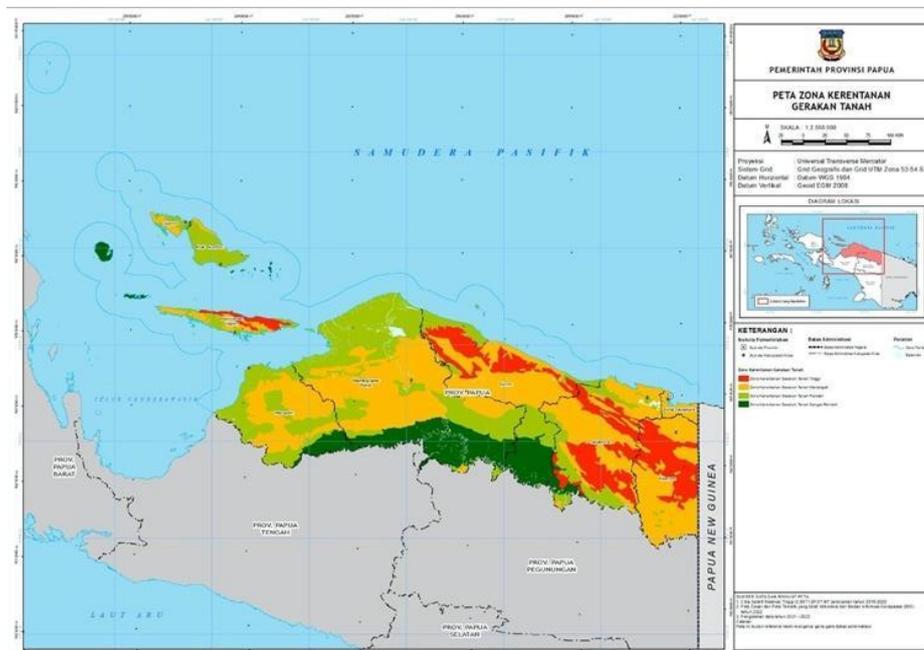
Provinsi Papua berada pada daerah dengan zona kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi khususnya pada jalur pegunungan tengah dan pegunungan utara Papua. Bahaya longsor tinggi di Provinsi Papua meliputi seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Jayapura menjadi wilayah dengan bahaya longsor tinggi terluas diikuti Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. Proporsi bencana longsor tinggi di Provinsi Papua dijabarkan berdasarkan kabupaten/kota pada Tabel II.16.

Tabel II.16 Wilayah dengan Bahaya Bencana Longsor Tinggi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Ha)	Proporsi (%)
1	Jayapura	219,388.10	51.68
2	Kepulauan Yapen	58,886.97	13.87
3	Biak Numfor		0.00
4	Sarmi	53,175.90	12.53
5	Keerom	87,688.31	20.66
6	Waropen	0	0.00
7	Supiori	0	0.00
8	Mamberamo Raya	3,044.21	0.72
9	Kota Jayapura	2,314.49	0.55
TOTAL		424,497.98	100

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Gambar II.10 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah di Provinsi Papua



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

b. Banjir

Banjir terjadi akibat beberapa faktor di antaranya curah hujan yang tinggi dan lama, lokasi topografi yang cenderung datar dengan pola sungai berbelok-belok dan dataran banjir yang luas, keadaan tanah maupun batuan yang lambat dalam meresap air, dan kapasitas sungai yang penuh sehingga tidak memungkinkan untuk menampung dan mengalirkan air ke laut. Wilayah rawan banjir di Provinsi Papua berada di bagian pesisir utara yaitu Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, dan Waropen seperti terlihat pada Gambar II.11. Bahaya banjir tinggi terdapat pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan wilayah bahaya banjir terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya diikuti Kabupaten

Sarmi dan Waropen. Proporsi bahaya banjir menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua dijabarkan pada Tabel II.17.

Tabel II.17 Wilayah dengan Bahaya Bencana Banjir Tinggi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Ha)	Proporsi (%)
1	Jayapura	48,859.59	8.24
2	Kepulauan Yapen	739.34	0.12
3	Biak Numfor	1,318.71	0.22
4	Sarmi	63,365.16	10.68
5	Keerom	26,972.71	4.55
6	Waropen	62,418.33	10.52
7	Supiori	282.66	0.05
8	Mamberamo Raya	385,285.77	64.95
9	Kota Jayapura	3,939.93	0.66
TOTAL		593,182.20	100

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Gambar II.11 Peta Rawan Bencana Banjir di Provinsi Papua



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

c. Tsunami

Provinsi Papua melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi tahun 2006, mencatat kejadian tsunami di Provinsi Papua tepatnya di pulau Yapen pada tahun 1900, 1914, 1957, 1979, dan 1996. Wilayah rawan tsunami di Provinsi Papua diprediksi berada di bagian pesisir utara Papua termasuk semenanjung Wondama (Teluk Cenderawasih). Terdapat 8 kabupaten/kota dengan risiko tsunami tinggi di Provinsi Papua yaitu Kabupaten

Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Mamberamo Raya, Sarmi, Supiori, Waropen, dan Kota Jayapura. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki area rawan tsunami tinggi terluas diikuti Kepulauan Yapen dan Sarmi. Wilayah dan bahaya tsunami tinggi ditunjukkan pada Tabel II.16.

Tabel II.18 Wilayah dengan Bahaya Tsunami Tinggi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Ha)	Proporsi (%)
1	Jayapura	503.16	2.37
2	Kepulauan Yapen	3,429.65	16.13
3	Biak Numfor	2,749.78	12.93
4	Sarmi	3,062.08	14.40
5	Keerom	1,171.63	5.51
6	Waropen	1,812.36	8.52
7	Supiori	7,886.21	37.09
8	Mamberamo Raya	544.89	2.56
9	Kota Jayapura	503.16	2.37
TOTAL		21,159.76	100

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

d. Kekeringan

Kekeringan dapat terjadi ketika terjadinya musim kemarau berkepanjangan. Beberapa dampak langsung yang dapat dirasakan dari kekeringan adalah produksi pangan yang semakin berkurang dan kegiatan ekonomi masyarakat yang terganggu. Bahan pangan yang cenderung sulit didapatkan pada masa kemarau mengakibatkan harganya menjadi mahal. Selain itu, air bersih menjadi sulit didapatkan dan hewan dapat mati dan menimbulkan wabah penyakit.

Provinsi Papua memiliki bahaya kekeringan pertanian yang lebih menonjol dibandingkan dengan jenis kekeringan lainnya. Bahaya kekeringan pertanian di Provinsi Papua sering ditemukan di pegunungan yang memiliki topografi tinggi dan curam serta memiliki kondisi dan perubahan cuaca yang sangat ekstrem namun dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Wilayah rawan kekeringan di Provinsi Papua masih belum dipetakan secara lebih rinci dan lengkap karena informasinya lebih banyak berasal dari instansi teknis pertanian. Informasi mengenai penyebab dan antisipasi penanganan bahaya kekeringan masih belum tertangani dengan baik.

e. Bencana Alam Lainnya

Bencana lain yang dapat terjadi dan mengancam serta memiliki risiko tinggi di antaranya adalah banjir bandang, wilayah dataran rendah dan wilayah pegunungan.

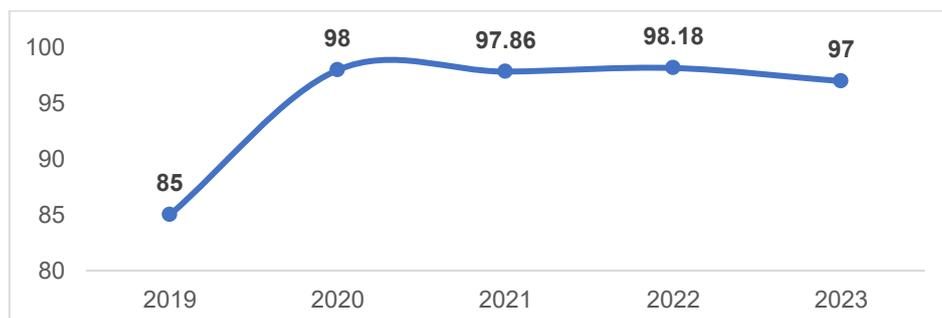
2.1.1.1.1 Pemanfaatan ruang

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik itu RJPD, RPJMD, RKPD maupun dokumen lainnya. Implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang Perda RTRW Provinsi Papua

khususnya untuk struktur dan pola ruang masih menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua.

Berdasarkan data bahwa tahun 2019 ketaatan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sebesar 85% namun tahun 2020 mengalami peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 98%. Tahun 2020-2023 ketaatan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang mengalami tren penurunan dari tahun 2020 sebesar 98 % di tahun 2023 turun menjadi 97%. Pelaksanaan ketaatan pelaksanaan dapat digambarkan pada Gambar II.12.

Gambar II.12 Ketaatan Terhadap Pelaksanaan RTRW Provinsi Papua



Sumber : Lakip Provinsi Papua Tahun 2024

Skenario pengembangan wilayah provinsi Papua, dibagi dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan, yang meliputi:

- a. **Wilayah pengembangan I**, meliputi wilayah Jayapura dan sekitarnya, yaitu:
 1. Kabupaten Keerom sebagai PKW, memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (kelapa sawit, jagung, kakao), sektor pariwisata (Telaga Cinta Yowong), sektor pertambangan, dan sektor Peternakan dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian (food estate dan tanaman pangan, sektor perkebunan dan sektor pertambangan);
 2. Kabupaten Sarmi sebagai PKW, memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (kelapa sawit, kelapa dalam, kakao), sektor pertambangan (nikel), sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor pariwisata dengan fokus pengembangan pada sektor industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan kelapa dalam (PICHO/Papua Home industri Coconut Oil);
 3. Kabupaten Jayapura sebagai PKN, memiliki potensi di sektor Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (kelapa sawit, kakao, sagu), sektor peternakan, sektor perikanan, sektor pariwisata (kerajinan kapak batu Ormu Wari, Danau Sentani), sektor pertambangan, sektor industri dan sektor Kehutanan dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian dan industri; serta
 4. Kota Jayapura sebagai PKN dan PKSN, memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor perikanan, sektor pariwisata, dan sektor jasa dengan fokus pengembangan sebagai pusat perdagangan, jasa dan pariwisata.

b. **Wilayah pengembangan II**, yaitu:

1. Kabupaten Biak Numfor sebagai PKW dan PKSN, memiliki potensi di sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor peternakan dengan fokus pengembangan sebagai pusat perikanan, industri pengolahan perikanan dan wisata bahari;
2. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi di sektor pariwisata (Kampung wisata Alam), sektor perikanan (ikan dan rumput laut), sektor perkebunan (sagu, kakao), sektor kehutanan, sektor pertanian, dan sektor peternakan dengan fokus pengembangan pada sektor perikanan dan wisata bahari; serta
3. Kabupaten Supiori memiliki potensi pengembangan di sektor perikanan dan pariwisata; dan

c. **Wilayah pengembangan III**, yaitu:

1. Kabupaten Mamberamo Raya memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan rakyat, sektor pertambangan (batu bara), sektor perikanan, sektor pariwisata (pariwisata alam), dan sektor kehutanan dengan fokus pengembangan pada pengolahan hasil hutan, pertanian dan Pariwisata; serta
2. Kabupaten Waropen memiliki potensi di sektor pariwisata (Wisata Rohani Pulau Nau, Pantai Mangrove), sektor perikanan (ikan, udang, kepiting), sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (sagu), sektor kehutanan, dan sektor pertambangan dengan fokus pengembangan meliputi pariwisata, perikanan dan pertanian serta potensi pertambangan.

Gambar II.12 Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Papua



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

2.1.2 Aspek Demografi

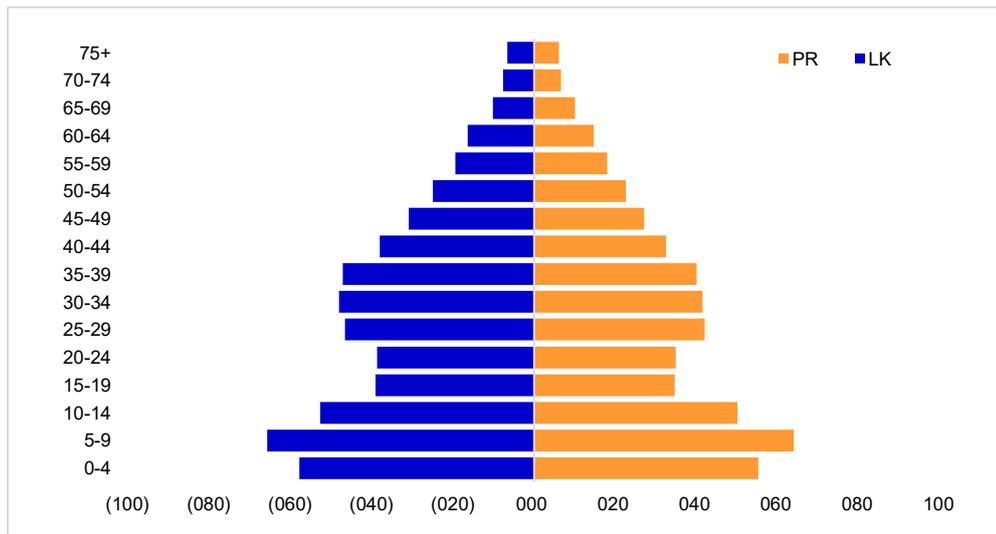
Jumlah penduduk di Provinsi Papua sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah sebanyak 823.494 jiwa dan meningkat menjadi 1.047,10 ribu jiwa pada tahun 2023. Kota Jayapura mengalami peningkatan jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua hingga tahun 2023. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami kenaikan jumlah penduduk hingga tahun 2023. Kabupaten Biak Numfor mengalami peningkatan jumlah penduduk hingga tahun 2019, namun mengalami penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020. Meskipun begitu, jumlah penduduk terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023.

Tabel II.19 Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2017-2023

No	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jayapura	125,98	128,59	131,80	166,17	168,48	171,33	171,61
2	Kepulauan Yapen	95,01	97,41	101,20	112,68	114,21	116,11	117,03
3	Biak Numfor	144,70	148,40	152,40	134,65	135,23	135,80	139,39
4	Sarmi	38,21	39,41	40,52	41,52	41,85	42,23	42,68
5	Keerom	55,02	55,80	57,10	61,62	62,16	62,78	63,5
6	Waropen	29,48	30,61	31,51	33,94	34,41	35,00	35,32
7	Supiori	19,10	20,02	20,71	22,55	22,86	23,25	24,01
8	Mamberamo Raya	22,31	23,31	24,09	36,48	36,99	37,62	38,64
9	Kota Jayapura	293,69	297,78	300,19	398,48	404,00	410,85	414,86
Provinsi Papua		823.494	823,49	841,32	859,52	1.008,09	1.020,19	1.034,96

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2024

Gambar II.13 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2023

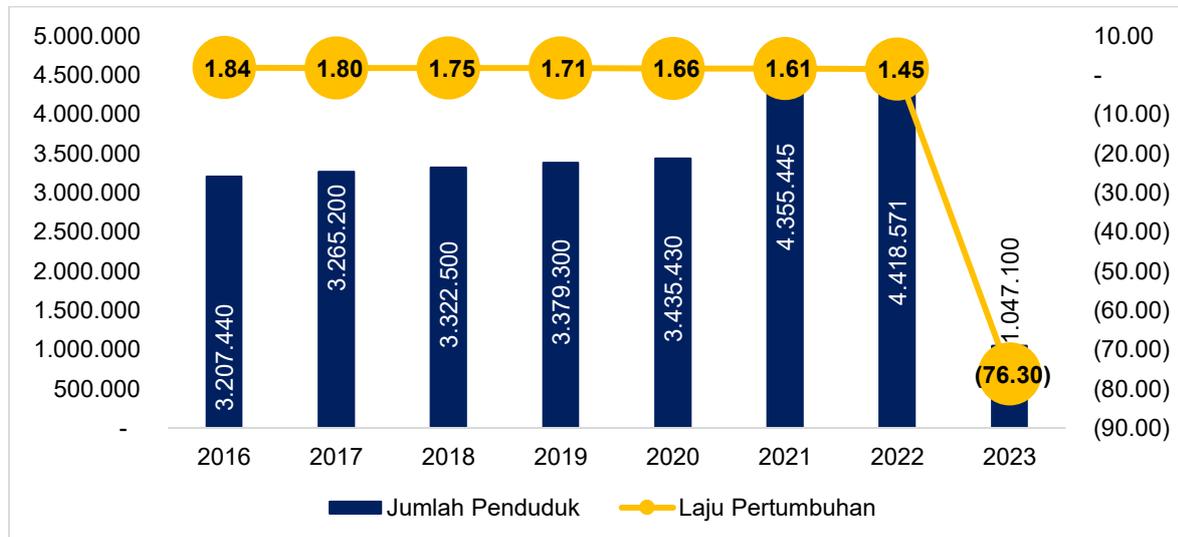


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2024 (data diolah)

Pada tahun 2023, terjadi pemekaran wilayah di Provinsi Papua yang menyebabkan perubahan signifikan dalam jumlah penduduk yang tercatat. Sebelum pemekaran, jumlah penduduk pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4.418.571 jiwa dengan laju pertumbuhan

sebesar 1,45%. Namun, setelah pemekaran, jumlah penduduk yang tercatat menurun drastis menjadi 1.047.100 jiwa dengan laju pertumbuhan negatif sebesar -76,30%.

Gambar II.14 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua



Sumber: BPS Prov Papua (Diolah)

Jumlah penduduk di Provinsi Papua sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah sebanyak 823.494 jiwa dan meningkat menjadi 1.047,10 ribu jiwa pada tahun 2023. Kota Jayapura mengalami peningkatan jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua hingga tahun 2023. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami kenaikan jumlah penduduk hingga tahun 2023. Kabupaten Biak Numfor mengalami peningkatan jumlah penduduk hingga tahun 2019, namun mengalami penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020. Meskipun begitu, jumlah penduduk terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

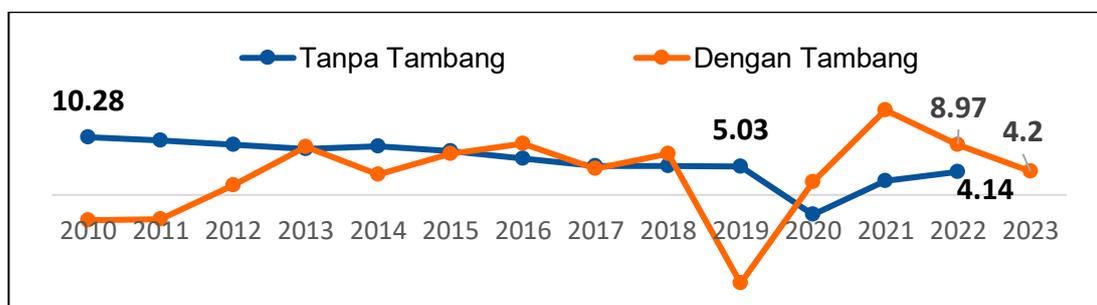
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB digunakan untuk melihat proporsi lapangan usaha untuk mengidentifikasi sektor basis dan PDRB ADHK digunakan untuk melihat proyeksi dari pertumbuhan ekonomi.

Grafik di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi Papua dari tahun 2019 hingga 2023 dengan perbandingan antara sektor tanpa tambang dan sektor dengan tambang. Pada tahun 2019, sektor dengan tambang mengalami penurunan drastis hingga mencapai titik terendah dalam satu dekade ini, sementara sektor tanpa tambang tetap stabil. Pada tahun 2020, sektor dengan tambang pulih dengan cepat, mencapai 5,03%, sedangkan sektor tanpa tambang mengalami sedikit penurunan. Tahun 2021 menunjukkan tren positif untuk

kedua sektor, dengan sektor tanpa tambang naik ke 4,14% dan sektor dengan tambang melonjak tajam. Tahun 2022 adalah puncak bagi sektor dengan tambang yang mencapai 8,97%, sedangkan sektor tanpa tambang juga naik meski lebih rendah. Pada tahun 2023, sektor dengan tambang turun menjadi 4,2%, dan data untuk sektor tanpa tambang tidak dihitung lagi oleh BPS karena adanya pemekaran wilayah di Papua.

Gambar II.15 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2015-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

2.2.2 Struktur Ekonomi

Adapun perkembangan PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Provinsi Papua ditunjukkan pada Tabel II.20.

Tabel II.20 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24.177,23	24.456,61	25.514,22	27.044,54	11.820,47
B. Pertambangan dan Penggalian	44.642,21	56.199,83	86.696,05	101.334,79	680,81
C. Industri Pengolahan	4.305,29	4.140,13	4.241,31	4.433,59	2.397,74
D. Pengadaan Listrik dan Gas	84,25	83,23	88,52	98,33	51,80
E. Pengadaan Air	103,67	100,37	104,79	113,23	82,04
F. Konstruksi	30.559,27	30.733,60	32.636,11	36.100,10	16.682,48
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.668,63	20.935,42	22.058,45	24.140,91	13.041,48
H. Transportasi dan Pergudangan	12.826,18	8.688,28	9.044,13	11.606,77	6.578,46
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.792,05	1.526,75	1.566,84	1.669,83	1.040,55
J. Informasi dan Komunikasi	8.195,28	8.456,43	8.819,97	9.372,36	4.983,60
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.370,13	3.325,39	3.573,54	4.067,52	3.061,83
L. Real Estate	5.788,84	5.774,49	6.283,74	6.666,29	3.838,07
M,N. Jasa Perusahaan	2.606,43	2.450,76	2.424,31	2.702,72	2.009,33
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	20.490,38	22.048,00	21.999,18	22.396,29	9.483,70
P. Jasa Pendidikan	4.031,56	4.089,98	3.918,51	4.091,41	2.186,61
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.548,67	3.839,76	3.994,08	4.137,21	2.317,25
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.320,64	2.337,54	2.422,36	2.539,92	1.481,71
PDRB	189.510,70	199.186,57	235.486,12	262.515,82	81.737,92

Sumber: BPS Provinsi Papua

Tabel II.21 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,76	12,91	13,46	14,27	6,24	11,93
B. Pertambangan dan Penggalian	23,56	29,66	45,75	53,47	0,36	30,56
C. Industri Pengolahan	2,27	2,18	2,24	2,34	1,27	2,06
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,05	0,05	0,03	0,04
E. Pengadaan Air	0,05	0,05	0,06	0,06	0,04	0,05
F. Konstruksi	16,13	16,22	17,22	19,05	8,80	15,48
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,91	11,05	11,64	12,74	6,88	10,64
H. Transportasi dan Pergudangan	6,77	4,58	4,77	6,12	3,47	5,14
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,81	0,83	0,88	0,55	0,80
J. Informasi dan Komunikasi	4,32	4,46	4,65	4,95	2,63	4,20
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	1,75	1,89	2,15	1,62	1,84
L. Real Estate	3,05	3,05	3,32	3,52	2,03	2,99
M,N. Jasa Perusahaan	1,38	1,29	1,28	1,43	1,06	1,29
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,81	11,63	11,61	11,82	5,00	10,18
P. Jasa Pendidikan	2,13	2,16	2,07	2,16	1,15	1,93
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,87	2,03	2,11	2,18	1,22	1,88
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,22	1,23	1,28	1,34	0,78	1,17

Sumber: BPS Provinsi Papua

Berdasarkan rata-rata PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Provinsi Papua tahun 2017-2023, diketahui bahwa sektor Pertambangan menjadi sektor dengan distribusi tertinggi (30,56%) yang diikuti dengan sektor Konstruksi (15,48%), dan Pertanian Kehutanan dan Perikanan (11,93%).

Tabel II.22 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16.608,11	16.490,61	16.754,98	17.133,42	7.017,87
B. Pertambangan dan Penggalian	38.925,05	45.395,19	63.915,45	74.225,10	451,53
C. Industri Pengolahan	3.010,41	2.859,43	2.853,50	2.855,82	1.418,04
D. Pengadaan Listrik dan Gas	55,48	54,95	58,12	62,03	33,80
E. Pengadaan Air	81,12	78,78	81,79	86,58	61,08
F. Konstruksi	18.685,26	18.523,22	19.325,89	20.158,25	9.023,20
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.470,15	13.137,88	13.888,81	14.543,06	7.729,26
H. Transportasi dan Pergudangan	7.232,58	4.911,21	5.090,76	5.948,66	3.240,90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.113,67	925,15	938,47	976,45	592,05
J. Informasi dan Komunikasi	5.887,49	6.106,73	6.295,32	6.639,24	3.724,89
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.273,75	2.240,42	2.293,48	2.409,12	1.733,02

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
L. Real Estate	3.974,61	3.967,86	4.247,22	4.449,45	2.600,14
M,N. Jasa Perusahaan	1.888,21	1.744,31	1.778,50	1.844,32	1.274,86
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	13.716,33	13.690,53	13.561,13	13.876,90	6.239,86
P. Jasa Pendidikan	3.406,33	3.384,49	3.222,26	3.273,86	1.812,42
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.492,20	2.587,41	2.619,67	2.620,86	1.502,43
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.745,17	1.689,10	1.748,97	1.801,71	1.097,38
PDRB	134.565,89	137.787,29	158.674,30	172.904,85	49.552,73

Sumber: BPS Provinsi Papua

Tabel II.23 Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,34	12,25	12,45	12,73	5,22	11,00
B. Pertambangan dan Penggalan	28,93	33,73	47,50	55,16	0,34	33,13
C. Industri Pengolahan	2,24	2,12	2,12	2,12	1,05	1,93
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,05	0,03	0,04
E. Pengadaan Air	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06
F. Konstruksi	13,89	13,77	14,36	14,98	6,71	12,74
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,01	9,76	10,32	10,81	5,74	9,33
H. Transportasi dan Pergudangan	5,37	3,65	3,78	4,42	2,41	3,93
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,83	0,69	0,70	0,73	0,44	0,68
J. Informasi dan Komunikasi	4,38	4,54	4,68	4,93	2,77	4,26
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,69	1,66	1,70	1,79	1,29	1,63
L. Real Estate	2,95	2,95	3,16	3,31	1,93	2,86
M,N. Jasa Perusahaan	1,40	1,30	1,32	1,37	0,95	1,27
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,19	10,17	10,08	10,31	4,64	9,08
P. Jasa Pendidikan	2,53	2,52	2,39	2,43	1,35	2,24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,85	1,92	1,95	1,95	1,12	1,76
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,30	1,26	1,30	1,34	0,82	1,20
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

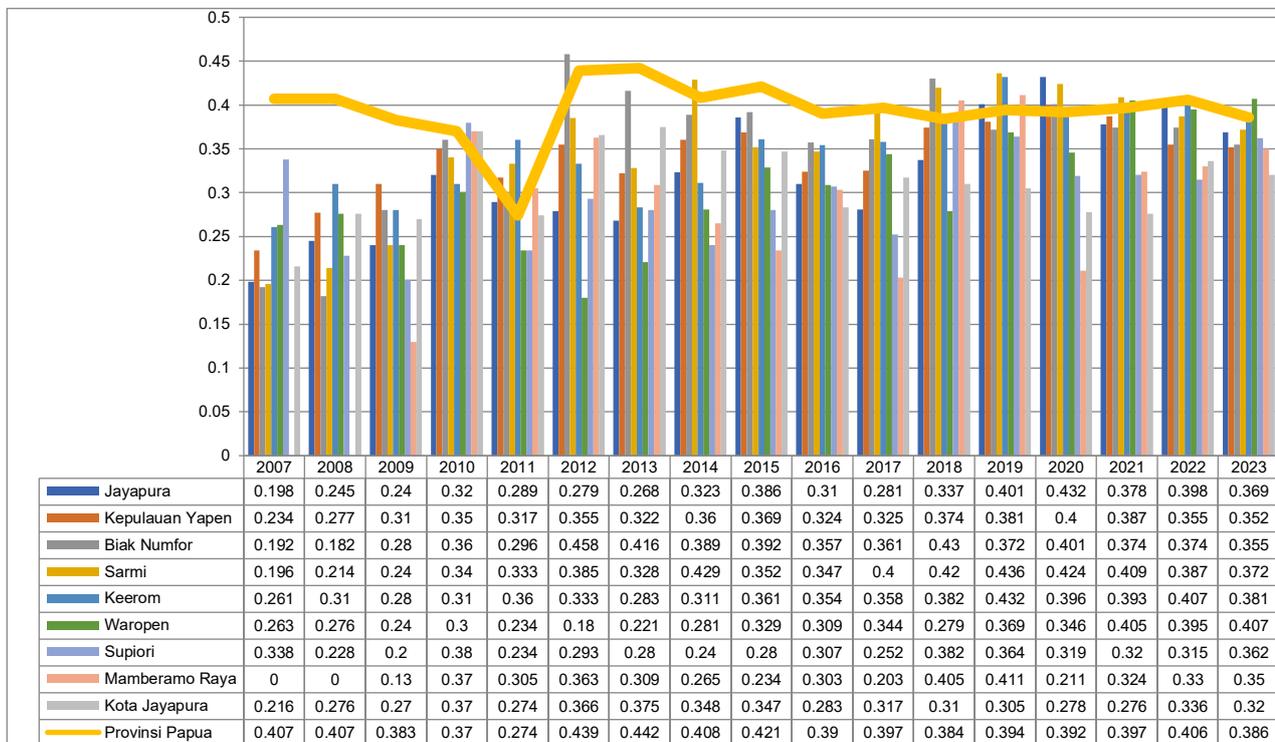
Sumber: BPS Provinsi Papua

Berdasarkan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha, diketahui bahwa sektor dengan kontribusi rata-rata terbesar adalah sektor Pertambangan (33,13%) yang diikuti dengan sektor Konstruksi (12,74%), dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (11%).

2.2.3 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu indikator untuk menunjukkan tingkat ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Indeks Gini menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua dari tahun 2007-2021 ditunjukkan pada Gambar II.16.

Gambar II.16 Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2007-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

Semakin kecil rasio gini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi semakin menurun antar masyarakat. Sebaliknya semakin tinggi rasio gini, menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antar masyarakat semakin tinggi. Tahun 2011 menjadi tahun dengan rasio gini terendah di Provinsi Papua yaitu sebesar 0,274. Sementara tahun 2013 menjadi tahun dengan capaian rasio gini tertinggi yaitu sebesar 0,442. Berdasarkan Gambar II.16, terlihat bahwa indeks gini pada mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2023 masih berada di bawah garis provinsi terkecuali pada Kabupaten Waropen.

2.2.4 Tingkat Kemiskinan dan Daerah Tertinggal

Pada Tabel II.22 menunjukkan persentase penduduk miskin yang berada di Provinsi Papua mencapai 14,88 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2021, capaian tersebut menunjukkan ada penurunan penduduk dengan kategori miskin jika dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai 18,33 persen. Kabupaten Supiori ditahun 2021 merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi dengan 34,25 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Supiori, sedangkan Kota Jayapura ditahun yang sama merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah mencapai 8,61 persen dari jumlah penduduk Kota Jayapura diikuti Kabupaten Jayapura yang mencapai 9,24 persen. Kedua

daerah tersebut juga telah menunjukkan adanya penurunan penduduk dengan kategori miskin jika dibandingkan 3 tahun ke belakang.

Tabel II.24 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jayapura	13,44	13,13	12,44	12,13	11,94	11,45
2	Kepulauan Yapen	27,17	27,13	26,30	26,09	26,15	25,89
3	Biak Numfor	25,72	25,50	24,57	24,45	24,48	23,53
4	Sarmi	14,51	14,41	13,87	13,84	13,76	13,21
5	Keerom	16,90	16,83	16,32	16,00	15,77	15,68
6	Waropen	30,53	30,95	29,54	29,85	30,22	29,16
7	Supiori	39,22	38,79	36,91	37,91	37,70	36,99
8	Mamberamo Raya	30,10	29,13	28,38	28,78	30,73	29,63
9	Kota Jayapura	11,37	11,49	11,16	11,39	11,12	10,50
Provinsi Papua		27,74	27,53	26,64	26,86	26,56	26,03

Sumber: BPS Provinsi Papua

2.2.4.1 Daerah Tertinggal

Data kemiskinan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Papua pada tahun 2023 menunjukkan variasi yang signifikan, dengan Kabupaten Supiori memiliki persentase kemiskinan tertinggi sebesar 36,99%. Diikuti oleh Kabupaten Waropen dengan 29,16% dan Mamberamo Raya dengan 29,63%. Kabupaten Kepulauan Yapen berada di posisi berikutnya dengan 25,89%, sementara Kabupaten Biak Numfor mencatat 23,53%. Kabupaten Keerom menunjukkan tingkat kemiskinan sebesar 15,68%, yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Kota Jayapura mencatat angka kemiskinan terendah sebesar 10,50%. Meskipun terjadi penurunan kemiskinan di beberapa daerah, tingkat kemiskinan masih bervariasi secara signifikan di seluruh Provinsi Papua.

Tabel II.25 Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan di Provinsi Papua

No	Kabupaten/ Kota	Penyebab Utama Ketertinggalan (Menurut Urutan)					
		1	2	3	4	5	6
1	Keerom	Sarpras	Aksesibilitas	-	Ekonomi	SDM	Keuangan Daerah
	Mamberamo Raya	Sarpras	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	Ekonomi	SDM	Keuangan Daerah
2	Waropen	Sarpras	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	-	SDM	Keuangan Daerah
	Supiori	Sarpras	Aksesibilitas	-	Ekonomi	SDM	Keuangan Daerah

Sumber: Nilai Indeks Daerah Tertinggal, Tahun 2022

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Penetapan

Daerah Tertinggal, dimana dalam Peraturan Menteri tersebut ditetapkan 22 (dua puluh dua) indikator penyebab ketertinggalan suatu daerah yaitu:

Gambar II.17 Indikator Penyebab Ketertinggalan Wilayah Papua

Provinsi	Kabupaten	Sarana dan Prasarana						Aksesibilitas			Karakteristik Daerah	Ekonomi			Sumber Daya Manusia			KKD					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20
Papua Barat	Teluk Wondama	3	0	2	1	2	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Papua Barat	Teluk Bintuni	3	2	2	2	3	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papua Barat	Manokwari Selatan	3	2	3	1	2	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Papua Barat	Pegunungan Arfak	3	3	3	2	3	1	1	2	1	3	1	1	1	0	3	0	3	2	2	0	0	1
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Papua Barat Daya	Sorong	3	2	3	2	2	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papua Barat Daya	Tambrau	3	3	3	3	3	0	0	1	1	2	2	2	0	0	2	1	2	1	1	0	0	0
Papua Barat Daya	Maybrat	3	3	3	3	3	0	0	0	2	1	0	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1
Papua	Keerom	0	1	2	1	2	0	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Papua	Waropen	2	1	3	2	3	0	1	1	1	3	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0
Papua	Supiori	1	0	1	0	1	1	1	2	2	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Papua	Mamberamo Raya	0	0	2	0	2	0	1	3	3	3	0	2	0	0	0	2	2	1	0	0	0	1
Papua Selatan	Boven Digoel	2	1	2	0	3	1	0	1	1	3	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Papua Selatan	Mappi	3	1	3	0	2	0	1	2	2	3	1	2	0	0	1	1	2	1	0	0	1	1
Papua Selatan	Asmat	2	1	3	1	3	2	2	3	3	3	1	2	0	0	1	1	2	1	2	1	1	0

Sumber: Nilai Indeks Daerah Tertinggal Tahun 2022

Keterangan:
 0 : Prioritas Rendah Intervensi
 1 : Prioritas Sedang Intervensi
 2 : Prioritas Tinggi Intervensi
 3 : Prioritas Sangat Tinggi Intervensi

Kemudian sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan 62 Daerah tertinggal Tahun 2020-2024. Dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tersebut, terdapat 4 (empat) daerah tertinggal di Provinsi Papua yaitu : Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Waropen. Perkembangan Daerah Tertinggal di Provinsi Papua hasil penilaian dari Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sampai dengan Tahun 2023 yang lalu menetapkan bahwa Kabupaten Supiori sudah siap entas dari ketertinggalan, sementara 3 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen masih dalam posisi sebagai Daerah Tertinggal. Hal ini disebabkan karena 3 (tiga) kabupaten tersebut nilai Indek Pembangunan Manusia dan Persentasi Penduduk Miskinnya masih dibawah dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tabel II.26 Klasifikasi status IDM Tingkat Provinsi, Kabupaten, Distrik dan Kampung Se-Provisi Papua tahun 2023

No	Kabupaten/Distrik/Desa	Jumlah	Klasifikasi Status					Keterangan
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1	Kabupaten Biak Numfor							Tertinggal
	Distrik	19						
	Kampung	254		5	90	134	25	
2	Kabupaten Jayapura							Tertinggal

No	Kabupaten/Distrik/Desa	Jumlah	Klasifikasi Status					Keterangan
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
	Distrik	19						
	Kampung	139		8	55	64	12	
3	Kabupaten Keerom							Tertinggal
	Distrik	11						
	Kampung	91	1	4	22	40	24	
4	Kabupaten Yapen							Berkembang
	Distrik	16						
	Kampung	160		4	129	27		
5	Kota Jayapura							Berkembang
	Distrik	5						
	Kampung	14	1	6	6	1		
6	Kabupaten Mamberamo Raya							Tertinggal
	Distrik	8						
	Kampung	60			5	43	12	
7	Kabupaten Sarmi							Sangat Tertinggal
	Distrik	10						
	Kampung	92		2	9	34	47	
8	Kabupaten Supiori							Tertinggal
	Distrik	5						
	Kampung	38		3	24	11		
9	Kabupaten Waropen							Tertinggal
	Distrik	11						
	Kampung	100		3	33	37	27	

Sumber Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2023 diolah

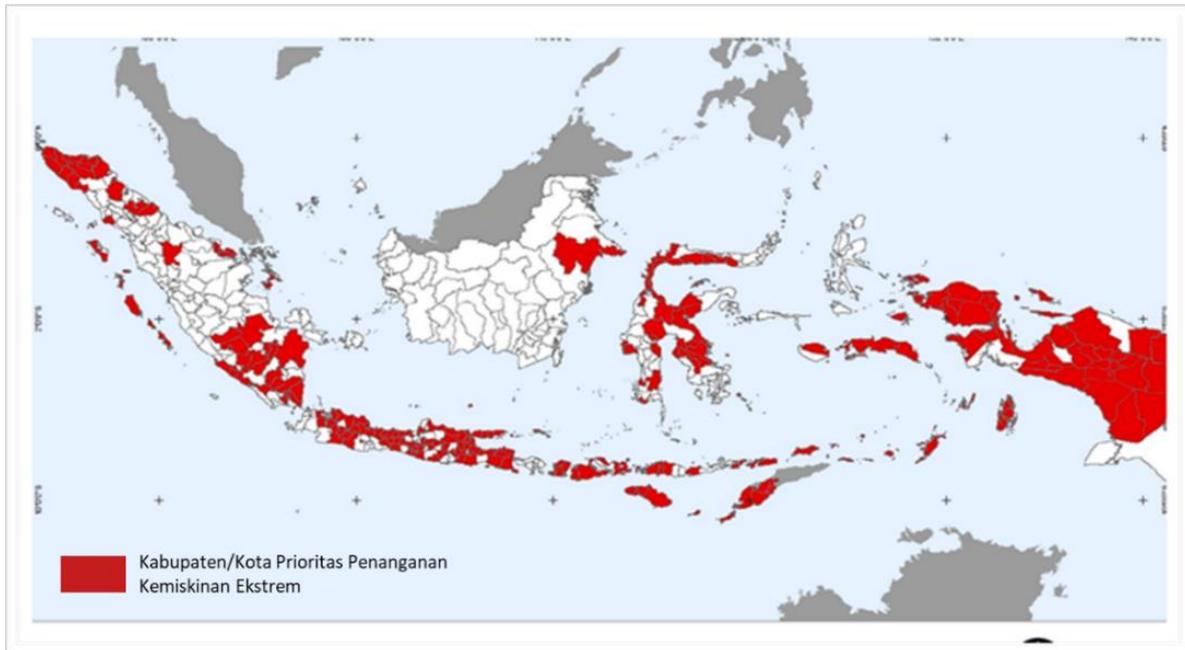
Pada Tahun 2023, Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Indeks Desa Membangun Tingkat Tahun 2023, dimana dalam Indeks Desa Membangun. Berikut disampaikan klasifikasi status data IDM tingkat Provinsi, Kabupaten, Distrik dan Kampung Se Provinsi Papua Tahun 2023. Data dimaksud menunjukan informasi bahwa secara umum dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua terdapat 2 Kabupaten/kota yang di kategorikan Berkembang, 6 kabupaten di kategorikan tertinggal dan 1 kabupaten di kategorikan sangat tertinggal (Tabel II.26).

2.2.4.2 Kemiskinan Ekstrem

Arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua akan dilaksanakan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, dengan dasar pelaksanaan program kemiskinan Ekstrem sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa pencapaian target kemiskinan ekstrem sebesar 0% di tahun 2024 dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan data yang terpadu. Berdasarkan Gambar II.18 diketahui bahwa kabupaten di Provinsi Papua termasuk dalam wilayah

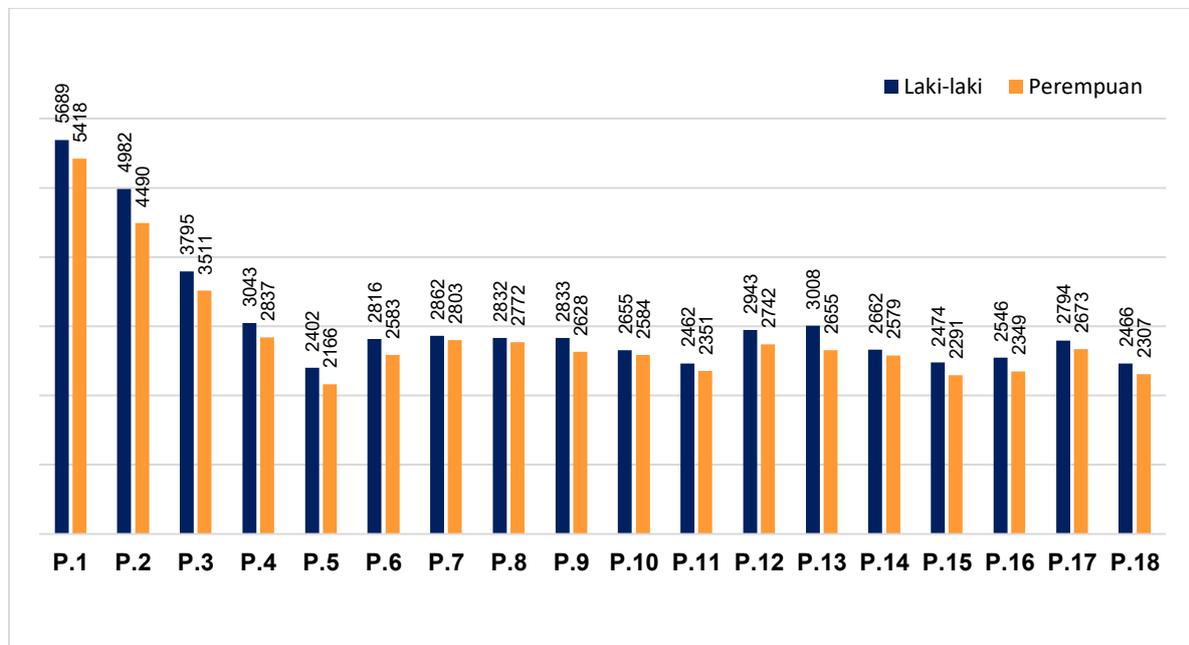
prioritas penanganan kemiskinan ekstrem yaitu Kabupaten Keerom, Jayapura, Mamberamo Raya, Waropen, Kepulauan Yapen, Supiori dan Biak Numfor.

Gambar II.18 Sebaran 212 Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia



Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2022

Gambar II.19 Sebaran Penduduk Miskin di Papua (<P18)

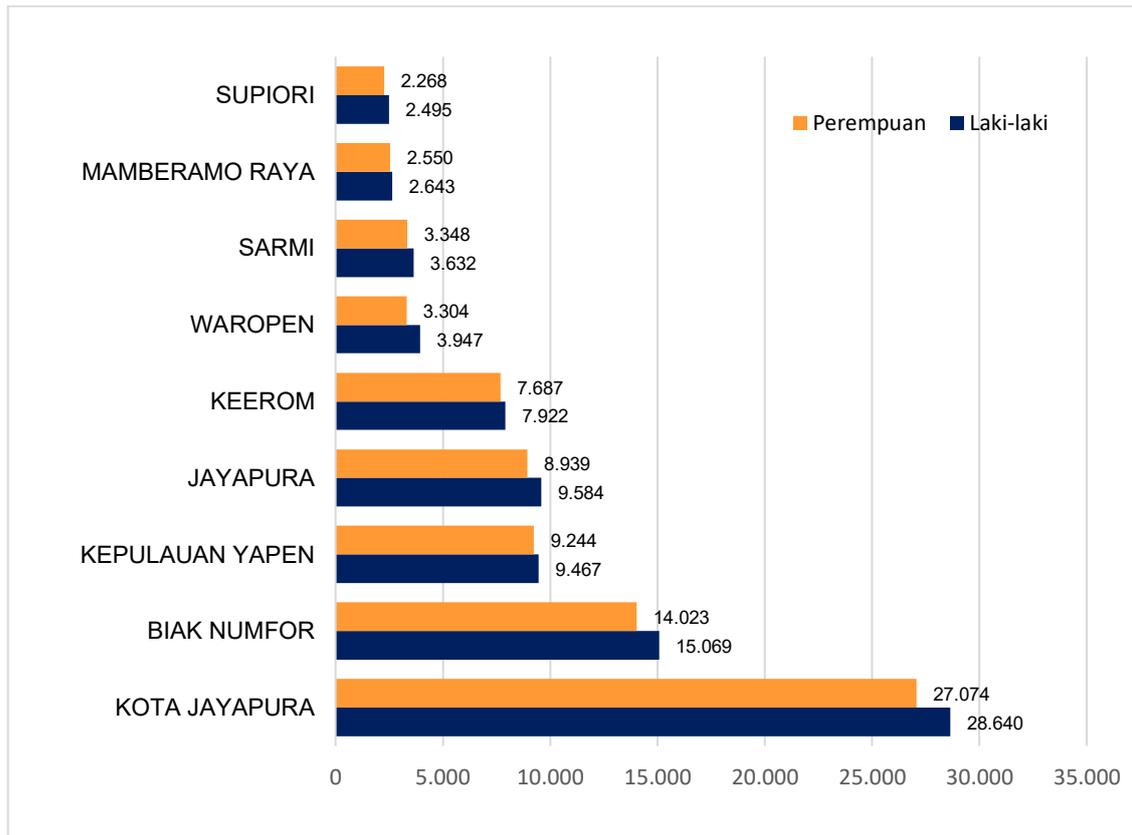


Sumber: Regsosek, 2022

Gambar II.19 dan Gambar II.20 menunjukkan sebaran penduduk miskin di Provinsi Papua (<P18) berdasarkan Regsosek (2022). Berdasarkan Gambar II.19 dan Gambar II.20 diketahui bahwa sebanyak 107.003 penduduk (17,93%) dari total 596.774 penduduk

berada pada 20% termiskin di Papua, didominasi oleh laki-laki. Dari sebarannya, penduduk miskin terkonsentrasi di 2% termiskin di Papua sebanyak 20.579 penduduk (3,44%) dari total penduduk di Papua. Mereka tergolong dalam kelompok miskin ekstrim Papua. Berdasarkan wilayahnya, penduduk miskin terkonsentrasi di Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Penanganan kemiskinan dapat difokuskan pada lokasi tersebut. Dalam hal ini, Kota Jayapura merupakan ibukota provinsi Papua – yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Papua.

Gambar II.20 Lokasi Penduduk Miskin di Papua (<P18)

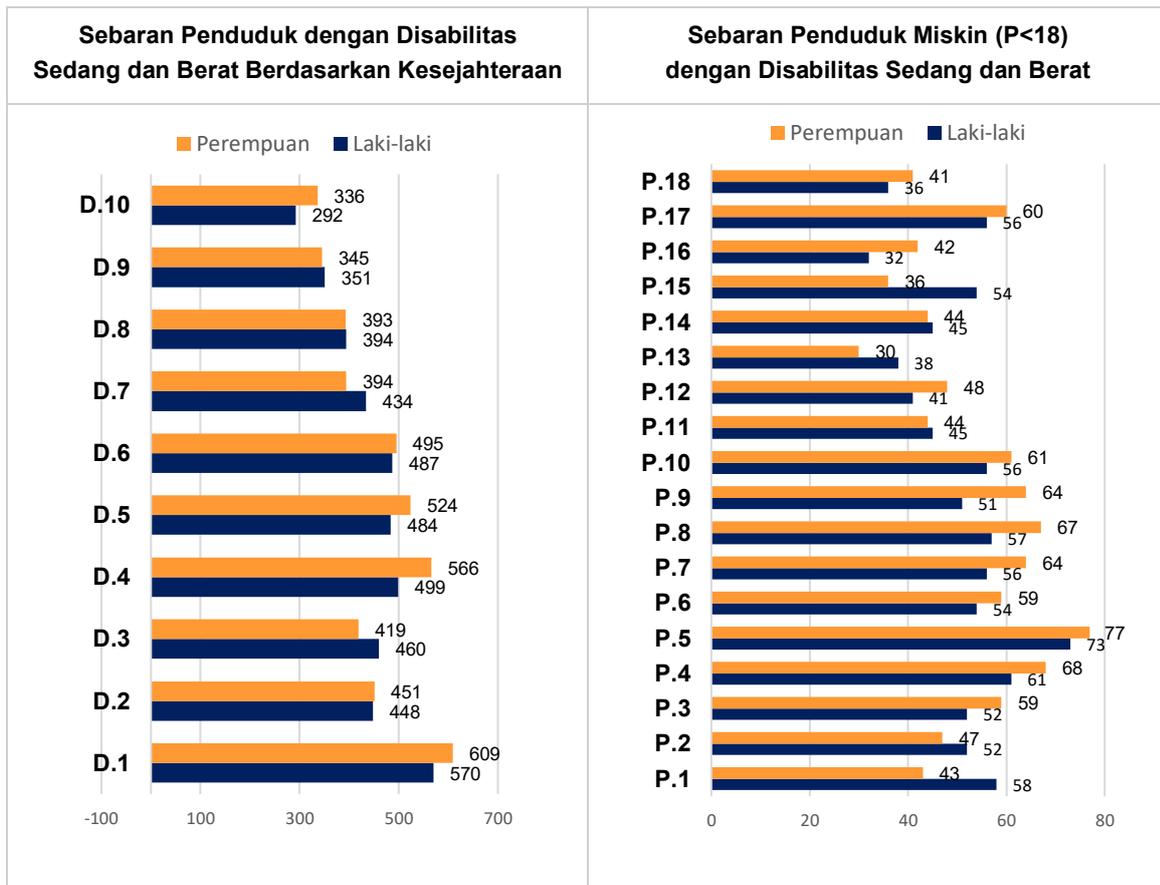


Sumber: Regsosek, 2022

2.2.4.3 Kondisi Kemiskinan Kelompok Disabilitas (Sedang dan Berat)

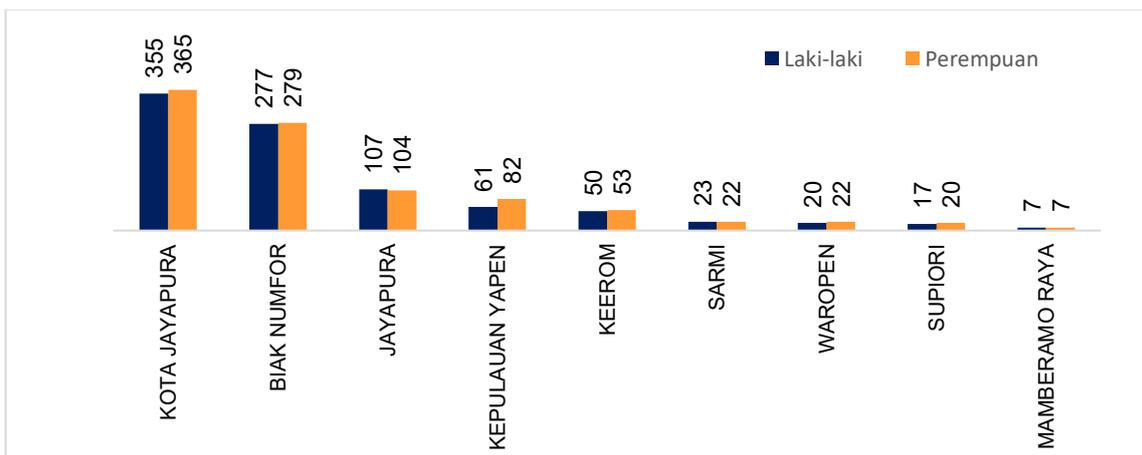
Gambar II.21 menunjukkan sebaran penduduk dengan disabilitas sedang dan berat berdasarkan kesejahteraan serta penduduk miskin (P<18) dengan disabilitas sedang dan berat di Provinsi Papua. Berdasarkan Gambar II.21 diketahui sebanyak 8.951 (1,49%) dari 596.774 penduduk di Papua mengalami disabilitas sedang dan berat yang harus diprioritaskan. Sebanyak 924(0,15%) dari total penduduk di Papua mengalami disabilitas sedang dan berat dengan status miskin. Penduduk disabilitas sedang dan berat yang berstatus miskin terbanyak berada di 5% termiskin dan berjenis kelamin Perempuan. Berdasarkan lokasinya, penyandang disabilitas di Papua dengan status miskin paling banyak berada di Kota Jayapura..

Gambar II.21 Sebaran Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat Berdasarkan Kesejahteraan serta Penduduk Miskin (P<18) dengan Disabilitas Sedang dan Berat di Provinsi Papua



Sumber: Regsosek, 2022

Gambar II.22 Persebaran Penduduk Miskin (P<18) dengan Disabilitas Sedang dan Berat di Provinsi Papua



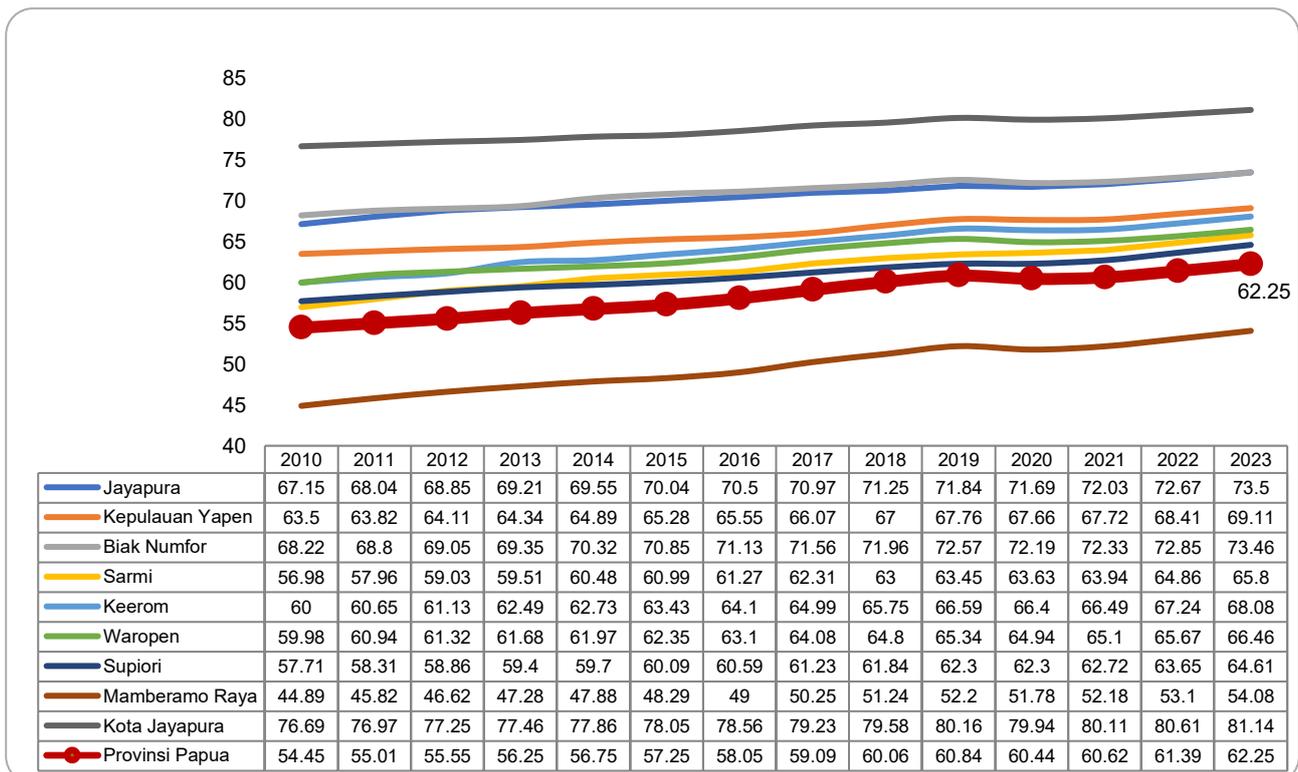
Sumber: Regsosek, 2022

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia. IPM dihitung berdasarkan 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan

sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Provinsi Papua menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia pada kurun waktu 2010-2022. Hal tersebut membuat Provinsi Papua kini berstatus “sedang” dari status sebelumnya “rendah”. Berdasarkan gambar, Kota Jayapura menjadi kota di Provinsi Papua yang memiliki IPM tertinggi pada tahun 2010-2023, sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Papua sekaligus berada di bawah garis provinsi. IPM di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota dari tahun 2010-2023 ditunjukkan pada Gambar II.23.

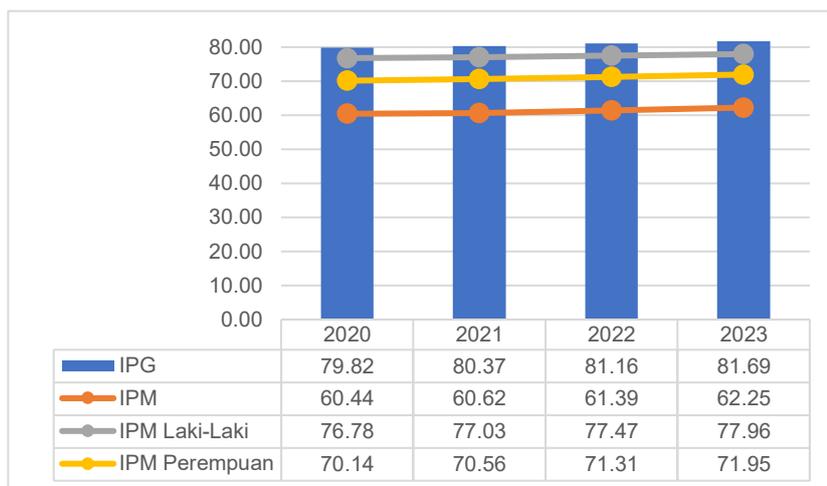
Gambar II.23 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua (data diolah)

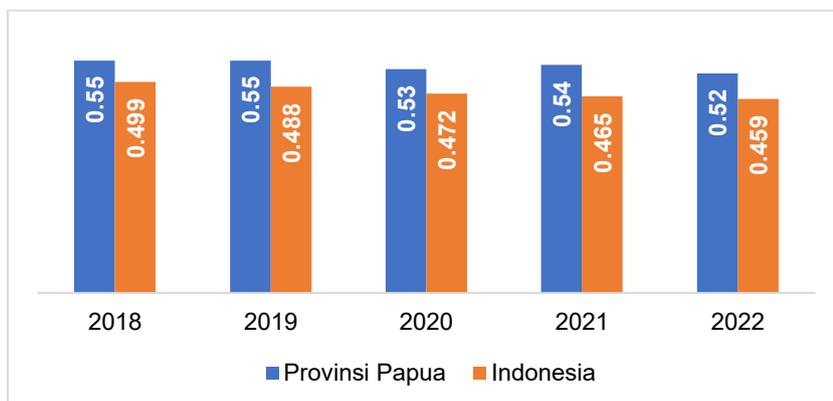
Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IPM Provinsi Papua berdasarkan gender ditunjukkan pada Gambar II.17. Berdasarkan gambar, diketahui bahwa IPM di Provinsi Papua pada tahun 2018-2022 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara jenis kelamin laki-laki maupun perempuan di Provinsi Papua digambarkan melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Diketahui juga bahwa IPG di Provinsi Papua masih berada di bawah angka 100 yang diartikan bahwa capaian Perempuan masih lebih rendah dibandingkan capaian laki-laki. Hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami peningkatan IPG menuju 100 yang menunjukkan semakin berkurangnya ketimpangan yang terjadi antara Perempuan dan laki-laki di Provinsi Papua. Adapun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Papua menunjukkan penurunan yang diartikan bahwa kesetaraan gender semakin membaik di Provinsi Papua yang ditunjukkan melalui Gambar II.18.

Gambar II.24 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Gender dan IPG di Provinsi Papua



Sumber: BPS RI, 2023 (data diolah)

Gambar II.25 Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Papua Tahun 2018-2022



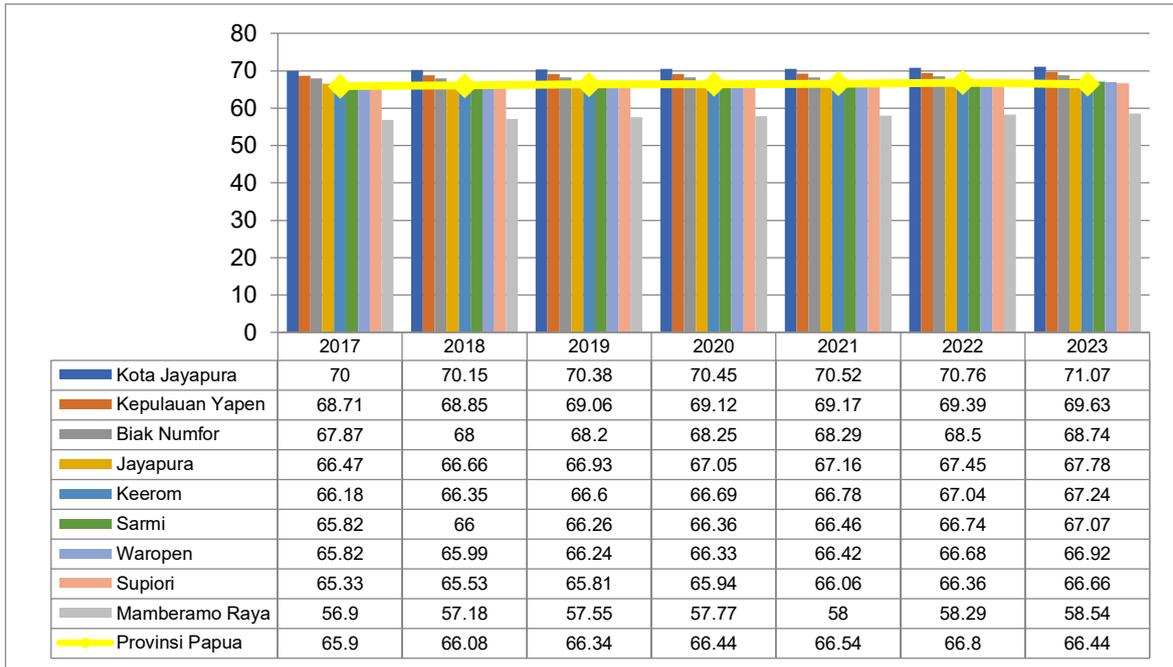
Sumber: BPS, 2024

2.2.6 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua dapat dilihat secara umum maupun berdasarkan jenis kelamin. AHH merupakan indikator penting dalam kesehatan yang dapat mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat umum pada waktu tertentu di level dampak sehingga AHH merupakan gambaran keadaan kesehatan di suatu wilayah. Faktor-faktor penentu tinggi rendahnya AHH antara lain angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit-penyakit tertentu, ketersediaan pelayanan kesehatan, dan kondisi sosio-ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, AHH menjadi komponen di bidang kesehatan dalam menentukan angka Indeks Pembangunan Manusia. Semakin tinggi AHH menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Berdasarkan Gambar II.26 diketahui bahwa AHH baik secara provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami kenaikan dari tahun 2017-2023. Kota Jayapura menjadi kota di Provinsi Jayapura dengan tingkat AHH tertinggi, sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan AHH terendah di Provinsi Papua.

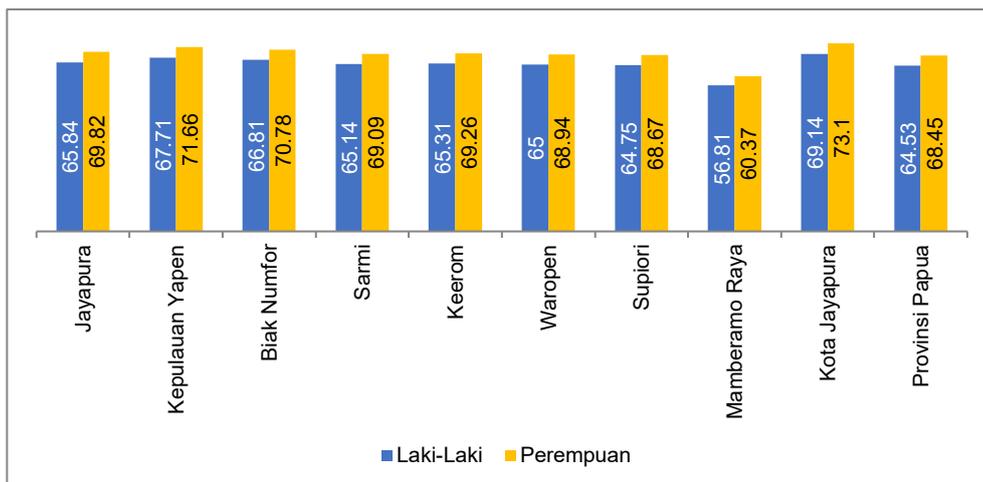
Gambar II.26 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2017-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2024

Berdasarkan Gambar II.26 diketahui bahwa Kota Jayapura menjadi kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan tingkat AHH tertinggi pada tahun 2023 untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan AHH terendah pada tahun 2023 di Provinsi Papua untuk kedua jenis kelamin. Berdasarkan gambar juga diketahui bahwa AHH pada tahun 2023 didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

Gambar II.27 Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2024 (data diolah)

Berdasarkan Gambar II.27 diketahui bahwa Kota Jayapura menjadi kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan tingkat AHH tertinggi pada tahun 2023 untuk jenis kelamin laki-laki

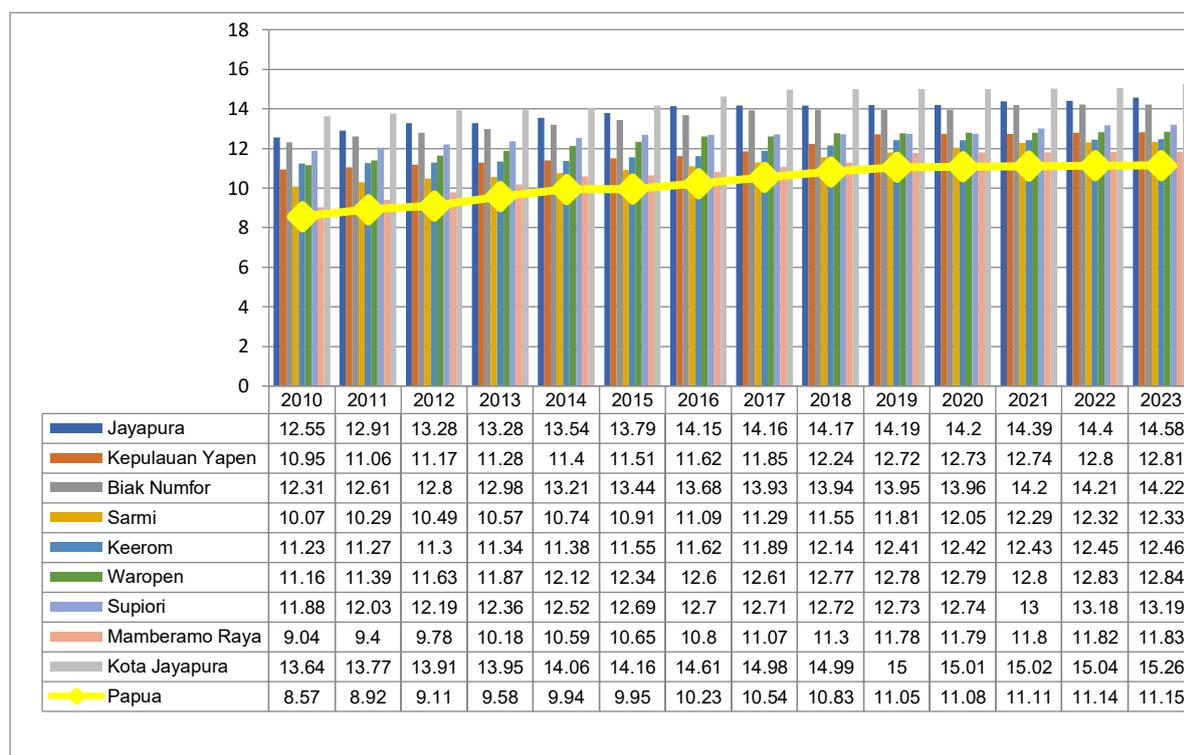
dan perempuan. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan AHH terendah pada tahun 2023 di Provinsi Papua untuk kedua jenis kelamin. Berdasarkan gambar juga diketahui bahwa AHH pada tahun 2023 didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

2.2.7 Harapan Lama Sekolah

Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan suatu indikator untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan bagi penduduk yang berada di usia sekolah oleh pemerintah. Berdasarkan kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar, HLS dihitung bagi penduduk dari usia 7 tahun ke atas.

Berdasarkan Gambar II.28, HLS di Provinsi Papua mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang. Hal tersebut membuktikan bahwa Provinsi Papua secara terus menerus meningkatkan ketersediaan dan kualitas pendidikan bagi penduduk usia sekolah di atas 7 tahun di Provinsi Papua. Kenaikan secara Provinsi juga sudah diikuti dengan kenaikan HLS pada masing-masing kabupaten/kota yang ada.

Gambar II.28 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010-2023 (Tahun)

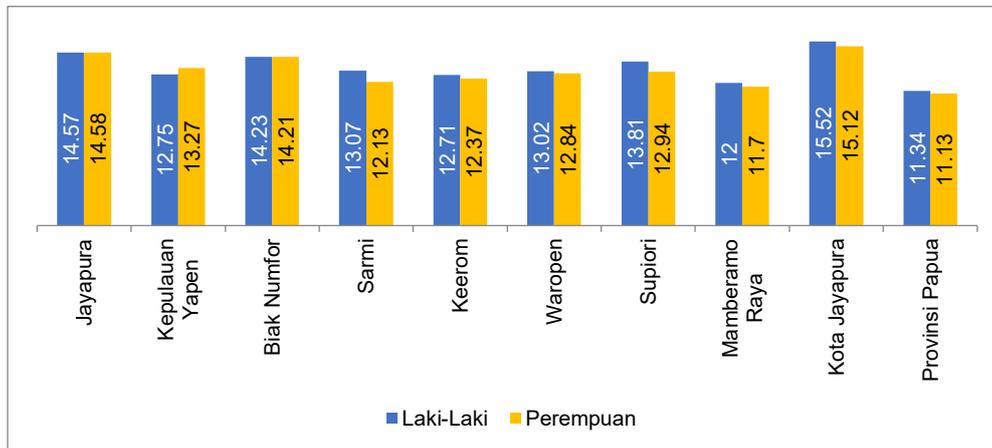


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Papua dapat dilihat secara umum maupun berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan Gambar II.29 HLS Provinsi Papua ditunjukkan melalui masing-masing kabupaten/kota berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023. Diketahui bahwa, Kota Jayapura menjadi kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan angka

HLS tertinggi untuk kedua jenis kelamin diikuti Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor. Sebaliknya, Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten di Provinsi Papua dengan angka HLS terendah pada tahun 2023. Angka HLS berdasarkan gender pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua diketahui telah berada di atas rata-rata provinsi.

Gambar II.29 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023 (Tahun)

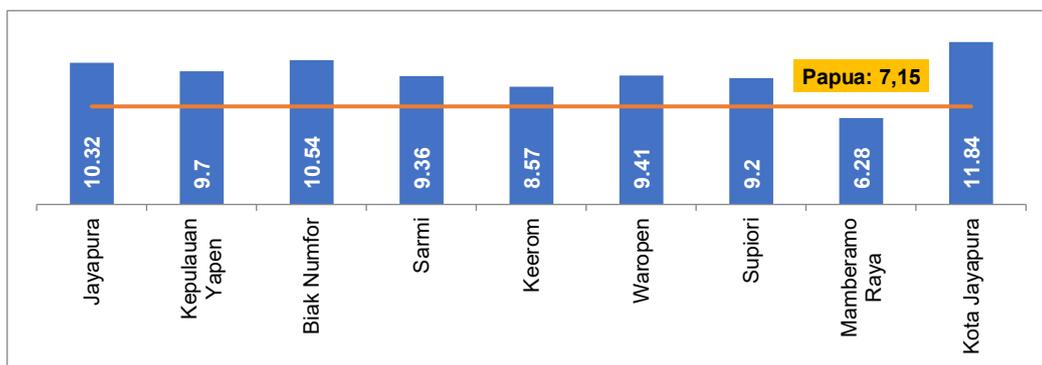


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

2.2.8 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan perhitungan jumlah tahun oleh penduduk dalam mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/ sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki.

Gambar II.30 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023 (Tahun)

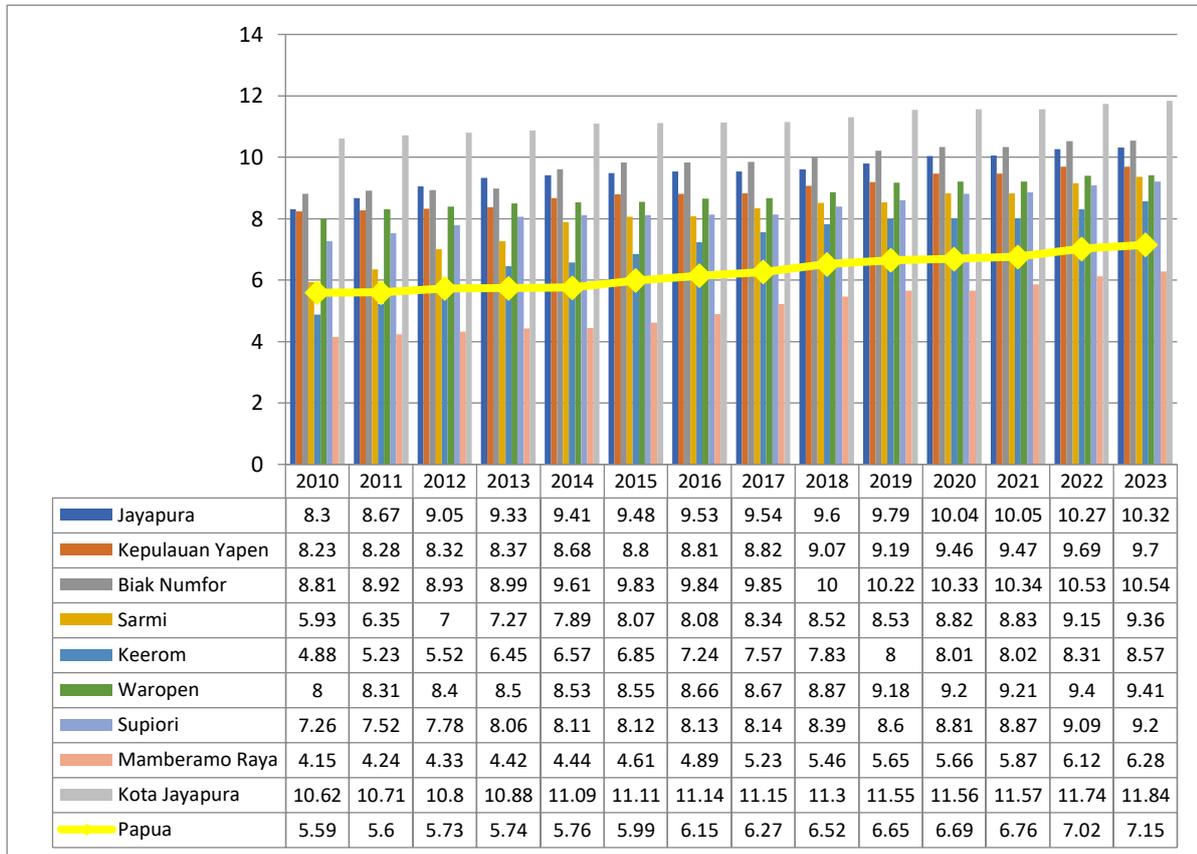


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

Berdasarkan Gambar II.30, mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Papua berada di atas rata-rata Provinsi. Masih terdapat kabupaten dengan RLS di bawah rata-rata Provinsi Papua yaitu Kabupaten Mamberamo Raya. RLS tertinggi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan RLS di Provinsi Papua menurut masing-masing kabupaten/kota mengalami peningkatan selama lebih dari 10 tahun terakhir. Secara

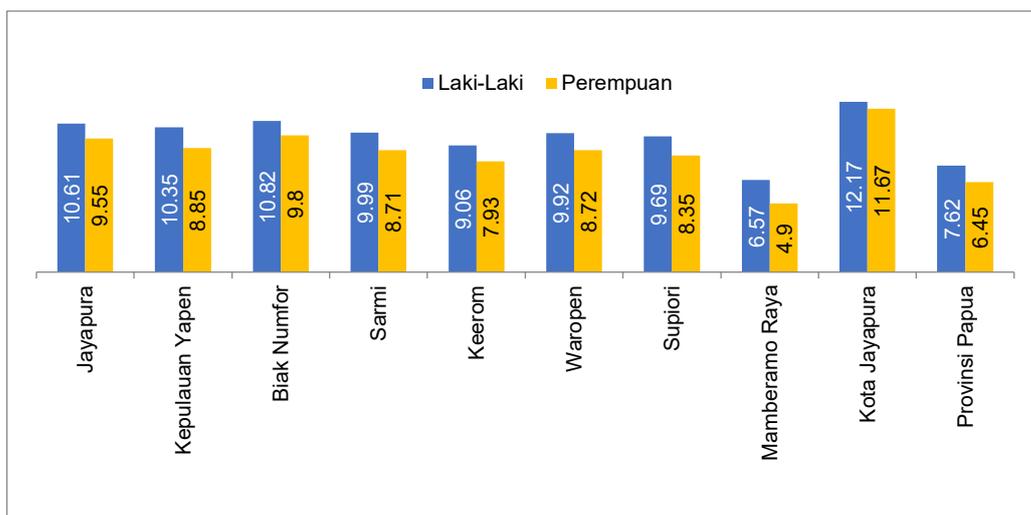
kabupaten/kota, Kota Jayapura memiliki RLS tertinggi selama lebih dari 10 tahun terakhir namun hal tersebut belum diikuti oleh Kabupaten Mamberamo Raya yang memiliki RLS masih di bawah RLS Provinsi Papua.

Gambar II.31 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010-2023 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

Gambar II.32 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023 (Tahun)



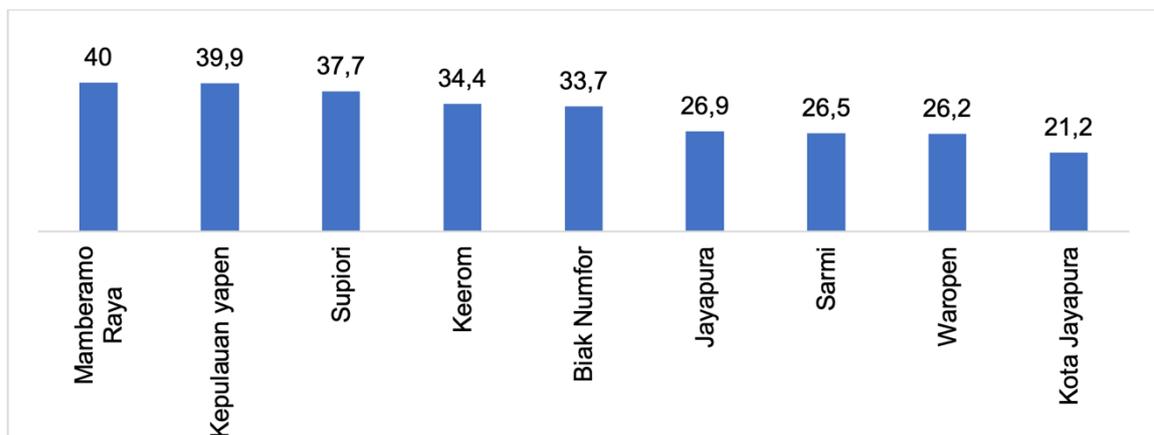
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

Gambar II.32 menunjukkan rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Papua berdasarkan gender. Angka RLS tertinggi di Provinsi Papua untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tahun 2023 adalah Kota Jayapura. Sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan RLS berdasarkan gender terendah di Provinsi Papua. Kabupaten Mamberamo Raya juga menjadi kabupaten dengan capaian RLS yang masih berada di bawah garis rata-rata secara provinsi. Berdasarkan Gambar II.32 juga dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki cenderung mendominasi perolehan RLS berdasarkan gender di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Apabila dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, Kota Jayapura cenderung memiliki capaian RLS yang hampir serupa untuk kedua jenis kelamin.

2.2.9 Prevalensi Stunting

Stunting adalah keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek berdasarkan tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga berusia 2 tahun, atau disebut 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.

Gambar II.33 Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2023



Sumber: Survey Status Gizi Indonesia, 2023

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi balita stunting di 9 kabupaten di Provinsi Papua rata-rata sebesar 26,9%. Tidak tersedia angka prevalensi untuk Provinsi Papua pasca pembentukan DOB, sebab survey dilakukan sebelum pemekaran provinsi. Berdasarkan kabupaten, prevalensi tertinggi balita stunting terdapat di Kabupaten Supiori yakni 40,2%, dan terendah di Kabupaten Jayapura sebesar 20,2%. Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, hanya Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura yang angka balita stuntingnya di bawah angka nasional, 21,6%. Tujuh kabupaten lainnya menunjukkan prevalensi di atas angka nasional.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

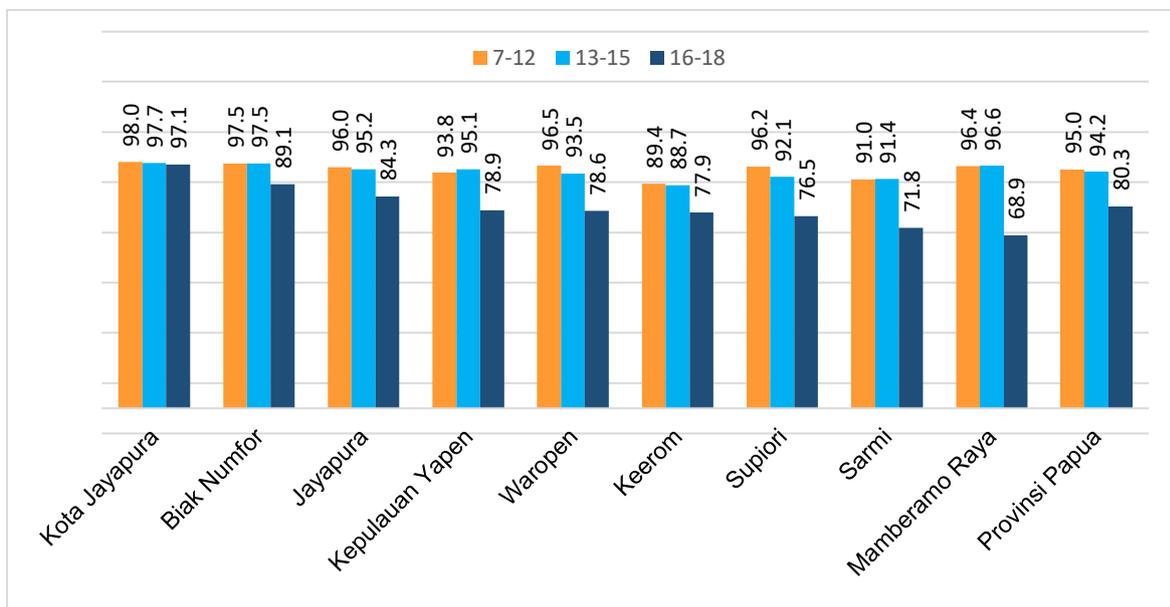
2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

2.3.1.1.1 Partisipasi Sekolah

Tingkat keikutsertaan penduduk di Provinsi Papua dalam pendidikan formal yang dinyatakan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) secara umum tidak jauh tertinggal daripada capaian nasional. APS menunjukkan jumlah dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok umur yang sama. APS cenderung menurun dengan makin tingginya kelompok umur penduduk yang juga menunjukkan jenjang Pendidikan yang sedang ditempuh. APS di Provinsi Papua pada tahun 2021 pada kelompok usia 7-12 tahun menunjukkan angka 95,0%, lebih rendah daripada angka nasional 99,1%. Sedangkan untuk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 94,2% sedikit lebih rendah daripada angka nasional 95,8%. Sementara APS untuk kelompok usia 16-18 tahun, lebih tinggi daripada angka nasional yakni 80,3% (nasional: 70,7%). Jika dilihat angka-angka kabupaten/kota, APS tertinggi untuk ketiga kelompok umur terdapat di Kota Jayapura, sedangkan kabupaten dengan angka terendah yaitu Sarmi dan Mamberamo Raya. Gambar II.34 menunjukkan APS per kabupaten/kota dan Provinsi.

Gambar II.34 Angka Partisipasi Sekolah per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021

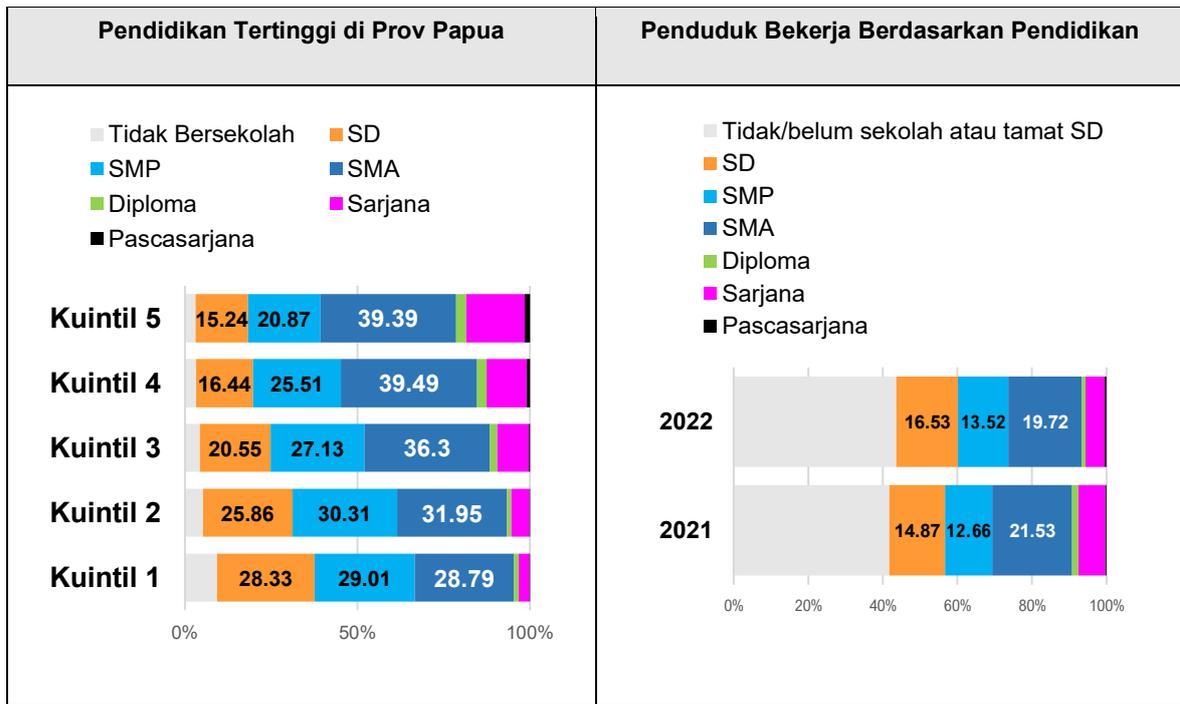


Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Gambar II.35 menunjukkan tingkat pendidikan dan penduduk bekerja berdasarkan pendidikan di Provinsi Papua berdasarkan Susenas (2023). Berdasarkan Gambar II.35 diketahui bahwa jenjang pendidikan tertinggi di Provinsi Papua didominasi oleh jenjang SMA/setara, yang terkonsentrasi pada Kuintil 3-4. Sementara itu, pendidikan tertinggi penduduk 20% termiskin didominasi oleh mereka lulusan SMP/setara. Berbeda dengan

kondisi penyerapan tenaga kerja di Papua didominasi oleh mereka yang tidak/belum sekolah yang nilainya semakin meningkat dari 2021-2022. Jenjang SMA dan SMP yang memiliki porsi yang tinggi di Papua hanya mampu menyerap 19,72% dan 13,52% dari total penduduk bekerja di Provinsi Papua. Peningkatan pendidikan yang tinggi di Provinsi Papua perlu sejalan dengan penyerapan tenaga kerja yang tersedia juga sehingga ada motivasi dari penduduknya untuk dapat mencapai Pendidikan yang tinggi.

Gambar II.35 Tingkat Pendidikan dan Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan di Papua, 2023



Sumber: Susenas 2023 dalam SEPAKAT

2.3.1.1.2 Fasilitas Pendidikan

Pada tahun ajaran 2023-2024, fasilitas pendidikan yang terdapat di Provinsi Papua adalah 255 unit TK/RA, 860 unit SD/MI, 293 unit SMP/MTs, 177 unit SMA/SMK/MA dan 31 unit Perguruan Tinggi. Sebaran fasilitas Pendidikan berdasarkan kabupaten/kota cukup merata, kecuali perguruan tinggi hanya terdapat di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Biak Numfor.

Tabel II.27 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Papua Tahun Ajaran 2023/2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan				
		TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	PT
1	Jayapura	53	144	54	35	5
2	Kepulauan Yapen	15	125	37	20	2
3	Biak Numfor	20	167	56	28	6
4	Sarmi	10	67	21	10	0
5	Keerom	51	84	21	13	0
6	Waropen	3	54	19	8	0
7	Supiori	30	40	14	9	0

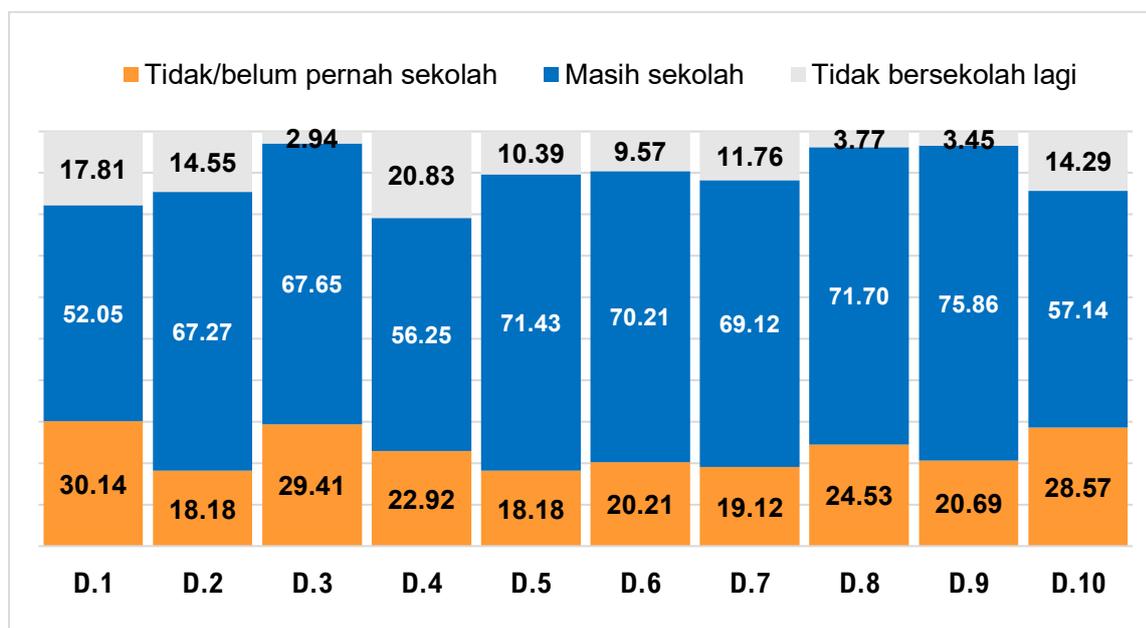
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan				
		TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	PT
8	Mamberamo Raya	5	73	22	6	0
9	Kota Jayapura	68	106	49	48	18
Total		255	860	293	177	31

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, 2023

2.3.1.1.3 Pendidikan Khusus

Gambar II.36 menunjukkan persentase penduduk dengan disabilitas sedang dan berat berdasarkan partisipasi sekolah di Papua berdasarkan Regsosek (2022). Dari total 596.774 penduduk di Papua yang mengalami disabilitas sedang dan berat, diantaranya terdapat 538 anak usia sekolah (7-18 tahun). Mayoritas anak usia sekolah yang disabilitas sedang dan berat yang masih bersekolah, yaitu sebesar 357 penduduk (66,36%). Sisanya, sebanyak 120 penduduk (22,30%) tidak/belum sekolah dan 61 penduduk (11,33%) tidak sekolah lagi. Mereka yang tidak bersekolah, secara proporsinya paling banyak berada di kelompok rentan (< 40% Termiskin). Artinya, bukan hanya berkaitan dengan ekonomi saja tetapi juga soal akses dan fasilitas yang kurang memadai sehingga baik kelompok miskin maupun rentan tidak/belum bersekolah.

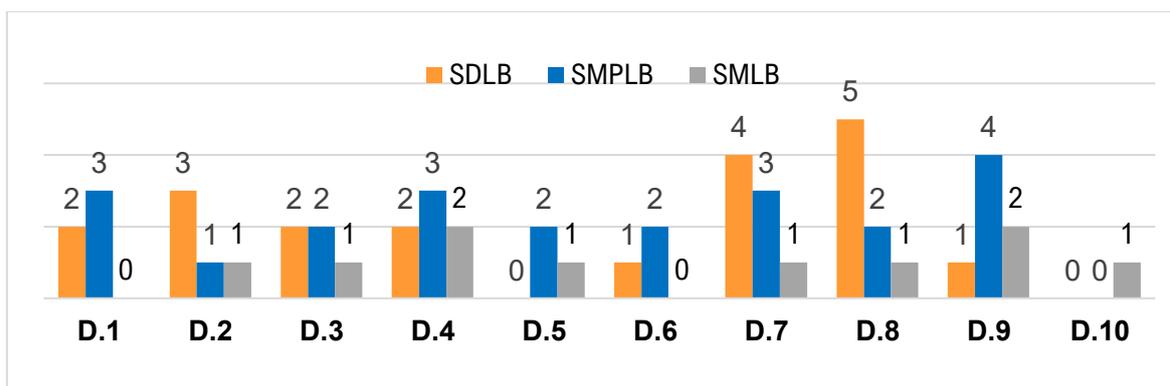
Gambar II.36 Persentase Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat Berdasarkan Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

Gambar II.37 menunjukkan Sebaran penduduk dengan disabilitas sedang dan berat yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa di Provinsi Papua berdasarkan Regsosek (2022). Berdasarkan Gambar II.37 diketahui hanya terdapat 52 penduduk dari total 357 penduduk disabilitas sedang dan berat yang masih bersekolah, bersekolah di Sekolah Luar Biasa. Padahal penduduk dengan disabilitas sedang dan berat membutuhkan pendamping/sistem pendidikan khusus.

Gambar II.37 Sebaran Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat yang Bersekolah di Sekolah Luar Biasa di Provinsi Papua



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

2.3.1.2 Kesehatan

2.3.1.2.1 Angka Kematian Bayi

Salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Bayi (AKB) yang menunjukkan jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Menurut hasil Sensus Penduduk 2020, AKB di Provinsi Papua sebelum pemekaran Provinsi sebesar 38,2 per 1.000 Kelahiran Hidup. Angka ini lebih dari 2 kali lipat angka nasional yang besarnya 16,9 per 1.000 Kelahiran Hidup. Sedangkan data per kabupaten/kota berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2023 menjadi 14 per 1.000 KH.

Tabel II.28 Angka Kematian Bayi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah kematian bayi	Jumlah kelahiran hidup	AKB/1000 KH
1	Sarmi	18	558	32
2	Mamberamo Raya	3	285	11
3	Kota Jayapura	25	5036	5
4	Jayapura	70	2,588	27
5	Supiori	2	202	10
6	Biak Numfor	36	3306	11
7	Keerom	7	1015	7
8	Kepulauan Yapen	33	1489	22
9	Waropen	4	132	30
Provinsi Papua		198	14,611	14

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2023

2.3.1.2.2 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian IBU (AKI) adalah indikator penting lainnya dalam mengukur derajat Kesehatan Masyarakat. AKI adalah banyaknya kematian perempuan sejak saat hamil hingga 42 hari sejak berakhirnya kehamilan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, AKI di Provinsi Papua sebelum pembentukan DOB adalah 565 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini 3 kali lebih tinggi daripada angka nasional yakni 189 per 100.000 kelahiran hidup

Laporan Dinas Kesehatan Tahun 2023 menunjukkan angka yang lebih rendah daripada angka nasional. Sama halnya dengan angka kematian bayi, ada kemungkinan pencatatan dan pelaporan dari tingkat kabupaten ke bawah tidak cukup lengkap dan teratur sehingga terdapat perbedaan antara angka laporan Dinas Kesehatan dan angka hasil sensus penduduk.

Tabel II.29 Angka Kematian Ibu Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah kematian ibu	Jumlah kelahiran hidup	AKI/100.000 KH
1	Sarmi	2	558	358
2	Mamberamo Raya	1	285	351
3	Kota Jayapura	6	5.036	119
4	Biak Numfor	2	3.306	60
5	Kepulauan Yapen	5	1.489	336
6	Jayapura	9	2.588	348
7	Supiori	-	202	0
8	Keerom	2	1.015	197
9	Waropen	-	132	0
Provinsi Papua		27	14,611	185

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2023

2.3.1.2.3 Fasilitas Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit Umum dan Puskesmas di Provinsi Papua jika dilihat dari sebaran wilayah telah cukup memadai, yakni telah tersedia setidaknya 1 Rumah Sakit di setiap kabupaten, serta jumlah puskesmas berdasarkan jumlah distrik di tiap kabupaten/ kota. Tabel berikut menampilkan jumlah RS dan Puskesmas di tiap kabupaten pada tahun 2022.

Tabel II.30 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum	Puskesmas (Terakreditasi)
Jayapura	1	19
Kepulauan Yapen	1	8
Biak Numfor	2	10
Sarmi	1	8
Keerom	1	1
Waropen	1	7
Supiori	1	2
Mamberamo Raya	1	-
Kota Jayapura	9	5
Papua	18	60

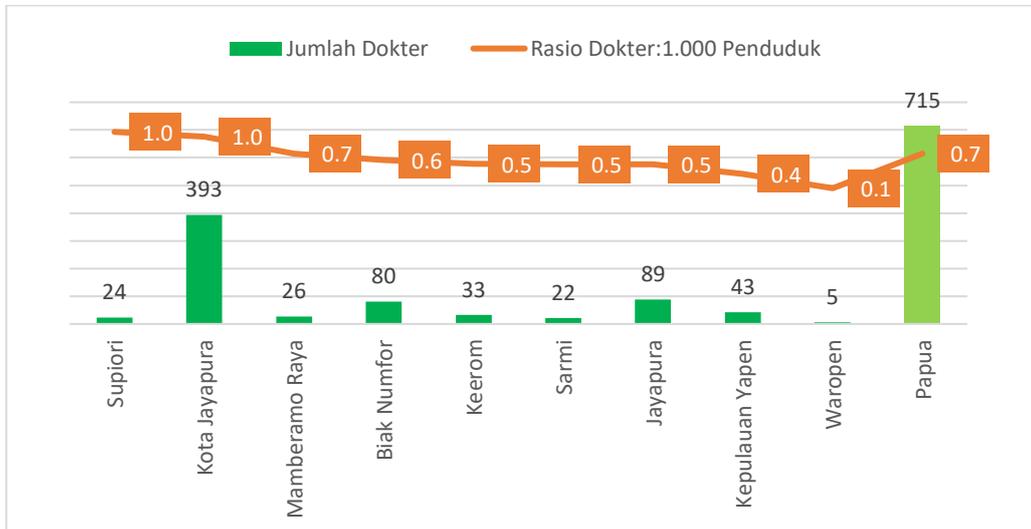
Sumber: LKJ Dinkes Provinsi Papua, 2023

2.3.1.2.4 Tenaga Kesehatan

Sebaran tenaga Kesehatan berdasarkan kabupaten/kota menunjukkan jumlah yang belum memenuhi standar dibandingkan dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Dari segi kuantitas, tenaga perawat dan bidan menunjukkan jumlah yang cukup tinggi di semua kabupaten/kota, seperti ditunjukkan oleh Tabel II.31. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, untuk tenaga dokter umum baru 2 kabupaten yang telah memenuhi standar

WHO yaitu 1 dokter untuk 1.000 penduduk, yakni Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura. Dalam tingkat provinsi, rasio dokter per 1000 penduduk baru mencapai 0,7.

Gambar II.38 Rasio Dokter Umum per 1.000 Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022



Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, BPS, 2023 (diolah)

Tabel II.31 Jumlah Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Jayapura	89	461	241	74	51
Kepulauan Yapen	43	411	134	36	28
Biak Numfor	80	556	266	58	30
Sarmi	22	196	139	20	13
Keerom	33	234	114	30	29
Waropen	5	133	38	7	8
Supiori	24	177	71	15	13
Mamberamo Raya	26	130	58	12	8
Kota Jayapura	393	1 293	305	193	95
Papua	715	2298	1366	445	275

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, BPS, 2023

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

Secara keseluruhan, total panjang jalan di Provinsi Papua pada tahun 2021 mencapai 7.244,5km, yang terdiri dari 874,0km jalan Nasional, 1.275,4 km jalan Provinsi, dan 5.095,1km jalan Kabupaten/kota. Jaringan jalan dengan kondisi aksesibilitas terpanjang di Provinsi Papua terdapat pada Kabupaten Jayapura dengan total 1.194,9 km (66,4%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua. Sedangkan kabupaten Supiori merupakan wilayah dengan aksesibilitas yang paling rendah di Provinsi Papua dengan

282,4 km (1,57%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua (lihat Tabel II.30).

Tabel II.32 Panjang Jalan Menurut Kewenangant di Provinsi Papua (km)

No	Kabupaten	PanjangJalan(km)			Jumlah
		Nasional	Provinsi	Kabupaten/Kota	
1	Jayapura	192,2	384	618,7	1.194,9
2	Kep.Yapen	75,3	148,1	511,3	734,7
3	BiakNumfor	75,6	344	712,1	1.131,7
4	Sarmi	179,2	37,7	638,2	855,1
5	Keerom	256,7	86,8	673,7	1.017,2
6	Waropen	0	46	448,1	494,1
7	Supiori	0	79,2	203,2	282,4
8	MemberamoRaya	0	65,6	1.031,5	1.097,1
9	KotaJayapura	95	84	258,3	437,3
Total		874	1.275,4	5.095,1	7.244,5

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2025 (Data diolah)

Pada tabel berikut, dapat dilihat Panjang Jalan per kabupaten dengan kondisi aksesibilitas beraspal dan kondisi lainnya. Kondisi jalan beraspal terpanjang di Provinsi Papua terdapat pada Kabupaten Jayapura dengan total 384,1 km (31,42%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua. Kabupaten Sarmi merupakan wilayah dengan aksesibilitas dan mobilitas yang paling rendah di Provinsi Papua dengan 37,7 km (3,08%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua (lihat Tabel II.30).

Tabel II.33 Panjang Jalan di Provinsi Papua (km)

Kabupaten/Kota	Aspal	Lainnya	Total
Jayapura	178	206.1	384.1
Kepulauan Yapen	58	117.01	175.01
Biak Numfor	164.4	7.6	172
Sarmi	0	37.7	37.7
Keerom	12	79.8	91.8
Waropen	45.5	57	102.5
Supiori	30	49.21	79.21
Mamberamo Raya	0	75.6	75.6
Kota Jayapura	96.38	8	104.38
Provinsi Papua	584.28	638.02	1.222.3

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023 (Data diolah)

2.3.1.3.2 Penataan Ruang

Rencana tata ruang wilayah atau RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen acuan spasial yang dijadikan dasar dalam melakukan pembangunan. Kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Papua dilihat dari Persentase luas kawasan peruntukannya sesuai dengan RTRW menunjukkan kesesuaian

dengan angka 97 ditahun 2023. meskipun angka ditahun 2022 kesesuaian dengan angka 98,18 menunjukkan penurunan di tahun 2023, angka capaian ini relatif bagus.

Tabel II.34 Presentase Ketaatan Terhadap Pelaksanaan RTRW Provinsi Papua

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Presentase Ketaatan terhadap RTRW	85,00	96,00	97,86	98,18	97,00

Sumber : Bapperida Provinsi Papua Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2013, pada tahun 2021 telah dilaksanakan Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Papua dan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk memenuhi standar kesehatan perumahan bagi masyarakat terutama Orang Asli Papua. Jumlah rumah layak huni selama tahun 2016-2022 dapat dilihat pada Tabel II.35.

Tabel II.35 Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Papua 2016-2022

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Swadaya (Unit)		1000	1680	2700	1768	1840	380	1089
1	Biak Numfor	300	320	450	160	100	-	35
2	Jayapura	200	-	725	431	261	66	162
3	Keerom	-	-	615	190	100	129	177
4	Kepulauan Yapen	-	-	290	166	250	165	165
5	Mamberamo Raya	-	270		70	150	-	-
6	Sarmi	-	200		196	185	-	-
7	Supiori	200	550		180	100	-	-
8	Waropen	-	190	160	170	250	-	-
9	Kota Jayapura	300	150	460	205	444	20	550
Rumah Khusus		247	129	35	25	61	0	20
1	Biak Numfor	87	25	10	-	-	-	-
2	Jayapura	50	25	25	-	12	-	-
3	Keerom	-	-	-	25	-	-	-
4	Kepulauan Yapen	110	25	-	-	-	-	20

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	Mamberamo Raya	-	25	-	-	-	-	-
6	Sarmi	-	10	-	-	20	-	-
7	Supiori	-	19	-	-	-	-	-
8	Waropen	-	-	-	-	29	-	-
9	Kota Jayapura	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan PSU							295	546
1	Biak Numfor						-	-
2	Jayapura						60	92
3	Keerom						-	-
4	Kepulauan Yapen						-	-
5	Mamberamo Raya						-	-
6	Sarmi						-	-
7	Supiori						-	-
8	Waropen						-	-
9	Kota Jayapura						235	454

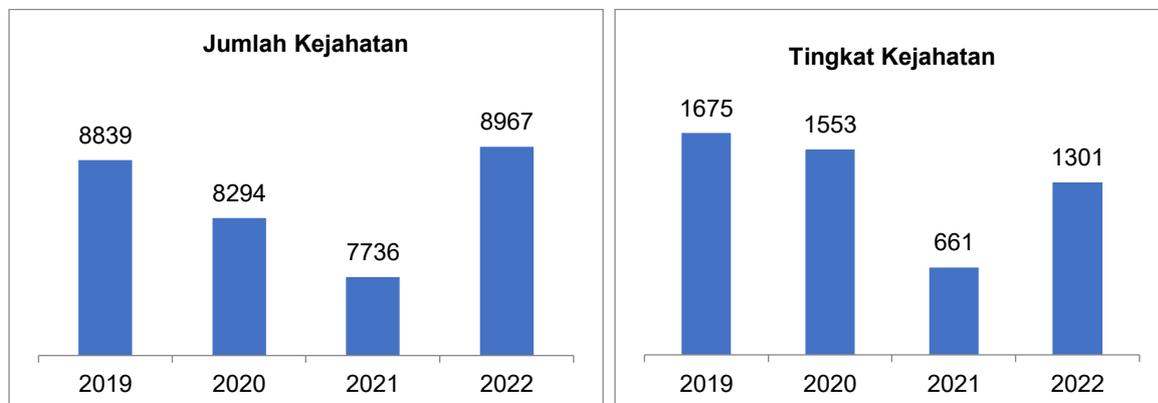
Sumber : data RTLH dari aplikasi e-RTLH yang sudah di input oleh Kabupaten/ Kota (Periode 12 September 2022)

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.5.1 Penurunan Tingkat Kriminalitas

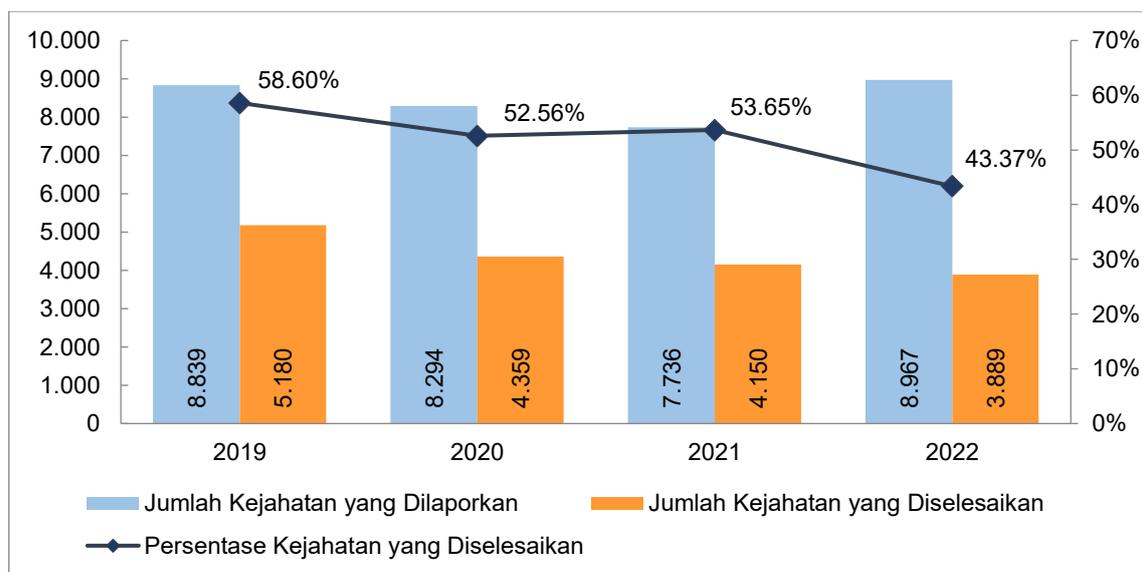
Perkembangan tindak kejahatan terlihat dari rasa aman yang di rasakan masyarakat. Data dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, yang diartikan bahwa semakin tinggi tindak pidana menunjukkan semakin tinggi risiko masyarakat terhadap tindak pidana yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Dalam konteks lebih luas, terdapat indikator angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Gambar II.39 menunjukkan jumlah kejahatan dan tingkat risiko kejahatan di Papua tahun 2019-2022.

Gambar II.39 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022



Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Gambar II.40 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Diselesaikan, dan Persentase yang Diselesaikan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022



Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Gambar II.39 menunjukkan jumlah kejahatan sempat mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 7.736 kejadian. Jumlah kejahatan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 8.967 kejadian. Tingkat kejahatan juga mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 661 kejadian namun kembali meningkat menjadi 1.301 kejadian pada tahun 2022. Adapun jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2022, dapat diselesaikan dengan capaian 43,37%. Persentase tersebut cenderung menurun bila dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 53,65%. Selang waktu terjadinya tindak kejahatan (*crime clock*) pada tahun 2019 adalah 01.00'32" (1 jam 32 detik) yang kemudian memanjang menjadi sebesar 1.03'32" (1 jam 3 menit 32 detik) pada tahun 2020. Interval terjadinya tindak kejahatan juga menjadi semakin panjang yaitu pada tahun 2021 menjadi sebesar 01.07'56" (1 jam 7 menit 56 detik). Berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya, interval pada tahun 2022 memendek menjadi 00.58'37" (58 menit 37 detik). Interval waktu yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun dan sebaliknya.

Tabel II.36 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Diselesaikan, dan Persentase yang Diselesaikan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022

Jenis Kejahatan		Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan				Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan				Persentase yang Diselesaikan			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan	35	35	39	51	21	20	30	34	60	57,14	76,92	66,76
	Kejahatan terhadap Fisik/Badan												
	Penganiayaan Ringan												
	Penganiayaan Berat	1482	1446	1538	1513	1081	986	1155	956	72,94	68,19	75,1	63,19
	Kekerasan dalam Rumah Tangga												
Kejahatan terhadap Kesusilaan	Perkosaan	110	85	110	91	80	57	99	67	72,73	67,06	90	73,63
	Pencabulan												

Jenis Kejahatan		Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan				Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan				Persentase yang Diselesaikan			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur												
Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)												
	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)												
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian	3679	3936	3611	4079	1831	1733	1531	1353	49,77	44,03	42,4	33,17
	Pencurian dengan pemberatan												
	Pencurian Kendaraan Bermotor												
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang												
	Pembakaran dengan Sengaja												
Penadahan													
Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika	110	133	68	96	109	124	57	86	99,09	93,23	83,82	89,58
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan/ Perbuatan Curang	1226	1167	1035	1099	745	606	471	935	60,77	51,93	45,51	85,08
	Penggelapan												
	Korupsi												
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum	113	177	287	118	67	42	203	50	59,29	23,73	70,73	42,37

Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Diketahui bahwa jenis kejahatan dengan jumlah laporan tertinggi adalah Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang. Pada tahun 2022, jumlah laporan terkait kejahatan ini menembus sebanyak 4.079 laporan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3.611 laporan. Meskipun kejahatan jenis ini memiliki jumlah laporan tertinggi, namun jumlah maupun persentase yang diselesaikan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Pada tahun 2022, jenis kejahatan ini mampu diselesaikan dengan persentase 33,17% berkurang dibandingkan pada tahun 2021 yaitu 42,4%. Kejahatan terhadap fisik dan badan juga menjadi jenis kejahatan dengan laporan terbanyak. Pada tahun 2022, jumlah laporan kejahatan jenis ini mencapai 1.513 laporan. Jumlah laporan cenderung menurun dibandingkan tahun 2021 namun meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2019 dan 2020 yang berkisar pada angka 1400-an laporan. Kejahatan terkait narkotika menjadi salah satu kejahatan dengan jumlah maupun persentase tertinggi yang diselesaikan. Pada tahun 2019, diketahui bahwa sebesar 99,09% jenis kejahatan ini dapat diselesaikan sebelum mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 83,82% dan kembali meningkat menjadi 89,58% pada tahun 2022.

Tabel II.37 Karakteristik Penduduk Papua Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2019-2022

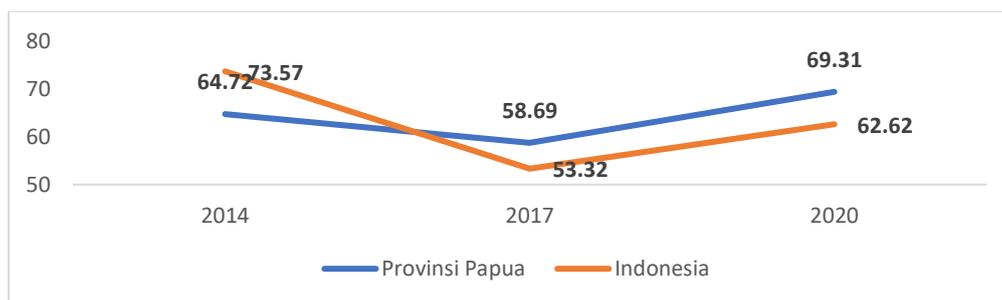
Korban Kejahatan	Laki-Laki				Perempuan			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Terhadap Nyawa	87,1	73,91	76,19	95,83	12,9	26,09	23,81	4,17
Terhadap Fisik/Badan	67,02	75,66	63,66	80,53	32,98	24,34	36,34	19,47
Terhadap Kesusilaan	1,59	0	4,29	54,84	98,41	100	95,71	45,16
Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	66,67	63,39	62,07	86,05	33,33	36,61	37,93	13,95

Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Diketahui bahwa mayoritas korban kejahatan terhadap nyawa, fisik/badan, dan hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan terjadi pada jenis kelamin laki-laki. Sebaliknya, korban kejahatan terhadap kesusilaan terjadi paling banyak terhadap jenis kelamin perempuan.

Unsur rasa aman juga menjadi kebutuhan dan hak dasar setiap orang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Oleh sebab itu, rasa aman diperlukan sebagai dasar ketertiban Masyarakat untuk mencapai perencanaan Pembangunan khususnya di Provinsi Papua. Berdasarkan data Susenas Modul Hansos pada Gambar II.41, proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di Provinsi Papua adalah sebesar 69,31 pada tahun 2020. Proporsi ini meningkat dibandingkan pada tahun 2017 dengan proporsi sebesar 58,69.

Gambar II.41 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya di Provinsi Papua Tahun 2014-2020



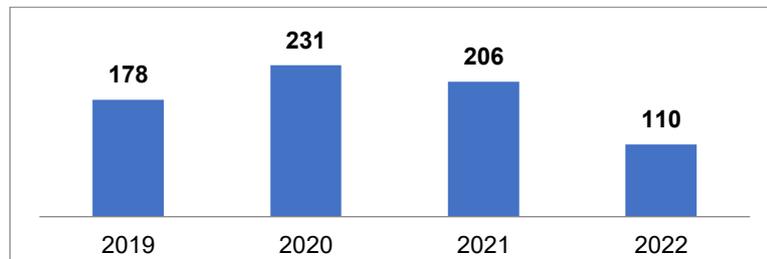
Sumber: Susenas Modul Hansos dalam BPS, 2020

2.3.1.5.2 Unsur Penegak Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Aspek pertahanan keamanan merupakan faktor hakiki guna menjamin kelangsungan hidup negara. Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu tingginya intensitas kejahatan, khususnya kejahatan konvensional. Salah satu faktor tersebut adalah komposisi penduduk.

Komposisi penduduk di Provinsi Papua yang multikultur dan multi agama menyimpan kerawanan konflik antar kelompok apabila hubungan antar kelompok tidak dikelola dengan baik. Jumlah personil keamanan (Polisi) juga mempengaruhi kondisi lingkungan. Jumlah personil keamanan yang mencukupi akan semakin memudahkan pengawasan terhadap kondisi lingkungan.

Gambar II.42 Rasio Penduduk Terhadap Personil Polisi di Provinsi Papua Tahun 2019-2022

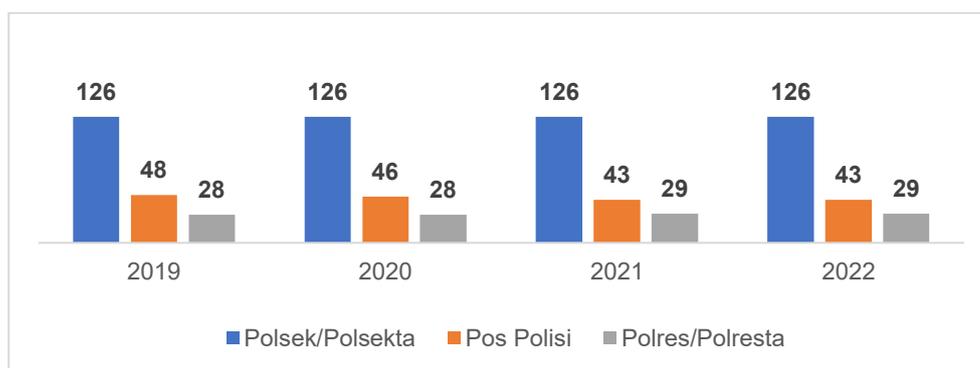


Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan Gambar II.42, diketahui bahwa pada tahun 2022 rasio penduduk terhadap personil polisi di Provinsi Papua adalah 1:110. Hal ini diartikan bahwa 1 polisi berbanding 110 penduduk di Papua. Pada kondisi ideal, rasio polisi dan penduduk adalah 1:350, yang artinya 1 polisi berbanding 350 penduduk. Berdasarkan hal tersebut, maka rasio penduduk terhadap polisi di Provinsi Papua sudah mencapai kondisi ideal tiap tahunnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022.

Keamanan suatu wilayah juga perlu ditinjau berdasarkan sarana keamanan yang ada. Jumlah sarana keamanan di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar II.33. Jumlah Polsek/Polsekta tetap sama sejak tahun 2019 hingga 2022. Jumlah pos polisi mengalami penurunan dari 48 unit di tahun 2019 menjadi 43 unit pada tahun 2022. Sementara Polres/Polresta mengalami penambahan 1 unit pada tahun 2021 menjadi 29 unit.

Gambar II.43 Jumlah Sarana Keamanan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022



Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Guna menjaga ketentraman, ketertiban, dan melindungi masyarakat, diperlukan adanya campur tangan masyarakat dan pemerintah. Unsur pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai

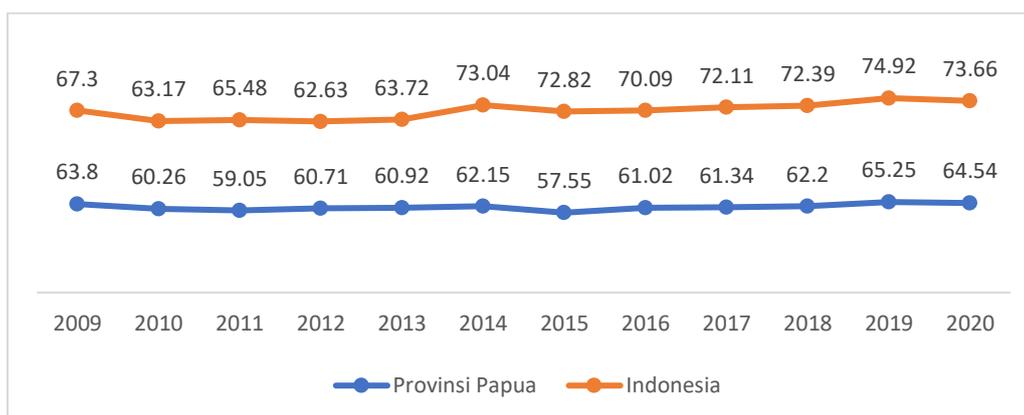
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Salah satu prasyarat dalam pelaksanaan pembangunan adalah mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib. Pengamanan dari Satpol PP dan personil Linmas dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut khususnya pada lokasi yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Di lain sisi, diperlukan juga kesadaran serta kepatuhan masyarakat untuk mendukung hal tersebut.

2.3.1.5.3 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit untuk menunjukkan tingkat perkembangan dan penerapan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2009-2020, IDI Provinsi pernah mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga mencapai angka dibawah angka 60. Perkembangan IDI di Provinsi Papua ditunjukkan melalui Gambar II.44.

Gambar II.44 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua Tahun 2009-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2020

Per tahun 2021, perhitungan IDI sudah menggunakan metode baru dengan 3 aspek penyusun yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia dalam BPS, pada tahun 2021 IDI di Provinsi Papua mencapai angka 66,39 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 66,65. Kenaikan angka menuju 100 menandakan bahwa kinerja demokrasi di Provinsi Papua semakin meningkat.

IDI Provinsi Papua masih berada dalam kategori “**sedang**”, meskipun begitu terdapat perubahan signifikan pada capaian aspek penyusun IDI seperti pada capaian Aspek Kesetaraan yang melampaui Aspek Kebebasan. Meskipun keseluruhan aspek masih berada dalam kategori "sedang", namun peningkatan yang terjadi menandai pergeseran fokus dalam pembangunan demokrasi, penekanan pemberdayaan kesetaraan tetapi juga menegaskan perlunya perbaikan dalam kapasitas lembaga demokrasi.

Tabel II.38 Capaian IDI Provinsi Papua Berdasarkan Aspek dan Indikator Penyusunnya 2021-2022

No	Indikator IDI	2021	2022
Aspek Kebebasan			
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	54,15	0
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	0	0
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100	100
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100	100
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	99,48	99,48
6	Pemenuhan hak hak pekerja	100	94,32
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	68,87	75,57
Aspek Kesetaraan			
8	Kesetaraan gender	89,01	90,54
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	43,48	100
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	54	57,5
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	50,32	39,86
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	96,67	97,17
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	66,37	63,03
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	48,43	50,22
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi			
15	Kinerja lembaga legislatif	4,17	16,22
16	Kinerja lembaga yudikatif	87,23	91,45
17	Netralitas penyelenggara pemilu	85	85
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	71,67	88,33
19	Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	80,23	81,46
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	57,14	42,86
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	75,2	65
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	10,77	33,85

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

2.3.1.6 Sosial

2.3.1.6.1 Agama dan Kepercayaan

Keagamaan menjadi salah satu aspek sosial mendasar di Provinsi Papua. Provinsi Papua memiliki latar belakang keagamaan maupun kepercayaan yang telah berkembang sejak lama dan turun-temurun. Agama dan kepercayaan di Provinsi Papua ditunjukkan pada Tabel II.39. Agama dan kepercayaan yang mendominasi di Provinsi Papua berdasarkan kabupaten/kota adalah agama Protestan sebanyak 625.247 jiwa diikuti agama Islam sebanyak 252.315 jiwa dan agama Katolik sebanyak 110.249 jiwa. Kota Jayapura menjadi kota dengan pemeluk agama Islam, Katolik, Hindu, dan Budha terbanyak pada tahun 2020,

sementara Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dengan pemeluk agama Protestan terbanyak.

Tabel II.39 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Papua Tahun 2020 (Jiwa)

Kabupaten	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Jayapura	34.069	150.327	293	233	196	-
Kepulauan Yapen	10.973	113.868	2.045	47	22	-
Biak Numfor	3.004	118.501	3.546	150	301	-
Sarmi	6.706	29.311	152	35	-	-
Keerom	2.705	22.506	17.661	366	15	-
Waropen	9.722	34.661	1.777	20	-	-
Supiori	486	18.975	162	10	-	-
Mamberamo Raya	2.031	7.035	135	-	6	-
Kota Jayapura	182.619	130.063	84.478	741	1.237	-
Provinsi Papua	252.315	625.247	110.249	1.602	1.777	-

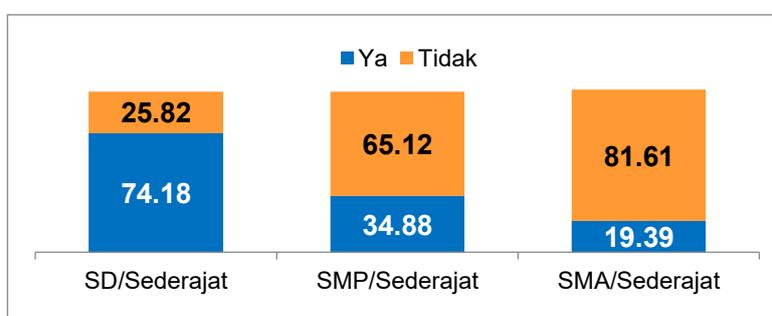
Sumber: Kementerian Agama Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

2.3.1.6.2 Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Papua menjadi salah satu isu pembangunan strategis. Masalah terkait kesejahteraan sosial di Provinsi Papua antara lain adalah ketelantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah masih belum optimal dalam menangani permasalahan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selain itu, guna mewujudkan kesejahteraan sosial, terdapat beberapa bantuan yang dapat diterima oleh penerima bantuan di Provinsi Papua seperti Program Indonesia Pintar (PIP), akses terhadap perlindungan sosial, dan penerima kredit dalam setahun.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu program pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan. PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan pemberian bantuan tunai untuk anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), anak yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah.

Gambar II.45 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar Menurut Jenis PIP di Provinsi Papua Tahun 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua, 2021 dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2023

Persentase rumah tangga sebagai sasaran utama penerima PIP masih tergolong sangat rendah yaitu hanya 9,27%. Rumah tangga penerima PIP paling banyak berada pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar yaitu 74,18%. Jenjang Pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat masing-masing berada pada persentase 34,88% dan 19,39%. Jenjang pendidikan SMA/ Sederajat menjadi persentase paling sedikit penerima PIP.

Tabel II.40 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosial Menurut Jenis Jaminan Sosial di Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Jenis Jaminan Sosial	Cakupan Penerima Manfaat (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jaminan Pensiun	6,52	7,46	5,65	4,71	6,14
Jaminan Hari Tua	5,1	5,29	3,68	3,1	4,15
Asuransi Kecelakaan Kerja	4,22	4,53	3,54	2,91	3,75
Jaminan / Asuransi Kematian	4,56	4,33	3,48	2,94	3,34
Jaminan Kehilangan Pekerjaan	N/A	N/A	N/A	N/A	0,75
Pesangon PHK	1,62	1,84	0,81	1,03	0,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2019-2023

Akses terhadap perlindungan sosial termasuk dalam sistem jaminan sosial nasional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Seluruh warga Indonesia wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional tanpa terkecuali. Jenis jaminan sosial mencakup Jaminan Pensiun/veteran, Jaminan Hari Tua, Asuransi Kecelakaan Kerja, Jaminan/Asuransi Kematian dan Pesangon (PHK). Jaminan pensiun menjadi jenis jaminan sosial dengan cakupan persentase penerima tertinggi sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 di Provinsi Papua. Sebaliknya, pesangon PHK menjadi jenis jaminan sosial dengan persentase terendah pada tahun 2023 yaitu 0,67% diikuti jaminan kehilangan pekerjaan yang terdata sejak tahun 2023 yaitu 0,75%.

Kredit usaha merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial lainnya yang diterima penduduk di Provinsi Papua. Kredit usaha lebih berfokus pada kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan, koperasi, pegadaian, maupun perorangan. Berdasarkan Tabel II.37, diketahui bahwa jenis kredit yang paling banyak diterima masyarakat di Provinsi Papua adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, persentase rumah tangga penerima KUR lebih tinggi dibandingkan jenis kredit lainnya. Sebaliknya, BUMDES menjadi jenis kredit dengan persentase terendah diikuti pinjaman online. Sejak tahun 2022, jenis kredit pinjaman online mulai terdata dan meningkat di tahun 2023 menjadi 0,47 dari 0,27 pada tahun 2022.

Tabel II.41 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun Menurut Jenis Kredit di Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Jenis Kredit	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	32,13	36,96	34,3	39,75	42,78
Kredit dari Bank Umum selain KUR	46,27	39,46	41,02	32,21	34,18
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	5,63	6	6,46	12,2	5,35
Kredit dari Koperasi	7,47	6,41	7,19	7,14	7,88
Kredit Perorangan/Perorangan dengan Bunga	3,51	4,78	2,4	2,42	4,98
Pegadaian	1,67	2,71	5,23	3,94	4,11
Perusahaan Leasing	3,47	4,59	4,55	4,92	7,66
Kelompok Usaha Bersama	1,85	0,2	0,97	N/A	N/A
Badan Usaha Milik Kampung	1,29	0,48	1,38	0,27	0,85
Pinjaman Online	N/A	N/A	N/A	0,27	0,47
Lainnya	6,04	3,64	1,86	4,76	8,02

Sumber: Susenas Maret dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2019-2023

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja di Provinsi Papua ditinjau berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK dan TPT dilihat dari penduduk dengan usia di atas 15 tahun yang terbagi dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jumlah Angkatan Kerja secara provinsi adalah sebanyak 2.516.129 jiwa dengan persentase bekerja terhadap angkatan kerja adalah sebesar 97,33%. Adapun Jumlah Bukan Angkatan Kerja adalah sebesar 743.102 jiwa yang terdiri dari sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Tabel II.42 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Papua Tahun 2023

No	Kabupaten	Angkatan Kerja					Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja			
		Bekerja	Pengangguran			Jumlah Angkatan Kerja		Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah Bukan Angkatan Kerja
			Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah						
1	Jayapura	70.469	913	2.076	2.989	73.458	95,93	10.327	20.225	4.508	35.060
2	Kepulauan Yapen	44.746	N/A	1.871	1.871	46.617	95,99	6.754	16.779	6.214	29.747
3	Biak Numfor	57.919	1.323	2.194	3.517	61.436	94,28	8.014	19.213	4.469	31.696
4	Sarmi	17.303	97	454	551	17.854	96,91	2.427	5.462	1.419	9.308
5	Keerom	30.851	N/A	357	470	31.321	98,5	2.814	4.866	1.787	9.467
6	Waropen	13.453	N/A	556	651	14.104	95,38	2.009	3.484	1.603	7.096
7	Supiori	7.842	N/A	347	396	8.238	95,19	1.158	3.792	1.145	6.095

No	Kabupaten	Angkatan Kerja					Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja			
		Bekerja	Pengangguran			Jumlah Angkatan Kerja		Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah Bukan Angkatan Kerja
			Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah						
8	Mamberamo Raya	10.846	N/A	44	N/A	10.890	99,6	911	9.206	4.433	14.550
9	Kota Jayapura	178.808	4.789	16.779	21.568	200.376	89,24	25.848	58.215	12.978	97.041
Provinsi Papua		2.448.947	14.821	52.361	67.182	2.516.129	97,33	156.725	441.573	144.804	743.102

Sumber: Sakernas Agustus dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Apabila kegiatan utama di Provinsi Papua ditinjau berdasarkan gender seperti terlihat pada Tabel II.43, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua didominasi oleh laki-laki yaitu 1,52 juta jiwa. Angka ini merupakan angka Provinsi Papua sebelum pemekaran. Jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua adalah sebanyak 2,45 juta jiwa yang juga didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 60,12%.

Tabel II.43 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2023

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
Angkatan Kerja	1.515.065	1.001.064	2.516.129
i. Bekerja	1.472.266	976.681	2.448.947
ii. Pengangguran Terbuka	42.799	24.383	67.182
Bukan Angkatan Kerja	233.618	509.484	743.102
i. Sekolah	79.412	77.313	156.725
ii. Mengurus Rumah Tangga	58.641	382.932	441.573
iii. Lainnya	95.565	49.239	144.804
Jumlah	1.748.683	1.510.548	3.259.231

Sumber: Sakernas Agustus dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Secara provinsi, TPT di Provinsi Papua pada Agustus 2021-2023 menunjukkan penurunan persentase dari 3,33% menjadi 2,67%. Penurunan persentase TPT pada selang tahun yang sama juga diikuti oleh penurunan TPAK. Persentase TPAK secara provinsi mengalami penurunan dari 78,29% pada tahun 2021 menjadi 77,2% pada tahun 2023. Persentase TPT dan TPAK ditunjukkan pada Tabel II.44.

Tabel II.44 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) – Agustus Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Jayapura	7,87	5,94	4,07	67,97	65,13	67,69
2	Kepulauan Yapen	2,47	3,6	4,01	63,94	68,36	61,05
3	Biak Numfor	9,49	7,4	5,72	69,47	72,31	65,97

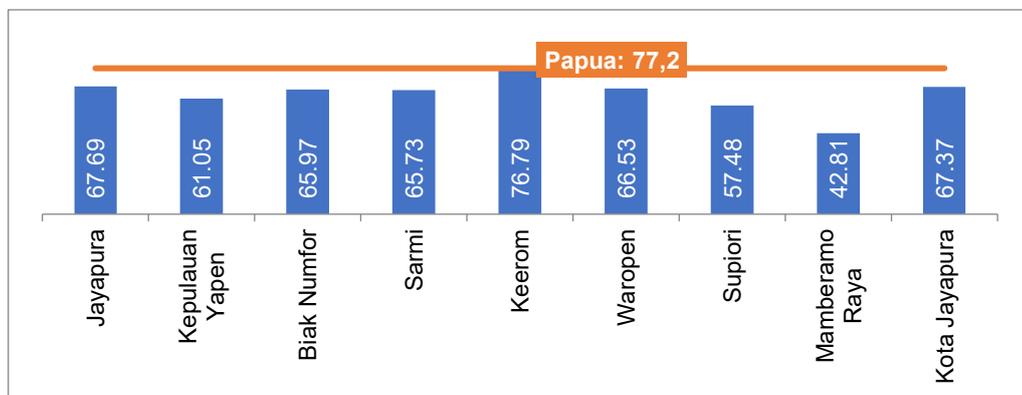
No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
4	Sarmi	2	2,09	3,09	68,57	68,96	65,73
5	Keerom	1,41	2,49	1,5	76,91	74,75	76,79
6	Waropen	8,56	6,64	4,62	56,39	56,98	66,53
7	Supiori	2,66	2,93	4,81	68,56	61,22	57,48
8	Mamberamo Raya	1,91	2,32	N/A	66,84	63,19	42,81
9	Kota Jayapura	11,67	9,71	10,76	63,75	60,61	67,37
Provinsi Papua		3,33	2,83	2,67	78,29	77,75	77,2

Sumber: Sakernas Agustus dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

2.3.2.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) - Agustus tertinggi di Provinsi Papua pada tahun 2023 berada di Kabupaten Keerom dengan persentase sebesar 76,79%. Persentase TPAK yang semakin meningkat di suatu daerah mengindikasikan bahwa penduduk dalam usia angkatan kerja di daerah tersebut secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan persentase TPAK terendah di Provinsi Papua pada tahun 2023. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, persentase TPAK pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua masih berada di bawah garis TPAK provinsi. Persentase TPAK di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota pada tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar II.46.

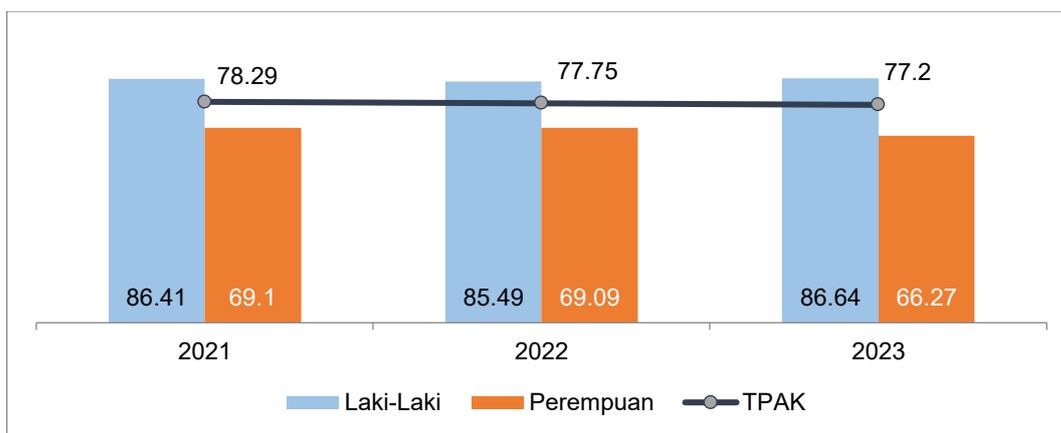
Gambar II.46 Persentase Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) - Agustus di Provinsi Papua Tahun 2022



Sumber: Sakernas Agustus dalam Indikator Penting Provinsi Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) Edisi Februari 2024

TPAK di Provinsi Papua juga ditinjau berdasarkan gender atau jenis kelamin. Diketahui bahwa TPAK di Provinsi Papua didominasi oleh laki-laki. TPAK laki-laki mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 86,64% dari 85,49% pada tahun 2022. TPAK perempuan pada tahun 2023 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Tahun 2023, persentase TPAK perempuan adalah sebesar 66,27% dari sebelumnya 69,10% pada tahun 2021 dan 69,09% pada tahun 2022. Adapun TPAK laki-laki berada di atas garis rata-rata provinsi sementara perempuan berada di bawah garis rata-rata provinsi.

Gambar II.47 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023

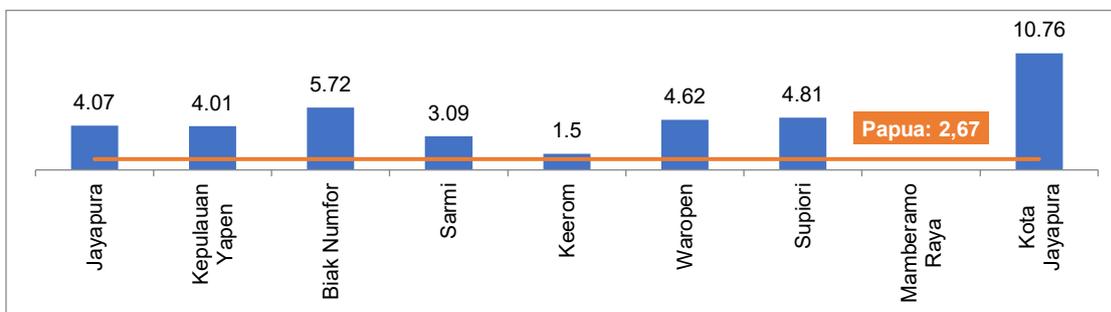


Sumber: Sakernas Agustus dalam Indikator Penting Provinsi Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) Edisi Februari 2024

2.3.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua pada Agustus 2023 adalah sebesar 2,67%. Kota Jayapura menjadi kota dengan persentase TPT tertinggi di Provinsi Papua yaitu sebesar 10,76%, sementara Kabupaten Keerom menjadi kabupaten dengan persentase TPT terendah yaitu sebesar 1,5%. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua memiliki persentase TPT diatas garis TPT provinsi. Adapun data persentase TPT Kabupaten Mamberamo Raya masih belum tersedia. Persentase TPT di Provinsi Papua pada tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar II.48.

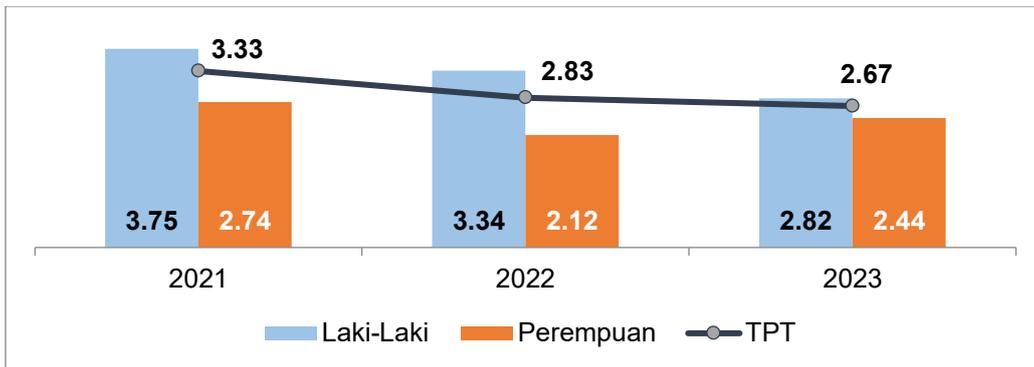
Gambar II.48 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Agustus di Provinsi Papua 2023



Sumber: Sakernas Agustus dalam Indikator Penting Provinsi Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) Edisi Februari 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua dapat dilihat berdasarkan gender atau jenis kelamin. Tahun 2023, TPT laki-laki adalah sebesar 2,82% lebih tinggi dibanding TPT perempuan yaitu sebesar 2,44%. TPT laki-laki mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2023, TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,32 dibandingkan pada tahun 2022. TPT perempuan mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,12% namun kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 2,44%. Adapun TPT perempuan masih berada di bawah garis rata-rata TPT secara provinsi sedangkan TPT laki-laki berada di atas garis rata-rata.

Gambar II.49 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023



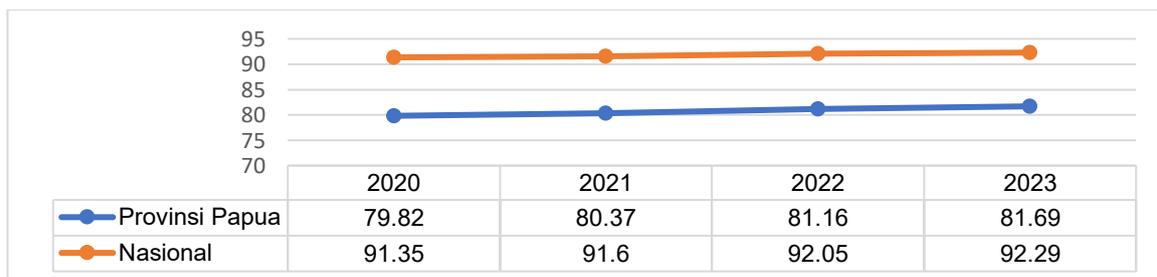
Sumber: Sakernas Agustus dalam Indikator Penting Provinsi Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) Edisi Februari 2024

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.2.1 Pembangunan Gender

Keberhasilan capaian pembangunan dalam mengakomodasi persoalan gender dapat diukur salah satunya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang menekankan pada status perempuan dan ukuran kemampuan dasar perempuan di suatu daerah. IPG merupakan komposit dari 4 indikator, yaitu: harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Kesetaraan gender ditunjukkan dengan angka IPG yang mendekati 100, sehingga semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin besar ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu daerah.

Gambar II.50 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Berdasarkan Gambar II.50, diketahui bahwa IPG Provinsi Papua dari tahun 2020–2023 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 IPD Provinsi Papua sebesar 79,82 yang meningkat menjadi 81,69 pada tahun 2023. Meskipun demikian, IPG Provinsi Papua pada tahun 2023 masih berada di bawah IPG Nasional yang mencapai 92,29 pada 2023. Jika ditinjau berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Papua, maka IPG tertinggi pada tahun 2023 dicapai oleh Kota Jayapura (94,76), Jayapura (91,60), dan Biak Numfor (90,97), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.45.

Tabel II.45 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020-2023

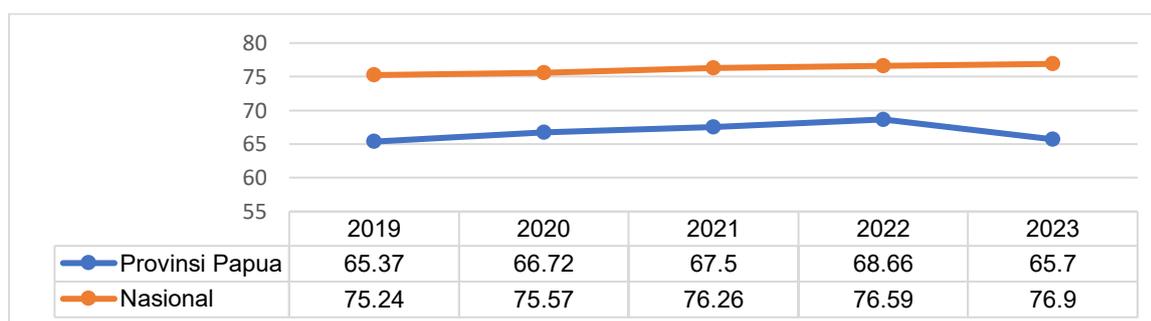
Kabupaten	2020	2021	2022	2023
Jayapura	90,91	91,09	91,43	91,60
Kepulauan Yapen	88,98	89,10	90,05	89,90
Biak Numfor	90,13	90,20	90,58	90,97
Sarmi	82,49	82,71	83,44	83,76
Keerom	86,25	86,27	87,37	87,96
Waropen	70,23	70,45	71,00	71,56
Supiori	76,51	76,93	77,93	78,33
Mamberamo Raya	82,11	82,68	83,36	83,77
Kota Jayapura	94,37	94,63	94,74	94,76
Provinsi Papua	91,35	91,60	92,05	92,29

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.3.2.2.2 Pemberdayaan Gender

Pembangunan gender tidak lepas dari adanya pemberdayaan gender. Pemberdayaan gender adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar. Tujuan pemberdayaan gender adalah untuk menghasilkan persamaan derajat antara laki-laki dan Perempuan. Tinjauan pemberdayaan gender dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan di dunia politik (keterwakilan di parlemen), pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Gambar II.51 Perbandingan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Gambar II.51 memperlihatkan ilustrasi dan data capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Papua dibandingkan dengan nasional. IDG Provinsi Papua pada tahun 2023 sebesar 65,70 di bawah IDG Nasional sebesar 76,90. Jika dipilah berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Papua, wilayah dengan IDG tertinggi adalah Kota Jayapura (77,65), Biak Numfor (70,71), Sarmi (70,35), dan Jayapura (70,20).

Tabel II.46 Perbandingan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Jayapura	69,70	68,77	70,20	69,50	70,20
Kepulauan Yapen	70,32	68,95	67,73	64,65	68,76
Biak Numfor	70,56	69,95	68,87	69,84	70,71
Sarmi	73,09	74,19	72,92	68,85	70,35
Keerom	58,06	59,31	59,83	54,04	63,87
Waropen	47,78	50,82	50,39	50,86	55,92
Supiori	66,33	64,07	62,65	63,21	64,18
Mamberamo Raya	58,23	53,80	59,29	55,13	54,83
Kota Jayapura	82,75	81,05	80,25	75,55	77,65
Provinsi Papua	65,37	66,72	67,50	68,66	65,70

Sumber: BPS RI, 2023

2.3.2.2.3 Keterlibatan sebagai Aparatur Sipil Negara

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Papua dilihat dari kontribusi perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perempuan yang bekerja sebagai PNS di Provinsi Papua pada tahun 2022 adalah sebanyak 13.433 jiwa.

Tabel II.47 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jayapura	1.771	2.311	4.082
2	Kepulauan Yapen	1.911	1.617	3.528
3	Biak Numfor	1.974	1.972	3.946
4	Sarmi	1.188	898	2.086
5	Keerom	1.602	1.469	3.071
6	Waropen	1.375	951	2.362
7	Supiori	1.371	1.137	2.508
8	Mamberamo raya	1.252	606	1.858
9	Kota Jayapura	1.603	2.472	4.075
	Provinsi Papua	14.047	13.433	27.480

Sumber: BPS Provinsi Papua dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

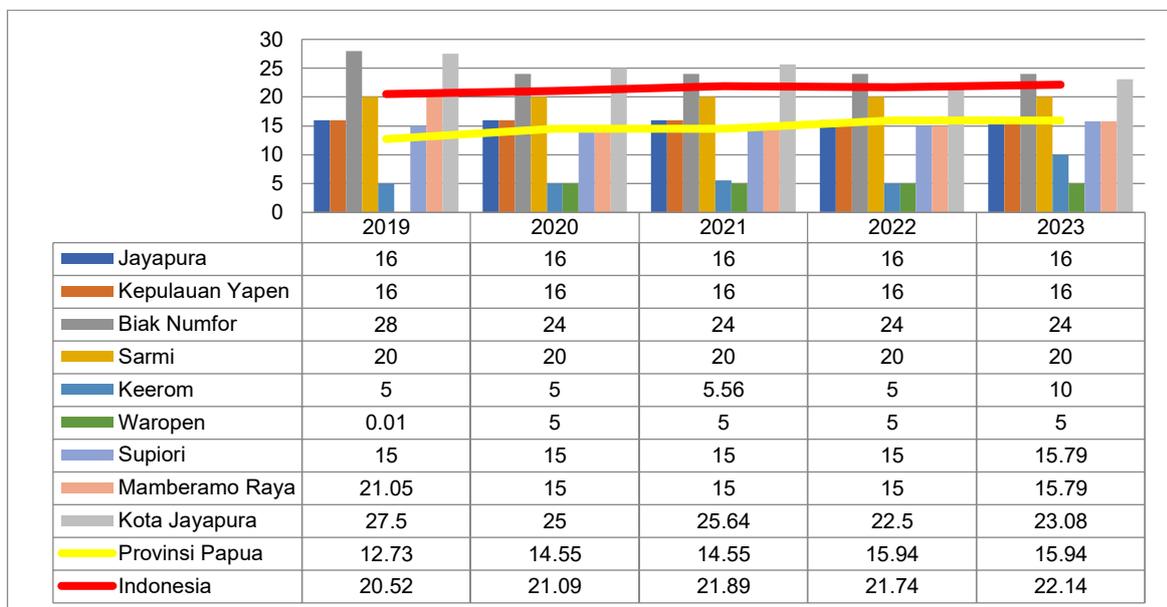
Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dan kota dengan jumlah PNS perempuan terbanyak dengan masing-masingnya berjumlah 2.311 dan 2.472 jiwa. Apabila dibandingkan secara total dengan jumlah laki-laki, jumlah perempuan dalam kepegawaian negeri sipil cenderung tidak memiliki perbandingan yang begitu tinggi. Jumlah tersebut ditunjukkan pada Tabel II.47.

2.3.2.2.2 Keterlibatan di Parlemen

Pemberdayaan perempuan juga dapat terlihat dari keterlibatannya di parlemen. Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara dalam keterwakilan perempuan di parlemen menurut data World Bank tahun 2019. Hal tersebut mencerminkan bahwa angka keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen masih rendah dan berpengaruh terhadap kebijakan kesetaraan gender. Keterlibatan perempuan di Parlemen dari Provinsi Papua pada tahun 2019-2023 ditunjukkan pada Gambar II.52.

Jika dilihat secara nasional, keterlibatan perempuan dalam parlemen di Provinsi Papua masih berada di bawah garis nasional. Secara provinsi, terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua yang sudah memiliki persentase keterlibatan perempuan di parlemen di atas garis provinsi. Kabupaten/kota dengan persentase keterlibatan perempuan di parlemen tertinggi adalah Kota Jayapura dan kabupaten/kota dengan persentase terendah adalah Kabupaten Keerom dan Waropen.

Gambar II.52 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Papua Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua

Partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan di Papua menjadi fokus penting untuk mencapai representasi yang lebih inklusif dan merata. Partisipasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun begitu perempuan di Papua semakin aktif terlibat dalam berbagai tingkatan politik dan pemerintahan. Terdapat sejumlah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan di Papua, mencakup advokasi untuk peningkatan jumlah perempuan di lembaga-lembaga legislatif, peningkatan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam agenda politik, serta dukungan terhadap kepemimpinan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik.

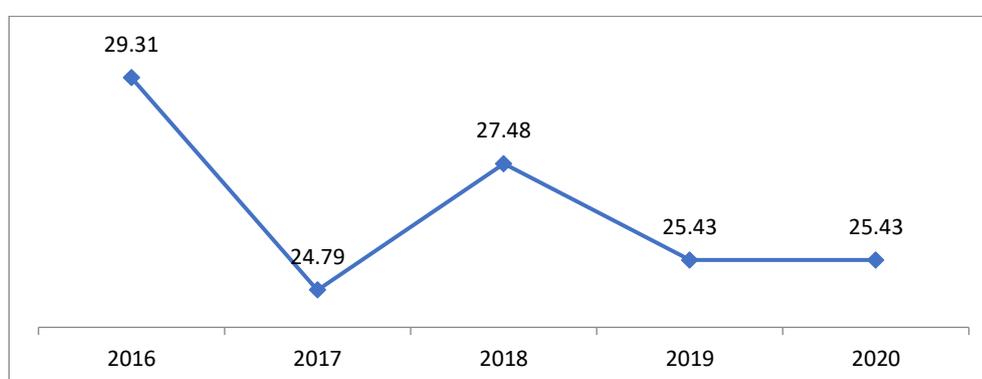
2.3.2.3 Pangan

Urusan pangan di Provinsi Papua dilihat berdasarkan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari, konsumsi setara kedelai pada penduduk, kerawanan pangan, ketidakcukupan konsumsi pangan, dan program bantuan pangan.

2.3.2.3.1 Asupan Kalori Minimum di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari

Tubuh memerlukan minimal 1400 kkal asupan untuk dapat melakukan aktivitas dalam sehari. Apabila penduduk belum memenuhi kebutuhan kalori minimum per hari maka hal tersebut mengindikasikan kurangnya kebutuhan kalori penduduk yang sesuai dengan standar. Adapun penduduk di Provinsi Papua dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari semakin mengalami penurunan sejak tahun 2016 meskipun sempat meningkat pada tahun 2018 sebelum kembali menurun hingga tahun 2020.

Gambar II.53 Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 kkal/Kapita/Hari di Provinsi Papua Tahun 2016-2020



Sumber: BPS RI, 2022

Rata-rata konsumsi per kapita ditinjau dari kalori dan protein per hari dan kelompok bahan makanan lainnya. Berdasarkan Tabel II.48, diketahui bahwa rata-rata konsumsi per kapita per hari di Provinsi Papua cenderung mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir. Sementara rata-rata konsumsi protein per kapita per hari sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 namun perlahan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 46,8 gram dari 45,07 gram. Meskipun rata-rata kalori dan protein mengalami kecenderungan untuk meningkat, tetapi masih belum bisa mencapai rata-rata nasional.

Tabel II.48 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari di Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Wilayah	Kalori (kkal)					Protein (gram)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Papua	1.863,07	1.914,12	1.879,71	1.902,04	1.902,72	44,66	46,52	44,94	45,07	46,8
Indonesia	2.120,52	2.112,06	2.143,21	2.079,09	2.087,64	62,13	61,98	62,28	62,21	62,33

Sumber: Publikasi Statistik Indonesia dalam BPS, 2023

2.3.2.3.2 Konsumsi Setara Kedelai

Konsumsi setara kedelai dilihat berdasarkan jenis pengolahan kedelai dalam bentuk tahu, tempe, dan kecap. Konsumsi tahu, tempe, dan kecap di Provinsi Papua diketahui masih berada di bawah angka konsumsi nasional yang ditunjukkan pada Tabel II.49 Konsumsi Setara Kedelai (Tahu, Tempe, Kecap) di Provinsi Papua Tahun 2020.

Tabel II.49 Konsumsi Setara Kedelai (Tahu, Tempe, Kecap) di Provinsi Papua Tahun 2020

Uraian	Konsumsi Setara Kedelai (kg/kapita/tahun)			
	Tahu	Tempe	Kecap	Total
Papua	2,23	1,65	0,34	4,22
Indonesia	2,78	3,64	0,74	7,17

Sumber: BPS RI, 2022

Apabila dilihat secara tahunan mulai dari tahun 2018 hingga 2020, konsumsi total setara kedelai cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2018, konsumsi setara kedelai meraih angka 3,42 hingga pada tahun 2020 meraih angka 4,22. Laju pertumbuhan konsumsi setara kedelai di Provinsi Papua adalah sebesar 11,09 per tahunnya. Konsumsi setara kedelai dan laju pertumbuhannya pada tahun 2018-2020 ditunjukkan pada Tabel II.50.

Tabel II.50 Konsumsi Setara Kedelai di Provinsi Papua Tahun 2018-2020

Uraian	Konsumsi Setara Kedelai (kg/kapita/tahun)			Pertumbuhan
	2018	2019	2020	
Papua	3,42	3,66	4,22	11,09
Indonesia	7,51	7,14	7,17	-2,29

Sumber: BPS RI, 2022

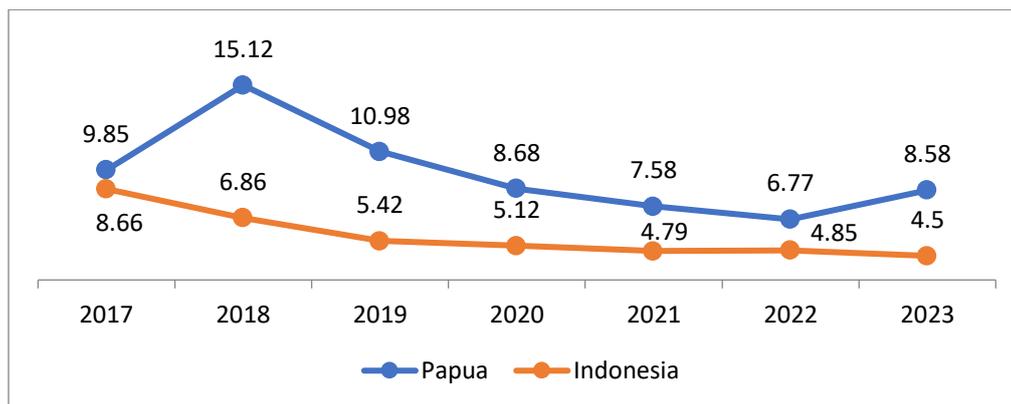
2.3.2.3.3 Kerawanan Pangan dan Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Kerawanan pangan menunjukkan kondisi ketidakcukupan pangan di suatu daerah. Prevalensi penduduk di Provinsi Papua dengan kerawanan pangan baik sedang maupun berat yang didasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan tahun 2017-2023. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten, yang diukur berdasarkan Skala Kerawanan Pengalaman Kerawanan Pangan. Skala ini memungkinkan untuk menganalisa prevalensi kerawanan pangan secara konsisten. Tingkat keparahan kondisi kerawanan pangan yang diukur melalui skala ini dapat memberikan gambaran secara langsung terkait ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam mengakses makanan yang dibutuhkan secara regular. Berdasarkan Gambar II.42, angka prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan mengalami fluktuasi. Tahun 2018 menjadi tahun dengan perolehan prevalensi tertinggi di Provinsi Papua yaitu mencapai 15,12% yang ditunjukkan pada Gambar II.54.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu dimana konsumsi energi sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk

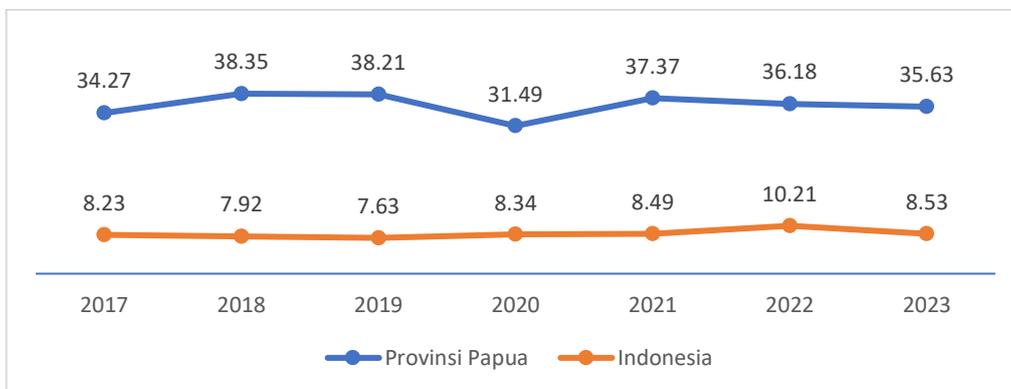
memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Papua sejak tahun 2017 menjadi yang terbesar secara Nasional dan jauh berada di atas garis nasional. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Papua berstatus “sangat tinggi” pada tahun 2019 dan 2021, serta berstatus “tinggi” pada tahun 2020. Prevalensi ketidakcukupan pangan di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar II.55.

Gambar II.54 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat Berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 (Persen)



Sumber: Susenas dalam BPS RI, 2023

Gambar II.55 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

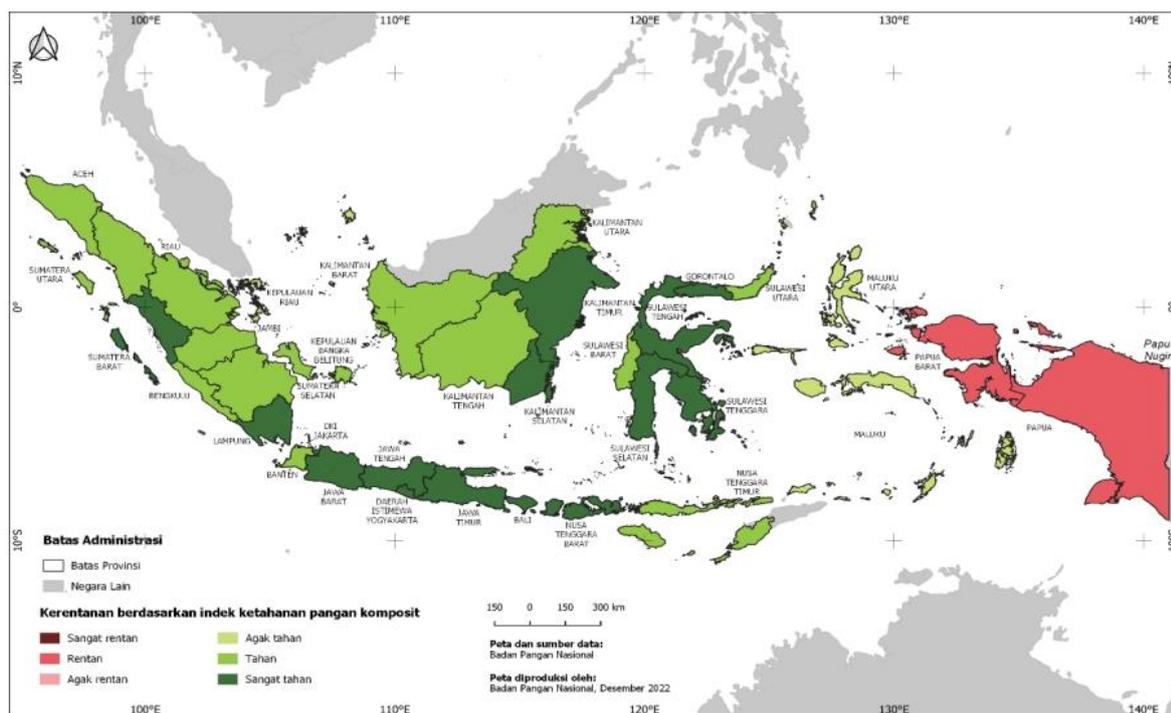


Sumber: Susenas dalam BPS, 2024

2.3.2.3.4 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan di Provinsi Papua dapat dilihat dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indikator penyusun ketahanan pangan di Indonesia didasarkan pada 3 aspek yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan/distribusi, dan pemanfaatan pangan di Indonesia pada kurun waktu tertentu. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Provinsi Papua mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2022, yaitu dari 34,79 menjadi 37,80. Meskipun begitu, Provinsi Papua juga menjadi provinsi dengan peringkat “rendah” dalam skor IKP dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini menjadikan Provinsi Papua menjadi provinsi Prioritas 1 untuk peningkatan skor IKP.

Gambar II.56 Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2022



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022

IKP dibedakan berdasarkan kabupaten dan kota untuk menentukan tingkatan kelompok kerentanan. Berdasarkan data IKP tahun 2022, sebanyak 70 kabupaten atau 16,83% dari 416 kabupaten memiliki skor IKP rendah, salah satunya adalah kabupaten di Provinsi Papua. Kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan) tersebar di Provinsi Papua. Berdasarkan pengelompokan terhadap kabupaten pada Tabel II.45, terlihat bahwa Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten Prioritas 1 dalam kurun 3 tahun terakhir. Sebaliknya Kabupaten Keerom menjadi kabupaten dengan tingkat kerentanan yang cukup baik yaitu berada pada Prioritas 4 selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan tinjauan kota, Kota Jayapura sebagai satu-satunya kota di Provinsi Papua menunjukkan ketahanan pangan sangat baik dengan berada pada Prioritas 5. IKP Provinsi Papua berdasarkan kabupaten dan kota ditunjukkan pada Tabel II.45.

Tabel II.51 Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua

Wilayah	Uraian	2020	2021	2022
Provinsi Papua	IKP (indeks)	34,79	35,48	37,8
	Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
	Interpretasi	Tingkat kerentanan pangan relatif sangat tinggi	Tingkat kerentanan pangan relatif sangat tinggi	Tingkat kerentanan pangan relatif sangat tinggi
	a. Indeks Ketersediaan (IK)	7,98	8,89	17,68
	b. Indeks Keterjangkauan	49,49	49	49,89
	c. Indeks Pemanfaatan (IP)	42,29	43,71	42,34

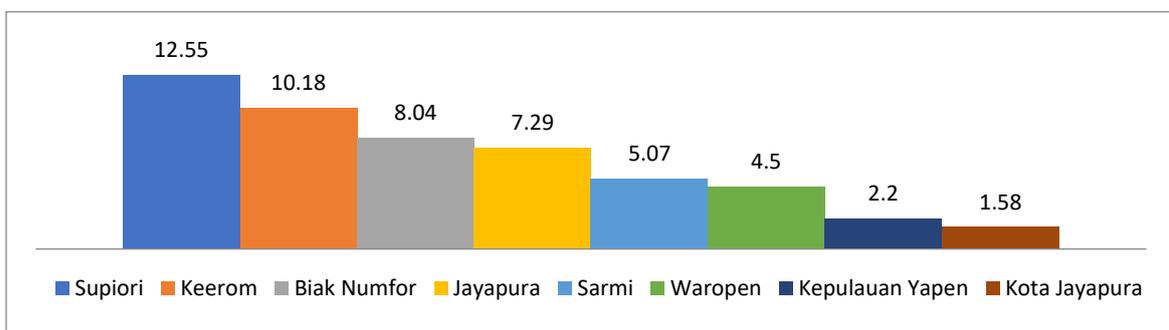
Wilayah	Uraian	2020	2021	2022	
Kabupaten					
1	Jayapura	IKP (indeks)	58,11	54,91	70,62
		Kategori	Prioritas 3	Prioritas 3	Prioritas 5
2	Kepulauan Yapen	IKP (indeks)	43,38	43,92	44,82
		Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2
3	Biak Numfor	IKP (indeks)	48,51	49,07	48,16
		Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2
4	Sarmi	IKP (indeks)	44,68	44,73	57,07
		Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 3
5	Keerom	IKP (indeks)	60,24	61,38	61,22
		Kategori	Prioritas 4	Prioritas 4	Prioritas 4
6	Waropen	IKP (indeks)	37,5	50,03	44,89
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 2
7	Supiori	IKP (indeks)	31,59	28,11	29,87
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
8	Mamberamo Raya	IKP (indeks)	19,8	21,95	22,96
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
9	Kota Jayapura	IKP (indeks)	68,83	70,18	74,64
		Kategori	Prioritas 5	Prioritas 5	Prioritas 5

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan, 2020-2022

2.3.2.3.5 Program Bantuan Pangan

Provinsi Papua termasuk dalam wilayah program bantuan pangan. Bantuan pangan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sembako. BPNT merupakan bantuan sosial pangan non tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari pemerintah sebesar 110.000 rupiah tiap bulan melalui mekanisme perbankan. Bantuan Sembako adalah pengembangan BPNT yang dilakukan sejak tahun dimulainya yaitu tahun 2020. KPM memperoleh program bantuan Sembako sebesar 150.000 rupiah melalui mekanisme perbankan. Adapun persentase KPM di Provinsi Papua yang menerima BPNT maupun Bantuan Sembako pada tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar II.57.

Gambar II.57 Persentase Penerima BPNT dan Bantuan Sembako Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua, 2023

Adapun realisasi jumlah KPM Bansos Pangan di Provinsi Papua pada tahun 2022 berjumlah 1.205.586 KPM dengan rencana jumlah KPM adalah sebesar 1.500.427 KPM.

Realisasi jumlah KPM cenderung mendekati rencana jumlah KPM Bansos Pangan. Hal serupa juga berlaku pada rencana dan realisasi anggaran Bansos Pangan di tahun yang sama seperti ditunjukkan pada Tabel II.52.

Tabel II.52 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Rencana Jumlah KPM	Realisasi Jumlah KPM	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran
Jayapura	19.364	17.672	11.609.600.000	10.596.800.000
Kepulauan Yapen	41.321	38.174	24.776.200.000	22.899.600.000
Biak Numfor	44.572	42.894	26.718.400.000	25.727.600.000
Sarmi	12.908	11.610	7.742.000.000	6.964.800.000
Keerom	15.431	14.483	9.253.400.000	8.687.800.000
Waropen	10.207	9.622	6.120.600.000	5.769.600.000
Supiori	7.977	7.918	4.784.200.000	4.748.800.000
Mamberamo Raya	8.212	6.600	4.926.000.000	3.958.800.000
Kota Jayapura	36.769	31.033	21.997.800.000	18.577.400.000
Papua	1.500.427	1.205.586	899.932.600.000	723.129.600.000

Sumber: BPS RI, 2023

2.3.2.4 Pertanian

Urusan pertanahan di Provinsi Papua dilihat dari peralihan tanah. Peralihan tanah memiliki beberapa pengelompokan di antaranya jual-beli, pewarisan, hibah, tukar-menukar, dan lelang. Pada tahun 2016-2017, pertanahan di Provinsi Papua mengalami penurunan. Berdasarkan Tabel II.47, diketahui bahwa pertanahan berdasarkan jual-beli, pewarisan, hibah, tukar-menukar, dan lelang mengalami penurunan. Pada tahun 2017 penurunan peralihan tanah menjadi sebesar 5.887 ha.

Tabel II.53 Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)

Tahun	Jual-Beli	Pewarisan	Hibah	Tukar Menukar	Lelang	Total
2016	6.208	559	254	6	30	7.057
2017	5.211	451	197	3	25	5.887

Sumber: Bappeda Papua

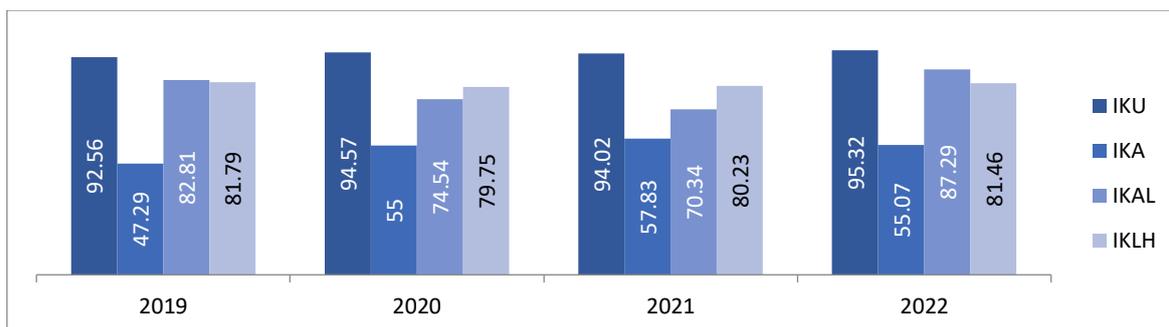
2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu wilayah yang berkaitan dengan sumber daya alam. Lingkungan hidup di Provinsi Papua dapat dilihat dari indeks lingkungan hidup beserta nilai kompositnya dan persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi yang dikelola secara aman berdasarkan tipe daerah.

2.3.2.5.1 Indeks Lingkungan Hidup

Provinsi Papua memiliki kekayaan akan sumber daya alam sehingga perencanaan dan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga unsur lingkungan hidup. Perubahan kondisi lingkungan menjadi salah satu isu penting terkait pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Berdasarkan Gambar II.58, diketahui bahwa IKLH Provinsi Papua pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020-2022. IKLH Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar II.58.

Gambar II.58 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya di Papua Tahun 2019-2022



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (data diolah, 2023)

Pada tahun 2023, perolehan IKLH Provinsi Papua dengan menggunakan metode lama masih mengungguli rata-rata IKLH Nasional. Skor IKLH Provinsi Papua sebesar 81,31, lebih tinggi 8,78 poin dibandingkan nasional yaitu sebesar 72,53. Sama halnya dengan perolehan IKLH, nilai komposit (IKU, IKA, IKL, IKAL) Provinsi Papua juga cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan menggunakan rumus baru di tahun yang sama, IKLH Provinsi Papua mengalami kenaikan sebanyak 0,57 poin menjadi 81,88. Namun kenaikan ini tidak disertai dengan kenaikan pada salah satu nilai kompositnya. Perolehan IKA dengan rumus baru cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yaitu 70,74 dari 72,01. Penurunan tersebut terjadi karena terdapat penambahan parameter yang membuat nilai IKU cenderung turun. Selain itu pada rumus terbaru, terdapat perubahan metode perhitungan pada IKA menjadi metode IKA-INA serta klasifikasi tutupan lahan ditambahkan dalam perhitungan IKL dan penambahan Faktor Koreksi Ekosistem Gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan sistem gambut.

Tabel II.54 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya

Provinsi	Capaian 2023 (Rumus Lama)					Capaian 2023 (Rumus Baru)				
	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKAL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKAL
Papua	81,31	95,87	54,73	100	84,56	81,88	84,47	70,74	100,01	84,56
Nasional	72,53	88,67	54,59	61,79	78,84	76,09	78,14	72,01	77,87	78,84

Sumber: Bappeda 2024 mengacu Surat Direktur Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024

Apabila ditinjau secara kabupaten, Supiori menjadi kabupaten dengan perolehan IKLH tertinggi baik menggunakan rumus lama maupun baru pada tahun 2023 yaitu sebesar 87,44 dan 85,37. Sebaliknya, Kota Jayapura menjadi kota dengan perolehan IKLH terendah dengan kedua rumus tersebut di tahun 2023 yaitu sebesar 73,5 dan 78,65.

Tabel II.55 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya

Kab/Kota	Gambut/Non Gambut	Capaian 2023 (Rumus Lama)				Capaian 2023 (Rumus Baru)			
		IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL
Biak Numfor	Non Gambut	82,84	95,23	62	95,71	82,12	84,13	70,74	97,94
Jayapura	Gambut	79,62	94,54	51,67	100	84,84	83,5	77,44	100
Keerom	Gambut	77,7	94,46	46,67	100	80,14	84,08	64,33	100
Kepulauan Yapen	Non Gambut	83,85	94,16	63,33	100	83,97	83,63	74,99	100
Mamberamo Raya	Gambut	84,96	100	60	100	84,08	85,96	72,79	100
Sarmi	Gambut	78,93	94,4	50	100	80,7	83,97	65,94	100
Supiori	Non Gambut	87,44	98,89	67,78	100	85,37	85,52	76,68	100
Waropen	Gambut	81,45	97,52	53,33	100	81,3	85,02	66,39	100
Kota Jayapura	Gambut	75,5	93,32	49	88,03	78,65	83,36	66,54	90,75

Sumber: Bappeda 2024 mengacu Surat Direktur Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024

2.3.2.5.2 Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman merupakan salah satu upaya dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Tertuang dalam poin 6 SDGs yaitu air bersih dan sanitasi layak, sanitasi aman diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas air bersih untuk mewujudkan air minum yang aman dan terjangkau. Akses sanitasi aman di Provinsi Papua melalui rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dilihat berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut diantaranya adalah fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, akses terhadap sanitasi layak, praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka, akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T), dan keterlayanan sistem pengelolaan lumpur tinja. Persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi yang dikelola secara aman di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel II.56.

Tabel II.56 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Menurut Tipe Daerah di Provinsi Papua Tahun 2020-2023

	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan + Perdesaan			
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
Papua	4,96	8,64	5,07	5,6	0,53	5,68	1,01	1,11	1,82	6,47	2,13	2,32
Indonesia	13,67	13,54	10,42	11,25	5,37	5,52	3,07	3,03	10,21	10,16	7,25	7,64

Sumber: Susenas Maret dalam BPS, 2023

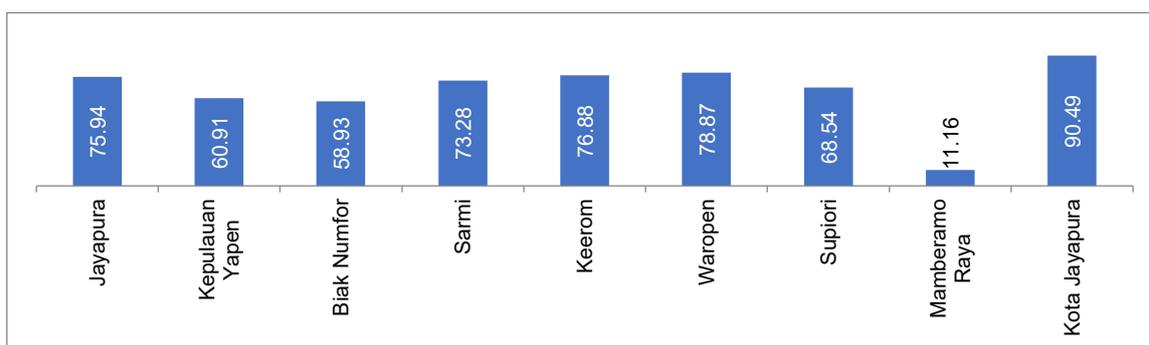
2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Papua dilihat dari kepemilikan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2.3.2.6.1 Kependudukan

Penduduk pada usia 0-17 tahun di Provinsi Papua yang telah memiliki akta kelahiran di tahun 2020 sudah berada di atas rata-rata yaitu di atas 50% pada masing-masing kabupaten/kota. Meskipun kepemilikan akta kelahiran sudah berada di atas rata-rata, masih terdapat satu kabupaten dengan kepemilikan akta kelahiran di bawah rata-rata yaitu Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 11,16%. Hal tersebut cukup menunjukkan ketimpangan besar dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua. Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun menurut kabupaten/kota pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel II.51.

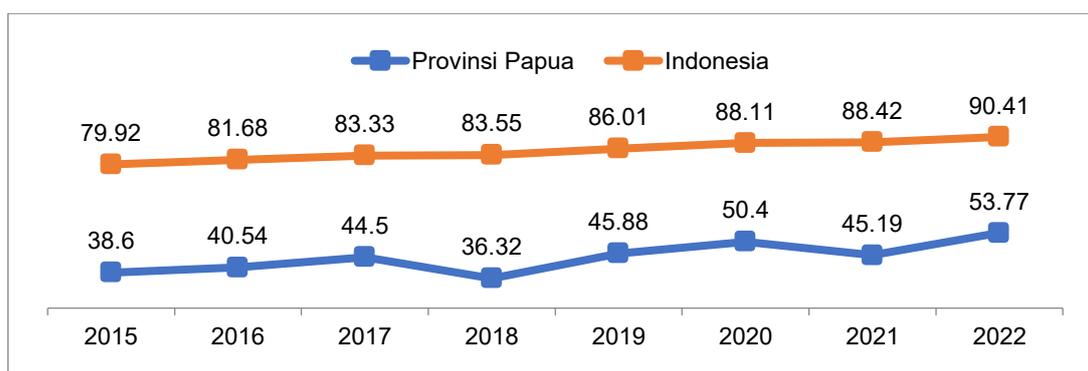
Gambar II.59 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020



Sumber: Analisis Profil Penduduk Provinsi Papua, BPS

Jika dilihat secara nasional melalui Gambar II.48, cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun di Provinsi Papua masih berada di bawah garis nasional. Meskipun persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran secara provinsi cenderung meningkat namun masih belum dapat mendekati persentase nasional.

Gambar II.60 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun



Sumber: Susenas dalam BPS RI

2.3.2.6.2 Catatan Sipil

Pencatatan sipil merupakan pelayanan pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sifatnya unik, tunggal, dan melekat pada penduduk yang terdaftar sebagai warga Indonesia. Kepemilikan NIK di Provinsi Papua sudah berada di atas rata-rata yaitu sebesar 80%.

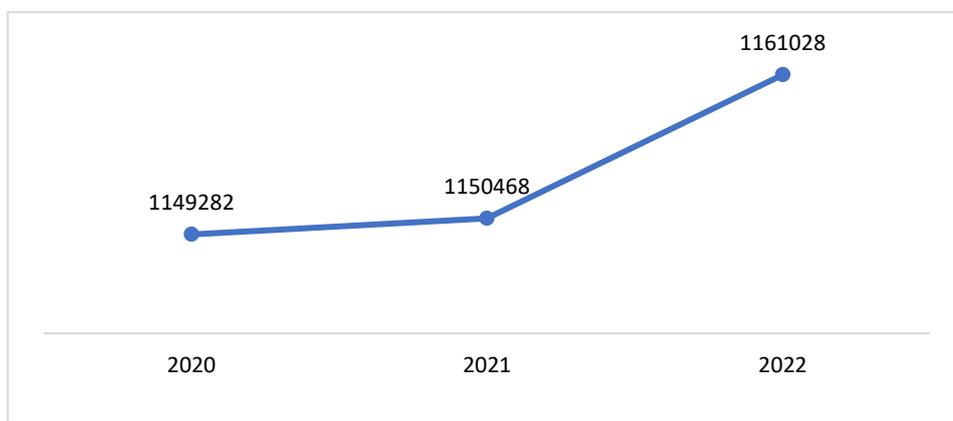
Meskipun begitu, masih terdapat satu kabupaten dengan persentase kepemilikan NIK sekaligus kepemilikan KTP terendah yaitu Kabupaten Mamberamo Raya. Persentase kepemilikan NIK berdasarkan jenis kelamin menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel II.57.

Tabel II.57 Persentase Kepemilikan NIK Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020

No	Kabupaten	Persentase Kepemilikan NIK		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jayapura	86.98	86.68	86.84
2	Kepulauan Yapen	84.86	83.41	84.16
3	Biak Numfor	89.47	88.69	89.09
4	Sarmi	88.47	88.75	88.59
5	Keerom	82.25	84.46	83.24
6	Waropen	87.94	87.69	87.82
7	Supiori	99.42	98.84	99.15
8	Mamberamo Raya	39.72	41.12	40.36
9	Kota Jayapura	94.95	95.6	95.24

Sumber: BPS Provinsi Papua (data diolah, 2021)

Gambar II.61 Cakupan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Papua 2020-2022



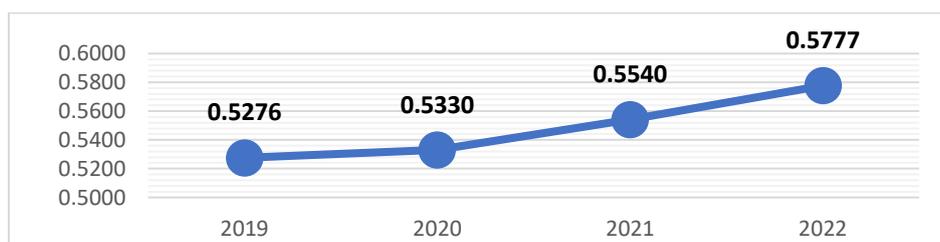
Sumber: Capaian Target Stranas AKPSH Bappenas, 2023

Berdasarkan data Capaian Target Stranas AKPSH oleh Bappenas pada indikator cakupan kepemilikan NIK pada semua penduduk Warga Negara Indonesia, Provinsi Papua mengalami kenaikan jumlah penduduk yang tercakup dalam kepemilikan NIK. Cakupan kepemilikan NIK dari tahun 2020-2022 di Provinsi Papua.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Menurut laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Papua menjadi Provinsi yang memiliki status desa sangat tertinggal terbanyak pada 2022. Meskipun Demikian, terdapat peningkatan nilai Indeks Desa Membangun dari 0,5276 pada tahun 2019 menjadi 0,5777 pada tahun 2022.

Gambar II.62 Indeks Desa Membangun Provinsi Papua



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (data diolah)
Catatan : Data Provinsi Papua (9 Kabupaten/Kota)

Tabel II.58 Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua (Milyar)

Tahun	Uraian	Dana Desa	Total TKDD	% DD Terhadap TKDD
2020	Anggaran	964.17	7817.78	12.33
	Realisasi	964.14	7765.70	12.42
	Realisasi Capaian	100.00	99.33	100.67
2021	Anggaran	985.10	7807.25	12.62
	Realisasi	983.54	7735.30	12.71
	Realisasi Capaian	99.84	99.08	100.77
2022	Anggaran	802.71	9218.91	8.71
	Realisasi	802.12	9576.53	8.38
	Realisasi Capaian	99.93	103.88	96.19

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, 2021, (data diolah)
Catatan: Data Provinsi Papua (9 Kab/Kota)

Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran APBN ke Desa sebesar 10% (on top) dari dana transfer daerah secara bertahap. Alokasi anggaran tersebut kemudian diberi nama Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN -yang telah diubah dua kali, terakhir PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN-, Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk disalurkan kembali ke Rekening Kas Desa (RKD). Untuk mendapatkan penyaluran tersebut Desa harus telah menetapkan dokumen APBD dan laporan realisasi keuangan sebelumnya, sedangkan daerah telah melaporkan konsolidasi laporan realisasi keuangan desa tahun sebelumnya.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Provinsi Papua mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 841.320 jiwa pada tahun 2018 menjadi 1.020.190 jiwa pada tahun 2021. Meskipun demikian, terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 2,91% pada 2018 menjadi 1,54% pada tahun 2021. diketahui bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Papua sebanyak 4-5

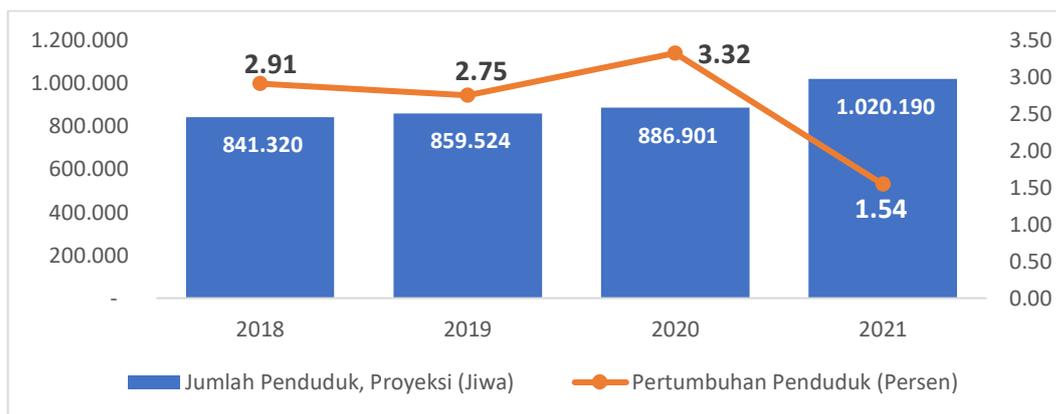
orang per keluarga yang mengindikasikan terdapat upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Papua. Hal ini pun terlihat dari Tabel II.55 yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif di Provinsi Papua yang cukup tinggi pada tahun 2017-2021, meskipun dalam kondisi fluktuatif setiap tahunnya.

Tabel II.59 Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (Jiwa)

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jayapura	22,729	24,189	13,814	1,143	1,865
2	Kepulauan Yapen	5,113	7,474	478	5,209	6,426
3	Biak Numfor	13,378	15,189	18,031	1,653	7,568
4	Sarmi	514	1,354	19,093	19,093	7,901
5	Keerom	2,863	4,588	6,824	8,225	8,984
6	Waropen	865	2,340	5,602	5,977	7,179
7	Supiori	463	651	876	889	76
8	Mamberamo Raya	961	171	299	907	907
9	Kota Jayapura	60,326	33,394	48,066	46,727	50,876
Papua		107,212	89,350	113,083	89,823	91,782

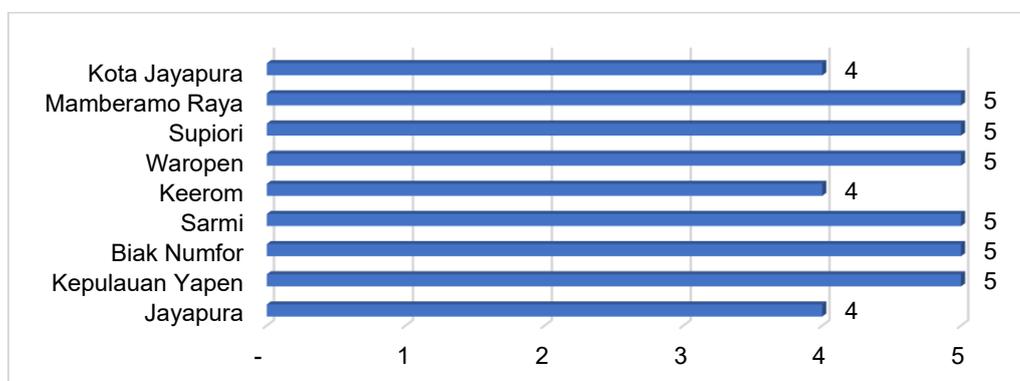
Sumber: BPS Provinsi Papua

Gambar II.63 Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua (Data Provinsi Papua 9 Kab/Kota)

Gambar II.64 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga (Orang)



Sumber: BPS Provinsi Papua

2.3.2.9 Perhubungan

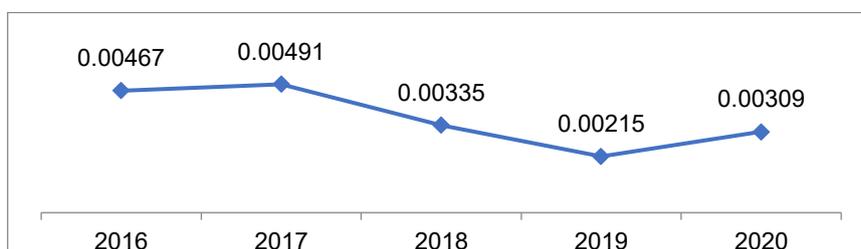
Perhubungan di Provinsi Papua dilihat dari transportasi darat, laut, udara, dan konektivitas. Transportasi darat mencakup jalan, transportasi laut mencakup jumlah penumpang domestik menggunakan moda transportasi kapal, dan transportasi udara mencakup jumlah penumpang berdasarkan moda transportasi pesawat. Konektivitas menjelaskan terkait aksesibilitas jalan baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua berdasarkan tingkat kemantapannya.

2.3.2.9.1 Transportasi Darat

Terminal penumpang di Provinsi Papua terdiri dari terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B. Untuk terminal penumpang tipe A berlokasi di terminal Entrop, di Kota Jayapura. Sedangkan terminal penumpang tipe B berlokasi di beberapa kabupaten/kota sebagai berikut:

- Terminal Heram di Kota Jayapura;
- Terminal Sentani di Kabupaten Jayapura;
- Terminal Arso di Kabupaten Keerom;
- Terminal Sarmi di Kabupaten Sarmi;
- Terminal Darfuar di Kabupaten Biak Numfor; dan
- Terminal Marsram di Kabupaten Supiori.

Gambar II.65 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km/unit)



Sumber: BPS Provinsi Papua

Penggunaan transportasi darat di Provinsi darat dilihat dari ketersediaan aksesibilitas berupa jalan terhadap jumlah kendaraan. Tahun 2016-2020 ketersediaan jalan terhadap jumlah kendaraan mengalami penurunan. Rata-rata perbandingan panjang jalan dengan kendaraan bermotor pada tahun 2016 adalah 1 km/467 unit kendaraan dan menurun hingga tahun 2020 sebesar 1 km/309 unit kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2017.

Tabel II.60 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2022 (km/unit)

Tahun	Rasio Panjang jalan/jumlah kendaraan
2016	0,00467
2017	0,00491

Tahun	Rasio Panjang jalan/jumlah kendaraan
2018	0,00335
2019	0,00215
2020	0,00309
2021	0.0158
2022	0.0139

Sumber: BPS Provinsi Papua dan Statistik Transportasi Provinsi Papua Tahun 2022

Penggunaan transportasi darat di Provinsi darat dilihat dari ketersediaan aksesibilitas berupa jalan terhadap jumlah kendaraan. Pada tabel di atas dapat dilihat ketersediaan jalan terhadap jumlah kendaraan mengalami penurunan pada tahun 2017-2019, kemudian pada tahun 2020-2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 dapat dilihat perbandingan panjang jalan dengan kendaraan bermotor adalah 1 km/467 unit kendaraan dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1 km/1.390 unit kendaraan.

2.3.2.9.2 Transportasi Laut

Angkutan laut menjadi salah satu moda transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk yang semakin tinggi terutama untuk wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat maupun udara. Angkutan laut masih menjadi pilihan moda transportasi bagi masyarakat yang bergerak di dalam wilayah maupun di luar Provinsi Papua yang dapat dijangkau melalui laut karena tarifnya yang relatif masih murah jika dibandingkan dengan transportasi udara untuk tujuan yang sama.

Tabel II.61 Jumlah Penumpang menurut Pelabuhan dan Jenis Pelayaran di Provinsi Papua Tahun 2022-2023

Pelabuhan	Kapal	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Masuk	Keluar	Total	Masuk	Keluar	Total
Jayapura	Kapal Luar Negeri						
	Kapal PELNI dan Kapal Swasta	80,329	101,321	181,650	130,859	127,777	258,636
	Kapal Perintis	11,906	9,943	21,849	11,384	10,517	21,901
Serui	Kapal Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
	Kapal PELNI/ Swasta/ Perintis/ ASDP/ Kapal Rakyat	76,367	79,089	155,456	-	-	-
	Kapal PELNI dan Kapal Swasta	-	-	-	45,837	45,691	91,528
	Kapal Perintis/ASDP/Kapal Rakyat	-	-	-	27,890	26,922	54,812
Biak	Kapal Luar Negeri	-	-	-	300	263	563
	Kapal PELNI dan Kapal Swasta	-	-	-	20,149	43,376	63,525
	Kapal Perintis/ASDP/Kapal Rakyat	1,864	789	2,653	33,834	18,237	52,071
Sarmi	Kapal Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
	Kapal PELNI dan Kapal Swasta	37,240	28,786	66,026			
	Kapal Perintis/ASDP/Kapal Rakyat	30,042	11,418	41,460	1,507	1,565	3,072
Waren	Kapal Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
	Kapal Swasta	9,465	7,654	17,119	-	-	-
	Kapal Perintis/ASDP/Kapal Rakyat	33,818	26,701	60,519	21,431	18,137	39,568

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Tahun 2024

Transportasi laut di Provinsi Papua dilihat dari jumlah penumpang yang menggunakan mode transportasi laut kapal baik berangkat maupun datang yang dipisahkan berdasarkan jenis pelayaran. Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah penumpang yang datang maupun berangkat dengan jenis pelayaran yang berbeda di 5 (lima) pelabuhan di Papua. Pada tahun 2023, jumlah penumpang dengan Kapal PELNI dan Kapal Swasta tertinggi berada di pelabuhan Jayapura yaitu 258.636 orang. Sedangkan pelabuhan Sarmi merupakan pelabuhan dengan jumlah penumpang dengan jenis pelayaran Kapal Perintis/ASDP/Kapal Rakyat terendah yaitu 3.072 orang. Untuk Kapal Luar Negeri pada tahun 2023, kabupaten Biak mendapatkan jumlah kedatangan dan keberangkatan sebesar 563 orang.

Tabel II.62 Jumlah Kapal dan Arus Barang menurut Pelabuhan di Provinsi Papua Tahun 2022-2023

Pelabuhan	Tahun	Jumlah Kapal (Unit)	Arus Barang (Ton/M3)		
			Masuk	Keluar	Total
Jayapura	2022	649	1,555,044.89	315,455	1,870,499.89
	2023	833	1,511,618.19	466,567.26	1,978,185.45
Serui	2022	1,556	549,314	128,050	677,364.00
	2023	1,159	187,667	96,447	284,114.00
Biak	2022	727	113,652	71,920	185,572.00
	2023	1,111	49,361	31,237	80,598.00
Sarmi	2022	177	10,808	97,920	108,728.00
	2023	191	6,781.50	131,439.96	138,221.46
Waren	2022	733	440	0	440.00
	2023	1,026	13,156	0	13,156.00

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Tahun 2024

Selain jumlah penumpang yang datang maupun berangkat, pada tabel di atas dapat dilihat jumlah kunjungan kapal dan barang pada masing-masing pelabuhan di Provinsi Papua pada tahun 2022 dan 2023. pada tahun 2023, pelabuhan Serui mendapatkan kunjungan kapal terbanyak yaitu 1.159 unit dengan jumlah muatan sebanyak 284.114 Ton/M3. Jika dilihat dari jumlah arus keluar dan masuk barang, maka pelabuhan Jayapura merupakan pelabuhan dengan jumlah muatan terbanyak pada tahun 2023 yaitu 1,978.185,45 Ton/M3. Sedangkan pelabuhan Sarmi mendapatkan kunjungan kapal paling sedikit yaitu 191 unit kapal dengan jumlah muatan 166.387GT. Namun jika dilihat dari jumlah arus barang bongkar muat, maka pelabuhan Jayapura merupakan pelabuhan dengan jumlah bongkar terbanyak sebesar 138.221,46 Ton/M3.

2.3.2.9.3 Transportasi Udara

Transportasi udara menjadi salah satu transportasi pilihan untuk perjalanan di dalam pulau maupun keluar Provinsi Papua. Salah satu mode yang digunakan pada transportasi udara di Provinsi Papua adalah pesawat. Uraian terkait transportasi udara di Provinsi Papua dapat dilihat dari jumlah kedatangan dan keberangkatan baik pesawat maupun penumpang. Terdapat tiga bandara yang beroperasi di Provinsi Papua di antaranya yaitu Bandar Udara Sentani (Kabupaten Jayapura), Frans Kaisiepo (Kabupaten Baik Numfor), dan Stevanus Rumbewas (Kabupaten Kep. Yapen).

Tabel II.63 Jumlah Pesawat dan Penumpang pada Bandar Udara di Provinsi Papua Tahun 2021-2023

Bandar Udara	Tahun/ Domestik/ Internasional	Pesawat				Penumpang			
		Datang	Pergi	Lokal	Jumlah	Datang	Pergi	Transit	Jumlah
Sentani Jayapura	2021	21,039	20,844	-	41,883	61,358	69,716	-	131,074
	2022	21,959	22,990	104	45,053	669,939	627,589	116,346	1,413,874
	2023								
	Domestik	22,262	23,326	357	45,945	861,588	725,439	147,311	1,734,338
	Internasional	25	16	-	41	233	55	3	291
Frans Kaiseipo Biak	2021	1863	1862	-	3,725	61,213	69,715	-	130,928
	2022	5,542	5,547	1,231	12,320	139,044	143,284	104,410	386,738
	2023								
	Domestik	1,649	1,653	6	3,308	108,472	110,187	78,673	297,332
	Internasional	25	21	-	46	122	128	7	257
Stevanus Rumbewas	2021	244	244	-	488	7,210	7,356	-	14,566
	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan, Provinsi Papua Tahun 2024

Pada Tabel II.63, dapat dilihat Bandara Sentani (Jayapura) menjadi bandara dengan jumlah keberangkatan/kedatangan pesawat dan penumpang domestik tertinggi pada tahun 2023, masing-masingnya 45.945 unit dan 1.734.338 orang. Sedangkan Bandara Frans Kaiseipo (Biak Numfor) pada tahun 2023 memiliki keberangkatan/kedatangan pesawat dan penumpang masing-masing sebanyak 3.308 unit dan 297.332 penumpang. Adapun Bandara Stevanus Rumbewas (Kepulauan Yapen) memiliki total keberangkatan/kedatangan pesawat dan penumpang paling rendah yaitu 488 unit dan 14.566 orang pada tahun 2021. Selain penumpang domestik, bandara Sentani dan Frans Kaiseipo juga melayani penumpang internasional, dimana pada tahun 2023 dapat dilihat jumlah penumpang kedatangan/keberangkatan dan transit terbanyak berada di Sentani yaitu 291 orang.

Tabel II.64 Jumlah Muatan Barang (Kargo) pada Bandar Udara di Provinsi Papua Tahun 2022-2023

Bandar Udara	Kargo (Ton)			
	Bongkar	Muat	Transit	Jumlah
Sentani Jayapura				
2021	-	-	-	-
2022	9,263,208	116,270,396	-	125,533,604
2023				
Domestik	9,799,863	122,490,371	112,216	132,402,450
Internasional	-	19,691	-	19,691
Frans Kaiseipo Biak				
2021				
2022	753,738	522,092	978,001	2,253,831
2023				
Domestik	456,471	344,600	289,879	1,090,950
Internasional	-	-	-	-
Stevanus Rumbewas				
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan, Provinsi Papua Tahun 2024

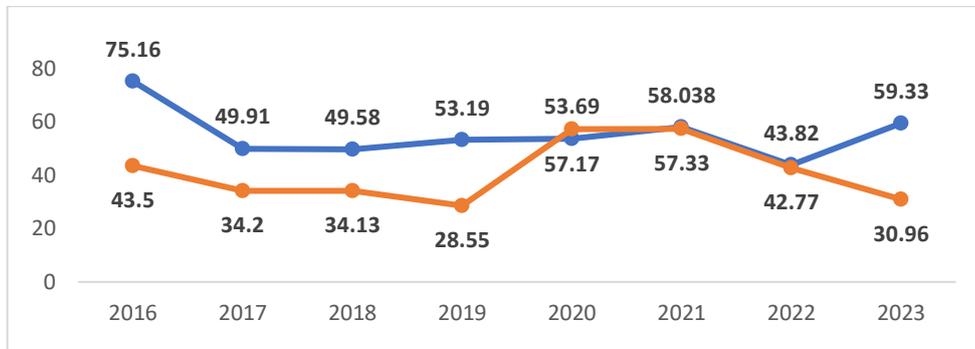
Selain penumpang, pesawat juga membawa barang (kargo) yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tabel di atas dapat dilihat, bandara Sentani merupakan bandara dengan jumlah kargo terbanyak pada tahun 2023 yaitu 132.402.450 Ton. Sedangkan bandar udara

Frans Kaiseipo di Biak Numfor, jumlah kargo pada tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 48,4% sebesar 1.090.950 Ton. Selain kargo domestik, pada bandar udara Sentani juga melayani kargo internasional, dimana pada tahun 2023 terdapat 19,691 Ton barang yang dikirim ke luar negeri.

2.3.2.9.4 Konektivitas

Konektivitas di Provinsi Papua juga dapat dilihat dari keterhubungan aksesibilitas berupa jalan daerah. Jalan daerah merupakan jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang didalamnya berisikan kemantapan jalan baik secara provinsi maupun kabupaten dan kota. Jalan daerah dalam kondisi mantap artinya jalan daerah dalam kondisi baik dan sedang. Persentase kemantapan jalan provinsi maupun kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

Gambar II.57 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap di Provinsi Papua Tahun 2016-2023



Sumber : Jalan Provinsi (kecuali DKI Jakarta) : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (SIPDJD)

2.3.2.10 Penanaman Modal

Penanaman modal di Provinsi Papua dilihat dari realisasi investasi Penanaman Modal Luar Negeri dan Dalam Negeri. Adapun jumlah investor di Provinsi Papua pada tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 jumlah proyek mencapai 127 unit dan di tahun 2023 menurun mencapai 73 unit. Realisasi investasi penanaman modal luar negeri di Provinsi Papua juga mengalami penurunan menjadi 8,3 juta US\$ pada tahun 2023. Jumlah proyek dan realisasi investasi pada tahun 2019-2023.

Tabel II.65 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Unit) (Juta US\$)

Uraian	Proyek (Unit)					Investasi (Juta US\$)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Papua	127	184	95	86	73	941	567,7	1.489,1	1.260,5	8,3
Indonesia	30.354	36.726	27.271	32.681	70.898	28.208,8	28.666,3	31.093,1	45.605	50.267,5

Sumber: BPS RI, 2024

Jumlah proyek pada penanaman modal dalam negeri cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019 hingga 2023 dengan proyek pada tahun 2019 sebanyak 68 unit

dan 2023 sebanyak 971 unit. Realisasi investasi juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Jumlah proyek dan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri pada tahun 2023 mencapai 971 unit dengan realisasi investasi sebesar 1.174,1 miliar rupiah.

Tabel II.55 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Unit) (Miliar Rupiah)

Uraian	Proyek (Unit)					Investasi (Miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Papua	68	323	473	754	971	567,7	2.722,2	911	1.311,8	1.174,1
Indonesia	30.451	96.623	106.002	124.582	266.722	386.498,4	413.535,5	447.063,6	552.769	674.923,4

Sumber: BPS RI, 2024

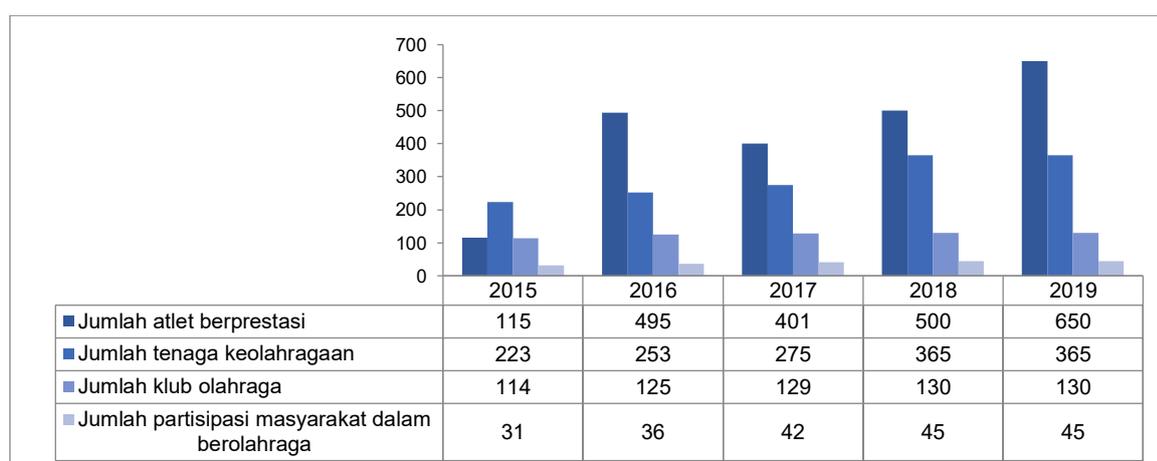
2.3.2.1.1 Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga di Provinsi Papua dilihat dari keorganisasian yang ada dan sarana prasarana olahraga sebagai fasilitas olahraga. Organisasi terbagi menjadi dua yaitu organisasi keolahragaan dan kepemudaan. Sarana dan Prasarana olahraga menjadi penunjang untuk kegiatan olahraga yang ada di Provinsi Papua.

a. Organisasi Keolahragaan

Organisasi keolahragaan menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin mengembangkan minatnya pada bidang olahraga. Provinsi Papua mengalami kenaikan klub olahraga dikarenakan semakin banyaknya kegiatan olahraga dari berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten hingga nasional. Pemberdayaan organisasi keolahragaan dan partisipasi masyarakat dalam bidang olahraga di Provinsi Papua.

Gambar II.66 Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga di Provinsi Papua Tahun 2015-2019



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

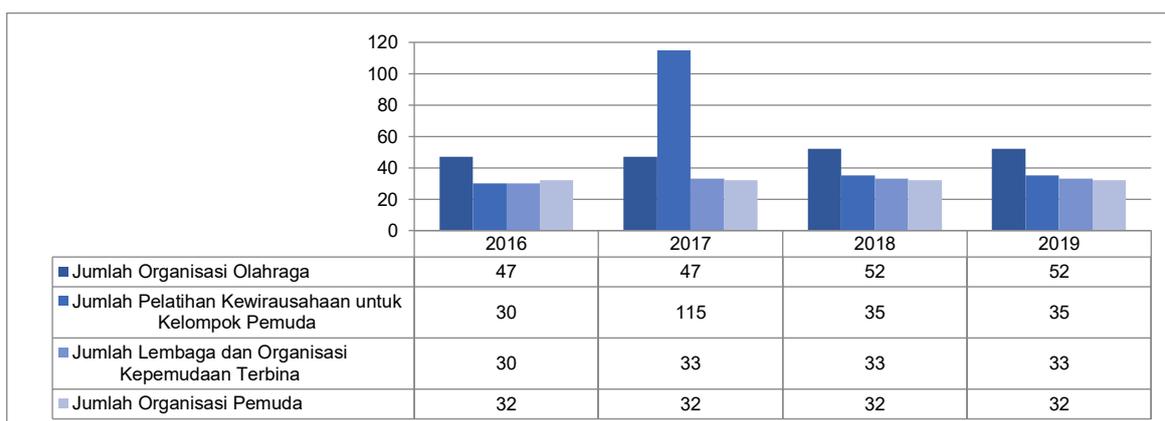
Diketahui bahwa, jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga semakin meningkat dari tahun 2015-2019 begitu juga dengan jumlah atlet berprestasi, klub olahraga, dan

jumlah tenaga keolahragaan. Banyaknya klub olahraga juga diikuti dengan meningkatnya jumlah atlet-atlet berprestasi di tingkat kabupaten hingga internasional dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan jumlah tersebut, organisasi keolahragaan di Provinsi Papua semakin mengalami peningkatan dalam mendukung bidang olahraga.

b. Organisasi Kepemudaan

Organisasi kepemudaan merupakan salah satu bentuk atau wadah bagi para pemuda untuk mengembangkan diri. Terdapat empat indikator bagi pemberdayaan pemuda di Provinsi Papua pada tahun 2016-2019, di antaranya adalah organisasi olahraga, lembaga dan organisasi kepemudaan terbina, organisasi pemuda, dan pelatihan kewirausahaan untuk Kelompok Pemuda. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah unit yang ada. Jumlah unit organisasi olahraga di Provinsi Papua mengalami kenaikan dari tahun 2016-2019, diikuti dengan jumlah unit lembaga dan organisasi kepemudaan terbina, dan jumlah organisasi pemuda. Satu indikator yang mengalami penurunan ditinjau dari unit adalah jumlah pelatihan kewirausahaan untuk kelompok pemuda. Keempat indikator tersebut beserta jumlah unit pada tahun 2016-2019.

Gambar II.67 Jumlah Organisasi Pemberdayaan Pemuda di Provinsi Papua Tahun 2016-2019 (Unit)



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Kepemudaan di Provinsi Papua juga ditinjau berdasarkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). IPP Papua semakin meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dari 49,83 menjadi 52,00. Penyumbang kenaikan pada angka IPP bersumber dari domain kesehatan dari 67,50 menjadi 75,00 dan domain partisipasi kepemimpinan dari 46,67 menjadi 53,33.

Tabel II.66 Perkembangan Nilai IPP dan Domain Penyusun IPP Provinsi Papua dan Indonesia

WILAYAH	INDIKATOR	2019	2020	2021
PAPUA	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	49.83	50.17	52.00
	a. Domain Pendidikan	56.67	56.67	56.67
	b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	67.50	67.50	75.00
	c. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	45.00	50.00	45.00
	d. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	46.67	46.67	53.33

WILAYAH	INDIKATOR		2019	2020	2021
	e.	Domain Gender dan Diskriminasi	33.33	30.00	30.00
INDONESIA	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		52.67	51.00	53.33
	a.	Domain Pendidikan	70.02	70.01	70.00
	b.	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	55.00	55.00	60.00
	c.	Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	45.00	40.00	40.00
	d.	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	46.66	46.67	43.33
	e.	Domain Gender dan Diskriminasi	46.67	43.33	53.33

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam dokumen Indeks Pembangunan Pemuda 2022

c. Sarana dan Prasarana Olahraga

Sarana dan prasarana olahraga merupakan fasilitas fisik untuk menunjang kebutuhan dalam berolahraga. Provinsi Papua memiliki sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang penduduk melakukan kegiatan olahraga. Berdasarkan Tabel II.67, diketahui bahwa terdapat sejumlah fasilitas penunjang berbagai jenis olahraga yang ada di Provinsi Papua ditinjau dari kampung/kelurahan. Pada tahun 2021, fasilitas olahraga terbanyak pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua adalah fasilitas sepak bola dan bola voli.

Tabel II.67 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Provinsi Papua Tahun 2021

No	Kabupaten	Sepak Bola	Bola Voli	Bulu Tangkis	Bola Basket	Tenis Lapangan	Tenis Meja	Futsal	Renang	Bela Diri	Bilyard	Lainnya
1	Jayapura	74	120	29	16	4	15	26	4	7	7	2
2	Kepulauan Yapen	36	61	3	1	1	2	4	1	2	3	1
3	Biak Numfor	116	192	7	3	4	4	9	1	2	3	0
4	Sarmi	36	53	4	1	1	1	8	0	3	1	0
5	Keerom	34	76	18	4	0	12	7	1	14	3	0
6	Waropen	10	28	2	1	0	3	3	0	1	0	0
7	Supiori	17	37	2	2	0	2	0	0	0	0	0
8	Mamberamo Raya	34	47	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kota Jayapura	23	30	15	14	11	5	14	5	11	5	1

Sumber: Statistik Potensi Desa Provinsi Papua 2021

2.3.2.12 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan kegiatan Penyusunan sampai Penyebarluasan Data informasi Pembangunan. Dalam hal ini Pusat Data dan Analisa – Bapperida Provinsi Papua melakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan telah menyusun output dokumen pada table berikut.

No	Dokumen	2019	2020	2021	2022	2023
1	Analisis Kerangka Pembangunan Daerah	ada	ada	ada	ada	ada

2.3.2.13 Kebudayaan

Untuk menjaga dan melestarikan seni budaya Papua, saat ini telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seni dan budaya berupa museum dan gedung-gedung kesenian. Dimana museum yang terbesar ada 2 (dua) gedung yang berlokasi di Kota Jayapura yaitu Museum Negeri Papua yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Museum Loka Budaya yang dikelola oleh Universitas Cenderawasih.

Koleksi seni budaya Papua pada Museum Negeri Papua kurang lebih sebanyak 3.447 koleksi yang meliputi benda geologi, biologi, etnografi, arkeologi, sejarah, numismatik, fisiologi, keramik, seni rupa, profil manusia, peta, dan diorama. Museum ini dilengkapi fasilitas sebagai berikut, ruang Pameran Tetap, ruang Pameran Temporer, ruang Auditorium, ruang Perpustakaan, ruang laboratorium, ruang Penyimpanan Koleksi, ruang Bengkel/ Preparasi, dan ruang Administrasi. Sedangkan koleksi utama dari Museum Loka Budaya adalah benda-benda etnografi yang berasal dari 270-an suku di Papua yang terdiri atas: peralatan dapur; peralatan yang berhubungan dengan mata pencaharian hidup seperti peralatan bercocok tanam, berburu dan menangkap ikan; busana dan perhiasan tubuh; peralatan perang; peralatan membayar harta (mas kawin, denda,dll); benda-benda sakral; alat transportasi dan alat-alat musik.

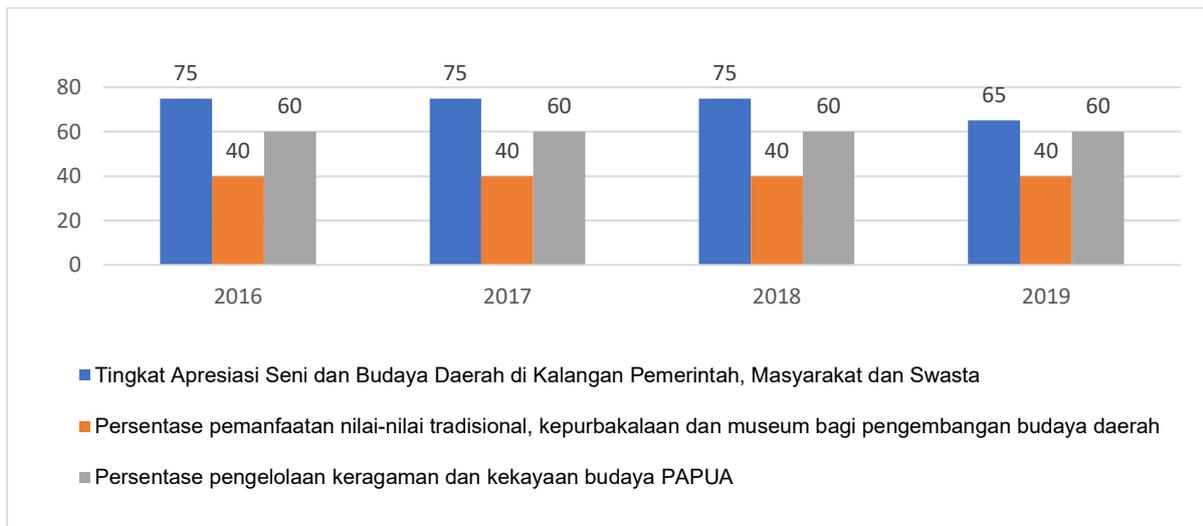
Dalam Dokumen Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tercatat sudah ada 17 Karya Budaya yang merupakan warisan suku-suku asli Papua. Mulai dari Yosim Pancar, Ukiran Asmat, hingga Pokem yang merupakan salah satu kemahiran dan kerajinan tradisional Papua.

Tabel II.68 Perkembangan Warisan Tak Benda Papua

Tahun	No	Karya Budaya	Kategori
2013	67	Yosim Pancar	Seni Pertunjukan
	68	Ukiran Asmat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
	69	Barappen	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
	70	Tifa	Seni Pertunjukan
	77	Noken	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	119	Papeda	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
	120	Tomako Batu	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
	121	Koteka	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	141	Wor Biak	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
	142	Elha	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
	143	Aker	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
	144	Honai	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
	145	Khombow	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
	146	Terfo	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2017	142	Ndambu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
	143	Yu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
	144	Pokem	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018' (Catatan : Belum dipisah 29 Kab/Kota)

Gambar II.68 Capaian Urusan Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2016-2019



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua

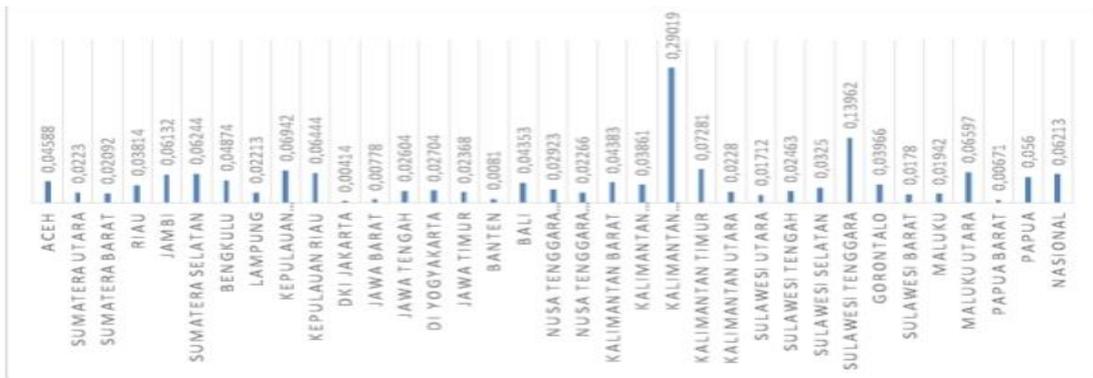
Salah satu keberhasilan pemerintah provinsi dalam mempromosikan dan menjaga kelestarian budaya Papua adalah mempatenkan Noken sebagai salah satu warisan dunia. Dimana pada tahun 2011 Noken Papua telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda dari Indonesia yang membutuhkan perlindungan mendesak. Noken Papua adalah hasil daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradat. Walaupun Noken berbentuk seperti halnya tas yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam benda dan peralatan, namun masyarakat Papua sendiri tidak menyebut noken sebagai tas. Bagi masyarakat Papua, Noken memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan tas yang diproduksi pabrik, baik secara bahan, jenis, model maupun bentuk Noken.

Tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya daerah di Provinsi Papua dinilai cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 65 persen dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan salah satunya oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang seni dan budaya daerah Papua yang sudah mulai berkurang. Meskipun capaian tersebut hingga tahun 2019 terlihat menurun dari tahun sebelumnya Tercatat pada tahun 2016 tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya adalah sebesar 75 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 65 persen.

2.3.2.14 Perpustakaan

Perpustakaan di Provinsi Papua dapat dilihat dari ketercukupan jumlah koleksi. Jumlah koleksi dapat dikatakan mencukupi jika setiap satu orang penduduk membaca dua koleksi berdasarkan ketentuan IFLA/UNESCO. Secara nasional, rasio ketercukupan jumlah koleksi masih belum mencukupi ketentuan IFLA/UNESCO. Berdasarkan data rasio jumlah koleksi koleksi dari IFLA/UNESCO, Provinsi Papua memiliki rasio sebesar 0,056.

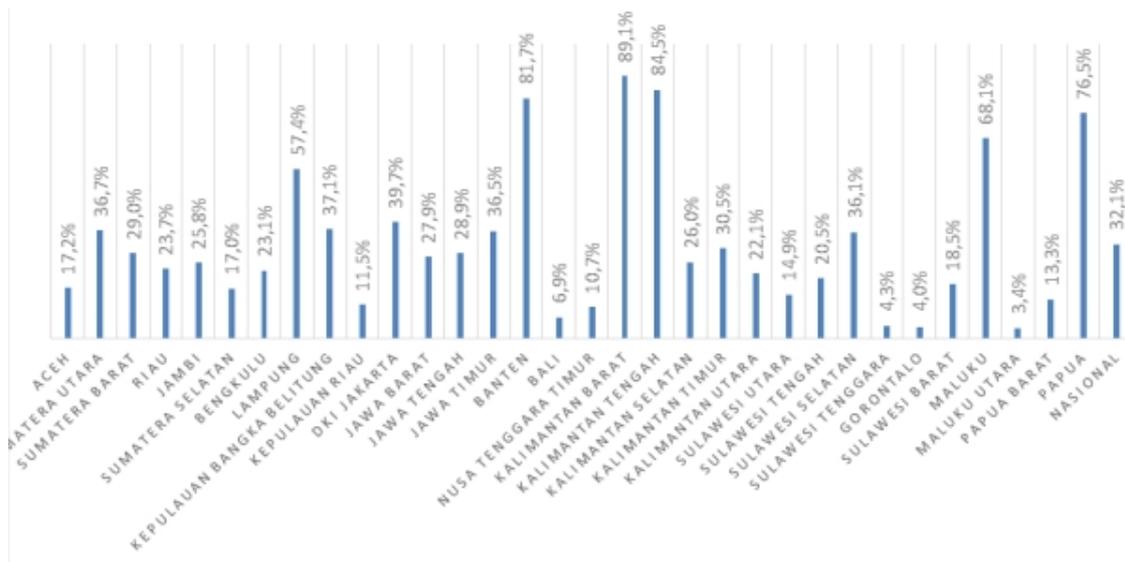
Gambar II.69 Rasio Ketercukupan Jumlah Koleksi Perpustakaan Berdasarkan Kategori Dari IFLA/UNESCO pada 34 Provinsi Di Indonesia Dan Secara Nasional



Sumber: Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan data rasio ketercukupan dengan penilaian IFLA/UNESCO pada Gambar II.61, diketahui bahwa seluruh provinsi di Indonesia masih belum memenuhi ketercukupan jumlah koleksi memenuhi ketercukupan jumlah koleksi. Meski begitu, secara persentase jumlah koleksi buku yang dipinjam terhadap keseluruhan koleksi buku, Provinsi Papua menjadi salah satu provinsi dengan persentase tertinggi setelah Provinsi Banten. Persentase tersebut ditunjukkan pada Gambar II.62.

Gambar II.70 Persentase Jumlah Koleksi Buku yang Dipinjam Terhadap Keseluruhan Koleksi Buku pada 34 Provinsi di Indonesia dan Secara Nasional



Sumber: Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan data perpustakaan dalam website pendataan perpustakaan berbasis wilayah, jumlah perpustakaan di Provinsi Papua mencapai 1077 unit yang meliputi perpustakaan sekolah sebanyak 918 unit, umum sebanyak 81 unit, perguruan tinggi sebanyak 48 unit, dan khusus sebanyak 30 unit. Jumlah perpustakaan ditunjukkan pada Gambar II.71.

Gambar II.71 Sebaran Perpustakaan Dalam Peta Secara Nasional

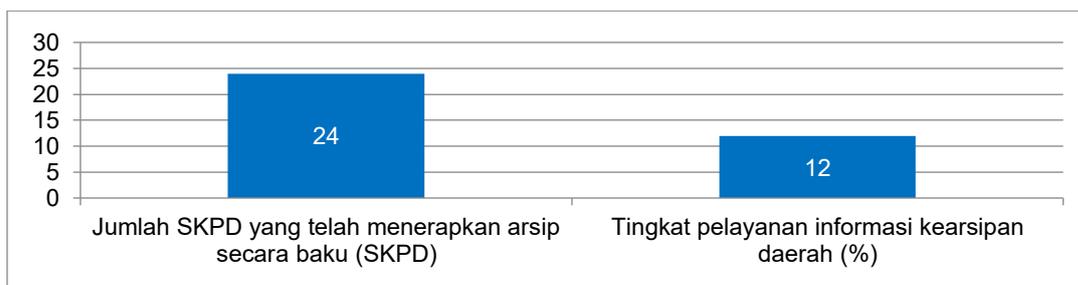


Sumber: data.perpusnas.go.id

2.3.2.15 Kearsipan

Urusan kearsipan di Provinsi Papua meliputi berbagai kegiatan di dalamnya meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam arsip nasional. Pengelolaan arsip didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan lainnya. Tenaga arsip dalam mengelola kearsipan merupakan tenaga arsip dari Perangkat Daerah (PD) yang menerapkan arsip secara baku dan telah mengikuti berbagai pembekalan terkait kearsipan. Perangkat Daerah di Provinsi Papua yang telah menerapkan arsip buku secara baku baru berjumlah 24 PD, sehingga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa PD yang belum menerapkan arsip secara baku.

Gambar II.72 Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku di Provinsi Papua Tahun 2016



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

Provinsi Papua memiliki jumlah akomodasi sebanyak 28 unit, 2148 kamar dan 3019 tempat tidur yang tersebar di Kabupaten Jayapura, kepulauan Yapen, Biak Numfor dan kota Jayapura pada pada tahun 2021 (lihat Tabel II.69). Kota Jayapura merupakan wilayah yang paling banyak memiliki akomodasi, kamar dan tempat tidur untuk penunjang pariwisata. Pengembangan/ pembangunan layanan akomodasi perlu lebih ditingkatkan di Kabupaten

Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori dan Mamberamo Raya karena sampai dengan tahun 2021 belum memiliki layanan akomodasi dalam mendukung kegiatan pariwisata daerah.

Tabel II.69 Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di Hotel pada Provinsi Papua

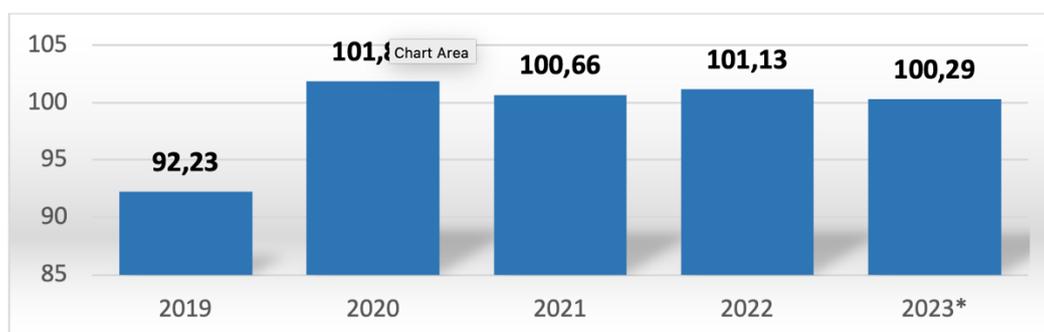
No	Kabupaten/Kota	2019			2020			2021		
		Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
1	Jayapura	4	293	463	5	231	611	5	428	695
2	Kepulauan Yapen	1	31	50	1	26	51	1	30	51
3	Biak Numfor	2	78	106	2	57	106	2	78	111
4	Sarmi									
5	Keerom									
6	Waropen									
7	Supiori									
8	Mamberamo raya									
9	Kota Jayapura	15	1170	1886	15	1093	1756	20	1612	2162
PROVINSI PAPUA		22	1572	2505	23	1407	2524	28	2148	3019

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

2.3.3.2 Pertanian

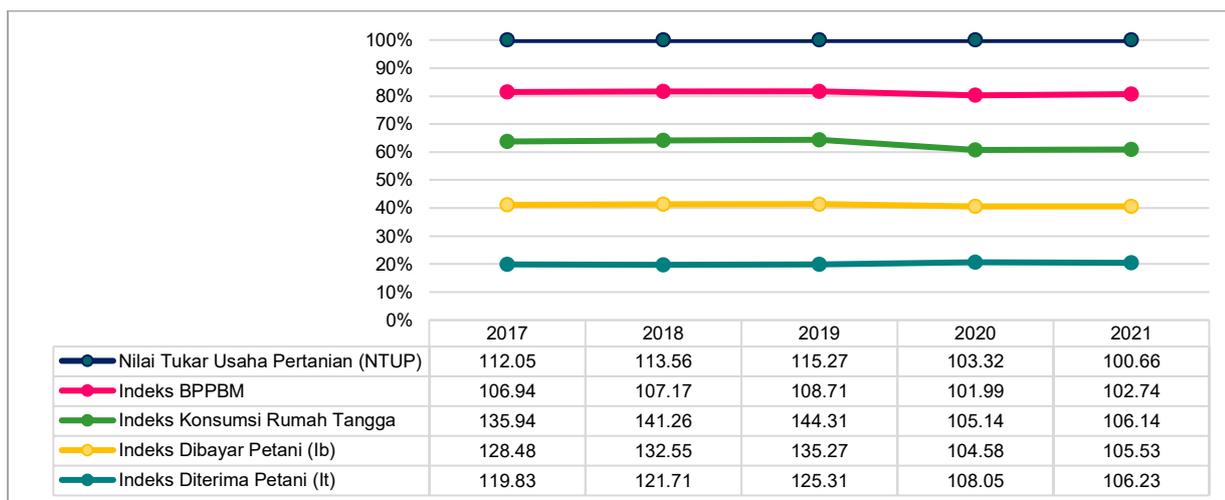
NTP (Nilai Tukar Pertani) di Provinsi Papua sangat berfluktuasi dan cenderung meningkat, tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani dan barang serta jasa yang dikonsumsi petani. Pada tahun 2023 NTP di Provinsi Papua turun sebesar 100,29, penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani sebesar 0,07 persen berubah lebih lambat dari pada perubahan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,40 persen. Mulai tahun 2018-2020 terindikasi harga produksinya lebih rendah dibandingkan kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani mengalami penurunan lebih jauh dari pengeluarannya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan para petani semakin berkurang dibandingkan tingkat kesejahteraan sebelumnya. Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan masing-masing komponen pembentuk NTP Papua, terlihat seluruh komponen mengalami trend negatif. Meskipun demikian capaian komponen nilai tukar petani berada pada angka rata-rata diatas 100 persen. Sehingga hal tersebut memiliki dampak yang baik dalam peningkatan kesejahteraan petani di Papua.

Gambar II.73 Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Papua 2019-2023* (data diolah)

Gambar II.74 Komponen Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2017-2021



Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

Produksi komoditas tahun 2023 di Provinsi Papua paling tinggi yaitu Produksi Ubi Kayu dengan total produksi sebesar 153,94 ribu ton dan produksi ubi kayu menurut Kabupaten/Kota paling tinggi adalah Kabupaten Keerom dengan total produksi sebesar 36,77 ribu ton. Produksi komoditas ubi Kayu dan ubi jalar merupakan komoditi paling tinggi karena komoditi tersebut merupakan komoditas unggulan lokal di Provinsi Papua.

Tabel II.70 Produksi Komoditas Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kabupaten/Kota	Padi (Ton)	Jagung (Ton)	Kedelai (Ton)	Kacang Hijau (Ton)	Ubi Jalar (Ton)	Ubi Kayu (Ton)
1 Jayapura	2,430	3,617.7	23.0	10.5	12,431.5	11,341.41
2 Yapen	38	2,233.5	25.2	12.0	13,623.0	23,847.03
3 Biak Numfor		3,633.5	6.8	257.3	20,809.3	21,284.74
4 Sarmi	4,141	7,512.0	593.5	403.8	7,738.6	18,861.23
5 Keerom	376	19,354.5	321.3	115.5	11,961.5	36,776.70
6 Waropen	931	2,573.7	68.0	70.5	8,744.4	11,976.20
7 Supriori	94	855.6	8.5	85.5	3,630.8	7,568.65
8 Mamberamo Raya	47	614.1		27.0	7,273.3	12,156.10
9 Kota Jayapura	2,195	4,086.9	11.9	32.0	6,410.8	10,136.08
Provinsi Papua	10,252.00	44,481.50	1,058.20	1,014.10	92,623.20	153,948.14

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua, 2023

2.3.3.3 Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan yang memiliki nilai produksi tercatat sesuai data BPS diantaranya adalah hasil perikanan tangkap di laut dan juga perikanan umum di daratan. Dari wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Papua, hanya Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mamberamo Raya yang tidak memiliki hasil produksi perikanan tangkap di laut, sedangkan wilayah dengan hasil yang lengkap adalah di Kabupaten Jayapura dan

Kabupaten Waropen. Produksi hasil perikanan tangkap di laut Provinsi Papua tahun 2021 ada sebanyak 126.675 ton.

Tabel II.71 Produksi Komoditas Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kabupaten/Kota	Perikanan tangkap di laut		Perikanan perairan umum daratan	
	Volume (Ton)	Nilai/value (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai/value (000 Rp)
1 Jayapura	19.015	690.399.360	741	6.704.392
2 Yapen	6.165	193.500.017	-	-
3 Biak Numfor	41.124	1.474.923.137	-	-
4 Sarmi	16.396	489.494.238	-	-
5 Keerom	-	-	-	-
6 Waropen	831	21.100.857	511	4.602.888
7 Supriori	1.889	54.290.770	-	-
8 Mamberamo Raya	-	-	-	-
9 Kota Jayapura	41.255	1.496.675.020	-	-
Provinsi Papua	126.675	4.420.383.399	1.252	11.307.280

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketersediaan energi terutama fasilitas kelistrikan merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah karena kebutuhan listrik tidak hanya bersumber dari rumah tangga, tetapi juga kebutuhan instansi pemerintah, perkantoran dan industri. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, maka pembangunan sarana dan prasarana energi juga menjadi kebutuhan vital dan mendesak di Papua. Tabel II.72 menunjukkan persentase rumah tangga berdasarkan sumber penerangan di Papua. Berdasarkan Tabel II.62 diketahui bahwa rata-rata rumah tangga yang telah memiliki sumber penerangan listrik di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sebanyak 74,04%. Dalam hal ini, daerah yang perlu diprioritaskan dalam percepatan akses listrik di Provinsi Papua adalah Kabupaten Mamberamo Raya dan Supiori.

Tabel II.72 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan

No	Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Jumlah
1	Jayapura	91,47	3,25	5,28	100,00
2	Kepulauan Yapen	70,95	12,20	16,85	100,00
3	Biak Numfor	99,79	0,20	0,01	100,00
4	Sarmi	87,91	7,83	4,27	100,00
5	Keerom	82,82	6,27	10,91	100,00
6	Waropen	63,35	26,12	10,54	100,00
7	Supiori	66,14	7,18	26,68	100,00

No	Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Jumlah
8	Mamberamo Raya	4,46	86,46	9,08	100,00
9	Kota Jayapura	99,45	0,18	0,37	100,00
Provinsi Papua (*rata-rata kab/kota)		74,04	16,63	9,33	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Tabel II.73 Produksi Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (kWh)

Kabupaten/Kota	Daya terpasang	Produksi listrik	Listrik terjual	Dipakai sendiri	Susut hilang
1 Jayapura	32.876	114.740.369	104.309.426	-	10.430.943
2 Yapen	1.400	34.819.284	28.826.054	2.015	5.991.215
3 Biak Numfor	49.892	79.862.556	71.349.975	995.682	7.516.899
4 Sarmi	4.890	12.730.661	11.366.662	-	1.363.999
5 Keerom	306	24.068.325	22.121.622	-	1.946.703
6 Waropen	1.172	8.206.725	7.147.972	-	1.058.753
7 Supriori	-	10.068.731	8.832.220	-	1.236.511
8 Mamberamo Raya	-	-	-	-	-
9 Kota Jayapura	181.099	409.188.130	360.518.176	7.905.509	40.764.445
Provinsi Papua	271.635	693.684.781	614.472.107	8.903.206	70.309.468

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Tabel II.73 menunjukkan produksi listrik menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.73 diketahui bahwa daya listrik terpasang di Provinsi Papua adalah 271.635 KW dengan produksi listrik sebesar 693.684.781 KWh, listrik terjual sebesar 614.472.107 KWh, dipakai sendiri sebesar 8.903.206 KWh, susut/hilang sebesar 70.309.468 KWh.

2.3.3.5 Perdagangan

Provinsi Papua melakukan ekspor bijih tembaga dan konsentrat (HS26) dengan volume ekspor mencapai 1.728.475.100 ton atau sekitar 90,99 persen dari total volume ekspor provinsi Papua pada tahun 2021. Total volume ekspor Provinsi Papua sendiri adalah sekitar 1.899.612.101 ton di tahun tersebut. Negara penerima ekspor terbesar dari Papua adalah Negara Jepang, dengan nilai ekspor ke negara tersebut sekitar US\$ 1.366.460.621. Selain Jepang, dua negara lain yang menjadi penerima ekspor terbesar Papua adalah negara Asia lainnya dan Korea Selatan dengan nilai ekspor masing-masing mencapai US\$ 648.696.536 dan US\$ 637.536.734. Perkembangan impor di Provinsi Papua cukup fluktuatif, dengan mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikan dalam satu tahun terakhir. Nilai impor Papua mengalami peningkatan dari US\$ 191.719.492 di tahun 2020 menjadi US\$ 272.239.487 di tahun 2021.

2.3.3.6 Perindustrian

Perusahaan industri besar dan sedang di Papua tahun 2020 tersebar di 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kabupaten Jayapura (7 industri), Kota Jayapura (10 industri), Kepulauan Yapen (1 industri) dan Biak Numfor (3 industri). Perusahaan industri besar dan sedang mampu menyerap tenaga kerja di Provinsi Papua tahun 2020 sebanyak 1165 tenaga kerja. Adapun lokasi dengan penyerapan tenaga kerja industri besar dan sedang tertinggi terdapat di Kabupaten Biak Numfor (452 tenaga kerja) dan Kota Jayapura (386 tenaga kerja).

Tabel II.74 Jumlah Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2020

Kabupaten/Kota	Industri Mikro dan Kecil		Industri Besar dan Sedang	
	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja
Jayapura	1.227	2.011	7	325
Kepulauan Yapen	1.731	3.403	1	2
Biak Numfor	2.542	4.230	3	452
Sarmi	96	98	0	0
Keerom	179	307	0	0
Waropen	455	776	0	0
Supiori	1.745	2.414	0	0
Mamberamo Raya	89	208	0	0
Kota Jayapura	1.684	3.389	10	386
Papua	9.748	16.836	21	1.165

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Berdasarkan survei industri mikro dan kecil tahunan, dari total industri di Provinsi Papua didominasi usaha industri mikro dan kecil yang mencapai 9.748 industri pada tahun 2020 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Industri mikro dan kecil di Provinsi Papua mampu menyerap tenaga kerja sebesar 16.836 tenaga kerja. Lokasi industri mikro dan kecil terbanyak terdapat di Kabupaten Biak Numfor (2.542 industri), Kabupaten Supiori (1.745 industri), dan Kepulauan Yapen (1.731 industri). Adapun penyerapan tenaga kerja industri mikro dan kecil terbanyak terdapat di Biak Numfor (4.230 tenaga kerja), Kepulauan Yapen (3.403 tenaga kerja), serta Kota Jayapura (3.389 tenaga kerja).

2.4 ASPEK DAYA SAING

2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Salah satu aspek daya saing bagi suatu wilayah adalah melalui kemampuan ekonomi. Daya saing ekonomi daerah di Provinsi Papua ditinjau dari pengeluaran per kapita dan pengeluaran konsumsi makan.

2.4.1.1 PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan suatu perhitungan untuk melihat tingkat kemakmuran pada suatu wilayah. PDRB per kapita didapatkan dengan menghitung pendapatan rata-rata penduduk dari hasil pembagian PDRB dengan populasi yang ada pada suatu wilayah.

Semakin tinggi pendapatan per kapita artinya semakin tinggi tingkat kemakmuran suatu wilayah. Berdasarkan Tabel II.75 diketahui bahwa PDRB ADHB per kapita tertinggi baik dengan maupun tanpa tambang dicapai oleh Kabupaten Jayapura. Diketahui juga bahwa pertumbuhannya semakin meningkat dalam kurun tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020 hingga tahun 2022. Adapun capaian PDRB AHB per kapita dengan tambang di Kabupaten Jayapura pada tahun 2022 adalah sebesar Rp106.313.271,76 dan tanpa tambang adalah sebesar Rp104.964.183,97. Sebaliknya, kabupaten dengan capaian PDRB AHB terendah baik dengan maupun tanpa tambang adalah Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun terus mengalami peningkatan dalam kurun tiga tahun terakhir yaitu 2020 hingga 2022, namun Kabupaten Kepulauan Yapen masih menjadi kabupaten dengan PDRB ADHB terendah. Adapun capaian PDRB AHB dengan tambang pada tahun 2022 di Kepulauan Yapen adalah sebesar Rp40.116.433,93 dan tanpa tambang adalah sebesar Rp39.868.948,14.

Tabel II.75 PDRB Per Kapita Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
PDRB ADHB Per Kapita (Dengan Tambang)			
Jayapura	96.474.479,70	101.050.658,79	106.313.271,04
Kep. Yapen	36.960.294,10	39.162.856,92	40.116.433,93
Biak Numfor	38.802.783,39	40.671.417,61	43.342.696,78
Sarmi	70.862.080,01	74.486.213,89	78.241.330,17
Keerom	47.547.769,86	49.237.050,54	51.072.907,23
Waropen	60.452.726,53	61.436.297,86	66.108.619,73
Supiori	46.379.140,67	47.565.472,69	49.004.238,36
Mamberamo Raya	47.377.017,46	49.624.541,45	52.541.672,67
Kota Jayapura	80.637.679,49	82.026.393,17	86.232.327,04
PDRB ADHB Per Kapita (Tanpa Tambang)			
Jayapura	95.181.722,02	99.719.028,96	104.964.183,97
Kep. Yapen	36.737.720,30	38.925.438,73	39.868.948,14
Biak Numfor	38.407.220,85	40.254.445,17	42.913.724,29
Sarmi	70.026.860,07	73.626.725,41	77.350.454,82
Keerom	46.997.874,73	48.662.579,60	50.471.465,62
Waropen	60.038.358,85	61.011.998,67	65.654.285,12
Supiori	46.180.698,58	47.355.343,06	48.785.034,55
Mamberamo Raya	46.455.221,80	48.654.360,54	51.536.145,77
Kota Jayapura	80.226.476,77	81.595.984,10	85.801.827,25

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Apabila ditinjau berdasarkan harga konstan baik dengan maupun tanpa tambang, Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dengan PDRB ADHB per kapita tertinggi di Provinsi Papua. PDRB ADHB per kapita dengan tambang di Kabupaten Jayapura pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 61.795.088,11 dan tanpa tambang sebesar Rp 60.601.798,77. Terlihat juga bahwa PDRB ADHB per kapita terendah baik dengan maupun tanpa tambang dicapai oleh Kabupaten Biak Numfor. Adapun pada tahun 2022, PDRB

ADHK per kapita dengan tambang di Kabupaten Biak Numfor mencapai Rp 25.793.581,69 dan tanpa tambang mencapai Rp 25.557.692,76.

Tabel II.76 PDRB Per Kapita Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
PDRB ADHK per Kapita Per Kapita (Dengan Tambang)			
Jayapura	58.759.284,89	60.578.455,61	61.795.088,11
Kep. Yapen	24.646.163,46	25.391.966,29	25.965.277,53
Biak Numfor	24.185.719,85	24.673.103,81	25.793.581,69
Sarmi	44.245.545,07	44.563.984,48	45.109.012,73
Keerom	32.405.890,76	32.940.723,03	33.554.747,44
Waropen	43.335.939,16	43.168.889,26	44.453.491,80
Supiori	34.231.781,25	34.172.339,64	34.589.729,71
Mamberamo Raya	27.981.105,92	27.865.427,90	28.249.998,31
Kota Jayapura	55.701.902,69	56.482.331,11	57.692.330,94
PDRB ADHK per Kapita Per Kapita (Tanpa Tambang)			
Jayapura	57.581.943,27	59.381.132,55	60.601.798,77
Kep. Yapen	24.497.540,22	25.235.976,06	25.808.014,87
Biak Numfor	23.956.185,34	24.439.052,27	25.557.692,76
Sarmi	43.601.910,03	43.919.054,92	44.458.230,08
Keerom	32.046.800,09	32.572.735,32	33.185.491,18
Waropen	42.980.627,40	42.811.438,34	44.092.026,08
Supiori	34.112.495,73	34.049.593,63	34.464.844,62
Mamberamo Raya	27.263.857,02	27.129.325,27	27.508.944,06
Kota Jayapura	55.474.188,04	56.255.886,84	57.468.591,63

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.4.1.2 Pengeluaran per Kapita

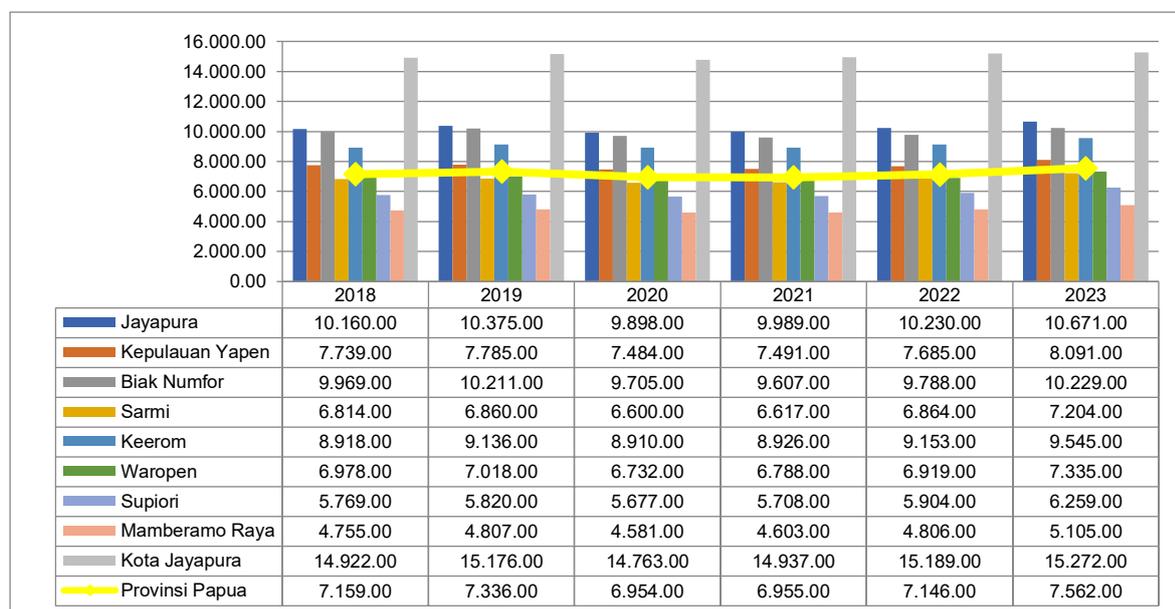
Pengeluaran per kapita dapat dilihat melalui pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga menjadi ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama satu tahun yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Semakin tinggi pengeluaran per kapita menunjukkan semakin banyak uang yang dikeluarkan tiap anggota rumah tangga setiap bulannya. Perhitungan pengeluaran per kapita sudah dihitung menggunakan metode baru. Adapun pengeluaran per kapita di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota ditunjukkan pada Gambar II.67.

Semakin tinggi pengeluaran per kapita menunjukkan semakin banyak uang yang dikeluarkan tiap anggota rumah tangga setiap bulannya. Perhitungan pengeluaran per kapita sudah dihitung menggunakan metode baru.

Pengeluaran per kapita tertinggi dari tahun 2018-2023 adalah Kota Jayapura dengan pengeluaran per kapita pada tahun 2023 mencapai 15.272 rupiah diikuti oleh Kabupaten Jayapura sebesar 10.671 rupiah dan Kabupaten Biak Numfor sebesar 10.229 rupiah.

Sebaliknya, Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan pengeluaran per kapita terendah yaitu sebesar 5.105 rupiah pada tahun 2023.

Gambar II.75 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2018-2023 (Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia di Provinsi Papua ditinjau berdasarkan kapasitas aparatur negara dengan melihat kuantitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin serta dengan melihat rasio ketergantungan dari tingkat produktivitas penduduk berdasarkan usia.

2.4.2.1 Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Guna mencapai tujuan pembangunan, salah satu hal yang dimuat di dalamnya adalah mengenai aparatur pemerintah. Pemerintah perlu bebas dari intervensi politik, bersih praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, profesional, dapat memberikan pelayanan publik, dan berperan sebagai perekat kesatuan bangsa. Tugas aparatur sipil negara adalah melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembantuan tertentu. Penyiapan ketersediaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kualitas secara proporsional di semua instansi menjadi arahan terkait kebijakan pembangunan kepegawaian di daerah.

Tabel II.77 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua

Tingkat Pendidikan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
SD	109	70	31	9	8	3	118	78	34
SMP	205	171	78	31	27	10	236	198	88
SMA	4402	4095	1074	1962	1680	547	6364	5775	1621

Tingkat Pendidikan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Diploma I/Akta I	208	216	3	75	86	10	283	302	13
Diploma II/Akta II	118	101	7	37	29	4	155	130	11
Diploma III/Akta III	1217	1339	315	1192	1231	596	2409	2570	911
Diploma IV/Akta IV	440	496	54	256	256	75	696	752	129
S1/Sarjana	6809	6591	1557	6178	6011	1551	12987	12602	3108
S2/Pasca Sarjana	2013	2109	583	1263	1422	453	3276	3531	1036
S3/Doktor/Ph.D	122	129	23	38	42	5	160	171	28
Jumlah	15643	15317	3725	11041	10792	3254	26684	26109	6979

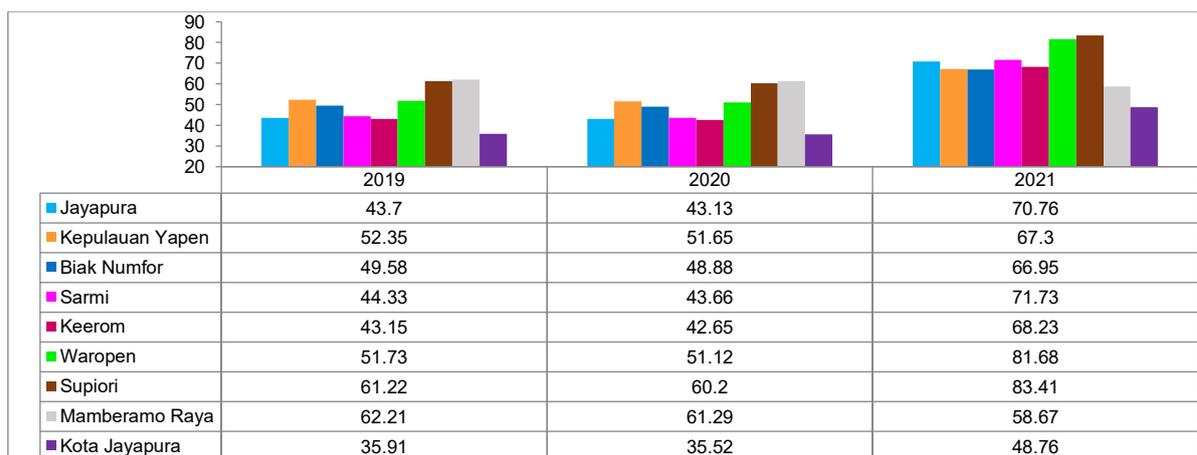
Sumber: BPS dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Salah satu aparat sipil negara daerah di Provinsi Papua adalah Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2023, PNS di lingkungan instansi Provinsi Papua berjumlah 6.979 orang berdasarkan hasil pencatatan dari Badan Kepegawaian Negara. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, data untuk tahun 2023 cenderung mengalami penurunan jumlah. Hal ini dikarenakan sebelum tahun 2023, data masih merupakan data sebelum pemekaran. Jumlah PNS pada tahun 2023 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 3.725 orang. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditempuh PNS di Provinsi Papua adalah S1 yaitu sebanyak 3.108 orang.

2.4.2.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan rasio untuk menunjukkan keadaan ekonomi yang digolongkan dalam negara maju atau negara berkembang. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif maupun tidak produktif lagi menjadi semakin tinggi.

Gambar II.68 Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

Persentase rasio ketergantungan di Provinsi Papua pada tahun 2019-2021. Berdasarkan Gambar II.70 diketahui bahwa rasio ketergantungan menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua meningkat pada tahun 2021. Kabupaten dengan rasio ketergantungan tertinggi

adalah Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura menjadi kota dengan rasio ketergantungan terendah pada tahun 2021. Rasio ketergantungan yang cenderung meningkat pada tahun 2021 di Provinsi Papua menandakan bahwa semakin banyak penduduk produktif yang harus menanggung sejumlah penduduk yang belum produktif maupun tidak produktif lagi.

2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.4.3.1 Prasarana Transportasi

Prasarana transportasi merupakan sarana penunjang lalu lintas pemindahan orang dan atau barang, yang terdiri atas jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan lain-lain yang digunakan oleh masyarakat untuk mobilitas. Oleh karenanya, ketersediaan prasarana transportasi menjadi salah satu fasilitas digunakan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Tabel II.68 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi dan Ketersediaan Angkutan Umum

Kabupaten	Jenis Prasarana Transportasi				Ketersediaan Angkutan Umum		
	Darat	Air	Darat dan Air	Udara	Ada, Dengan Trayek Tetap	Ada, Tanpa Trayek Tetap	Angkutan Umum
Jayapura	109	16	19	0	83	43	18
Kepulauan Yapen	64	50	49	2	53	41	71
Biak Numfor	195	4	69	0	172	73	23
Sarmi	84	14	13	0	64	16	31
Keerom	82	4	5	0	13	14	64
Waropen	62	3	36	10	0	41	70
Supiori	14	8	16	0	22	13	3
Mamberamo Raya	1	43	15	0	3	6	50
Kota Jayapura	36	1	2	0	34	5	0

Sumber: BPS dalam Statistik Potensi Desa 2021 Provinsi Papua

Jenis prasarana transportasi darat menjadi jenis transportasi dengan jumlah terbanyak yang digunakan oleh Masyarakat. Adapun prasarana transportasi darat dan darat dan air terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Biak Numfor dengan masing-masingnya sebanyak 195 unit dan 69 unit. Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi kabupaten dengan prasarana transportasi air terbanyak. Lalu Kabupaten Waropen menjadi kabupaten dengan prasarana transportasi udara terbanyak yaitu berjumlah 10 unit. Adapun ketersediaan angkutan umum dengan dan tanpa trayek tetap terbanyak berada di Kabupaten Biak Numfor yaitu 172 unit dan 73 unit. Sedangkan angkutan umum terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu sebanyak 71 unit disusul Kabupaten Waropen sebanyak 70 unit.

2.4.3.2 Infrastruktur Komunikasi

Infrastruktur komunikasi menjadi salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan masyarakat untuk menjalin komunikasi dan berjejaring. Wilayah Provinsi Papua yang luas

juga disertai kebutuhan akan komunikasi dan jejaring yang tinggi bagi masyarakat, infrastruktur komunikasi menjadi salah satu infrastruktur penting di wilayah Papua. Apabila ditinjau berdasarkan masing-masing kampung/kelurahan, angka ketersediaan BTS pada kategori “tidak ada”, jauh lebih banyak dibandingkan area yang telah terlayani oleh BTS, kecuali Kota Jayapura. Selain itu, masih terdapat beberapa daerah pada masing-masing kabupaten/kota yang masih belum terlayani oleh sinyal seluler. Sinyal internet telepon seluler juga telah menjangkau beberapa kampung/kelurahan pada masing-masing kabupaten dengan paling banyak sudah terlayani oleh sinyal 4G/LTE. Namun juga masih ditemukan beberapa area pada masing-masing kabupaten yang belum terlayani sinyal internet. Kabupaten Biak Numfor menjadi kabupaten dengan jumlah kampung/kelurahan terbanyak yang tidak memiliki sinyal akses internet.

Tabel II.78 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Keberadaan Base Transceiver Station (BTS), Sinyal Telepon Seluler, dan Sinyal Internet Telepon Seluler

Kabupaten	Keberadaan BTS		Kekuatan Sinyal Seluler				Sinyal Internet Telepon Seluler			
	Ada	Tidak Ada	Sangat Kuat	Kuat	Lemah	Tidak Ada Sinyal	4G/LTE	3G/H/H+/E VDO	2,5G/1/GPRS	Tidak Ada Sinyal Internet
Jayapura	36	108	33	51	37	23	63	31	8	19
Kepulauan Yapen	16	149	4	41	51	69	61	9	8	18
Biak Numfor	57	211	77	76	75	40	149	10	30	39
Sarmi	25	86	18	33	30	30	40	18	14	9
Keerom	28	63	16	22	22	31	36	9	1	14
Waropen	11	100	2	25	13	71	24	1	0	15
Supiori	16	22	1	14	16	7	9	4	4	14
Mamberamo Raya	14	45	4	10	5	40	10	2	2	5
Kota Jayapura	31	8	23	14	1	1	38	0	0	0

Sumber: BPS dalam Statistik Potensi Desa 2021 Provinsi Papua

Adapun warnet menjadi keberadaan sarana komunikasi terbanyak yang dimiliki masing-masing kampung/kelurahan di Provinsi Papua. Selain itu, keberadaan sarana komunikasi lainnya yang dapat melayani masyarakat di antaranya adalah keberadaan kantor pos/pos pembantu, pos keliling, dan perusahaan jasa ekspedisi swasta.

Tabel II.79 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Komunikasi

Kabupaten	Warnet	Kantor Pos/Pos Pembantu	Pos Keliling	Perusahaan Jasa Ekspedisi Swasta
Jayapura	26	5	7	7
Kepulauan Yapen	14	1	0	3
Biak Numfor	32	11	15	8
Sarmi	10	1	1	1
Keerom	9	1	4	4
Waropen	7	1	0	5
Supiori	3	2	1	2
Mamberamo Raya	4	1	0	0
Kota Jayapura	20	9	1	16

Sumber: BPS dalam Statistik Potensi Desa 2021 Provinsi Papua

2.4.3.3 Penataan Ruang

Penataan ruang Provinsi Papua diselenggarakan dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa keberadaan ruang yang terbatas sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Undang-undang mengamanatkan disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai acuan pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, arahan lokasi investasi, serta pedoman pemanfaatan ruang. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan, bahwa terhadap kawasan-kawasan tertentu yang memiliki nilai strategis perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang sebagai penjabaran RTRW.

Provinsi Papua telah memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tahun 2023-2042 yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033, yang memuat kesesuaian dengan kebutuhan ruang untuk pembangunan di Provinsi Papua dikarenakan terjadinya dinamika pembangunan, perubahan regulasi sektoral, RTRW Nasional, serta banyaknya kegiatan strategis di tingkat nasional dan regional.

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua telah memiliki Perda RTRW namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu dilakukan revisi terhadap Perda RTRW Kabupaten/kota untuk menyesuaikan kebijakan regional, nasional, provinsi maupun kebijakan sektoral dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan investasi sedangkan untuk RDTR baru kabupaten Jayapura menetapkan Peraturan Bupati tentang RDTR Perkotaan Sentani dan Kabupaten Biak Numfor menetapkan Peraturan Bupati tentang RDTR Pekotaan Biak.

2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.4.4.1 Laju Inflasi Daerah

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Papua di 3 kota IHK, pada Januari 2023, terjadi inflasi y-o-y sebesar 5,23 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,76 pada Januari 2022 menjadi 112,35 pada Januari 2023. Tingkat inflasi month-to-month sebesar -0,40 persen dan tingkat inflasi year-to-date sebesar -0,40 persen. Jika dirinci menurut 3 kota HK dan inflasi mtm, maka pada Januari 2023 di Merauke terjadi inflasi sebesar 0,41 persen, Timika terjadi inflasi -0,60 persen dan Kota Jayapura dengan inflasi sebesar -0,55 persen. Sedangkan untuk inflasi yoy, terjadi inflasi sebesar 4,41 persen di Merauke, sebesar 5,75 persen di Timika dan Kota Jayapura mengalami inflasi 5,26 persen. Secara nasional, inflasi yoy tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dan terendah di Sorong sebesar 3,23 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran dan kelompok pengeluaran

yang memberikan andil/sumbangan inflasi. Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi year-on-year pada Januari 2023, antara lain: angkutan udara, bensin, beras, biaya akademi/perguruan tinggi dan angkutan dalam kota. Sementara beberapa komoditas yang dominan memberikan andil deflasi year-on-year antara lain: biaya ponsel, ikan ekor kuning, bawang putih, ikan tongkol, dan kangkung.

Tabel II.80 Tingkat Inflasi Provinsi Papua Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	<i>Month to Month (mtm) Januari</i>	-0,27	0,03	-0,40
2	<i>Year to Date (ytd) Januari</i>	-0,27	0,03	-0,40
3	<i>Year on Year (yoy) Januari</i>	0,93	2,10	5,23

Sumber: BPS Provinsi Papua

2.4.4.2 Kondisi Politik dan Keamanan

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tercatat tahun 2016 IDI Papua adalah sebesar 61,02 persen meningkat 3,52 point pada tahun 2020 menjadi 64,54 persen. Hal tersebut juga tidak terlepas dari komponen pembentuk dari setiap aspek diantaranya Aspek Kebebasan Sipil (Persen); Aspek Hak-Hak Politik (Persen); dan Aspek Lembaga Demokrasi (Persen).

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan aspek pembentuk IDI, persentase hak-hak politik cenderung meningkat meskipun nilainya tergolong cukup rendah. Sedangkan untuk kedua aspek lainnya yaitu kebebasan hak sipil dan Lembaga demokrasi cenderung mengalami penurunan. Meskipun cenderung aspek kebebasan sipil terlihat mengalami penurunan, tetapi capaian rata-rata pertahun tergolong cukup tinggi.

Tabel II.81 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek di Provinsi Papua, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Demokrasi Indonesia (Persen)	61,02	61,34	62,20	65,25	64,54
Aspek Kebebasan Sipil (Persen)	92,15	89,09	84,36	93,08	89,32
Aspek Hak-Hak Politik (Persen)	41,13	42,16	47,90	51,16	53,54
Aspek Lembaga Demokrasi (Persen)	53,45	56,91	57,05	52,61	51,83

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Berdasarkan metode baru perhitungan IDI, terdapat perubahan indikator dalam aspek-aspek perhitungan IDI. Penggunaan indikator-indikator baru menghasilkan perbedaan nilai yang signifikan bagi Provinsi Papua. Adapun nilai IDI provinsi mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 66,65 dari sebelumnya 66,39.

Tabel II.82 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek Berdasarkan Metode Baru di Provinsi Papua, 2021-2022

Uraian	2021	2022
Indeks Demokrasi Indonesia (Persen)	66,39	66,65
Aspek Kebebasan (Persen)	75,64	67,23
Aspek Kesetaraan (Persen)	62,3	67,85
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (Persen)	62,15	64,63

Sumber: BPS RI, 2023

Tingkat kriminalitas di Papua tercatat dalam tiga tahun terakhir mengalami perbaikan. Tercatat terjadi penurunan jumlah kasus kejahatan setiap tahunnya, sama halnya dengan resiko penduduk yang berpotensi ditindakpidanakan. Penyelesaian tindak pidana sampai dengan tahun 2021 sebesar 42,82 persen, menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 45,79 persen. Penyelesaian kasus tindak pidana merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun angkanya tercatat menurun setiap tahunnya.

Tabel II.83 Tingkat Kriminalitas di Provinsi Papua Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	3.347	4.304	4.355
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (kasus)	8.551	8.005	6.864
Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (per 100.000 Penduduk)	248,7	234,28	199,64
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen)	50,18	45,79	42,82
Tingkat Kriminalitas (Persen)	25,55	18,60	15,76

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

2.4.4.3 Produktivitas Total Daerah

Kontribusi tenaga kerja di Papua selama lima tahun terkahir terhadap produk domestik regional bruto (PDRB ADHB Tanpa Tambang) semakin baik. Jika dilihat berdasarkan trend perkembangan produktivitas total daerah selama 2017-2021 mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan.

Tabel II.84 Produktivitas Total Daerah Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB Tanpa tambang (Rp. Juta)	122.457.689	133.409.669	144.899.565	142.683.470	148.652.165
Angkatan Kerja (jiwa/orang)	1.762.841	1.835.963	1.842.203	1.769.403	1.952.777
Produktivitas total daerah (P)	69,47	72,66	78,66	80,64	76,12

Komponen pembentuk produktivitas total pada indikator PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sedangkan pada Angkatan kerja terjadi penurunan pada periode 2019-2020. Pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang berdampak kepada pengurangan tenaga kerja khususnya pada sektor swasta. Sehingga meningkatkan angka pengangguran secara keseluruhan di Provinsi

Papua. Sampai dengan tahun 2021 produktivitas TK dalam perekonomian dalam perekonomian adalah sebesar Rp.76,12 Juta/TK/tahun yang tercatat menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp.80,64 Juta/TK/tahun.

2.5 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM dan KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN dan REALISASI RPJMD

Kinerja pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2023 dapat diukur dari realisasi ketercapaian indikator program pembangunan daerah ppada pelaksanaan RKPD tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun 2023 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2027 Nilai peringkat kinerja reaisasi RKPD Tahun 2023 berdasarkan urusan sebagaimana secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat tinggi dengan rician sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.85 Kriteria Penilaian Kinerja Per Urusan Provinsi Papua

No.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Intervensi Nilai Realisasi s/d Triwulan IV 2023	Jumlah Urusan
1.	Sangat Tinggi	$x > 91 \%$	26 Urusan
2.	Tinggi	$76 \% \leq x < 90 \%$	11 Urusan
3.	Sedang	$66 \% \leq x < 75 \%$	2 Urusan
4.	Rendah	$51 \% \leq x < 65 \%$	-
5.	Sangat Rendah	$< 50 \%$	-

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan evaluasi rata-rata tingkat capaian kinerja RPJMD tahun 2023 pada 42 urusan pemerintahan di Provinsi Papua berada pada level sangat tinggi - Tinggi Adapun urusan kesehatan dan perdagangan memiliki capaian Sedang, hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya data-data yang tidak bisa didiskripsikan karena tidak dilaksanakannya Pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 secara kontinyu

Tabel II.86 Rekapitulasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023

Indikator	Rata-rata Tingkat capaian Kinerja RPJMD Tahun 2023	Predikat
Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
Pendidikan	92,92	Sangat Tinggi
Kesehatan	69,46	Sedang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82,76	Tinggi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	83,83	Tinggi
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	89,03	Tinggi
Sosial	93,45	Sangat Tinggi
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
Tenaga Kerja	92,6	Sangat Tinggi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	95,32	Sangat Tinggi
Lingkungan Hidup	89,84	Tinggi
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,9	Sangat Tinggi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	95,82	Sangat Tinggi
Perhubungan	76,79	Tinggi

Indikator	Rata-rata Tingkat capaian Kinerja RPJMD Tahun 2023	Predikat
Komunikasi dan Informatika	94,93	Sangat Tinggi
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	81,13	Tinggi
Penanaman Modal	92,65	Sangat Tinggi
Kepemudaan dan Olahhrga	94,21	Sangat Tinggi
Persandian	99,99	Sangat Tinggi
Kebudayaan	98,78	Sangat Tinggi
Perpustakaan	99,81	Sangat Tinggi
Kearsipan	98,74	Sangat Tinggi
Urusan Pilihan		
Kelautan dan Perikanan	94,46	
Pariwisata	90,59	
Pertanian	95,19	
Kehutanan	98,25	
Energi dan Sumber Daya Mineral	93,55	
Perdagangan	68,7	Sedang
Perindustrian	98,74	Sangat Tinggi
Transmigrasi	100	Sangat Tinggi
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
Perencanaan	79,9	Tinggi
Keuangan	85,65	Tinggi
Kepegawaian	90,69	
Pendidikan dan Pelatihan	93,88	
Penelitian dan Pengembangan	99,44	
Penghubung	95,4	
Pengelolaan Perbatasan	95,04	
Inspektorat Daerah	88,52	Tinggi
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
Sekretariat Daerah	84,04	Tinggi
Sekretariat DPRD	96,14	Sangat Tinggi
Unsur Pemerintahan Umum		
Kesatuan bangsa dan Politik	82,38	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis (Data diolah, 2024)

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun anggaran 2023 disampaikan secara detail Lampiran 2 dokumen RKPD ini.

2.6 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.6.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah. Kemudian untuk masalah merupakan hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, biasanya dipecahkan dalam bentuk strategi-strategi khusus. dan akar masalah adalah hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah yang lebih rinci, dimana

pemecahannya melalui kegiatan-kegiatan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pembahasan ini, disampaikan beberapa masalah pokok pembangunan di Papua yang harus diagendakan untuk dituntaskan di masa depan.

2.6.1.1 Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Masih Rendah

Kualitas pembangunan ekonomi yang rendah ini ditandai dengan masih tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi, kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian wilayah sangat rendah, tenaga kerja yang belum berkualitas, daya saing investasi yang rendah, dan tingginya defisit perdagangan antardaerah. Adapun deskripsi dan data dukung perumusan masalah pokok “kualitas pembangunan ekonomi yang masih rendah” ditampilkan dalam Tabel II.87.

Tabel II.87 Permasalahan Pokok 1: Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Masih Rendah

No	Masalah	Deskripsi dan Data Dukung
1	Ketimpangan pembangunan ekonomi yang tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi topografi yang sebagian besar berlereng, dengan curah hujan yang tinggi, merupakan kendala utama dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua karena menyebabkan sulitnya membangun infrastruktur dasar dan tingginya biaya transportasi (high cost). Hal ini menjadi hambatan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi secara merata baik itu antarsektor maupun antarwilayah b. Indeks Ketimpangan Ekonomi (IKE) berdasarkan ukuran koefisien variasi di Provinsi Papua selama tahun 2016-2022 dinilai sangat tinggi, baik itu secara sektoral maupun spasial. c. Secara sektoral rata-rata IKE Papua mencapai 1,6233 poin per tahun, yang bermakna bahwa derajat penyimpangan nilai PDRB dari masing-masing sektor ekonomi terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,6233 poin per tahun. d. IKE untuk ketimpangan spasial rata-rata mencapai 1,4377 per tahun yang artinya penyimpangan nilai PDRB per kapita pada masing-masing wilayah terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,4377 poin per tahun. Kedua angka IKE ini masih jauh sekali dari batas IKE terendah sebesar 0,2 poin.
2	Rendahnya kontribusi industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Selama periode 2018-2022 peranan sektor industri pengolahan dalam menciptakan nilai tambah regional (PDRB) Provinsi Papua sangat rendah, rata-rata hanya mencapai 1,93% per tahun berdasarkan PDRB-DT (PDRB Dengan Tambang), dan 3,10% per tahun pada PDRB-TT (PDRB Tanpa Tambang). Keduanya dengan perkembangan yang cenderung menurun selama periode tersebut. b. Pondasi perekonomian Papua selama ini didominasi oleh sektor-sektor ekonomi yang ekstraktif (pertanian dan pertambangan), hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah melalui berbagai program dan proyek untuk mengaktifkan peran serta dan pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum menunjukkan hasil yang baik, dimana sebagian besar sumber daya alam Papua yang ada dikirim ke luar tanpa melalui proses pengolahan. c. Belum berperannya sektor industri pengolahan dalam menggerakkan perekonomian wilayah menandakan bahwa ada ketergantungan yang berlebih pada pengelolaan SDA sebagai komoditas ekspor, investasi dan pendapatan daerah. Kondisi ini dapat melemahkan pondasi perekonomian wilayah dimasa mendatang, oleh karena volatilitas harga dan jumlah produksi hasil ekstraktif (misal: komoditi pertanian) sangat tinggi, sehingga menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang tinggi juga. Beda halnya dengan produk-produk hasil industri pengolahan yang bersifat durable goods (barang-barang tahan lama), harga dan produksinya cenderung terus mengalami peningkatan, memiliki umur ekonomi yang panjang, dapat disimpan lebih lama, harga yang lebih kompetitif, dan yang paling utama sektor industri pengolahan ini mampu menjadi leading sektor yang lebih mapan dalam perekonomian wilayah.

No	Masalah	Deskripsi dan Data Dukung
3	Kualitas tenaga kerja yang rendah	<p>a. Struktur tenaga kerja di Provinsi Papua selama ini lebih dominan pada tenaga kerja dengan pendidikan SD dan kebawah, rata-rata sekitar 59,48% per tahun. Sedangkan untuk tenaga kerja yang berpendidikan SMA/SMK dan ke atas hingga pendidikan tinggi, yang dikategorikan tenaga kerja yang berkualitas, hanya 27,82% per tahun untuk waktu yang sama.</p> <p>b. Struktur tenaga kerja sektoral selama tahun 2021-2023 lebih terkonsentrasi pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang kurang memerlukan tenaga kerja berpendidikan, dengan pangsa tenaga kerja sekitar 69,23% per tahun.</p> <p>c. Tingkat upah di sektor pertanian paling rendah, dan sebagian juga merupakan tenaga kerja keluarga, akhirnya kemampuan sektor tersebut untuk mentransmisi pendapatan keluarga di atas garis kemiskinan sangat rendah, sehingga banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian selama ini masih belum mampu mengakselerasi penurunan kemiskinan di Papua lebih baik.</p>
4	Daya saing investasi yang rendah	<p>a. Perkembangan ICOR Provinsi Papua selama periode 2011- 2022 sangat fluktuatif berkisar diantara 15,83 poin paling tinggi di tahun 2012, dan 2,28 poin paling rendah di tahun 2021, dengan asumsi ICOR negatif diabaikan dalam perhitungan.</p> <p>b. Rata-rata ICOR selama periode 2011-2022 mencapai 6,29 poin per tahun, dengan kata lain-lain untuk meningkatkan PDRB Papua sebesar 1 rupiah rata-rata dibutuhkan tambahan investasi sebesar 6,29 rupiah per tahun. Angka ini sangat tinggi jauh di atas batas maksimum ICOR efisien sebesar 4,00 poin. Sehingga terindikasi selama ini ada inefisiensi (pemborosan) dalam perekonomian Papua sebesar 36,40% per tahun, yang menandakan juga daya saing investasi sangat rendah.</p>
5	Defisit perdagangan antardaerah yang sangat tinggi	<p>a. Keterkaitan dan hubungan kerja sama ekonomi antarwilayah yang saling menguntungkan sangat diperlukan bagi pembangunan di suatu daerah. Karena pada hakikatnya, tidak ada satupun daerah yang mampu memenuhi segala kebutuhannya dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki sendiri karena adanya keterbatasan dan kelangkaan. Namun begitu, jika keterkaitan dan hubungan tersebut tidak berimbang, dimana ada salah satu yang mendominasi karena sangat kuat, maka hal tersebut tidaklah sehat bagi pembangunan ekonomi wilayah yang posisinya lemah. Kondisi seperti inilah yang terjadi di Papua</p> <p>b. Sepanjang tahun 2015-2022 rasio neraca perdagangan antar daerah terhadap PDRB Provinsi Papua lebih banyak mengalami defisit dengan kecenderungan yang meningkat, bahkan di tahun 2021 sempat menyentuh angka -9,98%. Meskipun di tahun 2022 ada koreksi penurunan, akan tetapi kondisi defisit masih tetap besar, yaitu -6,40%.</p> <p>c. Jika dihitung rata-ratanya selama periode 2015-2022, terlihat rasio defisit di Provinsi Papua bisa mencapai -4,24% per tahun. Dengan kata lain ada kebocoran ekonomi rata-rata -4,24% per tahun. Kondisi ini jelas sangat tidak menguntungkan Papua, oleh karena rasio defisit yang besar tersebut menyebabkan: (1) banyak modal yang lari ke luar; (2) hilangnya potensi efek multiplier; (3) ketergantungan ekonomi terhadap daerah luar bertambah tinggi; (4) kesenjangan antardaerah semakin melebar; dan (5) daya saing perekonomian daerah semakin rendah.</p>

Sumber: Hasil Analisis (2024)

2.6.1.2 Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Sosial Budaya

Kualitas pembangunan sosial budaya yang belum optimal ini ditandai dengan rendahnya akses dan mutu pendidikan; belum optimalnya akses dan derajat kesehatan, tingginya ketimpangan gender dan rendahnya perlindungan terhadap anak, rendahnya daya saing kepemudaan, dan pelayanan kesejahteraan sosial yang belum memadai. Adapun deskripsi

dan data dukung perumusan masalah pokok “belum optimalnya kualitas pembangunan sosial budaya” ditampilkan dalam Tabel II.88.

Tabel II.88 Permasalahan Pokok 2: Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Sosial Budaya

No	Masalah	Deskripsi dan Data Dukung
1	Rendahnya akses dan mutu pendidikan	<p>a. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua baru mencapai 7,2 tahun di tahun 2023, yang terlihat hanya meningkat rata-rata 0,1 tahun dari tahun 2010. Apabila akselerasi lama sekolah masih sama seperti periode sebelumnya, maka di tahun 2045 diperkirakan Pemerintah Provinsi Papua hanya sanggup mewujudkan Rata-rata Lama Sekolah bagi penduduknya sebesar 9,8 tahun, ini masih jauh di bawah target generasi emas Indonesia melalui program wajib belajar 12 tahun.</p> <p>b. Selain akses yang belum memadai, kualitas pendidikan di Papua juga terlihat sangat kurang. Hal ini ditandai salah satunya dengan jumlah sekolah yang masih banyak belum terakreditasi, contohnya di tahun 2021 mencapai 43,70% dari total 4.774 Satuan Pendidikan (SP), dengan rincian secara berurutan yang paling tinggi adalah pada satuan pendidikan SD sebanyak 1.176 unit (56,38%), kemudian PAUD sebanyak 540 unit (25,89%), SMP sebanyak 268 unit (12,85%), SMA sebanyak 67 unit (3,21%), dan SMK sebanyak 35 unit (1,68%).</p>
2	Belum optimalnya pelayanan kesehatan	<p>a. Berdasarkan hasil Long Form SP2020, AKB (Angka Kematian Bayi) di Indonesia adalah 16,85 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dimana AKB tertinggi berada di Provinsi Papua yaitu sebesar 38,17 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dan AKB terendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,38 kematian per 1.000 kelahiran hidup.</p> <p>b. Berdasarkan hasil Long Form SP2020 besaran AKI di Indonesia sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup, dengan AKI paling tinggi di Papua sebesar 565 per 100.000 kelahiran hidup, dan terendah sebesar 48 per 100.000 kelahiran hidup di DKI Jakarta.</p> <p>c. Provinsi Papua saat ini masih merupakan endemik malaria tertinggi di Indonesia. Berdasarkan catatan WHO pada tahun 2021 ditemukan 811.636 kasus malaria baru, dimana sekitar 89% dari banyaknya kasus tersebut ada di Provinsi Papua. Sejauh ini Malaria menjadi salah satu penyebab paling besar pada kematian ibu dan anak. Selain malaria, kematian ibu dan anak di Papua juga dipengaruhi infeksi, TB, dan masalah perilaku ibu hamil seperti tekanan darah tinggi, jarang melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, serta kurang menjaga pola makan.</p> <p>d. Masih banyak puskesmas di Papua yang belum memenuhi standar puskesmas sesuai Permenkes RI No 43 tahun 2019 dan ada yang belum terakreditasi. Sesuai dengan standar yang ditetapkan, setidaknya-tidaknya dalam sebuah Puskesmas tersedia 9 jenis tenaga medis, yaitu Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Farmasi, Kesmas, Keslink, Gizi, dan tenaga laboratorium medik. Berdasarkan buku Data Dasar Puskesmas Kondisi 31 Desember 2019 Provinsi Papua yang diterbitkan Kemenkes RI, jumlah Puskesmas yang telah memenuhi standar tersebut hanya sebanyak 27 puskesmas atau sekitar 14,59% dari total Puskesmas yang terdata. Sedangkan untuk proporsi Puskesmas yang belum terakreditasi di tahun 2019 sebanyak 25,43%, dalam proses akreditasi sebanyak 5,61%, dan sudah terakreditasi sebanyak 69,16%.</p>
3	Masih tingginya ketimpangan gender	<p>a. IKG (Indeks Ketimpangan Gender) Papua tahun 2023 mencapai 0,515 poin, yang masuk dalam 10 besar tertinggi di Indonesia. Nilai ini hanya terkoreksi 0,02 poin dari data IKG tahun 2021 sebesar 0,535 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian pembangunan manusia di Papua belum inklusif karena terdistorsi oleh adanya ketimpangan gender yang tinggi.</p> <p>b. Keterlibatan perempuan dalam perlemen hanya 15,94% pada tahun 2022, masih jauh dibawah angka ideal 30%.</p> <p>c. Rata-rata Lama Sekolah perempuan 6 tahun, di bawah laki-laki 7,4 tahun.</p> <p>d. Angka Buta Huruf perempuan lebih tinggi sebesar 16,71%, sedangkan laki-laki sebesar 13,67%</p> <p>e. TPAK perempuan lebih rendah sebesar 69,09%, dan laki-laki sebesar 85,49%.</p>

No	Masalah	Deskripsi dan Data Dukung
4	Daya saing kepemudaan yang masih rendah	<p>a. Sepanjang periode 2015-2022, IPP Provinsi Papua bergerak diantara angka 48,00 poin di tahun 2015 dan 55,50 untuk tahun 2022, dengan rata-rata peningkatan 1,07 poin per tahun (Kemenpora RI, 2023). Selama 7 tahun tersebut cenderung IPP Provinsi Papua berada pada urutan terendah di Indonesia.</p> <p>b. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Provinsi Papua dalam pembangunan pemuda (IPP) terdapat pada domain pendidikan yang nilai indeksnya cenderung tidak mengalami perubahan dalam periode 2017–2021, dan terendah di Indonesia. Hal ini terjadi karena capaian indikator-indikator domain ini masih rendah, yang menggambarkan daya saing pemuda di Papua selama ini rendah, yang tercermin pada kondisi dimana sebagian besar pemuda Papua berpendidikan SMU ke bawah, bahkan ada yang tidak pernah bersekolah dan tidak sedikit pula yang putus sekolah yang disebabkan kondisi sosial ekonomi.</p> <p>c. Rendahnya tingkat pendidikan pemuda, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, antara lain ketidakmampuan dalam bersaing, terbatasnya peluang kerja yang menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik.</p>
5	Pelayanan kesejahteraan sosial yang belum memadai	<p>a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang paling banyak ditangani oleh pemerintah Provinsi selama ini adalah keluarga fakir miskin.</p> <p>b. Meskipun pemerintah terlihat cukup berhasil mereduksi tingkat kemiskinan hingga mencapai 26,03% di tahun 2023 (BPS Papua, 2023), akan tetapi penanganan masalah penduduk fakir miskin ternyata belum berjalan optimal, dimana jumlah fakir miskin cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.</p> <p>c. Selain fakir miskin, PMKS yang juga banyak ditangani pemerintah provinsi adalah penyandang HIV/AIDS. Data per Desember 2022 menunjukkan sekitar 50.502 orang penderita HIV/AIDS dengan pembagian Laki-laki 23.590 orang dan Perempuan 26.822 orang. Jalur penularan HIV/AIDS paling banyak ditemukan melalui hubungan seksual bebas yang ditularkan dari para pekerja seksual.</p>

Sumber: Hasil Analisis (2024)

2.6.1.3 Penanganan Terhadap Keamanan dan Ketertiban Umum Belum Optimal

Provinsi Papua termasuk 5 (lima) daerah dengan angka kriminalitas tertinggi di Indonesia di tahun 2021. Sebagaimana yang dipublikasikan oleh BPS RI (2022), Crime Rate Papua di tahun 2021 mencapai 186 per 100.000 penduduk, sedangkan pada tingkat nasional sebesar 90 per 100.000 penduduk. Dimana tingkat penyelesaian tindak pidana di Papua untuk tahun yang sama hanya mencapai 42,45%, paling rendah ketiga di Indonesia, dengan jumlah tindak pidana sebanyak 6.236 kasus. Kemudian dalam hal penanganan bencana daerah, Papua selama ini belum dapat menurunkan level resiko bencana dari kategori Sedang ke Rendah. Selama tahun 2016-2022 nilai IRB (Indeks Resiko Bencana) Papua berkisar diantara 122,15 - 125,31 poin, dimana hingga saat sekarang masih ada 5 daerah yang tergolong resiko tinggi, yaitu Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Merauke dan Nabire. Daerah lainnya termasuk dalam kategori resiko sedang. Seluruh fenomena ini mengindikasikan bahwa tingkat keamanan dan ketertiban umum di Papua belum begitu optimal mendukung pelaksanaan pembangunan daerah selama ini.

2.6.1.4 Tingkat Kerawanan Politik dan Demokrasi yang Patut Diwaspadai

Kebebasan berpendapat di Papua selama ini merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi dalam kehidupan berdemokrasi. Demokrasi yang ditandai oleh partisipasi, transparansi, dan politik yang akuntabel telah menjadi pusat tumbuhnya kebebasan berpendapat, baik di

level individu maupun kelompok. Namun, kebebasan yang tidak terkendali saat ini telah mendistorsi demokrasi yang dimanfaatkan untuk menyerang kepentingan orang lain atau kelompok lain tanpa data dan informasi yang valid, ini tercermin dengan semakin maraknya hoax, hate speech, dan propaganda hitam yang cenderung negatif mengganggu pelaksanaan pembangunan di Papua. Sebagai contoh pada tahun 2023 Aparat Kepolisian Daerah Papua menemukan penyebaran berita bohong atau hoaks yang masif di wilayah Papua. Berdasarkan hasil pantauan selama 3 bulan (Januari-Maret 2023), ditemukan 2-3 berita hoaks setiap harinya tersebar di Papua.

Narasi yang disampaikan penyebar hoaks terindikasi ingin memprovokasi masyarakat sehingga memunculkan aksi yang dapat berdampak pada gangguan keamanan dan kriminalitas. Perkembangan teknologi digital dan kemudahan untuk mengakses berbagai media sosial (internet, Instagram, whatsapp, face book, dan lain-lain) menjadi salah satu pemicu beredarnya informasi yang bertendensi negatif tersebut.

Selanjutnya untuk aspek politik, meskipun Papua dinilai tingkat partisipasi pemilihnya terbanyak di Indonesia pada Pilkada 2018, yaitu sebesar 84% (Bawaslu RI, 2018), namun pada tahun tersebut tingkat kerawanan politik di Papua dinilai Tinggi, sebagaimana yang dinyatakan Bawaslu RI bahwa: dari 17 provinsi yang melaksanakan Pilkada serentak 2018, terdapat tiga provinsi yang masuk kategori nilai Kerawanan Tinggi, yaitu: Papua (3,41), Maluku (3,25), dan Kalimantan Barat (3,04). Selanjutnya di tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih di Papua juga dinilai paling tinggi di Indonesia yaitu sebesar 95,75%, akan tetapi tingkat kerawanan politik ternyata dinilai lebih tinggi dari rata-rata Indonesia dengan skor IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) sebesar 49,63 poin. Begitu juga di tahun 2020, tingkat kerawanannya malah meningkat menjadi 51,57 poin, dan terakhir di tahun 2024 diprediksi tingkat kerawanan politik di Papua semakin meningkat menjadi 57,27 poin yang dianggap merupakan tingkat kerawanan patut diwaspadai (Bawaslu RI, 2024).

2.6.1.5 Sarana Prasarana dan Konektivitas yang Belum Memadai

Dalam pembangunan daerah sangat diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, guna mendukung berjalannya aktivitas suatu daerah. Adapun konektivitas merupakan kondisi yang menyebabkan atau memungkinkan dua atau lebih pusat pelayanan saling terhubung untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Sarana prasarana dan konektivitas seperti jalan, air bersih, sanitasi, pasar, terminal, dan lain-lain harus seimbang dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang merugikan masyarakat. Tabel II.89 menampilkan permasalahan pembangunan sarana prasarana dan konektivitas di Provinsi Papua.

Tabel II.89 Permasalahan Pembangunan Sarana Prasarana dan Konektivitas di Provinsi Papua

No	Sarana Prasarana	Deskripsi dan Data Dukung
1	Panjang jalan	Total panjang jalan di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2021 baru mencapai 21.563 km, dimana sekitar 44,31% dalam kondisi rusak dan rusak berat, dan hanya 20,77% yang dalam keadaan baik, serta 34,93% yang dalam kondisi sedang.

No	Sarana Prasarana	Deskripsi dan Data Dukung
2	Air bersih	Selama periode 2011-2022 kondisi akses air bersih pada masyarakat di Provinsi Papua masih di bawah 50%, yang cenderung mengalami penurunan sekitar -0,33% per tahun yaitu dari 39,43% di tahun 2011 menjadi 35,77% tahun 2022.
3	Listrik	Tingkat elektrifikasi di Provinsi Papua masih belum memadai dan menyebar tidak merata. Merujuk pada data BPS Provinsi Papua, di tahun 2022 tercatat elektrifikasi penduduk baru mencapai 79,96% yang sebagian besar terdistribusi pada kota-kota besar seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Merauke, Timika.
4	Rumah layak huni	Kepemilikan rumah layak huni di Provinsi Papua selama tahun 2018-2022 mengalami penurunan sekitar -10,32% per tahun. Dimana pada tahun 2018 proporsi kepemilikan rumah layak huni sebesar 58,23%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 27,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah rumah tangga yang tinggi tidak diimbangi dengan penambahan ketersediaan rumah layak huni secara proporsional.
5	Komunikasi dan informasi	Ketersediaan akses komunikasi dan informasi melalui internet saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Papua cukup banyak tersedia menara BTS (Base Transceiver Station) yang dapat memfasilitasi akses terhadap internet tersebut melalui jaringan 3g/4g. Tercatat pada tahun 2020 sudah ada 213 unit menara BTS di Papua, yang dikelola oleh Telkomsel sebanyak 175 unit, XL sebanyak 36 unit, dan Indosat sebanyak 2 unit (Kementerian Kominfo RI, 2022). Akan tetapi, dengan jumlah BTS sebanyak itu masih belum mampu untuk melayani kebutuhan akses internet yang memadai, karena hingga tahun 2022 berdasarkan publikasi dari Kemendesa-DT RI melalui rekomendasi IDM 2022 menunjukkan masih sekitar 93,34% kampung yang masyarakatnya belum dapat mengakses internet.
6	Transportasi darat	Jumlah kendaraan bermotor di Papua, berdasarkan data BPS RI tahun 2021 sebanyak 449.709 unit kendaraan yang didominasi oleh sepeda motor sekitar 87,16%, dan 12,84% merupakan mobil yang umumnya untuk angkutan barang. Khusus untuk terminal mobil penumpang umum dan barang, sampai saat ini jumlahnya sangat minim, kurang lebih hanya 7 unit yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Darat yaitu Terminal Tipe A sebanyak 1 unit, Tipe B sebanyak 2 unit, dan lainnya merupakan Tipe C.
7	Transportasi udara	Di Papua peran transportasi udara sangat dominan dalam menghubungkan daerah-daerah terdalam atau terpencil, akibat sangat minimnya sarana prasarana transportasi darat yang tersedia. Kondisi ini akhirnya membuat biaya transportasi sangat mahal dan berpengaruh pada harga- harga barang. Contohnya untuk harga barang-barang konstruksi yang tercermin pada IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) yang dipublikasikan oleh BPS Papua (2023). Sepanjang tahun 2018-2022 misalkan, IKK Provinsi Papua selalu paling tinggi di Indonesia, dengan rata-rata nilai IKK sekitar 211,01 poin. Selanjutnya, berdasarkan data Kementerian Perhubungan RI, di tahun 2022 terdapat 151 bandara di Papua (di luar lapangan terbang yang tidak terdaftar di IATA), dimana hanya 2 Bandara dalam kategori internasional (Jayapura dan Biak Numfor), lainnya merupakan penerbangan domestik dan perintis.
8	Transportasi laut	Jumlah pelabuhan di Provinsi Papua yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah masih sangat terbatas, dimana sampai dengan tahun 2023 hanya ada 24 pelabuhan yang dikelola KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) dan KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan), yang lebih banyak pengelolaannya pada KSOP Kelas III (70,83%). Berhubung jumlah pelabuhan sangat kurang, menyebabkan pelayanan rute pelayaran perintis di Papua masih sangat terbatas. Sebagai misal di tahun 2023, dalam menyukseskan program Tol Laut di Papua terdapat 3 (tiga) kapal penumpang yang melayani rute pelayaran Papua, yaitu: (1) KM Sabuk Nusantara 58 dengan rute pelayaran: Jayapura – Teba – Puiwai – Waren – Serui – Biak – Napan Wainami – Nabire (Pulang Pergi); (2) KM

No	Sarana Prasarana	Deskripsi dan Data Dukung
		Sabuk Nusantara 81 dengan rute pelayaran: Jayapura – Kaipuri – Waren – Serui – Nabire – Wasior – Manokwari (Pulang Pergi); dan (3) KM Sabuk Nusantara 100 dengan rute pelayaran: Jayapura – Sarmi – Teba – Kurudu – Waren – Serui – Ansum – Wooi – Miosnum – Poom – Biak (Pulang Pergi).

Sumber: Hasil Analisis (2024)

2.6.1.6 Kualitas Lingkungan Hidup yang Belum Maksimal

Dalam hal lingkungan hidup, masih banyak masalah yang belum dapat dituntaskan hingga saat ini, sebagaimana yang disinyalir oleh Kementerian LH Indonesia (2022) bahwa berdasarkan hasil analisis, isu lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Papua adalah: (1) kualitas air permukaan dan air laut, (2) perubahan ekstrem iklim global, serta (3) alih fungsi lahan dan hutan yang juga menyangkut aspek keanekaragaman hayati, pencemaran air dan pengelolaan persampahan/limbah. Mengacu pada dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) tahun 2021, nilai IKLH Provinsi Papua adalah sebesar 80,23 poin. Adapun faktor pembentuk IKLH yang skornya paling rendah adalah IKA (Indeks Kualitas Air) sebesar 57,83 poin. Secara umum rendahnya nilai IKA di Papua disebabkan oleh parameter fecal coliform. Hal ini berkaitan dengan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik yang belum berjalan dengan baik. Masalah pencemaran air di Ekoregion Papua juga dipengaruhi oleh limbah kegiatan pertambangan/industri. Perubahan ekstrem pada iklim global turut berperan dalam menyebabkan berbagai permasalahan seperti kebakaran hutan, kekeringan, banjir, longsor, coral bleaching, dan lain-lain.

2.6.1.7 Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

United Nations Development Programme atau UNDP mengemukakan bahwa governance atau tata kelola pemerintahan adalah bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan masalah yang dihadapi suatu bangsa dengan melibatkan semua sektor. Governance bisa dikatakan baik (good governance) apabila sumber daya dan problem yang dihadapi publik dikelola secara efektif dan efisien, yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik. Sehingga good governance adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan pelayanan dan fungsi negara yang baik, atau menurut World Bank sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administratif. Untuk mengamati perkembangan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Papua selama ini, Tabel II.90 menampilkan beberapa indikator kinerja yang dapat menggambarkan hal tersebut.

Tabel II.90 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Papua Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Tata Kelola Pemerintahan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pelayanan Publik				B-	B-
SAKIP		B	B	B	B

Indikator Kinerja Tata Kelola Pemerintahan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks SPBE	2,240				1,876
Indeks RB		B	CC	CC	CC
Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas)				Sangat Rentan	Sangat Rentan
Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber: Menpan RB-RI dan KPK-RI (2023)

Berdasarkan Tabel II.90 terlihat nilai IPP Provinsi Papua untuk tahun 2021 dan 2022 masing-masing berpredikat B- atau dinilai berkinerja “Baik Dengan Catatan”, yang berarti masih ada 3 (tiga) tahapan predikat lagi yang harus dilalui Pemerintah Provinsi Papua untuk memperoleh predikat tertinggi yaitu A atau berkinerja “Pelayanan Prima”.

Kemudian untuk penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, selama tahun 2019 sampai dengan 2022, nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Provinsi Papua hanya bertahan pada predikat B (Baik). Dimana untuk mencapai predikat SAKIP yang tertinggi AA (Sangat Memuaskan), pemerintah provinsi harus melalui tiga tahapan predikat lagi.

Selanjutnya untuk penilaian transparansi, dapat diamati pada nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada publik secara transparan. Terlihat angka indeks SPBE diantara tahun 2018 dan 2022 cenderung nilainya menurun, yaitu dari 2,240 menjadi 1,876 poin yang masuk dalam predikat Cukup. Pemerintah provinsi tampaknya harus bekerja keras dimasa mendatang untuk mencapai predikat Memuaskan dengan nilai SPBE antara 4,2 - 5,0.

Terkait dengan upaya mereformasi birokrasi yang dilakukan selama ini, terindikasi Pemerintah Provinsi Papua mengalami banyak kendala, sehingga terlihat nilai indeks RB mengalami penurunan dari predikat B (Baik) di tahun 2019 menjadi CC (Cukup) pada tahun 2020, dan sampai tahun 2022 predikatnya tidak pernah naik kembali ke B, selalu bertahan di CC. Padahal untuk memperoleh predikat RB tertinggi, yaitu Istimewa atau AA dengan skor lebih dari 90 poin, pemerintah provinsi harus melalui 4 (empat) tingkatan predikat RB, yang masih sangat jauh jika dibandingkan predikat CC.

Dalam kaitannya menilai kinerja pemerintahan yang bersih, terdapat salah satu indikator kinerja yang sangat representatif untuk menunjukkan hal tersebut, yaitu Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Untuk rilis tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa Indeks SPI Provinsi Papua masing-masing sebesar 58,04 dan 66,76 poin, keduanya masuk dalam kategori Sangat Rentan. Dimana untuk tahun 2022 KPK-RI menyebutkan tingkat kerawanan korupsi di Papua terbentuk dari 7 (tujuh) komponen penilaian risiko, yang dapat dilaporkan nilainya dari urutan terbesar hingga terendah, yaitu: (1) Risiko Penyalahgunaan Fasilitas Kantor sebesar 61%; (2) Risiko Pengelolaan PBJ sebesar 44%; (3) Risiko Trading In Influence sebesar 39%; (4) Risiko Nepotisme Dalam Pengelolaan SDM sebesar 35%; (5) Risiko

Penyalahgunaan Perjalanan Dinas sebesar 31%; (6) Risiko Suap/ Gratifikasi sebesar 29; dan (7) Risiko Jual/Beli Jabatan sebesar 18%.

Setelah berturut-turut 8 kali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Provinsi Papua dalam pelaporan keuangan tahun 2022 hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil kurang memuaskan ini diakui pemerintah provinsi sebagai akibat transisi pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berdampak pada kapasitas fiskal.

2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah ini, menyangkut pelayanan dasar dan tugas/fungsi tiap perangkat daerah. Permasalahan yang dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah.

Tabel II.91 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Urusan Pendidikan	a. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah di semua jenjang pendidikan, sesuai usia sekolah b. Masih rendahnya mutu, kecukupan tenaga pendidik dan fasilitas dukungan pendidikan
2	Urusan Kesehatan	a. Masih tingginya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI) b. Rendahnya mutu, ketercukupan tenaga kesehatan dan fasilitas dukungan kesehatan
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rendahnya ketersediaan akses transportasi, berbasis antar moda dalam mendukung ekonomi wilayah/daerah dan dalam kondisi baik
4	Urusan Perumahan dan Permukiman	Rendahnya ketersediaan rumah layak huni dengan tingkat kecukupan fasilitas yang mendukung kesehatan lingkungan
5	Urusan Sosial	Belum optimalnya pelayanan pada komunitas PMKS dan KAT
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1	Urusan Tenaga Kerja	Masih rendahnya angkatan kerja yang belum bekerja
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan b. Masih rendahnya tingkat pengarusutamaan gender (PUG)
3	Urusan Pangan	Masih tingginya prevalensi kerawanan dan ketidakcukupan konsumsi pangan masyarakat
4	Urusan Pertanahan	Masih tingginya tingkat peralihan tanah adat bersertifikat maupun tidak bersertifikat

No	Urusan	Permasalahan
5	Urusan Lingkungan Hidup	Masih tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air dan pada intensitas penurunan emisi
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Masih rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan NIK
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Belum optimalnya kontribusi kampung terhadap pertumbuhan ekonomi
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya advokasi/sarana pengendalian penduduk melalui KB aktif
9	Urusan Perhubungan	a. Masih kurangnya tingkat ketersediaan sarana angkutan maupun udara b. Masih kurangnya rasio ketersediaan jalan dengan kendaraan
10	Urusan Komunikasi dan Informatika	a. Masih tingginya angka penggunaan telepon seluler pada rumah tangga Penduduk b. Belum optimalnya pelayanan internet bagi penduduk dan rumah tangga di kelurahan/kampung c. Masih rendahnya kepemilikan atau penggunaan computer bagi rumah tangga penduduk
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	a. Belum optimalnya tingkat ketersediaan koperasi aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kampung b. Masih rendahnya koperasi yang berkualitas c. Masih rendahnya usaha mikro yang menjadi wirausaha
12	Urusan Penanaman Modal	a. Belum optimalnya tingkat pelayanan publik sesuai regulasi untuk mendukung penanaman modal b. Masih rendahnya nilai investasi baru per tahun c. Belum optimalnya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
13	Urusan Olah Raga dan Pemuda	a. Masih rendahnya ketersediaan sarana olah raga dan tingkat partisipasi pemuda sesuai cabor b. Belum optimalnya tingkat pembinaan untuk atlet berprestasi dan keberlanjutan di jenjang organisasi keolahragaan
14	Urusan Kebudayaan	a. Belum optimalnya penanganan terhadap nilai-nilai budaya maupun peninggalan situs bersejarah b. Rendahnya tingkat promosi budaya dan ketersediaan tenaga bersertifikat pengelola budaya c. Masih rendahnya pelestarian cagar budaya d. Masih rendahnya presentase komunitas atau sanggar kesenian yang difasilitasi
15	Urusan Perpustakaan	a. Belum optimalnya tingkat pelayanan publik b. Masih kurangnya ketersediaan literasibaru (terupdate / terkini)
16	Urusan Kearsipan	Belum optimalnya tingkat pelayanan publik dan ketersediaan tenaga khusus
Urusan Pilihan		
1	Urusan Pertanian	a. Masih rendahnya produktivitas pertanian dan peternakan per tahun

No	Urusan	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Masih rendahnya kegiatan pelaksanaan pembangunan prasarana pertanian c. Masih tingginya kasus penyakit hewan menular d. Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian e. Belum optimalnya pendataan kelompok tani
2	Urusan Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya produksi perikanan per tahun b. Masih rendahnya kegiatan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perikanan dan kelautan c. Belum optimalnya pendataan kelompok tani ikan
3	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Rendahnya tingkat penggunaan energi baru terbarukan (EBT) bagi rumah tangga
4	Urusan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepatuhan pada konsistensi dokumen perencanaan masih rendah b. Capaian realisasi indikator-indikator dan target serta realisasi menurut prioritas masih rendah c. Capaian kinerja anggaran serta fisik OPD tidak seimbang (<i>balance</i>) d. Rendahnya tingkat pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan daerah secara berkala
Urusan Kekhususan		
	Kontribusi Pelaksanaan Otsus Papua	Belum optimalnya implementasi pemanfaatan dana Otsus dengan diiringi asas transparansi dan akuntabilitas





BAB III

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah





BAB III

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi Nasional dan Regional dalam beberapa tahun terakhir, serta meramalkan dan merencanakan perekonomian ke depan. Secara rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang situasi dan proyeksi perekonomian secara makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi, dan indikator lain yang relevan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan prediksi perekonomian beserta indikatornya menjadi dasar untuk perencanaan perekonomian, yang kemudian menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan fiskal di masa depan. Proyeksi ekonomi ini juga menjadi dasar dalam memprediksi kondisi keuangan daerah, terutama terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.

Secara keseluruhan, bagian ini memuat orientasi kebijakan ekonomi daerah yang membahas evolusi ekonomi nasional, situasi ekonomi Provinsi Papua, serta tantangan dan prospek ekonomi daerah, termasuk asumsi-asumsi yang menjadi landasan bagi perencanaan RKPD tahun 2025. Selanjutnya, terdapat penjelasan mengenai arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi proyeksi keuangan dan kerangka pembiayaan Daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dalam hal pendapatan, pengeluaran, dan sumber pembiayaan.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah dimaksudkan sebagai panduan dalam upaya menyelesaikan isu strategis dan permasalahan ekonomi daerah sehingga dapat menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang lebih baik guna memacu pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian secara global, nasional, dan regional.

3.1.1 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

3.1.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Nasional

Pergerakan ekonomi global pada tahun 2023, mengalami pelemahan pertumbuhan kinerja. Kondisi ini dipicu dengan beragam kombinasi gejolak geopolitik-ekonomi yang terjadi, termasuk diantaranya penurunan ekspor-impor AS dan Tiongkok yang berdampak pada volume perdagangan dunia. Pengetatan kebijakan moneter oleh beberapa bank sentral utama didunia, khususnya negara maju, yang meningkatkan suku bunga secara signifikan untuk menahan dampak inflasi dimasing-masing negara, juga berkontribusi terhadap pelemahan kinerja ekonomi global. Proyeksi ekonomi global untuk tahun 2024 juga terlihat melandai dibandingkan tahun sebelumnya, dengan perkiraan sebesar 3,2%. Sementara itu untuk proyeksi tahun 2025, diperkirakan sama seperti tahun sebelumnya.

Tabel III.1 Pertumbuhan Ekonomi Global

Pertumbuhan Ekonomi (persen, yoy)	2022	Proyeksi		
		2023	2024	2025
Dunia	3.5	3.2	3.2	3.2
Negara Maju	2.6	1.6	1.7	1.8
Emerging Market dan Negara Berkembang	4.1	4.3	4.2	4.2
ASEAN-5	5.5	4.1	4.5	4.6

Sumber: IMF, World Economic Outlook (WEO) Oktober 2023 dan April 2024

Berbeda dengan kondisi Indonesia, ditengah pelemahan ekonomi global, kinerja dan prospek ekonomi nasional tetap terjaga dalam rentang pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan perioda sebelumnya. Secara nasional, menurut Laporan Perekonomian Indonesia 2023, perekonomian tetap bertumbuh baik dan berdaya tahan terhadap tekanan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi (yoy) sejak triwulan III 2023 sebesar 4,94, dilanjutkan dengan triwulan IV 2023 sebesar 5,04%, sampai dengan triwulan I 2024 sebesar 5,11% terus menunjukkan pergerakan yang sangat optimis. Pada triwulan I 2024, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, kecuali lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami kontraksi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh semua komponen pengeluaran.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2024 adalah sebesar 5,2%, dengan tingkat inflasi diperkirakan mencapai 2,8%. Perkiraan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah Rp15.000/US\$, berdasarkan asumsi dasar makro tahun 2024 yang telah disetujui

oleh Pemerintah dan DPR RI. Namun, berbagai lembaga seperti Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9%, sementara ADB dan IMF menyebutkan 5%, dan OECD memperkirakan 5,2%. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan investasi sekitar Rp6.900 Triliun dari berbagai sektor ekonomi, termasuk investasi Pemerintah, perbankan, pasar modal, belanja modal BUMN, penanaman modal, dan sumber pendanaan internal korporasi.

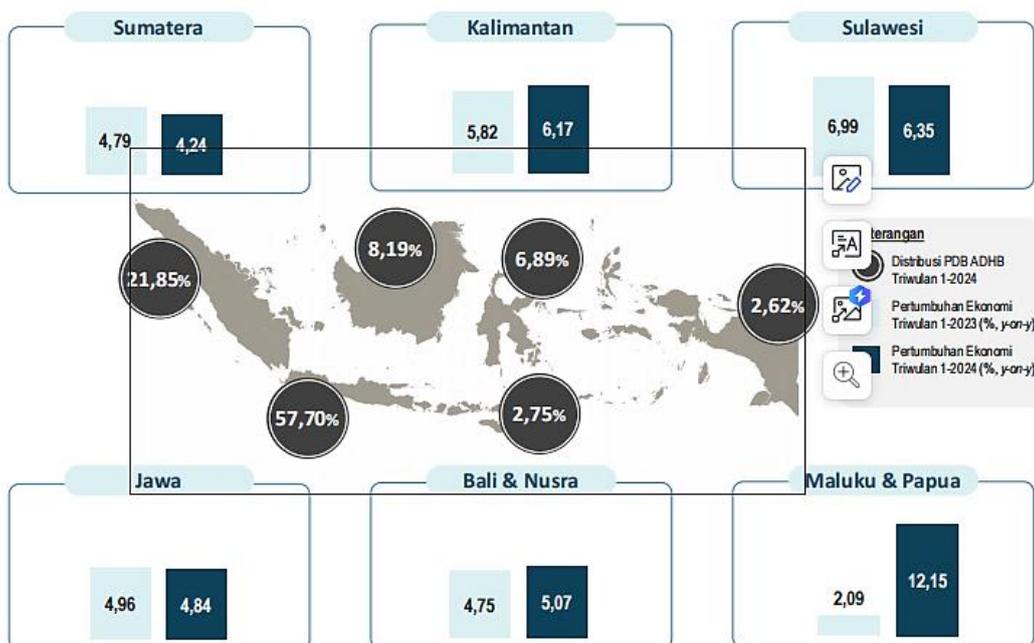
Tabel III.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023-2025 (% , yoy)

Komponen	2022	2023		2024	2024 _P	2025 _P
		III	IV	I		
Pertumbuhan Ekonomi	5.31	4.94	5.05	5.11	4.7-5.5	4.8-5.6
Konsumsi Rumah Tangga	4.93	5.06	4.47	4.91	4.6-5.4	4.6-5.4
Konsumsi Pemerintah	-4.51	-3.76	2.81	19.9	2.8-3.6	2.8-3.6
Ekspor	16.28	-4.26	1.64	0.5	-0.4-0.4	6.1-6.9
Impor	14.75	-6.18	-0.15	1.77	-1.1-0.3	7.1-7.9

Sumber data : BRS BPS Triwulan III, Triwulan IV 2023, Triwulan I 2024, Laporan Perekonomian Indonesia 2023, Proyeksi Bank Indonesia
 Catatan : *Proyeksi Bank Indonesia

Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 menunjukkan angka yang signifikan lebih tinggi dari proyeksi perekonomian global, yang diperkirakan sebesar 2,9%, menurun 0,1% dari proyeksi sebelumnya. Secara keseluruhan, proyeksi perekonomian Indonesia untuk tahun 2024 masih menunjukkan tren positif. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi Indonesia jika langkah-langkah antisipatif tidak dilakukan oleh Pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan.

Gambar III.1 Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Spasial



Sumber data: BRS BPS Triwulan III, Triwulan IV 2023, Triwulan I 2024

Dari perspektif spasial, pertumbuhan ekonomi pada seluruh wilayah terlihat mengalami pertumbuhan yang baik. Sejak triwulan III 2023 sampai dengan triwulan I 2024, tiga kelompok provinsi yang mempunyai pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi pada ketiga wilayah ini utamanya didorong oleh aktivitas pertambangan, industri logam, dan pembangunan IKN. Namun secara keseluruhan, struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih didominasi dan terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Dua provinsi ini berkontribusi sampai dengan 79% dari total seluruh wilayah di Indonesia.

Selain pertumbuhan dan proyeksi ekonomi yang sangat optimis, disisi lain menurut data Bank Indonesia untuk tahun 2024, target inflasi yang ditetapkan sebesar $2,5\pm 1\%$, yang merupakan penurunan dari target tahun sebelumnya, yaitu $3\pm 1\%$. Inflasi pada tahun 2023 mencapai 2,61%, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencatat tingkat inflasi sebesar 5,5%. Hal ini disebabkan oleh tetap terkendalinya inflasi harga impor, stabilitas nilai tukar Rupiah, dan respon kebijakan moneter yang proaktif, preventif, dan proyektif. Kerjasama erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berperan penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Sinergi dan inovasi akan menjadi kunci dalam menghadapi prospek kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2023 dan 2024, yang akan terus berlanjut dengan keinginan dan pemulihan perekonomian.

Stabilitas eksternal diperkirakan akan tetap terjaga, dengan proyeksi transaksi berjalan berkisar antara surplus 0,4% hingga defisit 0,4% dari PDB pada tahun 2023, dan surplus 0,2% hingga defisit 0,6% dari PDB pada tahun 2024. Sementara itu, neraca modal dan keuangan diproyeksikan surplus dengan dukungan dari investasi langsung luar negeri (PMA) dan investasi portofolio. Ketahanan sistem keuangan dijaga baik dari segi permodalan, risiko kredit, dan likuiditas. Pertumbuhan kredit diperkirakan akan berkisar antara 10-12% pada tahun 2023 dan 2024. Sektor ekonomi dan keuangan digital juga diproyeksikan meningkat, dengan nilai transaksi e-commerce diperkirakan mencapai Rp572 triliun dan Rp689 triliun, transaksi uang elektronik mencapai Rp508 triliun dan Rp640 triliun, dan perbankan digital mencapai lebih dari Rp67 ribu triliun dan Rp87 ribu triliun.

Arah kebijakan Bank Indonesia untuk tahun 2024 fokus pada stabilitas, terutama pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah agar berperang secara global tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia menyoroti global yang terus meningkat di tengah kondisi ekonomi dan keuangan nasional yang masih berada di bawah kapasitas potensi perekonomian.

Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui kebijakan bauran yang disesuaikan dengan kebijakan ekonomi nasional serta amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kebijakan moneter yang mengutamakan stabilitas akan ditempuh dengan kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang berorientasi ke depan dan bersifat preventif untuk mencapai sasaran inflasi yang

ditetapkan Pemerintah, yaitu $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2024 dan 2025. Dengan tingkat inflasi tersebut, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan perekonomian nasional berkisar antara 4,7-5,5 persen pada tahun 2024 dan 4,8-5,6 persen pada tahun 2025.

Selain itu, kebijakan moneter juga bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan mendukung stabilitas eksternal. Kebijakan tersebut didukung oleh operasi moneter yang berbasis pasar untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia ke pasar keuangan dan perekonomian. Ini termasuk menariknya aliran portofolio investasi asing serta manajemen lalu lintas devisa sesuai dengan standar internasional untuk mendukung stabilitas eksternal dan memastikan kecukupan cadangan devisa.

Sementara itu, kebijakan Bank Indonesia lainnya, yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, akan terus diarahkan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Secara ringkas masing-masing kebijakan Bank Indonesia di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2024 tetap berfokus pada stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan tingkat inflasi agar tetap sesuai sasaran. Ini merupakan bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia secara konsisten akan meneruskan respons kebijakan suku bunga dengan kalibrasi yang terukur, perencanaan yang matang, dan komunikasi yang transparan untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti pada semester I 2024.

b. Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap diterapkan untuk mendorong kredit dan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.

c. Kebijakan Sistem Pembayaran

BSPI 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk mengarahkan peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Blueprint ini berisi 5 (lima) Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang dijalankan oleh 5 (lima) kelompok kerja, termasuk Open banking, Sistem Pembayaran Ritel, Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Infrastruktur Pasar Keuangan, Data dan Digitalisasi, dan Reformasi Regulasi, Perizinan, dan Pengawasan. BSPI 2025 akan diimplementasikan melalui 23 *key delivery* dalam periode 2019-2025.

d. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang

Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 juga akan dilakukan untuk memperkuat efektivitas operasi

dan transmisi kebijakan, mengembangkan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta memperluas instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

e. Kebijakan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau

Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah juga akan terus bermitra, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Koordinasi yang erat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta mitra strategis melalui TPID dan TPID, serta GNPIP di berbagai daerah akan memperkuat guna mendukung pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, kebijakan fiskal Pemerintah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga akan diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta untuk mendorong kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, dan inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan, serta akan memfasilitasi terselenggaranya promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas dengan kerjasama instansi terkait. Kerja sama yang erat dengan Pemerintah juga akan diupayakan untuk menyukseskan Indonesia pada ASEAN 2023, khususnya dalam hal integrasi keuangan.

Secara keseluruhan, perbaikan ekonomi domestik akan didorong oleh perbaikan pada sektor usaha terkait ekspor sebagai tanggapan terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi di negara maju, yang diharapkan akan meningkatkan permintaan ekspor. Diperkirakan dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang meningkat, konsumsi rumah tangga akan tumbuh secara positif. Begitu pula, konsumsi pemerintah diperkirakan akan meningkat untuk mencapai target pembangunan yang tertunda sejak awal masa pandemi. Sementara itu, perbaikan pada sektor pariwisata, perdagangan, perhotelan, dan hiburan diperkirakan akan pulih secara bertahap setelah pemerintah membuka jalur *travel bubble* bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung.

3.1.1.2 Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025

Untuk optimalisasi perencanaan pembangunan nasional, Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional merupakan media untuk menerjemahkan cita-cita dan tujuan negara kedalam pembangunan negara yang lebih operasional dan teknis untuk dilaksanakan dalam perioda waktu yang telah ditentukan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Merujuk kepada ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017, tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pemerintah melakukan penyusunan dan penetapan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada setiap tahun anggaran. Dalam proses penyusunan rancangan RKP diatas, dokumen yang dihasilkan merupakan

hasil sinkronisasi yang dilaksanakan melalui pertemuan para pihak, rapat koordinasi pembangunan pusat, musyawarah perencanaan pembangunan provinsi, musyawarah perencanaan pembangunan nasional, dan pertemuan tiga pihak. Selanjutnya, melalui pembahasan dan kesepakatan bersama DPR, dokumen rancangan RKP kan dimutakhirkan menjadi rancangan akhir RKP.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, sasaran pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,3-5,6%. Upaya pencapaian proyeksi ini akan ditopang dengan kondisi stabilitas ekonomi makro yang akan didorong terus menguat seiring dengan dukungan indikator makro fiskal yang optimis dan berkinerja baik. Disisi lain tingkat inflasi diharapkan stabil dalam rentang 1,5-3,5% (yoy), dan nilai tukar rupiah pada rentang Rp. 15.000-15.400 per US\$. Sasaran tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, melalui peningkatan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi sebesar US\$ 5.500-5.520 sehingga Indonesia tetap bertahan dalam kategori upper-middle income countries.

Tabel III.3 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% yoy): Akhir Periode	1,5 - 3,5 ^{a)}
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000 - 15.400 ^{b)}
3	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	149,5 - 153,7
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,1 - 6,1 ^{c)}
5	Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	(0,4) - (0,2) ^{d)}
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	19,9 - 20,0
7	Kontribusi PDB Pariwisata	4,60
8	Nilai Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,10
9	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,70 – 11,20
10	Keseimbangan Primer (% PDB)	0,00 - 0,00 ^{c)}
11	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,45) – (2,80) ^{d)}
12	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,78 – 39,98
13	Pertumbuhan Investasi (PTMB) (%)	6,5 – 7,8
14	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,2 – 1.905,6
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5 – 842,2

Sumber data : Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024, Rancangan RKP Tahun 2025

Catatan :

^{a)} Keputusan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Tingkat Menteri pada Januari 2024 dan sasaran inflasi dalam RPJPN Tahun 2025-2045,

^{b)} Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro tanggal 7 Februari 2024,

^{c)} Perbedaan angka dseimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka dibelakang koma, serta

^{d)} Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

Dalam pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi 2025, dari sisi pengeluaran ditargetkan konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga ditargetkan untuk tetap tumbuh sejalan dengan membaiknya daya beli masyarakat, yang ditopang dengan target inflasi Bank Indonesia yang terjaga. Konsumsi pemerintah juga ditargetkan tumbuh.

Perdagangan luar negeri difokuskan pada aktivitas ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global, salah satunya melalui peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global serta berupaya meningkatkan efektivitas Free Trade Agreement. Sejalan dengan itu, aktivitas perdagangan dalam negeri juga diupayakan fokusnya kepada peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antardaerah dan global. Pembentukan Modal Tetap Bruto juga didorong menjadi stimulan bagi aktivitas perekonomian, dengan ekspektasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri bertumbuh meningkat menjadi sebesar Rp. 1.868-Rp. 1.906 triliun pada tahun 2025. Seiring dengan itu, efisiensi investasi ditargetkan mengalami perbaikan melalui penurunan Incremental Capital Output Rasio pada rentang 6,3-6,0.

Dari sisi lapangan usaha, pertanian dalam arti luas diharapkan menjadi sektor yang bertumbuh positif. Sektor pertambangan, konstruksi, perdagangan, industri pengolahan juga ditargetkan bertumbuh positif pada tahun 2025.

Dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai dasar transformasi perwujudan Indonesia Emas 2045, Kebijakan Fiskal tahun 2025 diarahkan fokusnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan antardaerah.

Instrumen fiskal pendapatan didorong melalui optimalisasi pendapatan negara (collecting more). Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2025 diproyeksikan mencapai 13,21-14,20% Produk Domestik Bruto (PDB), yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar 10,70-11,205 PDB, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 2,50-3,00% PDB. Instrumen fiskal Belanja Negara disisi lain, diharapkan mencapai 15,66-17,01% PDB, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,61-12,74% PDB, Transfer ke Daerah sebesar 4,05-4,27% PDB. Kebijakan belanja negara, baik Kementerian/Lembaga, non Kementerian/Lembaga, dan Transfer ke Daerah difokuskan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran, infrastruktur/konektivitas, serta penguatan kelembagan dan regulasi.

Sejalan dengan hal diatas, Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 selanjutnya akan diupayakan untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan produktivitas dengan cara memberikan ruang fiskal yang memadai untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dengan rentang defisit sebesar (2,45)-(2,80)% PDB dan belanja investasi below the line sebesar 1% PDB.

Ekspektasi pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia, didukung dengan kondisi stabilitas eksternal Indonesia yang diharapkan akan semakin solid dan menguat pada tahun 2025. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan Indonesia melewati perioda penting sebelumnya dengan sangat baik, dalam transisi pergantian kepemimpinan dan tahun politik. Indikator Neraca Perdagangan Barang pada tahun 2025, diperkirakan surplus pada rentang US\$43,4-43,9 miliar. Secara keseluruhan, pada akhir tahun 2025 postur neraca

diproyeksikan berada pada kisaran US\$2,5-6,8 miliar, disertai dengan perkembangan Cadangan Devisa mencapai US\$149,5-153,7 miliar (setara pembiayaan 6,1 bulan impor).

Disisi lain, kebijakan moneter pada tahun 2025 akan didorong untuk meminimalkan efek negatif rambatan global, dan juga menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pengendalian tingkat inflasi pada kisaran 1,5-3,5% (yoy), dan kurs rupiah pada rentang Rp.15.000-15.400 beserta kombinasi dengan bauran kebijakan lainnya (fiskal, makroprudensial, sektor riil, sektor keuangan, dan sistem pembayaran) merupakan upaya mitigasi yang akan dilakukan.

Dalam rangka pemerataan pembangunan, pada tahun 2025, wilayah Kawasan Timur Indonesia akan didorong agar bertumbuh lebih tinggi, namun tetap menjaga momentum pertumbuhan di kawasan barat. Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia diharapkan bertumbuh sebesar 6,4-6,9%, sementara itu di kawasan barat sebesar 5,0-5,3%.

Dalam wilayah Kawasan Timur Indonesia, khususnya di wilayah Papua, pada tahun 2025, kegiatan perekonomian utamanya diarahkan dengan mendorong penyiapan kawasan terintegrasi perikanan dan perkebunan. Penyiapan pangan lokal sagu dan padi sebagai upaya pengembangan kemandirian pangan, diharapkan akan menopang aktivitas perekonomian di wilayah Papua. Selain itu, peningkatan infrastruktur konektivitas seperti pengembangan bandara (Domine Eduard Osok dan Wamena), dan peningkatan Jalan Trans Papua diharapkan akan berkontribusi terhadap perekonomian wilayah. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, pengembangan hilirisasi industri tembaga di Papua Tengah, pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni, Kawasan Industri Fakfak juga diharapkan menstimulasi pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah Papua. Pertumbuhan ekonomi wilayah Papua diproyeksikan mencapai 5,3-5,8%.

Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2025, diproyeksikan kebutuhan investasi sebesar Rp.7.329-7.417 triliun, dengan proporsi terbesar sampai dengan 86,25-84,93% bersumber dari investasi swasta/masyarakat, diikuti dengan investasi pemerintah sebesar 7,37%-8,45%, dan investasi bumh sebesar 6,38-6,62%.

3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian Provinsi Papua pasca pandemi Covid-19 menunjukkan kinerja yang semakin membaik dan ini menunjukkan terjadinya pemulihan diberbagai sektor lapangan usaha. Situasi ini tidak lepas juga dari agregat pertumbuhan kewilayahan di Tanah Papua, yang pada tahun 2024 diprediksi lebih baik dari tahun 2023 (Laporan Perekonomian Provinsi Papua, Februari 2024).

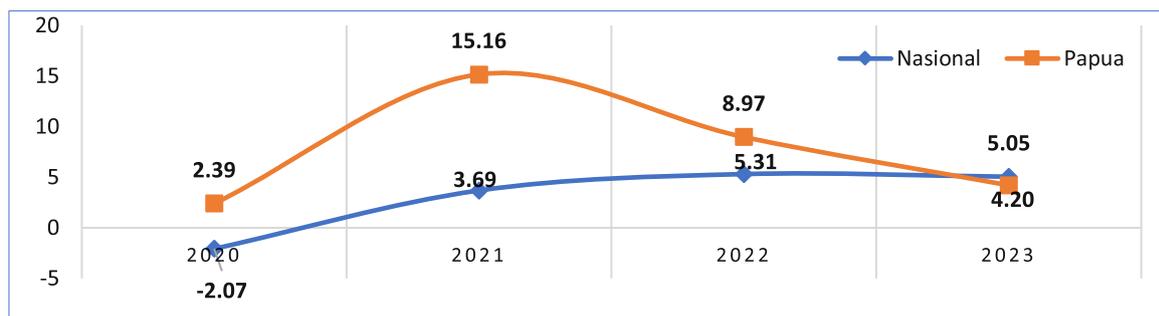
Namun demikian, pasca DOB di tahun 2023, Provinsi Papua yang tadinya terdiri dari 29 Kabupaten/Kota kini hanya terdiri dari 9 Kabupaten/Kota (Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, dan Kota Jayapura) sehingga beberapa lapangan usaha yang selama ini merupakan kontributor

terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua, seperti pertambangan dan penggalan, tidak lagi berada pada wilayah Provinsi Papua karena telah menjadi bagian dari wilayah Provinsi DOB. Diharapkan tahun 2024 ini pemulihan tersebut dapat terus berlangsung seiring dengan percepatan pembangunan yang akan berdampak pada perekonomian sehingga di tahun 2025 akan dapat memasuki fase normal. Dengan melihat kondisi tersebut maka diharapkan berbagai sektor lapangan usaha lainnya dapat tumbuh dan berkembang guna menopang perekonomian Provinsi Papua.

3.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Dari Gambar III.2, dapat terlihat bahwa tren pertumbuhan ekonomi nasional selama periode 2020-2023 terus cenderung meningkat walaupun mengalami perlambatan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus bertumbuh ditengah ketidakpastian dan perlambatan pertumbuhan ekonomi atau gejolak perekonomian global. Untuk dapat melihat kinerja perekonomian daerah Provinsi Papua, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu dasar yang digunakan sebagaimana tergambar dalam pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Papua.

Gambar III.2 Trend Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua dan Nasional 2020-2023 (Persen)



Sumber data : Provinsi Papua Dalam Angka 2022, Provinsi Papua Dalam Angka 2023, Provinsi Papua Dalam Angka 2024, PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (BPS Papua).

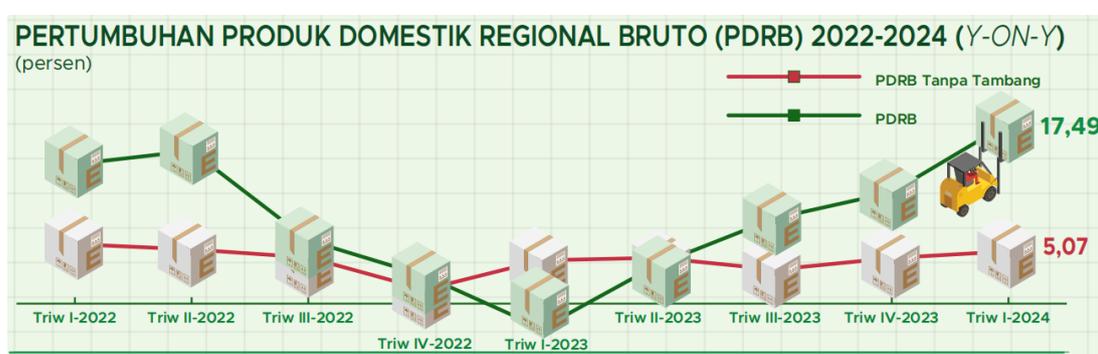
Keterangan : Data tahun 2023 merupakan data Provinsi Papua setelah pemekaran.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua selama periode 2020-2023 mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 15,16 persen dan pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2020 sebesar 2,39 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2022 mengalami perlambatan sebesar 6,19 poin dibandingkan dengan tahun 2021. Namun demikian, tren pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua selama periode 2020-2022 masih berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2023, pasca pemekaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sebesar 4,20 persen atau mengalami perlambatan sebesar 4,77 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022 disebabkan oleh perlambatan pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan. Selain itu, ketidakpastian global masih berlangsung yang menyebabkan tekanan pada nilai tukar sehingga menjadi faktor penahan pertumbuhan yang lebih tinggi di Papua. Namun demikian prospek penguatan pertumbuhan sektor

nontambang didukung oleh Perdagangan Besar dan Eceran serta Konstruksi diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kondisi kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua periode 2023 triwulan IV, seiring dengan gambaran tren pertumbuhan ekonomi diatas. Dalam Laporan Perekonomian Provinsi Papua-BI (Februari 2024), Indikator Penting Provinsi Papua dan DOB-BPS (April 2024), dan BRS-BPS (Mei 2024) dilaporkan kinerja perekonomian wilayah Papua semakin baik dan mengalami pertumbuhan output ekonomi dengan rentang 10,79-17,49% (yoy) dengan tambang. Peningkatan kinerja ini, utamanya bersumber dari meningkatnya kinerja LU pertambangan dan penggalian yang disebabkan oleh peningkatan produksi tembaga dan emas. Sementara itu pertumbuhan ekonomi tanpa tambang bergerak dalam rentang 4,42-5,07% (yoy). Secara keseluruhan, proyeksi pertumbuhan perekonomian wilayah Papua pada tahun 2024 berada dalam rentang 5,30-5,70% (yoy).

Gambar III.3 Trend Pertumbuhan PDRB Papua (% , yoy)



Sumber data : BRS BPS, Mei 2024

Keterangan : Pertumbuhan Ekonomi Papua Triwulan I-2024 termasuk Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

3.1.2.1.1 PDRB Menurut Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan menggunakan harga konstan. Ini menggambarkan kenaikan PDRB secara riil, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat menggambarkan secara kasar kenaikan pendapatan yang diukur dengan peningkatan output riilnya.

Tabel III.4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Papua, 2020-2023 (Persen)

No	Komponen	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi Rumah Tangga	-5,58	1,22	5,39	3,69
2	Konsumsi LNPRT	-7,54	4,95	4,59	6,14
3	Konsumsi Pemerintah	-0,30	3,13	0,38	3,68
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,50	9,73	2,36	2,59
5	Perubahan Investasi	-	-	-	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	8,58	42,69	32,12	-13,17
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-12,27	7,89	15,09	-1,11
	PDRB Provinsi Papua	2,39	15,16	8,97	4,20

Sumber data : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Menurut Pengeluaran 2019-2023, BPS Papua.

Catatan : Data tahun 2023 merupakan data Provinsi Papua setelah pemekaran.

Berdasarkan Tabel III.4 di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2020-2023 telah terjadi pertumbuhan yang fluktuatif dari setiap komponen perekonomian menurut pengeluaran. Untuk tahun 2023, komponen Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Sedangkan komponen Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor Barang dan Jasa, serta Impor Barang dan Jasa mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Provinsi Papua tahun 2023 pasca pemekaran ditinjau dari sisi pengeluaran terjadi pada komponen Konsumsi PKLNPRT sebesar 6,14 persen atau meningkat sebesar 1,55 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini terjadi disebabkan karena meningkatnya aktifitas/kegiatan partai politik menjelang Pemilu 2024. Sedangkan yang terendah adalah komponen Ekspor Barang dan Jasa dengan pertumbuhan sebesar -13,17 persen.

Tabel III.5 Distribusi PDRB ADHB menurut Pengeluaran Provinsi Papua, 2020-2023 (Persen)

No	Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi Rumah Tangga	50,73	44,04	43,49	54,99
2	Konsumsi LNPRT	2,28	2,04	1,99	5,41
3	Konsumsi Pemerintah	22,09	19,71	18,17	31,29
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,79	32,82	31,92	39,34
5	Perubahan Inventori	-0,82	0,23	-0,97	3,27
6	Ekspor Barang dan Jasa	32,81	46,71	55,14	24,07
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	41,88	45,01	49,75	58,37
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : PDRB Provinsi Papua Menurut Pengeluaran 2019-2023, BPS Provinsi Papua.

Keterangan : Data tahun 2023 Provinsi Papua setelah pemekaran.

Jika dilihat disribusi PDRB dari sisi pengeluaran maka komponen yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Provinsi Papua tahun 2023, pasca pemekaran, adalah Impor Barang dan Jasa sebesar 58,37 persen. Hal ini menunjukkan bahwa cukup besar konsumsi di Provinsi Papua bukan berasal dari produk yang dihasilkan sendiri melainkan impor yang berasal dari daerah lain di luar Provinsi Papua. Selain itu, komponen yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Provinsi Papua tahun 2023 dan dibuktikan dengan kontribusinya yang cukup besar adalah komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 54,99 persen, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 39,34 persen dan Konsumsi Pemerintah sebesar 31,29 persen. Sedangkan yang terendah adalah komponen Perubahan Inventori sebesar 3,27 persen.

3.1.2.1.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha

Struktur ekonomi mencerminkan kontribusi signifikansi setiap sektor usaha dalam ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi ini diwujudkan dalam pendistribusian PDRB berdasarkan harga saat itu untuk setiap kategori lapangan usaha terhadap total PDRB. Distribusi nilai ini diungkapkan dalam bentuk persentase, yang menandakan seberapa besar kintribusinya terhadap perekonomian, semakin tinggi persentasenya, semakin besar peranannya.

Tabel III.6 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua 2020-2023 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,28	10,84	10,30	14,46
2	Pertambangan dan Penggalian	28,21	36,82	38,60	0,83
3	Industri Pengolahan	2,08	1,80	1,69	2,93
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,04	0,04	0,10
6	Konstruksi	15,43	13,86	13,75	20,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,51	9,37	9,20	15,96
8	Transportasi dan Pergudangan	4,36	3,84	4,42	8,05
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,77	0,67	0,64	1,27
10	Informasi dan Komunikasi	4,25	3,75	3,57	6,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,67	1,52	1,55	3,75
12	Real Estate	2,90	2,67	2,54	4,70
13	Jasa Perusahaan	1,23	1,07	1,03	2,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminanan Sosial Wajib	11,07	9,34	8,53	11,60
15	Jasa Pendidikan	2,05	1,66	1,56	2,68
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,93	1,70	1,58	2,83
17	Jasa Lainnya	1,17	1,03	0,97	1,81
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha 2019-2023, BPS Papua.

Keterangan : Data tahun 2023 merupakan data Provinsi Papua setelah pemekaran.

Seperti terlihat dalam Tabel III.6 di atas, pada tahun 2023, struktur perekonomian Papua didominasi oleh kategori Lapangan Usaha Konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 20,41 persen. Nilai ini diikuti oleh kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,96 persen dan kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mampu menyumbang sebesar 14,46 persen. Kategori Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang sebesar 11,60 persen; kategori Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan menyumbang sebesar 8,05 persen; serta kategori Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi menyumbang sebesar 6,10 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang menjadi yang terendah yaitu sebesar 0,10 persen.

Lapangan Usaha Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, bersama dengan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, menjadi tiga sektor utama dalam pembentukan struktur ekonomi Provinsi Papua. Hal ini terjadi karena sebelum pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), wilayah ini merupakan pusat provinsi dengan pembangunan yang terfokus di ibu kota provinsi, yang menjadi pusat perdagangan grosir dan salah satu sumber utama kebutuhan harian untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.

Selanjutnya Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menduduki peran penting ketiga dalam struktur ekonomi Provinsi Papua karena adanya daerah pesisir yang kaya akan sumber daya laut di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada tahun 2023, Sail Teluk Cenderawasih di Kabupaten Biak Numfor menjadi peristiwa besar yang menyoroti potensi sektor Perikanan dan Kelautan terbesar di Provinsi Papua. Potensi ikan tuna sirip kuning di

Kabupaten Biak, kepiting dan tenggiri di Kabupaten Sarmi, hasil laut kepiting dan udang di Kabupaten Waropen, serta ikan baramundi di Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi aset utama dalam sektor ini.

Tabel III.7 Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua, 2020-2023 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,71	1,61	2,27	1,90
2	Pertambangan dan Penggalian	16,62	40,80	16,13	2,81
3	Industri Pengolahan	-5,02	-0,21	0,08	1,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,96	5,77	6,73	4,59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,88	3,82	5,86	0,06
6	Konstruksi	-0,87	4,33	4,31	3,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,47	5,72	4,71	5,38
8	Transportasi dan Pergudangan	-32,10	3,66	16,85	8,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16,93	1,44	4,05	3,15
10	Informasi dan Komunikasi	3,72	3,09	5,46	3,84
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,47	2,37	5,04	12,81
12	Real Estate	-0,17	7,04	4,76	5,83
13	Jasa Perusahaan	-7,62	1,96	3,70	8,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminanan Sosial Wajib	-0,19	-0,95	2,33	1,51
15	Jasa Pendidikan	-0,64	-4,79	1,60	4,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,82	1,25	0,05	3,65
17	Jasa Lainnya	-3,21	3,54	3,02	3,88
	PDRB Provinsi Papua	2,39	15,16	8,97	4,20

Sumber data : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha 2019-2023, BPS Papua.

Keterangan : Data tahun 2023 merupakan data Provinsi Papua setelah pemekaran

Seperti terlihat dalam Tabel III.7, laju pertumbuhan PDRB dari sisi lapangan usaha, masing-masing sektor lapangan usaha selama periode 2020-2023 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan lapangan usaha Provinsi Papua pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,81 persen; dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,79 persen; Jasa Perusahaan sebesar 8,14 persen. Salah satu penyebab tingginya pertumbuhan ketiga sektor tersebut adalah karena diselenggarakannya event-event festival berskala besar di Provinsi Papua pada tahun 2023. Selanjutnya, diikuti juga oleh lapangan usaha Real Estate sebesar 5,83 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,38 persen. Sedangkan yang terendah adalah lapangan usaha Jasa Industri Pengolahan sebesar 1,34 persen.

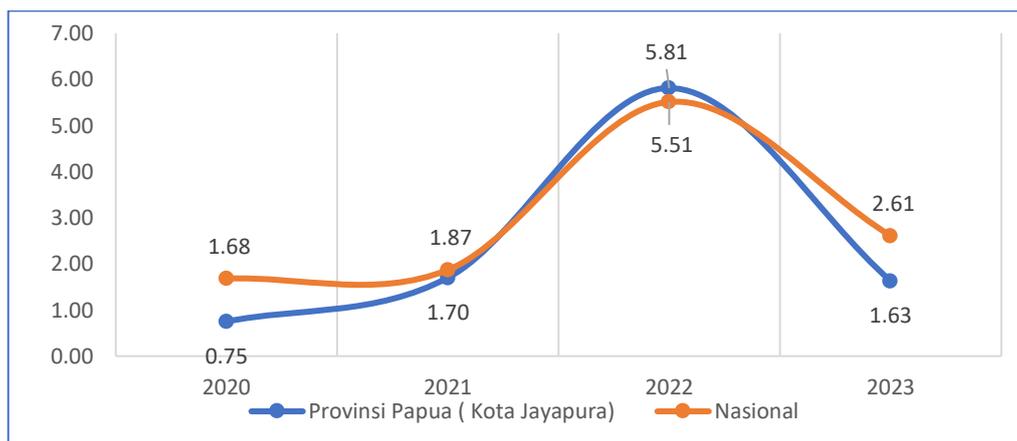
Pada tahun 2023, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Transportasi dan Pergudangan, serta Jasa Perusahaan mencatat pertumbuhan tercepat di Provinsi Papua. Hal ini disebabkan oleh status Provinsi Papua sebagai pusat aktivitas ekonomi, di mana Bandara Udara Sentani di Kabupaten Jayapura, bagian dari wilayah kabupaten Provinsi Papua, tetap menjadi pusat lalu lintas udara di wilayah tersebut. Pertumbuhan yang signifikan dalam sektor Jasa Perusahaan dipicu oleh berbagai acara besar yang diadakan di Provinsi

Papua, seperti Festival Kopi Papua, Festival Baku Timba, Festival Port Numbay, Jayapura Street Festival Carnival, Turnamen KASAD Cup, Festival Danau Sentani, My Pertamina Cup Basketball, Festival Sail Teluk Cenderawasih, Festival Biak Munara Wampasi, dan lain-lain.

3.1.2.2 Inflasi

Inflasi adalah indikator perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Naiknya harga-harga tersebut mengakibatkan penurunan nilai uang, yang pada gilirannya mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa sehari-hari. Penyebab utama inflasi adalah tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Teori kuantitas menyatakan bahwa terdapat korelasi langsung antara peningkatan jumlah uang yang beredar dan kenaikan harga barang. Oleh karena itu, peran Bank Sentral sangat penting dalam menjaga stabilitas inflasi dan jumlah uang yang beredar. Pada tahun 2022, pemerintah dan Bank Indonesia menetapkan target inflasi sebesar 3 ± 1 persen. Namun inflasi nasional pada tahun tersebut mencapai 5,51 persen, melebihi target yang telah ditetapkan.

Gambar III.4 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Papua, 2020 – 2023 (Persen)



Sumber data: BPS Provinsi Papua

Seperti terlihat dalam Gambar III.4 di atas, selama periode 2020-2023, inflasi Provinsi Papua mengalami fluktuasi yang signifikan dengan lonjakan yang tinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 5,81 persen. Kelompok pengeluaran penyumbang tertinggi pada inflasi Provinsi Papua tahun 2023 adalah kelompok transportasi (angkutan udara), kelompok makanan, minuman, dan tembakau (beras, ikan ekor kuning, tomat, kangkung, daging ayam ras, dll), dan kelompok pendidikan (biaya sekolah menengah atas, biaya akademi/perguruan tinggi, dan biaya sekolah menengah pertama). Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi atau menahan laju inflasi adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Faktor lain yang dampaknya juga turut mempengaruhi inflasi adalah status pandemi *Covid-19* yang telah berakhir sehingga vaksinasi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri tidak lagi diberlakukan (KEPPRES Nomor 17 Tahun 2023),

penurunan harga BBM non subsidi, pencabutan Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit serta pemberlakuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat terkait penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah.

3.1.2.3 Tingkat Kemiskinan

Dalam perjalanan menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, pemberantasan kemiskinan telah ditetapkan sebagai prioritas utama di antara tujuh belas tujuan yang disepakati. Di samping itu, strategi untuk mengurangi tingkat kemiskinan juga diberikan perhatian utama dalam pembangunan nasional. Pasca pandemi Covid-19, beberapa indikator ekonomi di wilayah Papua menunjukkan tidak adanya perbaikan. Begitu juga dengan angka kemiskinan. Pada periode Maret 2020–Maret 2023 persentase penduduk miskin di Provinsi Papua juga mengalami penurunan.

Tabel III.8 Indikator Kemiskinan dan Persentasi Penduduk Miskin di Provinsi Papua, Maret 2020-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	562.992	6,16	2,85	154,79	26,64
2021	591.959	5,6	2,27	151,82	26,86
2022	629.175	6,16	2,91	153,11	26,56
2023	686.469	6,28	2,95	149,56	26,03

Sumber data : Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tahun 2023, BPS Provinsi Papua.

Keterangan : Data jumlah penduduk miskin merupakan gabungan dari data 9 Kab/Kota di Provinsi Papua dari tahun 2020-2023.

Berdasarkan Tabel III.8, persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Papua periode 2020-2023 terjadi di tahun 2021 sebesar 26,86 persen dan yang terendah terjadi di tahun 2023 sebesar 26,03 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Papua terjadi di tahun 2020 sebesar 154,79 ribu jiwa dan yang terendah terjadi di tahun 2023 sebesar 149,56 ribu jiwa. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 3,55 ribu jiwa ditahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan angka kemiskinan yang masih tinggi, antara lain infrastruktur yang masih minim, masih banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau, serta tingkat pendidikan yang masih rendah.

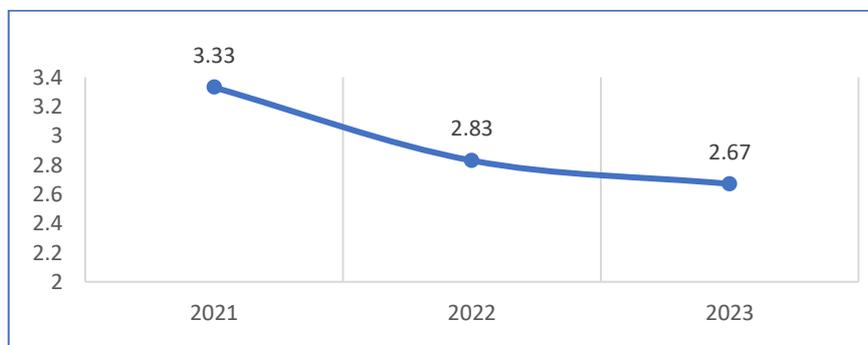
Garis kemiskinan Provinsi Papua tahun 2023 sebesar Rp 686.469,00/kapita/bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran minimum seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan non makanan selama sebulan di Provinsi Papua tahun 2023 meningkat sebesar Rp 57.294 dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 629.175,-/kapita/bulan. Peningkatan garis kemiskinan ini terjadi seiring dengan terjadinya kenaikan harga barang dari tahun ke tahun. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Papua selama periode 2020-2023 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa menjauhnya rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk

miskin terhadap standar kebutuhan minimum kehidupan layak yang telah ditentukan atau garis kemiskinan. Sementara itu, perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Papua selama 2020-2023 juga cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi.

3.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua periode 2021-2023 terus menurun setiap tahunnya. Untuk tahun 2023, TPT Provinsi Papua sebesar 2,67 persen atau turun 0,16 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 2,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja terus mengalami peningkatan serta jumlah pengangguran pun menurun. Atau dengan kata lain, tenaga kerja yang terserap dalam lapangan usaha juga semakin besar. Tenaga kerja di Papua mayoritas terserap pada sektor pertanian.

Gambar III.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua 2021-2023

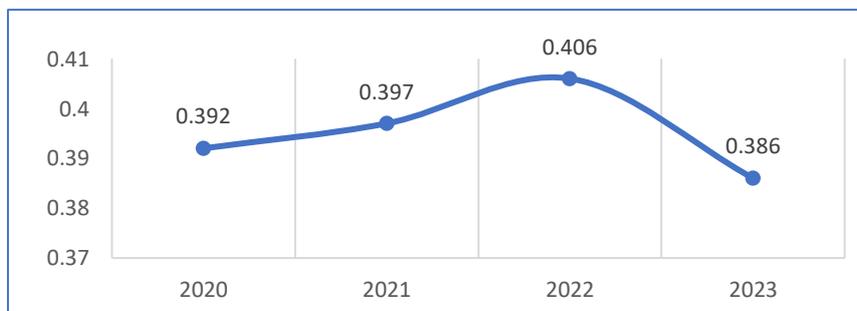


Sumber data: BPS Provinsi Papua

3.1.2.5 Rasio Gini

Rasio gini Provinsi Papua selama periode 2020-2023 mengalami fluktuatif dengan nilai rasio gini tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 0,406 dan yang terendah terjadi di tahun 2023 sebesar 0,386. Rasio gini yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran di Provinsi Papua semakin membaik, dari 0,406 di tahun 2022 turun 0,02 poin menjadi 0,386 di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan semakin kecilnya tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Papua.

Gambar III.6 Rasio Gini Provinsi Papua 2020-2023



Sumber data: BPS Provinsi Papua

3.1.3 Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tahun 2025

Berdasarkan kondisi perekonomian daerah yang telah dijabarkan maka perekonomian Provinsi Papua di tahun 2025 diperkirakan akan terus bertumbuh atau meningkat karena didorong oleh peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat dan juga didukung oleh pemulihan pada sektor-sektor penggerak ekonomi di Provinsi Papua yang diperkirakan akan terus bertumbuh positif di tahun 2025. Peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi tersebut tentunya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan inflasi dari sisi permintaan. Selain itu, diharapkan akan berdampak pula pada penurunan tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan dan juga menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat.

Tantangan lainnya yang mungkin akan dihadapi Provinsi Papua di tahun 2025, antara lain situasi perekonomian yang kompetitif, nilai investasi yang berfluktuasi pasca pemekaran DOB, keamanan dan kepastian hukum dalam berinvestasi, percepatan pembangunan, ketersediaan pangan yang terjangkau dan berkualitas, penguatan peran UMKM sebagai upaya penyerapan tenaga kerja, ketersediaan komoditas dan stabilitas harga-harga bahan pokok, serta penyediaan tenaga kerja yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan pasar.

Tabel III.9 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Papua Tahun 2025

No	Indikator	Tahun			Target	Proyeksi	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	15.11	5-6,5	5,3-5,9	6,5-6,7	4,4-4,9	6,9-7,2
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,33	3,25	3,18	2,40	6,3-6,8	-
3	Rasio Gini (%)	0.396	0,395	0,390	-	0,380-0,383	-
4	Tingkat Kemiskinan (%)	27.38	26,21	25.00	-	16-16,5	-
5	Indeks Pembangunan Manusia	60,62	61,65	67,67	67,85	68,03	68,21
6	Penurunan Emisi GRK (%)	27.38	?	0.311	-	59,28	-
7	PDRB per kapita (Juta Rp.)	41.53	48,23	48.23	-	59,8	-

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah Provinsi Papua diarahkan pada pemulihan ekonomi yang ditandai dengan pemulihan konsumsi masyarakat, peningkatan produksi komoditas unggulan, pembangunan proyek pemerintah dan proyek swasta, dan peningkatan kinerja dunia usaha yang disertai dengan penjaminan kenyamanan dan keamanan berusaha guna mendukung pemerataan dan peningkatan kemampuan ekonomi daerah dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Analisis mengenai situasi dan proyeksi keuangan daerah merupakan langkah penting dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan untuk menilai kemampuan daerah dalam membiayai proyek pembangunan serta memberikan perhatian yang tepat pada strategi isu-isu. Melalui analisis keuangan daerah yang cermat, akan dapat dirumuskan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Komponen keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, pengeluaran atau belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang harus dikelola dengan tertib, memenuhi prinsip hukum, efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban, serta memperhatikan keadilan dan kepentingan masyarakat.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pendapatan, pembiayaan, dan belanja daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumberdaya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang dan serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah. Komponen keuangan daerah (pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah) harus dikelola dengan tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sementara itu, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dengan demikian, penetapan kebijakan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun 2025, baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah harus dimulai sejak tahap perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga penting, yang berarti bahwa proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang diharapkan dapat mencapai tingkat efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas yang diinginkan.

Kebijakan pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kecuali untuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama

kendaraan bermotor, dan opsi pajak yang akan diterapkan mulai tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan demikian, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber pendapatan dan asset Pemerintah Daerah guna mendukung pembangunan daerah maka kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan dana perimbangan. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan PAD tahun 2023, antara lain sebagai dampak dari pemekaran daerah dan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, terutama terkait kebijakan opsen pajak.

Tabel III.10 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua tahun 2021-2023

KODE	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4	PENDAPATAN	11.028.623.323	1.602.124.407	2.739.243.604	1.971.550.294	2.020.839.051
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.226.754.655	557.427.518	565.381.850	457.188.178	468.617.883
4.1.01	Pajak Daerah	1.235.493.977	366.773.362	386.285.664	265.242.440	271.873.501
4.1.02	Retribusi Daerah	17.713.806	14.510.000	130.021.186	121.477.186	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	766.991.558	11.518.763	44.500.000	55.664.802	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	206.555.314	164.625.393	4.575.000	14.803.750	15.173.844
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	8.797.401.602	1.044.696.889	2.172.861.754	1.513.312.116	1.551.144.919
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.004.746.236	1.044.696.889	2.079.568.634	1.370.005.002	1.404.255.127
4.2.01.01	Dana Perimbangan	5.004.746.236	1.044.696.889	990.950.728	822.894.029	843.466.380
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.938.939.484		53.847.198	44.847.198	45.968.378
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.314.812.590	824.236.308	778.046.831	778.046.831	
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	366.834.632	220.460.581	147.455.984		
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	384.159.530		11.600.715		
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	3.804.141.054	-	1.088.617.906	547.110.973	560.788.747
4.2.01.03.01	Dana Otonomi Khusus	3.792.655.366		480.248.851	547.110.973	
4.2.01.03.02	Dana Insentif Daerah	11.485.688		-		
4.2.01.03.03	Dana Tambahan Infrastruktur			608.369.055		
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	3.804.141.054		93.293.120	143.307.114	146.889.792
4.2.02.02	Bantuan Keuangan			93.293.120	143.307.114	146.889.792
4,3	LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.467.066		1.000.000	1.050.000	1.076.250
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.396.650		1.000.000	1.050.000	1.076.250
4.3.2	Pendapatan lainnya	70.416				

Sumber data : BPKAD Provinsi Papua.

Keterangan : Belum tersedia data realisasi tahun 2023 sehingga digunakan data dari Pergub Provinsi Papua No. 4/2023 tentang APBD TA. 2023

Seperti tampak dalam tabel III.10 di atas, sumbangan terbesar terhadap pendapatan daerah Provinsi Papua selama kurun waktu 2022-2023 berasal dari Pendapatan Transfer, yang diikuti oleh sumbangan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk tahun 2023, kontribusi Pendapatan Transfer terhadap pendapatan daerah Provinsi Papua sebesar 79,93 persen dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar 20,07 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan PAD tahun 2023, antara lain sebagai dampak dari pemekaran daerah dan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, terutama terkait kebijakan opsen pajak.

Pemerintah daerah akan terus melaksanakan kebijakan untuk memperkuat sistem pajak dan retribusi daerah, dengan tujuan menjaga stabilitas pendapatan daerah setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Undang-undang tersebut mencakup penyesuaian pada jenis pajak dan retribusi daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah dan kondisi realisasi tahun 2022-2023, maka diproyeksikan pendapatan daerah Provinsi Papua tahun 2025 sebesar 2,794 triliun Rupiah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 576.689 miliar Rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 2,216 triliun Rupiah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah sebesar 1,020 miliar rupiah.

Tabel III.11 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	PENDAPATAN	100.00	100.00	100.00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.41	20.17	20.07
1.1.1.	Pajak Daerah	76.06	55.48	
1.1.2.	Retribusi Daerah	1.81	0.80	
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.89	34.44	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.24	9.28	
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	84.51	79.79	79.93
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	32.45	56.81	
1.2.1.1	Bagi Hasil	26.52	38.74	
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	60.80	46.25	
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)			
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.60	7.68	
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	9.09	7.33	
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	67.55	43.19	
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	99.80	99.70	
1.2.2.2	Dana Insentif Daerah	0.20	0.30	
1.2.2.3	Dana Tambahan Infrastruktur			
1.3	LAIN- LAIN PENDAPATAN yang SAH	0.08	0.04	
1.3.1	Hibah	36.78	98.42	
1.3.2	Pendapatan lainnya	63.22	1.58	

Sumber data : BPKAD Provinsi Papua, data diolah.

Keterangan : Tahun 2023 data dari Pergub Provinsi Papua No. 4/2023 tentang APBD TA. 2023

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, meliputi:

- a. Pengembangan kemudahan pembayaran pajak berbasis online dan kerjasama

- dengan berbagai pihak.
- b. Penguatan inovasi layanan samsat.
 - c. Peningkatan penagihan pajak secara persuasif.
 - d. Penguatan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pajak daerah.
 - e. Peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak.
 - f. Peningkatan akses dan kemudahan pelayanan pajak daerah.
 - g. Penguatan koordinasi dan kesepahaman dengan berbagai pihak untuk menghindari sengketa pajak.
 - h. Pengintegrasian ke dalam sistem samsat dan membangun kerjasama untuk optimalisasi pajak alat berat.
 - i. Membangun kerjasama untuk optimalisasi pajak mineral bukan logam dan batuan (MLB).
 - j. Kolaborasi Samsat dengan Kabupaten/Kota dalam penagihan tunggakan PKB dan rekonsiliasi data opsen pajak.
 - k. Membangun kerjasama dengan Dinas ESDM untuk memperkuat data PBBKB.
 - l. Penguatan koordinasi terkait kejelasan status aset yang akan menjadi sumber retribusi daerah.
 - m. Identifikasi jenis pelayanan OPD dan pembinaan OPD penghasil retribusi daerah.
 - n. Identifikasi sumber retribusi baru.
 - o. Optimalisasi koordinasi aset daerah yang memiliki kejelasan status legalitas.
 - p. Pengembangan elektronifikasi retribusi daerah.
 - q. Optimalisasi kontribusi BUMD.
 - r. Koordinasi kerjasama pengelolaan aset daerah.
 - s. Peningkatan pemutakhiran dan akurasi data wajib pajak.
 - t. Sinkronisasi data antara Samsat dengan BPKAD Kabupaten/Kota.
 - u. Pendataan dan legalisasi aset internal.
 - v. Pengembangan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
 - w. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM internal sesuai tugas dan fungsi.

Terkait kebijakan dana perimbangan, Pemerintah Provinsi Papua berfokus pada peningkatan perolehan dana perimbangan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan pembangunan di masa mendatang memerlukan pendekatan yang sistematis, terutama dalam hal kerangka pendanaan. Tujuannya adalah untuk menentukan kapasitas finansial sebenarnya yang dapat dialokasikan oleh daerah untuk mendukung program pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang mengikat, prioritas utama, dan diskresioner belanja, kita dapat memperkirakan kapasitas finansial sebenarnya yang tersedia untuk menambah program dan kegiatan selama periode lima tahun ke depan.

Dalam penyusunan belanja daerah, prinsip-prinsip penganggaran diterapkan melalui pendekatan berbasis kinerja, yang menitikberatkan pada pencapaian hasil dari masukan yang telah direncanakan. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan kinerja setiap unit kerja di bawah pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran, serta memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam program, kegiatan, dan subkegiatan.

Tabel III.12 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2021-2023

KODE	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5	BELANJA	11.454.657.535	3.492.154.005	3.009.243.604	2.303.892.977	2.361.490.301
5,1	BELANJA OPERASI	8.578.410.637	2.415.353.020	2.252.986.230	1.609.498.722	1.649.736.190
5.1.01	Belanja Pegawai	2.413.293.504	849.073.619	6.761.774.115	962.503.241	986.565.822
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.487.048.046	1.455.606.710	1.175.355.003	636.995.481	652.920.368
5.1.03	Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Hibah	1.634.316.327	93.750.779	400.283.113	10.000.000	10.250.000
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	43.752.760	16.921.911	574.000	-	-
5,2	BELANJA MODAL	2.029.533.805	519.216.636	524.358.965	547.110.973	560.788.747
5.2.01	Belanja Modal Tanah	25.000.000	3.500.000	140.625	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	236.086.848	117.578.466	63.843.376	-	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.054.570.477	102.481.562	32.527.427	-	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	709.924.786	294.575.408	411.925.020	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.504.768	81.200	641	-	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.446.926	1.000.000	2.000.000	-	-
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	196.021.127	403.000.000	11.520.581	9.000.000	9.225.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	196.021.127	403.000.000	11.520.581	9.000.000	9.225.000
5,4	BELANJA TRANSFER	650.691.966	154.584.349	220.377.828	138.283.282	141.740.364
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	650.691.966	154.584.349	220.377.828	138.283.282	141.740.364
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	-	-	-	-	-

Sumber data : BPKAD Provinsi Papua

Keterangan : Tahun 2023 data dari Pergub Provinsi Papua No. 4/2023 tentang APBD TA. 2023

Tabel III.12 di atas menunjukkan Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2022-2025. Dari tabel tersebut terlihat bahwa besaran realisasi belanja untuk tahun 2023 mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 11,4 triliun di tahun 2022 menjadi 3,4 triliun di tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pembentukan daerah otonomi baru di tahun 2022, sehingga Pemerintah Provinsi Papua harus menyesuaikan besaran belanja dengan potensi pendapatan yang masih tersedia. Selanjutnya Besaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 3,009 triliun Rupiah, yang meliputi Belanja Operasi sebesar 2,252 triliun Rupiah, Belanja Modal sebesar 524,358 miliar rupiah, Belanja Tak Terduga sebesar 11,520 miliar Rupiah,

dan Belanja Transfer sebesar 220,377 miliar Rupiah, dengan komponen belanja terbesar adalah Belanja Operasi.

Kemudian berdasarkan potensi pendapatan yang telah diproyeksikan, proyeksi Belanja daerah Provinsi Papua tahun 2025 adalah sebesar 3,069 triliun rupiah. Belanja tersebut selain diarahkan untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional tahun 2025, namun juga lebih utamanya diarahkan pada peningkatan sumberdaya manusia berkarakter berbasis ekonomi inklusif sebagai modal dasar transformasi pembangunan Papua, dengan berfokus pada prioritas pembangunan, yaitu peningkatan dan pemerataan sumberdaya manusia; pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan; percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah; peningkatan keamanan dan ketertiban; serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

RKP tahun 2025 merupakan acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia guna berpartisipasi dan berkolaborasi dalam upaya mendukung pencapaian pembangunan nasional. Untuk Pemerintah Daerah, RKP tahun 2025 digunakan sebagai acuan dalam menyusun RKPD tahun 2025. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam RKPD. Adapun prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- b. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
- c. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan yang memuat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan yang memuat tentang penyertaan modal daerah. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Tabel III.13 Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024

6	PEMBIAYAAN	2023	2024
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.272.073.030.162	285.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.772.073.030.162	285.000.000.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	500.000.000.000	0

6	PEMBIAYAAN	2023	2024
	<i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</i>	2.272.073.030.162	285.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.600.000.000	15.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.600.000.000	15.000.000.000
	<i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</i>	<i>30.600.000.000</i>	<i>15.000.000.000</i>
	<i>Pembiayaan Netto</i>	<i>2.241.473.030.162</i>	<i>270.000.000.000</i>
	Surplus/ (Defisit)	(2.241.473.030.162)	(270.000.000.000)
6.3	SiLPA Tahun Berkenaan	0	0

Arah kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pembiayaan daerah tahun 2023 dan 2024 diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada item-item pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

Seperti terlihat dalam Tabel III.13, Defisit APBD tahun anggaran 2023 didanai dari pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan pencairan Dana Cadangan. Sementara itu besaran defisit anggaran tahun 2024 didanai dari sumber pembiayaan yang berasal dari SiLPA.

3.2.4 Kebijakan Belanja Daerah yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Juli 2021, merupakan upaya pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, untuk itu perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain dalam wadah NKRI, serta akan memberikan peluang bagi

orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan. Rumusan materi muatan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tersebut dibangun dengan konstruksi yang bersumber dari dua elemen, yaitu:

- a. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- b. kristalisasi penggalan aspirasi masyarakat di Provinsi Papua yang menjadi karakter kekhususan dan kebutuhan prioritas bagi masyarakat Papua.

Kebijakan otsus menurut UU Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan tiga pilar penting sebagai penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP);
- b. Pemerintah daerah (Gubernur beserta perangkat daerah); dan
- c. Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dua (2) Formulasi Kebijakan Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 pasal 34 ayat 3 huruf e dan f, yaitu:

- a. **Dana Otsus Block Grant** (setara 1% dari DAU Nasional) digunakan untuk :
 - 1) Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan publik;
 - 2) Peningkatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), penguatan kelembagaan adat;
 - 3) Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Dana Otsus Specific Grant** (setara 1,25% dari DAU Nasional) digunakan untuk:
 - 1) Belanja pendidikan paling sedikit 30%;
 - 2) Belanja kesehatan paling sedikit 20% ; dan
 - 3) Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021, diatur bahwa penggunaan penerimaan provinsi dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Arah kebijakan pengelolaan belanja yang bersumber dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua meliputi:

- a. Pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dengan memprioritaskan OAP;
- b. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan memprioritaskan OAP;
- c. Pembangunan infrastruktur berkualitas terutama yang mendukung pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sanitasi lingkungan, pemukiman dan perumahan, serta infrastruktur dasar lainnya dengan memprioritaskan distrik dan kampung yang merupakan basis OAP

- d. Peningkatan kesejahteraan kualitas hidup OAP, pemberdayaan perempuan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat adat
- e. Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan

Arah kebijakan diatas, selanjutnya dijabarkan dalam RIPP, dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Dalam pelaksanaan RIPP, strategi operasionalisasi yang dilakukan antara lain:

- a. Percepatan pembangunan Papua berbasis sosial budaya, wilayah adat, zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan mengutamakan OAP;
- b. Percepatan pembangunan Papua berbasis distrik dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau;
- c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan partisipatif yang didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan kebijakan yang berbasis data dan informasi;
- d. Pelaksanaan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat dan MRP dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. Pemberdayaan pengusaha lokal dengan memprioritaskan pengusaha OAP;
- g. Pendampingan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara di wilayah Papua;
- h. Penguatan kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya; penguatan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam menciptakan wilayah Papua yang aman, stabil, damai;
- i. Peningkatan koordinasi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di wilayah Papua; dan
- j. Pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi.

Selanjutnya sesuai dengan Arahan yang dituangkan oleh Pemerintah dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2025 disebutkan bahwa Arah kebijakan umum Dana Otonomi Khusus Papua pada tahun 2025 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum satu persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional diarahkan untuk mendukung peningkatan peran distrik dan kampung dalam perluasan pelayanan publik di bidang administrasi pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan terutama pada Orang Asli Papua hingga ke tingkat kampung, penataan tanah adat/ulayat, penguatan lembaga adat, dan pengembangan pangan lokal;
- b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan (1,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional) diarahkan untuk (i) belanja pendidikan (minimal 30 persen), terutama untuk mendukung penyediaan layanan pendidikan dan pengembangan kurikulum kontekstual Papua, serta pemenuhan tenaga pendidik yang mengutamakan Orang Asli Papua; (ii) belanja kesehatan (minimal 20 persen) diarahkan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak (mobile health

services), percepatan penurunan stunting, penurunan kematian ibu dan bayi, pengendalian penyakit, serta pemenuhan tenaga kesehatan yang mengutamakan Orang Asli Papua; serta (iii) pemberdayaan ekonomi masyarakat, diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; koperasi; dan Badan Usaha Milik Kampung;

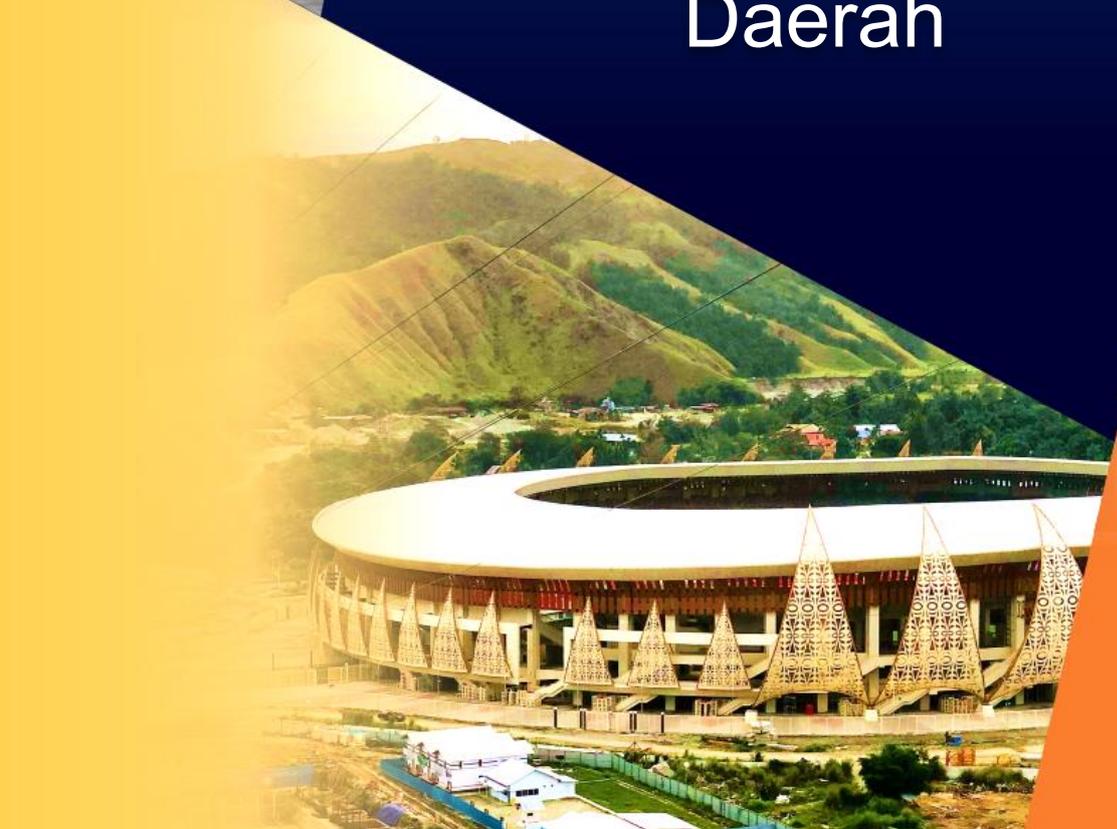
- c. Dana Tambahan Infrastruktur diarahkan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan, terutama yang mendukung pengembangan kawasan pemerintahan dan kawasan perkotaan, termasuk pada ibu kota daerah otonom baru;
- d. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Otonomi Khusus diarahkan untuk belanja pendidikan (35 persen), belanja kesehatan dan perbaikan gizi (25 persen), belanja infrastruktur (30 persen), serta belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat (10 persen), terutama dalam rangka penguatan budaya lokal dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat adat.

Mengingat arahan penggunaan Dana Otonomi Khusus akan mempertimbangkan aspek kinerja, pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor percepatan pembangunan Wilayah Papua dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap sesuai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029 untuk mencapai Misi Papua yang Sehat, Cerdas, dan Produktif.



BAB IV

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah





BAB IV

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Sasaran pokok dan prioritas pembangunan daerah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mengarahkan dan menentukan jalannya program-program utama yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun berkenaan. Dalam konteks ini, sasaran pokok merujuk kepada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah secara keseluruhan. Sementara itu, prioritas pembangunan mengarahkan fokus pada bidang-bidang atau sektor-sektor tertentu yang dianggap memiliki urgensi didahulukan serta penting untuk diberikan perhatian lebih dalam proses pembangunan daerah.

Penetapan sasaran pokok dan prioritas pembangunan daerah tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga menjadi pijakan bagi pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya, perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan, serta evaluasi dan pengendalian kinerja pemerintah daerah. Dengan memahami secara mendalam sasaran pokok dan prioritas pembangunan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada di wilayahnya serta merancang langkah-langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta merespon isu strategis yang mengemuka.

Dengan demikian, sasaran pokok dan prioritas pembangunan daerah berperan sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan efisien, serta sebagai alat untuk mengukur pencapaian hasil pembangunan secara berkala. Selain itu, keselarasan antara sasaran pokok dan prioritas pembangunan daerah dengan berbagai

mandat yang dijalankan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu, proses penetapan dan implementasi sasaran pokok dan prioritas pembangunan daerah harus dilakukan secara teliti, partisipatif, dan berkelanjutan guna memastikan tercapainya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Arahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

4.1.1.1 Telaah Visi dan Misi RPJPN 2025-2045

Pemerintah Republik Indonesia merencanakan Visi Indonesia Emas 2045 “**Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**”. Visi ini berlandaskan pada (i) kekuatan modal dasar yang terdiri atas kependudukan, modal sosial dan budaya, dan kemaritiman; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya bahari sebagai poros maritim dunia.

Pemerintah Republik Indonesia merencanakan Visi Indonesia Emas 2045 “**Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**”. Visi ini berlandaskan pada (i) kekuatan modal dasar yang terdiri atas kependudukan, modal sosial dan budaya, dan kemaritiman; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya bahari sebagai poros maritim dunia. Hasil perumusan visi kemudian diturunkan menjadi 5 (lima) sasaran utama sebagai berikut:

a. Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju

Negara Indonesia diperkirakan memiliki pendapatan per kapita setara negara maju yang berkisar pada US\$ 23.000–30.300 dan termasuk dalam ekonomi lima terbesar di dunia. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28% dan PDB kemaritiman sebesar 15% berbasis inovasi. Rencana penerapan pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, lapangan pekerjaan layak (*decent job*) akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80%.

b. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang

Selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan lapangan pekerjaan layak, dan pendapatan menengah, sasaran kedua adalah menurunkan angka kemiskinan menuju 0% pada kisaran 0,5% - 0,8% yang diikuti oleh penurunan jumlah penduduk rentan miskin secara signifikan. Ketimpangan pendapatan yang diindikasikan dengan rasio gini menurun sampai pada kisaran 0,290 – 0,320. Selain ketimpangan pendapatan, ketimpangan wilayah juga diperkirakan menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5%.

c. **Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat**

Indonesia mengalami perkembangan secara terus menerus dan kemajuan yang berhasil diraih. Sejalan dengan kondisi tersebut, peran dan pengaruh Indonesia di dunia internasional akan mengalami peningkatan. Peningkatan peran dan pengaruh di dunia internasional dicerminkan dari penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Pengukuran dilakukan terhadap aspek Global Power Index (GPI) yang diperkirakan termasuk dalam peringkat 15 besar dunia.

d. **Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat**

Peningkatan daya saing sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia yang meningkat secara merata dicapai melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan. Pengukuran daya saing sumber daya manusia menggunakan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) yang diperkirakan meningkat menjadi 0,73 pada tahun 2045.

e. **Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun Menuju *Net Zero Emission***

Proses pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan diharapkan mampu mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Penerapan konsep ramah lingkungan dicantumkan dalam kerangka ekonomi hijau yang diindikasikan oleh penurunan intensitas emisi GRK menjadi 93,5% pada tahun 2045 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010. Selain itu, indikator yang termasuk dalam pengukuran sasaran kelima adalah *net zero emission* pada tahun 2060.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, perlu penyusunan misi atau agenda utama pembangunan yang berjumlah 8 (delapan) yaitu transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta kesinambungan pembangunan. Delapan misi atau agenda utama pembangunan dapat dicermati secara detail sebagai berikut:

- a. **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
- b. **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan;
- c. **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk mengoptimalkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;

- d. **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** melalui stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gantar kawasan;
- e. **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam;
- f. **Pembangunan kewilayahan** untuk pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan dilakukan sesuai dengan karakteristik tiap wilayah;
- g. **Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** untuk mengembangkan wilayah sekaligus mendukung agenda transformasi; dan
- h. **Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas** melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

4.1.1.2 Arahan RIPP 2021-2041

Sesuai dengan pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua maka telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 yang memuat langkah-langkah strategis pelaksanaan pembangunan di tanah Papua. RIPP membawa semangat, paradigma, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Secara filosofis, RIPP merupakan penjabaran tujuan dan cita-cita pembangunan di dalam UUD 1945 yang disinergikan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*sustainable development goals*).

Dalam dokumen RIPP dinyatakan bahwa Visi Pembangunan Papua 2041: “Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”. Upaya perwujudan visi pembangunan Papua tersebut ditempuh melalui **3 (tiga) misi dan sasaran indikator** sebagai berikut:

- a. **Misi-1:** memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting.
- b. **Misi-2:** memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter dan mampu bekerjasama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

- c. **Misi-3**; meningkatkan kompetensi, kreativitas dan inovasi dengan pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Gambar IV.1 Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua

	INDIKATOR	BASELINE 2021	TARGET 2041
 PAPUA SEHAT sasaran : Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk	1. Umur harapan hidup (UHH) (tahun)	65,93 – 66,14	68,66 – 68,67
	2. Prevalensi <i>stunting</i> (%)	29,50 – 26,20	10,00
 PAPUA CERDAS sasaran : Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk	1. Harapan lama sekolah (HLS) (tahun)	11,11 – 13,13	14,59 – 16,61
	2. Rata-rata lama sekolah (RLS) (tahun)	6,76 – 7,69	9,36 – 10,37
 PAPUA PRODUKTIF sasaran : Tercapainya kemampuan bekerja, berusaha dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk	1. Tingkat kemiskinan (%)	27,38 – 21,82	5,99 – 5,00
	2. Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,84 – 3,33	4,11 – 1,73
	3. Laju pertumbuhan ekonomi (%)	10,30	6,30

Dimensi pembangunan yang tertuang dalam RIPPp meliputi Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua produktif yang masing-masing dapat diuraikan lagi sebagai berikut:

a. Papua Sehat

- 1) Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
- 2) Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan; dan
- 3) Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh.

b. Papua Cerdas

- 1) Fasilitas pendidikan yang berkualitas;
- 2) Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif;
- 3) Distribusi tenaga pendidik yang merata; dan
- 4) Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup.

c. Papua Produktif

- 1) Ekonomi masyarakat adat dan sumber-sumber daya lokal;
- 2) Akses terhadap teknologi, perdagangan, dan pasar nasional, regional, dan global;
- 3) Sumber daya alam yang berkelanjutan;

- 4) Ekonomi lokal; dan
- 5) Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah

Dalam rangka mewujudkan sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, dibutuhkan kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan dengan memperhatikan pengarusutamaan dan kaidah pelaksanaan, serta diimplementasikan dalam tiap pentahapan pembangunan. Kondisi perlu meliputi adanya intervensi di bidang infrastruktur dasar dan konektivitas, lingkungan hidup, tata kelola pembangunan dan tanah adat/ulayat, kebudayaan dan harmonisasi sosial.

4.1.1.3 Arahan RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi *window opportunity* bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas.

Gambar IV.2 Tema dan Arah Kebijakan RKP TA 2025



RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan,

penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel IV.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,6
2	Kemiskinan	7-8
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5-5
4	Indeks Modal Manusia	0,56
5	Rasio Gini	0,379 - 0,382
6	Intensitas Emisi GRK	38,6

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

Gambar IV.3 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL 1
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 2
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

PRIORITAS NASIONAL 3
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

PRIORITAS NASIONAL 4
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

PRIORITAS NASIONAL 5
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

PRIORITAS NASIONAL 6
Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

PRIORITAS NASIONAL 7
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

PRIORITAS NASIONAL 8
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Sementara itu, tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

4.1.1.4 Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (SDGs). Agenda internasional ini untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim yang diupayakan dalam bentuk aksi nyata. Diharapkan agenda ini dapat tercapai di tahun 2030, dengan tujuan dan target meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) meliputi:

- a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- c. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia
- d. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
- g. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
- h. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- i. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- j. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
- k. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- l. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

- p. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dalam membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Agenda SDGs tersebut di atas sangat relevan dengan konteks pembangunan Papua untuk saat ini maupun yang akan datang. Oleh karena itu Provinsi Papua juga berupaya sama untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil sintesis terhadap 236 indikator TPB kewenangan Provinsi, terdapat 10 (sepuluh) prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi penekanan dan urgensi bagi pembangunan di Provinsi Papua sebagai berikut:

- a. TPB 1 : Tanpa Kemiskinan
- b. TPB 2 : Tanpa Kelaparan
- c. TPB 4 : Pendidikan Berkualitas
- d. TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
- e. TPB 7 : Energi bersih
- f. TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- g. TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan Wilayah
- h. TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim
- i. TPB 15 : Ekosistem
- j. TPB 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2025 tidak dapat dilepaskan dari mandat yang dijalankan oleh Pemerintah Papua sesuai dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPD) Provinsi Papua tahun 2024-2026. Adapun arsitektur Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung

Sasaran:

- 1) Pembangunan kampung mandiri ekonomi
- 2) Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, serta kemandirian pangan.
- 3) Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan
- 4) Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

- 5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim
- 6) Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
- 7) Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan koperasi
- 8) Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan.
- 9) Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah

Tujuan 2 : Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses pada Layanan Dasar dan Pasar

Sasaran:

- 1) Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
- 2) Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah.
- 3) Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah
- 4) Menyiapkan papua gerbang ekspor
- 5) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
- 6) Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan
- 7) Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah

Tujuan 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing

Sasaran:

- 1) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
- 2) Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat
- 3) Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat

Tujuan 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua
- 2) Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel IV.2 Matriks Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran	Indikator kerja	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja			Kondisi akhir	
				2024	2025	2026		
T1	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5 – 6,5	6,5-6,7	6,7-6,9	6,9-7,2	6,9-7,2
S1	Pembangunan kampung mandiri ekonomi	Status IDM kampung mandiri ekonomi	persen	Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Maju
		Indeks Desa Membangun di lokus kampung mandiri	Indeks	-	>0,491- ≥0,599	>0,599- ≥0,707	>0,707 - ≥0,815	-
S2	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	77	85	90	100	100
		Produktivitas tanaman pangan utama	Ha	45,05	45,5	45,95	46,41	46,41
		Produktivitas perikanan	Ton/tahun	317.329,33	320.502,62	323.707,65	326.944,73	330.214,18
		Konsumsi ikan	kilogram	64,3	65	70	75	75
S3	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	Produksi perikanan	Ton/Tahun	317.329,33	320.502,62	323.707,65	326.944,73	330.214,18
		Nilai tukar petani sub sektor perikanan	indeks	114,55	115,7	116,86	118,03	119,21
S4	Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	persen	10,71	10,85	10,95	11,71	11,71
		Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	persen	36,14	10	11	12	12
S5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	81,46	82,27	83,09	83,92	83,92
		tingkat emisi gas rumah kaca	persen	1.866	1.885	1.904	1.923	1.923
		Indeks Kualitas Udara	indeks	95,32	96,27	97,23	98,2	98,2
		Indeks Kualitas Air	indeks	55,07	55,63	56,18	56,7418	56,7418
		Indeks Kualitas air laut	indeks	87,29	88,16	89,04	97,29	97,29
S6	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	persen	98	98	98	98	98
		Laju Deforestasi	Ha	34.918	-	-	-	-

Tujuan/Sasaran	Indikator kerja	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja			Kondisi akhir	
				2024	2025	2026		
S7	Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	persen	9,37	9,47	9,57	9,67	9,67
		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB	persen	1,8	2	2,8	3	3
		Cakupan bina kelompok pengrajin	kelompok	1.726	1.750	1.800	1.850	1.850
		Jumlah Industri rakyat yang dikembangkan	unit	7.308	7.500	7.750	8.000	8.000
		jumlah koperasi aktif	unit	2434	628	648	658	658
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persen	15,11	15,26	15,41	15,56	15,56
		Jumlah UMKM OAP yang berkembang	unit	377	381	385	389	389
		Jumlah unit usaha masyarakat di sektor pertambangan	Unit	-	-	-	-	-
		Persentase tenaga kerja sektor pertambangan	persen	-	-	-	-	-
S9	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	trilyun	1670	1720	1770	1820	1820
		Jumlah perusahaan PMDN dan PMA	unit	326	330	334	338	338
		Jumlah tenaga kerja	Orang	6.676	NA	NA	NA	NA
T2	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar dan Pasar	Persentase Kebutuhan Dasar Masyarakat	Persen	95	95	95	95	95
S10	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi (%)	Persen	95	95	95	95	95
		Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang kabupaten/kota	Persen	9	9	9	9	9
S11	Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik (%)	Persen	-	-	-	-	-

Tujuan/Sasaran		Indikator kerja	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja			Kondisi akhir
					2024	2025	2026	
S12	Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	Cakupan Panjang Jalan	kilometer	2100	2150	2200	2250	2250
S13	Menyiapkan papua gerbang ekspor	Tersedianya Papua Gerbang ekspor	Unit	1	1	1	1	1
S14	Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	Cakupan Rumah Layak Huni (%)	Persen	64,77	-	-	-	-
S15	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	persen	79,12	85	90	95	95
		Rasio Ketersediaan Daya Listrik	persen	26,17	30,17	40	50	50
		Jumlah energi Alternatif yang dikembangkan	Unit	-	-	-	-	-
S16	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	60	61	62	63	63
T3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,67	67,85	68,03	68,21	68,21
S17	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	tahun	9,14	9,19	9,22	9,26	9,26
		Harapan lama sekolah	tahun	13,09	13,29	13,35	13,48	13,48
S18	Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp ribu /Orang	8.504	8.754	9.004	9.254	9.254
S19	Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	tahun	66,54	66,64	66,74	66,84	66,84
T4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67	75,05	80,05	80,50	80,50
S20	Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua	Nilai SAKIP	Nilai	66,05	75,39	80,05	80,50	80,50
S21	Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	95	95	95	95	95
S22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	95	95	95	95	95

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2025 merupakan satu proses konsolidasi beberapa arahan yang telah diberikan oleh beberapa dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah lainnya, berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 serta pemetaan terhadap permasalahan serta isu strategis yang mengemuka di Papua. Selain itu, uraian prioritas pembangunan daerah tahun 2025 juga sangat terkait dengan tema pembangunan daerah yang disusung pada tahun 2025 seiring dengan adanya faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan agenda pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Papua tahun 2025.

4.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025

Tema pembangunan menengah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman kepada kebijakan yang tertuang dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021, disamping isu strategis paling mutakhir yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Tema Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2025 adalah; **Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkarakter Berbasis Ekonomi Inklusif sebagai Modal Dasar Transformasi Pembangunan Papua.**

TEMA RKP 2025	TEMA RKPD PAPUA TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkarakter Berbasis Ekonomi Inklusif sebagai Modal Dasar Transformasi Pembangunan Papua

Sesuai dengan tema pembangunan tersebut diatas, Sasaran pembangunan nasional dan Papua Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3 Sasaran Target Pembangunan Tahun 2025

No	Indikator	Nasional	Papua
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,6	4,4 -4,9
2	Kemiskinan	7-8	16 -16,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5-5	6,3 - 6,8
4	Indeks Modal Manusia	0,56	0,45
5	Rasio Gini	0,379 - 0,382	0,380 -0,383
6	Intensitas Emisi GRK	38,6	59,28

Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2025 yang telah dirumuskan diatas maka dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2023 yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM
- b. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan
- c. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
- d. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
- e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Kelima Prioritas pembangunan daerah diatas telah selaras dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel IV.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah 2023

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
I.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya Aksesibilitas dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan kesehatan b. Rendahnya budaya baca pada masyarakat c. Rendahnya derajat Kesehatan masyarakat d. Kurangnya Prestasi Olah Raga e. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan 2) Peningkatan prestasi 3) dan pemanfaatan sarpras olahraga 	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM
	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum terinternalisasinya nilai adat dan budaya asli tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat b. Belum efektifnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP c. Belum optimalnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan d. Masih kurangnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perlindungan sosial 2) Peningkatan internalisasi adat dan budaya 3) Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak 	
II.	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas b. Belum optimalnya peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan c. Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim d. Belum terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektor- sektor industri manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif e. Rendahnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan f. Kurangnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja g. Kurangnya daya saing dan realisasi investasi pada sektorsektor andalan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan komoditas unggulan berbasis wilayah adat 2) Pendayagunaan dan pengembangan potensi ekonomi pertanian, perkebunan, kelautan dan pariwisata dan ekonomi kreatif 3) Implementasi pembangunan berkelanjutan (green growth dan rendah karbon) 4) Peningkatan pemenuhan pangan berkelanjutan 	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
	h. Kurang tersedianya pangan yang berkelanjutan		
III.	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah b. Belum terimplementasinya Rencana Tata Ruang secara konsisten c. Belum tersedianya sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah d. Masih kurangnya pemenuhan rumah layak huni dan penataan pemukiman e. Kurangnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan f. Minimnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah g. Rendahnya kualitas pembangunan berbasis kampung h. Belum optimalnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan i. Kurangnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Percepatan konektivitas transportasi antar moda 2) Penyediaan infrastruktur dasar secara merata di seluruh wilayah (air bersih, sanitasi, listrik, telekomunikasi) 3) Percepatan pembangunan infrastruktur kampung, perbatasan dan wilayah terpencil) 4) Ketangguhan dalam adaptasi dan mitigasi bencana 	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
IV.	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum b. Kurangnya keharmonisan dan kohesifitas masyarakat c. Belum optimalnya Penegakan HAM d. Kurangnya kebebasan sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi. 	Peningkatan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Provinsi Papua	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
V.	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua b. Rendahnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik c. Rendahnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah d. Belum optimalnya sistem akuntabilitas pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Perbaiki tata kelola penyelenggaraan Otsus 2) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi 3) Penyelenggaraan pemerintahan 	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan pelayanan publik

Adapun keselarasan tema dan prioritas pembangunan daerah RKPDP Tahun 2023 dengan Tema dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.5 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPDP 2025 dengan RKP 2025

RKP 2025	RKPDP PAPUA 2025
Tema: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Tema: Peningkatan Sumber Daya Manusia berkarakter dan pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan berbasis komoditas unggulan
PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH

RKP 2025	RKPD PAPUA 2025
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4: Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 2: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Prioritas Daerah 2: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan
	Prioritas Daerah 3: Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas Daerah 1: Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas Daerah 2: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas Daerah 2: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas Daerah 4: Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
	Prioritas Daerah 5: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas Daerah 4: Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
	Prioritas Daerah 5: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

4.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai dengan tema dan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2025 maka selanjutnya harus diuraikan kedalam konsep teknokratis program-program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di Provinsi Papua sehingga akan memunculkan satu gerakan komprehensif program yang berdampak serta memberi kontribusi terhadap pencapaian sasaran pokok yang disepakati secara bersama sama oleh berbagai pihak di Provinsi Papua

Tabel IV.6 Sinkronisasi Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PD 4: Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	Peningkatan ruang dialog dan pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelesaian konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan	PD 2: Pertumbuhan Ekonomi yang	a. Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perikanan (komoditas tuna-	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	<p>cakalang-tongkol) dengan indikasi lokasi di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Jayapura dengan dukungan produksi dari kabupaten sekitarnya, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi wilayah tangkap (fishing ground) 2) Penguatan rantai pasok dingin dan food grade untuk produk perikanan 3) Fasilitasi dan pembinaan industri pengolahan dan pemasaran produk perikanan <p>b. Peningkatan penegakan regulasi serta kolaborasi antarpihak dalam mewujudkan kedaulatan, melalui pengawasan pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut, serta pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, terutama pada perbatasan perairan di Wilayah Pengelolaan Perikanan</p> <p>c. Percepatan pemenuhan akses air minum dan pengelolaan sampah sesuai karakteristik daerah</p> <p>d. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (kawasan jagung) di Kabupaten Keerom melalui penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia unggul, serta modernisasi teknologi pertanian dan irigasi yang terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi Senggi</p> <p>e. Penguatan ketahanan pangan berbasis pangan hewani, melalui penyediaan sarana pembibitan ternak</p>	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Ukm
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Ukm
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Ukm
			Program Pengembangan Umkm	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Ukm
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
		f. Pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpadu di Kabupaten Mamberamo Raya	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		g. Fasilitasi business matchmaking startup digital, fasilitasi digital technopreneur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Pengelolaan ketenagalistrikan	Dinas ESDM
			Pengelolaan aspek kegeologian	Dinas ESDM
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
			Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
<p>PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p>	<p>a. PD 2: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan</p> <p>b. PD 3: Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah</p>	<p>a. Pengembangan kawasan pariwisata dengan indikasi lokasi di Kabupaten Biak Numfor sebagai destinasi pariwisata bahari, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas amenities, aksesibilitas, dan atraksi wisata berbasis bahari 2) Peningkatan fasilitas penunjang pariwisata yang aman dan berkualitas 3) Pelaksanaan kegiatan bertaraf nasional dan internasional dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen <p>b. Peningkatan infrastruktur konektivitas, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Replacement fasilitas Pelabuhan Sarmi di Kabupaten Sarmi 2) Pelaksanaan preservasi dan peningkatan jalan nasional di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen 3) Pembangunan infrastruktur konektivitas transportasi udara di Kabupaten Biak Numfor 4) Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penyelenggaraan layanan publik bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran, serta peningkatan tata kelola komunikasi publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, serta peningkatan literasi 	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
		digital	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Perhubungan
PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	PD 1: Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) serta peningkatan pelayanan telemedicine dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom b. Percepatan penurunan stunting dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori c. Pengendalian penyakit (TBC, malaria, HIV/AIDS, kusta, d. filariasis, dan frambusia) dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Jayapura, dan 	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
		Kabupaten Keerom	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		e. Penyiapan sarana, prasarana, dan penyediaan layanan pendidikan dengan pendekatan sekolah berpola asrama, serta pengembangan kurikulum kontekstual Papua	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		f. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dengan mengutamakan orang asli Papua, melalui:	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		1) Perluasan cakupan beasiswa untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidik disertai dengan penempatan wajib pascakelulusan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Olah Raga dan Pemuda
		2) Pemerataan dan redistribusi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Olah Raga dan Pemuda
		3) Penugasan khusus tenaga kesehatan pada fasyankes primer di Wilayah Papua	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		g. Kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		h. Pembangunan kualitas keluarga serta penurunan ketimpangan gender, khususnya di kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		i. Perluasan akses perguruan tinggi keagamaan melalui pengembangan Institut Agama Islam Negeri Papua	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		j. Percepatan pemenuhan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sebagai salah satu upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PD 2: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PD 2: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	<p>a. Percepatan pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Keerom</p> <p>b. Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Keerom</p> <p>c. Percepatan penyediaan akses rumah layak huni di Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Supiori</p> <p>d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan melalui percepatan pembangunan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional Jayapura dan Pusat Kegiatan</p>	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat
			Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat
			Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian dan perkebunan	Dinas Pertanian Dinas Perkebunan
			Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verteriner	Dinas Pertanian
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
		Strategis Nasional Biak serta 21 kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Papua	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
		e. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten Keerom dalam mendukung pemerataan ekonomi wilayah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	a. PD 4: Peningkatan Keamanan dan Ketertiban b. PD 5: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	a. Peningkatan tata kelola pemerintahan, melalui: 1) Peningkatan smart government 2) Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam manajemen data, keamanan informasi, dan pengelolaan aset daerah b. Optimalisasi pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja, serta sinergi perencanaan dan penganggaran dalam mendukung peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat c. Peningkatan peran distrik dan kampung dalam perluasan jangkauan pelayanan publik di bidang administrasi pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan terutama pada orang asli Papua, hingga ke tingkat kampung d. Percepatan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sekretariat Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
			Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
			Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Tata Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sekretariat Dprd
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	Sekretariat Dprd
			Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	Sekretariat Dprd
			Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

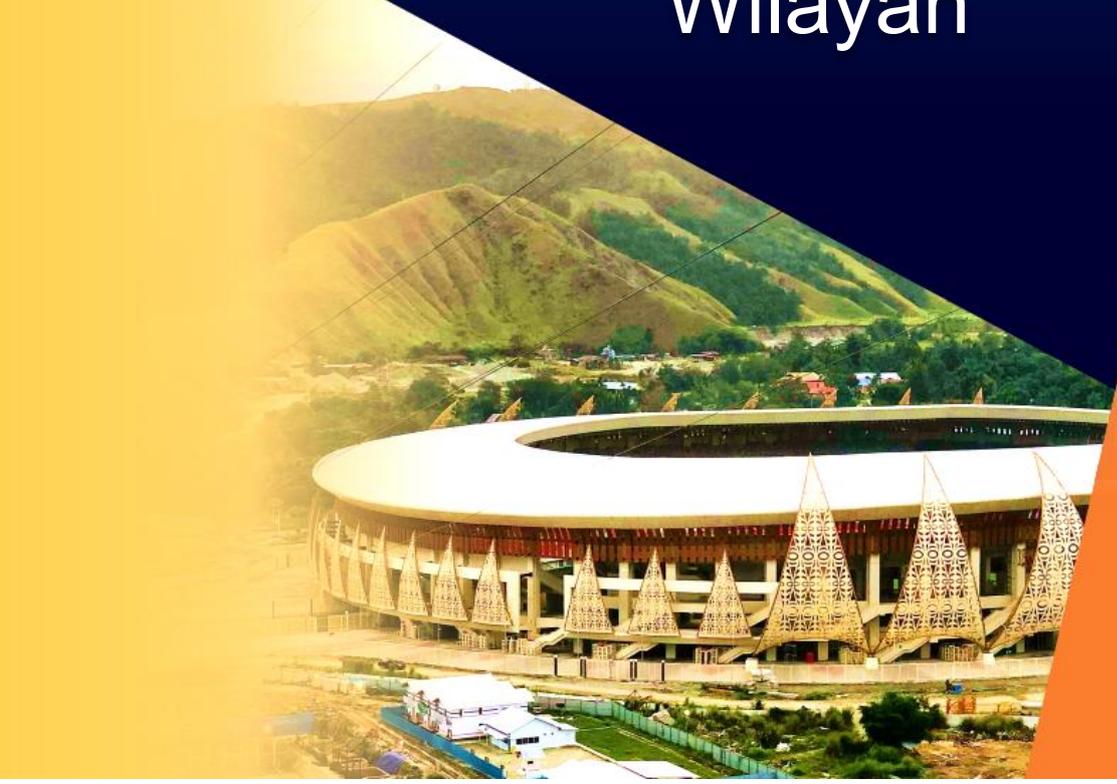
Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
			Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
			Program Pengelolaan Perbatasan	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
			Program Utama dan Penunjang Lembaga Majelis Rakyat Papua (Mrp) Provinsi Papua	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
PN 8: Memperkuat penyelarasan		a. Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengurangan risiko	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	a. PD 4: Peningkatan Keamanan dan Ketertiban b. PD 5: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kebencanaan melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana b. Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



BAB V

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah





BAB V

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Bab ini memuat arah kebijakan pembangunan wilayah yang perlu diperhatikan Kabupaten/kota dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan agar terjadi sinergitas dalam rangka mendukung capaian pembangunan Provinsi Papua.

5.1 Kerangka Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan wilayah pasca pemekaran wilayah melalui pembentukan DOB yang baru, arah kebijakan utama pengembangan wilayah Provinsi Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Untuk mewujudkan hal ini, maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat Asli Papua. Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Pengembangan wilayah Papua merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan Karakteristik Wilayah Adat Papua. Dengan memperhatikan Rencana Induk Pengembangan Provinsi Papua (RIPPP), maka sesuai arahan Pengembangan Wilayah di Provinsi Papua perlu dilakukan upaya Afirmasi untuk Wilayah Adat di Provinsi Papua.

Berdasarkan **Rencana Induk Pengembangan Provinsi Papua (RIPPP)**, arahan **Pengembangan Wilayah di Provinsi Papua** perlu dilakukan upaya **Afirmasi untuk Wilayah Adat di** Provinsi Papua melalui:

a. Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- (UMKM), Pembangunan Kampung, dan Pendampingan Masyarakat Adat;
- b. Penguatan dan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam kepemilikan dan pengelolaan Wilayah adat, meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat, melalui:
- 1) Pengalokasian Dana dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang secara khusus didedikasikan untuk pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat;
 - 2) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang khusus bertugas dan bertanggung jawab menyediakan perlindungan, pembelaan, dan pelayanan kepada masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP; dan
 - 3) Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/ OAP yang berfungsi mendidik dan melatih pemuda/masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP untuk pemetaan wilayah adat, pengorganisasian masyarakat, penguatan kelembagaan adat, pengembangan mata pencaharian, dan peningkatan ekonomi yang berbasis adat pada setiap wilayah adat.
- c. Peningkatan Keterlibatan Aktif masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP dalam pembangunan bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan;
- d. Penguatan komunikasi sosial antar masyarakat/ lembaga adat, maupun antara masyarakat /lembaga adat dengan pemangku kepentingan, serta mendorong kerja sama antar daerah;
- e. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam mendukung pelayanan publik bagi masyarakat;
- f. Peningkatan Kedewasaan Politik, Literasi Politik, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
- g. Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Kebijakan Khusus terhadap Masyarakat Adat/OAP yang tidak mempunyai identitas, melalui:
- 1) Pembangunan Pusat Data Etnografi Masyarakat Adat/OAP yang menyediakan data spasial dan numerik untuk pencatatan dan pengadministrasian keberadaan masyarakat adat/ OAP oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada setiap wilayah adat; dan
 - 2) Pembangunan Sistem Pendaftaran, Verifikasi, dan Pengadministrasian Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di tingkat Pemerintah Provinsi.
- h. Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai simpul utama ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, pusat industri dan jasa, serta simpul utama transportasi yang melayani skala nasional atau beberapa provinsi, serta sebagai pelabuhan hubungan internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan, melalui:
- 1) Pemantapan keterkaitan PKN dengan kota-kota utama di Wilayah Indonesia Bagian Timur, Bagian Barat, dan Negara Asia Pasifik melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi;
 - 2) Penyediaan prasarana perkotaan sesuai fungsi kota dengan pendekatan

- pembangunan prasarana kota terpadu;
 - 3) Peningkatan Peran Badan Usaha dalam Pembangunan Prasarana Perkotaan;
 - 4) Pengembangan Kegiatan Ekonomi (industri, jasa, perdagangan, perbankan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja;
 - 5) Pengembangan kerja sama pembangunan dengan kota-kota lain (Sister City); dan Peningkatan Kualitas SDM dan peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi utama PKN, terutama jasa, industri, dan perdagangan.
- i. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai simpul kedua ekspor impor yang mendukung PKN, pusat industri dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, melalui:
 - 1) Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam Provinsi;
 - 2) Penyediaan prasarana perkotaan sesuai fungsi kota dengan pendekatan pembangunan prasarana kota terpadu;
 - 3) Peningkatan Peran Badan Usaha dalam Pembangunan Prasarana Perkotaan;
 - 4) Pengembangan Kegiatan Ekonomi Kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja; dan
 - 5) Penataan Ruang Kota melalui Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Tata Ruang Kota.
- j. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat industri dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa distrik, melalui:
 - 1) Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam kabupaten;
 - 2) Penyediaan prasarana perkotaan yang melayani daerah sekitarnya;
 - 3) Peningkatan Peran Badan Usaha dalam Pembangunan Prasarana Perkotaan;
 - 4) Pengembangan Kegiatan Ekonomi Kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja; dan
 - 5) Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang kota.

Adapun penataan ruang wilayah Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan pengembangan wilayah berbasis agroindustri, perikanan dan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap melindungi hak kelola masyarakat adat, yang maju dan berdaya saing, serta berkelanjutan, sebagaimana yang secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042. Kebijakan penataan ruang Provinsi Papua terdiri atas:

- a. pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam menunjang agroindustri;
- b. pengembangan perikanan budidaya dan tangkap dengan tetap mengedepankan sumberdaya ikan lestari;
- c. pengembangan pariwisata unggulan berbasis wisata alam dan budaya yang terintegrasi dengan budaya setempat;
- d. peningkatan fungsi ruang yang mendukung kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan karakter dan hak kelola masyarakat hukum adat sekaligus mewujudkan provinsi berkelanjutan;

- e. pengembangan secara terintegrasi wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan karakter masyarakat adat dan kearifan lokal masing-masing wilayah sekaligus menciptakan peningkatan iklim investasi daerah;
- f. pengembangan struktur ruang secara berhierarki, dalam mendukung pengembangan pusat permukiman dan susunan pusat pertumbuhan di daratan dan lautan yang terintegrasi dengan prasarana wilayah sampai tingkat distrik;
- g. pemantapan ruang fungsi lindung dan budidaya dalam mendorong kelestarian lingkungan dan mendorong pengembangan wilayah dalam menciptakan daya saing daerah;
- h. pengembangan kawasan strategis dengan mengoptimalkan potensi ekonomi, mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara dengan penekanan pengamanan wilayah yang sangat luas sampai tingkat kampung dan wilayah perbatasan negara.

5.2 Arah Pengembangan Wilayah Papua Berbasis Wilayah Adat

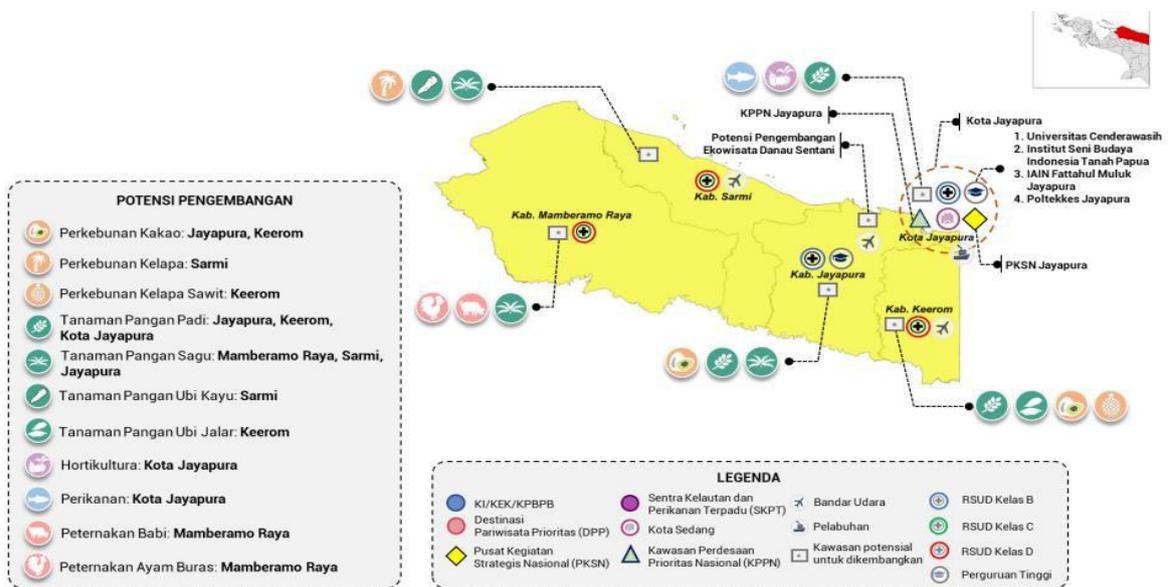
5.2.1 Wilayah Adat Tabi

Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Tabi yaitu: **“pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta Pengembangan Wilayah Adat Tabi sebagai sentra perkebunan, peternakan, tanaman pangan, hortikultura, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, pusat industri, perdagangan, jasa, serta perkotaan yang berkelanjutan”**. Arah Kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- b. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- c. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- d. Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
- e. Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- f. Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- g. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- h. Mengembangkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
- i. Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan:

- 1) Mengembangkan sentra perkebunan dan peternakan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi dan kemitraan usaha;
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi tanaman pangan, hortikultura, serta kelautan dan perikanan;
- 3) Mengembangkan pusat industri, perdagangan dan jasa untuk mendukung pasar komoditas unggulan strategis Papua;
- 4) Mengembangkan perkotaan yang berkelanjutan untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer dan sekunder serta pengembangan kawasan perbatasan negara;
- 5) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global serta
- 6) Mendorong pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara.

Gambar V.1 Arah Pengembangan Wilayah Adat Tabi



Sumber: PERPRES No. 24 Tahun 2023 tentang RIPP

5.2.2 Wilayah Adat Saireri

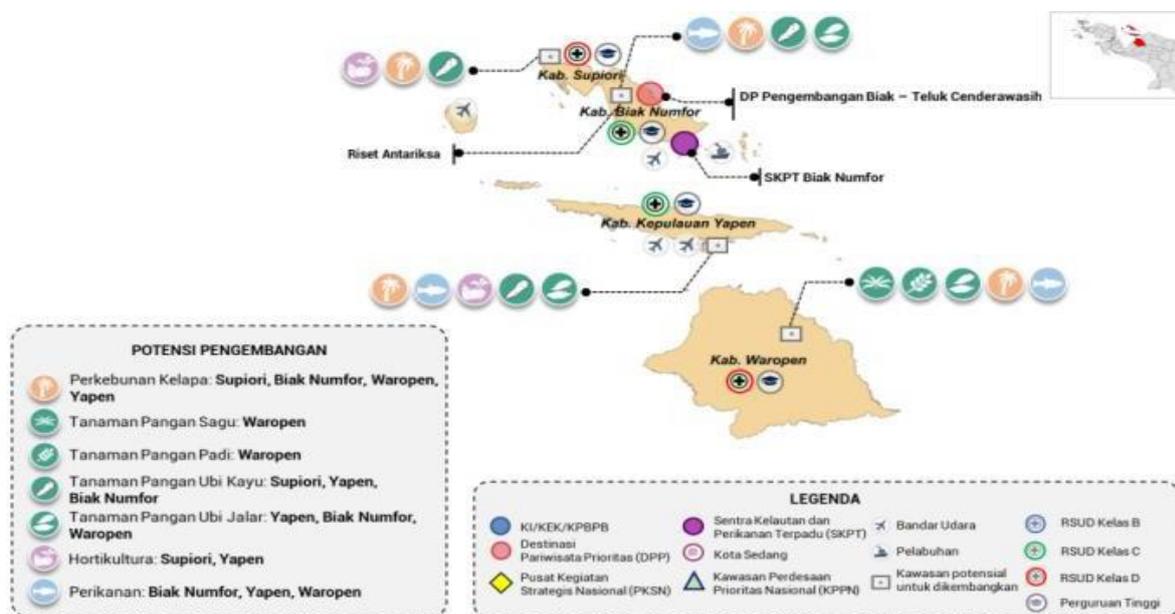
Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Saireri yaitu: **“Pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan Wilayah Adat Saireri sebagai sentra kelautan dan perikanan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, serta riset antariksa”**.

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- b. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- c. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);

- d. Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
- e. Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- f. Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- g. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- h. Mengembangkan pusat riset antariksa;
- i. Mengelola dan melindungi potensi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil berkelanjutan berbasis kearifan lokal;
- j. Mengembangkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - 1) Mengembangkan sentra kelautan dan perikanan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - 2) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura; serta
 - 3) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global.

Gambar V.2 Arah Pengembangan Wilayah Saireri



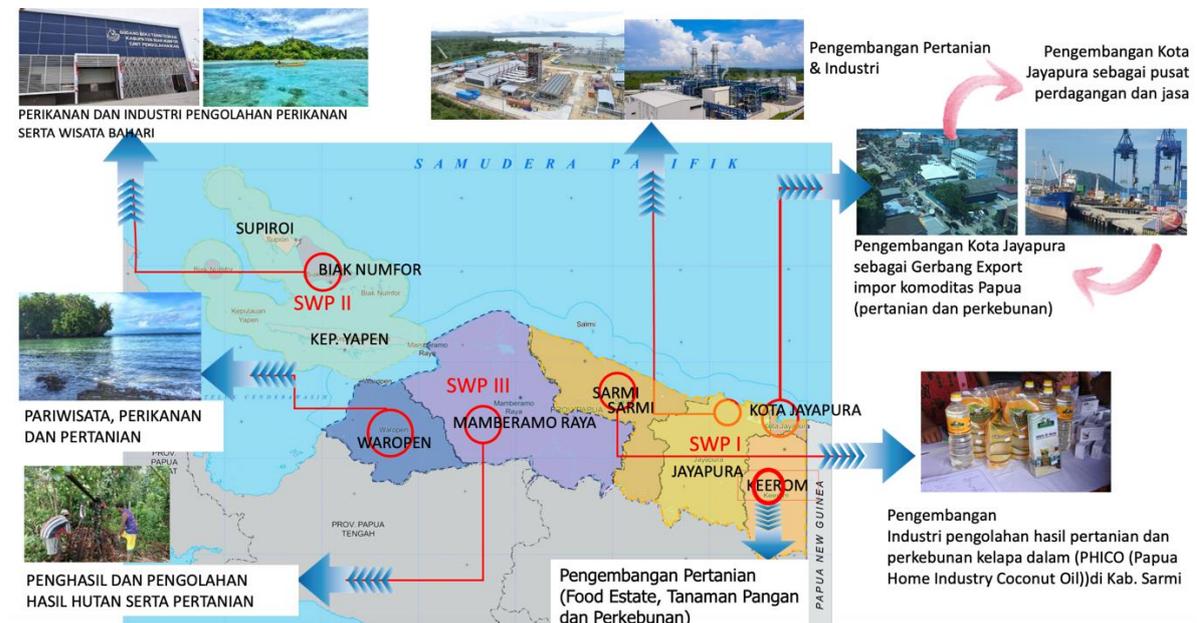
Sumber: PERPRES No. 24 Tahun 2023 tentang RIPP

5.3 Pengembangan Wilayah Berdasarkan Arahan RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Skenario pengembangan wilayah Provinsi Papua, dibagi dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan, yang meliputi:

- a. **Wilayah pengembangan I**, meliputi wilayah Jayapura dan sekitarnya dengan fokus pengembangan, yaitu (1) Kabupaten Keerom dengan pertanian (food estate, tanaman pangan dan perkebunan) dan pertambangan; (2) Kabupaten Sarmi dengan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan kelapa dalam (PICHCO/ *Papua Home industri Coconut Oil*); (3) Kabupaten Jayapura dengan pertanian dan industri; serta (4) Kota Jayapura sebagai pusat perdagangan, jasa dan pariwisata;
- b. **Wilayah pengembangan II**, yaitu: (1) Kabupaten Biak Numfor sebagai pusat perikanan, industri pengolahan perikanan dan wisata bahari; serta (2) Kabupaten Supiori dengan pengembangan perikanan dan pariwisata; dan
- c. **Wilayah pengembangan III**, yaitu: (1) Kabupaten Mamberamo Raya dengan pengolahan hasil hutan, pertanian dan Pariwisata; serta (2) Kabupaten Waropen meliputi pariwisata, perikanan dan pertanian serta potensi pertambangan.

Gambar V.3 Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Papua



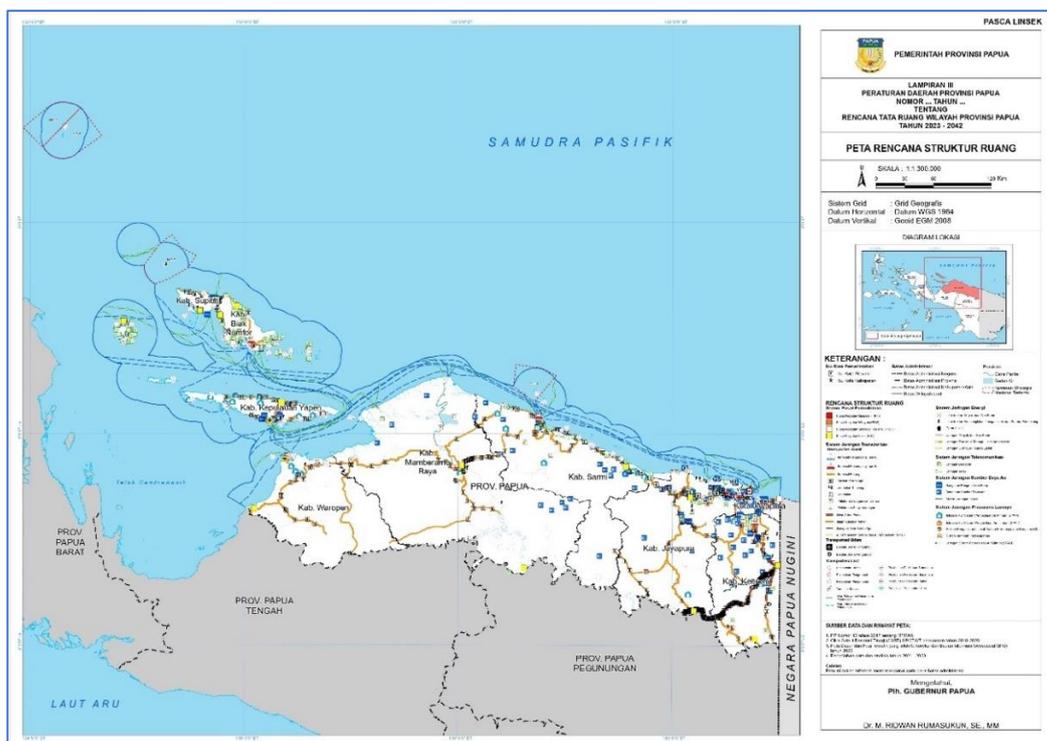
Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

Pemanfaatan ruang Provinsi Papua berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang, dengan memperhatikan hak ulayat dan karakteristik masyarakat adat (lihat Gambar V.4 dan Gambar V.5). Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Papua dilaksanakan melalui penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya. Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta maupun kerja sama pendanaan. Adapun kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pusat-pusat kegiatan yang ada di Provinsi Papua terdiri atas (PKN), (PKW), (PKSN) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), sebagaimana yang ditampilkan dalam PKN di Provinsi Papua meliputi Kota Jayapura dan Sebagian Kabupaten Jayapura. PKW di Provinsi Papua meliputi Biak di Kabupaten Biak Numfor, Sarmi di Kabupaten Sarmi, dan Arso di Kabupaten Keerom. PKSN di Provinsi Papua meliputi Jayapura di Kota Jayapura dan Biak di Kabupaten Biak Numfor. Adapun PKL di Provinsi Papua meliputi Perkotaan Genyem dan Airu (Kabupaten Jayapura); Perkotaan Warsa, Swandiwe dan Yenburwo (Kabupaten Biak Numfor); Perkotaan Waris dan Towe (Kabupaten Keerom); Perkotaan Bonggo (Kabupaten Sarmi); Perkotaan Serui dan Saubeba (Kepulauan Yapen); Perkotaan Botawa dan Wapoga (Kabupaten Waropen); Perkotaan Awaki dan Sorendiwari (Kabupaten Supiori); serta Perkotaan Kasonaweja dan Dabra (Mamberamo Raya).

Gambar V.4 **Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Papua Tahun 2023-2042**

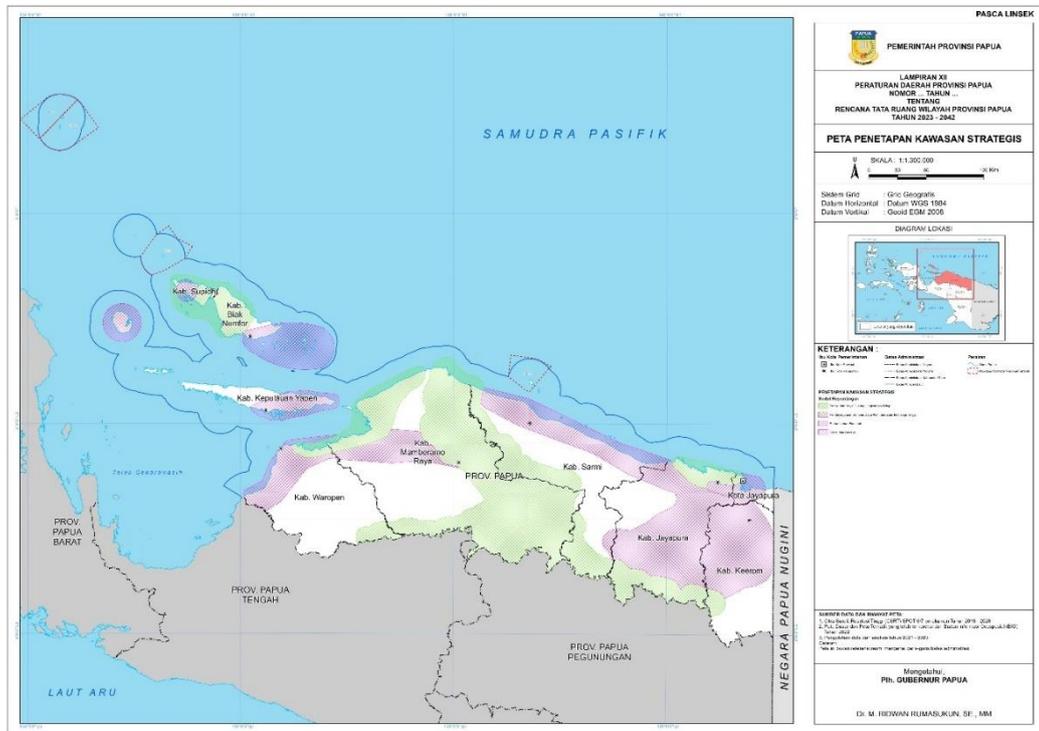


Sumber: RTRW Provinsi Papua 2023-2042

Untuk mendukung fungsi dari pusat kegiatan wilayah tersebut, terdapat indikasi program utama pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana yang ditampilkan dalam Lampiran XV Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042. Indikasi program utama terdiri atas program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Adapun sumber pendanaan indikasi program utama berasal dari APBN, APBD, swasta, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Gambar V.5 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Papua Tahun 2023-2042



Sumber: RTRW Provinsi Papua 2023-2042

Provinsi Papua memiliki beragam kawasan potensial yang dapat dikembangkan dalam mendukung pembangunan, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, potensi sektoral serta potensi alam yang sangat kaya. Pembangunan Provinsi Papua harus memanfaatkan berbagai sumber daya potensial yang tersedia, serta menekankan pada sektor-sektor unggulan di Provinsi Papua. Berdasarkan karakteristik wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua 2023-2042, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan (kawasan budidaya). Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Provinsi Papua yang dapat dikembangkan terdiri atas 10 kawasan, yaitu: (1) kawasan hutan produksi; (2) kawasan perkebunan rakyat; (3) kawasan pertanian; (4) kawasan perikanan; (5) kawasan pertimbangan dan energi; (6) Kawasan peruntukkan industri; (7) kawasan pariwisata; (8) kawasan permukiman; (9) Kawasan transportasi; serta (10) kawasan pertahanan dan keamanan.

Tabel V.1 Pengembangan Sistem Pusat Permukiman dan Kawasan Strategis di Provinsi Papua

SWP	KABUPATEN/ KOTA	SISTEM PUSAT PERMUKIMAN				KAWASAN STRATEGIS					POTENSI	
		PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	PKSN (Pusat Kawasan Strategis Nasional)	PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	KSN (Kawasan Strategis Nasional)	KSNT (Kawasan Strategis Nasional Tertentu)	KSP (Kawasan Strategis Provinsi)				
		Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/kota	Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong Pengembangan kawasan perbatasan negara	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa distrik			Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup		
SWP 1	1	Kota Jayapura	✓		✓				Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura-Sarmi	Kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura	Kawasan Cagar Alam Cycloops	a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) b. Perkebunan c. Peternakan d. Perikanan e. Pariwisata f. Jasa
	2	Jayapura	✓			<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Genyem, Perkotaan Airu 			Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura-Sarmi	Kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja Kawasan Cagar Alam Cycloops 	a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) b. Perkebunan (kelapa sawit, kakao, sagu) c. Peternakan d. Perikanan e. Pariwisata (Kerajinan kapak batu Ormu Wari, Danau Sentani, dsb) f. Pertambangan g. Industri h. Kehutanan
	3	Keerom		✓		<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Waris, 			Kawasan Pertanian dan		Kawasan Suaka Margasatwa	a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)

SWP	KABUPATEN/ KOTA	SISTEM PUSAT PERMUKIMAN				KAWASAN STRATEGIS					POTENSI
		PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	PKSN (Pusat Kawasan Strategis Nasional)	PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	KSN (Kawasan Strategis Nasional)	KSNT (Kawasan Strategis Nasional Tertentu)	KSP (Kawasan Strategis Provinsi)			
		Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/kota	Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong Pengembangan kawasan perbatasan negara	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa distrik			Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	
					<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Towe 			Industri Jayapura-Sarmi		Mamberamo Foja	<ul style="list-style-type: none"> b. Perkebunan (kelapa sawit, jaguung, kakao) c. Pariwisata (Telaga Cinta Yowong) d. Pertambangan e. Peternakan
	4 Sarmi		✓		<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Bonggo 		KSNT Pulau Liki	Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura-Sarmi		Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) b. Perkebunan (kelapa sawit, kelapa dalam, kakao) c. Pertambangan (nikel) d. Perikanan e. Kehutanan f. Pariwisata
SWP II	5 Biak Numfor		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Warsa, Perkotaan Swandiwe, Perkotaan Yenburwo 	KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi		Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Numfor	Kawasan Goa Jepang Biak	Kawasan Rawan Bencana Biak-Supiori	<ul style="list-style-type: none"> a. Perikanan b. Pariwisata c. Pertanian d. Pertambangan e. Peternakan
	6 Supiori				<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Awaki, 		KSNT Pulau Faniido, Pulau		Kawasan Maudori Supiori	Kawasan Rawan Bencana Biak-Supiori	<ul style="list-style-type: none"> a. Pariwisata b. Perikanan

SWP	KABUPATEN/ KOTA	SISTEM PUSAT PERMUKIMAN				KAWASAN STRATEGIS					POTENSI
		PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	PKSN (Pusat Kawasan Strategis Nasional)	PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	KSN (Kawasan Strategis Nasional)	KSNT (Kawasan Strategis Nasional Tertentu)	KSP (Kawasan Strategis Provinsi)			
		Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/kota	Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong Pengembangan kawasan perbatasan negara	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa distrik			Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	
					<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Sorendiweri 		Bras, Pulau Befondi				
	7 Kepulauan Yapen				<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Serui, Perkotaan Saubeba 			Kawasan perikanan dan pariwisata Kep. Yapen		Kawasan Mangrove Waropen - Mamberamo Raya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pariwisata (Kampung wisata Alam) b. Perikanan (ikan dan rumput laut) c. Perkebunan (sagu, kakao) d. Kehutanan e. Pertanian f. Peternakan
SWP III	8 Mamberamo Raya				<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Kasonaweja, Perkotaan Dabra 			Kawasan pertanian Mamberamo Raya-Waropen		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja Kawasan Mangrove Waropen - Mamberamo Raya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) b. Perkebunan rakyat c. Pertambangan (batu bara) d. Perikanan e. Pariwisata (pariwisata alam) f. Kehutanan
	9 Waropen				<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan Botawa, Perkotaan Wapoga 			Kawasan pertanian Mamberamo Raya-Waropen		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pariwisata (Wisata Rohani Pulau Nau, Pantai Mangrove) b. Perikanan (ikan, udang, kepiting)

SWP	KABUPATEN/ KOTA	SISTEM PUSAT PERMUKIMAN				KAWASAN STRATEGIS					POTENSI
		PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	PKSN (Pusat Kawasan Strategis Nasional)	PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	KSN (Kawasan Strategis Nasional)	KSNT (Kawasan Strategis Nasional Tertentu)	KSP (Kawasan Strategis Provinsi)			
		Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/kota	Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong Pengembangan kawasan perbatasan negara	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa distrik			Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	
									<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Mangrove Waropen - Mamberamo Raya 	<ul style="list-style-type: none"> c. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) d. Perkebunan (sagu) e. Kehutanan f. Pertambangan 	

Sumber: RTRW Provinsi Papua 2023-2042

Selain berdasarkan pemetaan kawasan budidaya, potensi pengembangan wilayah Provinsi Papua juga diimplementasikan berdasarkan penetapan kawasan strategis yang meliputi kawasan strategis nasional (KSN); kawasan strategis nasional tertentu (KSNT); dan kawasan strategis provinsi (KSP). KSN di Provinsi Papua meliputi: (1) kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Biak; serta (2) kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa Kawasan Perbatasan Negara. KSNT di Provinsi Papua meliputi: (1) Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Befondi di Kabupaten Supiori, serta (2) Pulau Liki di Kabupaten Sarmi. Adapun KSP di Provinsi Papua meliputi:

a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang terdiri atas:

- 1) Kawasan Pertanian Mamberamo Raya - Waropen di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan pengolahan hasil pertanian menunjang ekspor.
- 2) Kawasan Perikanan dan Pariwisata Kepulauan Yapen dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk membentuk pusat pengolahan perikanan berorientasi ekspor dan pusat pelayanan pariwisata bahari.
- 3) Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Numfor di Kabupaten Biak Numfor dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk membentuk pusat pengolahan perikanan berorientasi ekspor dan pusat pelayanan pariwisata bahari.
- 4) Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura – Sarmi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk membentuk penyediaan lahan pertanian tanaman pangan dalam menunjang ketahanan pangan dan industri pengolah hasil tanaman pangan sebagai satu kesatuan kegiatan secara terpadu.

b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, yang terdiri atas:

- 1) Kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura di Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, yang bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Danau Sentani sebagai pusat wisata budaya masyarakat Pesisir Pulau Papua.
- 2) kawasan Goa Jepang Biak di Kabupaten Biak Numfor dan Wilayah Laut, yang bertujuan sebagai pusat festival budaya.
- 3) kawasan Maudori Supiori di Kabupaten Supiori dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Maudori sebagai kawasan pelestarian budaya yang berbasis religi.

c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yang terdiri atas:

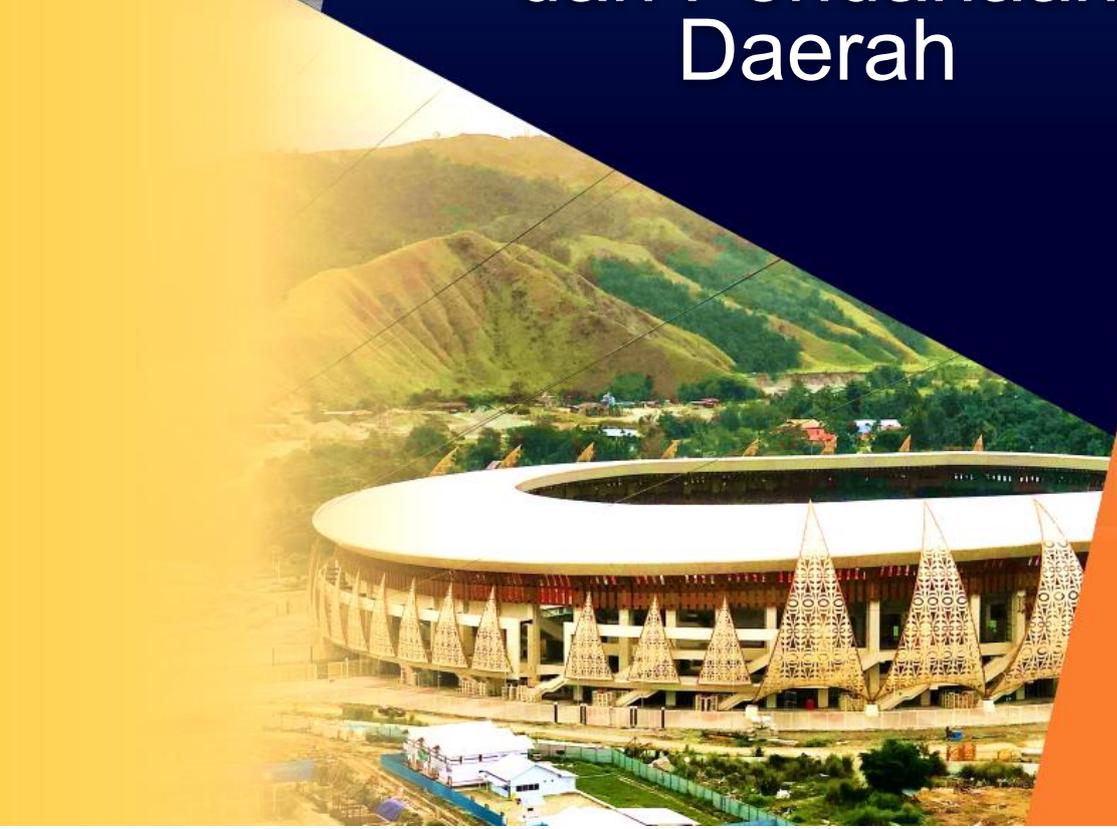
- 1) Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Mamberamo-Foja sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.

- 2) Kawasan Rawan Bencana Biak – Supiori di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Biak-Supiori sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.
- 3) kawasan Cagar Alam Cycloops dan sekitarnya di Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan darat dan laut Cycloops sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.
- 4) Kawasan Mangrove Waropen – Mamberamo Raya di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah pesisir sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati laut.



BAB VI

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah





BAB VI

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD 2025, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Papua Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026 yang menekankan keberlanjutan dari program-program yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 dan terikat dengan sasaran kinerja tertentu yang selanjutnya akan dicapai selanjutnya, oleh sebab itu perlu menjaga momentum keberlanjutan serta kerangka pikir anggaran yang berbasis pada paradigma money follow program atau pendanaan yang ada memang akan dialokasikan pada program-program prioritas yang akan memberikan kinerja pada daerah. Adapun penentuan program prioritas disusun berdasarkan: (1). Merupakan program prioritas pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026 (2). Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 serta indikatornya. (3). Merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan akhir RKPD Tahun 2025, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra- Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Papua tahun 2025 dengan mengasumsikan adanya anggaran berimbang yaitu jumlah Pendapatan daerah tahun 2025 sama dengan jumlah belanja tahun 2025 yang diproyeksikan mencapai sebesar 2,30 triliun rupiah. Selanjutnya pos pos pembiayaan masih dikosongkan menunggu adanya laporan yang resmi tentang jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023 pasca hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kerangka pendanaan dari pagu indikatif belanja Daerah disajikan dalam tabel VI.1 Kerangka Pendanaan dan pagu indikatif Provinsi Papua Tahun 2025

Tabel VI.1 Proyeksi APBD Provinsi Papua Tahun 2025

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2025 (Rp.)
4	PENDAPATAN	1,971,550,293,966.00
4.1	PENDAPATANASLI DAERAH	457,188,178,254.00
4.1.01	Pajak Daerah	265,242,440,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	121,477,186,000.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55,664,802,254.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14,803,750,000.00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1,513,312,115,712.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,370,005,002,000.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	822,894,029,000.00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	44,847,198,000.00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	778,046,831,000.00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0.00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0.00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	547,110,973,000.00
4.2.02.02.01	Dana Otonomi Khusus	547,110,973,000.00
4.2.02.02.01	Dana Insentif Daerah	0.00
4.2.02.02.02	Dana Tambahan Infrastruktur	0.00
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	143,307,113,712.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	143,307,113,712.00
4.3	LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,050,000,000.00
4.3.1	Pendapatan Hibah	1,050,000,000.00
1.3.2	Pendapatan lainnya	0.00
5	BELANJA	2,303,892,976,569.00
5.1	BELANJA OPERASI	1,609,498,721,569.00
5.1.01	Belanja Pegawai	962,503,240,900.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	636,995,480,669.00
	Subsidi	0.00
5.1.03	Belanja Hibah	10,000,000,000.00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	0.00
5.2	BELANJA MODAL	547,110,973,000.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9,000,000,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	138,283,282,000.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	138,283,282,000.00
	Surplus/Defisit	0.00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	0.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00

Tabel VI.2 Kerangka Pendanaan APBD Provinsi Papua Tahun 2025

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2025 (Rp.)
4	PENDAPATAN	1,971,550,293,966.00
4.1	PENDAPATANASLI DAERAH	457,188,178,254.00
4.1.01	Pajak Daerah	265,242,440,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	121,477,186,000.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55,664,802,254.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14,803,750,000.00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1,513,312,115,712.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,370,005,002,000.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	822,894,029,000.00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	44,847,198,000.00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	778,046,831,000.00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0.00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0.00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	547,110,973,000.00
4.2.02.02.01	Dana Otonomi Khusus	547,110,973,000.00
4.2.02.02.01	Dana Insentif Daerah	0.00
4.2.02.02.02	Dana Tambahan Infrastruktur	0.00
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	143,307,113,712.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	143,307,113,712.00
4.3	LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,050,000,000.00
4.3.1	Pendapatan Hibah	1,050,000,000.00
1.3.2	Pendapatan lainnya	0.00

6.1 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2025

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2025 untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026. Program dan Kegiatan Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2025 yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Tabel VI.3.

Tabel VI.3 Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PD 4: Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.045.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD 2: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.200.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.700.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.614.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	300.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
		Program Penempatan Tenaga Kerja	953.500.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	3.430.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
		Program Pengembangan Umkm	1.500.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.450.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.612.994.806	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan		

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Penyuluhan Pertanian	4.750.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.000.200.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	500.500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.376.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.150.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.815.460.095	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	800.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Hutan	2.986.769.577	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	a. PD 2: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	b. PD 3: Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Permukiman	118.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Penataan Bangunan Gedung	20.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Jalan	331.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	17.400.000.000	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	17.300.000.000	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	800.000.000	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	50.500.000.000	Dinas Perhubungan
PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	PD 1: Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Program Pengelolaan Pendidikan	98.811.418.192	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	700.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	125.845.777.200	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.300.000.000	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.700.000.000	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.200.000.000	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	66.027.820.717	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	39.750.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9.450.501.995	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.581.685.644	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.000.000.000	Dinas Olah Raga dan Pemuda
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	5.300.000.000	Dinas Olah Raga dan Pemuda
		Program Pengembangan Kebudayaan	1.700.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.050.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pembinaan Sejarah	729.484.530	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.323.771.040	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Permuseuman	3.941.455.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PD 2: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1.600.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.300.800.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	350.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PD 2: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	460.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat
		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua	301.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat
		Program Rehabilitasi Sosial	950.000.000	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	270.000.000	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	<ul style="list-style-type: none"> · PD 4: Peningkatan Keamanan dan Ketertiban · PD 5: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	132.008.727.350	Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	27.970.689.540	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	20.000.000.000	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.100.000.000	Biro Tata Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000.000	Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	124.392.510.114	Sekretariat Dprd
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	98.687.907.000	Sekretariat Dprd
		Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	26.961.410.000	Sekretariat Dprd
		Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	12.489.443.515	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	13.199.999.055	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.500.000.000	Penelitian dan Pengembangan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	165.726.500.973	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.045.400.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.925.105.480	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	2.125.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
Pendidikan dan Pelatihan	11.767.242.242	Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur		

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.400.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Program Pengelolaan Perbatasan	2.050.000.000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	16.580.540.000	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	7.607.309.000	Inspektorat
		Program Utama dan Penunjang Lembaga Majelis Rakyat Papua (Mrp) Provinsi Papua	9.806.137.542	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.550.000.000	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	a. PD 4: Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.045.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	955.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	b. PD 5: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Program Penanggulangan Bencana	2.000.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaannya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2025 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail Lampiran 1 dokumen RKPD ini.

Secara ringkas program kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan bidang urusan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 sebanyak 236 program, 612 Kegiatan dan 1775 Sub kegiatan, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel VI.4 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Menurut Urusan Provinsi Papua Tahun 2025

KODE	BIDANG URUSAN	JUMLAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1.01	Pendidikan	4	14	63
1.02	Kesehatan	16	52	133
1.03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6	10	57
1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	2	4
1.05	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5	23	100
1.06	Sosial	7	19	91
B	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
2.07	Tenaga Kerja	7	20	32
2.08	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5	15	31
2.09	Pangan	4	6	12
2.11	Lingkungan Hidup	10	12	25
2.12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4	10	33
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5	15	55
2.14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	5	7
2.15	Perhubungan	4	13	27
2.16	Komunikasi Dan Informatika	3	7	11
2.17	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	9	9	11
2.18	Penanaman Modal	6	7	10
2.19	Kepemudaan Dan Olahraga	4	15	47
2.21	Persandian	1	1	1
2.22	Kebudayaan	6	14	28
2.23	Perpustakaan	2	6	17
2.24	Kearsipan	3	12	35
C	URUSAN PILIHAN			
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	6	20	46
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	5	10	10
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	13	34	61
3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	43	85	118
3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	3	11	18
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	7	14	23
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	10	27
D	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	Perencanaan	3	14	80
5.02	Keuangan	4	16	107
5.03	Kepegawaian	3	13	59
5.04	Pendidikan Dan Pelatihan	2	9	21

KODE	BIDANG URUSAN	JUMLAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
5.05	Penelitian Dan Pengembangan	1	4	12
5.07	Pengelolaan Penghubung	2	9	42
5.06	Pengelolaan Perbatasan	2	9	31
E	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	Inspektorat Daerah	3	9	26
F	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	Sekretariat Daerah	9	28	163
4.02	Sekretariat DPRD	3	17	55
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	11	26
H	UNSUR KEKHUSUSAN			
9.02	Kekhususan Papua	1	2	20
	Jumlah Program	236	612	1775



BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah





BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2025.

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menjadi target capaian dalam sebuah periode pembangunan. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu target capaian dari pada program dan kegiatan prioritas yang mengacu pada sasaran pembangunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan yang mengacu kepada RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026. Berikut masing-masing indikator kinerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua, dapat dikemukakan pada Tabel VII.1 dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 pada Tabel VII.2, sebagai berikut :

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2025

No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.21	8.42	8.63	8.84	8.84
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.0	13.23	14.48	15.69	15.69
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	80.0	80.8	81.6	82.4	
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69.6	70.4	71.2	72	72
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	100	15	30	50	50
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	75.0	76.2	77.4	78.6	
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	Jumlah Kab/Kota	7.0	7	7	6	6
		5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp. Ribu per kapita	7600.0	7610	7620	7630	7630
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77.7	78.68	79.68	80.68	80.68
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak- Hak Politik dan Lembaga Demokras	7.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	95.0	95	95 96	96	96
		7.2	Nilai skor aspek hak- hak politik	Skor	50.0	50	50	51	51
		7.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	60.0				
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	8.1	Tingkat capaian realisasi program program Otsus yang direncanakan	Persen	100	100	100	100	100

No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.1	Capaian Nilai SAKIP	predikat	BB	BB	BB	BB	
		9.2	Capaian implementasi e-government	persen	95	95	95	95	Regulasi yang berubah
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	persen	100	95	95	95	Regulasi yang berubah
		10.2	Tingkat konsistensi KUAPPS terhadap RKPD	persen		95	95	95	Regulasi yang berubah
		10.3	Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RAP	persen		95	95	95	Regulasi yang berubah
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	11.1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Daerah Provinsi Papua						
		11.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	persen	13.30	14.27	15.24	16.21	16.21
	11.3	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	persen	66.00	66.1	66.2	66.3	66.3	
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	12.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	persen	5.0	5.5	6.0	6.5	6.5
		12.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	persen	5.0	6.0	7.0	8.0	8.0
		12.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	5.0	6.0	7.0	8.0	8.0
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksimitigasi perubahan iklim	13.1	Indeks Kualitas Udara	indeks	95.0	95	95	95	95
		13.2	Indeks Kualitas Air	indeks	80.0	80	80	80	80
		13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	85.0	85	85	85	85

No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
		13.4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupee	63160.5				
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	14.1	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	persen	12.00	12.1	12.2	12.3	12.3
		14.2	Kontribusi (STC) SIL Teluk Cenderawasi terhadap pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindakop, UMKM)	STC per tahun	20	40	20	20	20
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	15.1	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	98.34	91.62	91.7	91.78	91.78
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	16.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	64.93				
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	17.1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	55.00	60.00	65.00	70.00	70
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	18.1	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	persen	50.00	50	50	50	50
19	Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	19.1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen	80.00	81	82	83	83
20	Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	20.1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	40.00	41	42	43	43

No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	21.1	Indeks Kampung Membangun	indeks	52.00	52	52.5	52.5	52.5
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	73.00	73.5	74	74.5	74.5
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	23.1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	12.00	12.05	12.1	12.15	12.15
		23.2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	68.00	68.8	69.6	70.4	70.4
		23.3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	14.00	14.1	14.2	14.2	14.2
24	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	24.1	Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per tahun	50	60	70	80	80
		24.2	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	50	60	70	80	80
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	tinggi	sedang	rendah	rendah	rendah
26	Meningkatnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak	26.1	Indeks Pembangunan Gender	indeks	80.00	80.1	80.2	80.3	80.3
		26.2	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	65.00	65.1	65.2	65.3	65.3

Indikator Kinerja Daerah menjelaskan pencapaian masing-masing urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Provinsi Papua, dengan mempertimbangkan aspek kekhususan Provinsi Papua.

Tabel VII.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. Juta	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
1.2	Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	Persen	85.00	86.87	88.74	90.61	90.61
1.3	Capaian Implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	Persen	95	95	97	100	100
1.5	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPD yang mencapai target	Persen	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
1.6	Rasio belanja langsung dalam komposisi APBD	Persen	50.00	85.00	90.00	95.00	95.00
1.7	Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persen	70.00	52.82	56.64	58.48	58.48
1.8	Ketepatan waktu Penetapan APBD	Kategori	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
1.9	Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus	Jumlah Kab/Kota	7	8	9	9	9	
1.10	Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks	6.20	6.44	6.68	6.92	6.92	
1.11	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp. Ribu per kapita	1400	14.00	15.00	15.00	15.00	
1.12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks	B	B	B	A	A	
1.13	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	B	B	B	A	A	
1.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	A	A	A	A	A	
1.15	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang per hari	300	350	400	450	450	
1.16	Rata-rata Nilai Skor Peduli HAM	Nilai Indeks	75	75	80	80	80	
1.17	Tingkat Kerentanan Sosial	Kategori	Rendah					
Kesejahteraan Sosial								
1.	Pendidikan							
1.1	Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	Persen	60.00	63.15	66.15	69.03	69.03	Urusan Pelayanan Dasar Pendidikan Wajib
1.2	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	100	100	100	100	100	
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	85.00	85.77	86.54	87.31	87.31	
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat	persen	60.00	63.87	67.74	71.61		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
2.	Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 klh	4.00	4.00	4.00	3.00	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
2.2	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	persen	5.50	5.20	4.90	4.60	
3.	Pangan						
3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks	51.00	53.72	56.44	59.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
3.2	Persentase kenaikan cadangan pangan	persen	30.00	35.30	40.25	45.00	
3.3	Persentase penduduk tahan pangan	persen	60.00	60.40	60.75	60.90	
4.	Ketenagakerjaan						
4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2.00	2.40	2.70	4.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	80.00	80.30	80.75	80.99	
5.	Pemberdayaan						
5.1	Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang	persen	25.00	26.00	27.00	28.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan
5.2	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	60.00	60.30	60.60	60.90	
5.3	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.47	0.45	0.442	0.434	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
							Perlindungan Anak
6.	Seni Budaya dan Olahraga						
6.1	Persentase potensi budaya lokal yang dilestarikan	persen	60.00	60.00	60.00	60.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga
6.2	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	2	1	1	1	
6.3	Cakupan kurikulum muatan lokal	persen	5	5	5	5	
6.4	Indeks Pembangunan Olahraga	Tingkatan Status	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Kemampuan Ekonomi Daerah							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	NTP perikanan tangkap	Skor	105.00	105.00	105.00	105.00	
1.2	NTP perikanan budidaya	Skor	100.00	100.00	100.00	100.00	
1.3	Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapita/ bulan	2.46	2.47	2.47	2.47	
1.4	Pendapatan Per Kapita Petani	Rp juta per kapita	13.12	13.13	13.14	13.15	
1.5	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90.00	90.05	90.1	90.15	
1.6	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	65	66	67	68	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
1.7	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	3.50	3.51	3.52	3.53	
1.8	Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	persen	3.00	3.1	3.2	3.3	
1.9	Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	Jumlah	4	4	5	5	
1.10	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	60.00	61	61	61	
1.11	Jumlah UMKM yang berkembang	Jumlah	4000	4010	4020	4030	
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1.	Perhubungan						
1.1	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan	persen	93.10	93.2	93.3	93.4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
2.	Listrik Dan Air Bersih						
2.1	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	unit	45.00	45	45	46	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya
2.2	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	40.00	40.1	40.2	40.3	Mineral, dan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2.3	Backlog perumahan layak huni dan sehat	ribu juta	100.00	99	98	97	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
3.	Lingkungan Hidup						
3.1	Laju Deforestasi	ribu hektar	25.00	24	23	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
3.2	Tingkat Emisi Karbon	Ton CO2	0.282				Dasar Lingkungan Hidup, dan Urusan Pilihan Kehutanan
3.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai indeks	85.03	85.04	85.05	85.06	
3.4	Persentase penerapan <i>green economy</i>	persen	70.00	70.5	71	71.5	
3.5	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/ Rp	63160.49				
3.6	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen	80.00	80	80	81	
3.7	Persentase pengendalian daya rusak air	persen	60.00	61	62	63	
4.	Informasi dan Komunikasi						
4.1	Kepuasan Pelayanan Informasi & Komunikasi	Kategori	B	B	B	B	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
4.2	Cakupan layanan telekomunikasi	persen	60	61	62	63	
4.3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen	10	11	12	13	
5.	Iklim Berinvestasi						
5.1	Angka Kriminalitas	per 100.000 penduduk	147	145	143	141	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Wajib
5.2	Indeks Demokrasi	Nilai Indeks	63.08	63.09	63.1	63.11	
5.3	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM)	Jumlah	3	4	5	6	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
5.4	Lama hari pengurusan ijin investasi	hari	20	20	20	15	Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal, Urusan Pilihan Perdagangan	
5.5	ICOR	nilai	3.21	3.22	3.23	3.24		
5.6	Indeks Kemahalan Konstruksi	persen	200.00	198	196	194		
1.	Layanan Urusan Wajib Dasar							
1.1.	Pendidikan						Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	
1.1.1	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	0.25	0.21	0.17	0.13		0.13
1.1.2	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/ sederajat	persen	1.00	0.97	0.94	0.91		0.91
1.1.3	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	persen	30.00	32.41	34.82	35.23		35.23
1.1.4	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik	persen	30.00	32.43	34.86	35.29		35.29
1.1.5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	murid per guru	25.00	26.4	26.28	26.42		26.42
1.1.6	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	murid per guru	25.00	26.61	27.22	27.88		27.88
1.1.7	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	murid per sekolah	200.00	204.3	208.8	213.6		213.6

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.1.8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama	murid per sekolah	200.00	203.3	206.6	209.9	209.9	
1.1.9	Persentase siswa kelas 1, 2 dan 3 yang naik kelas	persen	100.00	100	100	100	100	
1.1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat (SPM Provinsi)	persen	100.00	100	100	100	100	
1.1.11	Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	persen	0.50	0.40	0.30	0.20	0.20	
1.1.12	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/ MA dengan kondisi bangunan baik	persen	39.99	40.00	40.90	41.80	41.80	
1.1.13	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/ kejuruan	murid per guru	25.00	25.90	26.80	27.70	27.70	
1.1.14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per sekolah	200.00	199.10	198.20	189.20	189.20	
1.1.15	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	persen	80.00	80.00	80.50	95.50	95.50	
1.1.16	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	persen	95.00	95.11	96.32	97.18	97.18	
1.1.17	Jumlah PKBM aktif	unit	448	465				
1.1.18	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	75.00	75.50	76.00	76.50	76.50	
1.1.19	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	persen	80.00	80.15	81.05	81.35	81.35	
1.1.20	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	persen	85.00	85.00	85.13	86.32	86.32	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
1.1.21	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	83.00	84.13	85.32	87.00	87.00
1.1.22	Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik	persen	84.00	85.45	86.25	90.00	90.00
1.1.23	Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik	persen	70.00	70.43	71.33	72.00	72.00
1.1.24	Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus	persen	56.00	56.31	56.50	70.00	70.00
1.1.25	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran	persen	20.00	25.00	30.00	30.50	30.50
1.1.26	Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan	unit per tahun	5	5	6	6	22
1.1.27	Jumlah kemitraan pendidikan yang dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama	unit	56.00	56.20	57.10	58.00	58.00
1.1.28	Cakupan PBM Sekolah yang di Supervisi dan di Monitoring	persen	56.00	56.00	55.10	54.20	54.20
1.1.29	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 yang lulus tepat waktu	persen	95.00	95.41	95.82	96.23	96.23
1.1.30	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S2 yang lulus tepat waktu	persen	70.00	70.30	70.60	70.90	70.90
1.1.31	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S3 yang lulus tepat waktu	persen	65.00	65.28	65.56	65.84	65.84

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
1.1.32	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	persen	25.00	26.20	27.40	28.70	28.70	
1.1.33	Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi	orang per tahun	250	250	250	250	750	
1.1.34	Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi	orang	1500	1500	1515	1625	1625	
1.1.35	Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina	unit	10	10	10	10	30	
1.1.36	Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa	persen	10.00	11.23	12.58	13.25	13.25	
1.1.37	Rasio kecukupan rombel terhadap siswa SLB	rasio siswa SLB per rombel	20.00	21.90	23.8	25.7	25.7	
1.1.38	APM Pendidikan khusus (SPM Provinsi)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
1.2.	Kesehatan							
1.2.1	Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	persen	30.00	31.30	40.30	41.20		
1.2.2	Cakupan puskesmas terakreditasi	persen	10.62	12.12	14.02	15.92		
1.2.3	Cakupan puskesmas pembantu	per 100,000 penduduk	150.00	150.90	151.40	152.30		
1.2.4	Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan	persen	70.00	70.00	75.00	80.00		
1.2.5	Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	persen	40.00	45.00	50.00	55.00		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
1.2.6	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	persen	89.66	90.56	92.46	93.36	
1.2.7	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	persen	75.00	80.00	85.00	90.00	100
1.2.8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	45.00	45.95	46.80	47.30	
1.2.9	Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS	persen	41.38	42.57	51.57	60.57	
1.2.10	Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	persen	92	95	98	100	385
1.2.11	Persentase PAK yang diawasi	persen	100	90	95	100	100
1.2.12	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat	jumlah	25.00	30.00	35.00	40.00	40.00
1.2.13	API Malaria	persen	25.64	25.54	24.60	23.70	23.70
1.2.14	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	32.64	31.74	30.84	29.95	29.95
1.2.15	Tingkat prevalensi DBD	persen	60.74	59.84	50.84	49.94	49.94
1.2.16	Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	per 100.000 penduduk	30.57	29.67	28.77	27.87	27.87
1.2.17	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1000 penduduk	9.00	8.90	8.00	7.10	7.10

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.2.18	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 1000 penduduk	34.18	26.33	22.78	21.94	21.94	
1.2.19	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	persen	30.00	35.00	40.00	45.00	45.00	
1.2.20	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa	persen	100.00					
1.2.21	Cakupan pelayanan kesehatan lembaga mitra	kabupaten/kota	16.00					
1.2.22	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	
1.2.23	Unmet need pelayanan kesehatan	persen	5.00	5.30	5.61	60.00	60.00	
1.2.24	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	kasus	150.00	135.00	121.5	109.35	109.35	
1.2.25	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	60.00	54.00	48.60	43.74	43.74	
1.2.26	Cakupan pelayanan nifas	persen	45.00	45.90	46.81	47.69	47.69	
1.2.27	Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI)	persen	65.00	65.47	70.23	70.56	70.56	
1.2.28	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	persen	25.00	22.50	20.25	18.22	18.22	
1.2.29	Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	persen	0.65	0.58	0.52	0.47	0.47	
1.2.30	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	persen	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	
1.2.31	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 klh	4.00	3.60	3.24	2.91	2.91	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
1.2.32	Rasio posyandu yang aktif	persen	70.00	70.91	71.86	80.86	
1.2.33	Cakupan kunjungan bayi (KN1)	persen	52.00	61.00	61.90	70.90	
1.2.34	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	persen	52.00	52.90	61.90	62.80	
1.2.35	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	persen	2300.00	2267.00	2236.00	2204.00	
1.2.36	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi	persen	50.00	51.90	52.02	65.54	
1.2.37	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	70.00	75.05	80.12	81.02	
1.2.38	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit	jumlah per tahun	27.00				
1.2.39	Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan	unit	8.00	5.00	5.00	5.00	
1.2.40	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 30.000 penduduk	29.10	29.10	29.10	29.10	30.00
1.2.41	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	4.50	5.40	6.30	6.81	
1.2.42	Rasio Dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	30.25	31.15	32.05	32.95	
1.2.43	Rasio Tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1.20	1.22	1.25	1.28	
1.2.44	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
1.2.45	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	persen	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
1.2.46	Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	persen	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00
1.2.47	Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	kabupaten per tahun	2.00	100	100	200	400
1.2.48	Cakupan jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi	persen	60.00	61.12	62.62	63.92	
1.2.49	Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	persen	40.00	40.91	42.83	44.70	
1.2.50	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00
1.2.52	Cakupan rumah sakit kelas C	persen	58.62	61.12	64.30	68.53	68.53
1.2.53	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional	persen	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00
1.2.54	Bed Occupancy Ratio (BOR)	rasio	45.00	45.50	46.40	47.72	47.72
1.2.55	Cakupan rumah sakit kelas C	persen	58.62	59.53	60.42	61.33	61.33
1.2.56	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.2.57	Tingkat kecukupan tenaga medis sesuai dengan standar rumah sakit	persen	73.00	75.10	77.30	79.50	79.50	
1.2.58	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar	persen	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	
1.2.59	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	persen	90.00	93.00	95.00	98.00	98.00	
1.2.60	Cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi baik	persen	40.00	40.00	41.56	47.12		
1.2.61	Cakupan keluarga terakses air bersih	persen	45.25	47.23	49.25	51.75		
1.2.62	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak bencana (SPM Provinsi)	-	100	100	100	100		
1.2.63	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB (SPM Provinsi)	-	100	100	100	100		
1.2.65	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak bencana (SPM Provinsi)		100	100	100	100	100	
1.2.66	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB (SPM Provinsi)		100	100	100	100	100	
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penata Ruang							
1.3.1.	Pekerjaan Umum							
1.3.1.1	Daerah irigasi provinsi yang berfungsi	hektar	5000	-	-	-	-	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
1.3.1.2.	Persentas luas lahan yang terlayani irigasi	persen	95	-	-	-	-
1.3.1.3	Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	ton per hektar	60.00	-	-	-	-
1.3.1.4	Cakupan layanan air minum (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100	100
1.3.1.5	Terpeliharanya sempadan sumber air	sungai/lokasi	20				
1.3.1.6	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	m	80	-	-	-	-
1.3.1.7	Panjang jalan provinsi yang fungsional	km	30	30	30	30	30
1.3.1.8	Panjang jembatan yang fungsional	m'	500	500	500	500	
1.3.1.9	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	50	50	50	50	
1.3.1.10	Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap	km	60	60	60	60	
1.3.1.11	Panjang jalan dalam kondisi mantap	meq	30	30	30	30	
1.3.1.12	Panjang jembatan dalam kondisi mantap	persen	30	30	30	30	
1.3.1.13	Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan	persen	80	80	80	80	
1.3.1.14	Cakupan keterlayanan air baku	persen	50	50	50	50	
1.3.1.15	Cakupan keterlayanan air bersih	persen	50.00	50.00	50.00	50.00	
1.3.1.16	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	persen	80.00	80.00	80.00	80.00	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.3.1.17	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani	persen	50.00	50.00	50.00	50.00		
1.3.1.18	Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	persen	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	
1.3.1.19	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100	100	
1.3.2.	Penata Ruang							
1.3.2.1	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	persen	100	100	100	100	100	
1.3.2.2	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen	100	100	100	100	100	
1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
1.4.1	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	persen	80.00	85.00	90.00	95.00	100	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.4.2	Cakupan rumah layak huni yang terbangun	persen	3000	3000	3000	3000	3000	
1.4.3	Persentase lingkungan permukiman yang sehat	persen	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	
1.4.4	Cakupan rumah tangga yang menggunakan air ledeng	per 1000 kk	380	440	510	570	570	
1.4.5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100	100	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
1.4.6	Persentase penduduk realokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100	
1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.5.1	Jumlah konflik horisontal	kasus	2.00	1.80	1.62	1.45	
1.5.2	Cakupan penegakan Perda	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	
1.5.3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	20.00				
1.5.4	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	kasus	1.20				
1.5.5	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	persen	65.00	78.00	78.00	78.00	
1.5.6	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	rasio	78.00	85.00	85.00	85.00	
1.5.7	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	persen	85.00	85.00	85.00	85.00	
1.5.8	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	persen	50.00	50.00	50.00	50.00	
1.5.9	Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	persen	65.00	65.00	65.00	65.00	
1.5.10	Jumlah Pertemuan FKUB per tahun	kali	2	2	2	2	8

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
1.5.11	Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan	orang	250	250	250	250	1000	
1.5.12	Cakupan fasilitasi Forkompimda	kali	5	5	5	5	20	
1.5.13	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	persen	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
1.5.14	Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM	persen	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
1.5.15	Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi dalam pendidikan menengah	persen	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
1.5.16	Persentase lembaga dan partai politik yang dibina	persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	
1.5.17	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	persen	-	95	-	-	-	
1.5.18	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	
1.5.19	Cakupan pertemuan dengan lembaga adat untuk harmonisasi regulasi dan mitra strategis pembangunan	kali	2	2	2	2	8	
1.5.20	Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	persen	80					
1.5.21	Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi	2	2	2	2	8	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
1.5.22	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	persen	100				
1.5.23	Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	persen	100				
1.5.24	Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	persen	40				
1.5.25	Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	persen	100				
1.5.26	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100	
1.6.	Sosial						
1.6.1	Persentase KAT yang memperoleh bantuan sosial	persen	60	50	55	60	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	persen	50	55	60	65	
1.6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	55.00	61.35	67.70	74.05	
1.6.4	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha	KK	200	200	400	600	
1.6.5	Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama	persen	90	90	90	90	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	85	90	95	100		
1.6.7	Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	persen	100	100	100	100		
1.6.8	Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan	persen	50	55	60	65		
1.6.9	Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	persen	35	40	45	50		
1.6.10	Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	kab/kota	9	9	9	9		
1.6.11	Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	50	50	50	50		
1.6.12	Persentase anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100		
1.6.13	Cakupan penyandang cacat netra yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100		
1.6.14	Cakupan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen	80	85	90	100		
1.6.15	Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial	dokumen	2	2	2	2		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
2.1.	Tenaga Kerja						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
2.1.1	Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap	persen	100	100	100	100	
2.1.2	Frekuensi promosi bursa tenaga kerja	kali	2	2	2	6	
2.1.5	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	persen	90	90	95	100	
2.1.6	Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	50	50	60	70	
2.1.7	Persentase kenaikan UMP	persen	4.00	4.5	5.00	5.5	
2.1.8	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	persen	60	60	70	80	
2.1.9	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	80	80	80.52	81.04	
2.1.10	Tingkat pengangguran terbuka	persen	2.00	1.80	1.62	1.46	
2.1.11	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial	persen	60	60	65	70	
2.1.12	Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3	persen	80	80	85	90	
2.2.	Pangan						
2.2.1	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	25.00	25.00	30.00	35.00	
2.2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	persen	40.00	38.00	36.00	34.00	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
2.2.3	Skor PPH	skor	92.67	92.67	92.91	93.00		
2.3.	Pertanahan						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan	
2.3.1	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	persen	80	80.00	85.00	90.00		
2.3.2	Cakupan tanah adat yang terpetakan	persen	60	60.00	70.00	90.00		
2.4.	Lingkungan Hidup						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	
2.4.1	Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air	titik sungai	20	20	20	20		60
2.4.2	Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara	lokasi per kab/kota	50/10	50/10	50/10	50/10		50/10
2.4.3	Proporsi degradasi lahan yang tercemar	persen	2.00	2.00	1.09	1.08		1.08
2.4.4	Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	persen	80.00	80.00	85.00	90.00		90.00
2.4.5	Cakupan akses informasi LH yang berkualitas	kali	12	12	12	12		48
2.4.6	Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	lokasi	1	1	1	1		4
2.4.7	Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi	persen	80	80.00	85.00	90.00		90.00
2.4.8	Persentase kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi	persen	40	45.00	50.00	65.00		65.00
2.4.9	Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	persen	50	55.00	60.00	65.00		65.00
2.4.10	Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	orang	20	20	20	20		80
2.4.11	Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina	orang	2	2	2	2	8	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
2.5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.5.1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	
2.5.2	Cakupan penduduk ber KTP elektronik	persen	85.78	89.74	93.78	98.18	
2.5.3	Persentase kepemilikan KK elektronik	persen	45.67	50.67	56.17	61.67	
2.5.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	persen	55.34	65.49	75.64	85.79	
2.5.5	Persentase pasangan berakte nikah	persen	65	70	75	80	
2.6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.6.1	Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG	persen	45	50	55	60	
2.6.2	Jumlah BUMKAM yang kelola Komoditas Unggulan	unit	75	80	85	90	
2.6.3	Persentase kampung tertinggal	persen	25.00	23.50	22.00	20.50	
2.6.4	Cakupan kampung mandiri	kampung	1	1	1	1	
2.6.5	Cakupan jumlah kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat	kampung	10	20	30	40	
2.6.6	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi	persen	30	35	40	45	
2.7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2.7.1	Cakupan sasaran Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina	kelompok per tahun	100	100	100	100	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
2.7.2	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>)	persen	2.25	2.25	2.25	2.00	2.00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.7.3	Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	persen	80	80	85	90	90	
2.7.4	Cakupan kampung KB	persen	40	45	50	55	55	
2.7.5	Cakupan tenaga penyuluh KB yang terlatih	orang per tahun	30	30	30	30	90	
2.8.	Perhubungan							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
2.8.1	Cakupan terintegrasinya antar moda angkutan antar wilayah adat	wilayah adat	3					
2.8.2	Cakupan pelayanan moda angkutan	persen	40	45.00	50	55	55	
2.8.3	Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor	jiwa	2000	1900.00	1700	1500	1500	
2.8.4	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer	unit	2					
2.8.5	Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II	unit	3	-	1	1	4	
2.8.6	Jumlah pelabuhan strategis provinsi	unit	3	1	1	-	4	
2.8.7	Jumlah terminal Tipe B yang fungsional	unit	2	-	1	1		
2.8.8	Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara	persen	7.0	8.00	8.00	9.00	9.00	
2.8.9	Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut	persen	4.5	5.00	85.00	90.00	90.00	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
2.8.10	Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan	persen	80	85.00	85.00	90.00	90.00	
2.9.	Komunikasi dan Informatika						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	
2.9.2	Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil hasil pembangunan	kerjasama	2	1	1	1		5
2.9.3	Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	persen	40.00	45.00	45.00	50.00		50.00
2.9.4	Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	persen	65.00	70.00	75.00	80.00		80.00
2.9.5	Persentase penduduk yang mengakses internet	persen	40.00	50.00	60.00	70.00		70.00
2.9.6	Cakupan SDM Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi	persen	80.00	82.50	85.00	8.75		8.75
2.10.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	
2.10.1	Persentase peningkatan pengembangan UMKM keolahragaan	persen	2.25					
2.10.2	Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri dikelola pengusaha muda	unit	10000.00	150	300	500		500
2.10.3	Jumlah UMKM yang mandiri dalam kompetisi usaha	unit	30	10	20	30		30
2.10.4	Tingkat Partisipasi dalam pameran gelar produk KUMKM dalam negeri	kali	10	5	10	15		15

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
2.10.5	Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah	kelompok	10	5	6	10	10	
2.10.6	Jumlah usaha dalam bentuk koperasi	Rp milyar	15	5	10	15	15	
2.10.7	Persentase koperasi aktif dan berkembang	unit	75	75	80	85	85	
2.11.	Penanaman Modal						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	
2.11.1	Persentase realisasi investasi	persen	100	90	95	100		100
2.11.2	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	persen	7.5	8.00	8.00	8.5		8.5
2.11.3	Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN	persen	35	25	30	35		35
2.11.4	Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/internasional	kali	5	5	5	5		15
2.11.5	Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasional	persen	80	80	80	80		80
2.11.6	Lama waktu penerbitan izin investasi	hari	10	10	10	10		10
2.11.7	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Skor	73.84	75.50	77.26	79.02		79.02
2.11.8	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti	persen	85	85	90	95		95
2.12.	Kepemudaan dan Olah Raga						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	
2.12.1	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	organisasi	50	10	10	10		30

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
2.12.2	Cakupan monitoring atlet berprestasi	persen	95.00	70	75	80	80	
2.12.3	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional	orang	40.00	10	15	15	40	
2.12.4	Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-					
2.12.5	Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-					
2.12.6	Cakupan venue berstandar internasional	persen	-					
2.12.7	Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang	250.00	100	100	100	300	
2.12.8	Jumlah organisasi kepemudaan	organisasi	59	15	15	15	45	
2.13	Statistik							
2.13.1	Cakupan ketersediaan data SIPD	persen	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	
2.13.2	Jumlah dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	dokumen	5	5	5	5	15	
2.14.	Persandian							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian
2.14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	100	100	100	100	100	
2.15.	Kebudayaan							

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
2.15.1	Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu	kurikulum	1.00	2	2	2	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
2.15.2	Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional	kali	2	4	4	4	12	
2.15.3	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	1.00	14	15	16	45	
2.15.4	Frekwensi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional	kali	31	5	5	5	15	
2.15.5	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	2	3	4	5	12	
2.15.6	Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina	persen	50.00	51.00	52.00	53.00	53.00	
2.15.7	Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua	jumlah	5	5	6	6	17	
2.16.	Perpustakaan							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
2.16.1	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	persen	60.00	65.00	70.00	80.00	80.00	
2.16.2	Persentase pemustaka yang puas terhadap layanan perpustakaan	persen	90.00	90.00	95.00	100.00	100	
2.17.	Kearsipan							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
2.17.1	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah Kearsipan dilakukan penyelamatan	jumlah	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
2.17.2	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan dan kepustakaan	persen	4.00	4.50	5.00	5.50	5.50	
3.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
3.1.	Pariwisata							Urusan Pilihan Pariwisata
3.1.1	Destinasi wisata unggulan yang berkembang	destinasi	15	16	17	18	51	
3.1.2	Kawasan wisata yang berstandar internasional	kawasan	5	6	7	8	8	
3.1.3	Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif	perusahaan	50	50	50	50	150	
3.1.4	Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional	orang	250	250	250	250	250	
3.1.5	Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina	pengusaha	50	50	50	50	150	
3.2.	Pertanian							Urusan Pilihan Pertanian
3.2.1	Cakupan bina kelompok tani	persen	20	20	20	20	60	
3.2.2	NTP peternakan	persen	100.00	99.97	99.99	100.00	100	
3.2.3	NTP tanaman pangan	persen	100.00	98.00	99.5	100	100	
3.2.5	NTP perkebunan	persen	100.00					
3.2.7	Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama	ton per hektar	10.00	9.65	9.8	100	100	
3.2.8	Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas	persen	-					
3.2.9	Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	juta hektar	4.00	4.29	4.50	4.89		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
3.2.10	Tingkat swasembada pangan	persen	45	50	55	60	
3.2.11	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	persen	85	90	95	100	
3.2.12	Persentase lahan yang dikembangkan sebagai kawasan agribisnis	persen	50	55	60	65	70
3.2.13	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat	persen	3.0	3.0	3.5	3.5	
3.2.14	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	kawasan	2	2	2	2	6
3.2.15	Cakupan teknologi pertanian/perkebunan rakyat tepat guna yang diterapkan	jenis	15	15	17	20	20
3.2.16	Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	kg per hektar	510.00	510.00	512.00	512.70	
3.2.17	Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	45	50.00	55.00	60.00	
3.2.18	Frekwensi promosi produk perkebunan	kali	2	2	2	2	6.00
3.2.19	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persen	70	75.00	80.00	85.00	85.00
3.2.20	Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	ton	37,600,000	38,100,00	38,900,00	39,000,00	
3.2.21	Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	40	42.00	44.00	46.00	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
3.2.22	Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	persen	25	30.00	35.00	40.00	
3.3.	Kehutanan						Urusan Pilihan Kehutanan
3.3.1	Nilai produksi sumber daya kehutanan	Rp triliun	2.5	3.20	3.90	4.60	4.60
3.3.2	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	persen	30.00	30.76	31.52	32.28	32.28
3.3.3	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ribu Ha	5.27	5.39	5.41	5.53	5.53
3.3.4	Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	persen	30	30.00	35.00	40.00	40.00
3.3.5	Luasan tutupan kawasan konservasi	Ha	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284
3.3.6	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	persen	50	50.00	55.00	60.00	60.00
3.4.	Energi dan Sumber Daya Mineral						Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
3.4.3	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan	persen	100	80	85	90	90
3.4.4	Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina	persen	60	60	65	70	70
3.4.5	Persentase penambangan ilegal yang ditertibkan	persen	100	95	100	100	100
3.4.6	Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	persen	100	100	100	100	100
3.4.7	Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	persen	70	70	75	80	80

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
3.4.8	Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	persen	100	100	100	100	100
3.4.9	Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi	persen	80	80	80	80	80
3.4.10	Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali	rp per liter	9.5	10.00	10.00	10.00	10.00
3.4.11	Tingkat elektrifikasi	persen	60.00	80.8	80.16	80.24	80.24
3.4.12	Persentase kampung terakses listrik	persen	60.00	60.00	65.00	70.00	70.00
3.4.13	Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	rumah tangga	250.00	250.00	250.00	250.00	750.00
3.4.14	Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	rumah tangga	500	500	500	500	
3.4.15	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	kampung	100	50	50	50	150
3.5.	Perdagangan						Urusan Pilihan Perdagangan
3.5.1	Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi	persen rata-rata kab/kota	175.00	175.00			
3.5.2	Cakupan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	persen	90	90	90	90	90
3.5.3	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	persen	100	100	100	100	100
3.5.4	Nilai ekspor Non Migas Papua	Rp milyar	3,000.00				

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
3.5.5	Cakupan pasar rakyat yang fungsional	unit	20	5.00	10	15	15	
3.5.6	Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	persen	4.00	4.25	4.50	5.00	5.00	
3.5.7	Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok	persen	150	150	125	100	100	
3.5.8	Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumahtangga	persen	15.25	15.25	15.74	16.23	16.25	
3.6.	Perindustrian						Urusan Pilihan Perindustrian	
3.6.1	Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat	unit per tahun	10					
3.6.2	Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	unit usaha	50					
3.6.3	Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi	kawasan	1					
3.7.	Kelautan dan Perikanan						Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	
3.7.1	Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Persen	70	70	70	70	70	
3.7.2	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi	Jumlah Kabupaten	8	8	8	8	8	
3.7.3	Produksi perikanan budidaya	ton	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000	
3.7.4	Produksi perikanan tangkap	ton	160.000	170.000	180.000	190.000	190.000	
3.7.5	Nilai ekspor produk perikanan	Rp. juta	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
3.7.6	Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	Rp. juta	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	
3.7.7	Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	Jumlah	4	4	5	5	
3.7.8	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	Jumlah	8	8	8	8	
3.7.9	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah	8	8	8	8	
4.	Layanan Penunjang Urusan						
4.1	Perencanaan Pembangunan						
4.1.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	-				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
4.1.2	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab/ kota	9	9	9	9	
4.1.3	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	
4.1.4	Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	
4.1.5	Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten	persen	100	100	100	100	
4.1.6	Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	
4.1.7	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
4.1.8	Penyusunan LKPJ tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya		
4.1.9	Cakupan Evaluasi RPD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100	100	100	100		
4.1.10	Cakupan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100	100	100	100		
4.1.11	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	persen	100	95	95	95		
4.1.12	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	persen	95	95	95	95		
4.1.13	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	95	95	95	95		
4.1.14	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	persen	95	95	95	95		
4.1.15	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	persen	95	95	95	95		
4.1.16	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah	jumlah	4	4	4	16		
4.1.17	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	persen	95	95	95	95		
4.1.18	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen	95	95	95	95		
4.2.	Keuangan							Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
4.2.1	Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	persen	100	100	100	100		

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
4.2.2	Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik	Kabupaten	9	9	9	9	9
4.2.3	Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus	persen	100	100	100	100	100
4.2.4	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.2.5	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	100	100	100	100	100
4.2.6	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	50	55	60	65	70
4.2.7	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.2.8	Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.2.9	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas	persen	100				
4.2.10	Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua	persen	100	100	100	100	100
4.2.14	Opini Pemeriksaan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.2.17	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	persen	4.60	4,65	4,70	4,75	
4.2.18	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah	persen	14.00	14.00	14.00	14.00	
4.2.19	Efektifitas pendapatan asli daerah	persen	3.00	3.00	3.00	3.00	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
4.2.20	Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	jenis	3	3	3	3		
4.3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	
4.3.1	Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang	100.00	100.00	100	100		
4.3.2	Jenis Diklat yang terakreditasi A	jumlah	8	8				
4.3.3	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	90	90	100	100		
4.3.4	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	90	90	100	100		
4.3.5	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	85	85	90	90		
4.3.6	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	orang	100	100	-	-		100
4.4.	Pelatihan dan Pengembangan						Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pelatihan dan Pengembangan	
4.4.1	Jumlah hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	jenis per tahun	10	5	8	10		10
4.4.2	Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	persen	60	60	65	70		70
4.5.	Penerapan SIDA							
4.5.1	Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	jenis	1	1	2	1	4	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
4.6.	Pengawasan						Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
4.6.1	Persentase kasus pelanggaran administrasi yang tertangani	persen	95.00	95.00	95.00	95.00	
4.6.2	Cakupan pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	35	35.00	40.00	45.00	
4.6.3	Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi	orang per tahun	4	2	2	2	
4.6.4	Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	
4.6.5	Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	persen	50	50.00	55.00	60.00	
4.6.6	Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	persen	35	35.00	40.00	45.00	
4.6.7	Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua	persen	60	60.00	70.00	80.00	
4.7.	Sekretariat Dewan						Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
4.7.1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja Pengawasan DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan	
		2023	2024	2025	2026			
4.7.2	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada		
1.	Layanan Urusan Wajib Dasar							
1.1.	Pendidikan						Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	
1.1.1	Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD	persen	56.00	56.00	56	60		65
1.1.2	Rasio OAP yang mengikuti kelas kecil	persen	100.00	100.00	100	100		100
1.1.3	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SD	persen	0.85	0.85	0,85	0,75		0,70
1.1.4	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SMP	persen	0.25	0.25	0,20	0,15		0,12
1.1.5	Persentase siswa SMA/SMK OAP yang lulus dengan nilai UAN di atas rata-rata	persen	60.00	60.00	60,00	65,00		70,00
1.1.6	Cakupan siswa lulusan OAP yang diterima di PTN	per 1000 siswa OAP	200	200	200	200		200
1.1.7	1 Angka Melek Huruf penduduk OAP	persen	60.00	60.00	60,00	55,00		50,00
1.1.8	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa lulus dengan IPK memuaskan	persen	85.00	85.00	85,00	90,00		100,00
1.1.9	Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	persen	50.00	50.00	60,00	70,00		80,00
1.1.10	Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat	sekolah per tahun	2.00	2.00	5,00	5,00		5,00
1.1.11	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	73.00	73.00	73,00	75,00		80,00
1.2.	Kesehatan							

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
1.2.1	Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3	persen	40.00	40.00	45,00	50,00	55,00	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
1.2.2	Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan	persen	75.00	75.00	100	100	100	
1.2.3	Cakupan balita OAP yang bergizi baik	persen	70.00	70.00	80	90	100	
1.2.4	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	100.00	100.00	100	100	100	
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penata Ruang							Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.3.1	Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni	persen	40.00	55,00	60,00	65,00	65,00	
1.4.	Sosial							Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
1.4.1	Cakupan keluarga OAP yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	per 1000 keluarga	1000	1000	1000	1000		
1.5.	Pangan							Urusan Bukan Pelayanan Dasar Pangan
1.5.1	Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang	persen	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	



BAB VII

Penutup





BAB VIII

Penutup

Bab ini memuat kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2025 yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan daerah Provinsi Papua.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, RKPD tahun 2025 memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2025. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2025, mengacu pada isu-isu strategis serta melalui pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Papua dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025, secara sinergis dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
- b. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2025, RKPD Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, hasil kesepakatan Bersama dengan DPRD Provinsi Papua;
- c. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD,

APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat RENJA- Perangkat Daerah masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2025;

- d. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang mencakup Musrenbang Otonomi Khusus dan Musrenbang Umum, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik;
- e. BAPPEDA Provinsi Papua wajib melakukan monitoring pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2025 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing PD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur;
- f. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan BAPPEDA Provinsi Papua;
- g. RKPD Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RKPD Provinsi Papua Tahun 2025 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.

8.2 PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

8.2.1 Pemantauan Pelaksanaan RKPD

Pemantauan pelaksanaan RKPD dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah terhadap program dan kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Pemantauan pelaksanaan RKPD dilakukan melalui penelaahan hasil Pemantauan triwulanan Renja PD yang mendukung prioritas pembangunan daerah, serta bertujuan untuk:

- a. mengetahui perkembangan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dan program yang dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana tertentu, seperti yang dituangkan dalam matriks prioritas RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam pencapaian program dan kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung prioritas pembangunan daerah dalam RKPD.

Pemantauan pelaksanaan RKPD dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan, dilaporkan per triwulan, serta menggunakan sumber data antara lain:

- a. hasil Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan Renja PD yang ter-tagging pada prioritas pembangunan daerah dalam aplikasi P2K;
- b. hasil Pemantauan pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari sumber dana Otonomi Khusus dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus;
- c. hasil Pemantauan pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan yang mendukung standar pelayanan minimal.
- d. data capaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan
- e. data lainnya yang relevan.

Tata cara Pemantauan pelaksanaan RKPD dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

a. Persiapan

- 1) Bidang Pengendalian pada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyiapkan data hasil Pemantauan pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan prioritas pembangunan daerah pada aplikasi P2K untuk menjadi dasar dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan RKPD.
- 2) Bidang Pengendalian pada pada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melaksanakan koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan prioritas pembangunan daerah.
- 3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan Renja PD yang mendukung prioritas pembangunan daerah pada aplikasi P2K memenuhi standar kelengkapan untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Pemantauan

Bidang Pengendalian pada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melaksanakan Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas pembangunan daerah pada aplikasi P2K, yang meliputi:

- 1) status capaian sasaran program, kegiatan /sub kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- 2) realisasi output dan penyerapan anggaran atas pelaksanaan sub kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- 3) permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian realisasi output dan penyerapan anggaran sub kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- 4) rekomendasi tindakan korektif yang perlu dilakukan terhadap subkegiatan yang mengalami permasalahan dan hambatan tertentu.

8.2.2 Pengendalian Pelaksanaan RKPD

Pengendalian pelaksanaan RKPD merupakan kegiatan lanjutan dari aktivitas pemantauan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan RKPD **dilakukan melalui tindakan korektif yang bersifat manajerial**. Pengendalian pelaksanaan RKPD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada triwulan III tahun pelaksanaan dan dilaksanakan berdasarkan hasil Pemantauan RKPD dan data relevan lainnya.

Tata cara Pengendalian pelaksanaan RKPD dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

a. Persiapan

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melakukan koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah untuk mengkonfirmasi pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan prioritas pembangunan daerah. Konfirmasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan:

- 1) bersifat strategis sesuai dengan arahan matriks prioritas RKPD, bersumber dana Otonomi Khusus. dan bersifat pendukung standar pelayanan minimal;
- 2) memanfaatkan data hasil Pemantauan; dan
- 3) data lainnya yang relevan.

b. Rapat Koordinasi

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah, dan kepala subbagian program pada Perangkat Daerah yang menjalankan program, kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah. Rapat koordinasi dilakukan untuk:

- 1) mencermati perkembangan pelaksanaan;
- 2) permasalahan yang dihadapi; dan
- 3) tindak lanjut dalam rangka pencapaian target sasaran makro pembangunan maupun prioritas pembangunan terpilih.

Pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan oktober tahun pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:

- 1) kegiatan penyampaian hasil pengisian instrumen Pengendalian oleh penanggung jawab prioritas pembangunan daerah;
- 2) penyampaian hasil cross-check lapangan; dan
- 3) perumusan tindakan korektif.

c. Tindakan Korektif

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah merumuskan rekomendasi tindakan korektif program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah, dengan garis besar sebagai berikut:

- 1) Perumusan rekomendasi tindakan korektif tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengisian instrumen Pengendalian dan hasil *cross-check* lapangan.
- 2) Tindakan korektif berupa tindakan konstruktif, yaitu tindakan untuk membangun dan memperbaiki pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah.
- 3) Tindakan korektif dapat dilaksanakan melalui *refocusing* atau kebijakan penajaman/pemfokusan kembali langkah pencapaian target dengan tujuan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan sehingga kembali berjalan sebagaimana mestinya.
- 4) Rekomendasi tindakan korektif disampaikan kepada masing-masing kepala subbagian program/Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pengendalian.

d. Laporan Pengendalian Pelaksanaan RKPD

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyusun laporan Pengendalian pelaksanaan RKPD untuk disampaikan kepada penanggung jawab prioritas pembangunan daerah. Laporan pengendalian tersebut paling sedikit memuat:

- 1) perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah yang belum berjalan semestinya, sebagaimana laporan penanggungjawab prioritas pembangunan daerah kepada kepala subbagian program/kepala Perangkat Daerah
- 2) permasalahan atau hambatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah, sebagaimana laporan penanggungjawab prioritas pembangunan daerah kepada kepala subbagian program/kepala Perangkat Daerah,
- 3) hasil penilaian pada instrumen Pengendalian;
- 4) hasil penilaian lapangan, jika diperlukan;
- 5) strategi berupa rekomendasi tindakan korektif percepatan pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah.

8.2.3 Evaluasi Saat Pelaksanaan RKPD

Evaluasi saat pelaksanaan RKPD dilakukan untuk menilai capaian sasaran prioritas pembangunan yang dikontribusikan dari program dan kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah. Hasil Evaluasi menjadi bahan masukan dan landasan untuk merumuskan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKPD tahun (t+2). Evaluasi saat pelaksanaan RKPD dilakukan mulai akhir triwulan III tahun pelaksanaan RKPD, yaitu pada bulan september sampai dengan bulan november tahun pelaksanaan, dengan menggunakan sumber data, antara lain:

- a. data dalam aplikasi P2K, yaitu data target dan capaian, pagu, dan penyerapan, serta pemetaan program, kegiatan/sub kegiatan dalam Renja PD yang mendukung prioritas pembangunan daerah;
- b. matriks program, kegiatan/sub kegiatan strategis daerah yang tertuang dalam RKPD;
- c. laporan Pengendalian pelaksanaan RKPD;
- d. hasil Evaluasi saat pelaksanaan Renja PD; dan
- e. data lainnya yang relevan.

Evaluasi saat-pelaksanaan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu:

a. Persiapan

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melakukan koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah dalam rangka Evaluasi saat pelaksanaan RKPD. Persiapan tersebut dilakukan pada bulan september tahun pelaksanaan.

b. Pengumpulan data

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melakukan:

- 1) pengumpulan data capaian pelaksanaan RKPD hingga triwulan III yang terkait data capaian pelaksanaan program dan sub kegiatan prioritas daerah dari aplikasi P2K;
- 2) menelaah hasil Evaluasi saat pelaksanaan Renja PD yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah yang tertuang dalam matriks program prioritas daerah RKPD.

c. Pengolahan dan Analisis Data

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah mengolah data capaian pelaksanaan serta menganalisis hasil identifikasi hambatan dan permasalahan pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan strategis daerah hingga triwulan III yang telah dihimpun dan disusun dalam bentuk laporan. Proses analisis dan penyusunan laporan tersebut dimulai pada bulan november tahun pelaksanaan.

d. Rapat Koordinasi Teknis

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melakukan konfirmasi data melalui rapat TP2K bersama Perangkat Daerah pelaksana program, kegiatan/sub kegiatan strategis daerah, dalam rangka konfirmasi dan validasi data yang belum lengkap berdasarkan data pelaporan dalam P2K. Proses pengumpulan, konfirmasi, dan validasi data dilakukan pada bulan Oktober hingga bulan November tahun pelaksanaan.

e. Penyusunan Hasil Evaluasi

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyusun laporan hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD yang memuat data capaian sampai dengan triwulan III tahun pelaksanaan RKPD.

f. Pelaporan Hasil Evaluasi

Laporan Evaluasi saat pelaksanaan RKPD disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah kepada Gubernur sebagai bahan usulan tema, sasaran, arah kebijakan, dan fokus prioritas pembangunan dalam penyusunan RKPD tahun (t+2). Hasil Evaluasi saat pelaksanaan RKPD tahun ke-4 periode RPJMD juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan kajian pendahuluan pada penyusunan RPJMD periode berikutnya.

8.2.4 Evaluasi Pasca Pelaksanaan RKPD

Evaluasi pasca-pelaksanaan RKPD dilakukan untuk menilai hasil capaian sasaran prioritas pembangunan hingga triwulan IV yang dikontribusikan dari program dan kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah. Hasil dari Evaluasi pasca-pelaksanaan RKP dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan sub bab Evaluasi RKPD untuk RKPD tahun (t+2). Evaluasi pasca-pelaksanaan RKPD dilakukan setelah periode tahun pelaksanaan RKPD berakhir, yaitu pada bulan januari sampai dengan bulan april tahun (t+1).

Pelaksanaan RKPD dapat menggunakan data, diantaranya:

- a. data dalam aplikasi P2K yang meliputi data:
 - 1) target dan capaian;
 - 2) pagu dan penyerapan; dan
 - 3) matriks program, kegiatan/subkegiatan strategis daerah di dalam RKPD.
- b. laporan Pengendalian pelaksanaan RKPD;
- c. hasil Evaluasi pasca-pelaksanaan Renja PD; dan
- d. data lainnya yang relevan.

Tata Cara Evaluasi pasca-pelaksanaan RKPD meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu:

a. Persiapan

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melakukan koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah dan kepala subbagian program pada Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dalam rangka Evaluasi saat pelaksanaan RKPD. Persiapan dilakukan pada bulan januari tahun (t+1).

b. Pengumpulan Data

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, melakukan:

- 1) menghimpun data capaian pelaksanaan RKPD hingga triwulan IV yang terkait dengan data capaian pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah berdasarkan data aplikasi P2K; dan
- 2) menelaah hasil Evaluasi pasca-pelaksanaan Renja PD yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah dalam RKPD.

Apabila data-data tersebut belum lengkap sampai dengan triwulan IV, kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dapat melakukan konfirmasi dan validasi data kepada Perangkat Daerah terkait. Proses pengumpulan, konfirmasi, dan validasi data tersebut dilakukan pada bulan februari hingga bulan Maret tahun (t+1).

c. Pengolahan dan Analisis Data

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, melakukan:

- 1) pengolahan dan analisis data capaian pelaksanaan; dan

2) identifikasi hambatan dan permasalahan prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis hingga triwulan IV.

Hasil identifikasi hambatan dan permasalahan tersebut disusun dalam bentuk laporan. Pelaksanaan pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan dilakukan sampai dengan minggu ketiga bulan april tahun (t+1).

d. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Evaluasi

Laporan hasil Evaluasi pasca-pelaksanaan RKPD diserahkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah kepada Gubernur paling lambat minggu keempat bulan april tahun (t+1) sebagai bahan penyusunan sub-bab rancangan Evaluasi RKPD tahun (t+2).



Lampiran I

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan Pendanaannya
Tahun Anggaran 2025



**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PROVINSI PAPUA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						189.930.314.917,00							221.671.396.725,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						189.930.314.917,00							221.671.396.725,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						189.930.314.917,00							221.671.396.725,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	67.417.814.917,00						-	95.573.896.725,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.750.000.000,00					1. Peningka tan kualitas SDM	-	4.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	1.600.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningka tan kualitas SDM	-	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningka tan kualitas SDM	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningka tan kualitas SDM	-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	1.100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	46.450.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	75.433.896.725,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				652 Orang/ Bulan	44.600.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		72.683.896.725,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	800.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.410.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	760.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	4.817.814.917,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	4.830.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				15 Paket	1.437.814.917,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	1.100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.800.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	800.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.940.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	1.760.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	760.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		760.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.550.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	4.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	3.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	121.542.500.000,00						-	125.027.500.000,00	
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	39.905.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	40.790.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>				5 Unit	800.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				1 Unit	875.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningka tan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia</i>				14 Unit	560.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningka tan kualitas SDM	-		420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>				7 Paket	2.100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningka tan kualitas SDM	-		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				170 Peserta Didik	2.550.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Heram, Waena	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningka tan kualitas SDM	-		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				1500 Peserta Didik	4.000.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		5.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus</i>				30 Orang	1.980.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.980.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				225 Orang	3.690.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		3.690.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				7 Satuan Pendidikan	3.500.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS</i>				20 Satuan Pendidikan	8.500.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		8.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				21 Konten Digital	700.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				20 Orang	400.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	700.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi</i>				10 Orang	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	700.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				4 Unit	1.600.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				1541 Satuan Pendidikan	1.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				200 Orang	3.300.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat</i>				7 Ruang	2.800.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		2.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.3.04	Pengelolaan Akademi Komunitas	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	2.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0022	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah Akademi Komunitas Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan</i>				1 Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0026	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan Akademi Komunitas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i>				1 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.07	Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan	-	-			-	79.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	79.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.07.0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan														
			<i>Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan yang Tersedia</i>				4 Satuan Pendidikan	6.000.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.07.0002	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan yang Tersedia</i>				200 Satuan Pendidikan	73.000.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		73.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.08	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan	-	-			-	2.437.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	2.437.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.08.0001	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan														
			<i>Jumlah Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan Yang Dilaksanakan</i>				4 Dokumen	2.437.500.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		2.437.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-			-	600.000.000,00						-	700.000.000,00	
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-			-	600.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya</i>				30 Orang	600.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-			-	370.000.000,00						-	370.000.000,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-			-	370.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	370.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus</i>				1 Dokumen	120.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus</i>				1 Laporan	250.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN						152.895.777.200,00							179.785.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						152.845.777.200,00							179.725.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						152.845.777.200,00							179.725.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	126.415.777.200,00						-	133.875.000.000,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	116.395.422.200,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	120.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				1500 Orang/ Bulan	116.395.422.200,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				15 Laporan	400.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				376 Paket	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.200.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				100 Paket	800.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				100 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				50 Paket	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				50 Paket	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				20 Paket	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				20 Paket	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.820.355.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.925.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				20 Laporan	20.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				25 Laporan	1.800.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.000.355.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				25 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	19.730.000.000,00						-	34.350.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	4.700.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun</i>				3 Unit	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</i>				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan</i>				3 Unit	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			<i>Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara</i>				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				3 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas</i>				3 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>				5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				9 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	7.000.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	12.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			<i>Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar</i>				200 Orang	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			<i>Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				200 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</i>				9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif</i>				20 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				5 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>				5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>				5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				9 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				7 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota</i>				5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan</i>				5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas</i>				5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	2.000.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya</i>				9 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar</i>				5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan</i>				5 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	5.530.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya														
			<i>Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya</i>				9 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0046	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan														
			<i>jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun</i>				1 dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar</i>				9 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar</i>				9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	3.700.000.000,00						-	6.100.000.000,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-			-	1.100.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				150 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi</i>				20 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.100.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>				150 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				30 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.3.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.3.02.0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik</i>				10 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.3.03	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	-	-			-	1.000.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.3.03.0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN														
			<i>Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat</i>				150 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-			-	1.000.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-			-	500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
			<i>Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan</i>				6 Sarana	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-			-	500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														
			<i>Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional</i>				6 Sarana	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	1.300.000.000,00						-	2.400.000.000,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	400.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</i>				5 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	400.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				15 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM</i>				5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
6.	1.02.07	PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	-	-			-	700.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	1.02.07.3.01	Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	-	-			-	700.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.07.3.01.0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi</i>				9 Unit	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X	NON URUSAN						50.000.000,00							60.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						50.000.000,00							60.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				7 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA						106.317.820.717,00							198.340.020.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						106.317.820.717,00							198.340.020.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						106.317.820.717,00							198.340.020.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>undefined</i>	-			866 Orang	66.027.820.717,00						-	23.940.020.000,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	53.670.799.740,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				866 Orang/Bulan	53.670.799.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	698.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	1.710.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	39.750.000.000,00						-	172.000.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	38.700.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	145.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		73.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		2.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		25.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit														
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				3 Unit	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				2 Unit	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		4.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	30.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		40.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	400.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	25.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		25.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	650.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya</i>				2 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan</i>				4 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	540.000.000,00						-	2.400.000.000,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-			-	240.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	1.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				1 Orang	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	1.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>				10 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		1.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA						62.875.401.139,00							59.100.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						62.875.401.139,00							59.100.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						62.875.401.139,00							59.100.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	42.620.000.000,00						-	38.000.000.000,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	830.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	3.000.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		3.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				12 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	35.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	35.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	35.000.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		35.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	19.255.401.139,00						-	20.100.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	18.655.401.139,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	20.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan</i>				5 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan</i>				12 Unit	3.000.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		3.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			<i>Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara</i>				12 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan</i>				10 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				10 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit</i>				1 Unit	5.000.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		5.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				10 Paket	8.655.401.139,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	1.000.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-			-	500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				115 Orang	500.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>				40 Orang	500.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Yobe	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA	
		RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA						15.591.686.420,00								0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.591.686.420,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						15.591.686.420,00							0,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	3.760.000.000,00						-	0,00		
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	75.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				30 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				1 Orang/ Bulan	50.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.910.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				500 Paket	570.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA	
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				10 Paket	170.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	250.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	150.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				5 Paket	570.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PAJAK DAERAH	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				10 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.525.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1000 Laporan	25.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Asano	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				30 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				50 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	10.831.686.420,00						-	0,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	5.150.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit</i>				1 Unit	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			<i>Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara</i>				20 Unit	150.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>				2 Dokumen	4.000.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	5.581.686.420,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				5 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)</i>				5 Dokumen	3.881.686.420,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA	
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				5 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA	
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan</i>				30 Dokumen	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA	
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA	
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				5 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	1.000.000.000,00						-	0,00		
	1.02.03.3.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA	
	1.02.03.3.02.0009	Penyediaan pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan															
			<i>Jumlah pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan yang tersedia</i>				30 Unit	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA	
		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						693.369.055.000,00								750.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						693.369.055.000,00							750.000.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						676.369.055.000,00							750.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	48.869.055.000,00						-	750.000.000,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.300.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				6 Dokumen	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				5 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	28.069.055.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				5.390 Orang/Bulan	27.369.055.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.300.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	700.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				15 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.600.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.100.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				44 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	132.000.000.000,00						-	0,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	128.000.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0072	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air														
			<i>Jumlah insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun</i>				1 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>				5 KM	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			<i>Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun</i>				1,5 KM	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0098	Pembangunan Kanal Banjir														
			<i>Panjang Kanal Banjir yang Dibangun</i>				10 KM	100.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun</i>				0,5 KM	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku														
			<i>Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun</i>				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.000.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun</i>				0.100 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi</i>				0.100 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				0.100 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI FISIK	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	7.500.000.000,00						-	0,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-			-	7.500.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>				1 Dokumen	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun</i>				5 Liter/Detik	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-			-	1.000.000.000,00						-	0,00	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-			-	1.000.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	3.000.000.000,00						-	0,00	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-	-			-	3.000.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														
			<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi</i>				2 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	4.000.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	-	-			-	4.000.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>				10 Sistem Drainase Perkotaan	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>				1 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-			-	118.000.000.000,00						-	0,00	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.1.01.0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun</i>				1 Unit	25.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														
			<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi</i>				500 SR	75.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.3.02	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	-	-			-	18.000.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.3.02.0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar														
			<i>Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar</i>				30 Unit	18.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	20.000.000.000,00						-	0,00	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-			-	20.000.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala</i>				2 Bangunan Gedung	20.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	332.000.000.000,00						-	0,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	332.000.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				30 KM	60.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>				38 KM	150.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan														
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>				2 Jembatan	20.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>				2 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>				33 KM	100.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>				25 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	10.000.000.000,00						-	0,00	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-			-	10.000.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih</i>				500 Orang	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya</i>				1 Lembaga	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						17.000.000.000,00							0,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	15.000.000.000,00						-	0,00	
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	15.000.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi</i>				20 Unit Rumah	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun</i>				20 Unit Rumah	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	2.000.000.000,00						-	0,00		
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-	-			-	2.000.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman</i>				5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman															
			<i>Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman</i>				2 Lokasi	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							4.657.858.792,00							22.258.452.600,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.657.858.792,00							22.258.452.600,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4.657.858.792,00							22.258.452.600,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.657.858.792,00						-	14.258.452.600,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	188.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		98.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				6 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	266.760.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	9.442.452.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				138 Orang/Bulan	236.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		9.357.452.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	120.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	470.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				138 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	831.098.792,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.158.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	3.098.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				6 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				3 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				20 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel					20 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	880.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					27 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					8 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2 Unit	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	1.045.000.000,00						-	5.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	700.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	3.250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														
			<i>Jumlah SDM Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				5 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia</i>				50 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			<i>Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</i>				4 laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>				2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-	-			-	250.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	1.450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			<i>Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>				1 laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	-			-	95.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS</i>				1 laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	955.000.000,00						-	2.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	-	-			-	855.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	2.400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran														
			<i>Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran														
			<i>Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal</i>				1 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi</i>				10 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait</i>				40 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-			-	100.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								13.657.462.950,00							28.270.178.900,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.645.462.950,00							28.252.178.900,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						13.645.462.950,00							28.252.178.900,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	11.645.462.950,00						-	18.452.178.900,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				6 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.397.452.600,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	14.116.178.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				138 Orang/Bulan	9.357.452.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.036.178.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			-				-	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	520.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				138 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				8 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	834.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.566.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				6 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				3 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				17 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				11 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	2.000.000.000,00						-	9.800.000.000,00	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	800.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	3.700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														
			<i>Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>				1 Kawasan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			<i>Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana</i>				20 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana														
			<i>Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani</i>				1 Kegiatan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														
			<i>Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			<i>Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana</i>				100 Keluarga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana</i>				20 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	450.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	2.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi														
			<i>Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis</i>				30 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	550.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	3.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>				50 Keluarga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan</i>				1 Kegiatan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi														
			<i>Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal</i>				1 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)</i>				1 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah														
			<i>Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen yang dilegalkan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana														
			<i>Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			<i>Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun</i>				6 kabupaten/kota	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	NON URUSAN														
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						18.466.898.080,00							5.145.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.335.000.000,00							3.975.000.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						17.335.000.000,00							3.975.000.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	15.585.000.000,00						-	1.780.000.000,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	225.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	225.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				7 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.050.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	65.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				250 Orang/Bulan	14.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				5 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	500.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				250 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				50 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	220.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	250.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	200.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				25 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	220.000.000,00						-	250.000.000,00	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	20.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	200.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi</i>				40 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				40 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi</i>				40 Keluarga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi</i>				5 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-			-	20.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	-	-			-	20.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														
			<i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota</i>				10 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	950.000.000,00						-	1.295.000.000,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	-	-			-	220.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	305.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	10.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	10.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	10.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	10.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	10.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	10.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas														
			<i>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	10.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	20.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	10.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	10.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar</i>				5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	-			-	280.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	340.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														
			<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	20.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	100.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	20.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	20.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	20.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	20.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	20.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak														
			<i>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	10.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	10.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	10.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	10.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti														
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	10.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</i>				60 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-			-	320.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	390.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	20.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	10.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	20.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	20.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	10.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	10.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	10.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	10.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	10.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			<i>Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-			-	130.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		260.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				40 Orang	10.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				40 Orang	10.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				40 Orang	10.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				40 Orang	10.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				40 Orang	10.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				40 Orang	10.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				40 Orang	10.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak														
			<i>Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi</i>				40 Orang	10.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				40 Orang	10.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal</i>				40 Orang	20.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA</i>				40 Dokumen	20.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	270.000.000,00						-	270.000.000,00	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	-	-			-	20.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														
			<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi</i>				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal														
			<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi</i>				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	250.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				100 Keluarga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota</i>				30 Keluarga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	170.000.000,00						-	210.000.000,00	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-	-			-	170.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	210.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi</i>				200 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi</i>				200 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi</i>				6 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			-	120.000.000,00						-	120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	-			-	120.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	120.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>				6 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>				1 Makam	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.131.898.080,00							1.170.000.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						1.131.898.080,00							1.170.000.000,00	
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	360.000.000,00						-	360.000.000,00	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	-	-			-	180.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	180.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional														
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-	-			-	170.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	170.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-	-			-	10.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	170.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	170.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-	-			-	110.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	20.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	260.000.000,00						-	260.000.000,00	
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	20.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0002	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-	-			-	140.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	140.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan</i>				5 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-			-	211.898.080,00						-	250.000.000,00	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	-	-			-	211.898.080,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	250.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain														
			<i>Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun</i>				10 Dokumen	111.898.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM							12.065.972.675,00						16.832.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.915.972.675,00							16.482.000.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						4.329.972.675,00							8.182.000.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.742.472.675,00						-	2.982.000.000,00	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	32.573.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-	-	78.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	12.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-		63.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	140.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-	-	285.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				220 Orang/Bulan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				5 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				6 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	132.899.675,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	435.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				220 Paket	32.899.675,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				50 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				150 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	931.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				15 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				3 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		26.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				20 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	507.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	728.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				5 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				5 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		108.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	190.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	345.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-			-	84.000.000,00						-	150.000.000,00	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	84.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>				2 Dokumen	84.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	300.000.000,00						-	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n</i>				25 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	953.500.000,00						-	1.850.000.000,00	
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	153.500.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>				40 Orang	153.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.04.3.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	800.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.04.3.01.0007	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah OAP Yang Diberdayakan melalui Kegiatan Kewirausahaan</i>				40 Orang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	800.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online</i>				30 Perusahaan	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online</i>				30 Perusahaan	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Biak Kota, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Sentani, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				20 Perkara	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														
			<i>Jumlah Penetapan UMP</i>				1 Surat Keputusan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
6.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-			-	450.000.000,00						-	700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	450.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)</i>				50 Perusahaan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														
			<i>Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan</i>				2 Kasus	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3</i>				50 Perusahaan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						7.586.000.000,00							8.300.000.000,00	
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-			-	199.000.000,00						-	0,00	
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	199.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>				25 Unit Usaha	199.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-			-	599.000.000,00						-	0,00	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	599.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>				25 Unit Usaha	599.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-			-	660.000.000,00						-	750.000.000,00	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	660.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				90 Orang	660.000.000,00	Kab. Jayapura, Kemtuk Gresi, Bring	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-			-	1.198.000.000,00						-	1.375.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	1.198.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.375.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>				6 Unit Usaha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		575.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>				245 Keluarga	499.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya</i>				100 Unit Usaha	199.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
5.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-			-	3.430.000.000,00						-	3.900.000.000,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	3.430.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	3.900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i>				150 Unit Usaha	630.000.000,00	Kab. Jayapura, Kemtuk Gresi, Bring	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan</i>				250 Orang	2.000.000.000,00	Kab. Jayapura, Kemtuk Gresi, Bring	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		2.300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil														
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i>				165 Unit Usaha	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-			-	1.500.000.000,00						-	2.275.000.000,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-	-			-	1.500.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		2.275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				45 Unit Usaha	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		2.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum</i>				175 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						150.000.000,00							350.000.000,00		
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						150.000.000,00							350.000.000,00		
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	150.000.000,00						-	350.000.000,00		
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	
	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi															
			<i>Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan</i>				16 Orang	150.000.000,00	Kab. Keerom, Senggi, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA							4.227.074.675,00							1.800.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.227.074.675,00							1.800.000.000,00		
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						3.462.174.675,00							1.400.000.000,00		
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	994.700.000,00						-	0,00		
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				60 Orang/ Bulan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	210.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	381.980.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	1.400.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	-	-			-	700.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi</i>				1 Kebijakan	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	-	-			-	470.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	470.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah pengelola organisasi masyarakat/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</i>				60 Orang	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</i>				60 Lembaga	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-			-	230.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi</i>				50 Lembaga	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/L estari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi</i>				60 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	407.474.675,00						-	0,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	230.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi</i>				2 Dokumen	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	177.474.675,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat</i>				40 Orang	177.474.675,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</i>				60 Layanan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-			-	0,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	200.000.000,00						-	0,00	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi</i>				2 perangkat daerah	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	460.000.000,00						-	0,00	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	360.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0004	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi</i>				2 Kegiatan	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi</i>				30 Layanan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						764.900.000,00							400.000.000,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	84.900.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	84.900.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				10 Laporan	84.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	190.000.000,00						-	0,00	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	190.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0006	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal</i>				4 Dokumen	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	490.000.000,00						-	400.000.000,00	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	300.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal</i>				1 dokumen Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gurabesi	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	190.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
			<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>				50 Organisasi	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	0,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota														
			<i>Jumlah fasilitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN								49.635.660.606,00							60.297.665.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.500.000.000,00							2.500.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						1.500.000.000,00							2.500.000.000,00	
1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.02.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik														
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	800.000.000,00						-	1.250.000.000,00	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	0,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			<i>Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-			-	600.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-	-	650.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal														
			<i>Rencana Kebutuhan Pangan Lokal</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			<i>Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>				30 Ton	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>				30 Ton	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-		500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-	-	500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			<i>Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-		500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-			-	250.000.000,00						-	750.000.000,00	
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-	-	750.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
			<i>Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-		250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-	450.000.000,00						-	500.000.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	450.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			<i>Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				50 Sertifikat	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			0				10	0,00	-	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	-	-		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						48.135.660.606,00							57.797.665.800,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						48.135.660.606,00							57.797.665.800,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	34.972.665.800,00						-	35.147.665.800,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	32.662.665.800,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	32.662.665.800,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				456 Orang/Bulan	32.662.665.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		32.662.665.800,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	110.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.180.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				35 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		535.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	320.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	2.450.000.000,00							2.250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			<i>Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	2.350.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	2.150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			<i>Jumlah Sertifikat Benih</i>				35 Sertifikat	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		650.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>				2 laporan	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	5.612.994.806,00						-	14.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	5.612.994.806,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	14.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			<i>Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani</i>				1 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			<i>Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara</i>				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>				5 Unit	12.994.806,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		5.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				750 Ha	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		5.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura														
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan														
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-		-		250.000.000,00						-	250.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-		-		250.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				250 Ha	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-		-		100.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			<i>Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	4.750.000.000,00						-	6.000.000.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	1.250.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	2.500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														
			<i>Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				3 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			<i>Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya</i>				80 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	3.500.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	3.500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>				2 Kelompok	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-			-	0,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			<i>Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi</i>				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT						10.143.158.182,00							10.895.600.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.143.158.182,00							10.895.600.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						10.143.158.182,00							10.895.600.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	8.880.158.182,00						-	9.390.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	102.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.059.958.182,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	6.260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				86 Orang/Bulan	6.009.958.182,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		6.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				80 Dokumen	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				17 Laporan	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	24.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	290.200.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	316.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	60.200.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		60.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	100.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				86 Orang	50.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.720.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.934.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		510.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	102.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	50.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	430.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	300.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		310.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	222.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				15 Unit	50.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	50.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	250.000.000,00						-	291.000.000,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-			-	250.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	291.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.04.1.01.0021	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	460.000.000,00						-	551.000.000,00	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	460.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		551.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya</i>				1 Lembaga	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>				9 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				9 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
4.	2.13.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA	-	-			-	301.000.000,00						-	361.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.06.3.01	Pengembangan Data/Informasi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.06.3.01.0001	Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat</i>				45 Orang	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.06.3.01.0002	Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.06.3.02	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	-	-			-	51.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	61.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.06.3.02.0001	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional</i>				1 Laporan	1.000.000,00	-	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.06.3.02.0002	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengembangan Teknologi Tepat Guna</i>				3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.06.3.03	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.06.3.03.0001	Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.13.08	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA	-	-			-	252.000.000,00						-	302.400.000,00	
	2.13.08.3.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua	-	-			-	250.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.08.3.01.0002	Penyediaan Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua														
			<i>Jumlah Unit Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.08.3.01.0006	Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.08.3.01.0011	Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat														
			<i>Jumlah Wirausaha Pemula di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Diidentifikasi dan Mengikuti Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung</i>				30 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.08.3.02	Pemberdayaan Orang Asli Papua	-	-			-	2.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	2.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.08.3.02.0001	Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT	
	2.13.08.3.02.0002	Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT	
		DINAS PERHUBUNGAN							70.000.000.000,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							70.000.000.000,00							0,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							70.000.000.000,00							0,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						-	21.200.000.000,00						-	0,00	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.200.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1.200.000.000,00	-	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.120.934.400,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				186 Orang/Bulan	13.120.934.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.250.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				30 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				20 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				15 Paket	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.329.065.600,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				300 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				10 Laporan	829.065.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.300.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				30 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				50 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	17.400.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-	-			-	1.500.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	14.100.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia</i>				0 Unit	12.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>				2 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>				3 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-			-	1.800.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B														
			<i>Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B</i>				1 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			<i>Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)</i>				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			<i>Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>				2 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-			-	17.300.000.000,00						-	0,00	
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-			-	300.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</i>				3 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-			-	17.000.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun</i>				2 Unit	17.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	-	-			-	14.100.000.000,00						-	0,00	
	2.15.04.3.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	-	-			-	100.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.04.3.01.0005	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara yang Tersedia</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.15.04.3.02	Pembangunan Bandar Udara	-	-			-	11.000.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.04.3.02.0002	Pembangunan Bandar Udara															
			<i>Jumlah bandar udara yang terbangun</i>				1 Unit	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.04.3.02.0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara															
			<i>Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun</i>				3 Unit/Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.04.3.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan	-	-			-	3.000.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.04.3.03.0001	Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara															
			<i>Jumlah rekomendasi penetapan lokasi bandar udara</i>				1 Dokumen	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							57.902.841.400,00							57.938.400.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						57.902.841.400,00							57.938.400.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						57.802.801.400,00							57.838.300.000,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	6.502.801.400,00						-	6.537.900.000,00	
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.865.868.400,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	5.900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				100 Orang/ Bulan	5.865.868.400,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		5.900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	84.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				100 Paket	84.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		84.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	122.965.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	123.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	0,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	10.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		10.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				14 Laporan	112.965.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		113.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	348.368.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	349.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				14 Laporan	348.368.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		349.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	81.600.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	81.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				21 Unit	81.600.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		81.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-			-	800.000.000,00						-	800.200.000,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	800.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	800.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik														
			<i>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan</i>				10 Permohonan	400.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		400.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i>				10 Media	400.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		400.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	50.500.000.000,00						-	50.500.200.000,00	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	50.500.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	50.500.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah</i>				5 Aplikasi	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		500.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>				25 perangkat daerah	50.000.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		50.000.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						100.040.000,00							100.100.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	100.040.000,00						-	100.100.000,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	100.040.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	100.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan</i>				3 Dokumen	100.040.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA							34.727.959.650,00						40.626.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						34.427.959.650,00							40.316.000.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						34.427.959.650,00							40.316.000.000,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	27.827.959.650,00						-	30.866.000.000,00	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	182.959.650,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	210.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		60.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	62.959.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		70.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				10 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.090.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.110.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/Bulan	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.000.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		60.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				10 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	510.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	560.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				300 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				10 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		160.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.335.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.616.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		310.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				10 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		26.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				10 Paket	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		170.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				10 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		360.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.750.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.020.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.520.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.170.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.280.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				10 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		160.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				10 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.100.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	14.520.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.570.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				15 Unit	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				11 Unit	14.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.000.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-			-	1.000.000.000,00						-	1.350.000.000,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	-			-	900.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.250.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya</i>				30 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi														
			<i>Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda</i>				25 Persentase	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>				30 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</i>				30 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	100.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda														
			<i>Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda</i>				10 Persentase	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	5.300.000.000,00						-	7.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	350.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha														
			<i>Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan</i>				10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi														
			<i>Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia</i>				10 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	-			-	2.150.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	2.750.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			<i>Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga</i>				170 Orang	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		2.500.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi</i>				10 Kegiatan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														
			<i>Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara</i>				3 Kegiatan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	-			-	1.750.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.250.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah														
			<i>Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi</i>				200 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			<i>Jumlah penerima Penghargaan olahraga</i>				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
			<i>Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)</i>				50 Pelatda	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi														
			<i>Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi</i>				5 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi														
			<i>Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan</i>				80 Orang	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.000.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	1.100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	1.200.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi</i>				10 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.100.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.3.05	Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	150.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.3.05.0001	Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi</i>				10 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		150.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	300.000.000,00						-	400.000.000,00	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	400.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi														
			<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				30 Organisasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi														
			<i>Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas</i>				30 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.04.1.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan														
			<i>Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan</i>				5 Organisasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	X	NON URUSAN						300.000.000,00							310.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						300.000.000,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	210.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				10 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				150 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		160.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	100.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						24.790.071.530,00							28.138.460.960,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						22.291.037.125,00							24.380.126.555,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						22.291.037.125,00							24.380.126.555,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	13.546.326.555,00						-	14.770.126.555,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.030.597.755,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	12.030.597.755,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				164 Orang/ Bulan	10.980.597.755,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		11.980.597.755,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				5 Laporan Dokumen	28.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		28.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				20 Laporan	21.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		21.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	800.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	810.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				400 Paket	640.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		640.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				19 Orang	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		170.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.238.988.800,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.407.288.800,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				22 Paket	427.771.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		430.771.600,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				600 Paket	35.667.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		45.667.200,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1450 Laporan	140.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		180.850.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				300 Laporan	634.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	444.240.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	472.240.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				5372 kwh Laporan	172.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		172.240.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	272.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	32.500.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				14 Unit	32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-			-	1.700.000.000,00						-	2.560.000.000,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan</i>				0 Objek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>				80 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara</i>				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-			-	1.200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				1100 , 500 Objek	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina</i>				200 Orang	150.000.000,00	-	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.3.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.3.01.0004	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-			-	1.050.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.050.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i>				100 Orang	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			<i>Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				1100 Lembaga	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-			-	729.484.530,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-			-	729.484.530,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan</i>				300 Orang	208.545.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah</i>				5 Unit	520.939.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-			-	1.323.771.040,00						-	1.450.000.000,00	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-			-	800.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	850.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan</i>				3 Objek	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>				5 Objek	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-			-	523.771.040,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				150 Orang	523.771.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-			-	3.941.455.000,00						-	4.100.000.000,00	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	-	-			-	3.941.455.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	4.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya</i>				60 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum</i>				3 Unit	3.441.455.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.150.700.000,00							3.360.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						2.150.700.000,00							3.360.000.000,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	0,00	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Kegiatan Berita Acara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-			-	1.000.200.000,00						-	1.310.000.000,00	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-	-			-	300.200.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi</i>				8 Lokasi	300.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi														
			<i>Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan</i>				350 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0008	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar														
			<i>Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi</i>				50 Usaha Pariwisata	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.3.05	Penetapan rencana induk pariwisata di wilayah provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.3.05.0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Wilayah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Wilayah Provinsi</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-			-	100.000.000,00						-	200.000.000,00	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				500 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-			-	600.000.000,00						-	1.300.000.000,00	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik														
			<i>Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik</i>				100 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah														
			<i>Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah</i>				90 Lembaga	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	450.500.000,00						-	550.000.000,00	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	-	-			-	250.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>				100 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	200.500.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>				30 Orang	200.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	X	NON URUSAN						348.334.405,00							398.334.405,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						348.334.405,00							398.334.405,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	348.334.405,00						-	398.334.405,00	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	348.334.405,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	398.334.405,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				15 Orang	348.334.405,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		398.334.405,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH						11.495.945.885,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.495.945.885,00							0,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5.368.253.885,00							0,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	300.000.000,00						-	0,00	
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-			-	4.618.253.885,00						-	0,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	4.068.253.885,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya</i>				1 Perpustakaan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan</i>				10 Eksemplar	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			<i>Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>				25 Perpustakaan	247.437.640,00	Kab. Supiori, Supiori Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi</i>				40 Orang	510.496.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi</i>				4 Layanan	450.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit														
			<i>Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan</i>				15 Perpustakaan	700.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			<i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan</i>				2000 Eksemplar	510.319.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			<i>Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK</i>				10 Perpustakaan	600.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			<i>Jumlah Data dan informasi Perpustakaan</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan</i>				25 Perpustakaan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	550.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus</i>				3 Lokus	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan</i>				3 Perpustakaan	250.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	-			-	450.000.000,00						-	0,00	
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan</i>				150 Entry	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah														
			<i>Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan</i>				150 Naskah	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			<i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi</i>				300 Eksemplar	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.3.04	Penetapan kebijakan pelestarian koleksi provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.3.04.0001	Penyusunan Kebijakan Bidang Perpustakaan tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Kebijakan Pelestarian Koleksi yang disusun tingkat Provinsi Papua</i>				4 Kebijakan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						6.127.692.000,00							0,00	
1.	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	3.813.000.000,00						-	0,00	
	2.24.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	310.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	205.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				0 Orang/Bulan	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				3 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				3 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	20.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				18 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				30 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				27 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
							-	968.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	518.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				13 Unit	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				70 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-			-	2.064.692.000,00						-	0,00	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	-	-			-	1.020.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi														
			<i>Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi</i>				120 Arsip	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														
			<i>Jumlah Daftar Arsip Dinamis</i>				1500 Arsip	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis</i>				5 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan</i>				9 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	-	-			-	320.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis														
			<i>Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi</i>				0 Arsip	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.02.0006	Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis														
			<i>jumlah arsip yang di akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi</i>				100 Arsip	320.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	-	-			-	350.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Yapen Selatan, Serui Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.3.06	Pengawasan kearsipan di provinsi	-	-			-	374.692.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.3.06.0001	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi														
			<i>Jumlah perangkat daerah provinsi yang dilakukan pengawasan</i>				41 Instansi	374.692.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-			-	250.000.000,00						-	0,00		
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	-	-			-	250.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun															
			<i>Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>				5000 Arsip	250.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	-	-			-	0,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang															
			<i>Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan</i>				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							35.197.669.460,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						35.197.669.460,00							0,00		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						35.197.669.460,00							0,00		
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	9.583.169.460,00						-	0,00		
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan</i>				1 Berita Acara	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu														
			<i>Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu</i>				1 Subtansi	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.958.169.460,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				157 Orang/Bulan	5.808.169.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	550.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			<i>Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan</i>				5 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				8 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.025.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	550.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				10 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-			-	4.200.500.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-			-	1.500.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			<i>Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola</i>				200 Ha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi</i>				400 Ha	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan														
			<i>Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan</i>				10 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-			-	2.300.500.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				20 Orang	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>				5 Kelompok	300.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.3.05	Pencadangan kawasan konservasi	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.3.05.0001	Pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Luasan pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang teridentifikasi dan terinventarisasi</i>				500 Ha	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	8.500.000.000,00						-	0,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-			-	5.200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			<i>Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>				7 Unit	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-			-	3.300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia</i>				4 Unit	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			<i>Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana</i>				4 Layanan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	6.300.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-			-	4.300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				10 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut</i>				30 Unit	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia</i>				4 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-			-	2.000.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				15 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-			-	2.814.000.000,00						-	0,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-			-	2.814.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan														
			<i>Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan</i>				25 Hari Operasi	700.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan														
			<i>Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat</i>				3 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan</i>				10 Kelompok Masyarakat	1.614.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-			-	3.800.000.000,00						-	0,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.3.04	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.3.04.0001	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri														
			<i>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri</i>				2 Unit Usaha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.3.05	Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri	-	-			-	1.000.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.3.05.0001	Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri														
			<i>Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya</i>				4 Sampel	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.3.07	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	-	-			-	2.500.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.3.07.0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar														
			<i>Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya dan dimanfaatkan</i>				15 unit	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN						11.000.000.000,00							14.939.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						11.000.000.000,00							14.939.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						11.000.000.000,00							14.939.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.424.000.000,00						-	3.339.000.000,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	500.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	750.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		750.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	80.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	80.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		80.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.650.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	544.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	624.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	520.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		24.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	235.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				70 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		175.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	5.376.000.000,00						-	7.250.000.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	330.000.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			0				10	0,00	-	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sertifikat Benih</i>				10 Sertifikat	250.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan														
			<i>Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan</i>				75000 Anakan	1.000.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njutan	-		1.700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji</i>				10000 Gram	1.000.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-			-	750.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>				1 laporan	750.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-			-	2.046.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	2.800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi</i>				1 laporan	1.296.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		2.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar</i>				1 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	-	-			-	0,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan														
			0				10	0,00	-	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	-	-			-	0,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
			<i>Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain</i>				1 Dosis	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	800.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	800.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			0				10	0,00	-	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan														
			<i>Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>				1 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	1.150.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	750.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			<i>Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			<i>Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan</i>				1 Wilayah	750.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			<i>Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	350.000.000,00						-	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-			-	350.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>				100 Ha	350.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
6.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-			-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi</i>				2 Laporan	300.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
7.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	600.000.000,00						-	700.000.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														
			<i>Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				6 Unit	300.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			0				10	0,00	-	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>				3 Kelompok	300.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-			-	0,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi</i>				1 Unit	0,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP								62.266.582.377,00							13.770.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.000.000.000,00							1.160.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1.000.000.000,00							1.160.000.000,00	
1.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	200.000.000,00						-	220.000.000,00	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-	-			-	100.000.000,00				5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi														
			<i>jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-			-	100.000.000,00				5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	350.000.000,00						-	450.000.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	350.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	450.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		60.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi														
			<i>Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		60.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			<i>Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan</i>				1 Kegiatan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	0,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan</i>				5 Titik	0,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	50.000.000,00						-	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati														
			<i>Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati</i>				5 Orang	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya</i>				2 Dokumen	0,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				4 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				2 Badan Usaha	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat</i>				100 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>				2 Lembaga	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	100.000.000,00						-	0,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>				10 Entitas	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi</i>				1 Perkara	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	100.000.000,00						-	160.000.000,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	160.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														
			<i>Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan</i>				1000 Ton	50.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		60.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi														
			<i>Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						61.266.582.377,00							12.610.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						61.266.582.377,00							12.610.000.000,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	55.979.812.800,00						-	6.385.000.000,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	390.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	425.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		15.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		160.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan</i>				1 Berita Acara	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	50.274.812.800,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	15.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				429 Orang/Bulan	50.254.812.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	65.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	75.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	550.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	620.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				20 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.650.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.890.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				15 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		160.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				15 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		310.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	3.28.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				4 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	500.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	250.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.150.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.265.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	450.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		495.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				20 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			-				-	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		220.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	3.28.02	PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	-	-			-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
	3.28.02.3.05	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	60.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.02.3.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah dokumen rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang disusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	2.986.769.577,00						-	3.285.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	160.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		160.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	210.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		210.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	450.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	485.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani														
			<i>Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		210.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	1.536.769.577,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.700.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				10 Ha	586.769.577,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				5 Ha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi</i>				5 Ha	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	450.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	510.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>				5 Ha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		210.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			<i>Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)</i>				3 Operasi	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan</i>				5 Unit Managemen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			<i>Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	-	-			-	500.000.000,00						-	600.000.000,00	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	-			-	500.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.1.03.0001	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.1.03.0002	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst														
			<i>Luas Kerusakan Karst yang Tertangani</i>				5 Ha	0,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			<i>Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola</i>				5 Ha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
5.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	1.250.000.000,00						-	1.460.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	1.250.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.460.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				5 Kelompok	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas</i>				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			<i>Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya</i>				3 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			<i>Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya</i>				25 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		260.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	-	-			-	0,00						-	220.000.000,00	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	220.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS</i>				25 Orang	0,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS</i>				2 Lembaga	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.	3.28.08	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	-	-			-	500.000.000,00						-	600.000.000,00	
	3.28.08.3.04	Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat	-	-			-	500.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.08.3.04.0003	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat														
			<i>Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Yang Dilaksanakan</i>				3 Lembaga MHA	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.08.3.04.0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan</i>				3 Lembaga MHA	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA														
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						750.000.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						750.000.000,00							800.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	425.000.000,00						-	425.000.000,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	250.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	250.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				5 Ha	250.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	75.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	75.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		75.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	100.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan</i>				5000 Batang	100.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	250.000.000,00						-	300.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	250.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				2 Kelompok	250.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA
3.	3.28.08	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	-	-			-	75.000.000,00						-	75.000.000,00	
	3.28.08.3.04	Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat	-	-			-	75.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	75.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA
	3.28.08.3.04.0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan</i>				1 Lembaga MHA	75.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		75.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA
								700.000.000,00							720.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						700.000.000,00							720.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						700.000.000,00							720.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	400.000.000,00						-	420.000.000,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	200.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				5 Ha	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		200.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	110.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		110.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	110.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan</i>				5000 Batang	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				2 Kelompok	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI
3.	3.28.08	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	-	-			-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.28.08.3.04	Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI
	3.28.08.3.04.0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan</i>				2 Lembaga MHA	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI
								1.650.000.000,00							1.650.000.000,00	
CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.650.000.000,00							1.650.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1.650.000.000,00							1.650.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	1.050.000.000,00						-	1.050.000.000,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	500.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	500.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				10 Ha	500.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		500.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	200.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		200.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	350.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	350.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan</i>				15000 Batang	350.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM	
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	300.000.000,00						-	300.000.000,00		
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan															
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				3 Kelompok	300.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM	
3.	3.28.08	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	-	-			-	300.000.000,00						-	300.000.000,00		
	3.28.08.3.04	Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM	
	3.28.08.3.04.0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat															
			<i>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan</i>				3 Lembaga MHA	300.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM	
								600.000.000,00							600.000.000,00		
								CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA								600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						600.000.000,00							600.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						600.000.000,00							600.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	150.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				3 Ha	150.000.000,00	Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		150.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	50.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		50.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	100.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan</i>				5000 Batang	100.000.000,00	Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA	
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	150.000.000,00						-	150.000.000,00		
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan															
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				2 Kelompok	150.000.000,00	Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA	
3.	3.28.08	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	-	-			-	150.000.000,00						-	150.000.000,00		
	3.28.08.3.04	Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA	
	3.28.08.3.04.0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat															
			<i>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan</i>				2 Lembaga MHA	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA	
		KPHP UNIT XVII WAROPEN							1.200.000.000,00							1.330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.200.000.000,00							1.330.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1.200.000.000,00							1.330.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	850.000.000,00						-	980.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	210.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	400.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				10 Ha	300.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		400.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			<i>Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan</i>				7500 Batang	150.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	200.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				3 Kelompok	200.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		200.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
3.	3.28.08	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	-	-			-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.28.08.3.04	Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.08.3.04.0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan</i>				2 Lembaga MHA	150.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
		KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA						850.000.000,00							990.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						850.000.000,00							990.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						850.000.000,00							990.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	550.000.000,00						-	690.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	165.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		55.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			<i>Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara</i>				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	55.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		55.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	250.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				5 Ha	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		250.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			<i>Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan</i>				5000 Batang	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				3 Kelompok	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
3.	3.28.08	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	-	-			-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.28.08.3.04	Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.08.3.04.0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan</i>				3 Lembaga MHA	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
		KPHP UNIT XXIII SARMI						1.000.000.000,00							1.210.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.000.000.000,00							1.210.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1.000.000.000,00							1.210.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	700.000.000,00						-	890.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	175.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	190.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok</i>				1 Unit	75.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		80.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			<i>Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara</i>				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	75.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	80.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		80.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	250.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	400.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				8 Ha	250.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		400.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			<i>Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan</i>				5000 Batang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	210.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				3 Kelompok	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		210.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
3.	3.28.08	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	-	-			-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	3.28.08.3.04	Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.08.3.04.0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan</i>				2 Lembaga MHA	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
		KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN						1.900.000.000,00							2.110.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.900.000.000,00							2.110.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1.900.000.000,00							2.110.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	1.300.000.000,00						-	1.510.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	375.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	380.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok</i>				1 Unit	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		80.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			<i>Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara</i>				5 Unit	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	75.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	80.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		80.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	500.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				5 Ha	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	400.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			<i>Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan</i>				22500 Batang	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		400.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				5 Kelompok	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
3.	3.28.08	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	-	-			-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
	3.28.08.3.04	Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.08.3.04.0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan</i>				5 Lembaga MHA	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
		KPHL UNIT XX BIAK						2.533.387.500,00							2.870.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.533.387.500,00							2.870.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2.533.387.500,00							2.870.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	1.533.387.500,00						-	1.870.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	425.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	580.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok</i>				1 Unit	75.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		80.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			<i>Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara</i>				10 Unit	350.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	75.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	80.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		80.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	533.387.500,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	600.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				10 Ha	533.387.500,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		600.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	110.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		110.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	500.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			<i>Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan</i>				18000 Batang	400.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		500.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	500.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	500.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				5 Kelompok	500.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
3.	3.28.08	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	-	-			-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
	3.28.08.3.04	Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat	-	-			-	500.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	500.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.08.3.04.0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan</i>				5 Lembaga MHA	500.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
		KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA						900.000.000,00							1.080.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						900.000.000,00							1.080.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						900.000.000,00							1.080.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	600.000.000,00						-	780.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	165.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		55.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			<i>Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara</i>				5 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	55.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		55.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			<i>Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan</i>				7500 Batang	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				2 Kelompok	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
3.	3.28.08	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	-	-			-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.28.08.3.04	Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.08.3.04.0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan</i>				2 Lembaga MHA	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
		KPHP UNIT XXIX KEEROM						800.000.000,00							920.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						800.000.000,00							920.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						800.000.000,00							920.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	500.000.000,00						-	620.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	105.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		55.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			<i>Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara</i>				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		50.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	55.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		55.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	200.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	50.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		50.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			<i>Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan</i>				5000 Batang	100.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				2 Kelompok	150.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
3.	3.28.08	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	-	-			-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.28.08.3.04	Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.08.3.04.0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan</i>				2 Lembaga MHA	150.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
		UPTD KEBUN RAYA KOYA KOSO						349.997.580,00							360.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						349.997.580,00							360.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						349.997.580,00							360.000.000,00	
1.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	349.997.580,00						-	360.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	-	-			-	349.997.580,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	360.000.000,00	UPTD KEBUN RAYA KOYA KOSO
	2.11.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya														
			<i>Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi</i>				150 Ha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		210.000.000,00	UPTD KEBUN RAYA KOYA KOSO
	2.11.04.1.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola</i>				5 Unit	149.997.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		150.000.000,00	UPTD KEBUN RAYA KOYA KOSO
		BPTH PAPUA						1.300.000.000,00							1.400.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.300.000.000,00							1.400.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1.300.000.000,00							1.400.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	1.300.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	1.300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.400.000.000,00	BPTH PAPUA
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih														
			<i>Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan</i>				3 Sertifikat	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	BPTH PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih														
			<i>Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan</i>				2 Sertifikat	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	BPTH PAPUA
	3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit														
			<i>Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan</i>				5 Sertifikat	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	BPTH PAPUA
	3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih														
			<i>Luas Sumber Benih yang Dibangun</i>				5 Ha	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	BPTH PAPUA
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			<i>Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan</i>				100000 Batang	350.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	BPTH PAPUA
		UPTD TAMAN BURUNG DAN TAMAN ANGGREK						649.996.000,00							650.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						649.996.000,00							650.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						649.996.000,00							650.000.000,00	
1.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	649.996.000,00						-	650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	-	-			-	649.996.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	650.000.000,00	UPTD TAMAN BURUNG DAN TAMAN ANGGREK
	2.11.04.1.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragam Hayati														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola</i>				5 Unit	349.996.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		350.000.000,00	UPTD TAMAN BURUNG DAN TAMAN ANGGREK
	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya														
			<i>Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi</i>				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		300.000.000,00	UPTD TAMAN BURUNG DAN TAMAN ANGGREK
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA						399.999.360,00							400.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						399.999.360,00							400.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						399.999.360,00							400.000.000,00	
1.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	399.999.360,00						-	400.000.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	399.999.360,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	400.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>				1 Dokumen	399.999.360,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		400.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP								32.812.774.821,00							41.485.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.374.994.521,00							3.705.000.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						2.374.994.521,00							3.705.000.000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	680.539.521,00						-	805.000.000,00	
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	95.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	105.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	380.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	205.539.521,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				8 Unit	205.539.521,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-			-	225.000.000,00						-	300.000.000,00	
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	-	-			-	225.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi</i>				1 Dokumen	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-			-	0,00						-	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	490.000.000,00						-	800.000.000,00	
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	490.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	800.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				100 Pelaku Usaha	245.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah</i>				0 Kegiatan usaha	245.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	979.455.000,00						-	1.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	979.455.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				5 Kegiatan usaha	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				8 Kegiatan usaha	279.455.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				50 Pelaku Usaha	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.3.02	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	-	-			-	0,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.06.3.02.0001	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi														
			<i>Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi</i>				1 Helpdesk	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						30.437.780.300,00							37.780.000.000,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						30.437.780.300,00							37.780.000.000,00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	14.947.780.300,00						-	18.180.000.000,00	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	160.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.627.780.300,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	16.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				150 Orang/Bulan	13.627.780.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	675.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	1.410.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	476.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	8.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	-	-			-	110.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			<i>Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	60.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.3.04	Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	-	-			-	0,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.3.04.0001	Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.3.09	Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)	-	-			-	50.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.3.09.0001	Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)														
			<i>Jumlah dokumen keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) yang telah terinventarisasi</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.3.12	Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	-	-			-	0,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.3.12.0001	Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi														
			<i>Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-			-	135.000.000,00						-	800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	-	-			-	35.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)</i>				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
4.	3.29.04	PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	-	-			-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.04.3.11	Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua	-	-			-	0,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.04.3.11.0001	Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua Yang Dilaksanakan</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.04.3.12	Pengawasan dan Distribusi BBM pada SPBU, APMS dan Sejenisnya di Provinsi Papua	-	-			-	0,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.04.3.12.0001	Pengawasan BBM pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan BBM Pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya Yang Dilaksanakan</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
5.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-			-	15.245.000.000,00						-	16.800.000.000,00	
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.06.1.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan.</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-			-	15.245.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	16.800.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			<i>Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu</i>				500 Keluarga	1.250.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Poom, Humbe Awai	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			<i>Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>				1 Laporan	245.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan															
			<i>Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>				4 Unit	13.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		15.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	3.29.06.1.06.0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							34.126.291.195,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						34.126.291.195,00							0,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						7.535.460.095,00							0,00		
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	20.000.000,00						-	0,00		
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				6 Dokumen	20.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-			-	600.000.000,00						-	0,00	
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			0				20	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	-	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.3.05	Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.3.05.0001	Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan														
			<i>Jumlah Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Yang Dilaksanakan</i>				1 Kegiatan	200.000.000,00	-	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	1.000.000.000,00						-	0,00	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	-	-			-	1.000.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi</i>				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	2.915.460.095,00						-	0,00	
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	815.460.095,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>				1 Laporan	515.460.095,00	Kab. Jayapura, Kemtuk Gresi, Bring	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>				1 laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-			-	1.500.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				3 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-	-			-	600.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.1.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi														
			0				10	100.000.000,00	-	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0005	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi														
			<i>Jumlah laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-			-	1.300.000.000,00						-	0,00	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	-			-	1.300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>				6 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal</i>				50 Pelaku Usaha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>				3 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i>				2 Produk	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	1.300.000.000,00						-	0,00	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.000.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan</i>				50 Sertifikat	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														
			<i>Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan</i>				100 laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-			-	400.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri</i>				5 UMKM	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>				5 UMKM	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri														
			<i>Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri</i>				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						26.590.831.100,00							0,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	22.240.031.100,00						-	0,00	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				5 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	18.975.831.100,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				271 Orang/Bulan	18.943.831.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				5 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				5 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	160.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.547.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				20 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				2 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	495.200.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	355.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	3.450.800.000,00						-	0,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	-			-	1.600.800.000,00			-	4. Pertumb uhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>				1 Dokumen	200.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				3 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>				3 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.3.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	-			-	1.850.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.3.01.0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Diberikan</i>				10 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.3.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi</i>				3 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.3.01.0010	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-			-	900.000.000,00						-	0,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-			-	900.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-KHUSUS [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas															
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		SEKRETARIAT DAERAH							132.008.727.350,00							185.036.120.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							132.008.727.350,00							185.036.120.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							132.008.727.350,00							185.036.120.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						-	132.008.727.350,00							185.036.120.000,00	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	32.008.727.350,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	32.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/Bulan	32.008.727.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		32.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	22.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		22.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	15.975.620.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	16.925.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	238.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		238.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	425.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	8.200.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.500.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	7.111.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.611.120.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.276.300.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.276.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				30 Unit	5.276.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.276.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	26.500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	27.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	24.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	52.248.080.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	75.448.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	52.248.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		75.448.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	0,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	11.282.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.282.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	-	-			-	0,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	16.081.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.081.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN						48.970.689.540,00							55.408.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						47.970.689.540,00							54.308.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						47.970.689.540,00							54.308.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	27.970.689.540,00						-	33.308.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	273.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		153.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	230.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	245.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				12 Laporan	130.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		140.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				6 Laporan	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		105.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	700.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				3 Paket	400.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				3 Orang	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.900.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.365.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		310.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.100.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	2.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.300.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		550.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		105.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.350.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		9.655.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				3 Laporan	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		155.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	8.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.200.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	1.200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.300.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	11.100.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	14.420.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				20 Unit	400.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		510.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				25 Unit	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.100.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4 Unit	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		210.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	8.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.000.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	1.500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.600.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	-	-			-	2.440.689.540,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.500.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</i>				15 Laporan	2.440.689.540,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.500.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-			-	20.000.000.000,00						-	21.000.000.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	20.000.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	21.000.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				10 Laporan	20.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		21.000.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	X	NON URUSAN						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.000.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.000.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.100.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				6 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.100.000.000,00	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
		BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							8.066.335.650,00						9.850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						8.066.335.650,00							9.850.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						8.066.335.650,00							9.850.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	3.000.000.000,00						-	3.950.000.000,00	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.400.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.300.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.700.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	500.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	150.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				12 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	-	-			-	1.000.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-			-	1.000.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.100.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan</i>				1 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		650.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-			-	3.100.000.000,00						-	3.800.000.000,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-	-			-	1.700.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.850.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		550.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum</i>				1 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		750.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		550.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-			-	1.400.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.950.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>				10 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	466.335.650,00						-	450.000.000,00		
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	-			-	466.335.650,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	450.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</i>				1 Dokumen	466.335.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
5.	4.01.09	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA	-	-			-	500.000.000,00						-	550.000.000,00		
	4.01.09.3.02	Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus	-	-			-	500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	550.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.09.3.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		550.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						8.911.463.300,00								10.291.350.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						8.911.463.300,00							10.291.350.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						8.911.463.300,00							10.291.350.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	6.211.463.300,00						-	7.461.350.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	530.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				5 Laporan	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	160.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	170.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1` Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				50 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				0 Laporan	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	30.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	20.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	430.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	486.350.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	0,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		56.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				100 Orang	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				20 Orang	0,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.626.463.300,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.180.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	30.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	250.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		70.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.326.463.300,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	70.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		80.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	500.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	825.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	975.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	75.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		75.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	550.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		700.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.600.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				12 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		800.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-			-	2.700.000.000,00						-	2.830.000.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	1.000.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Laporan	400.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-			-	800.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	630.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	900.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	900.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa</i>				50 Orang	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BIRO HUKUM						9.397.512.715,00							0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						9.397.512.715,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						9.397.512.715,00							0,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	3.740.000.000,00						-	0,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				6 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.150.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	-	-			-	5.657.512.715,00						-	0,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	-	-			-	4.157.512.715,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			<i>Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			<i>Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun</i>				1 Dokumen	57.512.715,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			<i>Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota					1 Dokumen	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-			-	1.500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum					30 Kasus	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
		BIRO ORGANISASI						6.580.041.000,00							12.278.316.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						6.580.041.000,00							12.278.316.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						6.580.041.000,00							12.278.316.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.180.041.000,00						-	4.628.316.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	60.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	7.500.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	55.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	7.500.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	7.500.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	180.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	500.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	180.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Wahno	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.694.111.800,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.587.316.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				17 Paket	287.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				5 Paket	10.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	24.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		24.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	277.786.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		850.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1320 Dokumen	15.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				56 Paket	121.125.800,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		211.416.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				200 Laporan	210.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		312.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	749.200.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.759.900.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
							-	116.600.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		176.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	72.750.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	43.850.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		66.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	159.329.200,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	250.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				13 Unit	159.329.200,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BIRO ORGANISASI
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	-	-			-	4.400.000.000,00						-	7.650.000.000,00	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-			-	1.950.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.500.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</i>				44 Dokumen	550.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</i>				9 Dokumen	800.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan</i>				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-			-	2.450.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.150.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</i>				1 Dokumen	450.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		800.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		900.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja</i>				1 Laporan	350.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan</i>				1 Dokumen	650.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		900.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						3.000.000.000,00							5.260.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						3.000.000.000,00							5.260.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						3.000.000.000,00							5.260.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.000.000.000,00						-	1.560.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	50.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	40.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		40.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	30.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		30.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	820.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	1.290.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	20.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		40.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		400.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	70.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		700.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	110.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	-			-	350.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	600.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-			-	1.000.000.000,00						-	1.950.000.000,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	550.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	1.050.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		400.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		350.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	450.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	900.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA							250.041.827.114,00							0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						250.041.827.114,00							0,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						250.041.827.114,00							0,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	124.392.510.114,00						-	0,00		
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	547.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	547.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.611.757.690,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				96 Orang	505.939.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	11.768.439.940,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	299.796.340,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	99.655.600,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	2.528.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	520.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	2.637.500.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	5.033.488.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12.665.905.600,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	3.142.500.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	9.023.405.600,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.885.500.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	735.500.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	850.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	3.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	74.921.647.884,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>				100 Orang/ Bulan	73.901.647.884,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>				100 Paket	330.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>				69 Orang	690.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	3.450.600.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>				12 Laporan	3.450.600.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-			-	98.687.907.000,00						-	0,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	-	-			-	2.008.230.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>				5 Dokumen	1.003.300.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda</i>				5 Dokumen	1.004.930.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	532.860.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>				1 Dokumen	110.940.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>				1 Dokumen	98.700.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>				1 Dokumen	97.020.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD</i>				1 Dokumen	97.500.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>				1 Dokumen	128.700.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	4.579.940.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>				12 Laporan	783.960.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>				12 Laporan	847.200.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>				12 Laporan	782.640.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>				12 Laporan	782.640.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>				1 Dokumen	313.500.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>				1 Dokumen	721.200.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>				1 Dokumen	348.800.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	5.988.440.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD</i>				1 Dokumen	3.400.440.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>				30 Orang	1.152.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>				15 Orang	648.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>				1 Dokumen	198.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>				1 Dokumen	590.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	27.296.000.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>				3 Laporan	2.034.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				3 Dokumen	25.262.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	301.200.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			<i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>				1 Dokumen	301.200.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	57.981.237.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>				12 Dokumen	15.664.737.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>				1 Dokumen	1.620.500.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>				12 Dokumen	39.690.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus</i>				1 Dokumen	1.006.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	4.02.03	PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	-	-			-	26.961.410.000,00						-	0,00	
	4.02.03.3.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	-	-			-	26.961.410.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.03.3.01.0001	Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama</i>				1 Dokumen	25.959.160.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.03.3.01.0004	Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua</i>				1 Dokumen	1.002.250.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH						44.774.867.570,00							44.774.867.570,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						44.774.867.570,00							44.774.867.570,00	
	5.01	PERENCANAAN						42.274.867.570,00							42.274.867.570,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	16.585.425.000,00						-	16.585.425.000,00	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	345.875.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	345.875.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	45.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		45.875.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.585.550.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	12.585.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				178 Orang/Bulan	12.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	155.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		155.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	614.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	614.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	414.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		414.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	740.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	740.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.050.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.050.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				4 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	430.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	430.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	820.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	820.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				10 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	12.489.443.515,00						-	12.489.443.515,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	6.689.443.515,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.689.443.515,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</i>				1 Dokumen	420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		420.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>				2 Berita Acara	530.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		530.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>				2 Berita Acara	1.739.443.515,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.739.443.515,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi</i>				2 Berita Acara	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>				2 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	1.800.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>				1 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi</i>				100 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>				100 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>				2 Buku	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	3.500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah														
			<i>Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya</i>				10 Kerja Sama	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				1 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	13.199.999.055,00						-	13.199.999.055,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	4.999.999.350,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.999.999.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				3 Dokumen	1.599.999.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.599.999.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	599.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		599.999.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				1 Laporan	199.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		199.999.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>				1 Laporan	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	3.200.000.000,00			-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	3.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>				1 Laporan	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	4.999.999.705,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	4.999.999.705,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				2 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	499.999.745,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		499.999.745,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	499.999.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		499.999.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						2.500.000.000,00							2.500.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-			-	2.500.000.000,00						-	2.500.000.000,00	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	1.150.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi</i>				1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	600.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	650.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</i>				1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>				1 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET							249.703.533.933,00						249.703.533.933,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						249.703.533.933,00							249.703.533.933,00	
	5.02	KEUANGAN						249.703.533.933,00							249.703.533.933,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	79.931.632.960,00						-	79.931.632.960,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.180.240.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.180.240.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.052.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.052.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	442.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		442.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	442.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		442.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.242.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.242.140.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	42.917.063.100,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	42.917.063.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/Bulan	41.760.243.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		41.760.243.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	514.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		514.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	642.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		642.420.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.313.500.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.313.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.313.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.313.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	3.004.400.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.004.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				340 Paket	723.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		723.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				35 Orang	2.280.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.280.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	19.748.272.190,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	19.748.272.190,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				50 Paket	4.178.814.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.178.814.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				150 Paket	1.592.448.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.592.448.990,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				80025 Paket	1.935.759.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.935.759.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				100 Dokumen	333.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		333.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				0 Laporan	4.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	6.785.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.785.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				0 Dokumen	723.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		723.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	108.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		108.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	108.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		108.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.975.057.770,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.975.057.770,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1600 Laporan	2.529.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.529.960.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				0 Laporan	1.467.097.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.467.097.770,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	978.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		978.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.685.099.900,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.685.099.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				88 Unit	2.633.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.633.620.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				60 Unit	305.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		305.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				100 Unit	1.027.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.027.080.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	719.199.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		719.199.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	165.726.500.973,00						-	165.726.500.973,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	21.813.710.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	21.813.710.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	1.525.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.525.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				0 Dokumen	3.453.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.453.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				0 Dokumen	1.916.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.916.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				60 Dokumen	1.740.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.740.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														
			<i>Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				60 Dokumen	607.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		607.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				60 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				60 Dokumen	4.242.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.242.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				60 Dokumen	3.094.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.094.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>				0 Dokumen	3.132.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.132.480.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi</i>				0 Orang	501.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		501.880.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.999.695.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.999.695.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota</i>				9 Laporan	1.831.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.831.375.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				9 Laporan	1.146.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.146.370.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah</i>				9 Dokumen	1.021.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.021.950.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	5.999.808.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.999.808.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>				0 Dokumen	668.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		668.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>				0 Dokumen	532.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		532.560.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>				0 Dokumen	645.184.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		645.184.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>				0 Dokumen	806.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		806.240.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>				0 Laporan	1.307.254.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.307.254.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>				0 Dokumen	852.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		852.576.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>				0 Dokumen	565.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		565.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				0 Orang	622.194.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		622.194.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	6.500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>				1 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				3 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				3 Laporan	2.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi</i>				8 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>				10 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	120.551.487.973,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	120.551.487.973,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				1 Laporan	112.551.487.973,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		112.551.487.973,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				1 Laporan	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi</i>				1 Laporan	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	6.861.800.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.861.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi</i>				0 Orang	6.861.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.861.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	4.045.400.000,00						-	4.045.400.000,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	4.045.400.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.045.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				1 Dokumen	649.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		649.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				2 Dokumen	800.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		800.650.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	294.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		294.870.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	1.099.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.099.980.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						48.147.877.260,00							109.334.850.054,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						48.147.877.260,00							109.334.850.054,00	
	5.02	KEUANGAN						48.147.877.260,00							109.334.850.054,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	43.222.771.780,00						-	91.452.191.214,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	327.250.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	327.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	28.185.179.300,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	40.840.313.936,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				231 Orang/Bulan	28.185.179.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.690.313.936,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	432.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.238.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				13 Dokumen	432.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		930.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				8 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		357.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		951.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	429.816.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.028.850.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				460 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		705.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		996.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan</i>				10 Orang	111.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		122.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				184 Orang	318.816.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.154.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	6.644.761.780,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	9.703.552.065,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				14 Paket	86.737.581,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				9 Paket	959.378.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.174.372.065,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	902.785.969,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.122.117.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	16.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		32.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	4.679.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.429.375.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		445.288.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.812.610.500,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	20.143.083.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				10 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		760.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				117 Paket	410.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		850.871.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				268 Unit	1.189.210.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.991.727.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	212.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.140.485.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.263.301.400,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.126.542.213,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	278.155.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.074.238.695,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	1.529.046.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.512.270.200,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.456.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.540.033.318,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.127.852.800,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.971.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				73 Unit	1.341.856.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.674.830.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	487.376.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		564.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				141 Unit	298.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		442.040.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				9 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.290.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	4.925.105.480,00						-	17.882.658.840,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	4.925.105.480,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	17.882.658.840,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	212.311.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.081.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				5 Laporan	79.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		656.822.840,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				5 Laporan	143.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		628.375.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>				1 Laporan	2.655.650.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.688.395.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen Ketetapan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		526.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.</i>				5 Laporan	952.544.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.664.040.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</i>				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				1 Dokumen SSPD	213.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		805.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti</i>				1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		975.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				8 Laporan	540.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.555.676.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				1 Laporan	128.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		951.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						11.870.786.555,00							15.250.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						11.870.786.555,00							15.250.000.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						11.870.786.555,00							15.250.000.000,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	9.745.786.555,00						-	11.700.000.000,00	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.450.000.000,00			-	-	-	-	8.300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				140 Orang/Bulan	7.300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan Kualitas SDM	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				4 Laporan	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	694.786.555,00			-	-	-	-	1.180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	65.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	-	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	160.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	-	-		180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	-	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				4 Laporan	159.786.555,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	-	-		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	250.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.081.000.000,00			-	-	-	-	1.210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	-	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	-	-		600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	576.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	-	-		600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	210.000.000,00			-	-	-	-	360.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	60.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	-	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	-	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	-	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	2.125.000.000,00						-	3.550.000.000,00	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	950.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>				1 Dokumen	350.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			<i>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</i>				1 Lembaga	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	450.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	525.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN				300 Orang	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			<i>Jumlah Fungsional ASN yang Dibina</i>				75 Orang	75.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	200.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>				100 Orang	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</i>				100 Orang	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</i>				100 Orang	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR						11.767.242.242,00							12.872.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						11.767.242.242,00							12.872.000.000,00	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						11.767.242.242,00							12.872.000.000,00	
1.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	9.367.242.242,00						-	10.672.000.000,00	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	154.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	250.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	144.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.243.242.242,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.260.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				92 Orang/Bulan	7.003.242.242,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	130.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	110.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	520.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	280.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	292.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		102.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	120.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.000.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.050.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		550.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	140.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				100 Unit	140.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	2.400.000.000,00						-	2.200.000.000,00	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	800.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>				600 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	1.600.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	1.700.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota															
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				220 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		350.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga															
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		350.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan															
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1060 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan															
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA							8.235.001.922,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8.035.001.922,00							0,00		
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN						8.035.001.922,00							0,00		
1.	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	5.985.001.922,00						-	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.390.068.280,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				78 Orang/ Bulan	4.360.068.280,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	70.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				78 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	979.933.642,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				20 Paket	20.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				20 Paket	20.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				30 Paket	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				20 Paket	114.933.642,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1000 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	370.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	210.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	105.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				42 Unit	75.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				40 Unit	30.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
2.	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	-	-			-	2.050.000.000,00						-	0,00	
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	-	-			-	1.000.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah</i>				2 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			<i>Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-	-			-	1.050.000.000,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan</i>				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan</i>				1 Dokumen	350.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara</i>				1 Dokumen	350.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.02.1.02.0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	-	-			-	0,00			-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.03.0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	X	NON URUSAN													0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						200.000.000,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	200.000.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				78 Paket	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH								6.000.000.000,00							13.470.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.000.000.000,00							13.470.000.000,00	
	5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG						6.000.000.000,00							13.470.000.000,00	
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	4.945.000.000,00						-	10.870.000.000,00	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	425.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.940.346.900,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	210.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				50 Orang/Bulan	1.922.846.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	360.153.100,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				60 Orang	300.153.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	770.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		750.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		750.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.367.500.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.207.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	297.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.700.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	73.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	73.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	-	-			-	1.055.000.000,00						-	2.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	-			-	1.055.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan</i>				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		800.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat</i>				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		325.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan</i>				1 Laporan	255.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		525.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	-		800.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		INSPEKTORAT							34.849.784.645,00							34.849.792.645,00	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							34.849.784.645,00							34.849.792.645,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						34.849.784.645,00							34.849.792.645,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	10.661.935.645,00						-	10.661.935.645,00	
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.492.473.600,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.492.473.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				92 Orang/Bulan	6.492.473.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.492.473.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	741.644.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	741.644.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				90 Orang	741.644.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		741.644.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.538.918.045,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.538.918.045,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	67.747.900,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		67.747.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	506.160.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		506.160.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	300.220.145,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.220.145,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	54.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		54.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				4 Laporan	480.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		480.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	1.130.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.130.790.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	616.300.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	616.300.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	10.700.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.700.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	151.200.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		151.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	454.400.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		454.400.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	272.600.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	272.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	119.500.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		119.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	53.100.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		53.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-			-	16.580.540.000,00						-	16.580.548.000,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	14.467.660.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	14.467.668.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				62 Laporan	3.610.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.610.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				79 Laporan	3.306.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.306.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>				1 Laporan	62.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		62.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>				48 Laporan	2.449.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.449.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota</i>				13 Laporan	2.496.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.496.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														
			<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>				1 Kesepakatan	258.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		258.268.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>				60 Dokumen	2.284.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.284.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>				1 Laporan	462.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		462.080.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>				21 Laporan	1.650.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.650.800.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														
							-	7.607.309.000,00							7.607.309.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	1.984.374.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.984.374.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>				1 Rekomendasi	1.984.374.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.984.374.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	5.622.935.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.622.935.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>				1 Perangkat Daerah	521.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		521.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				28 Kegiatan	5.101.935.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.101.935.000,00	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						21.500.000.000,00							0,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						15.980.000.000,00							0,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						15.980.000.000,00							0,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	6.380.000.000,00						-	0,00	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningka tan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagam an dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningka tan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagam an dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningka tan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagam an dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	2. Peningka tan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagam an dan keagamaan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				70 Orang	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.390.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	170.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	700.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				10 Unit	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	2.500.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	2.500.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				350 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i>				5 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	2.700.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	2.700.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>				1 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				350 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				350 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	1.000.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	1.000.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				350 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	1.200.000.000,00						-	0,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	1.200.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				350 Orang	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	2.200.000.000,00						-	0,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	2.200.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				630 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				250 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				9 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	NON URUSAN						5.520.000.000,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						5.520.000.000,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	5.520.000.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.500.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				65 Orang/Bulan	5.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Orientasi MRP</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.01.0005	Penyusunan Peraturan MRP														
			<i>Jumlah Peraturan MRP yang Disusun</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.01.0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan														
			<i>Jumlah Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan</i>				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.01.0007	Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.01.0008	Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	-	-			-	6.656.137.542,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0001	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota														
			<i>Jumlah Pimpinan dan Anggota yang Menerima Hak Keuangan</i>				42 Orang	3.256.137.542,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0002	Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0003	Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi dan Pergub														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasidan Pergub</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0004	Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0005	Penyusunan Peraturan MRP														
			<i>Jumlah Peraturan MRP yang Disusun</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan														
			<i>Jumlah Laporan Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan yang Dilaksanakan</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0007	Pelaksanaan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdikan kepada Masyarakat Papua														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdikan kepada Masyarakat Papua</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0008	Pelaksanaan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0009	Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0010	Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerukunan kehidupan Beragama</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	9.02.02.3.02.0011	Monitoring Pemberdayaan Perempuan														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pemberdayaan Perempuan				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0012	Peningkatan Kapasitas MRP														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP				1 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X	NON URUSAN						31.550.000.000,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						31.550.000.000,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	31.550.000.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.800.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				60 Orang/ Bulan	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.050.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				5 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan</i>				3 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				49 Orang	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	15.100.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				5 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				2 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	3.000.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

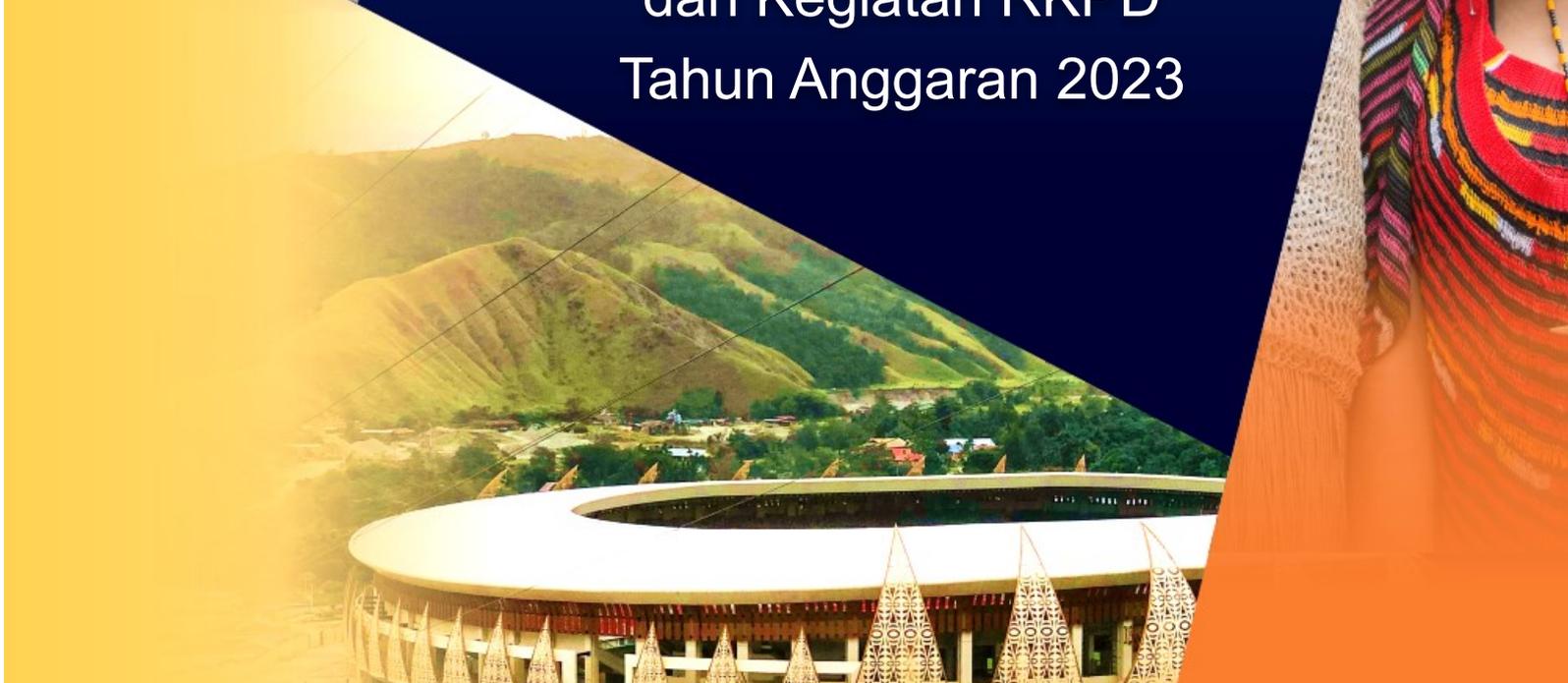
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				10 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				15 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
J U M L A H								2.668.919.486.449,00							1.777.511.005.187,00	



Lampiran 2

Evaluasi Pelaksanaan Program
dan Kegiatan RKPD
Tahun Anggaran 2023



Capaian program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) URUSAN PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Arsip Daerah

Dinas Pendidikan dan perpustakaan memiliki 3 urusan yaitu urusan Pendidikan, Kearsipan dan Perpustakaan, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 190.112.311.998,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 176.973.016.868,00** atau **93,09 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, terdiri dari sub kegiatan:**
 - (1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, indikator kinerja terbangunnya pagar sekolah dan asrama sekolah khusus Papua Go global 2 unit dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, indikator kinerja Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik dengan target 100 Peserta Didik) tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (3) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, indikator kinerja Terlaksananya pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 14 Guru, tingkat capaian kinerja sebesar 98,65 persen
 - (4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas, indikator kinerja Jumlah Sekolah Menengah Khusus yang terfasilitasi (Lembaga) sebanyak 13 lembaga, dengan tingkat capaian kinerja 97,44 persen
 - (5) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, indikator kinerja terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, target kinerja 50 Guru/Orang dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,62 persen
- **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri dari sub kegiatan:**
 - (1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, indikator kinerja terbangunnya sarana dan prasarana dengan target 1 dokumen, dengan tingkat capaian kinerja 99,25 persen

- (2) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, indikator kinerja Terlaksananya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik sebanyak 50 peserta didik, dengan tingkat capaian kinerja 94,95persen
 - (3) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, indikator kinerja Terlaksananya Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, target 1 kurikulum dengan tingkat capaian kinerja 99,34 persen
 - (4) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, indikator kinerja Jumlah siswa yang mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik, target kinerja 10 Peserta Didik dengan realisasi kinerja 10 peserta dan tingkat capaian kinerja 99,27 persen
 - (5) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan indikator kinerja Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Khusus yang terfasilitasi target kinerja 10 Lembaga, dengan realisasi 10 lembaga dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,77 persen
 - (6) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan, indikator kinerja Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS, target kinerja sekolah, dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Indikator Kinerja Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun, target kinerja 11 unit dengan realisasi kinerja 11 unit atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja 96,73 persen
 - (2) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus, Indikator kinerja Terlaksananya Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus, target kinerja 1 kurikulum dengan realisasi kinerja 1 kurikulum atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja 99,9 persen
 - (3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus, Indikator kinerja Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus, target kinerja 7 lembaga dengan realisasi kinerja 7 lembaga atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,85 persen
 - (4) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, Indikator kinerja Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, Target Kinerja 1 Dokumen dengan realisasi kinerja 1 dokumen atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen
 - (5) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, Indikator kinerja Terselenggaranya bimbingan teknis dan Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, target kinerja 100 orang dengan realisasi kinerja 100 orang atau 100 persen dan Tingkat capaian kerja sebesar 99,1 persen

B. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus,** terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus, Indikator kinerja Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus 1 Dokumen, dengan realisasi kinerja 1 dokumen atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja 98,95 persen

C. PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Perhitungan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Indikator kinerja Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen), target keluaran 45 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,56 persen

Permasalahan dan Solusi:

- **Permasalahan**

Tingkat capaian kinerja sub kegiatan terlihat cukup memuaskan namun ada beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi pada tahun yang akan datang , antara lain:

1. Jumlah tenaga pendidik PAUD dengan kuota kegiatan peningkatan mutu dan kualitas pendidik PAUD masih belum terpenuhi;
2. Belum semua penduduk usia 3-6 tahun terdata secara baik yang disebabkan oleh budaya, tingkat kesejahteraan dan medan/lokasi yang sangat sulit dijangkau;
3. Belum semua lembaga penyelenggara pendidikan PAUD memenuhi standar pelayanan pendidikan bermutu dan berkarakter.
4. Masih banyaknya anak-anak Papua yang belum terlayani pendidikan secara maksimal
5. Implementasi pembangunan pendidikan di Kabupaten/Kota seringkali berbenturan dengan kebijakan pemimpin setempat;
6. Peralihan kewenangan SMA-SMK yang kembali ke Kabupaten/Kota serta pemekaran Provinsi Papua menjadi 3 (tiga) provinsi baru.

- **Solusi:**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Dengan memberi pelatihan peningkatan mutu serta bantuan pendidikan PAUD yang melibatkan peserta dari kabupaten/kota;
2. Pendataan secara rinci dilakukan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota, disertai dengan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Badan Pusat Statistik Papua dan LSM yang berkompeten;
3. Sosialisasi dan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat edukasi kepada
4. pemimpin lembaga dan tenaga pendidik sangat membantu dalam pengembangan lembaga penyelenggara pendidikan PAUD di kabupaten/kota.
5. Perlu adanya koordinasi secara kontinyu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengenai daerah yang membutuhkan layanan pendidikan disertai dengan sarana prasarana dan tenaga pendidik yang bermutu dan berkualitas. agar semua anak-anak Papua dapat menikmati layanan pendidikan;
6. Pendataan secara rinci dilakukan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota. disertai dengan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Badan Pusat Statistik Papua dan LSM yang berkompeten;
7. Mensinkronkan data program dan kegiatan pendidikan antara Provinsi danKab./Kota;

2) URUSAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Urusan kesehatan untuk OPD Dinas Kesehatan melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 107.289.932.304,00** dengan total penyerapan **Rp. 93.067.056.954** atau 86,74 persen. Alokasi dana tersebut untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya, indikator kinerja Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun, indikator target (unit), dengan realisasi kinerja unit dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,68 persen
 - (2) Pengembangan Rumah Sakit, indikator kinerja Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal

- 1:1000 (Unit), target indikator 5 unit, dengan realisasi kinerja 5 unit atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen
- (3) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, indikator kinerja Pengadaan bahan kimia untuk menunjang pemeriksaan (Tahun), indikator target 1 unit, dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,5 persen
 - (4) Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan (Unit), indikator target 10 unit dengan realisasi kinerja 10 unit atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja 99,27 persen
 - (5) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (unit), indikator target 10 unit dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,91 persen
 - (6) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya, indikator kinerja Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen), indikator target 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja 98,85 persen
 - (7) Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya, indikator kinerja Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (paket), indikator target .. paket dengan realisasi kinerja 100 persen atau 99,94 persen
- **Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana, indikator kinerja Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang), target kinerja 100 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,90 persen
 - (2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen), target kinerja 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 79,49 persen

- (3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen), target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 70, 99 persen
- (4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,75
- (5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,90 persen
- (6) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 32, 47 persen
- (7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,86 persen
- (8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,92 persen
- (9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,86 persen
- (10) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,87 persen
- (11) Pengelolaan Surveilans Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (12) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota

(Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,81 persen

- (13) Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,81 persen

- **Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 97 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,00 persen

- **Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit, indikator kinerja Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit) target kinerja 1 unit dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 85,32 persen
- (2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit) target kinerja 1 unit dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,59 persen

B. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) target kinerja 30 orang dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,23 persen

- **Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang), target kinerja .. orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,76 persen

C. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK, indikator kinerja Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana), target kinerja sarana dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,90 persen
 - (2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik, indikator kinerja Jumlah Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,90 persen

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,92 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 78,16 persen
- **Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,92 persen

Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura

Urusan kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 268.698.905.129,00** dengan total penyerapan **Rp. 252.255.017.980,00 atau 93,88 persen**. Alokasi dana tersebut untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, indikator kinerja Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit), target output 1 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,35 persen
 - (2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, indikator kinerja Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Paket) target output 4 paket dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen
 - (3) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit), target output 4 paket dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,51 persen
 - (4) Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Paket), target output 5 paket dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,82 persen
 - (5) Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya), indikator kinerja Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan (Paket), target output 6 paket dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,72 persen

- (6) Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit, Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Paket) target output 3 paket dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen
- (7) Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Paket), target output 8 paket dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,31 persen
- (8) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya, indikator kinerja Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Kegiatan), target output 4 kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen
- **Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, indikator Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Kegiatan), target output 2 kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Kegiatan), target output 2 kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan (Orang), target output 20 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

Rumah Sakit Jiwa

Urusan kesehatan untuk Rumah Sakit Jiwa melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 40.819.471.619,00** dengan total penyerapan **Rp. 39.588.313.432,00** atau **96,98** persen. Alokasi dana tersebut untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, indikator kinerja Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Paket), target keluaran target output paket dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya), indikator kinerja Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan (Paket), target output paket dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen
- **Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, indikator kinerja jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, target output dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,93 persen
 - (2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, target kinerja dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,82 persen
 - (3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), indikator kinerja jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

- (4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,93 persen
- (5) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat indikator kinerja umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (6) Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet, indikator kinerja Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan, target output unit, dengan target output sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**
 - (1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, indikator kinerja jumlah rumah sakit yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar, target output unit, dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator kinerja umlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), target output orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen

Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

Urusan kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Abepura melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 126.573.025.795,00** dengan total penyerapan **Rp. 114.604.799.808.31** atau **90,54**

persen. Alokasi dana tersebut untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

• **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, indikator kinerja Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit, target output unit, dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 91,4 persen
- (2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, indikator kinerja, indikator kinerja Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan, target output unit, dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,96 persen
- (3) Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit, indikator kinerja jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan, target output unit, dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,99 persen
- (4) Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya, indikator kinerja Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan, target output unit, dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,47 persen

• **Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, indikator kinerja umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, target output dokumen, dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,47 persen

B. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

• **Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan

- (1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator kinerja umlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), target output dokumen,

dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,47 persen

3) URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (yang bersumber dari dana Otsus dan DTI)

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, perumahan dan Kawasan permukiman mengurus 2 urusan yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 858,296,980,760,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 710,445,999,182,44** atau **82,77 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

- **Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, indikator kinerja Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun, target kinerja 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,18 persen
 - (2) Pembangunan Kanal Banjir, indikator kinerja panjang kanal banjir yang dibangun, target kinerja 0 km, dengan realisasi kinerja sebesar 0 km dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,7 persen

B. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (YANG BERSUMBER DARI DTI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA)

- **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, indikator kinerja Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen), target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,14 persen
 - (2) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan, indikator kinerja Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/Detik), target kinerja 0, dengan realisasi kinerja sebesar 0, dan tingkat capaian kinerja sebesar 75,69 persen
 - (3) Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota, indikator kinerja jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara, target 0. Unit

dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 75,42 persen

C. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

- **Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, indikator kinerja umlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,71 persen

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

- **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen), target kinerja 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,5 persen
- (2) Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, indikator kinerja luas lahan yang tersedia untuk penyelenggaraan jalan, target kinerja 0 M², dengan realisasi kinerja sebesar 0 M² dan tingkat capaian kinerja 100 persen
- (3) Pembangunan Jalan, indikator kinerja Panjang Jalan yang Dibangun, target kinerja 0 km, dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 79,75 persen
- (4) Rekonstruksi Jalan, indikator kinerja Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (KM), target kinerja 0 km, dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 82,61 persen
- (5) Rehabilitasi Jalan, indikator kinerja Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM), target kinerja 0 km, dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 90,92 persen
- (6) Pembangunan Jembatan, Panjang Jembatan yang Dibangun (M), target kinerja 0 M² dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 53,04 persen

E. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

- **Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, indikator kinerja Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang), target kinerja 0 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,20 persen
- (2) Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi, Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,71 persen

F. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

- **Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, indikator kinerja Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, target 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,82 persen

G. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

- **Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman target 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,83 persen
 - (2) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman, indikator kinerja Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Unit Rumah), target kinerja 0 lokasi dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 83,99 persen

4) URUSAN KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA SOSIAL

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp.**

34,329,753,918,00 dengan total penyerapan sebesar **Rp. 30,565,038,884,00** atau **89.03 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENINGKATAN KETENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- **Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, indikator kinerja Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (Laporan), target kinerja 4 laporan dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, indikator kinerja Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan), target kinerja 2 laporan dengan realisasi kinerja 100 persen dan tingkat capaian kinerja 97,59 persen
 - (3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen), target kinerja 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, inidkator kinerja Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Laporan), target kinerja 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,96 persen
- **Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan) target

- kinerja 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,62 persen
- (2) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan, target kinerja 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,83 persen

B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- **Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana), indikator kinerja Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota (Orang), target kinerja 40 orang, dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
- **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, indikator kinerja Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang), target kinerja 60 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen
 - (2) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana, indikator kinerja Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang) target kinerja 50 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, indikator kinerja Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang) target kinerja 50 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,9 persen
- **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana, indikator kinerja Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga

dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dokumen) target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen

- (2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan) target kinerja 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
- (3) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, indikator kinerja Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (keluarga) target kinerja 60 keluarga dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (4) Penanganan Pasca Bencana Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen) target kinerja 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen

C. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

- **Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan) target kinerja 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen

5) URUSAN SOSIAL

Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua

Dinas Sosial Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Papua mengurus 3 urusan yaitu urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 45,301,434,190,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 42,464,871,061,00** atau **93.74 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- **Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang), target kinerja 60 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (2) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Keluarga yang meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Keluarga), target kinerja 30 keluarga dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga), target kinerja 10 lembaga dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti** Terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Penyediaan Permakanan, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 18 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,93 persen
- (2) Penyediaan Sandang, indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang) target kinerja 18 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,59 persen
- (3) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses, indikator kinerja Jumlah orang yang terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang) target kinerja 18 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, indikator kinerja Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 18 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (5) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari, indikator kinerja Jumlah Peserta Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari hari Kewenangan

- Provinsi (Orang), target kinerja 18 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (6) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Dokumen), target kinerja 18 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,24 persen
- **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses, indikator kinerja Jumlah orang yang terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 17 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen
 - (2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di dalam Panti (Dokumen), target kinerja 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyediaan Perumahan, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 38 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,42 persen
 - (2) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses, indikator kinerja Jumlah orang yang terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang) target kinerja 38 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,59 persen
 - (3) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial, indikator kinerja Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 38 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial, indikator kinerja Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 38 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (5) Pemulasaraan, indikator kinerja Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi, target kinerja 3 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

- **Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti,** terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial, indikator kinerja Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual kewenangan Provinsi (Orang) target kinerja 20 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,49 persen

C. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- **Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, indikator kinerja Jumlah Kelurga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Keluarga) target kinerja 30 keluarga dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,6 persen
- (2) Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miski Lintas Kabupaten/ Kota (Keluarga), target kinerja 36 keluarga dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,8 persen

D. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi,** teridri dari sub kegiatan:

- (1) Penyediaan Permakanan, indikator kinerja Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 256 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,6 persen
- (2) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, indikator kinerja Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan provinsi (Orang), target kinerja 33 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

Permasalahan Dan Solusi

1. Permasalahan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada umumnya terdiri dari 26 Kategori/ Kelompok PMKS menurut Kementerian Sosial RI. Untuk Provinsi Papua terdapat 20 Kategori/ Kelompok. Sedangkan yang tertangani hanya 8 (delapan) Kategori/ kelompok PMKS saja, diantaranya adalah: Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Anak Terlantar, Lanjut Usia

Terlantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza, dan Korban Bencana Alam dan Sosial. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari data PMKS tersebut, hal ini diakibatkan oleh data PMKS yang sifatnya fleksibel/ tidak tetap dan berubah-ubah, dan juga kurang mendapat dukungan data yang valid dari Kabupaten/ Kota. Untuk itu dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tersebar dilokasi-lokasi terpencil dan sulit terjangkau oleh pelayanan yang ada;
- b. Kondisi geografis turut serta mendukung sulitnya pemberian pelayanan kepada PMKS seperti di wilayah pegunungan, lembah, pulau terluar serta perbatasan antar negara;
- c. Infrastruktur untuk menjangkau PMKS sebagaimana huruf a dan b diatas belum tersedia;
- d. Kebijakan pemerintah daerah masih sangat terbatas dan baru 2 (dua) Peraturan Daerah (Perda) yang secara langsung terkait dengan PMKS yaitu Peraturan Daerah Khusus Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyandang disabilitas dan Peraturan Daerah Khusus Tahun 2008 tentang Penanganan khusus terhadap suku-suku tertinggal yang mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2021. Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. (Bab XX Pasal 66 ayat (1) “Pemerintah Provinsi memberikan perhatian dan penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku yang terisolasi/ terpencil dan terabaikan di Provinsi Papua”.)

2. Solusi

Memperhatikan permasalahan yang ada, beberapa solusi yang bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah tersebut antara lain:

- a. Kebijakan penganggaran pembangunan manusia secara khusus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum sepenuhnya berpihak atau *Pro Poor*, sehingga dengan kondisi geografis dan penyebaran PMKS setidaknya ditangani dengan pembiayaan yang signifikan baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan;
- b. Mengingat penduduk yang berada di daerah-daerah terpencil masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, maka pemberdayaan berupa pemberian keterampilan bertani dengan menggunakan peralatan pertanian dan bercocok tanam yang baik;
- c. Pelayanan berbasis panti di Papua harus dikembangkan di beberapa Kabupaten atau Wilayah Adat, sehingga pelayanan seperti Lanjut Usia dan anak Terlantar bisa Tertangani secara Terpadu.

II. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) URUSAN TENAGA KERJA

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua mengurus 4 urusan yaitu urusan Tenaga Kerja, Perindustrian, dan perdagangan dan Transmigrasi, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 52,652,055,105,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 47,513,240,667,00** atau **90.24 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

- **Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, indikator kinerja Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang), target kinerja 100 orang dengan realisasi sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,78 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (2) Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja, indikator kinerja Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (LPK), target kinerja 4 LPK dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,76 persen

B. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

- **Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja, indikator kinerja Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya (Orang), target kinerja 20 orang dengan realisasi sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,85 persen

C. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

- **Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial, indikator kinerja Jumlah Perusahaan yang Menyusun

Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online (Perusahaan), target kinerja 10 perusahaan dengan realisasi sebesar 62,5 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

- (2) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, indikator kinerja Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek (Laporan), target kinerja 1 laporan dengan realisasi sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 84,5 persen
 - **Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara), target kinerja 20 perkara dengan realisasi sebesar 81,43 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - **Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), indikator kinerja Jumlah Penetapan UMP (Surat Keputusan), target kinerja 1 surat keputusan dengan realisasi sebesar 66,67 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

D. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- **Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan, indikator kinerja Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) (Perusahaan), target kinerja 50 perusahaan dengan realisasi sebesar 33,33 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, indikator kinerja Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 (Perusahaan), target kinerja 50 perusahaan dengan realisasi sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen

2) URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua

Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) (OPD), target kinerja 3 OPD dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (Dokumen)), target kinerja 2 Dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang tersedia (Dokumen) target kinerja 3 Dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi, target kinerja 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen
- **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik (Orang), target kinerja 50 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen
 - (2) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen), target kinerja 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen

C. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- **Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang tersedia (Dokumen), realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen

D. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- **Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi dan Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

(Organisasi) target kinerja 30 organisasi realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen

- **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Orang), target kinerja 35 orang realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen

E. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- **Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen), target kkinerja 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja 100 persen
- **Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Layanan), target kinerja 7 layanan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,55 persen
- **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi (Dokumen), target kinerja 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

3) PANGAN

Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua mengurus 2 urusan yaitu urusan Pertanian dan urusan Pangan, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 91,462,009,141,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 83,673,899,451,00** atau **91.48 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

- **Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan), target kinerja keluaran 2 laporan dengan realisasi keluaran sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,92 persen

B. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Sertifikat), target kinerja keluaran 30 sertifikat dengan realisasi keluaran sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,35 persen

4) URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mengurus 2 urusan yaitu urusan Lingkungan Hidup dan urusan Kehutanan, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 127,290,532,584,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 116,776,731,512.33** atau **94.43 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

- **Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen (Laporan), target kinerja keluaran 1 laporan, dengan realisasi keluaran sebesar 1 laporan tau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,3 persen

- **Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, Jumlah Dokumen (Laporan), target kinerja keluaran 1 laporan, dengan realisasi keluaran sebesar 1 laporan atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,55 persen

B. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- **Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, indikator kinerja Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi keluaran sebesar 1 dokumen atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,16 persen
 - (2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sector lingkungan hidup yang Dilaksanakan, target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi keluaran sebesar 80,04 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 80,04 persen

C. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

- **Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi keluaran sebesar 1 dokumen atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,91 persen

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

- **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, indikator kinerja Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang), target kinerja keluaran 5 orang dengan realisasi keluaran sebesar 5 orang atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,88 persen

E. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

- **Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari kegiatan:

- (1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan, indikator kinerja Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH (Lembaga), target kinerja keluaran 5 lembaga dengan realisasi keluaran sebesar 5 lembaga atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,88 persen
- (2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Orang), target kinerja keluaran 200 orang dengan realisasi keluaran sebesar 200 orang atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,68 persen

F. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

- **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, indikator kinerja Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (entitas), target kinerja keluaran 3 entitas dengan realisasi keluaran sebesar 3 entitas atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,01 persen

G. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

- **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan, indikator keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan (Dokumen), target kinerja keluaran 2 dokumen dengan realisasi keluaran sebesar 2 dokumen atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,6 persen

H. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

- **Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Dokumen), target kinerja keluaran 2 dokumen dengan realisasi keluaran sebesar 2 dokumen atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,33 persen

I. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI), bersumber dari Dana OTSUS dan DBH

- **Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi, dilaksanakan pada UPTD Kebun Raya Koya Koya Koso**, terdiri dari sub kegiatan:

- (2) Pengelolaan Kebun Raya, indikator kinerja Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi (Ha) target kinerja keluaran 150 Ha dengan realisasi keluaran sebesar 150 Ha 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (3) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya, indikator kinerja Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha), target kinerja keluaran 600 Ha dengan realisasi keluaran sebesar 600 Ha 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

J. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

- **Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi, dilaksanakan pada UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati, indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit), target output 1 unit dengan realisasi kinerja sebesar 30 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 58,47 persen

K. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua

- **Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi, indikator kinerja Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (Dokumen), target output 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

5) URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

- **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan), target kinerja keluaran 5 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

- **Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil, indikator kinerja Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen), target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

- **Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan), target kinerja keluaran 5 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

C. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- **Keigatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dokumen, target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (Laporan), target kinerja keluaran 5 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan, indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Orang), target kinerja keluaran 4 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

D. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

- **Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain indikator kinerja Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain (Dokumen), target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

6) URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 36,003,277,261,00** dengan total

penyerapan sebesar **Rp. 34,496,598,319,00** atau **95.82 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

- **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan**, terdiri dari sub kegiatan

- (1) **Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) **Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (2) **Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa**, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen), target kinerja keluaran 6 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA

- **Kegiatan Pengembangan Data/Informasi**, terdiri dari sub kegiatan

- (1) **Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK**, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi

kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,89 persen

- **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kampung**, terdiri dari sub kegiatan (1) Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna, indikator kinerja Jumlah Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Laporan), target kinerja keluaran 5 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,62 persen

D. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA

- **Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua**, terdiri dari sub kegiatan (1) Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat, **Indikator kinerja** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat (Dokumen), **target kinerja keluaran** 6 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen (2) Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat, indikator kinerja Jumlah Wirausaha Pemula di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Diidentifikasi dan Mengikuti Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung (Dokumen), target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,59 persen

7) URUSAN PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan melaksanakan urusan perhubungan, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 52,123,816,995,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 40,028,012,953,00** atau **76.79 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

- **Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan (1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit), target kinerja keluaran 140 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,43 persen
- **Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**, terdiri dari sub kegiatan

- (1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), indikator kinerja Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,18 persen

B. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

- **Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional, indikator kinerja ketersediaan pelabuhan yang memadai (Unit), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 87 persen

C. PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN

- **Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara, indikator kinerja Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia (Unit), target kinerja keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 46,48 persen

8) URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 23,848,485,300,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 22,642,059,321,00** atau **94.94 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik, indikator kinerja, target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Pelayanan Informasi Publik, indikator kinerja, target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

- **Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, indikator kinerja, target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, indikator kinerja, target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

9) URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

- **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat (Dokumen), target kinerja keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 83,15 persen
 - (2) Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel, indikator kinerja Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel (Unit Usaha), target kinerja keluaran 6 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,07 persen

B. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

- **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi, indikator kinerja Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi (Unit Usaha), target kinerja keluaran 50 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,87 persen
 - (2) Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi, indikator kinerja Jumlah Koperasi yang dapat dinilai tingkat kesehatannya (unit usaha), target kinerja keluaran 50 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,84persen

C. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

- **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, indikator kinerja Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang), target kinerja keluaran 100 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 93,6 persen

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

- **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha, indikator kinerja Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha), target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 78,06 persen
 - (2) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, indikator kinerja Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui

Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga), target kinerja keluaran 150 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

E. PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

- **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, terdiri dari sub kegiatan**
 - (1) Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan, indikator kinerja Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha), target kinerja keluaran 130 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 67,91 persen
 - (2) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan, indikator kinerja Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang), target kinerja keluaran 518 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 83,12 persen

F. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

- **Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, terdiri dari sub kegiatan**
 - (1) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi, indikator kinerja Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit), target kinerja keluaran 90 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 70,01 persen
 - (2) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM, indikator kinerja Jumlah Penyelesaian Perkara bagi pelaku UMKM (unit usaha), target kinerja keluaran 90 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen

10) URUSAN PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua melaksanakan urusan penanaman modal, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 23,356,321,522,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 21,639,200,497,00** atau **92.65 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- **Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, indikator kinerja Tersedianya dana yang dibutuhkan (Rp.515.183.500,-), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,89 persen
- **Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi, indikator kinerja Tersedianya Peta Potensi Investasi di Provinsi Papua (Buku), target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,65 persen

B. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

- **Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Tersedianya Bahan/Materi Promosi yang Up to Date di Provinsi Papua berupa: Buku Peluang Investasi, Brosur PM, Profil Proyek Investasi, Peta Peluang Usaha, Peta Penyebaran Perumahan PMA, PMDN dan Video Digital Promosi PM. (buku, lbr), target kinerja keluaran 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,71 persen
 - (2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Terlaksananya Promosi Dalam dan Luar Negeri (event), target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

C. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- **Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

indikator kinerja Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (), target kinerja keluaran 1000 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,86 persen

- (2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, indikator kinerja Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah (), target kinerja keluaran 17 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,92 persen

D. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- **Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan

- (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, indikator kinerja Tersedianya data perusahaan PMA/PMDN (dokumen), target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,13 persen
- (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 91,14 persen
- (3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, indikator kinerja Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profile dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (Kegiatan Usaha), target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,01 persen

E. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- **Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan

- (1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, indikator kinerja Tersedianya data perusahaan PMA/PMDN (dokumen), target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,68 persen

11) URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Papua melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 47,373,353,596,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 44,629,576,50,00** atau **94.21 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

- **Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan

- (1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen
- (2) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera, indikator kinerja Terlaksananya Penyelenggaraan seleksi pasukan pengibar bendera (peserta), target kinerja keluaran 100 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 93,43 persen
- (3) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen

- **Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan

- (1) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi (Dokumen), target kinerja keluaran 100 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,91 persen

B. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

- **Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**, terdiri dari sub kegiatan

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi, indikator kinerja Terselenggaranya event olahraga bagi para pelajar, target kinerja keluaran 100 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

- (2) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen
- **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Seleksi Atlet Daerah, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen
 - (2) Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science), indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen
 - (3) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi, indikator kinerja Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Kegiatan), target kinerja keluaran 100 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,97 persen
 - (4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen
- **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Standardisasi Organisasi Keolahragaan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan (Dokumen), target kinerja keluaran 100 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,22 persen
 - (2) Pengembangan Organisasi Keolahragaan, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen
 - (3) Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen
 - (4) Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi, indikator kinerja Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan (Organisasi), target kinerja keluaran 100 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

12) URUSAN PERSANDIAN

Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Persandian dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, indikator kinerja, target kinerja keluaran 0 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 0 persen

13) URUSAN KEBUDAYAAN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua melaksanakan dua urusan yakni Kebudayaan dan Pariwisata, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 49,444,367,196,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 47,966,222,425.01** atau **97.01 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

- **Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, indikator kinerja Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi kebudayaan (Orang), target kinerja keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen
 - (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan, indikator kinerja Jumlah film Dokumenter (Paket), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,35 persen
- **Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, indikator kinerja Jumlah Peserta yang mengikuti gita bahana (Orang), target kinerja keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen
 - (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional, indikator kinerja Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia,

Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,15 persen

- (3) Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan, indikator kinerja Jumlah Orang/ Lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan (Sertifikat), target kinerja keluaran 18 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat, indikator kinerja Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina (Cetak buku kamus Indonesia - Ansus) (Buah), target kinerja keluaran 300 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

- **Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional, indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Jumlah Sumber Daya Manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Pelatihan Juri Seni) (Orang), target kinerja keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,78 persen
 - (2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, indikator kinerja Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang di tingkatkan kapasitasnya (Kias Budaya Papua Ke 1) (Kegiatan), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,7 persen

C. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

- **Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah, indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit), target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,13 persen

D. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

- **Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, indikator kinerja Jumlah Objek diduga cagar budaya yang di daftarkan (Objek), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,17 persen
 - (2) Penetapan Cagar Budaya, indikator kinerja Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan (Objek), target kinerja keluaran 4 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,76 persen
- **Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pengembangan Cagar Budaya, indikator kinerja Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan (Objek), target kinerja keluaran 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen
 - (2) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya, indikator kinerja Jumlah tenaga pelestari cagar budaya yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang), target kinerja keluaran 38 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

E. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

- **Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu, indikator kinerja Jumlah Koleksi Museum yang di lakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu (Unit/Kegiatan), target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,1 persen
 - (2) Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman, indikator kinerja Jumlah sumberdaya manusia permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya (Orang), target kinerja keluaran 110 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,2 persen
 - (3) Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum, indikator kinerja Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Pameran Keliling di Kab. Biak Numfor (Kegiatan), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,47 persen

14) URUSAN PERPUSTAKAAN

Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Perpustakaan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

C. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, Indikator kinerja Jumlah Layanan Perpustakaan elektronik yang di kembangkan, target kinerja 2 perpustakaan, dengan realisasi kinerja 2 perpustakaan atau 100persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen
 - (2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi, Indikator kinerja Terasilitasi pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah, Provinsi, target kinerja 1 bangunan, dengan realisasi kinerja 1 bangunan 100persen, tingkat capaian kinerja sebesar 99,95persen
 - (3) Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi, target kinerja Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan, target kinerja 3 eksemplar, dengan realisasi kinerja 3 eksemplar atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,84persen
 - (4) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, Indikator kinerja Terasilitasi Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, target indikator kinerja 3 kegiatan dengan realisasi kinerja 2 kegiatan atau 100 persen, dan tingkat kinerja sebesar 100persen
 - (5) Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi, Indikator kinerja Terselenggaranya Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi, target kinerja 15 orang, dengan realisasi kinerja 15 orang atau 100 persen, dengan tingkat capaian kinerja 96,01persen
 - (6) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi, Indikator kinerja Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Tinggkat Daerah dan Provinsi, target kinerja 60 orang, dengan realisasi 60 orang atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,2persen
 - (7) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, indikator kinerja Terasilitasi Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, target kinerja 3 kegiatan,

dengan realisasi kinerja 3 kegiatan atau 100 persen, dan tingkat capaian kerja sebesar 100persen

- (8) Pengembangan Perpustakaan Deposit, indikator kinerja Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan, target kinerja 1 perpustakaan dengan realisasi kinerja 1 perpustakaan atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98persen
 - (9) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Data dan informasi Perpustakaan, target kinerja 3 dokumen, dengan realisasi kinerja 3 dokumen atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97persen
- **Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat, indikator kinerja Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus, target kinerja 10 lokus, dengan realisasi 2 lokus atau 99,93 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,93persen
 - (2) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, indikator kinerja Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan, target kinerja 2 perpustakaan, dengan realisasi kinerja 2 perpustakaan atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi,** Terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara, indikator kinerja Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi, target kinerja keluaran 200 eksemplar dengan realisasi kinerja sebesar 200 eksemplar atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

C. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi,** Terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis, indikator kinerja Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi, indikator target 200 eksemplar, dengan realisasi kinerja 200 eksemplar atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, indikator kinerja Terciptanya arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan, indikator target 1.000 lembar, dengan ralisasi kinerja 1.000 atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**
 - (1) Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi
- **Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**
 - (1) Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip, indikator kinerja Terciptanya Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan, indikator target 1.000 eksemplar, dengan realisasi fisik kinerja 1.000 atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip, indikator kinerja Jumlah Tenaga Fungsional/Operator Aplikasi SRIKANDI, Indikator target 6 orang dengan realisasi fisik 6 orang atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

E. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi**, dengan sub kegiatan:
 - (1) Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup, indikator kinerja tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan di tingkat Provinsi/Kabupaten , target kinerja 21 Unit dengan realisasi kinerja 21 unit atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,87 persen

F. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**, Terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikemukakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, indikator target jumlah koleks budaya ednis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh perpustakaan daerah tingkat provinsi, target keluaran 200 eksemplar dengan indikator kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

15) URUSAN KEARSIPAN

Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Kearsipan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**, Terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis, indikator kinerja Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi, indikator target 200 eksemplar, dengan realisasi kinerja 200 eksemplar atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

B. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, indikator kinerja Terciptanya arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan, indikator target 1.000 lembar, dengan ralisasi kinerja 1.000 atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100persen
- **Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**
 - (1) Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi
- **Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**
 - (1) Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip, indikator kinerja Terciptanya Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan, indikator target 1.000 eksemplar,

dengan realisasi fisik kinerja 1.000 atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100persen

- (2) Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip, indikator kinerja Jumlah Tenaga Fongisional/Operator Aplikasi SRIKANDI, Indikator target 6 orang dengan realisasi fisik 6 orang atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

C. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP (BERSUMBER DARI DANA OTSUS)

- **Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:**
 - (1) Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup, indikator kinerja tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan di tingkat Provinsi/Kabupaten , target kinerja 21 Unit dengan realisasi kinerja 21 unit atau 100 persen, dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,87 persen

III. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan

1) URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua melaksanakan urusan kelautan dan perikanan, melalui APBD Provinsi Papua Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 42,843,070,797,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 40,468,130,477.89** atau **94.46 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

- **Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat, indikator kinerja Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha), target kinerja keluaran 40 Ha dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,79 persen
 - (2) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, indikator kinerja, indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,99 persen
- **Kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (2) Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, indikator kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok), target kinerja keluaran 2 kelompok dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (3) Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, indikator kinerja Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang), target kinerja keluaran 20 orang dengan

realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,83 persen

- (4) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, indikator kinerja Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok), target kinerja keluaran 4 kelompok dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,8 persen

B. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- **Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, indikator kinerja Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit), target kinerja keluaran 5 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,76 persen
- (2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, indikator kinerja Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit), target kinerja keluaran 2 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

- **Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan, Indikator kinerja Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan) target kinerja keluaran 1 pelabuhan perikanan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,57 persen
- (2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan, Indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit), target kinerja keluaran 1 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,76 persen
- (3) Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan, Indikator kinerja Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan), target kinerja keluaran 2 unit dengan realisasi kinerja sebesar 3 layanan dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen

C. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- **Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**, Terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Indikator kinerja Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,99 persen
 - (2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut, Indikator kinerja Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit), target kinerja keluaran 22 unit dengan realisasi kinerja sebesar 21 unit atau 95,45 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,63 persen
 - (3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut, Indikator kinerja Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit) target kinerja keluaran 1 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (4) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Indikator kinerja Jumlah Pembudidaya (Orang), target kinerja keluaran 10 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**, Terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit), target kinerja keluaran 4 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit), target kinerja keluaran 1 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

D. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- **Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (2) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,79 persen
 - (3) Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (4) Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), indikator kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif (Kelompok), target kinerja keluaran 5 Kelompok dengan realisasi kinerja sebesar 80 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,4 persen

E. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar,

indikator kinerja Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko, target kinerja keluaran unit usaha dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

- (2) Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing, indikator kinerja Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing, indikator kinerja Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing, target kinerja keluaran unit usaha dengan realisasi kinerja sebesar 99,94 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen
- **Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi, target kinerja keluaran unit usaha dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

2) URUSAN PARIWISATA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Pariwisata dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

- **Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi, indikator kinerja Tersedianya Lokasi Daya tarik unggulan Provinsi sesuai dengan tahapan pengembangan (Pembangunan Home Stay) (Unit), target kinerja keluaran 2 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,24 persen

- **Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pengembangan Destinasi Pariwisata, indikator kinerja Tersedianya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Pembangunan Guest House di desa Rheapang Muaib) (Unit), target kinerja keluaran 2 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,07 persen

B. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

- **Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, indikator kinerja Terlaksananya Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Orang), target kinerja keluaran 50 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

C. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- **Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, indikator kinerja Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif (Unit), target kinerja keluaran 50 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,05 persen

D. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- **Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan, indikator kinerja Jumlah Peserta yang mengikuti Kompetensi SDM Pariwisata dan EKonomi Kreatif tingkat lanjutan (Orang), target kinerja keluaran 48 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 88,38 persen
- (2) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata, indikator kinerja Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata (Kelompok), target kinerja

keluaran 25 Kelompok dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,16 persen

- **Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, indikator kinerja Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan, Bimbingan teknis, dan pendampingan Ekonomi Kreatif (Kelompok), target kinerja keluaran 9 Kelompok dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 1,62 persen

3) URUSAN PERTANIAN

Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Pertanian dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

- Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian, indikator kinerja Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian (Laporan), target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,72 persen
- (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, indikator kinerja Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,51 persen

- **Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih, indikator kinerja Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat) target kinerja keluaran 10.000 sertifikat dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,33 persen
- (2) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, indikator kinerja Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (Laporan) target kinerja keluaran 3 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,35 persen
- (3) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan, indikator kinerja Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran (Dokumen) target kinerja keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 101,05 persen

- (4) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan, indikator kinerja Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Laporan) target kinerja keluaran 7 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 261,111 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,15 persen
- **Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, indikator kinerja Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 92,62 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 90,87 persen
 - **Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, indikator kinerja Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,73 persen

B. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

- **Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, indikator kinerja Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen) target kinerja keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,8 persen
 - (2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya, indikator kinerja Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit) target kinerja keluaran 6 unit dengan realisasi kinerja sebesar 54,55 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 91,15 persen

C. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

- **Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular (Layanan) target kinerja keluaran 6 layanan dengan realisasi kinerja sebesar 92,81 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,04 persen
- **Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, indikator kinerja Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (sampel) target kinerja keluaran 200 sampel dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,96 persen

D. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

- **Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, indikator kinerja Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) target kinerja keluaran 165 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 109,71 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen

E. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

- **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, indikator kinerja (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,97 persen

F. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

- **Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN, indikator kinerja Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan

Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (Orang) target kinerja keluaran 60 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 88,89 persen

- (2) Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta, indikator kinerja Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang) target kinerja keluaran 90 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,62 persen
- **Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian, indikator kinerja Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen) target kinerja keluaran 375 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 49,67 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,48 persen
 - (2) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani, indikator kinerja Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok) target kinerja keluaran 1 kelompok dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,06 persen
- **Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani, indikator kinerja Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Unit) target kinerja keluaran 3 unit dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,86 persen

4) URUSAN KEHUTANAN

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Pada tahun 2023, melaksanakan Urusan Kehutanan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan, indikator kinerja jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang tersusun, target kinerja keluaran dokumen, tingkat realisasi kinerja sebesar 92,6 persen
- **Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi, indikator kinerja Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,91 persen
- (2) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung, indikator kinerja Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala (Dokumen) target kinerja keluaran 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,39 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 10 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,9 persen
 - (2) Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 100 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,28 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**, , terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, indikator kinerja Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan (Ha) target kinerja keluaran 100 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu, indikator kinerja Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH (Unit Managemen) target kinerja keluaran 1 unit managemen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,72 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi<6000 m3/Tahun**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi<6000 m3/Tahun, indikator kinerja Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen

dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,46 persen

B. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

- **Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam,** terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi, indikator kinerja Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola (Ha) target kinerja keluaran 10 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,16 persen

C. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan,** terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan, indikator kinerja Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Kelompok) target kinerja keluaran 4 kelompok dengan realisasi kinerja sebesar 44,44 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 87,99 persen

CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA

D. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara,** terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 3 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 98,75 persen

E. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 30 orang

dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,23 persen

CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI

F. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 2 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen

G. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 35 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 dan tingkat capaian kerja sebesar 99,86 persen

CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM

H. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 1 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,14 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan, indikator kinerja Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,99 persen

I. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 30 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,72 persen

CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA

J. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 2 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 98,99 persen

K. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 20 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,93 persen

KPHP UNIT XVII WAROPEN

L. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 2 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,74 persen

M. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 10 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,97 persen

KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA

N. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH, indikator kinerja Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun (Unit) target kinerja keluaran 1 unit dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,89 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan, indikator kinerja Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen

O. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 30 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 97,24 persen

KPHP UNIT XXIII SARMI

P. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 3 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 95,73 persen

Q. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 30 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen

KPHP Unit XIX KEPULAUAN YAPEN

R. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,82 persen

S. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 15 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,5 persen

KPHP Unit XX BIAK

T. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH, indikator kinerja Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun (Unit) target kinerja keluaran 20 unit dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,71 persen
- **Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung, indikator kinerja Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen
 - (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung (Dokumen) target kinerja

keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen

U. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 30 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 91,96 persen

KPHP Unit XXVIII KOTA JAYAPURA

V. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan, indikator kinerja Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,85 persen

W. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 30 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,36 persen

KPHP Unit XXIX KEEROM

X. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara, indikator kinerja Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha) target kinerja keluaran 2 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 98,1 persen

Y. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang) target kinerja keluaran 10 orang dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,52 persen

BPTPH JAYAPURA

Z. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

- **Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Sertifikasi Sumber Benih, indikator kinerja Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan (Sertifikat) target kinerja keluaran 1 sertifikat dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,52 persen
 - (2) Sertifikasi Mutu Benih, indikator kinerja Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan (Sertifikat) target kinerja keluaran 10 sertifikat dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 95,27 persen
 - (3) Pembangunan Sumber Benih, indikator kinerja Luas Sumber Benih yang Dibangun (Ha) target kinerja keluaran 2 hektar dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen

5) URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Papua melaksanakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 50,338,979,825** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 47,093,601,428** atau **93,55 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

- **Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 98,05 persen
 - (2) Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah, indikator kinerja Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi (Dokumen) target kinerja keluaran 3

dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,45 persen

- (3) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi,** terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,83 persen
 - (2) Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 97,33 persen
 - (3) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

- **Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut,** terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen
 - (2) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Laporan) target kinerja keluaran 2 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 96,99 persen

- **Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Laporan) target kinerja keluaran 2 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 97,8 persen
- **Kegiatan Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB), indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) (Laporan) target kinerja keluaran 3 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,28

- **Kegiatan Penetapan Harga Patokan Batuan**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah (Dokumen) target kinerja keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,3 persen

C. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

- **Kegiatan Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun (Laporan) target kinerja keluaran 2 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 0 persen
 - (2) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun, indikator kinerja Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun (Laporan) target kinerja keluaran 2 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 0 persen

D. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

- **Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan

realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,58 persen

- **Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, indikator kinerja Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Dokumen) target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,87 persen
 - (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,65 persen
 - (3) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, indikator kinerja Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit) target kinerja keluaran 1,201 unit dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 96,29 persen
 - (4) Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 100 persen

6) URUSAN PERDAGANGAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Tahun Anggaran 2023 juga melaksanakan urusan perdagangan, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

- **Kegiatan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi, indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan) target

kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,99 persen

B. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING

- **Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 98,8 persen
 - (2) Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 0 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 0 persen

C. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

- **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, indikator kinerja Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina (Pelaku Usaha) target kinerja keluaran 30 pelaku usaha dengan realisasi kinerja sebesar 6,67 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,62 persen

D. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengembangan Layanan Pengujian, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang (Dokumen) target kinerja keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 250 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,89 persen

- (2) Pengembangan Layanan Kalibrasi, indikator kinerja Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat) target kinerja keluaran 5 sertifikat dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,41 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan) target kinerja keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 50 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,32 persen

7) URUSAN PERINDUSTRIAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Tahun Anggaran 2023 juga melaksanakan urusan perindustrian, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- **Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
- **Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP, indikator kinerja Jumlah bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP (Unit) target kinerja keluaran 3 unit dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 98,37 persen
 - (2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,96 persen
 - (3) Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi (Dokumen) target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kerja sebesar 99,82 persen

8) URUSAN TRANSMIGRASI

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Tahun Anggaran 2023 juga melaksanakan urusan transmigrasi, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

- Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, terdiri dari sub kegiatan
- (1) Pelatihan Transmigrasi, indikator kinerja Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang), target kinerja keluaran 20 orang, dengan realisasi sebesar 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

IV. Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Provinsi Papua melaksanakan urusan pemerintahan, melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 421,302,288,692,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 341,362,627,515,00** atau **81.03 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan), tingkat capaian kinerja 88,08 persen
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan: (1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, tingkat capaian kinerja 82,46 persen; (2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan, realisasi dengan tingkat capaian 99,81 persen; (3) Fasilitasi Kunjungan Tamu, indikator kinerja jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu, dengan realisasi kinerja 1 paket dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,53 persen; (4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator kinerja jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, realisasi laporan dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 61,5 persen
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas, indikator kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,56 persen

- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, indikator kinerja Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 89,55 persen
- Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, sub kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan, indikator kinerja jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan
- Fasilitasi Keprotokolan, terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara, dengan sub kegiatan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara

Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua

APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 87,978,280,785,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 81,447,186,425.03** atau **92.58 persen**, di gunakan untuk melaksanakan 1 Program dan didukung oleh program peunjang urusan

A. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

- **Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**, indikator kinerja sub kegiatan adalah: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Bulan), target kinerja keluaran 6 bulan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,95 persen

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, berisikan indikator sub kegiatan: (1) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Buku), dengan target kinerja 32 buku dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,9 persen; (2) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Buku), target kinerja 30 buku, dengan tingkat capaian sebesar 97,65 persen
- **Kegiatan dministrasi Keuangan Perangkat Daerah**, indikator kinerja sub kegiatannya adalah: (1) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun), target kinerja 1 tahun realisasi 12,50 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86,47 persen; (2) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, tingkat capaian kinerja sebesar 99,5 persen; (3) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan

Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Buku), target kinerja 45 buku, dengan tingkat capaian sebesar 99,39 persen

- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, indikator kinerja sub kegiatannya adalah: (1) Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Stel), target kinerja 330 stel dengan tingkat capaian 99,86 persen; (2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, target kinerja 9 (Orang) dan tingkat capaian 87,31 persen
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan: (1) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket), tingkat capaian kinerja 98,9 persen; (2) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) tingkat capaian kinerja 99,72 persen; (3) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) tingkat capaian kinerja 98,79 persen; (4) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) tingkat capaian kinerja 95,94 persen; (5) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) tingkat capaian kinerja 98,88 persen; (6) Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (orang) tingkat capaian kinerja 99,27 persen; (7) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Orang), dengan tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 97,84 persen
- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Tahun), target 1 tahun dengan realisasi kinerja sebesar 88,62 persen
- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah: (1) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit), target 148 unit, dengan tingkat capaian 18,71 persen; (2) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)
- **Kegiatan Fasilitas Keprotokolan**, indikator kinerja sub kegiatan adalah: jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan, dengan tingkat capaian kinerja 97,09 persen

Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua

APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 32,605,495,650,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 31,854,209,521,00** atau **97.7 persen** digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan

A. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

- **Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**, indikator kinerja sub kegiatan adalah: (1) Jumlah laporan hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan), target 1 laporan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen; (2) Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan), target 1 laporan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen; (3) Jumlah laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan), target 1 laporan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**, indikator kinerja sub kegiatan adalah: (1) Jumlah laporan hasil Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan), target 1 laporan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen; (2) Jumlah laporan hasil Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan) target 1 laporan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,9 persen; (3) Jumlah laporan hasil Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan) target 1 laporan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**, indikator kinerja sub kegiatan adalah: (1) Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan), target 1 laporan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen; (2) Jumlah dokumen hasil Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen), target 1 dokumen, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen; (3) Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan), target 1 laporan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah: (1) Jumlah dokumen hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen), tingkat capaian sebesar 99,99 persen (2) Jumlah dokumen

hasil pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen), tingkat capaian sebesar 100 persen (3) Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) tingkat capaian sebesar 100 persen;

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah: (1) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan), tingkat capaian sebesar 92,91 persen; (2) Jumlah dokumen yang disusun (Dokumen),berencana tingkat capaian sebesar 100 persen (3) Jumlah dokumen laporan yang disusun (Dokumen), tingkat capaian sebesar 100 persen
- **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah: (1) Jumlah dokumen hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen), tingkat capaian sebesar 100 persen
- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah: (1) Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang), target 20 orang, tingkat capaian sebesar 100 persen tingkat capaian sebesar 100 persen; (2) Jumlah Sosialisasi (Kegiatan), target 1 kegiatan, tingkat capaian sebesar 100 persen
- **Kegiatan dministrasi Umum Perangkat Daerah**, kegiatan ini berisikan komponen instalasi listrik, pengadaan peratalan dan penyediaan barang cetakan, bahan buku bacanaan, alat tulis kantor, makan minum dan rapat koordidnasi dan konsultasi SKPD tingkat capaian sebesar 100 persen;
- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah: (1) Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Paket), tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah: (1) Terlayannya pelaksanaan surat menyurat (Bulan), target 12 bulan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen; (2) Tersediaannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan) target 12 bulan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen;; (3) Tersediaannya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan), target 12 bulan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen;
- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, indikator kinerja sub kegiatan adalah: (1) Tersediaannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Bulan), target 12 bulan, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen; (2) Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

(Unit), target 26 unit, realisasi 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen;

Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua

Biro Tata pemerintahan dan Otonomi Khusus setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 30,207,898,610** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 28,543,408,029** atau **94.49 persen**, untuk melaksanakan 3 (tiga) Program dan didukung oleh 1 (satu) penunjang penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

A. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

- **Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan, indikator kinerja jumlah dokumen hasil pengelolaan tata laksana pemerintah, teralisasi sebesar 100 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (2) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

- **Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,42 persen
 - (3) Fasilitasi Penataan Wilayah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Pelaksanaan Otonomi Daerah**
 - (1) Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (2) Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen

- (3) Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

C. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

- Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus
 - (1) Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus, indikator kinerja, target kinerja keluaran 100 persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, indikator kinerja, target kinerja keluaran 100 persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,61 persen

Biro Hukum Setda Provinsi Papua

APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 36,428,020,786,00** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 28,523,749,330,00** atau **78.3 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

- **Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, indikator kinerja jumlah produk hukum pengaturan yang disusun, dokumen realisasi kinerja 95,74 persen
 - (2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, indikator kinerja jumlah produk hokum penetapan yang disusun, realisasi kinerja 100 persen
 - (3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, indikator kinerja Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya, indikator kinerja jumlah produk hukum yang di dokumentasi dan dikelola informasi hukumnya, realisasi kinerja 79,19 persen
 - (4) Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, indikator kinerja jumlah produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi, realisasi kinerja 75,24 persen
- **Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, indikator kinerja jumlah masalah hukum yang diselesaikan, target kinerja keluaran kasus, realisasi persen dengan tingkat capaian kinerja 73,89 persen

Biro Organisasi Setda Provinsi Papua

APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 28,285,805,429** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 23,441,353,058** atau **82.87 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

- **Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi, indikator kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan kelembagaan provinsi (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 97,88 persen
 - (2) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota, indikator kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan kelembagaan kabupaten/Kota (dokumen), target kinerja keluaran 8 dokumen, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 100 persen
 - (3) Penataan Analisis Jabatan, indikator kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan (dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 99,26 persen
- **Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, indikator kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, target kinerja dokumen, target kinerja keluaran 1 dokumen, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 94,17 persen
 - (2) Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, indikator kinerja jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja, target kinerja keluaran 1 dokumen, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 98,67 persen
 - (3) Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja, indikator kinerja jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja, target kinerja keluaran 1 laporan, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 99,11 persen
 - (4) Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan, indikator kinerja jumlah dokumen hasil pengelolaan tata laksana pemerintahan, target kinerja keluaran 1 dokumen, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 98,55 persen
 - (5) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik, indikator kinerja jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik, target kinerja keluaran 1 dokumen, realisasi 100 persen dengan tingkat capaian kinerja 95,21 persen

2) URUSAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 482,553,782,528** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 465,159,421,363** atau **96.4 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- **Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen
 - (2) Pembahasan Rancangan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 79,45 persen
 - (3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen), target kinerja keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembahasan KUA dan PPAS, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (3) Pembahasan APBD, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (4) Pembahasan Perubahan APBD, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (5) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen),

target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

- **Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan), target indikator keluaran 12 laporan dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan), target indikator keluaran 12 laporan dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan), target indikator keluaran 13 laporan dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan), target indikator keluaran 12 laporan dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (6) Pengawasan Penggunaan Anggaran, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen), target indikator keluaran 12 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- **Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pendalaman Tugas DPRD, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen

dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 87,31 persen

- (2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
- (3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, indikator kinerja Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang), target indikator keluaran 13 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, indikator kinerja Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang), target indikator keluaran 30 orang dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen), target indikator keluaran 5 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - **Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Kunjungan Kerja dalam Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Pelaksanaan Reses, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen), target indikator keluaran 69 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,39 persen
 - **Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyusunan Kode Etik DPRD, indikator kinerja Jumlah Kode Etik Dan Tata Beracara DPRD (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - **Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 88,35 persen
 - (2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen), target indikator keluaran 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

- (3) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen), target indikator keluaran 4 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen), target indikator keluaran 14 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

B. PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

- **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (Dokumen), target indikator keluaran 69 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,43 persen
 - (2) Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus, indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus (Dokumen), target indikator keluaran 69 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (3) Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua (Dokumen), target indikator keluaran 12 dokumen dengan realisasi sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

Sekretariat Majelis Rakyat Papua

Sekretariat Majelis Rakyat Papua, melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 54,818,851,560** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 53,025,964,052** atau **96.73 persen** untuk membiayai.

- A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**,
 - (1) kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; (3) Administrasi Umum Perangkat Daerah; (4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- B. PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA**
 - **Kegiatan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban**, sub kegiatan Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota, indikator kinerja jumlah pimpinan dan anggota yang menerima hak keuangan, target kinerja keluaran orang, terealisasi sebesar 99,96 persen

V. Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) URUSAN PERENCANAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua melaksanakan urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan serta Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 100,401,790,539** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 81,031,929,007.66** atau **80.71 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- **Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi, indikator kinerja Jumlah RANPERDA RTRWP Papua yang mendapatkan Persetujuan Substansi dan Evaluasi serta Luas Kawasan Hutan yang diusulkan untuk Perubahan Kawasan Hutan (Dokumen), target kinerja 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 83,58 persen

B. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

- **Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, indikator kinerja Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen), target kinerja 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,44 persen
- (2) Pelaksanaan Konsultasi Publik, indikator kinerja Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara), target kinerja 1 Berita Acara dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,73 persen
- (3) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, indikator kinerja Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara), target kinerja 35 Berita Acara dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen
- (4) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi, indikator kinerja Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara), target kinerja 9 Berita Acara dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,96 persen

- (5) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen), target kinerja 3 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,09 persen
- **Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen), target kinerja 1 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,48 persen
 - (2) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, Indikator kinerja Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang), target kinerja 23 Orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,84 persen
 - (3) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Orang), target kinerja 23 Orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen
 - **Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan), target kinerja 4 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,83 persen
 - (2) Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Laporan (Dokumen), target kinerja 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,47 persen
 - (3) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Indikator kinerja Laporan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen), target kinerja 22 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 93,32 persen

- (4) Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen), target kinerja Keluaran 9 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 peersen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,49 persen

C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen), target kinerja Keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 peersen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 peersen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,13 persen
 - (3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 peersen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen), target kinerja Keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 peersen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
 - (5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan), target

kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen

- (6) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen
- **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen), target kinerja Keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,73 persen
 - (2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Indikator kinerja, Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen
 - (3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Indikator kinerja, Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 89,25 persen
 - (4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen
 - (5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen), target kinerja Keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,92 persen

- (6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen
- (7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,27 persen
- (8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, Indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen

- **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen), target kinerja Keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,96 persen
- (2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen
- (3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
- (4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang

Infrastruktur (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen

- (5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen), target kinerja Keluaran 3 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,56 persen
- (6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,76 persen
- (7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen
- (8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,9 persen

2) URUSAN KEUANGAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua melaksanakan urusan Keuangan melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 1,799,387,734,152** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 1,541,786,573,413** atau **85.68 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- **Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, indikator kinerja Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (target kinerja Keluaran 1

- dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,83 persen
- (2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen), target kinerja Keluaran 2 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,71 persen
 - (3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD, indikator kinerja Jumlah Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,86 persen
 - (4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, indikator kinerja Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen), target kinerja Keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,85 persen
 - (5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD, indikator kinerja Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen), target kinerja Keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,85 persen
 - (6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, indikator kinerja Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen), target kinerja Keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,85 persen
 - (7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, indikator kinerja Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen), target kinerja Keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 84,03 persen
 - (8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, indikator kinerja Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen), target kinerja Keluaran 60 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,52 persen
 - (9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, indikator kinerja Jumlah Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 69,57 persen
 - (10) Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah

Pemerintah Provinsi (Orang), target kinerja Keluaran orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 83,25 persen

- **Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan), target kinerja Keluaran 9 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,79 persen
 - (2) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Laporan), target kinerja Keluaran 9 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,91 persen
 - (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah (Dokumen), target kinerja Keluaran 9 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,65 persen
- **Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 81,06 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 81,06 persen
 - (2) Penatausahaan Pembiayaan Daerah, indikator kinerja jumlah dokumen hasil penatausahaan pembiayaan daerah, target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas

Daerah (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,58 persen

- (4) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, indikator kinerja Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,89 persen
 - (5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), indikator kinerja Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 91,2 persen
 - (6) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, indikator kinerja Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,45 persen
 - (7) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, indikator kinerja JUmlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,28 persen
 - (8) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, target kinerja Keluaran orang dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,91 persen
- **Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban, indikator kinerja

- JUmlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,67 persen
- (2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, indikator kinerja JUmlah Laporan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan), target kinerja Keluaran 3 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,7 persen
 - (3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 3 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,68 persen
 - (4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi, indikator kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen), target kinerja Keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,53 persen
 - (5) Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, indikator kinerja Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen), target kinerja Keluaran 5 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,53 persen
- **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 86,03 persen
 - **Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi, indikator kinerja Jumlah Orang yang Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan

Daerah Pemerintah Provinsi (Orang), target kinerja Keluaran 1 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 93,62 persen

B. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyusunan Standar Harga, indikator kinerja Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,77 persen
 - (2) Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, indikator kinerja Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,13 persen
 - (3) Pengamanan Barang Milik Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,87 persen
 - (4) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,36 persen
 - (5) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,04 persen

3) URUSAN PENDAPATAN

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 99,525,196,305** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 84,603,547,137.88** atau **85.01 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**, terdiri dari sub kegiatan

- (1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 9 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,31 persen
- (2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 2 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,28 persen
- (3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah, target kinerja Keluaran laporan dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 80,83 persen
- (4) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 3 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 88,01 persen
- (5) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti, target kinerja Keluaran laporan dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 92,2 persen
- (6) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, target kinerja Keluaran laporan dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 85,81 persen
- (7) Penagihan Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak, target kinerja Keluaran laporan dengan realisasi kinerja sebesar persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,57 persen
- (8) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 8 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,57 persen
- (9) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan), target kinerja

Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 91,69 persen

4) URUSAN KEPEGAWAIAN

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua melaksanakan urusan Kepegawaian melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 50,714,241,980** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 45,993,857,308** atau **90.69 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

- **Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, target kinerja Keluaran 1 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,96 persen
 - (2) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN, target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 84,87 persen
 - (3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, target kinerja Keluaran 1 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,98 persen
 - (4) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, indikator kinerja, Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (2 Lembaga), target kinerja Keluaran 1 lembaga dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,83 persen
 - (5) Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (1 Dokumen), target kinerja Keluaran 1 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (6) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (1 Dokumen), target kinerja Keluaran 1 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,6 persen
 - (7) Pengelolaan Data Kepegawaian, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (1 Dokumen), target kinerja Keluaran 1

Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen

- **Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengelolaan Mutasi ASN, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (1 Dokumen), target kinerja Keluaran 1 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 48,7 persen
 - (2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, indikator kinerja Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (1 Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,82 persen
- **Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (1 Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 75,5 persen
 - (2) Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN, indikator kinerja Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN (300 Orang), target kinerja Keluaran 300 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,89 persen
 - (3) Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN, indikator kinerja, Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (1 Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,98 persen
 - (4) Pembinaan Jabatan Fungsional ASN, indikator kinerja Jumlah Fungsional ASN yang Dibina (100 Orang), target kinerja Keluaran 100 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,17 persen
 - (5) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (1 Dokumen) target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 67,65 persen
- **Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, indikator kinerja Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (80 Orang), target kinerja Keluaran 800 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,87 persen

- (2) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai, indikator kinerja Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (200 Orang), target kinerja Keluaran 200 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,56 persen
- (3) Pembinaan Disiplin ASN, indikator kinerja Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (70 Orang), target kinerja Keluaran 70 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,42 persen
- (4) Evaluasi Disiplin ASN, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (1 Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,8 persen

5) URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua melaksanakan urusan Pendidikan dan Pelatihan melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 67,014,411,130** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 62,915,115,385.2** atau **93.88 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- **Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, indikator kinerja Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang), target kinerja Keluaran 120 orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen
 - (2) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 81,38 persen
- **Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah ASN Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Orang), target kinerja Keluaran orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 82,58 persen

- (2) Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar, indikator kinerja Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,95 persen
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga, indikator kinerja Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,17 persen
- (4) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, indikator kinerja Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang), target kinerja Keluaran orang dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,9 persen
- (5) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 82,16 persen

6) URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- **Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

(Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,82 persen

- **Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**, terdiri dari sub kegiatan:

(1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 persen

(2) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,97 persen

- **Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**, terdiri dari sub kegiatan:

(1) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,45 persen

- **Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**, terdiri dari sub kegiatan:

(1) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen

7) URUSAN PENGHUBUNG

Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua pada Tahun Anggaran 2023 melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 18,379,902,529** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 17,468,414,404** atau **95.04 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG

- Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung, terdiri dari sub kegiatan:

(1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan, target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,84 persen

- (2) Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat, indikator kinerja Jumlah laporan hasil pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat, target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 94,36 persen
- (3) Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan, target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,21 persen
- (4) Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya, Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan, target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,57%

8) **URUSAN PENGELOLAAN PERBATASAN**

Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerja Sama Provinsi Papua melaksanakan urusan pengelolaan perbatasan melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 24,880,301,139** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 23,735,966,996** atau **95.4 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN

- **Kegiatan Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jumlah Laporan BLOM (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 98,03 persen
- **Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Jumlah Laporan Koordinasi Pembangunan Pos Lintas Batas (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,62 persen
 - (2) Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan, Jumlah Laporan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,64 persen
 - (3) Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara, Jumlah Laporan Pembinaan Pelintas Batas (Laporan), target

kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 95,34 persen

- **Kegiatan Monitoring dan Evaluasi**, terdiri dari sub kegiatan
- (1) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Laporan Pengawasan (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 89,77 persen

VI. Penyelenggaraan Unsur Pengawas

1) INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Provinsi Papua melaksanakan urusan Pengawasan melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 66,841,931,213** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 59,170,294,465** atau **88.52 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

- **Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**, terdiri dari sub kegiatan
- (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 9 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,32 persen
- (2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan), target kinerja Keluaran 6 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,63 persen
- (3) Reviu Laporan Kinerja, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan), target kinerja Keluaran 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 7 dokumen 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 59,66 persen
- (4) Reviu Laporan Keuangan, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan), target kinerja Keluaran 12 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 93,32 persen
- (5) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan), target kinerja Keluaran 2 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 82,34 persen
- (6) Kerjasama Pengawasan Internal, indikator kinerja Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan), target kinerja Keluaran 3 kesepakatan dengan realisasi kinerja sebesar 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,11 persen

- (7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen), target kinerja Keluaran 8 dokumen dengan realisasi kinerja 7 dokumen atau 43,75 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 82,54 persen
- **Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan), target kinerja Keluaran 3 laporan dengan realisasi kinerja 2 laporan atau 88,89 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 57,35 persen
 - (2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan), target kinerja Keluaran 7 laporan dengan realisasi kinerja 5 laporan atau 85,71 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 58 persen

B. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

- **Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah), target kinerja Keluaran 20 PD dengan realisasi kinerja 17 PD atau 88 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 71,91 persen
 - (2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah), target kinerja Keluaran 34 PD dengan realisasi kinerja 34 PD atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 71,14 persen
 - (3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, indikator kinerja Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan), target kinerja Keluaran 8 kegiatan dengan realisasi kinerja 7 kegiatan atau 92,31 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 87,76 persen

VII. Penyekenggaraan Unsur Pemerintahan Umum

1) URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua melaksanakan urusan Kesatuan bangsa dan politik melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023

telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 39,352,794,485** dengan total penyerapan sebesar **Rp. 32,419,498,331** atau **82.38 persen** untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang), target kinerja Keluaran 560 orang dengan realisasi kinerja 420 orang atau 37,5 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 67,14 persen
- (2) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja 1 dokumen atau 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 73,83 persen

B. PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**, terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, indikator kegiatan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (dokumen laporan), target kinerja Keluaran 5 dokumen/laporan dengan realisasi kinerja 5 dokumen/ laporan atau 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen

- (2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, indikator kegiatan Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (dokumen), target kinerja Keluaran 1 dokumen dengan realisasi kinerja 1 dokumen atau 50 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,53 persen
- (3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, indikator kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang), target kinerja Keluaran 450 orang dengan realisasi kinerja 450 orang atau 100 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 87,5 persen

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,** terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, indikator kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang), target kinerja Keluaran 180 orang dengan realisasi kinerja 135 orang atau 37,5 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 50,98 persen

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, inidkator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang), target kinerja Keluaran 160 orang dengan realisasi kinerja 120 orang atau 37,5 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 75,2 persen

E. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari sub kegiatan
 - (1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Ora Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang), target kinerja Keluaran 150 orang dengan realisasi kinerja 113 orang atau 37,67 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 77,37 persen
 - (2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, indikator kinerja jumlah peserta sosialisasi FGD penyusunan peta rawan konflik, FGD Mitigasi Daerah Rawan Konflik dan FGD Rapat Kordinasi Pengawasan Orang asing (orang), target kinerja Keluaran 150 orang dengan realisasi kinerja 113 orang atau 37,67 persen dan tingkat capaian kinerja sebesar 40,66 persen

TABEL MATRIKS CAPAIAN/ REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2023

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1-01.2-23.2-24.01.1000	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah		190.112.311.998			176.973.016.868	93,09			
1.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		134.150.257.649			122.343.660.517	91,2			
1.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.667.502.910	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	1.666.857.985	99,96	0 Laporan	-	
1.01.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.468.027.720	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.467.382.795	99,96	5 Dokumen	100	
1.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		99.480.000	Jumlah Dokumen Dokumen RKA-OPD yang terfasilitasi	2 Dokumen	99.480.000	100	2 Dokumen	100	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-OPD	2 Dokumen			2 Dokumen	100	
1.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		99.995.190	Jumlah Laporan Dokumen yang terfasilitasi	4 Dokumen	99.995.190	100	4 Dokumen	100	
1.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		124.157.940.934			112.633.696.502	90,72			
1.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		123.283.783.694	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	272 Orang/ Bulan	111.759.539.262	90,65	272 Orang/ Bulan	100	
1.01.001.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		162.547.450	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	162.547.450	100	2 Dokumen	100	
1.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		230.050.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	230.050.000	100	1 Laporan	100	
1.01.001.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		168.050.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	168.050.000	100	2 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.01.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		313.509.790	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	313.509.790	100	2 Laporan	100	
1.01.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		950.000.000			940.388.127	98,99			
1.01.001.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		950.000.000	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	940.388.127	98,99	1 Dokumen	100	
1.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.194.314.210			1.193.144.320	99,9			
1.01.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		511.793.600	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	272 Stel	510.958.400	99,84	272 Stel	100	
1.01.001.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		294.887.275			294.586.045	99,9			
1.01.001.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		194.700.000	Tersedianya informasi data kepegawaian Dinas Pendidikan	2 Dokumen	194.666.540	99,98	2 Dokumen	100	
1.01.001.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		192.933.335	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	192.933.335	100	1 Dokumen	100	
1.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-			-	-			
1.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.658.806.695			3.654.403.324	99,88			
1.01.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		188.800.000			188.691.709	99,94			
1.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		280.280.000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	3 Pak	279.072.000	99,57	3 Pak	100	
1.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		297.176.695			296.875.383	99,9			
1.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan		186.900.000			186.800.790	99,95			
1.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		85.200.000	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	85.200.000	100	2 Dokumen	100	
1.01.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		518.300.000	Jumlah Tamu Pimpinan yang terfasilitasi makan dan minum Meningkatkan tamu pimpinan	60 1.300 kali 90 90%	515.675.200	99,49	60 1.300 kali 60 90%	100 66,67	
1.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.102.150.000	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Dokumen	2.102.088.242	100	1 Dokumen	100	
1.01.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		675.000.000			674.516.198	99,93			
1.01.001.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Papua	675.000.000	Tersedianya Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Gedung	674.516.198	99,93	1 Gedung	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.846.692.900			1.580.654.061	85,59			
1.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10.800.000	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3 orang	10.800.000	100	3 orang	100	
1.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		760.000.000	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Paket	506.761.643	66,68	3 Paket	100	
1.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.075.892.900	Jumlah Jasa Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Kegiatan	1.063.092.418	98,81	1 Kegiatan	100	
1.01.002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		48.711.628.504			47.433.551.112	97,38			
1.01.002.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		13.012.132.196	Tolak ukur A	0 %	12.275.209.631	94,34	0 %	-	
1.01.002.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3.200.000.000	Terbangun Pagar Sekolah dan Asrama Sekolah Khusus Papua Go global	2 Unit	2.579.758.900	80,62	2 Unit	100	
1.01.002.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		1.955.916.585	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	1.955.802.940	99,99	100 Peserta Didik	100	
1.01.002.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Provinsi Papua	2.364.847.870	Terlaksananya pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	14 Guru	2.333.027.320	98,65	14 Guru	100	
1.01.002.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		2.932.103.870	Jumlah Sekolah Menengah Khusus yang terfasilitasi	13 Lembaga	2.857.144.990	97,44	13 Lembaga	100	
1.01.002.1.01.62	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Provinsi Papua	2.559.263.871	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	50 Guru/Orang	2.549.475.481	99,62	100 Guru/Orang	200	
1.01.002.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		9.739.703.823			9.647.203.457	99,05			
1.01.002.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3.109.690.756	Terbangunnya sarana dan prasarana	1 Dokumen	3.086.619.556	99,26	1 Dokumen	100	
1.01.002.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		705.563.390	Terlaksananya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50 Peserta Didik	669.966.580	94,95	50 Peserta Didik	100	
1.01.002.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		1.170.850.065	Terlaksananya Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	1 Kurikulum	1.163.160.250	99,34	1 Kurikulum	100	
1.01.002.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		3.182.048.840	Jumlah siswa yang mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	3.158.779.058	99,27	100 Peserta Didik	100	
1.01.002.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		1.271.550.772	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Khusus yang terfasilitasi	10 Lembaga	1.268.678.013	99,77	10 Lembaga	100	
1.01.002.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		300.000.000			300.000.000	100			
1.01.002.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus		25.959.792.485			25.511.138.024	98,27			
1.01.002.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		10.498.961.060	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit	10.155.858.314	96,73	11 Unit	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.01.002.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus		910.364.180	Terlaksananya Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	1 Kurikulum	909.417.048	99,9	1 Kurikulum	100	
1.01.002.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		1.617.536.045	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	7 Lembaga	1.615.159.970	99,85	7 Lembaga	100	
1.01.002.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		-			-	-			
1.01.002.1.03.59	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1.639.924.000	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1.639.662.572	99,98	1 Dokumen	100	
1.01.002.1.03.61	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		11.293.007.200	Terselenggaranya bimbingan teknis dan Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100 Orang	11.191.040.120	99,1	100 Orang	100	
1.01.003	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		1.369.287.380			1.354.897.380	98,95			
1.01.003.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		-			-	-			
1.01.003.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		-	Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	12 Orang	-	-	12 Orang	100	
1.01.003.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		1.369.287.380	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	1 Dokumen	1.354.897.380	98,95	1 Dokumen	100	
1.01.003.1.02.06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus		1.369.287.380	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	1 Dokumen	1.354.897.380	98,95	1 Dokumen	100	
1.01.004	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		1.030.452.295			1.015.634.562	98,56			
1.01.004.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		1.030.452.295			1.015.634.562	98,56			
1.01.004.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		1.030.452.295	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	45 Dokumen	1.015.634.562	98,56	45 Dokumen	100	
2.23.002	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		3.249.762.225			3.243.264.812	99,8			
2.23.002.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		2.586.635.750			2.580.484.339	99,76			
2.23.002.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		103.100.000	Jumlah Layanan Perpustakaan elektronik yang di kembangkan	2 perpustakaan	103.063.950	99,96	0 perpustakaan	100	
				Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dilakukan Pemeliharaan	1 1			1 1	100	
2.23.002.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi		1.527.122.000	Terfasilitasi pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah, Provinsi	1 Bangunan	1.526.377.539	99,95	1 Bangunan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.23.002.1.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi		109.250.000	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	3 Eksemplar	109.070.000	99,84	3 Eksemplar	100	
2.23.002.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		176.946.025	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	176.946.025	100	30 Perpustakaan	100	
2.23.002.1.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi		98.042.725	Terselenggaranya Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	15 Orang	94.132.725	96,01	15 Orang	100	
2.23.002.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		155.300.000	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Tingkat Daerah dan Provinsi	60 Orang	154.059.200	99,2	60 Orang	100	
2.23.002.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		225.075.000	Terfasilitasi Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3 Kegiatan	225.075.000	100	3 Kegiatan	100	
2.23.002.1.01.08	Pengembangan Perpustakaan Deposit		111.490.000	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	111.470.000	99,98	1 Perpustakaan	100	
2.23.002.1.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		80.310.000	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	3 dokumen	80.289.900	99,98	3 dokumen	100	
2.23.002.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		663.126.475			662.780.473	99,95			
2.23.002.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		529.054.975	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	10 LOKUS	528.708.973	99,93	2 LOKUS	-	
2.23.002.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		134.071.500	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	2 perpustakaan	134.071.500	100	2 perpustakaan	100	
2.23.003	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		100.450.000			100.430.000	99,98			
2.23.003.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		100.450.000			100.430.000	99,98			
2.23.003.1.04.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		100.450.000	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	200 Eksemplar	100.430.000	99,98	200 Eksemplar	100	
2.24.002	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		246.735.850			240.735.850	97,57			
2.24.002.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		246.735.850			240.735.850	97,57			
2.24.002.1.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		246.735.850	Terciptanya Penggunaan arsip Dinamis	1 Arsip	240.735.850	97,57	1 Arsip	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.24.003	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		730.114.495			723.129.735	99,04			
2.24.003.1.01	Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		130.140.925			130.140.925	100			
2.24.003.1.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		130.140.925	Terciptanya Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan	1000 Lembar	130.140.925	100	1000 Lembar	100	
2.24.003.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota		149.972.810			149.092.250	99,41			
2.24.003.1.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi		149.972.810	Tersedianya Jumlah Arsip Kartografi/Peta yang di data dan diselamatkan	100 Lembar	149.092.250	99,41	100 Lembar	100	
2.24.003.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi		450.000.760			443.896.560	98,64			
2.24.003.1.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		199.987.520	Terfasilitasinya Tenaga Fungsional Arsiparis	8 Orang	199.231.520	99,62	8 Orang	100	
2.24.003.1.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		250.013.240	Jumlah Tenaga Fungsional/Operator Aplikasi SRIKANDI	6 Orang	244.665.040	97,86	6 Orang	100	
2.24.004	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		523.623.600			517.712.900	98,87			
2.24.004.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi		523.623.600			517.712.900	98,87			
2.24.004.1.01.01	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		523.623.600	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan di tingkat Provinsi/Kabupaten	21 Unit	517.712.900	98,87	21 Unit	100	
	JUMLAH		190.112.311.998			176.973.016.868	93,09			
1-02.0-00.0-00.01.1000	Dinas Kesehatan		107.289.932.304			93.067.056.954	86,74			
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		51.449.927.600			40.557.338.334	78,83			
1.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		44.728.537.600			34.248.072.937	76,57			
1.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		44.728.537.600	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	34.248.072.937	76,57	76.57 Orang/ Bulan	76,57	
1.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.643.470.000			3.234.014.537	88,76			
1.02.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.054.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 paket	1.645.583.568	80,12	80.12 paket	80,12	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		725.270.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 paket	725.148.868	99,98	99.98 paket	99,98	
1.02.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		211.700.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 paket	211.680.085	99,99	99.99 paket	99,99	
1.02.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		652.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	651.602.016	99,86	99.86 laporan	99,86	
1.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.727.920.000			2.727.869.325	100			
1.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.727.920.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 laporan	2.727.869.325	100	94.3 laporan	94,3	
1.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		350.000.000			347.381.535	99,25			
1.02.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		350.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 unit	347.381.535	99,25	99.25 unit	99,25	
1.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		45.157.622.364			42.238.834.585	93,54			
1.02.002.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		18.011.818.766	Pengadaan bahan bahan reagensia kimia untuk menunjang pemeriksaan	0 reagensia	17.925.840.999	99,52	0 reagensia	-	
				Fasilitas pendukung kinerja pemeriksaan	0 barang			0 barang	-	
1.02.002.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1.500.000.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 unit	1.495.238.513	99,68	99.68 unit	-	
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 unit			99.68 unit	-	
1.02.002.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit		250.000.540	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5 Unit	249.933.350	99,97	99.97 Unit	1.999,4	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5 Unit			99.97 Unit	1.999,4	
1.02.002.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan		7.255.014.431	Pengadaan bahan kimia untuk menunjang pemeriksaan	100 Tahun	7.219.032.599	99,5	99.5 Tahun	99,5	
				Pengadaan bahan kimia untuk menunjang pemeriksaan	100 Tahun			99.5 Tahun	99,5	
1.02.002.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan		4.652.281.936	Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	100 Unit	4.618.343.075	99,27	99.27 Unit	99,27	
				Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	100 Unit			99.27 Unit	99,27	
1.02.002.1.01.20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		175.699.795	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	100 unit	175.541.795	99,91	99.91 unit	99,91	
				Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	100 unit			99.91 unit	99,91	
1.02.002.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		796.958.000	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	0 Dokumen	787.757.710	98,85	98.85 Dokumen	-	
				Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	0 Dokumen			98.85 Dokumen	-	
1.02.002.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		3.381.864.064	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 paket	3.379.993.957	99,94	99.94 paket	-	
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 paket			99.94 paket	-	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.002.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		21.422.474.506			19.318.022.587	90,18			
1.02.002.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		1.292.106.505	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	0 Orang	1.290.771.249	99,9	99,9 Orang	-	
1.02.002.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		5.856.202.759	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	100 Dokumen	4.655.132.046	79,49	79,49 Dokumen	79,49	
1.02.002.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1.482.933.864	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	1.052.801.138	70,99	70,99 Dokumen	70,99	
1.02.002.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		56.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Dokumen	55.862.624	99,75	99,75 Dokumen	99,75	
1.02.002.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		194.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 Dokumen	191.871.348	98,9	98,9 Dokumen	98,9	
1.02.002.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		612.430.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	198.840.000	32,47	32,47 Dokumen	32,47	
1.02.002.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		495.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	100 Dokumen	494.494.490	99,86	99,86 Dokumen	99,86	
1.02.002.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		5.216.815.918	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	5.212.419.767	99,92	99,92 Dokumen	99,92	
1.02.002.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		29.979.785	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	100 Dokumen	29.938.346	99,86	99,86 Dokumen	99,86	
1.02.002.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		3.459.801.100	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	3.455.409.726	99,87	99,87 Dokumen	99,87	
1.02.002.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		302.400.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	302.400.000	100	100 Dokumen	-	
1.02.002.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota		1.767.904.575	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	100 Dokumen	1.729.215.810	97,81	97,81 Dokumen	97,81	
1.02.002.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		656.700.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	100 Dokumen	648.866.043	98,81	98,81 Dokumen	98,81	
1.02.002.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		681.487.547			661.052.803	97			
1.02.002.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		681.487.547	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100 dokumen	661.052.803	97	97 dokumen	97	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.002.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		5.041.841.545			4.333.918.196	85,96			
1.02.002.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		4.817.542.000	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	0 Unit	4.110.545.096	85,32	85.32 Unit	-	
1.02.002.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		224.299.545	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0 Unit	223.373.100	99,59	99.59 Unit	-	
1.02.003	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		8.306.372.290			8.245.703.412	99,27			
1.02.003.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		7.681.772.290			7.622.631.002	99,23			
1.02.003.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		7.681.772.290	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasvankes)	300 Orang	7.622.631.002	99,23	99.23 Orang	33,08	
1.02.003.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		624.600.000			623.072.410	99,76			
1.02.003.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		624.600.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	0 Orang	623.072.410	99,76	99.76 Orang	-	
1.02.004	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINIMUM		452.210.330			451.758.970	99,9			
1.02.004.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		452.210.330			451.758.970	99,9			
1.02.004.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		222.210.330	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	0 Sarana	221.978.440	99,9	99.9 Sarana	-	
1.02.004.1.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik		230.000.000	Jumlah Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	0 Dokumen	229.780.530	99,9	99.9 Dokumen	-	
1.02.005	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		1.923.799.720			1.573.421.653	81,79			
1.02.005.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		73.800.000			73.000.000	98,92			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.005.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		73.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0 Dokumen	73.000.000	98,92	98.92 Dokumen	-	
1.02.005.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		1.600.000.000			1.250.619.653	78,16			
1.02.005.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1.600.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Dokumen	1.250.619.653	78,16	78.16 Dokumen	-	
1.02.005.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		249.999.720			249.802.000	99,92			
1.02.005.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM		249.999.720	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	0 Dokumen	249.802.000	99,92	99.92 Dokumen	-	
	JUMLAH		107.289.932.304			93.067.056.954	86,74			
1-02.0-00.0-00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura		268.698.905.129			252.255.017.980	93,88			
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		127.561.834.500			112.880.416.981	88,49			
1.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		107.703.834.500			93.071.816.573	86,41			
1.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		107.703.834.500	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	734 Orang/ Bulan	93.071.816.573	86,41	734 Orang/ Bulan	100	
1.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.618.500.000			1.618.020.081	99,97			
1.02.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.771.500	99,77	1 Paket	100	
1.02.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		720.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	719.978.700	100	3 Paket	100	
1.02.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		798.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	798.269.881	99,97	1 Laporan	100	
1.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16.987.520.000			16.951.173.912	99,79			
1.02.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		8.412.520.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	8.393.153.455	99,77	5 Laporan	100	
1.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		8.575.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	8.558.020.457	99,8	2 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.251.980.000			1.239.406.415	99			
1.02.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.126.980.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Laporan	1.114.446.165	98,89	3 Laporan	100	
1.02.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		125.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Paket	124.960.250	99,97	2 Paket	100	
1.02.001.1.14	Fasilitasi Keprotokolan		-			-	-			
1.02.001.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0 Laporan	-	-	0 Laporan	-	
1.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		140.637.070.629			138.874.689.939	98,75			
1.02.002.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		138.373.070.629			136.610.954.284	98,73			
1.02.002.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		26.560.540.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	25.330.378.278	95,37	1 Unit	100	
1.02.002.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		2.500.000.000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	4 Paket	2.499.332.000	99,97	4 Paket	100	
1.02.002.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		80.292.651.569	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	22 Unit	79.898.007.823	99,51	22 Unit	100	
1.02.002.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan		2.138.000.000	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	5 Paket	2.134.127.875	99,82	5 Paket	100	
1.02.002.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)		8.810.000.000	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	6 Paket	8.785.370.784	99,72	6 Paket	100	
1.02.002.1.01.16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		450.000.000	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	3 Paket	449.928.145	99,98	3 Paket	100	
1.02.002.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		1.850.000.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Paket	1.744.691.430	94,31	7 Paket	87,5	
1.02.002.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		15.771.879.060	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Kegiatan	15.769.117.949	99,98	4 Kegiatan	100	
1.02.002.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		260.000.000			259.993.091	100			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.002.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		260.000.000			259.993.091	100			
1.02.002.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		2.004.000.000			2.003.742.564	99,99			
1.02.002.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1.900.000.000	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Kegiatan	1.899.742.564	99,99	2 Kegiatan	100	
1.02.002.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		104.000.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2 Kegiatan	104.000.000	100	2 Kegiatan	100	
1.02.003	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		500.000.000			499.911.060	99,98			
1.02.003.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		500.000.000			499.911.060	99,98			
1.02.003.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		500.000.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	20 Orang	499.911.060	99,98	20 Orang	100	
	JUMLAH		268.698.905.129			252.255.017.980	93,88			
1-02.0-00.0-00.02.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (BLUD)		79.168.604.598			-	-			
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		79.168.604.598			-	-			
1.02.001.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		79.168.604.598			-	-			
1.02.001.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		79.168.604.598	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	20 Unit Kerja	-	-	0 Unit Kerja	-	
	JUMLAH		79.168.604.598			-	-			
1-02.0-00.0-00.03.0000	Rumah Sakit Jiwa		40.819.471.619			39.588.313.432	96,98			
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		26.078.178.599			24.849.968.192	95,29			
1.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		459.725.000			459.718.260	100			
1.02.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		125.000.000			125.000.000	100			
1.02.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		70.000.000			70.000.000	100			
1.02.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		75.000.000			75.000.000	100			
1.02.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		19.000.000			19.000.000	100			
1.02.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		170.725.000			170.718.260	100			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		18.869.719.449			17.722.841.508	93,92			
1.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		18.749.219.449			17.604.053.360	93,89			
1.02.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		22.500.000			22.500.000	100			
1.02.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		98.000.000			96.288.148	98,25			
1.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-			-	-			
1.02.001.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-			-	-			
1.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		500.000.000			498.231.930	99,65			
1.02.001.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		500.000.000			498.231.930	99,65			
1.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.696.893.650			1.645.368.000	96,96			
1.02.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		200.000.000			199.972.300	99,99			
1.02.001.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		168.811.650			168.800.000	99,99			
1.02.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		345.600.000			345.595.600	100			
1.02.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		130.477.000			130.474.100	100			
1.02.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		562.040.000			560.926.000	99,8			
1.02.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		289.965.000			239.600.000	82,63			
1.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		840.000.000			840.000.000	100			
1.02.001.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		840.000.000			840.000.000	100			
1.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.261.840.500			3.257.775.494	99,88			
1.02.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		36.000.000			36.000.000	100			
1.02.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.825.840.500			1.821.775.494	99,78			
1.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.400.000.000			1.400.000.000	100			
1.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		450.000.000			426.033.000	94,67			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		300.000.000			300.000.000	100			
1.02.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100.000.000			76.093.500	76,09			
1.02.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		50.000.000			49.939.500	99,88			
1.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		10.943.793.020			10.940.845.240	99,97			
1.02.002.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1.640.000.000			1.639.757.698	99,99			
1.02.002.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		1.290.000.000			1.289.969.000	100			
1.02.002.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)		350.000.000			349.788.698	99,94			
1.02.002.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		9.053.793.020			9.051.092.492	99,97			
1.02.002.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		697.293.020			696.776.188	99,93			
1.02.002.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1.122.500.000			1.120.520.045	99,82			
1.02.002.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		2.060.000.000			2.059.962.872	100			
1.02.002.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		3.000.000.000			2.999.934.479	100			
1.02.002.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		1.974.000.000			1.973.898.908	99,99			
1.02.002.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		200.000.000			200.000.000	100			
1.02.002.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		200.000.000			199.995.050	100			
1.02.002.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		200.000.000			199.995.050	100			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.002.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		50.000.000			50.000.000	100			
1.02.002.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		50.000.000			50.000.000	100			
1.02.003	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		3.797.500.000			3.797.500.000	100			
1.02.003.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		3.797.500.000			3.797.500.000	100			
1.02.003.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		3.797.500.000			3.797.500.000	100			
JUMLAH			40.819.471.619			39.588.313.432	96,98			
1-02.0-00.0-00.04.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura		126.573.025.795			114.604.799.808	90,54			
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		89.028.439.755			78.879.792.800	88,6			
1.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		77.238.439.755			67.590.463.667	87,51			
1.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		77.238.439.755			67.590.463.667	87,51			
1.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.700.000.000			4.370.448.753	92,99			
1.02.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.000.000.000			995.243.760	99,52			
1.02.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		700.000.000			696.821.904	99,55			
1.02.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.000.000.000			2.678.383.089	89,28			
1.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.850.000.000			3.696.882.866	96,02			
1.02.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		200.000.000			199.718.900	99,86			
1.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3.650.000.000			3.497.163.966	95,81			
1.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.240.000.000			3.221.997.514	99,44			
1.02.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		240.000.000			239.961.424	99,98			
1.02.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3.000.000.000			2.982.036.090	99,4			
1.02.002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		30.044.586.040			29.040.097.511	96,66			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.002.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		29.044.586.040			28.045.417.501	96,56			
1.02.002.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		4.500.000.000			4.112.803.867	91,4			
1.02.002.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		10.000.000.000			9.996.334.053	99,96			
1.02.002.1.01.16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		4.330.000.000			4.242.944.703	97,99			
1.02.002.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		10.214.586.040			9.693.334.879	94,9			
1.02.002.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1.000.000.000			994.680.010	99,47			
1.02.002.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		1.000.000.000			994.680.010	99,47			
1.02.003	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		7.500.000.000			6.684.909.497	89,13			
1.02.003.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		7.500.000.000			6.684.909.497	89,13			
1.02.003.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		7.500.000.000			6.684.909.497	89,13			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	JUMLAH		126.573.025.795			114.604.799.808	90,54			
1-02.0-00.0-00.04.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura (BLUD)		96.611.351.519			-	-			
1.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		96.611.351.519			-	-			
1.02.001.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		96.611.351.519			-	-			
1.02.001.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		96.611.351.519	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	-	-	0 Unit Kerja	-	
	JUMLAH		96.611.351.519			-	-			
1-03.1-04.0-00.01.1000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		858.296.980.760			710.445.999.182	82,77			
1.03.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		69.828.391.100			64.941.382.582	93			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.200.000.206			1.153.333.080	96,11			
1.03.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-			-	-			
1.03.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		700.000.096			653.860.300	93,41			
1.03.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		500.000.110			499.472.780	99,89			
1.03.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		50.330.388.680			46.479.525.811	92,35			
1.03.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		49.457.188.300	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	45.611.855.156	92,22	0 Orang/ Bulan	-	
1.03.001.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		573.200.220			572.573.550	99,89			
1.03.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		150.000.135			145.758.295	97,17			
1.03.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		150.000.025			149.338.810	99,56			
1.03.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.420.732.147			1.404.765.799	98,88			
1.03.001.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1.420.732.147	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	1.404.765.799	98,88	0 Laporan	-	
1.03.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		700.000.110			695.666.000	99,38			
1.03.001.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		700.000.110			695.666.000	99,38			
1.03.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-			-	-			
1.03.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		11.799.249.957			10.892.968.357	92,32			
1.03.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		500.000.000			499.790.600	99,96			
1.03.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.099.999.957			1.096.665.200	99,7			
1.03.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		50.000.000			50.000.000	100			
1.03.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		200.000.000			199.999.000	100			
1.03.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		9.949.250.000			9.046.513.557	90,93			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		91.200.000			82.800.000	90,79			
1.03.001.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Papua	91.200.000			82.800.000	90,79			
1.03.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-			-	-			
1.03.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.686.820.000			3.661.740.535	99,32			
1.03.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100.000.000			100.000.000	100			
1.03.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.035.000.000			1.017.928.535	98,35			
1.03.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.551.820.000			2.543.812.000	99,69			
1.03.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		600.000.000			570.583.000	95,1			
1.03.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		600.000.000			570.583.000	95,1			
1.03.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-			-	-			
1.03.002	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		41.077.122.820			40.144.388.493	97,73			
1.03.002.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		41.077.122.820			40.144.388.493	97,73			
1.03.002.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		820.672.000			813.940.590	99,18			
1.03.002.1.01.12	Pembangunan Kanal Banjir		40.256.450.820			39.330.447.903	97,7			
1.03.002.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		-			-	-			
1.03.002.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		-			-	-			
1.03.002.1.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa		-			-	-			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.002.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		-			-	-			
1.03.003	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		88.289.688.685			67.275.670.055	76,2			
1.03.003.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		88.289.688.685			67.275.670.055	76,2			
1.03.003.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		1.969.872.000	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	0 Dokumen	1.952.921.000	99,14	0 Dokumen	-	
1.03.003.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan		81.319.816.685	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	0 Liter/Detik	61.551.781.540	75,69	0 Liter/Detik	-	
1.03.003.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota		5.000.000.000			3.770.967.515	75,42			
1.03.008	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		17.610.802.000			17.383.442.700	98,71			
1.03.008.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		17.610.802.000			17.383.442.700	98,71			
1.03.008.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Provinsi Papua	17.610.802.000			17.383.442.700	98,71			
1.03.010	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		619.749.520.155			501.281.192.302	80,88			
1.03.010.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		619.749.520.155			501.281.192.302	80,88			
1.03.010.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		9.737.608.000	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	9.202.467.952	94,5	0 Dokumen	-	
1.03.010.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		12.600.000.000			12.600.000.000	100			
1.03.010.1.01.05	Pembangunan Jalan		223.843.485.505	Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	178.524.050.208	79,75	0 KM	-	
				Panjang Jalan yang Dibangun	0 Km			0 Km	-	
1.03.010.1.01.08	Rekonstruksi Jalan		253.213.226.567	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0 KM	209.177.018.596	82,61	0 KM	-	
1.03.010.1.01.09	Rehabilitasi Jalan		73.768.595.959	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	67.068.223.522	90,92	0 KM	-	
1.03.010.1.01.12	Pembangunan Jembatan		46.586.604.124	Panjang Jembatan yang Dibangun	0 M	24.709.432.023	53,04	0 M	-	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.011	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		7.850.000.000			7.774.829.085	99,04			
1.03.011.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		7.850.000.000			7.774.829.085	99,04			
1.03.011.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		4.450.000.000	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	0 Orang	4.418.544.770	99,29	0 Orang	-	
1.03.011.1.01.05	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi		3.400.000.000	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	0 Dokumen	3.356.284.315	98,71	0 Dokumen	-	
1.04.003	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		400.000.000			199.630.000	49,91			
1.04.003.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		400.000.000			199.630.000	49,91			
1.04.003.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		200.000.000			199.630.000	99,82			
1.04.003.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		200.000.000			-	-			
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS JUMUM (PSU)		13.491.456.000			11.445.463.966	84,83			
1.04.005.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		13.491.456.000			11.445.463.966	84,83			
1.04.005.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		943.344.000			905.918.000	96,03			
1.04.005.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		12.548.112.000	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	0 Unit Rumah	10.539.545.966	83,99	0 Unit Rumah	-	
	JUMLAH		858.296.980.760			710.445.999.182	82,77			
1-05.0-00.0-00.01.1000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah		34.329.753.918			30.565.038.884	89,03			
1.05.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		25.804.282.800			22.058.229.627	85,48			
1.05.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		191.482.900			191.202.650	99,85			
1.05.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		98.229.760	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Laporan	98.175.000	99,94	7 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		13.630.190	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.574.000	99,59	1 Dokumen	100	
1.05.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		11.336.550	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.336.550	100	1 Dokumen	100	
1.05.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		68.286.400	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	68.117.100	99,75	3 Dokumen	100	
1.05.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16.944.202.150			16.555.569.618	97,71			
1.05.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		16.875.183.800	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang	16.486.624.618	97,7	138 Orang	100	
1.05.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		37.945.900	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	37.945.000	100	1 Laporan	100	
1.05.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		31.072.450	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	31.000.000	99,77	2 Laporan	100	
1.05.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		351.000.000			350.730.000	99,92			
1.05.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		351.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	350.730.000	99,92	6 Orang	100	
1.05.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.206.241.400			3.105.947.160	96,87			
1.05.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.441.400	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.400.000	99,44	2 Paket	100	
1.05.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		136.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	36.000.000	26,47	1 Paket	50	
1.05.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	100	12 Paket	100	
1.05.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		127.800.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	127.786.450	99,99	6 Paket	100	
1.05.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		21.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	21.000.000	100	3 Dokumen	25	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		150.000.000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	100	2 Paket	100	
1.05.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		860.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	859.905.000	99,99	2 Laporan	100	
1.05.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.892.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69 Laporan	1.891.855.710	99,99	69 Laporan	100	
1.05.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.110.000.000			-	-			
1.05.001.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3.110.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	-	-	0 unit	-	
1.05.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		526.719.000			414.168.849	78,63			
1.05.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		421.099.000	Jumlah Koordinasi dan tersedia air untuk kebutuhan Kantor dan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	310.588.849	73,76	1 Tahun	100	
1.05.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		105.620.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	103.580.000	98,07	2 Laporan	100	
1.05.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.474.637.350			1.440.611.350	97,69			
1.05.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		529.937.350	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 unit	501.232.350	94,58	40 unit	100	
1.05.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		794.700.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	789.379.000	99,33	21 unit	100	
1.05.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		150.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	150.000.000	100	2 unit	100	
1.05.002	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMMUM		4.124.905.000			4.107.867.585	99,59			
1.05.002.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		3.120.205.000			3.112.627.685	99,76			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.002.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		451.605.000	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 Laporan	451.605.000	100	4 Laporan	100	
1.05.002.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		298.950.000	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Laporan	291.736.000	97,59	2 Laporan	100	
1.05.002.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		2.093.901.300	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	3 Dokumen	2.093.639.965	99,99	3 Dokumen	100	
1.05.002.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		275.748.700	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	275.646.720	99,96	1 Laporan	100	
1.05.002.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		1.004.700.000			995.239.900	99,06			
1.05.002.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		350.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	341.683.350	97,62	1 Laporan	100	
1.05.002.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		654.700.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	653.556.550	99,83	1 Laporan	100	
1.05.003	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		3.900.566.118			3.898.989.145	99,96			
1.05.003.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		1.100.000.000			1.099.917.357	99,99			
1.05.003.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)		1.100.000.000	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	40 Orang	1.099.917.357	99,99	40 Orang	100	
1.05.003.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		500.500.000			500.400.001	99,98			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.003.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		200.000.000	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	60 Orang	199.900.001	99,95	60 Orang	100	
1.05.003.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana		300.500.000	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang	300.500.000	100	50 Orang	100	
1.05.003.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.000.000.000			998.982.409	99,9			
1.05.003.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		-			-	-			
1.05.003.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.000.000.000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	998.982.409	99,9	500 Orang	100	
1.05.003.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1.300.066.118			1.299.689.378	99,97			
1.05.003.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		218.553.350	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan	1 Dokumen	218.532.100	99,99	1 Dokumen	100	
1.05.003.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi		350.000.000	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	349.947.610	99,98	1 Laporan	100	
1.05.003.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		200.000.000	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 keluarga	200.000.000	100	60 keluarga	100	
1.05.003.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi		531.512.768	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang	2 Dokumen	531.209.668	99,94	2 Dokumen	100	
1.05.004	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		500.000.000			499.952.527	99,99			
1.05.004.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		500.000.000			499.952.527	99,99			
1.05.004.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		500.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	499.952.527	99,99	1 Laporan	100	
	JUMLAH		34.329.753.918			30.565.038.884	89,03			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1-06.2-08.2-12.01.1000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		45.301.434.190			42.464.871.061	93,74			
1.06.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		35.852.471.320			33.132.715.384	92,41			
1.06.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		243.994.115			243.988.390	100			
1.06.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		45.163.450	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	45.163.450	100	5 Dokumen	100	
1.06.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		45.163.450	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	45.163.450	100	5 Dokumen	100	
1.06.001.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		53.261.425	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	53.261.425	100	5 Dokumen	100	
1.06.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		41.695.725	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	41.690.000	99,99	5 Dokumen	100	
1.06.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		58.710.065	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	58.710.065	100	5 Dokumen	100	
1.06.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		26.778.163.900			24.173.347.607	90,27			
1.06.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		26.778.163.900	Jumlah Aparatur yang mendapatkan	201 Orang	24.173.347.607	90,27	201 Orang	100	
1.06.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		482.400.000			481.026.400	99,72			
1.06.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		242.400.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	201 Pasang	241.026.400	99,43	201 Pasang	100	
1.06.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		240.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	240.000.000	100	5 Orang	100	
1.06.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.469.094.305			2.465.533.583	99,86			
1.06.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		310.315.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	0 Paket	307.790.000	99,19	0 Paket	-	
1.06.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		149.809.305	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	148.866.000	99,37	1 Paket	100	
1.06.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		252.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	252.000.000	100	1 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.06.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.756.970.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	1.756.877.583	99,99	44 Laporan	100	
1.06.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		260.500.000			259.500.000	99,62			
1.06.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		260.500.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 Unit	259.500.000	99,62	9 Unit	100	
1.06.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.091.339.000			1.004.398.904	92,03			
1.06.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.495.000	99,96	1 Laporan	100	
1.06.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		757.472.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	670.536.904	88,52	3 Laporan	100	
1.06.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		321.367.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 Laporan	321.367.000	100	8 Laporan	100	
1.06.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.526.980.000			4.504.920.500	99,51			
1.06.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		512.420.000	Jumlah Kendaraan Dinas Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 Unit	510.150.000	99,56	9 Unit	100	
1.06.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14.560.000	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	14.560.000	100	17 Unit	100	
1.06.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		4.000.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	3.980.210.500	99,51	4 Unit	100	
1.06.002	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		793.559.197			793.559.197	100			
1.06.002.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		793.559.197			793.559.197	100			
1.06.002.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi		131.159.747	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	131.159.747	100	60 Orang	100	
1.06.002.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi		500.144.490	Jumlah Keluarga yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Keluarga	500.144.490	100	30 Keluarga	100	
1.06.002.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi		162.254.960	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Lembaga	162.254.960	100	10 Lembaga	100	
1.06.004	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		3.157.228.127			3.139.079.350	99,43			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.06.004.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		692.035.177			684.033.850	98,84			
1.06.004.1.01.01	Penyediaan Permakanan		248.375.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	18 Orang	245.718.000	98,93	18 Orang	100	
1.06.004.1.01.02	Penyediaan Sandang		120.000.000	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	18 Orang	118.200.000	98,5	18 Orang	100	
1.06.004.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		100.010.177	Jumlah orang yang terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	18 Orang	97.600.000	97,59	18 Orang	100	
1.06.004.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		24.000.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual kewenangan Provinsi	18 Orang	24.000.000	100	18 Orang	100	
1.06.004.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari		50.000.000	Jumlah Peserta Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari hari Kewenangan Provinsi	18 Orang	50.000.000	100	18 Orang	100	
1.06.004.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar		149.650.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	18 Dokumen	148.515.850	99,24	18 Dokumen	100	
1.06.004.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		424.916.930			424.910.000	100			
1.06.004.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		45.216.930	Jumlah orang yang terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	17 Orang	45.210.000	99,98	17 Orang	100	
1.06.004.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		379.700.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	379.700.000	100	1 Dokumen	100	
1.06.004.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		1.690.276.020			1.681.935.500	99,51			
1.06.004.1.03.01	Penyediaan Permakanan		1.324.750.000	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standart Gizi minimal Kewenangan Provinsi	38 Orang	1.317.012.000	99,42	38 Orang	100	
1.06.004.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		147.326.020	Jumlah orang yang terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	38 Orang	146.723.500	99,59	38 Orang	100	
1.06.004.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial		64.200.000	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	38 Orang	64.200.000	100	38 Orang	100	
1.06.004.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		24.000.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual kewenangan Provinsi	38 Orang	24.000.000	100	38 Orang	100	
1.06.004.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari		50.000.000	Jumlah Peserta Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari hari Kewenangan Provinsi	38 Orang	50.000.000	100	38 Orang	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.06.004.1.03.12	Pemulasaraan		80.000.000	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	3	80.000.000	100	3	100	
1.06.004.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		350.000.000			348.200.000	99,49			
1.06.004.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		350.000.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual kewenangan Provinsi	20 Orang	348.200.000	99,49	20 Orang	100	
1.06.005	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		878.607.560			876.097.560	99,71			
1.06.005.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		878.607.560			876.097.560	99,71			
1.06.005.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		375.807.560	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Keluarga	374.307.560	99,6	30 Keluarga	100	
1.06.005.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		502.800.000	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miski Lintas Kabupaten/ Kota	36 Keluarga	501.790.000	99,8	36 Keluarga	100	
1.06.006	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		1.182.886.496			1.180.886.080	99,83			
1.06.006.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		1.182.886.496			1.180.886.080	99,83			
1.06.006.1.01.01	Penyediaan Permakanan		497.334.016	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	256 Orang	495.360.000	99,6	256 Orang	100	
1.06.006.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		685.552.480	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan provinsi	33 Orang	685.526.080	100	33 Orang	100	
2.08.002	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		500.000.950			500.000.950	100			
2.08.002.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		200.000.950			200.000.950	100			
2.08.002.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		200.000.950	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	3 OPD	200.000.950	100	3 OPD	100	
2.08.002.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi		150.000.000			150.000.000	100			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.08.002.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	150.000.000	100	2 Dokumen	100	
2.08.002.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		150.000.000			150.000.000	100			
2.08.002.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		150.000.000	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang tersedia	3 Dokumen	150.000.000	100	3 Dokumen	100	
2.08.003	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		674.540.185			585.007.185	86,73			
2.08.003.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		260.000.000			260.000.000	100			
2.08.003.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		260.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	260.000.000	100	5 Dokumen	100	
2.08.003.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		89.533.000			-	-			
2.08.003.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		89.533.000	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	70 Orang	-	-	70 Orang	100	
2.08.003.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		325.007.185			325.007.185	100			
2.08.003.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi		177.157.370	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 Orang	177.157.370	100	50 Orang	100	
2.08.003.1.03.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		147.849.815	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	147.849.815	100	5 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.08.004	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		125.000.000			125.000.000	100			
2.08.004.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		125.000.000			125.000.000	100			
2.08.004.1.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi		125.000.000	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang tersedia	5 Dokumen	125.000.000	100	5 Dokumen	100	
2.08.006	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		268.103.720			268.103.720	100			
2.08.006.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		124.954.530			124.954.530	100			
2.08.006.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		124.954.530	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi dan Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia	30 Organisasi	124.954.530	100	30 Organisasi	100	
2.08.006.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		143.149.190			143.149.190	100			
2.08.006.1.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		143.149.190	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	35 Orang	143.149.190	100	35 Orang	100	
2.08.007	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		411.907.275			408.702.275	99,22			
2.08.007.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		126.440.275			126.440.275	100			
2.08.007.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		126.440.275	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	126.440.275	100	5 Dokumen	100	
2.08.007.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		220.705.000			217.500.000	98,55			
2.08.007.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		220.705.000	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	7 Layanan	217.500.000	98,55	7 Layanan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.08.007.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		64.762.000			64.762.000	100			
2.08.007.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		64.762.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	64.762.000	100	5 Dokumen	100	
2.12.002	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		295.600.000			295.600.000	100			
2.12.002.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		295.600.000			295.600.000	100			
2.12.002.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk		295.600.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	295.600.000	100	5 Laporan	100	
2.12.003	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		321.300.000			321.300.000	100			
2.12.003.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil		210.500.000			210.500.000	100			
2.12.003.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil		210.500.000	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	5 Dokumen	210.500.000	100	5 Dokumen	100	
2.12.003.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		110.800.000			110.800.000	100			
2.12.003.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil		110.800.000	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	5 Laporan	110.800.000	100	5 Laporan	100	
2.12.004	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		705.219.360			705.219.360	100			
2.12.004.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		216.883.515			216.883.515	100			
2.12.004.1.01.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		216.883.515	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Dokumen	216.883.515	100	5 Dokumen	100	
2.12.004.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		288.561.915			288.561.915	100			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.12.004.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		288.561.915	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	5 Laporan	288.561.915	100	5 Laporan	100	
2.12.004.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		199.773.930			199.773.930	100			
2.12.004.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		199.773.930	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4 Orang	199.773.930	100	4 Orang	100	
2.12.005	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		135.010.000			133.600.000	98,96			
2.12.005.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan		135.010.000			133.600.000	98,96			
2.12.005.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain		135.010.000	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	5 Dokumen	133.600.000	98,96	5 Dokumen	100	
	JUMLAH		45.301.434.190			42.464.871.061	93,74			
2-07.2-17.3-30.01.1000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja		52.652.055.105			47.513.240.667	90,24			dari TP2K Papua
2.07.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		37.786.702.441			34.772.916.995	92,02			
2.07.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		37.622.689			37.572.874	99,87			
2.07.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		17.786.979	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen	10 Dokumen	17.737.164	99,72	8 Dokumen	80	
2.07.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		19.835.710	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	19.835.710	100	6 laporan	75	
2.07.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		34.348.218.160			31.387.894.977	91,38			
2.07.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		34.286.702.700	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	284 orang/bulan	31.326.379.517	91,37	284 orang/bulan	100	
2.07.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		35.935.975	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	5 Laporan	35.935.975	100	5 Laporan	100	
2.07.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		25.579.485	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semester an	5 Laporan	25.579.485	100	5 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.07.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.732.597.900			1.732.126.805	99,97			
2.07.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		17.954.700	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	250 Paket	17.938.000	99,91	250 Paket	100	
2.07.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		50.459.400	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	50.459.195	100	1 Paket	100	
2.07.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		31.983.800	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 paket	31.983.800	100	3 paket	100	
2.07.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		156.000.000	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	3 paket	156.000.000	100	3 paket	100	
2.07.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		158.700.000	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	10 laporan	158.699.250	100	10 laporan	100	
2.07.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.317.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	1.317.046.560	99,97	15 Laporan	100	
2.07.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		236.804.500			236.721.000	99,96			
2.07.001.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		180.000.000	Jumlah unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	180.000.000	100	0 unit	-	
2.07.001.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		56.804.500	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BAngunan Lainnya yang disediakan	4 unit	56.721.000	99,85	1 unit	25	
2.07.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		911.523.592			867.634.839	95,19			
2.07.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	-	-	1 laporan	100	
2.07.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		481.923.592	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik yang disediakan	3 laporan	445.234.839	92,39	3 laporan	100	
2.07.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		429.600.000	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	422.400.000	98,32	1 Laporan	100	
2.07.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		519.935.600			510.966.500	98,28			
2.07.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		397.655.600	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	388.883.500	97,79	5 unit	100	
2.07.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		22.280.000	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	22.236.000	99,8	10	100	
2.07.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	99.847.000	99,85	2 unit	100	
2.07.003	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		1.499.967.950			1.496.656.450	99,78			
2.07.003.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		1.349.990.670			1.347.040.270	99,78			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.07.003.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		1.349.990.670	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	100 Orang	1.347.040.270	99,78	100 Orang	100	
2.07.003.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		149.977.280			149.616.180	99,76			
2.07.003.1.02.01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja		149.977.280	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	2 LPK	149.616.180	99,76	4 LPK	200	
2.07.004	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		200.394.591			198.087.561	98,85			
2.07.004.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		200.394.591			198.087.561	98,85			
2.07.004.1.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja		200.394.591	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	198.087.561	98,85	20 Orang	100	
2.07.005	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		1.290.192.274			1.259.188.924	97,6			
2.07.005.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		499.979.874			468.976.524	93,8			
2.07.005.1.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial		300.000.000	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	8 Perusahaan	300.000.000	100	10 Perusahaan	125	
2.07.005.1.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		199.979.874	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	168.976.524	84,5	1 Laporan	100	
2.07.005.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		348.780.100			348.780.100	100			
2.07.005.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		348.780.100	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	348.780.100	100	28 Perkara	140	
2.07.005.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		441.432.300			441.432.300	100			
2.07.005.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)		441.432.300	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	441.432.300	100	1 Surat Keputusan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.07.006	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		446.072.077			445.919.576	99,97			
2.07.006.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		446.072.077			445.919.576	99,97			
2.07.006.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		200.818.952	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	50 Perusahaan	200.818.952	100	50 Perusahaan	100	
2.07.006.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		245.253.125	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	50 Perusahaan	245.100.624	99,94	50 Perusahaan	100	
2.17.003	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		406.504.668			385.773.918	94,9			
2.17.003.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		406.504.668			385.773.918	94,9			
2.17.003.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat		106.504.995	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	3 Dokumen	88.554.995	83,15	3 Dokumen	100	
2.17.003.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		299.999.673	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	50 Unit Usaha	297.218.923	99,07	6 Unit Usaha	12	
2.17.004	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		459.756.819			459.082.719	99,85			
2.17.004.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		459.756.819			459.082.719	99,85			
2.17.004.1.01.01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi		259.756.819	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	50 Unit Usaha	259.408.819	99,87	76 Unit Usaha	152	
2.17.004.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi		200.000.000	Jumlah Koperasi yang dapat dinilai tingkat kesehatannya	50 unit usaha	199.673.900	99,84	0 unit usaha	-	
2.17.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPFRASIAN		450.000.000			421.200.000	93,6			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.17.005.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		450.000.000			421.200.000	93,6			
2.17.005.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		450.000.000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	421.200.000	93,6	100 Orang	100	
2.17.006	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		740.242.114			652.468.964	88,14			
2.17.006.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		740.242.114			652.468.964	88,14			
2.17.006.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		399.999.340	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	5 Unit Usaha	312.226.190	78,06	7 Unit Usaha	140	
2.17.006.1.01.03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		340.242.774	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	150 Keluarga	340.242.774	100	150 Keluarga	100	
2.17.007	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		3.837.970.016			2.878.154.753	74,99			
2.17.007.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		3.837.970.016			2.878.154.753	74,99			
2.17.007.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		2.051.419.016	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	130 Unit Usaha	1.393.151.053	67,91	210 Unit Usaha	161,54	
2.17.007.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		1.786.551.000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	518 Orang	1.485.003.700	83,12	460 Orang	88,8	
2.17.008	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		398.350.000			308.861.695	77,54			
2.17.008.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		398.350.000			308.861.695	77,54			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.17.008.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		298.350.000	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	90 Unit	208.875.000	70,01	50 Unit	55,56	
2.17.008.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM		100.000.000	Jumlah Penyelesaian Perkara bagi pelaku UMKM	20 unit usaha	99.986.695	99,99	30 unit usaha	150	
3.30.001			-			-	-			
3.30.001.1.01			-			-	-			
3.30.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.02			-			-	-			
3.30.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.06			-			-	-			
3.30.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.07			-			-	-			
3.30.001.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.08			-			-	-			
3.30.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Papua	-			-	-			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.30.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.09			-			-	-			
3.30.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Papua	-			-	-			
3.30.003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		145.900.100			145.892.100	99,99			
3.30.003.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		145.900.100			145.892.100	99,99			
3.30.003.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		145.900.100	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	145.892.100	99,99	1 Laporan	100	
3.30.004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING		1.153.559.120			284.389.750	24,65			
3.30.004.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasikan dalam Sistem Informasi Perdagangan		1.153.559.120			284.389.750	24,65			
3.30.004.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		299.999.120	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	284.389.750	94,8	1 Laporan	100	
3.30.004.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		853.560.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	-	-	0 Laporan	-	
3.30.005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		449.968.390			448.259.730	99,62			
3.30.005.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		449.968.390			448.259.730	99,62			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.30.005.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		449.968.390	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	30 Pelaku Usaha	448.259.730	99,62	4 Pelaku Usaha	13,33	
3.30.006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		1.047.656.050			1.043.183.660	99,57			
3.30.006.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		797.668.715			794.887.460	99,65			
3.30.006.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian		399.668.915	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	5 Dokumen	399.225.200	99,89	25 Dokumen	500	
3.30.006.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi		397.999.800	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	5 Sertifikat	395.662.260	99,41	5 Sertifikat	100	
3.30.006.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		249.987.335			248.296.200	99,32			
3.30.006.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen		249.987.335	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Laporan	248.296.200	99,32	1 Laporan	100	
3.31.002	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		2.039.611.495			2.013.996.872	98,74			
3.31.002.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		-			-	-			
3.31.002.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		-			-	-			
3.31.002.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		-	Jumlah bantuan peralatan dan mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP yang di berikan	3 3 unit	-	-	5 3 unit	166,67	
3.31.002.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		-	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta orang asli papua (OAP) di provinsi	1 dokumen	-	-	0 dokumen	-	
3.31.002.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		-			-	-			
3.31.002.3.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		2.039.611.495			2.013.996.872	98,74			
3.31.002.3.01.08	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Kab. Jayapura	1.535.753.165	Jumlah bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	3 Unit	1.510.689.420	98,37	3 Unit	100	
3.31.002.3.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Kab. Jayapura, Kab. Keerom	259.999.928	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	259.899.928	99,96	1 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.31.002.3.01.10	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Kota Jayapura	243.858.402	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	1 Dokumen	243.407.524	99,82	1 Dokumen	100	
3.31.004	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		-			-	-			
3.31.004.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		-			-	-			
3.31.004.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		-			-	-			
3.31.004.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas		-			-	-			
3.32.003	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		299.207.000			299.207.000	100			
3.32.003.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		299.207.000			299.207.000	100			
3.32.003.1.01.06	Pelatihan Transmigrasi		299.207.000	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	20 Orang	299.207.000	100	20 Orang	100	
JUMLAH			52.652.055.105			47.513.240.667	90,24			
2-09.3-27.0-00.01.1000	Dinas Pertanian dan Pangan		91.462.009.141			83.673.899.451	91,48			
2.09.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		61.479.456.200			55.045.517.349	89,53			
2.09.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		58.618.056.200			52.264.082.626	89,16			
2.09.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		58.618.056.200	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	454 Orang/ Bulan	52.264.082.626	89,16	454 Orang/ Bulan	100	
2.09.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.544.970.000			1.531.766.542	99,15			
2.09.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		128.476.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	127.683.300	99,38	12 Paket	100	
2.09.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		80.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	79.999.629	100	1 Paket	100	
2.09.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		44.444.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	44.443.250	100	250 Paket	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.09.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		105.700.000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	105.699.300	100	1 Paket	100	
2.09.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.186.350.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73 Laporan	1.173.941.063	98,95	73 Laporan	100	
2.09.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		897.700.000			830.942.503	92,56			
2.09.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		825.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	758.542.503	91,92	12 Laporan	100	
2.09.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		48.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	48.400.000	99,79	12 Laporan	100	
2.09.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		24.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000	100	12 Laporan	100	
2.09.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		418.730.000			418.725.678	100			
2.09.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		418.730.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	418.725.678	100	21 Unit	100	
2.09.003	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Masyarakat		1.000.738.510			999.930.134	99,92			
2.09.003.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		1.000.738.510			999.930.134	99,92			
2.09.003.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		1.000.738.510	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2 Laporan	999.930.134	99,92	2 Laporan	100	
2.09.005	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		1.000.000.207			993.546.100	99,35			
2.09.005.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.000.000.207			993.546.100	99,35			
2.09.005.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.000.000.207	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Sertifikat	993.546.100	99,35	30 Sertifikat	100	
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		11.682.218.152			11.199.888.932	95,87			
3.27.002.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		615.000.000			600.716.791	97,68			
3.27.002.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		85.000.000	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	1 Laporan	83.916.000	98,72	1 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.002.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		530.000.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	516.800.791	97,51	1 Dokumen	100	
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		7.723.676.402			7.508.848.330	97,22			
3.27.002.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		599.943.975	Jumlah Sertifikat Benih	10000 Sertifikat	589.904.112	98,33	10000 Sertifikat	100	
3.27.002.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		1.982.412.020	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	3 Laporan	1.890.303.161	95,35	3 Laporan	100	
3.27.002.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		2.316.907.788	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	3 Dokumen	2.341.139.916	101,05	3 Dokumen	100	
3.27.002.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		2.824.412.619	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	7 Laporan	2.687.501.141	95,15	7 Laporan	100	
3.27.002.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		1.995.384.000			1.813.159.300	90,87			
3.27.002.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		1.995.384.000	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1.813.159.300	90,87	1 Laporan	100	
3.27.002.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		1.348.157.750			1.277.164.511	94,73			
3.27.002.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		1.348.157.750	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Dinroduksi	1 Laporan	1.277.164.511	94,73	1 Laporan	100	
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		9.066.296.000			8.356.897.798	92,18			
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		9.066.296.000			8.356.897.798	92,18			
3.27.003.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		1.070.347.000	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3 Dokumen	1.068.212.942	99,8	3 Dokumen	100	
3.27.003.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		7.995.949.000	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	6 Unit	7.288.684.856	91,15	6 Unit	100	
3.27.004	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		614.725.000			608.450.465	98,98			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.004.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		314.725.000			308.565.450	98,04			
3.27.004.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		314.725.000	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular	9 Layanan	308.565.450	98,04	9 Layanan	100	
3.27.004.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		300.000.000			299.885.015	99,96			
3.27.004.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		300.000.000	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	200 sampel	299.885.015	99,96	200 sampel	100	
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		599.906.709			599.848.600	99,99			
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		599.906.709			599.848.600	99,99			
3.27.005.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		599.906.709	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	165 Ha	599.848.600	99,99	165 Ha	100	
3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		124.150.000			119.150.000	95,97			
3.27.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		124.150.000			119.150.000	95,97			
3.27.006.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		124.150.000			119.150.000	95,97			
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		5.894.518.363			5.750.670.073	97,56			
3.27.007.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		2.640.231.209			2.522.939.575	95,56			
3.27.007.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN		1.000.000.000	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	888.860.610	88,89	60 Orang	100	
3.27.007.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta		1.640.231.209	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 Orang	1.634.078.965	99,62	90 Orang	100	
3.27.007.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		2.911.997.695			2.885.910.950	99,1			
3.27.007.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		299.997.695	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	375 Dokumen	298.435.950	99,48	375 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.007.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		2.612.000.000	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	1 Kelompok	2.587.475.000	99,06	1 Kelompok	100	
3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		342.289.459			341.819.548	99,86			
3.27.007.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		342.289.459	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	3 Unit	341.819.548	99,86	3 Unit	100	
JUMLAH			91.462.009.141			83.673.899.451	91,48			
2-11.3-28.0-00.01.1000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		106.000.446.527			100.096.732.116	94,43			
2.11.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		81.157.295.705			76.183.306.087	93,87			
2.11.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		200.000.000			190.840.000	95,42			
2.11.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		200.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	190.840.000	95,42	1 Laporan	100	
2.11.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		72.723.629.063			67.797.403.333	93,23			
2.11.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		72.723.629.063	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	722 Orang/ Bulan	67.797.403.333	93,23	722 Orang/ Bulan	100	
2.11.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.409.678.008			2.382.603.525	98,88			
2.11.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		114.616.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	113.419.800	98,96	1 Paket	100	
2.11.001.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		8.340.728	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.338.000	99,97	1 Paket	100	
2.11.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		199.999.880	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.932.745	99,97	1 Paket	100	
2.11.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		80.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	100	1 Paket	100	
2.11.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		30.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100	
2.11.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		140.400.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	140.400.000	100	1 Laporan	100	
2.11.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.836.321.400	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.810.512.980	98,59	1 Laporan	100	
2.11.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.356.822.282			3.346.011.054	99,68			
2.11.001.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.701.539.674	Jumlah Kantor Yang dibangun	2 2 Unit	1.696.743.564	99,72	2 2 Unit	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.001.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.655.282.608	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.649.267.490	99,64	1 Unit	100	
2.11.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.135.983.144			2.135.692.175	99,99			
2.11.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		37.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	37.500.000	100	1 Laporan	100	
2.11.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		575.033.144	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	574.742.175	99,95	1 Laporan	100	
2.11.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.523.450.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.523.450.000	100	1 Laporan	100	
2.11.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		331.183.208			330.756.000	99,87			
2.11.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		266.883.208	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	266.456.000	99,84	11 Unit	100	
2.11.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		64.300.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	64.300.000	100	57 Unit	100	
2.11.002	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP		616.350.000			613.209.753	99,49			
2.11.002.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		140.000.000			139.014.643	99,3			
2.11.002.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi		140.000.000	Jumlah Dokumen	1 Laporan	139.014.643	99,3	1 Laporan	100	
2.11.002.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		476.350.000			474.195.110	99,55			
2.11.002.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		476.350.000	Jumlah Dokumen	1 Laporan	474.195.110	99,55	1 Laporan	100	
2.11.003	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		2.608.650.194			2.107.589.723	80,79			
2.11.003.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		2.608.650.194			2.107.589.723	80,79			
2.11.003.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		108.650.194	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	106.652.850	98,16	1 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.003.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		2.500.000.000			2.000.936.873	80,04			
2.11.005	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		74.999.990			74.183.160	98,91			
2.11.005.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		74.999.990			74.183.160	98,91			
2.11.005.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		74.999.990	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	74.183.160	98,91	1 Dokumen	100	
2.11.006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		199.999.816			193.766.140	96,88			
2.11.006.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		199.999.816			193.766.140	96,88			
2.11.006.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		199.999.816	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	5 Orang	193.766.140	96,88	5 Orang	100	
2.11.008	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		1.133.627.320			1.121.457.891	98,93			
2.11.008.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		1.133.627.320			1.121.457.891	98,93			
2.11.008.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan		233.633.610	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	5 Lembaga	233.344.291	99,88	5 Lembaga	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.008.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		899.993.710	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	200 Orang	888.113.600	98,68	200 Orang	100	
2.11.009	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		228.666.748			226.409.604	99,01			
2.11.009.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		228.666.748			226.409.604	99,01			
2.11.009.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		228.666.748	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 entitas	226.409.604	99,01	3 entitas	100	
2.11.010	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		100.000.000			96.601.970	96,6			
2.11.010.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		100.000.000			96.601.970	96,6			
2.11.010.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan		100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	2 Dokumen	96.601.970	96,6	2 Dokumen	100	
2.11.011	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		237.699.642			236.116.660	99,33			
2.11.011.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		237.699.642			236.116.660	99,33			
2.11.011.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		237.699.642	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang	2 Dokumen	236.116.660	99,33	2 Dokumen	100	
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		13.004.746.250			12.788.438.294	98,34			
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		698.680.000			646.989.000	92,6			
3.28.003.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		698.680.000			646.989.000	92,6			
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		1.748.750.000			1.731.374.597	99,01			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.28.003.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		449.500.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	440.101.247	97,91	1 Dokumen	100	
3.28.003.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung		1.299.250.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	1.291.273.350	99,39	2 Dokumen	100	
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		7.908.260.000			7.854.678.366	99,32			
3.28.003.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		500.000.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	499.500.000	99,9	10 Ha	100	
3.28.003.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		7.408.260.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	7.355.178.366	99,28	100 Ha	100	
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		499.996.250			499.987.850	100			
3.28.003.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		499.996.250	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	499.987.850	100	100 Ha	100	
3.28.003.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		1.499.060.000			1.434.922.812	95,72			
3.28.003.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		1.499.060.000	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-PBPHH	1 Unit Manajemen	1.434.922.812	95,72	1 Unit Manajemen	100	
3.28.003.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		650.000.000			620.485.669	95,46			
3.28.003.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		650.000.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	620.485.669	95,46	1 Dokumen	100	
3.28.004	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		5.501.942.862			5.455.652.834	99,16			
3.28.004.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		5.501.942.862			5.455.652.834	99,16			
3.28.004.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		5.501.942.862	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	10 Ha	5.455.652.834	99,16	10 Ha	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.28.005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		1.136.468.000			1.000.000.000	87,99			
3.28.005.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		1.136.468.000			1.000.000.000	87,99			
3.28.005.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		1.136.468.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	1.000.000.000	87,99	4 Kelompok	100	
JUMLAH			106.000.446.527			100.096.732.116	94,43			
2-11.3-28.0-00.01.1001	Cabang Dinas Kehutanan Jayapura		600.000.000			593.452.206	98,91			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		400.000.000			394.984.506	98,75			
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000			394.984.506	98,75			
3.28.003.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3 Ha	394.984.506	98,75	3 Ha	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALTRAN SUNGAI (DAS)		200.000.000			198.467.700	99,23			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		200.000.000			198.467.700	99,23			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		200.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	30 Orang	198.467.700	99,23	30 Orang	100	
JUMLAH			600.000.000			593.452.206	98,91			
2-11.3-28.0-00.01.1002	Cabang Dinas Kehutanan Sarmi		600.000.000			599.723.000	99,95			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		400.000.000			400.000.000	100			
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000			400.000.000	100			
3.28.003.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	400.000.000	100	2 Ha	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALTRAN SUNGAI (DAS)		200.000.000			199.723.000	99,86			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		200.000.000			199.723.000	99,86			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		200.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	35 Orang	199.723.000	99,86	35 Orang	100	
JUMLAH			600.000.000			599.723.000	99,95			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2-11.3-28.0-00.01.1003	Cabang Dinas Kehutanan Keerom		848.514.925			844.599.519	99,54			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		500.000.000			497.057.709	99,41			
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		338.528.000			335.604.258	99,14			
3.28.003.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		338.528.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	1 Ha	335.604.258	99,14	1 Ha	100	
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		161.472.000			161.453.451	99,99			
3.28.003.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		161.472.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	161.453.451	99,99	1 Dokumen	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		348.514.925			347.541.810	99,72			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		348.514.925			347.541.810	99,72			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		348.514.925	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	30 Orang	347.541.810	99,72	30 Orang	100	
	JUMLAH		848.514.925			844.599.519	99,54			
2-11.3-28.0-00.01.1004	Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya		600.000.000			595.797.500	99,3			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		400.000.000			395.947.500	98,99			
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000			395.947.500	98,99			
3.28.003.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	395.947.500	98,99	2 Ha	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		200.000.000			199.850.000	99,92			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		200.000.000			199.850.000	99,92			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		200.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	20 Orang	199.850.000	99,92	20 Orang	100	
	JUMLAH		600.000.000			595.797.500	99,3			
2-11.3-28.0-00.01.1022	KPHP Unit XVII Waropen		700.000.000			698.895.000	99,84			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		400.000.000			398.975.000	99,74			
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000			398.975.000	99,74			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.28.003.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	398.975.000	99,74	2 Ha	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		300.000.000			299.920.000	99,97			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		300.000.000			299.920.000	99,97			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		300.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	10 Orang	299.920.000	99,97	10 Orang	100	
	JUMLAH		700.000.000			698.895.000	99,84			
2-11.3-28.0-00.01.1023	KPHP Unit XXI Lintas Sarmi Mamberamo Raya		700.000.000			691.530.000	98,79			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		400.000.000			399.810.000	99,95			
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		179.400.000			179.210.000	99,89			
3.28.003.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		179.400.000	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	179.210.000	99,89	1 Unit	100	
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		220.600.000			220.600.000	100			
3.28.003.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		220.600.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	220.600.000	100	1 Dokumen	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		300.000.000			291.720.000	97,24			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		300.000.000			291.720.000	97,24			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		300.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	30 Orang	291.720.000	97,24	30 Orang	100	
	JUMLAH		700.000.000			691.530.000	98,79			
2-11.3-28.0-00.01.1024	KPHP Unit XXIII Sarmi		500.000.000			487.200.000	97,44			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		300.000.000			287.200.000	95,73			
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		300.000.000			287.200.000	95,73			
3.28.003.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		300.000.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3 Ha	287.200.000	95,73	3 Ha	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		200.000.000			200.000.000	100			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		200.000.000			200.000.000	100			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		200.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	30 Orang	200.000.000	100	30 Orang	100	
	JUMLAH		500.000.000			487.200.000	97,44			
2-11.3-28.0-00.01.1025	KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen		899.986.000			897.395.800	99,71			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		599.995.000			598.907.400	99,82			
3.28.003.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		599.995.000			598.907.400	99,82			
3.28.003.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		599.995.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	598.907.400	99,82	1 Dokumen	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		299.991.000			298.488.400	99,5			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		299.991.000			298.488.400	99,5			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		299.991.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	15 Orang	298.488.400	99,5	15 Orang	100	
	JUMLAH		899.986.000			897.395.800	99,71			
2-11.3-28.0-00.01.1026	KPHL Unit XX Biak		999.997.989			975.392.476	97,54			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		699.999.989			699.505.889	99,93			
3.28.003.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		168.353.889			167.859.789	99,71			
3.28.003.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		168.353.889	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	167.859.789	99,71	20 Unit	100	
3.28.003.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		531.646.100			531.646.100	100			
3.28.003.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung		144.996.100	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	144.996.100	100	1 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.28.003.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung		386.650.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	386.650.000	100	1 Dokumen	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		299.998.000			275.886.587	91,96			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		299.998.000			275.886.587	91,96			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		299.998.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	30 Orang	275.886.587	91,96	30 Orang	100	
JUMLAH			999.997.989			975.392.476	97,54			
2-11.3-28.0-00.01.1027	KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura		499.925.000			498.203.100	99,66			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		300.000.000			299.560.900	99,85			
3.28.003.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		300.000.000			299.560.900	99,85			
3.28.003.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		300.000.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	299.560.900	99,85	1 Dokumen	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		199.925.000			198.642.200	99,36			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		199.925.000			198.642.200	99,36			
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		199.925.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	30 Orang	198.642.200	99,36	30 Orang	100	
JUMLAH			499.925.000			498.203.100	99,66			
2-11.3-28.0-00.01.1028	KPHP Unit XXIX Keerom		1.099.999.793			1.089.047.764	99			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		400.000.000			392.399.500	98,1			
3.28.003.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000			392.399.500	98,1			
3.28.003.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		400.000.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	392.399.500	98,1	2 Ha	100	
3.28.006	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		699.999.793			696.648.264	99,52			
3.28.006.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		699.999.793			696.648.264	99,52			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.28.006.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		699.999.793	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	10 Orang	696.648.264	99,52	10 Orang	100	
	JUMLAH		1.099.999.793			1.089.047.764	99			
2-11.3-28.0-00.01.1034	UPTD Kebun Raya Koya Koso		850.000.000			849.845.000	99,98			
2.11.004	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		850.000.000			849.845.000	99,98			
2.11.004.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		850.000.000			849.845.000	99,98			
2.11.004.1.01.03	Pengelolaan Kebun Raya		200.000.000	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	150 Ha	200.000.000	100	150 Ha	100	
2.11.004.1.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		650.000.000	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	600 Ha	649.845.000	99,98	600 Ha	100	
	JUMLAH		850.000.000			849.845.000	99,98			
2-11.3-28.0-00.01.1035	BPTH Papua		1.049.999.600			1.022.979.847	97,43			
3.28.003	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1.049.999.600			1.022.979.847	97,43			
3.28.003.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan		1.049.999.600			1.022.979.847	97,43			
3.28.003.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih		310.962.000	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat	309.462.000	99,52	1 Sertifikat	100	
3.28.003.1.09.03	Sertifikasi Mutu Benih		539.037.600	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	10 Sertifikat	513.517.847	95,27	10 Sertifikat	100	
3.28.003.1.09.06	Pembangunan Sumber Benih		200.000.000	Luas Sumber Benih yang Dibangun	2 Ha	200.000.000	100	2 Ha	100	
	JUMLAH		1.049.999.600			1.022.979.847	97,43			
2-11.3-28.0-00.01.1036	UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek		10.850.000.000			6.344.356.775	58,47			
2.11.004	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		10.850.000.000			6.344.356.775	58,47			
2.11.004.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		10.850.000.000			6.344.356.775	58,47			
2.11.004.1.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati		10.850.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	6.344.356.775	58,47	0.6 Unit	60	
	JUMLAH		10.850.000.000			6.344.356.775	58,47			
2-11.3-28.0-00.01.1037	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua		491.662.750			491.581.410	99,98			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.003	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		491.662.750			491.581.410	99,98			
2.11.003.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		491.662.750			491.581.410	99,98			
2.11.003.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		491.662.750	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	491.581.410	99,98	1 Dokumen	100	
JUMLAH			491.662.750			491.581.410	99,98			
2-13.0-00.0-00.01.1000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua		36.003.277.261			34.496.598.319	95,82			
2.13.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		17.450.662.721			15.977.429.761	91,56			
2.13.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		489.270.400			489.270.400	100			
2.13.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		30.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.000.000	100	3 Dokumen	100	
2.13.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		30.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100	
2.13.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		30.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100	
2.13.001.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		30.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100	
2.13.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		30.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100	
2.13.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		90.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	90.000.000	100	3 Laporan	100	
2.13.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		249.270.400	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	249.270.400	100	1 Laporan	100	
2.13.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.727.762.721			10.256.439.242	87,45			
2.13.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11.577.162.721	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1032 Orang/ Bulan	10.106.375.525	87,3	1024 Orang/ Bulan	99,22	
2.13.001.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		30.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	29.903.975	99,68	83 Dokumen	97,65	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.13.001.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		30.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	29.767.234	99,22	12 Dokumen	100	
2.13.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		30.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	29.997.408	99,99	1 Laporan	100	
2.13.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		30.600.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	30.498.300	99,67	18 Laporan	100	
2.13.001.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		30.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	29.896.800	99,66	1 Dokumen	100	
2.13.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		29.633.200			29.633.200	100			
2.13.001.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		29.633.200	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	29.633.200	100	1 Dokumen	100	
2.13.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.119.196.400			1.118.836.504	99,97			
2.13.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		697.500.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	697.425.812	99,99	7 Paket	100	
2.13.001.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		29.196.400	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	29.029.520	99,43	1 Dokumen	100	
2.13.001.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		30.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	29.993.280	99,98	12 Dokumen	100	
2.13.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		150.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	86 Orang	149.887.892	99,93	79 Orang	91,86	
2.13.001.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		212.500.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	212.500.000	100	35 Orang	100	
2.13.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.960.000.000			1.959.443.772	99,97			
2.13.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		35.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.688.000	99,11	1 Paket	100	
2.13.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		62.500.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	62.300.000	99,68	2 Paket	100	
2.13.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	100	1 Paket	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.13.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		150.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	150.000.000	100	100 Dokumen	100	
2.13.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		112.500.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	112.492.660	99,99	12 Laporan	100	
2.13.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.500.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	1.499.963.112	100	85 Laporan	100	
2.13.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		334.600.000			334.043.400	99,83			
2.13.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		334.600.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	334.043.400	99,83	12 Unit	100	
2.13.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		865.700.000			865.344.865	99,96			
2.13.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		183.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	183.200.000	100	12 Laporan	100	
2.13.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		682.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	682.144.865	99,95	12 Laporan	100	
2.13.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		924.500.000			924.418.378	99,99			
2.13.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		412.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	411.918.378	99,98	12 Unit	100	
2.13.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		54.500.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	54.500.000	100	20 Unit	100	
2.13.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		458.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	458.000.000	100	2 Unit	100	
2.13.004	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		2.000.000.000			1.998.935.730	99,95			
2.13.004.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		2.000.000.000			1.998.935.730	99,95			
2.13.004.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		2.000.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1.998.935.730	99,95	1 Dokumen	100	
2.13.005	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		5.453.614.700			5.453.478.815	100			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.13.005.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		5.453.614.700			5.453.478.815	100			
2.13.005.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		1.192.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	1 Dokumen	1.192.500.000	100	1 Dokumen	100	
2.13.005.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		4.261.114.700	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	4.260.978.815	100	6 Dokumen	100	
2.13.006	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA		4.899.999.840			4.884.550.148	99,68			
2.13.006.3.01	Pengembangan Data/Informasi		1.199.999.840			1.198.732.840	99,89			
2.13.006.3.01.02	Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK		1.199.999.840	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK	1 Dokumen	1.198.732.840	99,89	1 Dokumen	100	
2.13.006.3.02	Pemberdayaan Masyarakat Kampung		3.700.000.000			3.685.817.308	99,62			
2.13.006.3.02.02	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna		3.700.000.000	Jumlah Pengembangan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	3.685.817.308	99,62	5 Laporan	100	
2.13.008	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA		6.199.000.000			6.182.203.865	99,73			
2.13.008.3.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua		6.199.000.000			6.182.203.865	99,73			
2.13.008.3.01.06	Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat		2.399.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	6 Dokumen	2.397.903.410	99,95	6 Dokumen	100	
2.13.008.3.01.11	Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat		3.800.000.000	Jumlah Wirausaha Pemula di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Diidentifikasi dan Mengikuti Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung	5 Dokumen	3.784.300.455	99,59	5 Dokumen	100	
	JUMLAH		36.003.277.261			34.496.598.319	95,82			
2-15.0-00.0-00.01.1000	Dinas Perhubungan		52.123.816.995			40.028.012.953	76,79			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		28.926.373.915			21.251.681.955	73,47			
2.15.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		106.500.000			106.416.784	99,92			
2.15.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		106.500.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	106.416.784	99,92	3 Laporan	100	
2.15.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		25.485.692.615			18.370.565.908	72,08			
2.15.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		25.375.692.615	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/ Bulan	18.260.649.608	71,96	157 Orang/ Bulan	100	
2.15.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		110.000.000			109.916.300	99,92			
2.15.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.770.720.300			1.447.031.527	81,72			
2.15.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		30.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.800.000	99,33	1 Paket	100	
2.15.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		624.020.300	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	420.692.255	67,42	1 Paket	100	
2.15.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		69.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	68.874.165	99,82	1 Paket	100	
2.15.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		328.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	207.965.107	63,4	2 Laporan	100	
2.15.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		719.700.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	719.700.000	100	1 Laporan	100	
2.15.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		22.500.000			12.475.000	55,44			
2.15.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		22.500.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	12.475.000	55,44	6 Unit	60	
2.15.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.032.750.000			857.987.134	83,08			
2.15.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		41.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	26.723.900	65,18	2 Laporan	66,67	
2.15.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		500.150.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	437.663.234	87,51	3 Laporan	100	
2.15.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		491.600.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	393.600.000	80,07	1 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		508.211.000			457.205.602	89,96			
2.15.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		50.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	19.923.000	39,85	14 Unit	56	
2.15.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		458.211.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	437.282.602	95,43	9 Unit	100	
2.15.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		5.000.000.000			4.971.074.866	99,42			
2.15.002.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		4.900.000.000			4.871.892.675	99,43			
2.15.002.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		4.900.000.000	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	140 Unit	4.871.892.675	99,43	140 Unit	100	
2.15.002.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		100.000.000			99.182.191	99,18			
2.15.002.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		100.000.000	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Tersejahtera dan Terpelihara	1 Unit	99.182.191	99,18	1 Unit	100	
2.15.003	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		13.197.443.080			11.481.487.296	87			
2.15.003.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		13.197.443.080			11.481.487.296	87			
2.15.003.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional		13.197.443.080	ketersediaan pelabuhan yang memadai	1 Unit	11.481.487.296	87	1 Unit	100	
2.15.004	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		5.000.000.000			2.323.768.836	46,48			
2.15.004.3.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi		5.000.000.000			2.323.768.836	46,48			
2.15.004.3.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara		5.000.000.000	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	3 Unit	2.323.768.836	46,48	2 Unit	66,67	
	JUMLAH		52.123.816.995			40.028.012.953	76,79			
2-16.2-21.0-00.01.1000	Dinas Komunikasi dan Informatika		23.848.485.300			22.642.059.321	94,94			
2.16.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		13.308.185.300			12.102.229.772	90,94			
2.16.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.005.405.300			9.801.279.959	89,06			
2.16.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11.005.405.300	Gaji dan Tunjangan	100 Orang	9.801.279.959	89,06	80 Orang	80	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.16.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		108.000.000			107.100.000	99,17			
2.16.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		108.000.000			107.100.000	99,17			
2.16.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.291.390.000			1.291.103.958	99,98			
2.16.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100.000.000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Bulan	99.997.877	100	0 Bulan	-	
2.16.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		265.440.000			265.305.870	99,95			
2.16.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		49.950.000			49.864.000	99,83			
2.16.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		876.000.000			875.936.211	99,99			
2.16.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		31.500.000			31.457.400	99,86			
2.16.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		31.500.000			31.457.400	99,86			
2.16.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		556.500.000			556.250.000	99,96			
2.16.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		52.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.500.000	100	0 Laporan	-	
2.16.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		504.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	503.750.000	99,95	0 Laporan	-	
2.16.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		315.390.000			315.038.455	99,89			
2.16.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		115.390.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	115.272.554	99,9	0 Unit	-	
2.16.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99.949.151	99,95	0 Unit	-	
2.16.001.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99.816.750	99,82	0 Unit	-	
2.16.002	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		1.097.000.000			1.096.983.639	100			
2.16.002.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		1.097.000.000	ada	3	1.096.983.639	100	3	100	
2.16.002.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		642.000.000	ada	3	641.983.664	100	3	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.16.002.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik		455.000.000	ada	3	454.999.975	100	3	100	
2.16.003	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		9.368.300.000			9.367.850.997	100			
2.16.003.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		9.368.300.000			9.367.850.997	100			
2.16.003.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		663.100.000			663.055.000	99,99			
2.16.003.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		8.705.200.000			8.704.795.997	100			
2.21.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		75.000.000			74.994.913	99,99			
2.21.002.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		75.000.000			74.994.913	99,99			
2.21.002.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		75.000.000			74.994.913	99,99			
	JUMLAH		23.848.485.300			22.642.059.321	94,94			
2-18.0-00.0-00.01.1000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		23.356.321.522			21.639.200.497	92,65			
2.18.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		16.664.753.822			15.024.728.067	90,16			
2.18.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		148.461.900			144.664.900	97,44			
2.18.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		148.461.900	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	144.664.900	97,44	3 Dokumen	60	
2.18.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.304.595.772			7.216.554.668	86,9			
2.18.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8.249.895.772	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	7.162.479.068	86,82	65 Orang/ Bulan	100	
2.18.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		54.700.000	Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun	5 Dokumen	54.075.600	98,86	5 Dokumen	100	
2.18.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		222.600.000			196.245.000	88,16			
2.18.001.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		222.600.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	196.245.000	88,16	1 Dokumen	100	
2.18.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.076.900.000			1.788.980.000	86,14			
2.18.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		136.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	130.500.000	95,96	90 Paket	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.18.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1.940.900.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	1.658.480.000	85,45	65 Orang	100	
2.18.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.956.145.250			2.930.199.206	99,12			
2.18.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.711.300	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.633.000	99,1	5 Paket	100	
2.18.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		338.600.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	334.720.500	98,85	7 Paket	100	
2.18.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		24.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.000.000	100	3 Paket	25	
2.18.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		204.500.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	183.799.350	89,88	12 Paket	100	
2.18.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		10.320.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.199.590	98,83	12 Dokumen	100	
2.18.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		517.513.950	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	516.389.266	99,78	1 Paket	100	
2.18.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.852.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.852.457.500	100	60 Laporan	100	
2.18.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		299.740.000			291.183.000	97,15			
2.18.001.1.07.05	Pengadaan Mebel		-			-	-			
2.18.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		299.740.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	291.183.000	97,15	37 Unit	100	
2.18.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.074.700.000			886.734.010	82,51			
2.18.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12.700.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.700.000	100	1 Laporan	100	
2.18.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		362.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	177.410.500	49,01	3 Laporan	100	
2.18.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		700.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	696.623.510	99,52	2 Laporan	100	
2.18.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.581.610.900			1.570.167.283	99,28			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.18.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		460.810.900	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit	460.806.286	100	19 Unit	100	
2.18.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		120.800.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	120.774.997	99,98	25 Unit	100	
2.18.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.000.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dinelihara/Direhabilitasi	6 Unit	988.586.000	98,86	6 Unit	100	
2.18.002	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		986.983.500			975.334.230	98,82			
2.18.002.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		515.183.500			514.619.230	99,89			
2.18.002.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		515.183.500	Tersedianya dana yang dibutuhkan	1 Rp.515.183.500,-	514.619.230	99,89	80 Rp.515.183.500,-	8.000	
2.18.002.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		471.800.000			460.715.000	97,65			
2.18.002.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi		471.800.000	Tersedianya Peta Potensi Investasi di Provinsi Papua	0 Buku	460.715.000	97,65	0 Buku	-	
2.18.003	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		2.966.298.600			2.945.867.500	99,31			
2.18.003.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		2.966.298.600			2.945.867.500	99,31			
2.18.003.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		620.718.600	Tersedianya Bahan/Materi Promosi yang Up to Date di Provinsi Papua berupa : Buku Peluang Investasi, Brosur PM, Profil Proyek Investasi, Peta Peluang Usaha, Peta Penyebaran Perumahan PMA, PMDN dan Video Digital Promosi PM.	2 buku, lbr	600.287.500	96,71	1 buku, lbr	50	
2.18.003.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		2.345.580.000	Terlaksananya Promosi Dalam dan Luar Negeri	5 event	2.345.580.000	100	4 event	80	
2.18.004	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1.550.087.600			1.548.421.500	99,89			
2.18.004.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.550.087.600			1.548.421.500	99,89			
2.18.004.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		760.940.000	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi	1000	759.907.500	99,86	16	1,6	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.18.004.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		789.147.600	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah	17	788.514.000	99,92	4	23,53	
2.18.005	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		818.398.000			776.249.200	94,85			
2.18.005.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		818.398.000			776.249.200	94,85			
2.18.005.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		242.100.000	Tersedianya data perusahaan PMA/PMDN	0 dokumen	240.000.000	99,13	0 dokumen	-	
2.18.005.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		192.535.000			175.484.200	91,14			
2.18.005.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		383.763.000	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profile dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan	0 Kegiatan Usaha	360.765.000	94,01	0 Kegiatan Usaha	-	
2.18.006	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		369.800.000			368.600.000	99,68			
2.18.006.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		369.800.000			368.600.000	99,68			
2.18.006.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		369.800.000	Tersedianya data perusahaan PMA/PMDN	0 dokumen	368.600.000	99,68	0 dokumen	-	
	JUMLAH		23.356.321.522			21.639.200.497	92,65			
2-19.0-00.0-00.01.1000	Dinas Olah Raga dan Pemuda		47.373.353.596			44.629.576.505	94,21			
2.19.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		39.038.660.396			36.655.046.260	93,89			
2.19.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		59.484.800			59.406.400	99,87			
2.19.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		34.644.800	Dokumen Yang Dihasilkan	100 Dokumen	34.644.800	100	100 Dokumen	-	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.19.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		24.840.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Dokumen	24.761.600	99,68	100 Dokumen	-	
2.19.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14.501.728.196			12.150.007.384	83,78			
2.19.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14.445.168.196	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	12.093.489.384	83,72	100 Orang/Bulan	-	
2.19.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		19.560.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Laporan	19.520.000	99,8	100 Laporan	-	
2.19.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		37.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan	36.998.000	99,99	100 Laporan	-	
2.19.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		302.625.000			301.429.890	99,61			
2.19.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-			-	-			
2.19.001.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		302.625.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	301.429.890	99,61	100 Orang	-	
2.19.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.987.072.400			1.978.831.813	99,59			
2.19.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		118.609.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	118.133.000	99,6	100 Paket	-	
2.19.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		21.000.000			21.000.000	100			
2.19.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Provinsi Papua	106.463.400	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100 Paket	106.458.007	99,99	100 Paket	-	
2.19.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		300.000.000			299.751.000	99,92			
2.19.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.441.000.000			1.433.489.806	99,48			
2.19.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-			-	-			
2.19.001.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-			-	-			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.19.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.828.750.000			1.801.583.021	98,51			
2.19.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		103.250.000	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, SDA dan listrik	100 Laporan	96.058.021	93,03	100 Laporan	-	
2.19.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.725.500.000			1.705.525.000	98,84			
2.19.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.359.000.000			20.363.787.752	100,02			
2.19.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		339.000.000	Jumlah kendaraan perorang dinas	100 Unit	338.999.238	100	100 Unit	-	
2.19.001.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		20.000.000.000	Jumlah aset tetap lainnya	100 Unit	20.004.808.514	100,02	100 Unit	-	
2.19.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	19.980.000	99,9	100 Unit	-	
2.19.002	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		494.991.000			478.356.950	96,64			
2.19.002.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		250.000.000			233.576.460	93,43			
2.19.002.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi		-			-	-			
2.19.002.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		250.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan seleksi pasukan pengibar bendera	100 peserta	233.576.460	93,43	20 peserta	-	
2.19.002.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		-			-	-			
2.19.002.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		244.991.000			244.780.490	99,91			
2.19.002.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi		244.991.000	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	100 Dokumen	244.780.490	99,91	100 Dokumen	-	
2.19.003	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		7.839.702.200			7.496.173.295	95,62			
2.19.003.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		249.965.000			249.965.000	100			
2.19.003.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi		249.965.000	Terselenggaranya event olahraga bagi para pelajar	100	249.965.000	100	100	-	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.19.003.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event		-			-	-			
2.19.003.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		6.706.137.200			6.368.873.795	94,97			
2.19.003.1.03.01	Seleksi Atlet Daerah		-			-	-			
2.19.003.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		-			-	-			
2.19.003.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi		6.706.137.200	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100 Kegiatan	6.368.873.795	94,97	100 Kegiatan	-	
2.19.003.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		-			-	-			
2.19.003.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		883.600.000			877.334.500	99,29			
2.19.003.1.04.01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan		803.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	100 Dokumen	797.334.500	99,22	100 Dokumen	100	
2.19.003.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		-			-	-			
2.19.003.1.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		-			-	-			
2.19.003.1.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi		80.000.000	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	100 Organisasi	80.000.000	100	100 Organisasi	-	
	JUMLAH		47.373.353.596			44.629.576.505	94,21			
2-22.3-26.0-00.01.1000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		49.444.367.196			47.966.222.425	97,01			
2.22.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		22.668.274.550			22.374.069.636	98,7			
2.22.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		45.000.000			44.850.000	99,67			
2.22.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25.000.000	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Laporan	24.950.000	99,8	20 Laporan	100	
2.22.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.000.000	Jumlah laporan	20 Laporan	19.900.000	99,5	20 Laporan	100	
2.22.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.955.314.550			19.799.663.157	99,22			
2.22.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		19.905.314.550	Jumlah ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua	158 Orang	19.749.663.157	99,22	158 Orang	100	
2.22.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		28.800.000	Jumlah orang	12 orang/bulan	28.800.000	100	12 orang/bulan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.22.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		21.200.000	Jumlah laporan	20 Laporan	21.200.000	100	20 Laporan	100	
2.22.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		640.000.000			610.090.000	95,33			
2.22.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		480.000.000	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200 Stel	478.410.000	99,67	200 Stel	100	
2.22.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		160.000.000	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	131.680.000	82,3	4 Orang	100	
2.22.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.501.220.000			1.497.687.795	99,76			
2.22.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		62.231.200	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	62.231.200	100	15 Unit	100	
2.22.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		427.771.600	Jumlah Bahan Logistik Kantor (BBM, ATK)	2 Paket	427.770.911	100	2 Paket	100	
2.22.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		35.667.200	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	276 Buku	35.667.200	100	276 Buku	100	
2.22.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		200.000.000			196.470.000	98,24			
2.22.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		140.850.000	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	1450 Orang/Kali	140.850.000	100	1450 Orang/Kali	100	
2.22.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		634.700.000	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282 Orang	634.698.484	100	282 Orang	100	
2.22.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		494.240.000			393.840.684	79,69			
2.22.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		172.240.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	8 Laporan	116.890.584	67,86	8 Laporan	100	
2.22.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		322.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 Laporan	276.950.100	86,01	5 Laporan	100	
2.22.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		32.500.000			27.938.000	85,96			
2.22.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		32.500.000	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajakannya (Pajak kendaraan Bermotor roda 4)	1 Unit	27.938.000	85,96	1 Unit	100	
				Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajakannya (Pajak kendaraan Bermotor roda 2)	6 Unit			6 Unit	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya (Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2)	4 Unit			4 Unit	100	
				Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya (Pemeliharaan kendaraan Bermotor roda 4)	3 Unit			3 Unit	100	
2.22.002	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		3.000.000.000			2.969.270.047	98,98			
2.22.002.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		929.800.000			914.029.999	98,3			
2.22.002.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		500.000.000	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi kebudayaan	60 Orang	499.899.999	99,98	60 Orang	100	
2.22.002.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		429.800.000	Jumlah film Dokumenter	1 Paket	414.130.000	96,35	1 Paket	100	
2.22.002.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		1.370.200.000			1.355.250.241	98,91			
2.22.002.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		500.000.000	Jumlah Peserta yang mengikuti gita bahana	60 Orang	499.827.231	99,97	60 Orang	100	
2.22.002.1.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		384.000.000	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	369.223.010	96,15	1 Laporan	100	
2.22.002.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		486.200.000	Jumlah Orang/ Lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan	18 Sertifikat	486.200.000	100	18 Sertifikat	100	
2.22.002.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		700.000.000			699.989.807	100			
2.22.002.1.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		700.000.000	Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina (Cetak buku kamus Indonesia - Ansus)	300 Buah	699.989.807	100	300 Buah	100	
				Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina (Cetak kamus Indonesi - Lani)	300 Buah			300 Buah	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.22.003	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		3.712.499.789			3.703.163.048	99,75			
2.22.003.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		3.712.499.789			3.703.163.048	99,75			
2.22.003.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		2.354.779.789	Jumlah Sumber Daya Manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Jumlah Sumber Daya Manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Pelatihan Juri Seni)	60 Orang	2.349.559.721	99,78	60 Orang	100	
				Jumlah Sumber Daya Manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Jumlah Sumber Daya Manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Pelatihan Seni Lukis Bagi Sanggar Seni Remaja)	68 Orang			68 Orang	100	
2.22.003.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		1.357.720.000	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang di tingkatkan kapasitasnya (Kias Budaya Papua Ke 1) Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang di tingkatkan kapasitasnya (Pergelaran dan pameran seni kreasi baru daerah	1 Kegiatan	1.353.603.327	99,7	1 Kegiatan	100	
					1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang di tingkatkan kapasitasnya (Temu Karya Taman Budaya Se - Indonesia)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
				Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang di tingkatkan kapasitasnya (Pembuatan Sistem Aplikasi Data Informasi UPTD - Taman Budaya)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
2.22.004	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		2.825.713.820			2.744.653.647	97,13			
2.22.004.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		2.825.713.820			2.744.653.647	97,13			
2.22.004.1.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		2.825.713.820	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 Unit	2.744.653.647	97,13	5 Unit	100	
2.22.005	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		1.568.996.750			1.565.078.740	99,75			
2.22.005.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		450.000.000			446.274.290	99,17			
2.22.005.1.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		150.000.000	Jumlah Objek diduga cagar budaya yang di daftarkan	1 Objek	150.000.000	100	1 Objek	100	
2.22.005.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya		300.000.000	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	4 Objek	296.274.290	98,76	4 Objek	100	
2.22.005.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		1.118.996.750			1.118.804.450	99,98			
2.22.005.1.02.02	Pengembangan Cagar Budaya		700.000.000	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	2 Objek	699.807.700	99,97	2 Objek	100	
2.22.005.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya		418.996.750	Jumlah tenaga pelestari cagar budaya yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	38 Orang	418.996.750	100	38 Orang	100	
2.22.006	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		5.010.000.000			4.954.355.445	98,89			
2.22.006.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi		5.010.000.000			4.954.355.445	98,89			
2.22.006.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		577.582.930	Jumlah Koleksi Museum yang di lakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	5 Unit/Kegiatan	549.278.930	95,1	5 Unit/Kegiatan	100	
2.22.006.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		1.422.417.070	Jumlah sumberdaya manusia permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya	110 Orang	1.411.025.758	99,2	110 Orang	100	
2.22.006.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		3.010.000.000	Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Pameran Keliling di Kab. Biak Numfor)	1 Kegiatan	2.994.050.757	99,47	1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Gelar Pasar dan Pameran Noken bagi masyarakat (Kabupaten Keerom)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Akses Masyarakat terhadap Museum)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Pembinaan Sanggar Noken Di 4 Kabupaten/Kota)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Gelar Pasar dan Pameran Noken bagi masyarakat (Kota Jayapura)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Pelatihan Merajut Noken bagi siswa sekolah (Noken Masuk Sekolah)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Penataan Ruang Pameran Museum Noken Papua)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Gelar Pasar dan Pameran Noken bagi masyarakat (Kabupaten Jayapura)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Gelar Pasar dan Pameran Noken bagi masyarakat (Kabupaten Sarmi)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
				Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum (Pagelaran Pasar dan Pameran Noken bagi masyarakat (Kota Jayapura)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100	
3.26.002	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARTIWISATA		6.736.984.507			6.598.100.687	97,94			
3.26.002.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		5.000.000.000			4.912.017.854	98,24			
3.26.002.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		5.000.000.000	Tersedianya Lokasi Daya tarik unggulan Provinsi sesuai dengan tahapan pengembangan (Pembangunan Home Stay)	2 Unit	4.912.017.854	98,24	2 Unit	100	
				Tersedianya Lokasi Daya tarik unggulan Provinsi sesuai dengan tahapan pengembangan (Pembangunan Loss Jajanan Kuliner)	5 Unit			5 Unit	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Tersedianya Lokasi Daya tarik unggulan Provinsi sesuai dengan tahapan pengembangan (Pembangunan Ruang Ganti dan/Toilet)	12 Unit			12 Unit	100	
				Tersedianya Lokasi Daya tarik unggulan Provinsi sesuai dengan tahapan pengembangan (Pembangunan Gazebo)	12 Unit			12 Unit	100	
3.26.002.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		1.736.984.507			1.686.082.833	97,07			
3.26.002.1.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi		1.736.984.507	Tersedianya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Pembangunan Guest House di desa Rhenang Muaih)	2 Unit	1.686.082.833	97,07	2 Unit	100	
3.26.003	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		500.000.000			499.912.460	99,98			
3.26.003.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		500.000.000			499.912.460	99,98			
3.26.003.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		500.000.000	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	50 Orang	499.912.460	99,98	50 Orang	100	
3.26.004	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		1.331.897.780			1.319.243.115	99,05			
3.26.004.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		1.331.897.780			1.319.243.115	99,05			
3.26.004.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		1.331.897.780	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif	1 Unit	1.319.243.115	99,05	1 Unit	100	
3.26.005	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		2.090.000.000			1.238.375.600	59,25			
3.26.005.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		1.298.400.000			1.225.570.600	94,39			
3.26.005.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		500.000.000	Jumlah Peserta yang mengikuti Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat lanjutan	48 Orang	441.900.000	88,38	48 Orang	100	
3.26.005.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		798.400.000	Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	25 Kelompok	783.670.600	98,16	25 Kelompok	100	
3.26.005.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		791.600.000			12.805.000	1,62			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.26.005.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		791.600.000	Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan, Bimbingan teknis, dan pendampingan Ekonomi Kreatif	9 Kelompok	12.805.000	1,62	0 Kelompok	-	
JUMLAH			49.444.367.196			47.966.222.425	97,01			
3-25.0-00.0-00.01.1000	Dinas Kelautan dan Perikanan		42.843.070.797			40.468.130.478	94,46			
3.25.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		21.230.628.350			19.120.061.145	90,06			
3.25.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.316.958.700			1.315.982.468	99,93			
3.25.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		825.158.700	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	824.231.248	99,89	1 Dokumen	100	
3.25.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		491.800.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	491.751.220	99,99	1 Laporan	100	
3.25.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.403.903.400	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang	15.306.873.435	87,95	112 Orang	100	
3.25.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		17.403.903.400	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/ Bulan	15.306.873.435	87,95	112 Orang/ Bulan	100	
3.25.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		600.000.000			600.000.000	100			
3.25.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		600.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	600.000.000	100	1 Laporan	100	
3.25.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.504.583.250			1.502.737.742	99,88			
3.25.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		15.450.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.450.000	100	1 Laporan	100	
3.25.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		627.600.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	626.759.742	99,87	1 Laporan	100	
3.25.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		78.800.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	78.528.000	99,65	1 Laporan	100	
3.25.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		782.733.250	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	782.000.000	99,91	1 Laporan	100	
3.25.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		405.183.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	394.467.500	97,36	14 Unit	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.25.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		405.183.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	394.467.500	97,36	14 Unit	100	
3.25.002	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		2.381.028.160			2.378.110.764	99,88			
3.25.002.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		1.029.678.160			1.028.126.920	99,85			
3.25.002.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		492.000.000	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	40 Ha	490.987.570	99,79	40 Ha	100	
3.25.002.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		537.678.160	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau	15 Orang	537.139.350	99,9	15 Orang	100	
3.25.002.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		1.351.350.000			1.349.983.844	99,9			
3.25.002.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		528.350.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	528.305.769	99,99	1 Dokumen	100	
3.25.002.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		143.000.000	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kelompok	143.000.000	100	2 Kelompok	100	
3.25.002.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		150.000.000	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	20 Orang	149.744.550	99,83	20 Orang	100	
3.25.002.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		530.000.000	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4 Kelompok	528.933.525	99,8	4 Kelompok	100	
3.25.003	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		3.460.997.100			3.454.526.164	99,81			
3.25.003.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		2.180.100.000			2.175.959.764	99,81			
3.25.003.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		-			-	-			
3.25.003.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		1.741.900.000	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	5 Unit	1.737.759.764	99,76	5 Unit	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.25.003.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		438.200.000	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2 Unit	438.200.000	100	2 Unit	100	
3.25.003.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		1.280.897.100			1.278.566.400	99,82			
3.25.003.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		214.723.750	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan	213.805.600	99,57	1 Pelabuhan Perikanan	100	
3.25.003.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		562.023.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	560.680.000	99,76	1 Unit	100	
3.25.003.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		504.150.350	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan	504.080.800	99,99	3 Layanan	100	
3.25.004	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		6.570.381.500			6.537.290.992	99,5			
3.25.004.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		3.689.407.000			3.677.094.144	99,67			
3.25.004.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		39.600.000	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	39.200.000	98,99	1 Dokumen	100	
3.25.004.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		3.189.912.500	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	22 Unit	3.178.252.674	99,63	21 Unit	95,45	
3.25.004.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		239.894.500	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	239.641.470	99,89	1 Unit	100	
3.25.004.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi		220.000.000	Jumlah Pembudidaya	10 Orang	220.000.000	100	10 Orang	100	
3.25.004.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		2.880.974.500			2.860.196.848	99,28			
3.25.004.1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		537.000.000	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	533.634.000	99,37	4 Unit	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.25.004.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2.343.974.500	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	2.326.562.848	99,26	1 Unit	100	
3.25.005	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		6.042.896.440			5.822.365.696	96,35			
3.25.005.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		6.042.896.440			5.822.365.696	96,35			
3.25.005.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		837.611.440	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	837.560.080	99,99	1 Dokumen	100	
3.25.005.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		326.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	325.516.860	99,79	1 Dokumen	100	
3.25.005.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		96.725.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	96.725.000	100	1 Dokumen	100	
3.25.005.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		4.782.360.000	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	5 Kelompok	4.562.563.756	95,4	4 Kelompok	80	
3.25.006	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		3.157.139.247			3.155.775.717	99,96			
3.25.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		46.200.000			46.200.000	100			
3.25.006.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		46.200.000	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	46.200.000	100	1 Dokumen	100	
3.25.006.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		2.498.225.500			2.496.861.970	99,95			
3.25.006.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		162.000.000			162.000.000	100			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.25.006.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing		2.336.225.500			2.334.861.970	99,94			
3.25.006.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		612.713.747			612.713.747	100			
3.25.006.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		612.713.747			612.713.747	100			
JUMLAH			42.843.070.797			40.468.130.478	94,46			
3-29.0-00.0-00.01.1000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral		50.338.979.825			47.093.601.428	93,55			
3.29.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		31.043.332.900			28.367.792.364	91,38			
3.29.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		428.391.400			426.073.000	99,46			
3.29.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		112.331.400	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	110.481.000	98,35	1 Dokumen	100	
3.29.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		316.060.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	315.592.000	99,85	2 Dokumen	100	
3.29.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.329.953.000			17.010.955.270	88			
3.29.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		19.329.953.000	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	17.010.955.270	88	14 Bulan	100	
3.29.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.603.666.270			1.596.484.700	99,55			
3.29.001.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN		340.494.500	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	23 Orang	338.739.300	99,48	23 Orang	100	
3.29.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		739.421.770	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	734.045.400	99,27	17 Orang	100	
3.29.001.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		523.750.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	523.700.000	99,99	55 Orang	100	
3.29.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.745.263.500			3.653.714.038	97,56			
3.29.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		115.978.600	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126 Paket	115.944.258	99,97	126 Paket	100	
3.29.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		28.200.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.200.000	100	12 Paket	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.29.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		90.760.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	89.783.800	98,92	12 Paket	100	
3.29.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		39.600.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	22.880.000	57,78	12 Dokumen	100	
3.29.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		239.040.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	238.927.000	99,95	1 Laporan	100	
3.29.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.326.884.900	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.282.610.680	98,1	1 Laporan	100	
3.29.001.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		904.800.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	875.368.300	96,75	1 Dokumen	100	
3.29.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.288.553.130			3.278.218.699	99,69			
3.29.001.1.07.05	Pengadaan Mebel		17.000.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	16.999.650	100	1 Paket	100	
3.29.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.241.553.130	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	122 Unit	1.237.754.685	99,69	122 Unit	100	
3.29.001.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.030.000.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2.023.464.364	99,68	4 Unit	100	
3.29.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		245.296.000			42.636.157	17,38			
3.29.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		245.296.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.636.157	17,38	12 Laporan	100	
3.29.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.402.209.600			2.359.710.500	98,23			
3.29.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		178.309.600	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	144.570.000	81,08	21 Unit	100	
3.29.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		103.900.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	103.823.400	99,93	40 Unit	100	
3.29.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.120.000.000	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	4 Unit	2.111.317.100	99,59	4 Unit	100	
3.29.002	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN		2.095.100.000			2.078.747.753	99,22			
3.29.002.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		1.665.250.000			1.654.927.753	99,38			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.29.002.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		101.000.000	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	99.027.050	98,05	1 Dokumen	100	
3.29.002.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		1.524.250.000	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	1.515.900.703	99,45	3 Dokumen	100	
3.29.002.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		40.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	40.000.000	100	1 Laporan	100	
3.29.002.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		429.850.000			423.820.000	98,6			
3.29.002.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah		57.850.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	57.750.000	99,83	1 Dokumen	100	
3.29.002.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah		222.000.000	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	216.070.000	97,33	1 Laporan	100	
3.29.002.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah		150.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	150.000.000	100	1 Laporan	100	
3.29.003	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		652.420.000			642.270.000	98,44			
3.29.003.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		277.700.000			271.300.000	97,7			
3.29.003.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat		65.200.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	65.200.000	100	1 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.29.003.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		212.500.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2 Laporan	206.100.000	96,99	2 Laporan	100	
3.29.003.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		99.500.000			99.500.000	100			
3.29.003.1.06.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		99.500.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	99.500.000	100	1 Laporan	100	
3.29.003.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		120.720.000			118.070.000	97,8			
3.29.003.1.13.03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		120.720.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2 Laporan	118.070.000	97,8	2 Laporan	100	
3.29.003.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)		83.500.000			82.900.000	99,28			
3.29.003.1.14.02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)		83.500.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	3 Laporan	82.900.000	99,28	3 Laporan	100	
3.29.003.1.16	Penetapan Harga Patokan Batuan		71.000.000			70.500.000	99,3			
3.29.003.1.16.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan		71.000.000	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	3 Dokumen	70.500.000	99,3	3 Dokumen	100	
3.29.005	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		-			-	-			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKANJUT REKOMENDASI DPR	
						KEU		KELUARAN			
						Rp	%	(K)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3.29.005.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun						-				
3.29.005.1.03.03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	2 Laporan		-	Ditakar dari 0 Laporan			
3.29.005.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	2 Laporan		-	0 Laporan			
3.29.006	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		16.548.126.925			16.004.791.311	96,72				
3.29.006.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		166.900.000			166.200.000	99,58				
3.29.006.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		166.900.000	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	166.200.000	99,58	1 Laporan	100		
3.29.006.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		16.381.226.925			15.838.591.311	96,69				
3.29.006.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		901.000.000	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	5 Dokumen	899.858.198	99,87	5 Dokumen	100		
3.29.006.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		916.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	912.750.000	99,65	1 Laporan	100		

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.29.006.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		14.509.026.925	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1201 Unit	13.970.783.113	96,29	1201 Unit	100	
3.29.006.1.06.07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		55.200.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	55.200.000	100	1 Laporan	100	
JUMLAH			50.338.979.825			47.093.601.428	93,55			
4-01.0-00.0-00.01.0000	Sekretariat Daerah		421.302.288.692			341.362.627.515	81,03			
4.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		421.302.288.692			341.362.627.515	81,03			
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		38.715.341.000			34.101.625.000	88,08			
4.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		38.715.341.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	34.101.625.000	88,08	0 Orang/ Bulan	-	
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		22.500.000			-	-			
4.01.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		22.500.000			-	-			
4.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		30.272.564.150			20.510.556.595	67,75			
4.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		382.760.950			315.607.000	82,46			
4.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1.350.013.200			1.347.384.600	99,81			
4.01.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		3.500.040.000			3.448.640.000	98,53			
4.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25.039.750.000			15.398.924.995	61,5			
4.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.274.620.000			7.242.895.924	99,56			
4.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		7.274.620.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	7.242.895.924	99,56	0 Unit	-	
4.01.001.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		17.360.562.722			-	-			
4.01.001.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.218.096.277	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan	-	-	0 Orang/Bulan	-	
4.01.001.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		16.142.466.445	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/ Bulan	-	-	0 Orang/ Bulan	-	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.001.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		300.293.080.820			268.901.359.456	89,55			
4.01.001.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		300.293.080.820	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0 Paket	268.901.359.456	89,55	0 Paket	-	
4.01.001.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		11.282.080.000			1.131.827.000	10,03			
4.01.001.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		11.282.080.000			1.131.827.000	10,03			
4.01.001.1.14	Fasilitasi Keprotokolan		16.081.540.000			9.474.363.540	58,91			
4.01.001.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		16.081.540.000			9.474.363.540	58,91			
	JUMLAH		421.302.288.692			341.362.627.515	81,03			
4-01.0-00.0-00.01.1000	Biro Umum dan Protokol		87.978.280.785			81.447.186.425	92,58			
4.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		63.708.280.785			57.431.692.808	90,15			
4.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		762.736.610			751.885.000	98,58			
4.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Jayapura	313.502.860	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	32 Buku	313.195.950	99,9	0 Buku	-	
4.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Jayapura	449.233.750	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Buku	438.689.050	97,65	0 Buku	-	
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33.538.952.100			29.071.726.807	86,68			
4.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		32.998.952.300	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	28.534.803.717	86,47	250 Tahun	25,00	0
4.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Jayapura	199.999.800	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	198.995.520	99,5	0 Laporan	-	
4.01.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Jayapura	340.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45 Buku	337.927.570	99,39	0 Buku	-	
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.350.500.000			1.291.498.590	95,63			
4.01.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jayapura	895.500.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	330 Stel	894.219.000	99,86	0 Stel	-	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Jayapura	455.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	397.279.590	87,31	0 Orang	-	
4.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		9.758.933.000			9.565.849.559	98,02			
4.01.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		50.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	49.450.500	98,9	0 Paket	-	
4.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura)	596.120.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	594.458.260	99,72	0 Paket	-	
4.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Jayapura	2.200.487.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.173.950.620	98,79	0 Paket	-	
4.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jayapura	2.297.425.500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	2.204.130.796	95,94	0 Paket	-	
4.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jayapura	144.300.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	142.685.600	98,88	0 Dokumen	-	
4.01.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Jayapura	2.883.000.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	275 orang	2.862.070.220	99,27	0 orang	-	
4.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jayapura	1.587.600.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Orang	1.539.103.563	96,95	0 Orang	-	
4.01.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.555.000.000			1.537.000.000	98,84			
4.01.001.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.555.000.000			1.537.000.000	98,84			
4.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10.733.599.300			9.519.122.875	88,69			
4.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		57.526.000			57.479.104	99,92			
4.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		10.676.073.300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	9.461.643.771	88,62	0 Tahun	-	
4.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.508.560.000			5.209.135.972	94,56			
4.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Jayapura	400.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	148 Unit	74.855.000	18,71	0 Unit	-	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Jayapura	1.078.120.000			1.073.030.239	99,53			
4.01.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		200.040.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	196.692.000	98,33	0 Unit	-	
4.01.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Jayapura	3.230.000.000			3.217.019.733	99,6			
4.01.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		600.400.000			647.539.000	107,85			
4.01.001.1.14	Fasilitasi Keprotokolan		499.999.775			485.474.005	97,09			
4.01.001.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Kota Jayapura	499.999.775			485.474.005	97,09			
4.01.007	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		24.270.000.000			24.015.493.617	98,95			
4.01.007.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		24.270.000.000			24.015.493.617	98,95			
4.01.007.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		24.270.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	6 Bulan	24.015.493.617	98,95	0 Bulan	-	
	JUMLAH		87.978.280.785			81.447.186.425	92,58			
4-01.0-00.0-00.01.2000	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa		32.605.495.650			31.854.209.521	97,7			
4.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		21.530.188.300			20.784.605.171	96,54			
4.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		209.000.000			208.991.500	100			
4.01.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		80.000.000	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	79.992.000	99,99	3 Dokumen	100	
4.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		69.000.000	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	68.999.500	100	1 Dokumen	100	
4.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		60.000.000	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	60.000.000	100	1 Laporan	100	
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.519.038.300			9.773.627.422	92,91			
4.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		10.378.038.300	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/ Bulan	9.632.627.422	92,82	73 Orang/ Bulan	100	
4.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		111.000.000	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	111.000.000	100	1 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.001.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		30.000.000	Jumlah dokumen laporan yang disusun	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100	
4.01.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		20.000.000			20.000.000	100			
4.01.001.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		20.000.000	Jumlah dokumen hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	100	1 Dokumen	100	
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		400.000.000			400.000.000	100			
4.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		150.000.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang	150.000.000	100	20 Orang	100	
4.01.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		250.000.000	Jumlah Sosialisasi	1 Kegiatan	250.000.000	100	1 Kegiatan	100	
4.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		6.367.150.000			6.366.986.250	100			
4.01.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		33.100.000	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	33.100.000	100	1 Paket	100	
4.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		204.000.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	1 Paket	204.000.000	100	1 Paket	100	
4.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		520.000.000	Jumlah dokumen kantor yang dicetak dan digandakan	2 Paket	520.000.000	100	2 Paket	100	
4.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		60.000.000	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan yang disediakan	12 Bulan	60.000.000	100	12 Bulan	100	
4.01.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		1.072.000.000	Jumlah paket penyediaan ATK	1 Paket	1.072.000.000	100	1 Paket	100	
4.01.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		1.344.000.000	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	11340 Porsi	1.344.000.000	100	11340 Porsi	100	
4.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.034.050.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	3.034.050.000	100	1 Laporan	100	
4.01.001.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100.000.000	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	99.836.250	99,84	1 Dokumen	100	
4.01.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		594.000.000			594.000.000	100			
4.01.001.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		594.000.000	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Paket	594.000.000	100	2 Paket	100	
4.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.871.000.000			2.870.999.999	100			
4.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		321.000.000	Terlayannya pelaksanaan surat menyurat	12 Bulan	321.000.000	100	12 Bulan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		75.000.000	Tersediaannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	74.999.999	100	12 Bulan	100	
4.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.475.000.000	Tersediaannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	2.475.000.000	100	12 Bulan	100	
4.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		550.000.000			550.000.000	100			
4.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		400.000.000	Tersediaannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	400.000.000	100	12 Bulan	100	
4.01.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		150.000.000	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26 Unit	150.000.000	100	26 Unit	100	
4.01.007	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		11.075.307.350			11.069.604.350	99,95			
4.01.007.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		7.657.107.350			7.657.087.350	100			
4.01.007.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		1.252.457.350	Jumlah laporan hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1.252.457.350	100	1 Laporan	100	
4.01.007.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		5.939.000.000	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	5.938.980.000	100	1 Laporan	100	
4.01.007.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		465.650.000	Jumlah laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	465.650.000	100	1 Laporan	100	
4.01.007.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		2.163.400.000			2.157.717.000	99,74			
4.01.007.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		1.378.400.000	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1.377.717.000	99,95	1 Laporan	100	
4.01.007.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		455.000.000	Jumlah laporan hasil Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	450.000.000	98,9	1 Laporan	100	
4.01.007.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		330.000.000	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	330.000.000	100	1 Laporan	100	
4.01.007.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1.254.800.000			1.254.800.000	100			
4.01.007.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		504.800.000	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	504.800.000	100	1 Laporan	100	
4.01.007.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		400.000.000	Jumlah dokumen hasil Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	400.000.000	100	1 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.007.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		350.000.000	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	350.000.000	100	1 Laporan	100	
JUMLAH			32.605.495.650			31.854.209.521	97,7			
4-01.0-00.0-00.01.3000	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus		30.207.898.610			28.543.408.029	94,49			
4.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		16.988.970.600			15.391.472.354	90,6			
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.491.216.800			8.894.900.534	84,78			
4.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		10.491.216.800	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/ Bulan	8.894.900.534	84,78	0 Orang/ Bulan	-	
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		360.000.000			360.000.000	100			
4.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		360.000.000			360.000.000	100			
4.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.796.145.200			4.796.053.500	100			
4.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		119.170.200			119.128.500	99,96			
4.01.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		2.389.950.000			2.389.900.000	100			
4.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.287.025.000			2.287.025.000	100			
4.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		352.382.600			352.377.320	100			
4.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		352.382.600			352.377.320	100			
4.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		989.226.000			988.141.000	99,89			
4.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		678.466.000			678.466.000	100			
4.01.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		310.760.000			309.675.000	99,65			
4.01.002	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		950.000.167			949.980.700	100			
4.01.002.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		950.000.167			949.980.700	100			
4.01.002.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		300.000.000			299.981.700	99,99			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.002.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		650.000.167			649.999.000	100			
4.01.003	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		7.268.927.843			7.218.613.915	99,31			
4.01.003.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		4.773.658.018			4.723.466.220	98,95			
4.01.003.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		1.200.025.010			1.200.004.520	100			
4.01.003.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		3.172.063.008			3.121.891.700	98,42			
4.01.003.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah		401.570.000			401.570.000	100			
4.01.003.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah		2.495.269.825			2.495.147.695	100			
4.01.003.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		700.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	0 Dokumen	699.949.695	99,99	0 Dokumen	-	
4.01.003.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		1.000.000.000			999.935.000	99,99			
4.01.003.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		795.269.825			795.263.000	100			
4.01.009	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA		5.000.000.000			4.983.341.060	99,67			
4.01.009.3.02	Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus		5.000.000.000			4.983.341.060	99,67			
4.01.009.3.02.01	Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus		750.000.000			749.994.900	100			
4.01.009.3.02.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus		4.250.000.000			4.233.346.160	99,61			
	JUMLAH		30.207.898.610			28.543.408.029	94,49			
4-01.0-00.0-00.01.4000	Biro Hukum		36.428.020.786			28.523.749.330	78,3			
4.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		18.232.908.786			13.597.090.307	74,57			
4.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		158.000.000			113.564.706	71,88			
4.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		158.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	113.564.706	71,88	1 Dokumen	100	
4.01.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-			-	-			
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.768.217.560			4.656.646.705	80,73			
4.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.768.217.560			4.656.646.705	80,73			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.009.000.000			556.410.000	55,14			
4.01.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		324.000.000			323.010.000	99,69			
4.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		685.000.000			233.400.000	34,07			
4.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		8.467.159.010			6.841.881.142	80,8			
4.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		478.240.000			378.177.000	79,08			
4.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		737.537.710	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	675.605.979	91,6	0 Paket	-	
4.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		803.936.300	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	619.565.765	77,07	0 Paket	-	
4.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		60.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen	21.600.000	36	0 Dokumen	-	
4.01.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		764.320.000			761.000.316	99,57			
4.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5.623.125.000			4.385.932.082	78			
4.01.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		504.162.000			467.000.000	92,63			
4.01.001.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		504.162.000			467.000.000	92,63			
4.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.408.500.216			486.961.714	34,57			
4.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		904.400.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	415.486.000	45,94	0 Laporan	-	
4.01.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		504.100.216	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	71.475.714	14,18	0 Laporan	-	
4.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		917.870.000			474.626.040	51,71			
4.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		817.870.000			474.626.040	58,03			
4.01.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100.000.000			-	-			
4.01.005	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		18.195.112.000			14.926.659.023	82,04			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.005.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		11.583.412.000			10.041.178.242	86,69			
4.01.005.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan		4.524.852.000			4.331.921.358	95,74			
4.01.005.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan		1.500.000.000	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	8 Dokumen	1.500.000.000	100	0 Dokumen	-	
4.01.005.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		687.200.000			544.200.000	79,19			
4.01.005.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		4.871.360.000			3.665.056.884	75,24			
4.01.005.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum		6.611.700.000			4.885.480.781	73,89			
4.01.005.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum		6.611.700.000			4.885.480.781	73,89			
	JUMLAH		36.428.020.786			28.523.749.330	78,3			
4-01.0-00.0-00.01.5000	Biro Organisasi		28.285.805.429			23.441.353.058	82,87			
4.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		13.819.039.334			9.325.814.701	67,49			
4.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		28.189.100			28.018.100	99,39			
4.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		12.134.100	Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	12.063.100	99,41	1 Dokumen	100	
				Tersusunnya Dokumen RKA -SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	100	
4.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		16.055.000	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	15.955.000	99,38	4 Dokumen	100	
4.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.287.156.200			4.860.514.652	52,34			
4.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.266.356.200	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/Bulan	4.849.714.652	52,34	39 orang/Bulan	100	
4.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		10.000.000	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100	
4.01.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		10.800.000	Tersusunnya Laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulanan/Semestra n SKPD dan laporan koordinasi Peyusunan laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulanan, Semesteran SKPD	12 Dokumen	10.800.000	100	12 Dokumen	100	
4.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		956.700.000			924.150.690	96,6			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		148.200.000	Tersediannya Pakaian Dinas ASN Biro Beserta Atribut Kelengkapannya	39 Stel	148.200.000	100	39 Stel	100	
4.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		808.500.000	ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 40 ASN	775.950.690	95,97	40 40 ASN	100	
4.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.082.744.034			3.077.305.373	99,82			
4.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		138.800.000	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	12 12 paket	138.600.000	99,86	12 12 paket	100	
4.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		771.850.000	Tersediannya Barang Cetak dan Pengadaan yang di Sediakan	15 15 Paket	771.817.424	100	15 15 Paket	100	
4.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		19.800.000	Tersediannya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1 1320 dokumen bacaan	19.800.000	100	1 1320 dokumen bacaan	100	
4.01.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		211.416.484	Tersediannya Paket Bahan/ Material /ATK	1 56 jenis	211.033.386	99,82	1 56 jenis	100	
4.01.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		312.020.000	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 3 paket	312.020.000	100	1 3 paket	100	
4.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.620.000.000	Terselesaikan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 8 Laporan	1.615.282.013	99,71	1 8 Laporan	100	
				Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 59 orang			1 59 orang	100	
4.01.001.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		8.857.550	Terselesaikan Dokumen Penata Usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	8 8 Dokumen	8.752.550	98,81	8 8 Dokumen	100	
4.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		224.500.000			210.666.250	93,84			
4.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		18.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 2 belanja jasa	4.911.750	27,29	1 2 belanja jasa	100	
4.01.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		140.500.000	Selesai Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 3 Laporan	139.754.500	99,47	1 3 Laporan	100	
				Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 4 Jenis			1 4 Jenis	100	
4.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		66.000.000	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 1 sopir	66.000.000	100	1 1 sopir	100	
4.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		239.750.000			225.159.636	93,91			
4.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		239.750.000	Tertib administrasi Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 16 unit	225.159.636	93,91	16 16 unit	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.002	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		14.466.766.095			14.115.538.357	97,57			
4.01.002.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		9.477.976.445			9.277.362.066	97,88			
4.01.002.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		3.000.000.000	Terwujudnya penataan OPD Pemerintah Provinsi Papua	1 1 Dokumen	2.936.547.569	97,88	1 1 Dokumen	100	
				Terwujudnya OPD pemerintah daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	1 1 Dokumen			1 1 Dokumen	100	
4.01.002.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		2.500.000.000	Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota	1 11 Kabupaten dan Kota	2.392.458.020	95,7	1 11 Kabupaten dan Kota	100	
4.01.002.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan		3.977.976.445	Tersusunnya Jumlah OPD yang memiliki data Evaluasi Jabatan	1 100 persen	3.948.356.477	99,26	1 100 persen	100	
				Tersusunnya Jumlah OPD yang memiliki data Matrix Peran Hasil	1 30 persen			1 30 persen	100	
				Tersusunnya PERGUB Analisis Jabatan, Analisis Beban, Kompetensi Jabatan dan Peta Jabatan	1 30 persen			1 30 persen	100	
				Tersusunnya Aplikasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan	1 40 persen			1 40 persen	100	
				Tersusunnya Dokumen Data Formasi Jabatan OPD	1 100 persen			1 100 persen	100	
				Tersusunnya Data Evaluasi Jabatan OPD	1 30 persen			1 30 persen	100	
				Tersusunnya Data Evaluasi Jabatan OPD	1 30 persen			1 30 persen	100	
				Tersusunnya Data Analisis Jabatan OPD	1 30 persen			1 30 persen	100	
				Tersusunnya Data Analisis Jabatan OPD	1 30 persen			1 30 persen	100	
				Tersusunnya Data Standar Kompetensi Jabatan OPD	1 30 persen			1 30 persen	100	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis jabatan , Analisis beban kerja dan Evaluasi jabatan	1 100 persen			1 100 persen	100	
				Tersusunnya Jumlah OPD yang memiliki data Analisis Beban Kerja	1 100 persen			1 100 persen	100	
				Tersusunnya Jumlah OPD yang memiliki data Analisis Jabatan	1 100 persen			1 100 persen	100	
				Tersusunnya Jumlah OPD yang memiliki data Kompetensi Jabatan	1 100 persen			1 100 persen	100	
4.01.002.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		4.988.789.650			4.838.176.291	96,98			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.002.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		726.183.600	Presentase Kab/kota yang melaksanakan Reformasi Birokrasi	1 25%	683.812.200	94,17	1 25%	100	
				Predikat penilaian PMPRB Provinsi Papua	1 Nilai "CC"			1 Nilai "CC"	100	
				Terlaksananya Reformasi Birokrasi pada SKPD Provinsi Papua	1 31 persen			1 31 persen	100	
4.01.002.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		1.381.401.850	Nilai Sakip Provinsi Papua	1 Nilai "B"	1.363.084.350	98,67	1 Nilai "B"	100	
				Tersediannya Dokumen LKJ SKPD Provinsi Papua	1 35 SKPD			1 35 SKPD	100	
				Tersediannya Dokumen LKJ 10 Kabupaten dan 1 Kota	1 11 Kabupaten/Kota			1 11 Kabupaten/Kota	100	
4.01.002.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		302.866.100	Pelaksanaan Budaya Kerja pada SKPD Provinsi Papua	1 20 persen	300.158.851	99,11	1 20 persen	100	
				Dokumen Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja dalam pelaksanaan tugas:	1 1 Dokumen			1 1 Dokumen	100	
				Terefleksinya pelaksanaan budaya kerja bagi ASN dalam pelaksanaan tugas Pemerintah	1 10 persen			1 10 persen	100	
4.01.002.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		1.087.818.600	Tersediannya Dokumen Peta Proses Bisnis SKPD;	1 30 persen	1.072.027.618	98,55	1 30 persen	100	
				Teraplikasinya penggunaan Tata Naskah Dinas di SKPD Provinsi Papua	1 35 SKPD			1 35 SKPD	100	
				Pelaksanaan SOP di SKPD	1 10 persen			1 10 persen	100	
4.01.002.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		1.490.519.500	Pelaksanaan Pelayanan Publik dilingkungan pemerintah Provinsi Papua	1 37 persen	1.419.093.272	95,21	1 37 persen	100	
				Terlaksananya Forum Konsultasi Pelayanan Publik pada UPP	1 3 persen			1 3 persen	100	
				Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat oleh SKPD	1 60 persen			1 60 persen	100	
JUMLAH			28.285.805.429			23.441.353.058	82,87			
4-02.0-00.0-00.01.1000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua		482.553.782.528			465.159.421.363	96,4			
4.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		155.888.376.126			144.373.482.920	92,61			
4.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.140.000.000			1.140.000.000	100			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.140.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.140.000.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		24.547.519.812			23.099.415.961	94,1			
4.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13.484.199.812	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/ Bulan	12.036.095.961	89,26	93 Orang/ Bulan	100	
4.02.001.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		10.384.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10.384.200.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		351.500.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	351.500.000	100	3 Laporan	100	
4.02.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		327.620.000	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	327.620.000	100	3 Laporan	100	
4.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2.224.594.408			2.224.525.172	100			
4.02.001.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		2.224.594.408	Jumlah Orang Dalam Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	38 Orang	2.224.525.172	100	38 Orang	100	
				Jumlah Paket Dalam Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31 Paket			31 Paket	100	
4.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5.131.500.000			5.082.568.161	99,05			
4.02.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		799.500.000	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150 Orang	799.500.000	100	150 Orang	100	
4.02.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3.008.000.000	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108 Orang	2.960.266.526	98,41	108 Orang	100	
4.02.001.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Papua	1.324.000.000	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	1.322.801.635	99,91	100 Orang	100	
4.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		19.151.574.259			18.749.738.031	97,9			
4.02.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		600.054.359	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Laporan	600.054.359	100	1 Laporan	100	
4.02.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		752.000.000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	499.390.000	66,41	1 Laporan	100	
4.02.001.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		595.000.000	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Laporan	450.000.000	75,63	1 Laporan	100	
4.02.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		8.977.019.900	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 Laporan	8.977.019.256	100	3 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1.000.000.000	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3 Dokumen	1.000.000.000	100	3 Dokumen	100	
4.02.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		360.000.000	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Dokumen	360.000.000	100	4 Dokumen	100	
4.02.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		3.467.000.000	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.467.000.000	100	1 Laporan	100	
4.02.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.400.500.000	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	3.396.274.416	99,88	4 laporan	100	
4.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.161.117.000			2.881.871.281	91,17			
4.02.001.1.07.05	Pengadaan Mebel		561.117.000	Tersedianya Pengadaan Mebel	1 Laporan	561.080.000	99,99	1 Laporan	100	
4.02.001.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		2.600.000.000	Tersedianya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1 Laporan	2.320.791.281	89,26	1 Laporan	100	
4.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12.997.156.392			12.719.054.133	97,86			
4.02.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		800.000.000	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	800.000.000	100	1 Laporan	100	
4.02.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3.997.560.000	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3.719.784.985	93,05	3 Laporan	100	
4.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		8.199.596.392	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	8.199.269.148	100	1 Laporan	100	
4.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13.093.300.000			13.042.590.148	99,61			
4.02.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.414.820.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Laporan	1.412.166.600	99,81	1 Laporan	100	
4.02.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.613.400.000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Laporan	1.613.399.848	100	1 Laporan	100	
4.02.001.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		700.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3 Laporan	670.039.000	95,72	3 Laporan	100	
4.02.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		9.365.080.000	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Laporan	9.346.984.700	99,81	3 Laporan	100	
4.02.001.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		74.441.614.255			65.433.720.033	87,9			
4.02.001.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		73.751.614.255	Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	1 Laporan	64.753.720.033	87,8	1 Laporan	100	
4.02.001.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		-			-	-			
4.02.001.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		690.000.000	Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	69 Laporan	680.000.000	98,55	69 Laporan	100	
4.02.002	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		211.186.646.402			205.674.178.443	97,39			
4.02.002.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		3.514.020.000			3.307.679.100	94,13			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.002.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		2.362.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	2.361.285.300	99,97	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda		1.000.700.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	795.073.800	79,45	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		151.320.000	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	151.320.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		527.650.500			527.650.500	100			
4.02.002.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS		104.250.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	104.250.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		100.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	100.200.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.02.03	Pembahasan APBD		100.000.500	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	100.000.500	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD		100.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	100.500.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		122.700.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	122.700.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		4.908.500.000			4.908.499.500	100			
4.02.002.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		780.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	780.000.000	100	12 Laporan	100	
4.02.002.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		842.400.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	842.400.000	100	12 Laporan	100	
4.02.002.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		780.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	13 Laporan	779.999.500	100	13 Laporan	100	
4.02.002.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		780.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	780.000.000	100	12 Laporan	100	
4.02.002.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		651.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	651.200.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran		722.400.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	722.400.000	100	12 Dokumen	100	
4.02.002.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		352.500.000	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	352.500.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		16.003.240.000			15.015.829.315	93,83			
4.02.002.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD		7.782.440.000	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	6.795.229.315	87,31	1 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.002.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		1.475.000.000	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	1.474.800.000	99,99	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		1.560.000.000	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	13 Orang	1.560.000.000	100	13 Orang	100	
4.02.002.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		4.882.800.000	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	30 Orang	4.882.800.000	100	30 Orang	100	
4.02.002.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		303.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	303.000.000	100	5 Dokumen	100	
4.02.002.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		72.663.089.000			72.189.201.317	99,35			
4.02.002.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		2.982.589.000	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	2.982.589.000	100	1 Laporan	100	
4.02.002.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		52.000.000	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Yang Disusun	0 Dokumen	-	-	0 Dokumen	-	
4.02.002.1.05.03	Pelaksanaan Reses		69.628.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	69 Dokumen	69.206.612.317	99,39	69 Dokumen	100	
4.02.002.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		361.200.000			361.200.000	100			
4.02.002.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD		361.200.000	Jumlah Kode Etik Dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	361.200.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD		113.208.946.902			109.364.118.711	96,6			
4.02.002.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		33.010.266.902	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	29.165.438.711	88,35	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		4.003.400.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	4.003.400.000	100	1 Dokumen	100	
4.02.002.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		70.185.680.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dokumen	70.185.680.000	100	4 Dokumen	100	
4.02.002.1.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		6.009.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	14 Dokumen	6.009.600.000	100	14 Dokumen	100	
4.02.003	PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA		115.478.760.000			115.111.760.000	99,68			
4.02.003.3.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		115.478.760.000			115.111.760.000	99,68			
4.02.003.3.01.01	Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama		64.081.360.000	Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	69 Dokumen	63.714.360.000	99,43	69 Dokumen	100	
4.02.003.3.01.02	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus		44.390.400.000	Jumlah Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	69 Dokumen	44.390.400.000	100	69 Dokumen	100	
4.02.003.3.01.03	Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua		7.007.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	12 Dokumen	7.007.000.000	100	12 Dokumen	100	
4.02.003.3.01.04	Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Provinsi Papua	-			-	-			
	JUMLAH		482.553.782.528			465.159.421.363	96,4			
4-02.0-00.0-00.02.1000	Sekretariat Majelis Rakyat Papua		54.818.851.560			53.025.964.052	96,73			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		13.527.700.170			11.752.498.006	86,88			
4.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		199.840.000			199.840.000	100			
4.02.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		49.960.000			49.960.000	100			
4.02.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		49.960.000			49.960.000	100			
4.02.001.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		49.960.000			49.960.000	100			
4.02.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		49.960.000			49.960.000	100			
4.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.028.164.750			6.151.241.269	87,52			
4.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.028.164.750	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang	6.151.241.269	87,52	56 orang	100	
4.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.660.800.000			1.211.182.768	72,93			
4.02.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		500.000.000			497.925.000	99,58			
4.02.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.160.800.000			713.257.768	61,45			
4.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.638.895.420			4.190.233.969	90,33			
4.02.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		575.000.000	Jumlah Koordinasi dan tersedia air untuk kebutuhan Kantor dan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Tahun	220.322.489	38,32	0 Tahun	-	
4.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4.063.895.420	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor	0 orang	3.969.911.480	97,69	0 orang	-	
9.02.001			-			-	-			
9.02.001.1.02			-			-	-			
9.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Papua	-			-	-			
9.02.001.1.08			-			-	-			
9.02.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Papua	-			-	-			
9.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Papua	-			-	-			
9.02.002	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA		41.291.151.390			41.273.466.046	99,96			
9.02.002.3.02	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban		41.291.151.390			41.273.466.046	99,96			
9.02.002.3.02.01	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota		41.291.151.390			41.273.466.046	99,96			
	JUMLAH		54.818.851.560			53.025.964.052	96,73			
5-01.5-05.1-03.01.1000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		100.401.790.539			81.031.929.008	80,71			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		3.499.999.860			2.925.400.514	83,58			
1.03.012.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		3.499.999.860			2.925.400.514	83,58			
1.03.012.1.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi		3.499.999.860	Jumlah RANPERDA RTRWP Papua yang mendapatkan Persetujuan Substansi dan Evaluasi serta Luas Kawasan Hutan yang diusulkan untuk	2 Dokumen	2.925.400.514	83,58	2 Dokumen	100	
5.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		51.076.467.277			32.788.309.397	64,19			
5.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.080.875.000			1.075.334.715	99,49			
5.01.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	99.390.270	99,39	2 Dokumen	100	
5.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		50.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	49.050.000	98,1	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		45.875.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	45.871.100	99,99	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		50.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	49.900.000	99,8	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		50.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	49.845.000	99,69	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		107.500.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	107.363.000	99,87	2 Dokumen	100	
5.01.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		677.500.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	673.915.345	99,47	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		40.925.383.047			22.753.104.571	55,6			
5.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		40.239.833.047	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 orang/bulan	22.067.745.451	54,84	180 orang/bulan	100	
5.01.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		155.550.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	155.464.420	99,94	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		130.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	129.894.700	99,92	1 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100.000.000	100	1 Laporan	100	
5.01.001.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000	100	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		100.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	100.000.000	100	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100.000.000	100	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		591.506.800			581.436.402	98,3			
5.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		400.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	389.931.402	97,48	8 Orang	100	
5.01.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		191.506.800	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	191.505.000	100	100 Orang	100	
5.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		6.174.374.630			6.155.235.614	99,69			
5.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Papua	351.074.630	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	343.509.630	97,85	17 Paket	100	
5.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		620.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	619.941.950	99,99	1 Paket	100	
5.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		700.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	698.912.300	99,84	1 Paket	100	
5.01.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.000.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	999.735.333	99,97	1 Laporan	100	
5.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.755.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.753.652.281	99,95	1 Laporan	100	
5.01.001.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		748.300.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	739.484.120	98,82	1 Dokumen	100	
5.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.189.496.400			1.153.463.000	96,97			
5.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		73.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	73.200.000	100	1 Laporan	100	
5.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		102.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	66.000.000	64,71	1 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.014.296.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.014.263.000	100	1 Laporan	100	
5.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.114.831.400			1.069.735.095	95,95			
5.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		114.831.400	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	113.097.000	98,49	10 Unit	100	
5.01.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Papua	1.000.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	956.638.095	95,66	18 Unit	100	
5.01.002	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		18.250.869.273			17.911.492.628	98,14			
5.01.002.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		7.886.636.582			7.817.430.494	99,12			
5.01.002.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		1.002.000.000	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	996.402.013	99,44	1 Dokumen	100	
5.01.002.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		527.101.582	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	525.680.220	99,73	1 Berita Acara	100	
5.01.002.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		140.800.000	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	35 Berita Acara	140.709.965	99,94	35 Berita Acara	100	
5.01.002.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		4.344.360.000	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	9 Berita Acara	4.299.234.696	98,96	9 Berita Acara	100	
5.01.002.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		1.872.375.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	1.855.403.600	99,09	3 Dokumen	100	
5.01.002.1.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		3.399.799.596			3.389.990.619	99,71			
5.01.002.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		1.537.866.566	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1.529.940.142	99,48	1 Dokumen	100	
5.01.002.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		712.819.910	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	23 Orang	711.671.250	99,84	23 Orang	100	
5.01.002.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		1.149.113.120	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	23 Orang	1.148.379.227	99,94	23 Orang	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.01.002.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		6.964.433.095			6.704.071.515	96,26			
5.01.002.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		3.394.347.040	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	3.320.835.025	97,83	4 Laporan	100	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan			2 Laporan	100	
5.01.002.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah		499.990.000	Jumlah Dokumen Laporan	2 Dokumen	487.331.970	97,47	2 Dokumen	100	
5.01.002.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		2.570.166.055	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	22 Dokumen	2.398.530.410	93,32	22 Dokumen	100	
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan			4 Laporan	100	
5.01.002.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		499.930.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	9 Dokumen	497.374.110	99,49	9 Dokumen	100	
5.01.003	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		24.074.454.129			23.926.398.348	99,38			
5.01.003.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		10.299.999.500			10.264.572.257	99,66			
5.01.003.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		4.500.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	4.499.969.352	100	3 Dokumen	100	
5.01.003.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		3.999.999.700	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	3.965.046.527	99,13	1 Laporan	100	
5.01.003.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		500.000.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	499.942.580	99,99	1 Laporan	100	
5.01.003.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		500.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	499.973.460	99,99	3 Dokumen	100	
5.01.003.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		299.999.800	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	299.936.390	99,98	1 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.01.003.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		500.000.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	499.703.948	99,94	1 Laporan	100	
5.01.003.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		4.199.764.572			4.141.565.027	98,61			
5.01.003.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		460.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	458.759.800	99,73	3 Dokumen	100	
5.01.003.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1.074.795.607	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1.074.210.660	99,95	1 Laporan	100	
5.01.003.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan		500.000.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	446.242.660	89,25	1 Laporan	100	
5.01.003.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		639.969.065	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	639.860.613	99,98	1 Laporan	100	
5.01.003.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		425.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	424.654.090	99,92	3 Dokumen	100	
5.01.003.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		350.000.000	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	349.817.934	99,95	1 Laporan	100	
5.01.003.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		250.000.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	248.179.990	99,27	1 Laporan	100	
5.01.003.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		499.999.900	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	499.839.280	99,97	1 Laporan	100	
5.01.003.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		9.574.690.057			9.520.261.064	99,43			
5.01.003.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		804.990.675	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	804.630.060	99,96	3 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.01.003.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1.339.996.640	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.339.827.545	99,99	1 Laporan	100	
5.01.003.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		999.999.325	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	999.970.901	100	1 Laporan	100	
5.01.003.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		1.129.899.515	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.129.578.581	99,97	1 Laporan	100	
5.01.003.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		899.804.830	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	850.860.224	94,56	3 Dokumen	100	
5.01.003.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		299.999.735	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	299.272.750	99,76	1 Laporan	100	
5.01.003.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		599.999.537	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	599.725.116	99,95	1 Laporan	100	
5.01.003.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		3.499.999.800	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	3.496.395.887	99,9	1 Laporan	100	
5.05.002	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		3.500.000.000			3.480.328.121	99,44			
5.05.002.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		900.000.000			898.395.957	99,82			
5.05.002.1.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		900.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	898.395.957	99,82	1 Laporan	100	
5.05.002.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		950.000.000			949.776.004	99,98			
5.05.002.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Provinsi Papua	250.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	249.984.840	99,99	1 Dokumen	100	
5.05.002.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		700.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	699.791.164	99,97	1 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.05.002.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		700.000.000			682.164.590	97,45			
5.05.002.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		700.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	682.164.590	97,45	1 Dokumen	100	
5.05.002.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		950.000.000			949.991.570	100			
5.05.002.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		950.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	949.991.570	100	1 Laporan	100	
JUMLAH			100.401.790.539			81.031.929.008	80,71			
5-02.0-00.0-00.01.1000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah		1.799.387.734.152			1.541.786.573.413	85,68			
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		93.991.378.581			68.894.219.206	73,3			
5.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.611.160.000			3.238.198.020	89,67			
5.02.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		1.094.800.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.065.607.380	97,33	1 Dokumen	100	
5.02.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		446.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	437.980.000	98,2	1 Dokumen	100	
5.02.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		48.720.000	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100	
5.02.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2.021.640.000	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	5 Laporan	1.734.610.640	85,8	5 Laporan	100	
5.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		43.766.243.100			23.384.314.657	53,43			
5.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		41.760.243.100	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	149 Orang/ Bulan	21.381.367.700	51,2	149 Orang/ Bulan	100	
5.02.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		687.400.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	685.555.297	99,73	1 Laporan	100	
5.02.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		1.318.600.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.317.391.660	99,91	1 Laporan	100	
5.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.249.200.000			1.133.079.767	90,7			
5.02.001.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1.249.200.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.133.079.767	90,7	2 Dokumen	100	
5.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.452.600.000			3.879.193.580	87,12			
5.02.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		4.452.600.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	3.879.193.580	87,12	35 Orang	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		23.826.655.319			23.179.191.900	97,28			
5.02.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		427.427.100			424.020.000	99,2			
5.02.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		941.175.795	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket	936.627.720	99,52	150 Paket	100	
5.02.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4.189.117.300	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	80025 Paket	4.187.776.801	99,97	80025 Paket	100	
5.02.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		237.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	236.980.000	99,99	100 Dokumen	100	
5.02.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		8.116.480.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.099.876.324	99,8	1 Laporan	100	
5.02.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6.545.400.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	6.440.628.145	98,4	1 Laporan	100	
5.02.001.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		3.370.055.124	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.853.282.910	84,67	1 Dokumen	100	
5.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.818.000.000			1.330.000.000	47,2			
5.02.001.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2.818.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Roda 2)	4 Unit	1.330.000.000	47,2	4 Unit	100	
5.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.670.672.798			5.717.956.234	85,72			
5.02.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.929.665.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1600 Laporan	3.419.440.000	87,02	1600 Laporan	100	
5.02.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.712.845.798	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.283.886.654	74,96	1 Laporan	100	
5.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.028.162.000			1.014.629.580	98,68			
5.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.596.847.364			7.032.285.048	92,57			
5.02.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		4.519.636.850	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	88 Unit	4.266.609.429	94,4	88 Unit	100	
5.02.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		658.520.000	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60 Unit	398.428.500	60,5	60 Unit	100	
5.02.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.753.600.000			1.705.117.065	97,24			
5.02.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		665.090.514			662.130.054	99,55			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.02.002	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		1.699.563.483.571			1.467.287.128.090	86,33			
5.02.002.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		24.627.140.000			22.749.624.264	92,38			
5.02.002.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		3.226.000.000	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	3.220.627.050	99,83	1	100	
5.02.002.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		3.295.400.000	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	3.285.751.350	99,71	2 Dokumen	100	
5.02.002.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD		2.466.500.000	Jumlah Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1 Dokumen	2.463.159.080	99,86	1 Dokumen	100	
5.02.002.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		1.756.000.000	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	1.753.315.000	99,85	60 Dokumen	100	
5.02.002.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD		900.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	898.656.000	99,85	60 Dokumen	100	
5.02.002.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		900.000.000	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	898.656.000	99,85	60 Dokumen	100	
5.02.002.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		4.006.800.000	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	60 Dokumen	3.366.766.610	84,03	60 Dokumen	100	
5.02.002.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		3.911.800.000	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	60 Dokumen	3.697.590.610	94,52	60 Dokumen	100	
5.02.002.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		2.208.040.000	Jumlah Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1.536.171.380	69,57	1 Dokumen	100	
5.02.002.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi		1.956.600.000	Jumlah Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	0 Orang	1.628.931.184	83,25	0 Orang	-	
5.02.002.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		5.574.061.000			5.480.788.530	98,33			
5.02.002.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		2.413.686.000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	9 Laporan	2.408.592.430	99,79	9 Laporan	100	
5.02.002.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		1.538.750.000	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	9 Laporan	1.537.368.740	99,91	9 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.02.002.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		1.621.625.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	9 Dokumen	1.534.827.360	94,65	9 Dokumen	100	
5.02.002.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		14.544.457.000			13.478.847.845	92,67			
5.02.002.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		5.000.000.000			4.053.126.529	81,06			
5.02.002.1.03.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		1.040.000.000			1.040.000.000	100			
5.02.002.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		2.441.877.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	2.431.742.950	99,58	1 Dokumen	100	
5.02.002.1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		1.328.630.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1.327.190.781	99,89	1 Dokumen	100	
5.02.002.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		900.000.000	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	820.757.216	91,2	1 Laporan	100	
5.02.002.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		771.550.000	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	751.840.360	97,45	1 Dokumen	100	
5.02.002.1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		862.400.000	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	856.200.000	99,28	1 Dokumen	100	
5.02.002.1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		2.200.000.000			2.197.990.009	99,91			
5.02.002.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		8.371.370.000			8.317.455.596	99,36			
5.02.002.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		700.000.000	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	697.700.000	99,67	1 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.02.002.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		700.000.000	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	676.885.070	96,7	3 Laporan	100	
5.02.002.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		2.908.670.000	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	2.899.234.840	99,68	3 Laporan	100	
5.02.002.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		2.987.800.000	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	5 Dokumen	2.973.785.686	99,53	5 Dokumen	100	
5.02.002.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1.074.900.000	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	1.069.850.000	99,53	5 Dokumen	100	
5.02.002.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1.636.550.255.571			1.407.995.646.039	86,03			
5.02.002.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		1.636.550.255.571	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1.407.995.646.039	86,03	1 Laporan	100	
5.02.002.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		9.896.200.000			9.264.765.816	93,62			
5.02.002.1.06.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi		9.896.200.000	Jumlah Orang yang Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Orang	9.264.765.816	93,62	1 Orang	100	
5.02.003	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		5.832.872.000			5.605.226.117	96,1			
5.02.003.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		5.832.872.000			5.605.226.117	96,1			
5.02.003.1.01.01	Penyusunan Standar Harga		600.100.000	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	580.702.000	96,77	1 Dokumen	100	
5.02.003.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		1.266.800.000	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1.205.088.806	95,13	2 Dokumen	100	
5.02.003.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah		587.792.000	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	569.388.940	96,87	1 Laporan	100	
5.02.003.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		1.694.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.666.379.510	98,36	1 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.02.003.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		1.683.980.000	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.583.666.861	94,04	1 Dokumen	100	
JUMLAH			1.799.387.734.152			1.541.786.573.413	85,68			
5-02.0-00.0-00.02.1000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		99.525.196.305			84.603.547.138	85,01			
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		83.988.852.405			70.389.717.420	83,81			
5.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		365.650.000			346.383.200	94,73			
5.02.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		270.250.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	262.223.200	97,03	1 Dokumen	100	
5.02.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Provinsi Papua	95.400.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	84.160.000	88,22	1 Dokumen	100	
5.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		43.572.834.522			34.007.966.351	78,05			
5.02.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		43.572.834.522	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/Bulan	34.007.966.351	78,05	168 Orang/Bulan	100	
5.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		499.200.000			432.000.000	86,54			
5.02.001.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		499.200.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	432.000.000	86,54	11 Dokumen	91,67	
5.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.454.576.040			2.925.472.462	84,68			
5.02.001.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN		210.300.000	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	8 Orang	64.233.050	30,54	4 Orang	50	
5.02.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3.244.276.040	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	91 Orang	2.861.239.412	88,19	80 Orang	87,91	
5.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		10.884.251.906			10.468.109.934	96,18			
5.02.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		130.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	114.355.512	87,97	10 Paket	90,91	
5.02.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		709.842.500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	699.910.500	98,6	1 Paket	100	
5.02.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1.057.519.106	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	993.095.230	93,91	1 Paket	100	
5.02.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		971.190.300	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	9 Paket	800.204.735	82,39	9 Paket	100	
5.02.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		16.200.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000	61,73	1 Dokumen	100	
5.02.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		450.000.000			370.026.952	82,23			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.02.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		7.549.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.480.517.005	99,09	1 Laporan	100	
5.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		14.150.822.000			12.389.810.913	87,56			
5.02.001.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		216.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	215.200.000	99,63	10 Unit	100	
5.02.001.1.07.05	Pengadaan Mebel		216.000.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	212.916.315	98,57	40 Unit	100	
5.02.001.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		13.718.822.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.961.694.598	87,19	2 Unit	100	
5.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.611.777.437			6.030.015.440	91,2			
5.02.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.315.640.511	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.044.408.409	91,82	1 Laporan	100	
5.02.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.493.108.608	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.335.435.849	89,44	3 Laporan	100	
5.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.803.028.318	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.650.171.182	91,52	1 Laporan	100	
5.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.449.740.500			3.789.959.120	85,17			
5.02.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2.007.895.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	1.790.730.581	89,18	23 Unit	92	
5.02.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		595.050.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	474.519.289	79,74	6 Unit	100	
5.02.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		727.795.500	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	143 Unit	414.242.773	56,92	72 Unit	50,35	
5.02.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.119.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	1.110.466.477	99,24	3 Unit	100	
5.02.004	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		15.536.343.900			14.213.829.718	91,49			
5.02.004.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		15.536.343.900			14.213.829.718	91,49			
5.02.004.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		2.257.860.000	Jumlah laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	2.174.647.387	96,31	9 Laporan	100	
5.02.004.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		341.150.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	338.683.400	99,28	2 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.02.004.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		843.875.000			682.090.200	80,83			
5.02.004.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		3.688.395.000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	3.246.317.164	88,01	3 Laporan	100	
5.02.004.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		4.227.757.600			3.897.914.866	92,2			
5.02.004.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		817.334.400			701.354.903	85,81			
5.02.004.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		796.120.000			775.530.100	97,41			
5.02.004.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		1.616.261.900	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Laporan	1.528.440.178	94,57	8 Laporan	100	
5.02.004.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		947.590.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	868.851.520	91,69	1 Laporan	100	
JUMLAH			99.525.196.305			84.603.547.138	85,01			
5-03.0-00.0-00.01.1000	Badan Kepegawaian Daerah		50.714.241.980			45.993.857.308	90,69			
5.03.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		29.317.396.931			28.052.991.657	95,69			
5.03.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		801.868.831			797.603.565	99,47			
5.03.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		95.590.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 1 Dokumen	95.590.000	100	1 1 Dokumen	100	
5.03.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		84.269.981	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 1 Dokumen	84.269.981	100	1 1 Dokumen	100	
5.03.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		90.629.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 1 Dokumen	90.629.000	100	1 1 Dokumen	100	
5.03.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		80.769.950	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 1 Laporan	80.769.950	100	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		450.609.900	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 1 Laporan	446.344.634	99,05	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.444.032.020			14.580.629.577	94,41			
5.03.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14.729.119.540	Jumlah pegawai BKD Provinsi Papua Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	1 108 Orang/Bulan	13.899.571.223	94,37	1 108 Orang/Bulan	100	
5.03.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		562.327.295	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 1 Dokumen	557.281.079	99,1	1 1 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		77.477.275	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 1 Laporan	77.477.275	100	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		75.107.910	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 1 Laporan	46.300.000	61,64	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		26.761.340			26.761.340	100			
5.03.001.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		26.761.340	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 1 Laporan	26.761.340	100	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.903.504.478			3.867.316.558	99,07			
5.03.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		585.200.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 4 Paket	572.066.250	97,76	1 4 Paket	100	
5.03.001.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1.507.747.063	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 1 Dokumen	1.501.095.481	99,56	1 1 Dokumen	100	
5.03.001.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		225.637.025	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 1 Dokumen	221.721.314	98,26	1 1 Dokumen	100	
5.03.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1.022.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 24 Orang	1.014.794.800	99,3	1 24 Orang	100	
5.03.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		336.449.380	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 100 Orang	335.541.876	99,73	1 100 Orang	100	
5.03.001.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		226.471.010	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 100 Orang	222.096.837	98,07	1 100 Orang	100	
5.03.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		6.256.758.690			6.048.478.274	96,67			
5.03.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		160.761.160	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 2 Paket	159.389.850	99,15	1 2 Paket	100	
5.03.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3.507.453.755	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 1 Paket	3.449.558.000	98,35	1 1 Paket	100	
5.03.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		134.138.775	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 8 Paket	99.930.000	74,5	1 8 Paket	100	
5.03.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		1.051.880.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 1 Laporan	1.017.730.000	96,75	1 1 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.402.525.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 1 Laporan	1.321.870.424	94,25	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		347.944.000			330.500.000	94,99			
5.03.001.1.07.05	Pengadaan Mebel		347.944.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 1 Paket	330.500.000	94,99	1 1 Paket	100	
5.03.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.532.127.572			1.465.368.963	95,64			
5.03.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		39.055.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 1 Laporan	-	-	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		455.657.516	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 12 Laporan	429.019.863	94,15	1 12 Laporan	100	
5.03.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.037.415.056	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 1 Laporan	1.036.349.100	99,9	1 1 Laporan	100	
5.03.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.004.400.000			936.333.380	93,22			
5.03.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		244.400.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 15 Unit	183.786.480	75,2	1 15 Unit	100	
5.03.001.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		760.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 22 Unit	752.546.900	99,02	1 22 Unit	100	
5.03.002	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		21.396.845.049			17.940.865.651	83,85			
5.03.002.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		4.613.252.594			4.415.287.271	95,71			
5.03.002.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		2.184.222.840	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 1 Dokumen	2.183.433.557	99,96	1 1 Dokumen	100	
5.03.002.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		1.267.046.590	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 1 Laporan	1.075.385.644	84,87	1 1 Laporan	100	
5.03.002.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		301.340.400	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 1 Dokumen	301.282.830	99,98	1 1 Dokumen	100	
5.03.002.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		198.587.964	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 2 Lembaga	194.283.610	97,83	1 2 Lembaga	100	
5.03.002.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		194.484.800	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 1 Dokumen	194.484.000	100	1 1 Dokumen	100	
5.03.002.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		273.974.400	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 1 Dokumen	272.874.400	99,6	1 1 Dokumen	100	
5.03.002.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian		193.595.600	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 1 Dokumen	193.543.230	99,97	1 1 Dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.002.1.02	Mutasi dan Promosi ASN		2.972.231.131			2.143.812.333	72,13			
5.03.002.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN		1.610.136.871	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 1 Dokumen	784.158.543	48,7	1 1 Dokumen	100	
5.03.002.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		1.362.094.260	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 1 Laporan	1.359.653.790	99,82	1 1 Laporan	100	
5.03.002.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN		10.440.082.104			8.028.905.873	76,9			
5.03.002.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		7.184.361.870	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 1 Dokumen	5.438.533.471	75,7	1 1 Dokumen	100	
5.03.002.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		745.447.434	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	0 300 Orang	707.353.615	94,89	0 300 Orang	-	
5.03.002.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		276.366.400	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 1 Laporan	273.552.490	98,98	1 1 Laporan	100	
5.03.002.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		357.194.140	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	1 100 Orang	339.953.695	95,17	1 100 Orang	100	
5.03.002.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		1.876.712.260	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	0 1 Dokumen	1.269.512.602	67,65	0 1 Dokumen	-	
5.03.002.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		3.371.279.220			3.352.860.174	99,45			
5.03.002.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		2.484.549.520	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1 80 Orang	2.481.293.040	99,87	1 80 Orang	100	
5.03.002.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		232.361.440	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1 200 Orang	219.725.590	94,56	1 200 Orang	100	
5.03.002.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN		314.905.185	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 70 Orang	313.074.190	99,42	1 70 Orang	100	
5.03.002.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN		339.463.075	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 1 Laporan	338.767.354	99,8	1 1 Laporan	100	
	JUMLAH		50.714.241.980			45.993.857.308	90,69			
5-04.0-00.0-00.01.1000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		67.014.411.130			62.915.115.385	93,88			
5.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		21.421.037.700			18.911.949.297	88,29			
5.04.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		337.400.000			327.400.000	97,04			
5.04.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		337.400.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	327.400.000	97,04	4 Dokumen	100	
5.04.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14.135.088.200			12.164.810.706	86,06			
5.04.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13.178.838.200	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	11.657.810.706	88,46	0 Orang/ Bulan	-	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.04.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		531.250.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	332.000.000	62,49	1 Laporan	100	
5.04.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		425.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	175.000.000	41,18	3 Laporan	100	
5.04.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		600.000.000			599.145.000	99,86			
5.04.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Papua	300.000.000			299.145.000	99,72			
5.04.001.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		300.000.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	300.000.000	100	1 Dokumen	100	
5.04.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.690.550.000			2.388.104.476	88,76			
5.04.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.600.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.600.000	100	1 Paket	100	
5.04.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Papua	700.000.000			678.543.000	96,93			
5.04.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		40.300.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.300.000	100	1 Paket	100	
5.04.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.944.650.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.663.661.476	85,55	1 Laporan	100	
5.04.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.193.900.000			2.037.382.000	92,87			
5.04.001.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.193.900.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.037.382.000	92,87	1 Unit	100	
5.04.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.314.099.500			1.245.590.115	94,79			
5.04.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		844.099.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	775.590.115	91,88	3 Laporan	100	
5.04.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		470.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	470.000.000	100	1 Laporan	100	
5.04.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		150.000.000			149.517.000	99,68			
5.04.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		150.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	149.517.000	99,68	0 Unit	-	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.04.002	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		45.593.373.430			44.003.166.088	96,51			
5.04.002.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		9.412.818.590			9.114.869.485	96,83			
5.04.002.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		7.812.818.590	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	7.812.756.080	100	120 Orang	100	
5.04.002.1.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		1.600.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	1.302.113.405	81,38	1 Dokumen	100	
5.04.002.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		36.180.554.840			34.888.296.603	96,43			
5.04.002.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		1.433.900.000	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	0 Orang	1.184.075.280	82,58	0 Orang	-	
5.04.002.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		1.500.000.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	0 Laporan	1.499.199.170	99,95	0 Laporan	-	
5.04.002.1.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		5.051.222.940	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	0 Dokumen	4.958.655.329	98,17	0 Dokumen	-	
5.04.002.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		27.695.431.900	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Orang	26.835.578.474	96,9	0 Orang	-	
5.04.002.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		500.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Dokumen	410.788.350	82,16	0 Dokumen	-	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5-06.0-00.0-00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama		24.880.301.139			23.735.966.996	95,4			
5.06.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		13.417.244.234			12.748.608.325	95,02			
5.06.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		149.468.710			149.467.310	100			
5.06.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		56.015.200	Jumlah Laporan RENJA	1 Dokumen	56.015.200	100	1 Dokumen	100	
5.06.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		23.557.600	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	23.557.600	100	1 Dokumen	100	
5.06.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		16.728.800	Jumlah Dokumen Perubahan	1 Dokumen	16.728.000	100	1 Dokumen	100	
5.06.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		13.757.600	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	1 Laporan	13.757.000	100	1 Laporan	100	
5.06.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		39.409.510	Jumlah Laporan TP2K	1 Laporan	39.409.510	100	1 Laporan	100	
5.06.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.524.359.434			6.041.759.327	92,6			
5.06.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.477.244.234	Jumlah Pembayaran Gaji	12 bulan	5.994.644.127	92,55	12 bulan	100	
5.06.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		23.557.600	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	23.557.600	100	1 Laporan	100	
5.06.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		23.557.600	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	1 Laporan	23.557.600	100	1 Laporan	100	
5.06.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		346.097.200			345.338.200	99,78			
5.06.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		93.000.000	Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia	120 Stell	92.241.000	99,18	120 Stell	100	
5.06.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		100.000.000	Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	100.000.000	100	0 orang	-	
5.06.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		153.097.200	Jumlah Laporan	1 Laporan	153.097.200	100	1 Laporan	100	
5.06.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.494.790.830			4.314.230.582	95,98			
5.06.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		74.130.430	Jumlah Komponen	10 Jenis	74.130.430	100	10 Jenis	100	
5.06.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.710.500	Jumlah Penyediaan Perlengkapan	1 paket	-	-	0 paket	-	
5.06.001.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		225.966.137	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	30 Jenis	224.164.500	99,2	30 Jenis	100	
5.06.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		268.307.456	Jumlah Bahan Logistik	30 Jenis	266.183.621	99,21	30 Jenis	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.06.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		90.993.750	Jumlah Barang Cetak	30 Jenis	90.925.900	99,93	30 Jenis	100	
5.06.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		88.200.000	Jumlah Bahan Bacaan	7200 Eksemplar	88.200.000	100	7200 Eksemplar	100	
5.06.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		1.042.000.000	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.041.960.000	100	1 Laporan	100	
5.06.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.647.006.157	Jumlah Laporan Rapat	1 Laporan	2.476.189.731	93,55	1 Laporan	100	
5.06.001.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		52.476.400	Jumlah Laporan PPID	1 Laporan	52.476.400	100	1 Laporan	100	
5.06.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		544.763.842			542.845.500	99,65			
5.06.001.1.07.05	Pengadaan Mebel		289.738.600	Jumlah Pengadaan	41 unit	289.488.000	99,91	41 unit	100	
5.06.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		255.025.242	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	21 unit	253.357.500	99,35	21 unit	100	
5.06.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		410.650.000			410.639.237	100			
5.06.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		17.450.000	Jumlah Surat	500 Eksemplar	17.450.000	100	500 Eksemplar	100	
5.06.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		135.200.000	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	135.189.237	99,99	12 Bulan	100	
5.06.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		258.000.000	Jumlah Jasa	84 Orang	258.000.000	100	84 Orang	100	
5.06.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		947.114.218			944.328.169	99,71			
5.06.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		607.457.000	Jumlah Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang yang Dipelihara	16 Unit	606.264.000	99,8	16 Unit	100	
5.06.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		112.440.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 paket	112.440.000	100	40 paket	100	
5.06.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		227.217.218	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	3 unit	225.624.169	99,3	3 unit	100	
				Jumlah Pos Lintas Batas yang terpelihara	1 unit			1 unit	100	
5.06.002	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN		11.463.056.905			10.987.358.671	95,85			
5.06.002.1.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama		3.799.999.786			3.725.302.859	98,03			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.06.002.1.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah		3.799.999.786	Jumlah Laporan BLOM	1 Laporan	3.725.302.859	98,03	1 Laporan	100	
				Jumlah Laporan Border Trade	1 Laporan			1 Laporan	100	
				Jumlah Laporan BLM RI-PNG	1 Laporan			1 Laporan	100	
5.06.002.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan		6.663.057.119			6.364.348.912	95,52			
5.06.002.1.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan		1.472.352.219	Jumlah Laporan Koordinasi Pembangunan Pos Lintas Batas	1 Laporan	1.407.906.567	95,62	1 Laporan	100	
				Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	1 Laporan			1 Laporan	100	
5.06.002.1.02.02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan		2.595.352.450	Jumlah Laporan	1 Laporan	2.482.094.930	95,64	1 Laporan	100	
				Jumlah Laporan Capacity Building	1 Laporan			1 Laporan	100	
5.06.002.1.02.03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara		2.595.352.450	Jumlah Laporan Pembinaan Pelintas Batas	1 Laporan	2.474.347.415	95,34	1 Laporan	100	
				Jumlah Laporan Sosialisasi Aturan Lintas Batas	1 Laporan			1 Laporan	100	
				Jumlah Laporan Joint Verifikation Pelintas Batas	1 Laporan			1 Laporan	100	
5.06.002.1.03	Monitoring dan Evaluasi		1.000.000.000			897.706.900	89,77			
5.06.002.1.03.03	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.000.000.000	Jumlah Laporan Pengawasan	1 Laporan	897.706.900	89,77	1 Laporan	100	
	JUMLAH		24.880.301.139			23.735.966.996	95,4			
5-07.0-00.0-00.01.0000	Badan Penghubung Daerah		18.379.902.529			17.468.414.404	95,04			
5.07.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		15.933.502.529			15.073.825.089	94,6			
5.07.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		170.000.000			170.000.000	100			
5.07.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		35.000.000			35.000.000	100			
5.07.001.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		35.000.000			35.000.000	100			
5.07.001.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		35.000.000			35.000.000	100			
5.07.001.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		35.000.000			35.000.000	100			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.07.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		15.000.000			15.000.000	100			
5.07.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.000.000			15.000.000	100			
5.07.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.836.469.529			3.302.489.541	86,08			
5.07.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.761.469.529			3.227.489.541	85,8			
5.07.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		15.000.000			15.000.000	100			
5.07.001.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		15.000.000			15.000.000	100			
5.07.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		15.000.000			15.000.000	100			
5.07.001.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		15.000.000			15.000.000	100			
5.07.001.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		15.000.000			15.000.000	100			
5.07.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		15.000.000			14.642.000	97,61			
5.07.001.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		15.000.000			14.642.000	97,61			
5.07.001.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		-			-	-			
5.07.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.288.450.000			1.261.215.017	97,89			
5.07.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		406.500.000			406.432.050	99,98			
5.07.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		881.950.000			854.782.967	96,92			
5.07.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		5.850.145.000			5.845.974.351	99,93			
5.07.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		170.000.000			169.686.500	99,82			
5.07.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		412.500.000			412.391.781	99,97			
5.07.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1.470.860.000			1.469.394.523	99,9			
5.07.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		214.785.000			214.252.750	99,75			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.07.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.082.000.000			1.081.537.049	99,96			
5.07.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.500.000.000			2.498.711.748	99,95			
5.07.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.119.720.000			1.088.635.275	97,22			
5.07.001.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Papua	1.119.720.000			1.088.635.275	97,22			
5.07.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.213.938.000			1.015.585.193	83,66			
5.07.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		42.350.000			25.268.500	59,67			
5.07.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		330.288.000			152.216.693	46,09			
5.07.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		32.500.000			32.500.000	100			
5.07.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		808.800.000			805.600.000	99,6			
5.07.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.319.780.000			2.255.503.712	97,23			
5.07.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		506.880.000			502.587.593	99,15			
5.07.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		405.600.000			352.112.225	86,81			
5.07.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		432.300.000			426.787.350	98,72			
5.07.001.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		575.000.000			574.747.050	99,96			
5.07.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		400.000.000			399.269.494	99,82			
5.07.001.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-			-	-			
5.07.001.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-			-	-			
5.07.001.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		-			-	-			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.07.001.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan		-			-	-			
5.07.001.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Provinsi Papua	-			-	-			
5.07.001.1.14	Fasilitasi Keprotokolan		120.000.000			119.780.000	99,82			
5.07.001.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		120.000.000			119.780.000	99,82			
5.07.002	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		2.446.400.000			2.394.589.315	97,88			
5.07.002.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		2.446.400.000			2.394.589.315	97,88			
5.07.002.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat		222.400.000			219.829.336	98,84			
5.07.002.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat		452.500.000			426.999.234	94,36			
5.07.002.1.01.03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		479.750.000			461.570.075	96,21			
5.07.002.1.01.04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		1.291.750.000			1.286.190.670	99,57			
	JUMLAH		18.379.902.529			17.468.414.404	95,04			
6-01.0-00.0-00.01.1000	Inspektorat		66.841.931.213			59.170.294.465	88,52			
6.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		31.194.833.213			28.768.149.157	92,22			
6.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.341.931.213			17.744.817.484	91,74			
6.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		19.341.931.213	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/ Bulan	17.744.817.484	91,74	92 Orang/ Bulan	100	
6.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.820.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	4.638.364.606	96,23	1 Paket	100	
6.01.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		276.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	266.800.000	96,67	1 Paket	100	
6.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		4.544.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	92 Orang	4.371.564.606	96,21	92 Orang	100	
6.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.135.406.600			4.094.854.704	99,02			
6.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		536.550.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	525.335.000	97,91	21 Paket	100	
6.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		502.400.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	502.400.000	100	1 Paket	100	
6.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		586.066.600	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	583.955.138	99,64	2 Paket	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		42.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	38.650.000	92,02	2 Dokumen	100	
6.01.001.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		521.640.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	521.247.326	99,92	1 Laporan	100	
6.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.946.750.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.923.267.240	98,79	1 Laporan	100	
6.01.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.052.700.000			1.052.550.000	99,99			
6.01.001.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.052.700.000	Unit	6 6	1.052.550.000	99,99	6 6	100	
6.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.175.515.400			639.797.608	54,43			
6.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10.725.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.664.960	99,44	1 Laporan	100	
6.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		203.990.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	136.052.648	66,7	1 Laporan	100	
6.01.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		960.800.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	493.080.000	51,32	3 Laporan	75	
6.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		669.280.000			597.764.755	89,31			
6.01.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		98.500.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	84.878.022	86,17	9 Unit	100	
6.01.001.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		440.880.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	382.986.733	86,87	30 Unit	100	
6.01.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		129.900.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	129.900.000	100	2 Unit	100	
6.01.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		24.068.468.000			20.969.857.177	87,13			
6.01.002.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		20.381.818.000			18.834.487.367	92,41			
6.01.002.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		5.707.850.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	5.554.982.250	97,32	9 Laporan	100	
6.01.002.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		3.403.450.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan	3.390.712.419	99,63	6 Laporan	100	
6.01.002.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja		88.750.000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	52.950.000	59,66	1 Laporan	100	
6.01.002.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan		4.343.650.000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan	4.053.377.354	93,32	12 Laporan	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.01.002.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		1.495.450.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	2 Laporan	1.231.414.694	82,34	2 Laporan	100	
6.01.002.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal		969.040.000	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	941.010.520	97,11	3 Kesepakatan	100	
6.01.002.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		4.373.628.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen	3.610.040.130	82,54	7 Dokumen	87,5	
6.01.002.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		3.686.650.000			2.135.369.810	57,92			
6.01.002.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		465.600.000	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	267.035.000	57,35	2 Laporan	66,67	
6.01.002.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		3.221.050.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	1.868.334.810	58	5 Laporan	71,43	
6.01.003	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		11.578.630.000			9.432.288.131	81,46			
6.01.003.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		446.500.000			-	-			
6.01.003.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		446.500.000	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	-	-	0 Rekomendasi	-	
6.01.003.1.02	Pendampingan dan Asistensi		11.132.130.000			9.432.288.131	84,73			
6.01.003.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		1.277.130.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	20 Perangkat Daerah	918.414.393	71,91	17 Perangkat Daerah	85	
6.01.003.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		809.980.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 Perangkat Daerah	576.185.500	71,14	34 Perangkat Daerah	100	
6.01.003.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		9.045.020.000	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	7.937.688.238	87,76	7 Kegiatan	87,5	
6.01.003.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		-	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0 Perangkat Daerah	-	-	0 Perangkat Daerah	-	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34 Perangkat Daerah			0 Perangkat Daerah	-	
	JUMLAH		66.841.931.213			59.170.294.465	88,52			

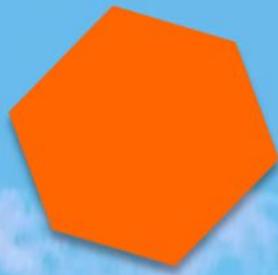
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8-01.0-00.0-00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		39.352.794.485			32.419.498.331	82,38			
8.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		15.836.901.700			13.102.856.209	82,74			
8.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		104.947.109			90.952.000	86,66			
8.01.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		34.100.255	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	33.270.000	97,57	1 Dokumen	100	
8.01.001.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		31.757.444	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	30.487.000	96	2 Dokumen	100	
8.01.001.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		39.089.410	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	27.195.000	69,57	2 Laporan	100	
8.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.867.767.508			5.990.315.428	87,22			
8.01.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.844.741.700	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	5.967.293.620	87,18	48 Orang/ Bulan	92,31	
8.01.001.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		23.025.808	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	23.021.808	99,98	2 Laporan	100	
8.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.500.780.465			1.653.637.854	66,12			
8.01.001.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		227.500.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket	227.500.000	100	56 Paket	100	
8.01.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		120.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	-	-	0 Orang	-	
8.01.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		440.751.095	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	413.408.384	93,8	95 Orang	95	
8.01.001.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1.712.529.370	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	1.012.729.470	59,14	125 Orang	83,33	
8.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		5.187.408.618			4.912.244.166	94,7			
8.01.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15.926.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	115 Buah	15.800.500	99,21	115 Buah	100	
8.01.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		374.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Unit	364.080.000	97,35	16 Unit	100	
8.01.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		257.870.350	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Jenis	257.862.403	100	20 Jenis	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.01.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		307.200.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Buku	307.200.000	100	500 Buku	100	
8.01.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		132.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Tabloid	132.000.000	100	2 Tabloid	100	
8.01.001.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		59.511.368	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Jenis	56.981.900	95,75	20 Jenis	100	
8.01.001.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		360.000.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Laporan	360.000.000	100	100 Laporan	100	
8.01.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.650.900.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	3.388.319.363	92,81	78 Laporan	97,5	
8.01.001.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		30.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000	100	1 Dokumen	100	
8.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		271.020.000			140.410.000	51,81			
8.01.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		17.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Surat	15.750.000	92,65	1000 Surat	100	
8.01.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		129.120.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	-	-	0 Laporan	-	
8.01.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		124.900.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	124.660.000	99,81	1 Laporan	100	
8.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		904.978.000			315.296.761	34,84			
8.01.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		904.978.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	315.296.761	34,84	12 Unit	85,71	
8.01.002	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		2.190.353.610			1.543.229.772	70,46			
8.01.002.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2.190.353.610			1.543.229.772	70,46			
8.01.002.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1.104.347.080	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan	560 Orang	741.406.810	67,14	420 Orang	75	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLAK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.01.002.1.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1.086.006.530	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	801.822.962	73,83	1 Dokumen	100	
8.01.003	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		16.902.184.399			14.944.313.153	88,42			
8.01.003.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		16.902.184.399			14.944.313.153	88,42			
8.01.003.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		999.950.444	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang	5 dokumen laporan	999.307.000	99,94	5 dokumen laporan	100	
8.01.003.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		299.536.530	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	292.129.500	97,53	1 dokumen	100	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.01.003.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		15.602.697.425	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	450 Orang	13.652.876.653	87,5	450 Orang	100	
8.01.004	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		781.455.498			398.377.342	50,98			
8.01.004.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		781.455.498			398.377.342	50,98			
8.01.004.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		781.455.498	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	180 Orang	398.377.342	50,98	135 Orang	75	
8.01.005	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA		1.287.396.694			968.167.425	75,2			
8.01.005.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		1.287.396.694			968.167.425	75,2			
8.01.005.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1.287.396.694	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160 Orang	968.167.425	75,2	120 Orang	75	
8.01.006	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		2.354.502.584			1.462.554.430	62,12			
8.01.006.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		2.354.502.584			1.462.554.430	62,12			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DPA	TOLOK UKUR KELUARAN	TARGET KINERJA KELUARAN	REALISASI				TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPR
						KEU		KELUARAN		
						Rp	%	(K)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.01.006.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1.376.159.545	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Ora Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	1.064.764.050	77,37	113 Orang	75,33	
8.01.006.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		978.343.039	jumlah peserta sosialisasi FGD penyusunan peta rawan konflik, FGD Mitigasi Daerah Rawan Konflik dan FGD Rapat Kordinasi Pengawasan Orang asing	150 orang	397.790.380	40,66	113 orang	75,33	
	JUMLAH		39.352.794.485			32.419.498.331	82,38			





RKPD

PROVINSI PAPUA
2025





RKPD

PROVINSI PAPUA
2025

